RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya, sehingga dapat menyusun ***"RENCANA KERJA PERUBAHAN"*** Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 02 September 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung Barat

Drs. H. HENDRA TRISMAYADI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP.197109251991011002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil	8
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Adminduk	9
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
	3.1. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi	12
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	15
	3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
BAB VI	PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dinas, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2024.

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara telah terjadi perubahan besar dalam tata hubungan antar manusia. Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap perubahan hubungan dan prilaku manusia baik dalam konteks pribadi ataupun kelompok baik dalam kapasitas personal, masyarakat dan warga negara.

Keadaan ini mendorong Pemerintah mengeluarkan Regulasi dalam bidang kependudukan yaitu dengan telah terbitnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan semangat Otonomi Daerah yang dinaungi dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2000 serta diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang

baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (***good governance***) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu sebagai aplikasinya perlu dibuat rencana kerja dan kegiatan tahunan.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, harus dipahami bahwa semua tindakan atas kebijakan, diimplementasikan dan diorientasikan untuk "***Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui penertiban administrasi kependudukan dan catatan sipil.***". Hal ini sinergis dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026 ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" dan "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah"***.

Upaya untuk mendorong mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah menyusun suatu Rencana Kegiatan Tahunan 2024, dimana isinya merupakan rangkaian kegiatan yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemantauan kinerja.

Di dalam rencana kegiatan ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang, sehingga dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, baik dari unsur pimpinan maupun staf, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sebagai orientasi atas tindakan dan prilaku organisasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Provinsi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Presiden Republik Indonesia;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Presiden Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.
20. Peraturan Bupati Bandung Barat No. 38 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Rencana Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018–2023;
22. Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kegiatan Tahunan merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas dalam rangka pencapaian tujuan. Rencana Kegiatan Tahunan ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kegiatannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan adalah :

1. Merumuskan target indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai penjabaran Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026;
2. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
3. Sebagai penjabaran Rencana Strategi Dinas sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
4. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan disdukcapil dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Disdukcapil, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut.

Terlebih lagi peran penyediaan dana APBD untuk menunjang program-program dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat sesuai yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 – 2026. Berdasarkan Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISDUKCAPIL

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN SASARAN		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penduduk Memiliki KTP-EL	94	98,7	105
Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	86	99,7	115,9
Persentase Anak Ber KIA	30	25,8	86
Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran	38	39,95	105
Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun	98	90,39	92
Persentase Penerbitan Akta Kematian	35	100	285
Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	35	57,8	165
Profil Kependudukan yang Terselesaikan	1	1	100

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sebagaimana disampaikan renstra disdukcapil, dapat diidentifikasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan:

a. *Keterbatasan sumber daya manusia,* secara kuantitas jumlah SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat belum memadai karena sebagian besar masih berstatus tenaga kontrak dan tenaga sukarela. Lebih dari itu secara kualitas kemampuan (skill) yang dimiliki masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknologi informasi, manajemen dan pemahaman yuridis. Sehingga untuk mengimplementasikan organisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK belum dapat optimal.

b. *Keterbatasan dana operasional,* alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih terbatas.

c. *Lemahnya koordinasi,* penyelenggaraan pelayanan belum dilaksanakan secara optimal berkaitan dengan lemahnya koordiasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan, Desa, Institusi Pengadilan dan Kementrian Agama serta instasi terkait lainnya.

d. *Keterbatasan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan,*penyelenggaraan pelayanan belum secara optimal menggunakan teknologi informasi komunikasi.

e. *Belum optimalnya partisipasi masyarakat*, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil belum optimal.

f. *Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (SAK) belum tertib dan tertata,* pada semua tatanan baik Dinas, Kecamatan, Desa, terutama pada tingkat RT/RW maupun masyarakat sendiri, proses pencatatan admisnistrasi kependudukan belum terselenggara secara optimal, sehingga identitas data penduduk cenderung beragam pada setiap dinas terkait.

g. *Organisasi penyelenggara pelayanan belum optimal,* di tingkat kecamatan belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan "tersentralisasi" di tingkat Dinas. Lebih dari itu, SOP yang telah dirumuskan belum diimplementasikan secara utuh. Sehingga, penyelenggaraan administrasi kependudukan belum maksimal baik di tingkat desa, kecamatan maupun dinas.

h. *Belum proporsionalnya kualitas data dan informasi kependudukan,* dengan belum maksimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berdampak kualitas data dan informasi kependudukan belum proporsional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat mendukung terhadap :

Tujuan 4	:	***MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK***
Sasaran 4.1	:	***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah***
Indikator Sasaran	:	***Nilai SAKIP***
Tujuan 4	:	***MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK***
Sasaran 4.5	:	***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***
Indikator Sasaran	:	- ***Indeks Kepuasan Masyaratak (IKM)***

Sesuai dengan tupoksi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keterkaitan antara tupoksi dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. *Keterkaitan tupoksi dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah :*

   Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tujuan ke 4 yaitu : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik***.

2. *Keterkaitan tupoksi dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah :*

   Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan sasaran ke – 4.1 dan 4.5 dari tujuan ke-4 yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

3. *Keterkaitan tupoksi dengan indikator sasaran Rencana Pembangunan Daerah :*

   Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan Indikator Sasaran dari sasaran ke- 4.1 dan 4.5 yaitu **Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil secara fundamental pada Tanggal 26 November 2013 DPR RI telah mengesahkan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, yang selanjutnya ditetapkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan oleh Presiden RI dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013.

Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada msyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Secara substansi perubahan yang mendasar dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, dimaksud meliputi :

a. ***Masa Berlaku KTP – el (KTP elektronik);***

1) Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP.
2) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UU Nomor 24 Tahun 2013 ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

b. ***Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri;***

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, diantaranya : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

c. ***Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el;***

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014.

d. ***Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya Melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun;***

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 30 April 2013.

e. ***Penerbitan Akta Pencatatan Sipil;***

Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

f. ***Pengakuan dan Pengesahan Anak;***

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.

g. ***Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis);***

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).

h. ***Pencatatan Kematian;***

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

i. ***Stelsel Aktif;***

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

j. ***Petugas Registrasi;***

1) Petugas Registrasi yang dulunya harus PNS, diubah diutamakan PNS.
2) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

k. ***Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan;***

1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Propinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.
2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.
3) Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

*l. **Pendanaan;***

1) Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dibebankan dalam APBN melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014. Dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P Tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.
2) Pendanaan selain untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan tetap dianggarkan oleh APBD.

m. Penambahan Sanksi

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 (satu) milyar.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				2024
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	BB/74,50
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
				2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Disdukcapil	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki KTP-El	94%
			Persentase IKD (Identitas Kependudukan Digital)	10%
			Persentase Anak yang memiliki KIA	26%
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kematian	50%
			Persentase Penduduk ber Akta kelahiran 0 – 18 Tahun	90%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	50%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan yang terselesaikan	1
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Disdukcapil	74,50/BB

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana Kerja Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang direncanakan untuk Periode Perubahan Anggaran Tahun 2024 beserta dapat dilihat pada **Lampiran III.1**.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ini disusun sebagai bahan pelaksanaan pembangunan tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta bahan rujukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan bahan penyusunan Laporan Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai alat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program-program inilah yang kemudian masuk dalam tahap transisi dari pelaksanaan menuju data kependudukan yang Valid. Adapun langkah-langkah kebijakan yang sangat strategis yang perlu dilakukan, antara lain :

1) Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pelayanan publik. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempuh strategi bidang kependudukan yang didasarkan pada perumusan kebijakan kependudukan yang diarahkan untuk pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas sesuai hasil pengolahan administrasi dan informasi kependudukan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan kependudukan. Karena itu kedepan hendaknya diupayakan pemahaman secara komprehensif berbagai fenomena kependudukan dan dinamikanya di dalam proses pembangunan. Perumusan kebijakan kependudukan tentunya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan faktor kependudukan.
2) Membangun SIAK yang efisien dan terancang untuk mengakomodasi hak-hak penduduk serta perlindungan penduduk. Upaya pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini merupakan kebutuhan yang sudah sangat mendesak terutama untuk memenuhi hak penduduk dan perlindungan social melalui penyelengaraan pelayanan yang transparan, tertib, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan landasan hukum untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih komprehensif.

3) Menciptakan SIAK melalui komitmen dan kerja sama dengan berbagai pihak serta dukungan dari instansi pemerintah, swasta, dan institusi masyarakat. Untuk membangun SIAK ini diperlukan komitmen dan kerja sama antara instansi terkait disemua tingkatan dalam kerangka membangun basis data, yang berasal dari berbagai instansi secara terintegrasi. Maka diperlukan adanya dukungan peran serta masyarakat dengan berbagai institusi.

4) Mensukseskan program nasional kepemilikan dokumen kependudukan dalam membangun database kependudukan yang valid sehingga mampu memberikan data dan informasi bagi pihak yang berkepentingan demi terwujudnya keserasian data kependudukan di semua institusi.

Melalui kebijakan strategis di atas, diharapkan akan terbangunnya suatu jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara on line di wilayah Kabupaten Bandung Barat sehingga akan terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung Barat, 02 September 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kepala,

Drs. H. HENDRA TRISMAYADI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197109251991011002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BANDUNG BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAH RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEWENANGAN PENGAMPU	PERKIRAAN MULAI MENCAPAI KINERJA AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU/ MITRA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Kemandirian/Backcurang (1)-(2)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH PERUBAHAN (2)-(1)				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENGELOLAAN BPS																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
1		PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Biro Pemerintahan dan Pengelolaan SDA Nilai AKIP SANGAT				5 (> Angka Baik) AKIP/Tahun	5 (> Angka Baik) AKIP/Tahun												
		Penyelenggaraan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggara Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja OKEMerapi				1 Dokumen / 1 Unit	1 Dokumen / 1 Unit												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen					Kab. Bandung Barat, Kabupaten Bandung	DANA HIBAH/DAK/ LAIN-LAIN						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Daerah																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Bandung Barat, Kabupaten Bandung	DANA TRANSFER UMUM/DAK/ LAIN-LAIN						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pendidikan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Bandung Barat, Kabupaten Bandung	DANA TRANSFER UMUM/DAK/ LAIN-LAIN						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PENGAJUAN BPS																		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Capaian Program dan Anggaran Perangkat Daerah (SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Program dan Anggaran Perangkat Daerah)				4 Laporan	4 Laporan					Kab. Bandung Barat, Kabupaten Bandung	DANA TRANSFER UMUM/DAK/ LAIN-LAIN						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET UNTUK PERUBAHAN KEGIATAN (OPSI)	ADA/TIDAK/ CAPAIAN/ BERLU - DPO TUNTAN MEN	PENERIMAAN (LAPORAN TARGET MASUK DPO KUASA BUD)	CAPAIAN HASILA DAN KEUANGAN PROGRAMAN										KELOMPOK SASARAN	PENERIMAAN MASA MENDATANG TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Kemandirian/Berkurang (+/-/-0)	LOKASI	SUMBER DANA	PROYEKSI				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KEBELUM	KEDUDUKAN	SEBELUM	APABILA	SESUDAH PERUBAHAN				KUANTITAS	RUPIAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD PADA AKHIR 2024	PENGHITUNGAN CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN KINJA MENGIKUTI TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		Kode Indikator (K) / (Ku)			Kenaikan/Berkurang (14-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGETUA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							RASIONAL	INDIKATOR	INPUT (M)	OUTPUT (K)	OUTCOME (K)				KEWENANGAN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT PERUBAHAN TAHUN BERJALAN (UP)	SASARAN CAPAIAN PERUBAHAN TAHUN BERJALAN (UP)	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET PERUBAHAN TAHUN BERJALAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										RELOKASI BAGIAN	PRAKIRAAN BAGI / RENCANA TAHUN BERJALAN		PERKIRAAN SISWA PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKA		PAGU INDIKATIF (Rp)			Belanja/Belanja (14-15)	URAIAN	SUMBER DANA	PENGETAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	AFTER DESA	PERUBAHAN DAN				BASIONAL	BASIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URAIAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PERUBAHAN KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN SEBELUM DAN TAHUN BERJALAN	PENDEKATAN CAPAIAN TARGET MENJADI OPD / LAINNYA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PENGHARGAAN	TANGGUNG JAWAB RENCANA TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		Pagu 2025 (Rp)			Selisih/Kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KABUPATEN	KABUPATEN	RAPBD (Rp)	APBD (Rp)	RPPD PERUBAHAN (Rp)				KABUPATEN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URAIAN / NAMA URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA (RP)	REALISASI CAPAIAN KINERJA (RP) TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR TAHUN 2024	LAYANAN KINERJA DAN URUSAN PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BIAYA PENGHASILAN TAHUN 2025			PERangkat Daerah / Lembaga Pelaksanaan (OPD)
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)			Besaran/Besaran (1+2)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							KABUPATEN	KECAMATAN	APBD (Rp)	APBD Jasa	PAGU PERKIRAAN (RP)				KABUPATEN	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.10.03.2.01.0001	Pelaksanaan Sistem Anti Pemalsuan/Pengaman Asperum dan Pemantauan Peredaran/Penjualan Tembakau Ilegal																			
	2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
	2.12.03.2.01.0006	Fasilitasi Tentang Perusahaan Dan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Perusahaan Dan				4 Laporan	4 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM					0.00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
	2.12.03.2.01.0006	Fasilitasi Tentang Perusahaan Dan																			
	2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
1	**2.14.01**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	Persentase Lembaga perlindungan yang memberikan data dan informasi Persentase Lembaga (%)				0 (0 %) %	0 (0 %) %													
	2.14.03.2.01.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitasi/Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri				2 Dokumen 0 Kelg	1 Dokumen 0 Kelg	0.00	0.00	0.00	0.00									DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.12.06.2.01.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi																			
			Jumlah Dokumen Sistem Pengelolaan yang Dibina dan Disyahkan				2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta Indonesia	Dana TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM					0.00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
	2.14.03.2.01.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi																			
	2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
	2.12.06.2.01.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Informasi Kepemilikan yang Perlu Ditindaklanjuti Persatan Pengelolaan Informasi Kepemilikan				2 Dokumen 0 Kelg	1 Dokumen 0 Kelg	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	3.500.000.000,00									DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.14.04.2.01.0001	Pengawasan Izin Cara Pendaftaran, Pendaftaran, Pemeriksaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pengelenggaraan Kemitraan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Izin Usaha Perdagangan, Pendaftaran, Pemeriksaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pengelenggaraan Kemitraan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan				4 Dokumen	4 Dokumen	600.167.800,00	0.00	0.00	600.167.800,00	Kab. Bantaeng, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM					0.00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.100.170.700,00**	**14.270.000.400,00**	**19.870.000.400,00**	**3.141.010.700,00**									
	2.14.04.2.01.0001	Pengawasan Izin Cara Pendaftaran, Pendaftaran, Pemeriksaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pengelenggaraan Kemitraan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
	2.14.04.2.01.0001	Pengawasan Izin Usaha Perdagangan	Terbitkannya Perlindungan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terbitkannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				21 Aturan 22 Org	21 Aturan 22 Org	44.000.000,00	156.187.000,00	100.500.200,00	100.500.200,00				Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah					200.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.14.04.2.01.0002	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta, Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM		Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah			80.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.14.04.2.01.0004	Pengelenggaraan Pencatatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Data Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.512.000,00	11.512.000,00	12.512.000,00	0.00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta, Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM		Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah			40.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.14.04.2.01.0005	Kesadaran Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Kesadaran Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta, Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM		Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah			80.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.14.04.2.01.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengelenggaraan Tinggi																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengelenggaraan Tinggi				4 Dokumen	4 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta, Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM		Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah			80.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA
	2.14.04.2.01.0000	Kependudukan, Informasi, dan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	40.380.000,00	444.000.000,00	144.870.200,00	100.000.200,00	Kab. Bantaeng Bantul, Yogyakarta, Indonesia	DANA TRANSFER UNTUK DAERAH ALOKASI UMUM		Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah Pengurusan izin kerja pemerintahan dan swasta daerah			80.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DPPA

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD (Rp)	Realisasi Capaian Periode RPJMD (%)	Realisasi Capaian Target RPJMD Pada Akhir Periode (Rp)	Capaian Indikator Pembangunan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Nilai Rencana Tahun 2023		Organisasi / Daerah Penanggung Jawab
							Target Awal		Hasil Awal (Rp)			Kenaikan/Berkurang (+/-) (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Hasil / Alokasi (Rp)	
							Awal (Rp)	Awal (%)	Awal (Rp)	Akhir (%)	Akhir (Rp)				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Cijamil Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah Telp. (022) 60834586 Kode Pos 40552
E-Mail : disdukcapil@bandungbaratkab.go.id Website :bandungbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR: 1015/Kep/268-disdukcapil/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk Tim Penyusunnya;

b. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Peraturan Darrah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 - 2026

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Ketua;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
pada tanggal : 02 September 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Drs. H. HENDRA TRISMAYADI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197109251991011002

Tembusan disampaikan kepada :

Yth.
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : /Kep208 -disdukcapil/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Penanggung jawab	:	Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
Ketua	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
		2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
		4. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi;;
		5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
		6. Kepala Subbagian Keuangan;
		7. Perencana Ahli Muda;
		8. Analis Kebijakan Ahli Muda di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Drs. H. HENDRA TRISMAYADI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197109251991011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : /Kep- 2019 disdukcapil/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Tugas Pokok

Menyusun Rencan Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Fungsi

1. Pengumpulan Rencana Kerja dari setiap Bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024;
3. Pengevaluasian dan pelaporan RENJA tahun sebelumnya Ketua Tim;
4. Pelaporan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

C. Rincian Tugas

1. Pengarah
   a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
   b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.
2. Penanggung jawab
   a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
   b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil Pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah.
3. Ketua
   a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
   b. Mengarahkan mengawasi dan mengendalikan kegiatan Anggota;
   c. Mengevaluasi kegiatan Anggota;
   d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.

4. Sekretaris
    a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;
    b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;
    c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;
    d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;
    e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;
    f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.
5. Anggota
    a. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja;
    b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    c. Menyusun laporan.
6. Operator
    a. menginput data kinerja pada aplikasi SIPD dan E-Porja.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Drs. H. HENDRA TRISMAYADI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197109251991011002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

KECAMATAN BATUJAJAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2024 pada Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan kerja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat untuk periode triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 dan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Melalui Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan IV Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Batujajar Kabupaten Barat untuk periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja kami susun sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur penyusunan perencanaan ditahun yang akan datang. Saran dan masukan sangat kami diharapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan evaluasi pada periode berikutnya.

Batujajar, Januari 2024

CAMAT BATUJAJAR

DEDEN MULYADI, S.Sos., M.M

Pembina Tk.I

NIP. 196709071989121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG **1**

1.2 LANDASAN HUKUM **2**

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN **3**

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN **3**

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH **5**

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI… **5**

2.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN **17**

2.3 METADATA INDIKATOR… **25**

BAB III CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH… **30**

3.1 PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH… **30**

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA… **48**

4.1 PERMASALAHAN UMUM **48**

4.2 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA… **48**

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT… **49**

BAB V PENUTUP **50**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Perbandingan Target Keuangan Dan Kinerja Renstra, Renja dan DPA…19

Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batujajar..... 24

Tabel 2.3.2 Indikator Kinerja Program Kecamatan Batujajar… 26

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Batujajar…..... 30

Tabel 3.2 Interval Kriteria Realisasi Anggaran 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Batujajar.....17

Gambar 2.2.1 Keterkaitan Dokumen Renja PD..... 24

Gambar 2.2.2 Tindak Lanjut Penyusunan Renja.....26

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Batujajar…..... 28

Tabel 3.2 Interval Kriteria Realisasi Anggaran 34

Tabel 4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja.....36

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut..... 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 259, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap akhir triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Evaluasi terhadap Renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
10) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan;

11) Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026;
12) Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Batujajar adalah untuk menyajikan informasi pencapaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Batujajar pada Triwulan IV (Oktober s.d Desember) berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batujajar pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Batujajar, antara lain:

1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Batujajar;
2) Mengetahui pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan kendala yang dihadapi;
3) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran;
4) Mendorong Kecamatan Batujajar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Batujajar untuk meningkatkan kinerjanya

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Perangkat Daerah

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra, Renja, DPA)

2.3 Metadata Indikator Kinerja

Bab III Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.1 Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja

4.1 Permasalahan Umum

4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Batujajar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang berjarak 15,2 kilometer dari ibu kota Kabupaten Bandung Barat ke arah Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Padalarang
- Timur : Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung
- Selatan : Kecamatan Cihampelas
- Barat : Kecamatan Saguling

Batujajar dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, kemudian pada tahun 2007 karena pemekaran kabupaten, masuk menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Batujajar terbagi menjadi 7 desa yaitu :

1. Desa Batujajar Timur
2. Desa Batujajar Barat
3. Desa Cangkorah
4. Desa Galanggang
5. Desa Giriasih
6. Desa Pangauban
7. Desa Selacau

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan, tugas pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
    2. subbagian kepegawaian dan umum.

c. Seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
d. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
g. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Batujajar

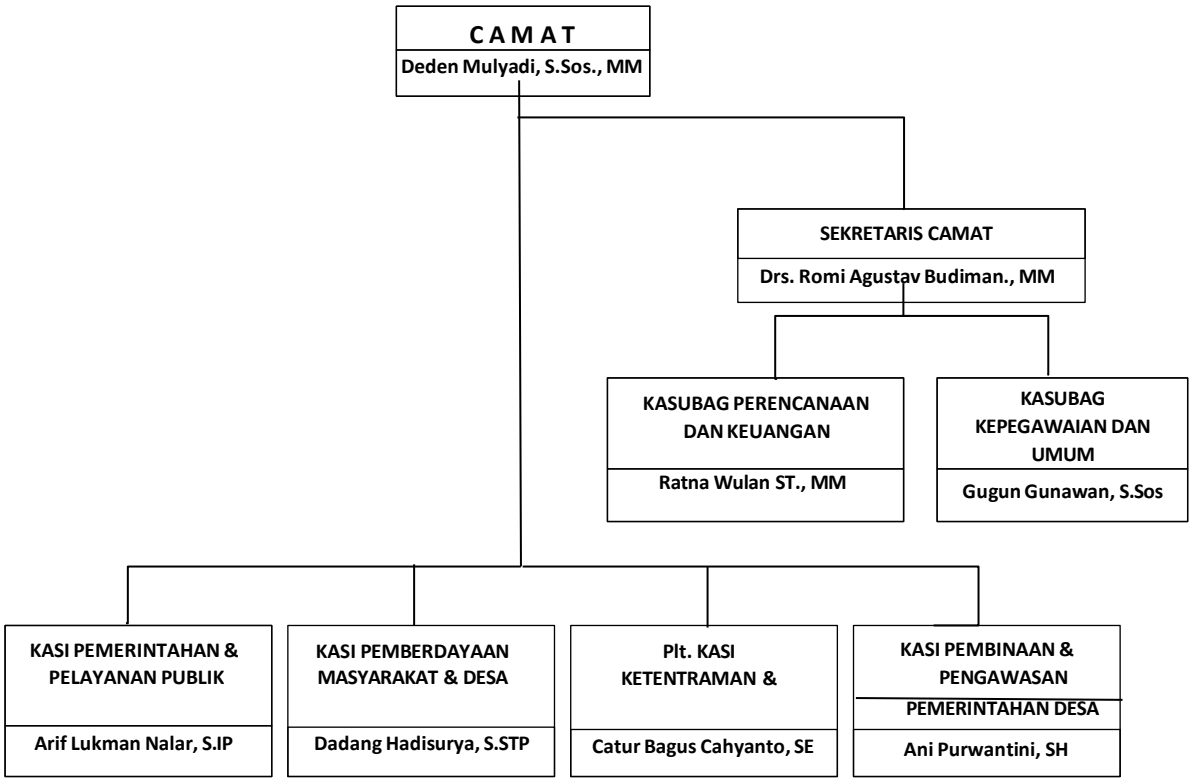

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
c. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

d. mengkoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
f. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum ; dan
c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat;
b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundangundangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;

c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan kecamatan;
d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
j. melaksanakan administrasi anggaran Kecamatan;
k. melaksanakan verifikasi keuangan;
l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan

c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai lingkup Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup Kecamatan;
h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai lingkup Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kecamatan;
j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Kecamatan;
m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Kecamatan;
q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pemerintahan dan pelayanan publik; dan
c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik;

d. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan survei kepuasan masyarakat;
f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
h. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pertanahan;
i. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masayrakat dan desa;
d. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
f. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
h. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati di bidang tata ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan;
e. melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
f. melakukan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;
h. melaksanakan penyusunan bahan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan bahan penanganan kasus-kasus di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
j. melaksanakan pengkajian perumusan langkah-langkah antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi tata pemerintahan desa;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
f. melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
g. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa;

h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuagan desa dan pendayagunaan aset desa;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
j. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
k. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
l. melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang musyawarah desa;
m. melaksanakan penyusunan profil dan monografi desa;
n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra, Renja, DPA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.

Renstra dan Renja merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah. Renstra disusun untuk jangka waktu lima tahun, sedangkan Renja disusun setiap tahun. Renja merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra, sehingga Renja harus mengikuti arah dan pedoman yang ditetapkan dalam Renstra. Sedangkan DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan tindak lanjut dari Renja.

Gambar 2.2.1
Keterkaitan Dokumen Renja PD

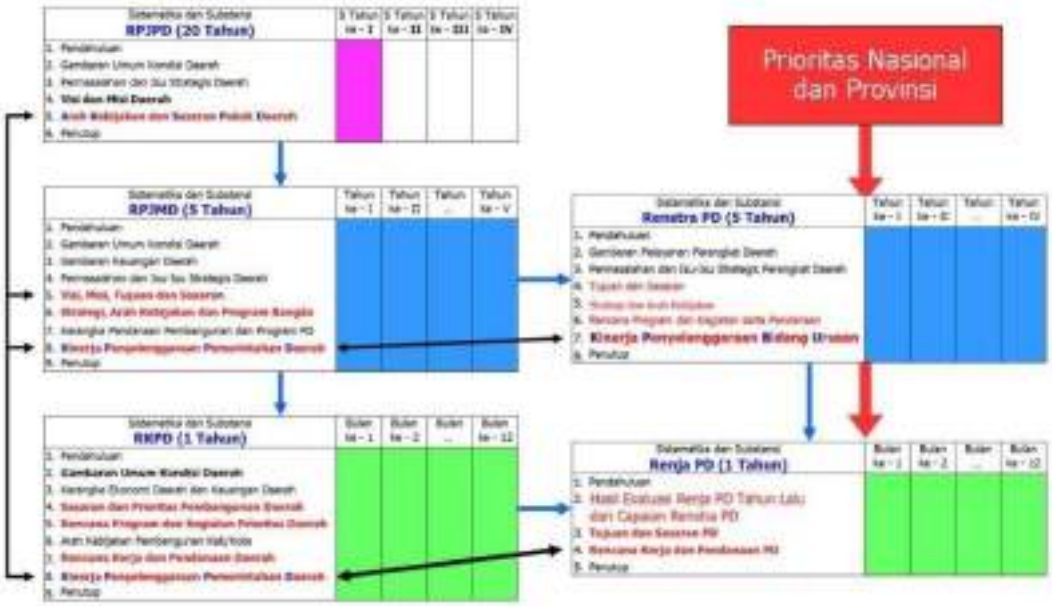

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2.2
Tindak Lanjut Penyusunan Renja

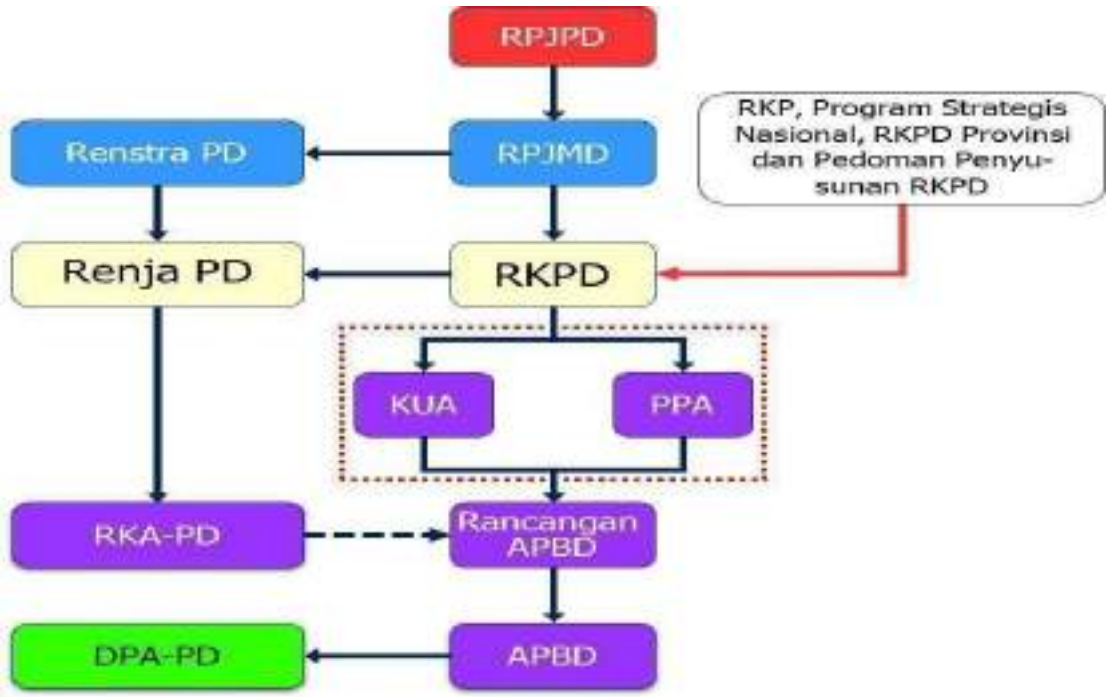

Pada Tahun Anggaran 2024, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batujajar dan terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.590.414.830,-. Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Batujajar terdapat 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.981.160.643,-. Sedangkan dalam Renstra 2024-2026 terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 5.599.800.264,-.

Berikut tabel perbandingan target keuangan dan kinerja antara Renstra, Renja dan DPA :

Tabel 2.2
Tabel Perbandingan Target Keuangan dan Kinerja Renstra, Renja dan DPA
Kecamatan Batujajar

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Perangkat Daerah					
		Renstra		Renja Perubahan		DPA	
		Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja
Kecamatan Batujajar		**Rp. 5.599.800.264**		**Rp. 5.981.160.643**		**Rp. 5.590.414.830**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Kecamatan Batujajar**	Rp. 3.728.834.964	62,76 (B)	Rp. 3.920.359.843	62,76 (B)	Rp. 3.539.314.030	62,76 (B)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rp. 31.763.035	10 Dokumen	Rp. 125.050400	10 Dokumen	Rp. 125.050.400	11 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.643.035	1 Dokumen	Rp. 125.050400	2 Dokumen	Rp. 2.990.000	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.200.000	5 Dokumen	Rp. 3.637.951.748	5 Laporan	Rp. 110.100.400	5 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rp. 3.601.614. 964	4 Dokumen	Rp. 3.637.951.748	4 Dokumen	Rp. 3.271.830.388	4 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.594.114. 964	17 Orang/ Bulan	Rp. 3.628.261.748	14 orang/ bulan	Rp. 3.262.140.388	17 orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2.350.000	1 Laporan	Rp. 2.210.000	1 Laporan	Rp. 2.210.000,	1 Laporan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp. 1.150.000	1 Dokumen	Rp. 3.060.000	1 Dokumen	Rp. 3.060.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Rp. 4.000.000	18 Laporan	Rp. 4.420.000	18 Laporan	Rp. 4.420.000	4 Laporan

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rp. 21.200.000	1 Laporan	Rp. 18.807.600	1 Laporan	Rp. 18.807.600	1 Laporan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp. 21.200.000	3 Paket	Rp. 18.807.600	3 Paket	Rp. 18.807.600	3 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp. 41.779.100	16 Laporan	Rp. 57.968.200	12 Laporan	Rp. 58.941.700	12 Laporan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 10.500.000	2 Paket	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp. 879.100	2 Paket	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp. 19.800.000	10 Paket	Rp. 33.468.200	10 paket	Rp. 34.441.700	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 2.000.000	2 Paket	Rp. 2.000.000	2 Paket	Rp. 2.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 8.600.000	12 Laporan	Rp. 22.500.000	12 Laporan	Rp. 22.500.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rp. 5.000.000	1 Laporan	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp. 5.000.000	2 Paket	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp. 6.286.000	24 Laporan	RP. 60.534.800	2 Laporan	Rp. 24.624.400	2 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Rp. 3.186.000	12 Laporan	Rp. 35.910.400	12 Laporan	-	-

	dan Listrik yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 3.100.000	12 Laporan	Rp. 24.624.400	12 Laporan	Rp. 24.624.400	13 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	Rp. 21.191.865	9 Unit	Rp. 20.047.095	2 Unit	Rp. 40.059.542	2 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 10.700.000	8 Unit Kendaraan	Rp. 12.350.000	1 unit	Rp. 12.350.000	1 Kendaraan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 10.491.865	1 Unit Gedung	Rp. 7.697.095	1 unit	Rp. 27.709.542	1 Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi**	Rp. 115.454.500	100%	Rp. 305.590.000	100%	Rp. 295.590.000	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rp. 88.554.500	13 Dokumen	Rp. 156.884.200	2 Dokumen	Rp. 146.884.200	2 Dokumen
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 13.554.500	1 Laporan	Rp. 13.500.000	1 Laporan	Rp. 13.500.000	1 Laporan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 75.000.000	12 Dokumen	Rp. 143.384.200	12 Dokumen	Rp. 133.384.200	12 Dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	Rp. 8.100.000	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan

yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 8.100.000	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 18.800.000	1 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 18.800.000	1 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Rp. 85.400.000	100%	Rp. 1.104.412.000	100%	Rp. 1.104.712.000	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Rp. 85.400.000**	**3 Dokumen**	Rp. 1.104.412.000	17 Dokumen	**Rp. 1.104.712.000**	17 Dokumen
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 41.200.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 40.600.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 21.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 5.400.000	1 Dokumen	-	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Rp. 38.800.000	1 Laporan	Rp. 1.063.812.000	12 Laporan	Rp. 1.083.712.000	12 Laporan

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**Rp. 47.480.000**	**100%**	Rp. 591.874.400	100%	Rp. 591.874.400	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 33.980.000	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 33.980.000	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rp. 13.500.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 13.500.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**	Rp. 66.945.500	100%	Rp. 58.924.400	100%	Rp. 58.924.400	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Rp. 66.945.500**	**23 Dokumen**	Rp. 58.924.400	100%	**Rp. 58.924.400**	23 Dokumen

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 19.500.000	3 Dokumen	Rp. 10.400.000	3 Dokumen	Rp. 10.400.000	3 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 20.570.000	7 Dokumen	Rp. 15.800.000	7 Dokumen	Rp. 15.800.000	7 Dokumen
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.700.000	1 Dokumen	Rp. 32.724.400	12 Dokumen	Rp. 32.724.400	12 Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 11.175.500	12 Dokumen	-	-	-	-

Sumber : Renstra Kecamatan Batujajar Tahun 2024-2026, Renja Perubahan Kecamatan Batujajar Tahun 2024 dan DPA Perubahan Kecamatan Batujajar Tahun 2024

Terdapat beberapa kegiatan Renstra dan Renja yang tidak terakomodir di DPA dikarenakan terbatasnya anggaran dan dikarenakan adanya kegiatan yang sudah tidak relevan di anggarkan di DPA tahun 2024 yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Untuk kegiatan tersebut tidak bisa diakomodir dikarenakan untuk penyediaan sumber daya air di Kecamatan Batujajar sudah tidak lagi menggunakan pihak ketiga, melainkan sudah memiliki sumur bor sendiri, sehingga anggaran penyediaan sumber daya air tidak lagi di anggarkan di DPA tahun 2024.

2.3 Metadata Indikator

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan berfokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output*

merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pernerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicators)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lnstansi Pemerintah wajib menetapkan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicators)* secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. lndikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)*.

Kecamatan Batujajar sesuai dengan bidang/ urusan yang dilaksanakan kecamatan, yakni peningkatan kualitas pelayan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan perangkat daerah, menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batujajar - Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai/ Predikat	69,40 (B)	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Penilai Internal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024
2.	Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemberdayaan Desa dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82,5	Hasil survey tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur pada tahun 2024
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Persen	100%	Hasil perhitungan antara realisasi koordinasi Trantibum yang dilaksanakan dalam satu tahun dibanding dengan rencana target koordinasi Trantibum yang direncanakan

					pada tahun 2024 dikali 100%

Sumber : Renstra Kecamatan Batujajar 2024-2026

Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Batujajar yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian target dan sasaran strategis Kecamatan, maka perlu di tetapkannya indikator program kegiatan Kecamatan Batujajar. Jika target program tercapai, maka target sasaran juga akan tercapai.

Berikut indikator program Kecamatan Batujajar untuk periode Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 2.3.2
Indikator Kinerja Program
Kecamatan Batujajar - Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Batujajar	Nilai/ Predikat	69,40 (B)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Persen	100%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase Koordinasi	Persen	100%

	Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi		
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Persen	100%

Sumber : Renja Kecamatan Batujajar Tahun 2024

Untuk mengukur realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Batujajar pada tahun anggaran 2024, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target 2024}} \times 100\ \%$$

BAB III

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Renja Kecamatan Batujajar merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Batujajar.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran Kecamatan Batujajar sampai dengan Semester IV Tahun 2024 serta predikat kinerja, diukur dengan skala nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interval Kriteria Realiasi Anggaran

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Berikut realisasi anggaran Kecamatan Batujajar sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Batujajar

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Perangkat Daerah						Realisasi	
		Renstra		Renja Perubahan		DPA			
		Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Kecamatan Batujajar**	Rp. 3.728.834.964	62,76 (B)	Rp. 3.920.359.843	62,76 (B)	Rp. 3.539.314.030	62,76 (B)	Rp. 3.298.191.319	69,35 (B)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rp. 31.763.035	10 Dokumen	Rp. 125.050400	10 Dokumen	Rp. 125.050.400	11 Dokumen	Rp. 118.270.000	10 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.643.035	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	2 Dokumen	Rp. 2.990.000	2 Dokumen	Rp. 2.990.000	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.680.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen	Rp. 2.990.000	1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.200.000	5 Dokumen	Rp. 110.100.400	5 Laporan	Rp. 110.100.400	5 Laporan	Rp. 103.320.000	4 Laporan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rp. 3.601.614. 964	4 Dokumen	Rp. 3.271.830.388	4 Dokumen	Rp. 3.271.830.388	4 Dokumen	Rp. 3.037.956.469	4 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.594.114. 964	17 Orang/ Bulan	Rp. 3.628.261.748	14 orang/ bulan	Rp. 3.262.140.388	15 orang/ bulan	Rp. 3.030.476.469	14 orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2.350.000	1 Laporan	Rp. 2.210.000	1 Laporan	Rp. 2.210.000,	1 Laporan	Rp. 2.210.000	1 Dokumen
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp. 1.150.000	1 Dokumen	Rp. 3.060.000	1 Dokumen	Rp. 3.060.000	1 Dokumen	Rp. 3.060.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 4.000.000	18 Laporan	Rp. 4.420.000	18 Laporan	Rp. 4.420.000	4 Laporan	Rp. 2.210.000	2 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rp. 21.200.000	1 Laporan	Rp. 18.807.600	1 Laporan	Rp. 18.807.600	1 Laporan	Rp. 18.807.600	1 Laporan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp. 21.200.000	3 Paket	Rp. 18.807.600	3 Paket	Rp. 18.807.600	3 Paket	Rp. 18.807.600	3 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp. 41.779.100	16 Laporan	Rp. 57.968.200	12 Laporan	Rp. 58.941.700	12 Laporan	Rp. 58.499.050	12 Laporan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 10.500.000	2 Paket	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp. 879.100	2 Paket	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp. 19.800.000	10 Paket	Rp. 33.468.200	10 paket	Rp. 34.441.700	10 paket	Rp. 33.999.050	9 paket

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 2.000.000	2 Paket	Rp. 2.000.000	2 Paket	Rp. 2.000.000	2 Paket	Rp. 2.000.000	2 Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 8.600.000	12 Laporan	Rp. 22.500.000	12 Laporan	Rp. 22.500.000	12 Laporan	Rp. 22.500.000	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rp. 5.000.000	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp. 5.000.000	2 Paket	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp. 6.286.000	24 Laporan	RP. 60.534.800	2 Laporan	Rp. 24.624.400	2 Laporan	Rp. 24.608.200	2 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 3.186.000	12 Laporan	Rp. 35.910.400	12 Laporan	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 3.100.000	12 Laporan	Rp. 24.624.400	12 Laporan	Rp. 24.624.400	13 Laporan	Rp. 24.608.200	13 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	Rp. 21.191.865	9 Unit	Rp. 20.047.095	2 Unit	Rp. 40.059.542	2 Unit	Rp. 40.050.000	2 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 10.700.000	8 Unit Kendaraan	Rp. 12.350.000	1 unit	Rp. 12.350.000	1 Kendaraan	Rp. 12.350.000	1 Kendaraan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 10.491.865	1 Unit Gedung	Rp. 7.697.095	1 unit	Rp. 27.709.542	1 Gedung	Rp. 27.700.000	1 Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintaha**	Rp. 115.454.500	100%	Rp. 305.590.000	100%	Rp. 295.590.000	100%	Rp. 274.526.750	92,87%

DAN PELAYANAN PUBLIK	**n dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi**								
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rp. 88.554.500	13 Dokumen	Rp. 156.884.200	2 Dokumen	Rp. 146.884.200	2 Dokumen	Rp. 131.400.600	1 Dokumen
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 13.554.500	1 Laporan	Rp. 13.500.000	1 Laporan	Rp. 13.500.000	1 Laporan	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 75.000.000	12 Dokumen	Rp. 143.384.200	12 Dokumen	Rp. 133.384.200	12 Dokumen	Rp. 131.400.600	11 Dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 8.100.000	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan	Rp. 131,126.150	11 Dokumen
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 8.100.000	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan	Rp. 131.205.800	12 Laporan	Rp. 131.126.150	12 Laporan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 18.800.000	1 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan	Rp. 12.000.000	5 Laporan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 18.800.000	1 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan	Rp. 17.500.000	6 Laporan	Rp. 12.000.000	6 Laporan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam	Rp. 85.400.000	100%	Rp. 1.104.412.000	100%	Rp. 1.104.712.000	100%	Rp. 1.090.285.000	98,69%

	pembanguna n kewilayahan								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa**	**Rp. 85.400.000**	**3 Dokumen**	Rp. 1.104.412.000	17 Dokumen	**Rp. 1.104.712.000**	17 Dokumen	Rp. 1.090.285.000	16 Dokumen
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Rp. 41.200.000	5 Lembaga Kemasyar akatan	Rp. 40.600.000	5 Lembaga Kemasyar akatan	Rp. 21.000.000	5 Lembaga Kemasyar akatan	Rp. 20.300.000	5 Lembaga Kemasyar akatan
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 5.400.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 38.800.000	1 Laporan	Rp. 1.063.812.000	12 Laporan	Rp. 1.083.712.000	12 Laporan	Rp. 1.069.985.000	12 Laporan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**Rp. 47.480.000**	**100%**	Rp. 591.874.400	100%	Rp. 591.874.400	100%	Rp. 583.986.200	98,67%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 33.980.000	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan	Rp. 39.558.200	12 Laporan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 33.980.000	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan	Rp. 39.574.400	12 Laporan	Rp. 39.558.200	12 Laporan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan**	Rp. 13.500.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan	Rp. 544.428.000	11 Laporan

	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 13.500.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan	Rp. 552.300.000	12 Laporan	Rp. 544.428.000	11 Laporan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**	Rp. 66.945.500	100%	Rp. 58.924.400	100%	Rp. 58.924.400	100%	Rp. 53.708.200	91,14%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Rp. 66.945.500**	**23 Dokumen**	Rp. 58.924.400	100%	**Rp. 58.924.400**	23 Dokumen	Rp. 53.708.200	22 Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 19.500.000	3 Dokumen	Rp. 10.400.000	3 Dokumen	Rp. 10.400.000	3 Dokumen	Rp. 8.600.000	2 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 20.570.000	7 Dokumen	Rp. 15.800.000	7 Dokumen	Rp. 15.800.000	7 Dokumen	Rp. 15.100.000	7 Dokumen
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.700.000	1 Dokumen	Rp. 32.724.400	12 Dokumen	Rp. 32.724.400	12 Dokumen	Rp. 30.008.200	11 Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Rp. 11.175.500	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-

	Kemasyarakatan								

Berdasarkan Tabel 3.2 Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Batujajar diatas, maka diperoleh gambaran evaluasi untuk program/ kegiatan Kecamatan Batujajar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **110,5%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **110,5%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **110,5%** dengan kategori **Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **90,91%** dengan kategori **"Tinggi"**

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **75%** dengan kategori **"Sedang"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **8,33%** dengan kategori **"Sangat Rendah"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **22,22%** dengan kategori **"Sangat Rendah"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **92,87%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **92,87%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **92,87%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **7,69%** dengan kategori **"Sangat Rendah"**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **50%** dengan kategori **"Sangat Rendah"**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **50%** dengan kategori **"Sangat Rendah"**
2) **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **91,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **91,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **91,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
3) **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **500%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **83,33%** dengan kategori **"Tinggi"**
   - Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **83,33%** dengan kategori **"Tinggi"**

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **98,69%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **98,69%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **98,69%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **533,33%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **94,11%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **94,11%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **98,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **98,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **98,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **91,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **91,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **91,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **91,14%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **91,14%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **91,14%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renstra 2024-2026 adalah **91,14%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan Renja 2024 adalah **91,14%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Rata-rata capaian kinerja disandingkan dengan DPA 2024 adalah **91,14%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

2. Keuangan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **88,45%** dengan kategori **"Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **84,13%** dengan kategori **"Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **93,19%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **372%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **94,58%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **94,58%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **84,35%** dengan kategori "**Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **92,85%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **92,85%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **88,72%** dengan kategori **"Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 **100%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **140,01%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **100.92%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar 99,25% dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **391,48%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **40,65%** dengan kategori **"Sangat Rendah"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **99,93%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **188,98%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **199,78%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **99,98%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **237,78%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **89,83%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **92,87%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **148,38%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **83,76%** dengan kategori **"Tinggi"**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **89,46%** dengan kategori **"Tinggi"**
2) **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **1.618,84%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **99,92%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **99,92%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
3) **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **63,83%** dengan kategori **"Rendah"**
   - Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **68.57%** dengan kategori **"Sedang"**

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **68.57%** dengan kategori **"Sedang"**

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **1.276,68%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **98,72%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **98,69%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **1.276,68%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **98,72%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **98,69%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **1.229,96%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **98,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **98,67%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **116,42%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **99,96%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **99,96%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

2) Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **4.032,8%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **98,57%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **98,57%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **80,22%** dengan kategori **"Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **91,15%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **91,15%** dengan kategori **"Sangat Tinggi"**

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra 2024-2026 sebesar **80,22%** dengan kategori **“Tinggi”**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar **91,15%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”**
- Tingkat capaian realisasi keuangan disandingkan dengan pagu indikatif DPA 2024 sebesar **91,15%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”**

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA

4.1 Permasalahan Umum

Dalam perspektif pembangunan daerah, tahap-tahap dalam proses kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan, implementasai program/kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik. Paling tidak terdapat dua tahapan dalam porses yang kadang ditemui kendala dan permasalahan yakni : *Pertama*, bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan. *Kedua*, kendala dan permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dengan implementasi-nya.

Berikut permasalahan umum dalam pencapaian target kinerja di Kecamatan Batujajar :

1. Kurangnya SDM dan kapasitas SDM di Kecamatan Batujajar
2. Kurangnya sarana dan prasarana di Kecamatan Batujajar
3. Proporsi anggaran yang masih belum sesuai kebutuhan

4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan di dalam Renstra Kecamatan Batujajar tahun 2024 - 2026 tentunya muncul hal–hal yang menjadi faktor pendorong maupun sebagai faktor penghambat pencapaian kinerja perangkat daerah. Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja Kecamatan Batujajar untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong

a. Kerjasama yang baik dan kekompakan tim internal Kecamatan Batujajar
b. Komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder di lingkungan Kecamatan Batujajar, terhadap tugas dan tanggungjawab pekerjaan

c. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku
d. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Kecamatan Batujajar dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan

2) Faktor Penghambat

a. Saat ini Kecamatan Batujajar belum memiliki gedung kantor yang representative sehingga kebutuhan ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan seperti ruang rapat (bangunan kantor) dan peralatan IT masih terbatas;
b. Adanya beberapa kendala teknis dengan system pada aplikasi SIPD RI yang mengakibatkan adanya keterlambatan/ tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal, maka ditindaklanjuti sebagai berikut :

1) Mengajukan penambahan personil ke BKPSDM beserta pengajuan kursus/ training personal guna meningkatkan kapasitas SDM di Kecamatan Batujajar
2) Mengajukan/ menganggarkan penambahan sarana dan prasarana di Kecamatan Batujajar untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Batujajar
3) Memperhatikan kembali indikator dan target pada Renstra dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batujajar;
4) Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
5) Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan perumusan perhitungan pencapaian targetnya;
6) Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian dari tahun – tahun sebelumnya;
7) Penyesuaian target kinerja
8) Melakukan penyesuaian kegiatan yang tidak terealisasi sekaligus melakukan penyesuaian program/kegiatan/Sub Kegiatan

BAB V
PENUTUP

Secara umum pencapaian target kinerja Kecamatan Batujajar sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

Berdasarkan evaluasi terhadap evaluasi capaian targert kinerja terhadap Rencana Kerja Kecamatan Batujajar, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk pencapaian target kinerja SKPD, diantaranya :

1. Memperhatikan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Renja Triwulan IV Tahun 2024, yaitu koordinasi yang baik antar unit kerja Kecamatan Batujajar, kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, serta komitmen pimpinan beserta seluruh stakeholder di lingkungan Kecamatan Batujajar terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, tentunya hal ini akan dipertahankan serta akan diupayakan mengeliminir faktor-faktor pengahambat pencapaian kinerja;
2. Untuk semakin menyempurnakan evaluasi renja Kecamatan Batujajar dibutuhkan proses pelaporan secara periodik agar lebih efektif dan didokumentasikan dengan baik.

Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batujajar Triwulan IV Tahun 2024 disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Selanjutnya evaluasi hasil renja akan dijadikan sebagai bahan penyusunan dan kebijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya dan bahan masukan perubahan Renstra Perangkat Daerah, guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan.

Batujajar, Januari 2024

Camat Batujajar

DEDEN MULYADI, S.Sos., M.M

Pembina Tk.I

NIP. 196709071989121001

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuaten Bandung Barat

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini yang merupakan penjabran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Dengan Tersusunnya Renja PD ini diharapkan dapat lebih meningaktkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan organisasinya.

Kami menyadari Renja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat ini belumlah sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja PD dimasa-masa yang akan datang.

Demikian perencanaan kerja ini disusun dengan harapan dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Bandung Barat, Juli 2023
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung Barat

Ir. JAROT PRASETYO
NIP. 196311181997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah 6

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 6

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 7

2.1.3. Realiasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 9

2.1.4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 18

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

3.3. Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47
BAB V PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanalan dan faktor faktor penyebabnya 6

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan factor factor penyebabnya 7

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat 11

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badadn Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat 17

Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi selama Tahun 2019 19

Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama tahun 2019 19

Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat 21

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Bandung Barat 27

Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2021 28

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 32

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat 33

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun RPJP Daerah Kabupaten Bandung Barat dan RPJM Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Barat. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Barat. Renstra BPBD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif.

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 disusun untuk lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan bencana;
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal;

o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunanan dan Keuangan Daerah;
r) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung barat Tahun 2009 Nomor 28);
s) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);
t) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung Barat;
u) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah;
v) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 980);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung barat Tahun 2024 adalah sebagai :

a) Pedoman atau materi pada pembahasan musrenbang Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
b) Bahan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2024;

c) Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (RAPBD) Kabupaten Bandung Barat 2024;
d) Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal;
e) Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana;
b) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c) Mewujudkan sinergitas dan keselarasan anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana;
d) Mewujudkan efiseinsi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalm pembangunan bidang penanggulangan bencana;
e) Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD dan LKPJ.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
2.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Derah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2022 semua program/kegiatan memenuhi target sesuai dengan apa yang telah direncanakan

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang tidak memenuhi tager kinerja	Faktor Penyebab
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Realisasi cakupan indicator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan Hal tersebut didukung dengan adanya komitmen realiasi Program yang menunjang kinerja organisasi
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang tidak memenuhi tager kinerja	Faktor Penyebab
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah • Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2.	**Program Penanggulangan Bencana**	Realisasi Indikator capaian Program Penanggulangan Bencana sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, Hal tersebut didukung adanya komitmen terhadap pelaksanaan seefektif mungkin program penanggulangan bencana yang menunjang pencapaian kinerja organisasi

No	Program/Kegiatan yang tidak memenuhi tager kinerja	Faktor Penyebab
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota • Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabuaten/Kota • Sub Kegiatan Peneyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam hal program atau kegiatan yang pada realisasinya melebihi target yang direncanakan BPBD Kabupaten Bandung Barat tidak ada, karena apa yang ditargetkan sesuai dengan kebutuhan yang saat itu dibutuhkan. Dan dalam perjalan pun tidak ada perubahan terkait penetapan target kinerja.

2.1.4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Sebagaimana factor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada table 2.1 dan 2.2 diatas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada tahun 2023 sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara berkala;
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah;
- Peningkatan tingkat kedisplinan aparatur;
- Penyusunan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dan Perkiraan Capain Renja Tahun 2023 disajikan pada table berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Bandung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1.05.	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Peerlindungan Masyarakat**									
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Nilai SAKIP BPBD**	**B**		**B**	**B**	**100%**	**B**	**B**	**100%**
1.05.01.2.01	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*6 Dokumen*	-	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*100%*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*100%*
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.02	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*7 Dokumen*	-	*7 Dokumen*	*7 Dokumen*	*100%*	*7 Dokumen*	*7 Dokumen*	*100%*
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	52 Orang	-	52 Orang	52 Orang	100%	52 Orang	52 Orang	100%
1.05.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
1.05.01.2.05	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Kegiatan*	-	*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*100%*	*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*100%*
1.05.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya pakaian olahraga	52 Orang	-	52 Orang	52 Orang	100%	52 Orang	52 Orang	100%
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	52 Orang	-	52 Orang	52 Orang	100%	52 Orang	52 Orang	100%
1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	52 Orang	-	52 Orang	52 Orang	100%	52 Orang	52 Orang	100%
1.05.01.2.06	*Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*4 Kegiatan*	-	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*100%*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor	26 Jenis		26 Jenis	26 Jenis	100%	26 Jenis	26 Jenis	100%
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Barang Ceetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
1.05.01.2.06.06	Sub Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	-	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	100%	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	100%
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	114 Kegiatan	-	114 Kegiatan	114 Kegiatan	100%	114 Kegiatan	114 Kegiatan	100%
1.05.01.2.07	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pengadan Barang Milik Daerah*	*6 Jenis*	-	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*100%*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*100%*
1.05.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel untuk Kantor BPBD	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
1.05.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya bagi Kantor BPBD	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
1.05.01.2.08	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*2 Kegiatan*	-	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*100%*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*100%*
1.05.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perengkapan kantor	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Jasa pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.05.01.2.09	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*2 Kegiatan*	-	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*100%*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabtan	11 Unit	-	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operational atau lapangan	19 Unit	-	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100%
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**Sedang**	**-**	**Sedang**	**Sedang**	**100%**	**Sedang**	**Sedang**	**100%**
1.05.03.2.01	*Kegiatan Pelayanah Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Benana*	*1%*	-	*1%*	*1%*	*100%*	*1.5%*	*1.5%*	*100%*
1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	250 orang	-	120 Orang	120 Orang	100%			100%
1.05.03.2.02	*Kegiatan Pelayanan Pecegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana*	*1%*	-	*1%*	*1%*	*100%*	*1,5%*	*1,5%*	*100%*
1.05.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di	200 orang	-	820 Orang	820 Orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kawasan rawan bencana mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana								
1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2500 orang	-	2500 Orang	2500 Orang	100%			
1.05.03.2.02.07	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dalam penanganan Pasca Bencana	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.05.03.2.02.08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	30 orang	-	60 Orang	60 Orang	100%			
1.05.03.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.05.03.2.03	*Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*100%*	-	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
1.05.03.2.03.02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik bagi Korban Bencana Alam	1050 Paket	-	2050 Paket	1650 Paket	80,48%			
1.05.03.2.03.05	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	30 orang	-	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat sebelum perubahan

No	SPM/ Standar nasional	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja					Catatan Anallisis
			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Kebencanaan yang disebarluaskan	95%	0,012%	95%	0,012%				Capaian indicator pada tahun 2020 sebesar 0,012%, hal ini disebakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi dimana jumlah desa yang rawaan bencana itu sebanyak 165 desa
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	95%	0,012%	95%	0,012%				Capaian indicator pada tahun 2020 sebesar 0,012%, hal ini disebakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi ditambah lagi kurangnya kesadaran dari desa akan pentingnya penanggulan bencana di desa-desa.
3.	Pelayanan Penyelamatan dan EVakuasi Korban Bencana	Persentase Respon Penanganan Bencana	95%	100%	95%	100%				Capaian Indikator pada tahun 2020 sebesar 100%, hal ini didukung oleh kesiapsiagaan personil, komunikasi, peran relawan dan peralatan/perlengkapan dalam penanganan bencana.

Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat setelah perubahan

No	SPM/ Standar nasional	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja			Catatan Anallisis
			Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)	(11)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1%	1,2%	1,5%	1,4%	2%	Capaian indicator pada tahun 2022 sebesar 1,4%, hal ini berarti target kinerja yang telah ditetapkan dalam resntra tercapai. Akan titapi jika dibandingkan dengan target SPM sangat jauh sekali dimana haru 100% setiap tahunnya
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1%	1%	1,5%	1,2%	2%	Capaian indicator pada tahun 2022 sebesar 1,2%, hal ini berarti target kinerja yang telah ditetapkan dalam resntra tercapai. Akan titapi jika dibandingkan dengan target SPM sangat jauh sekali dimana harus 100% setiap tahunnya

3.	Pelayanan Penyelamatan dan EVakuasi Korban Bencana	Persentase Respon Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Indikator pada tahun 2022 sebesar 100%, hal ini didukung oleh kesiapsiagaan personil, komunikasi, peran relawan dan peralatan/perlengkapan dalam penanganan bencana.

Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel 2.2. diatas dapat diketahui bahawa capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

a) IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat jika di sandingkan dengan terget kinerja yang dituangkan didalam Renstra Perubahan BPBD Tahun 2018-2023 semuanya tercapai. Akan tetapi jika menyandingkan dengan target yang dituangkan dalam SPM yang tidak memenuhi target adalah Persentase Warga Negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana dan Persentase Warga Negara dan Aparatur yang mendapatkan layanan Pecegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Ben. Hal tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
   1) Luasnya wilayah kabupaten bandung barat dimana berdasarkan kajian resiko bencana dari 165 desa seluruhnya memeiliki potensi bencana sesuai jenis bencana di masing-masing desa. Sehingga perlu adanya peninjauan kembali terkait target yang ditentukan setiap tahunnya.
   2) Keterbatasan anggaran untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai target yang diinginkan.
   3) Keterbatasan personil yang ada untuk bisa mencapai target 165 desa dalam mendukung tercapainya IKU Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Bandung Barat.

b) IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat yang tercapai targetnya adalah Nilai SAKIP dan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKU tersebut dapat tercapai disebabkan beberapa hal yaitu :

1) Kesiapsiagaan personil dalam mengantisipasi setiap kejadian bencana yang ada di wilayah kabupaten bandung barat
2) Komunikasi yang baik dari segenap pemangku kepentingan di bidang kebencanaan seperti relawan, aparatur desa dan kecamatan.
3) Adanya Komitmen Pimpinan dan Dukungan SDM dalam mendukung pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada tahun 2023 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

a) Alokasi anggaran diarahkan untuk pemenuhan indicator kinerja utama yang sudah di tetapkan;
b) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkup penanggulangan bencana;
c) Perlu adanya peninjauan kembali terkait target kinerja setiap tahunnya disesuakan kondisi dilapangan dan hasil kejian resiko bencana yang telah ditetapkan;
d) Optimasliasi pengurangan resiko bencana melalui mitigasi structural dan non structural serta peningkatan kapasitas aparatur, relawan dan masyarakat berbasis kewilayahan;
e) Pemenuhan Standar Minimal Pelayanan sub urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 tahun 2018.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat mengahadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi selama Tahun 2022

Permasalahan	Hambatan
Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah rawan bencana	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana.
Masih adanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.	Perlunya sosialisasi dan pembentukan Destana dan Disetiap perencanaan tata ruang diharapakan diperhatikan dari aspek Bencana juga.
Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanganan bencana	
Masih belum adanya gudang terendiri yang representative sesuai dengan standar BNPB sebagai tempat penyimpanan peralatan dan logistic cadangan baik pangan, sandang dan tenda sebagai antisipasi terjadinya bencana	

Selain itu, selama Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat juga menghadapi beberpa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.7.

Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama tahun 2022

Peluang	Tantangan
Berkembangnya teknologi di biadang kebencanaan	Peningkatan tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan
Peningkatan kecepatan akses informasi	
Tingginya perhatian Lembaga pendidikan, LSM dan Ormas dalam bidang penanggulangan bencana	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan engerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk mengahasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rancangan Rencana Kerja Anggaran Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan misi, kebijakan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 1 tahun dengan cara mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Meningkatnya Nilai SAKIP BPBD**	**B**	Rp.6.438.261	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Meningkatnya Nilai SAKIP BPBD**	**B**	Rp.6.438.261
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*KBB*	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*7 Dokumen*	*Rp.5.160.555*	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*KBB*	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*7 Dokumen*	*Rp.5.160.555*
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KBB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	49 Orang	Rp.5.092.399	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KBB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	49 Orang	Rp.5.092.399
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/ Semesteran SKPD	KBB	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp.68.155	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/ Semesteran SKPD	KBB	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp.68.155
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*KBB*	*Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Kegiatan*	*Rp.33.800*	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*KBB*	*Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Kegiatan*	*Rp.33.800*
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KBB	Tersedianya Pakaian dinas bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	49 Orang	Rp.33.800	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KBB	Tersedianya Pakaian dinas bagi ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	49 Orang	Rp.33.800
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	*KBB*	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*4 Kegiatan*	*Rp.833.435*	*Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah*	*KBB*	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*4 Kegiatan*	*Rp.833.435*
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KBB	Jumlah Logistik Kantor	26 Jenis	Rp.101.038	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KBB	Jumlah Logistik Kantor	26 Jenis	Rp.101.038
	Sub Kegiatan Barang Ceetakan dan Penggandaan	KBB	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	Rp.10.290	Sub Kegiatan Barang Ceetakan dan Penggandaan	KBB	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	Rp.10.290

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**
	Sub Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KBB	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	Rp.105.000	Sub Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KBB	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33 Surat Kabar, 5 Tabloid, 2 Majalah	Rp.105.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KBB	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	114 Kegiatan	Rp.617,107	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KBB	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	114 Kegiatan	Rp.617,107
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*KBB*	*Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*2 Kegiatan*	*Rp.217.490*	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*KBB*	*Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*2 Kegiatan*	*Rp.217.490*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KBB	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perengkapan kantor	3 Jenis	Rp.12.495	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KBB	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perengkapan kantor	3 Jenis	Rp.12.495
	Sub Kegiatan Jasa pelayanan Umum Kantor	KBB	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp.204.994	Sub Kegiatan Jasa pelayanan Umum Kantor	KBB	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp.204.994
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*KBB*	*Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*2 Kegiatan*	*Rp.192.980*	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*KBB*	*Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*2 Kegiatan*	*Rp.192.980*
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KBB	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabtan	11 Unit	Rp.47.170	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KBB	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabtan	11 Unit	Rp.47.170
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	KBB	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operational atau lapangan	19 Unit	Rp.145,810	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	KBB	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operational atau lapangan	19 Unit	Rp.145,810

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**
	Program Penanggulangan Bencana	**KBB**	**Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**Sedang**	**Rp.3.060.754**	**Program Penanggulangan Bencana**	**KBB**	**Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**Sedang**	**Rp.3.060.754**
	Kegiatan Pelayanah Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*KBB*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Benana*	*1%*	*Rp.695.134*	*Kegiatan Pelayanah Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	*KBB*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Benana*	*1%*	*Rp.695.134*
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	KBB	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	120 Orang	Rp. 695.134	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	KBB	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	120 Orang	Rp. 695.134
	Kegiatan Pelayanan Pecegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*KBB*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana*	*1%*	*Rp. 1.478.862*	*Kegiatan Pelayanan Pecegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*KBB*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana*	*1%*	*Rp. 1.478.862*
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	820 Orang	Rp. 343.303	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	820 Orang	Rp. 343.303
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2500 Orang	Rp. 12.292	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2500 Orang	Rp. 12.292
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	KBB	Jumlah warga negara yang mendapatkab peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 orang	Rp. 130.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	KBB	Jumlah warga negara yang mendapatkab peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 orang	Rp. 130.500
	Sub Kegiatan	KBB	Terlaksananya koordinasi	1 Kegiatan	Rp. 697.859	Sub Kegiatan	KBB	Terlaksananya	1 Kegiatan	Rp. 697.859

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		dalam penanganan Pasca Bencana			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		koordinasi dalam penanganan Pasca Bencana		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Terlaksananya pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp. 261.624	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Terlaksananya pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp. 261.624
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KBB	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	100 orang	Rp.33.282	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KBB	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	100 orang	Rp.33.282
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*KBB*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*100%*	*Rp.866.757*	*Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*KBB*	*Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*100%*	*Rp.866.757*
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Rp.402.800	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Rp.402.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Logistik bagi Korban Bencana Alam	500 Paket	Rp.317.357	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Logistik bagi Korban Bencana Alam	500 Paket	Rp.317.357
	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	KBB	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	30 Orang	Rp.166.600	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	KBB	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	30 Orang	Rp.166.600
Jumlah Total					**Rp.9.499.016**				**Jumlah Total**	**Rp.9.499.016**

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dilakukan pula telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL				

Hasil Musrenbang Tahun 2023 tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Tranformasi Ekonomo yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1 :	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP 1 :	Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru erbarukan (EBT)
		PP 2 :	Peningkatan kuantitas/ketahan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		PP 3 :	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		PP 4 :	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
		PP 5 :	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi
		PP 6 :	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi

		PP 7 :	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri
		PP 8 :	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
PN 2 :	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 1 :	Pembangunan Wilayah Sumatera
		PP 2 :	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
		PP 3 :	Pembangunana wilayah Nusa Tenggara
		PP 4 :	Pembangunan Wilayah Kalimantan
		PP 5 :	Pembangunan Wilayah Sulawesi
		PP 6 :	Pembangunana Wilayah Maluku
		PP 7 :	Pengembangan Wilayah Papua
PN 3 :	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1 :	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		PP 2 :	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		PP 3 :	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
		PP 4 :	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		PP 5 :	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		PP 6 :	Pengentasan Kemiskinan
		PP 7 :	Peningkatan Produktivitas dan daya saing

PN 4 :	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 1 :	Revolusi mentasl dan pembinaan ideology pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter
		PP 2 :	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban
		PP 3 :	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmonisasi sosial
		PP 4 :	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
PN 5 :	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 1 :	Infrastruktur Pelayanan Dasar
		PP 2 :	Infrastruktur Ekonomi
		PP 3 :	Infrastruktur Perkotaan
		PP 4 :	Energi dan Ketenagalistrikan
		PP 5 :	Transformasi Digital
PN 6 :	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP 1 :	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		PP 2 :	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		PP 3 :	Pembangunana Rendah

			Karbon
PN 7 :	Memperkuat stabilitas polhunkam dan transformasi pelayanan public	PP 1 :	Konsolidasi Demokrasi
		PP 2 :	Optimalisasi Kebijakan Luar Negri
		PP 3 :	Penegakan Hukum Nasional
		PP 4 :	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
		PP 5 :	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat mendukung kedalam Prioritas Nasioanal 6 (PN 6) yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan Program Prioritas 2 (PP 2) yaitu Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Selain itu berdasrakan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dilakukan melalui :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang meliputi :
    a. Penyusunan kajian Resiko Bencana;
    b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi :
    a. Penyusunana Rencana Penanggulangan Bencana;
    b. Pembuatan Rencana Kontijensi;
    c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi;
    d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
    e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana;
    f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi :
    a. Respon Cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis;
    b. Respon cepat darurat bencana;
    c. Aktivasi komandi penanganan darurat bencana;
    d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
    e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti yang telah ditetapkan di dalam RPD Kabupaten bandung Barat tahun 2024-2026 dan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026 dimana tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2024
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Sedang (0,49)
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP BPBD	B (68,85)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam hal program dan kegiatan ada perubahan dimana telah diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2020 dan Pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang mengakibatkan berubah pula program kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga perlu dilakukan mapping terkait program dan kegiatan. Dalam mendukung pemenuhan tercapaianya target yang telah di tetapkan dalam RPJMD ditambah juga adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten bandung Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Keluaran : Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Hasil : Terlaksananya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat**	**Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat**	**Kabupaten Bandung Barat**	**Sedang (0,49)**	**Rp 3.971.600.000**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 3.971.600.000**		**Sedang**	**Rp 6.961.500.000**
1	05	03	2,01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Keluaran :** Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Benana **Hasil :** Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warga negara yang berada di daerah rawan	Warga negara yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	1%	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000		2%	Rp 500.000.000
1	05	03	2,01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	03	2,01	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Seacara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Warga negara yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	100 orang	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000		200 orang	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Keluaran :** Persentase Warga Negara dan Aparatur yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana **Hasil :** Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana dan apratur yang menangani sub-urusan bencana	Warga negara yang berada di daerah rawan dan Aparatur yang menangani sub urusan bencana	Kabupaten Bandung Barat	1%	Rp 516.553.000				Rp 516.553.000		1%	Rp 3.009.053.000
1	05	03	2,02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	03	2,02	02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Warga negara dan Pelatihan yang berada di daerah rawan dan Aparatur yang menangani sub urusan bencana	Kabupaten Bandung Barat	50 orang	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000		250 orang	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02	03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Dokumen	Rp 6.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.500.000		1 Dokumen	Rp 26.500.000
1	05	03	2,02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas	Warga negara dan petugas yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		500 Unit	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Resiko Benacana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Resiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	Rp -
1	05	03	2,02	06	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		4 Kegitan	Rp 600.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	03	2,02	08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Relawan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung Barat	30 orang	Rp 110.053.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 110.053.000			30 orang	Rp 110.053.000
1	05	03	2,02	09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			1 Dokumen	Rp 292.500.000
1	05	03	2,02	10	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Aparatur dan Warga negara yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	200 orang	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000			500 orang	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02	11	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			-	Rp -
1	05	03	2,02	12	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelaurga di wilayah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			240 Kepala Keluarga	Rp 480.000.000
1	05	03	2,03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Keluaran :** Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Hasil :** Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	100%	Rp 2.855.047.000				Rp 2.855.047.000			100%	Rp 2.952.447.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	03	2,03	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	4 Dokumen	Rp 7.800.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.800.000		4 Dokumen	Rp 37.800.000
1	05	03	2,03	03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis kejadian Bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1257 orang	Rp 2.598.975.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.598.975.000		1257 orang	Rp 2.379.975.000
1	05	03	2,03	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	450 Orang	Rp 207.730.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 207.730.000		1000 orang	Rp 507.730.000
1	05	03	2,03	05	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Petugas penanganan darurat bencana	Kabupaten Bandung Barat	4 Laporan	Rp 40.542.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 40.542.000		4 Laporan	Rp 26.942.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	03	2,04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Keluaran :** Persentase keterlibatan Warga Negara yang dalam penatan system dasar penanggulangan bencana **Hasil :** Terlaksananya penataan system dasar penanggulangan bencana	Warga negara di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	100%	Rp 500.000.000				Rp 500.000.000		100%	Rp 500.000.000
1	05	03	2,04	01	Sub Kegiatan Penyusunanan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	02	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	03	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebenacanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	03	2,04	05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan hasil Binwas Penyelenggaraaan Penanggulangan Bencana	Petugas penanganan darurat bencana	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	08	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten dan lintas perangkat daerah Kabupaten yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kabutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P	BPBD dan OPD Terkait	Kabupaten Bandung Barat	100 orang	Rp. 250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp. 250.000.000		100 orang	Rp. 250.000.000
1	05	03	2,04	13	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal palinglama 1 (satu) tahun	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000		1 Dokumen	Rp 250.000.000
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Keluaran : Meningkatnya Nilai Sakip Hasil : Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat**	**Kabupaten Bandung Barat**	**B (68,85)**	**Rp 6.728.173.015**				**Rp 6.728.173.015**		**B (69,85)**	**Rp 6.480.773.015**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Hasil :**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	6 Dokumen	Rp 372.122.078				Rp 372.122.078		6 Dokumen	Rp 409.334.286
1	05	01	2,01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 27.112.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.112.500		1 Dokumen	Rp. 27.112.500
1	05	01	2,01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisai Realisasi Kinerja	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Laporan	Rp. 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp. 5.000.000		2 Laporan	Rp. 5.000.000
1	05	01	2,01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Hasil :**Terlaksananya Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	7 Dokumen	Rp 5.452.273.015				Rp 5.452.273.015		7 Dokumen	Rp 5.452.273.015
1	05	01	2,02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	19 orang	Rp 5.442.273.015	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.442.273.015		19 orang	Rp 5.442.273.015

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	6 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		6 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	**Kinerja** : Tersedianya Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah Daerah **Keluaran** : Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	4 kegiatan	Rp 20.000.000				Rp 20.000.000		4 kegiatan	Rp 20.000.000
1	05	01	2,03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunana Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000			2 Laporan	Rp 5.000.000
1	05	01	2,03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000			1 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah **Hasil :** Tersusuunya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	3 kegiatan	Rp 389.342.000				Rp 389.342.000			3 kegiatan	Rp 428.276.200
1	05	01	2,05	01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	46 unit	Rp 39.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 39.000.000			46 orang	Rp 39.000.000
1	05	01	2,05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 paket	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000			1 paket	Rp 50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	46 orang	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000		46 orang	Rp 100.000.000
1	05	01	2,06		Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah **Hasil :** Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	4 Kegiatan	Rp 884.905.800				Rp 884.905.800		4 Kegiatan	Rp 973.396.380
1	05	01	2,06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		1 Paket	Rp 2.500.000
1	05	01	2,06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		1 Paket	Rp 2.500.000
1	05	01	2,06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		1 Dokumen	Rp 2.500.000
1	05	01	2,06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 92.780.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 92.780.000		1 Paket	Rp 92.780.000
1	05	01	2,06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 12.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000		1 Paket	Rp 12.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.750.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.750.000		1 Dokumen	Rp 5.750.000
1	05	01	2,06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		12 Laporan	Rp 5.000.000
1	05	01	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	114 Laporan	Rp 450.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 450.000.000		114 Laporan	Rp 350.000.000
1	05	01	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Dokumen	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 609.760.000		12 Dokumen	Rp 2.500.000
1	05	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Keluaran :** Jumlah Pengadan Barang Milik Daerah **Hasil :** Tersedianya Barang Milik Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	8 jenis	Rp 334.325.800				Rp 334.325.800		10 Jenis	Rp 367.758.380
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-		-	Rp -
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Opertaional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 paket	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 paket	Rp 5.000.000
1	05	01	2,07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	3 Unit	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000		1 Unit	Rp 5.500.000
1	05	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Keluaran :** Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah **Hasil :** Tersedianya jasa dalam menunjang urusan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Kegiatan	Rp 339.425.688				Rp 339.425.688		2 Kegiatan	Rp 373.368.257
1	05	01	2,08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 12.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000		12 Laporan	Rp 12.000.000
1	05	01	2,08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		12 Laporan	Rp 2.000.000
1	05	01	2,08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		12 Laporan	Rp 2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Keluaran :** Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah **Hasil :** Tersedianya jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Kegiatan	Rp 347.510.000				Rp 347.510.000		2 Kegiatan	Rp 382.261.000
1	05	01	2,09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	11 Unit	Rp 110.420.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 110.420.000		11 Unit	Rp 110.420.000
1	05	01	2,09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	21 Unit	Rp 136.375.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 136.375.000		19 Unit	Rp 136.375.000
1	05	01	2,09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laiinnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	5 Unit	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		5 Unit	Rp 5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Unit	Rp 46.900.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 46.900.000		-	Rp -	
JUMLAH TOTAL										**Rp 10.699.773.015**				**Rp 10.699.773.015**			**Rp 13.442.273.015**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disertai dengan indicator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten bandung Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Keluaran : Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Hasil : Terlaksananya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat**	**Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat**	**Kabupaten Bandung Barat**	**Sedang (0,49)**	**Rp 3.971.600.000**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 3.971.600.000**		**Sedang**	**Rp 6.961.500.000**
1	05	03	2,01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Keluaran :** Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Benana **Hasil :** Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warga negara yang berada di daerah rawan	Warga negara yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	1%	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000		2%	Rp 500.000.000
1	05	03	2,01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	03	2,01	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Seacara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Warga negara yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	100 orang	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000		200 orang	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Keluaran :** Persentase Warga Negara dan Aparatur yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana **Hasil :** Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana dan apratur yang menangani sub-urusan bencana	Warga negara yang berada di daerah rawan dan Aparatur yang menangani sub urusan bencana	Kabupaten Bandung Barat	1%	Rp 516.553.000				Rp 516.553.000		1%	Rp 3.009.053.000
1	05	03	2,02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	03	2,02	02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Warga negara dan Pelatihan yang berada di daerah rawan dan Aparatur yang menangani sub urusan bencana	Kabupaten Bandung Barat	50 orang	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000		250 orang	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02	03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Dokumen	Rp 6.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.500.000		1 Dokumen	Rp 26.500.000
1	05	03	2,02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas	Warga negara dan petugas yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		500 Unit	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Resiko Benacana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Resiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	Rp -
1	05	03	2,02	06	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		4 Kegitan	Rp 600.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	03	2,02	08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Relawan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung Barat	30 orang	Rp 110.053.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 110.053.000		30 orang	Rp 110.053.000
1	05	03	2,02	09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		1 Dokumen	Rp 292.500.000
1	05	03	2,02	10	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Aparatur dan Warga negara yang berada di daerah rawan	Kabupaten Bandung Barat	200 orang	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000		500 orang	Rp 500.000.000
1	05	03	2,02	11	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	Rp -
1	05	03	2,02	12	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelaurga di wilayah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		240 Kepala Keluarga	Rp 480.000.000
1	05	03	2,03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Keluaran :** Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Hasil :** Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	100%	Rp 2.855.047.000				Rp 2.855.047.000		100%	Rp 2.952.447.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	03	2,03	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	4 Dokumen	Rp 7.800.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.800.000		4 Dokumen	Rp 37.800.000
1	05	03	2,03	03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis kejadian Bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1257 orang	Rp 2.598.975.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.598.975.000		1257 orang	Rp 2.379.975.000
1	05	03	2,03	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	450 Orang	Rp 207.730.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 207.730.000		1000 orang	Rp 507.730.000
1	05	03	2,03	05	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Petugas penanganan darurat bencana	Kabupaten Bandung Barat	4 Laporan	Rp 40.542.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 40.542.000		4 Laporan	Rp 26.942.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	03	2,04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Keluaran :** Persentase keterlibatan Warga Negara yang dalam penatan system dasar penanggulangan bencana **Hasil :** Terlaksananya penataan system dasar penanggulangan bencana	Warga negara di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	100%	Rp 500.000.000				Rp 500.000.000		100%	Rp 500.000.000
1	05	03	2,04	01	Sub Kegiatan Penyusunanan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	02	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	03	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebenacanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Warga negara korban bencana di wilayah Kabupetan Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	03	2,04	05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan hasil Binwas Penyelenggaraaan Penanggulangan Bencana	Petugas penanganan darurat bencana	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	-
1	05	03	2,04	08	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten dan lintas perangkat daerah Kabupaten yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kabutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P	BPBD dan OPD Terkait	Kabupaten Bandung Barat	100 orang	Rp. 250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp. 250.000.000		100 orang	Rp. 250.000.000
1	05	03	2,04	13	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal palinglama 1 (satu) tahun	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000		1 Dokumen	Rp 250.000.000
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Keluaran : Meningkatnya Nilai Sakip Hasil : Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat**	**Kabupaten Bandung Barat**	**B (68,85)**	**Rp 6.728.173.015**				**Rp 6.728.173.015**		**B (69,85)**	**Rp 6.480.773.015**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Hasil :**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	6 Dokumen	Rp 372.122.078				Rp 372.122.078		6 Dokumen	Rp 409.334.286
1	05	01	2,01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 27.112.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.112.500		1 Dokumen	Rp. 27.112.500
1	05	01	2,01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisai Realisasi Kinerja	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Laporan	Rp. 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp. 5.000.000		2 Laporan	Rp. 5.000.000
1	05	01	2,01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 6.712.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.712.500		1 Dokumen	Rp 6.712.500
1	05	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Hasil :**Terlaksananya Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	7 Dokumen	Rp 5.452.273.015				Rp 5.452.273.015		7 Dokumen	Rp 5.452.273.015
1	05	01	2,02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	19 orang	Rp 5.442.273.015	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.442.273.015		19 orang	Rp 5.442.273.015

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	6 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		6 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	**Kinerja** : Tersedianya Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah Daerah **Keluaran** : Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	4 kegiatan	Rp 20.000.000				Rp 20.000.000		4 kegiatan	Rp 20.000.000
1	05	01	2,03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunana Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		2 Laporan	Rp 5.000.000
1	05	01	2,03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 Dokumen	Rp 5.000.000
1	05	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah **Hasil :** Tersusuunya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	3 kegiatan	Rp 389.342.000				Rp 389.342.000		3 kegiatan	Rp 428.276.200
1	05	01	2,05	01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	46 unit	Rp 39.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 39.000.000		46 orang	Rp 39.000.000
1	05	01	2,05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 paket	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000		1 paket	Rp 50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	46 orang	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000		46 orang	Rp 100.000.000
1	05	01	2,06		Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	**Keluaran :** Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah **Hasil :** Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	4 Kegiatan	Rp 884.905.800				Rp 884.905.800		4 Kegiatan	Rp 973.396.380
1	05	01	2,06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		1 Paket	Rp 2.500.000
1	05	01	2,06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		1 Paket	Rp 2.500.000
1	05	01	2,06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		1 Dokumen	Rp 2.500.000
1	05	01	2,06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 92.780.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 92.780.000		1 Paket	Rp 92.780.000
1	05	01	2,06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Paket	Rp 12.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000		1 Paket	Rp 12.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Dokumen	Rp 5.750.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.750.000		1 Dokumen	Rp 5.750.000
1	05	01	2,06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		12 Laporan	Rp 5.000.000
1	05	01	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	114 Laporan	Rp 450.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 450.000.000		114 Laporan	Rp 350.000.000
1	05	01	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Dokumen	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 609.760.000		12 Dokumen	Rp 2.500.000
1	05	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Keluaran :** Jumlah Pengadan Barang Milik Daerah **Hasil :** Tersedianya Barang Milik Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	8 jenis	Rp 334.325.800				Rp 334.325.800		10 Jenis	Rp 367.758.380
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-		-	Rp -
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Opertaional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 paket	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		1 paket	Rp 5.000.000
1	05	01	2,07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	3 Unit	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000		1 Unit	Rp 5.500.000
1	05	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Keluaran :** Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah **Hasil :** Tersedianya jasa dalam menunjang urusan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Kegiatan	Rp 339.425.688				Rp 339.425.688		2 Kegiatan	Rp 373.368.257
1	05	01	2,08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 12.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000		12 Laporan	Rp 12.000.000
1	05	01	2,08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		12 Laporan	Rp 2.000.000
1	05	01	2,08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	12 Laporan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		12 Laporan	Rp 2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan						Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total			
1	05	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Keluaran :** Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah **Hasil :** Tersedianya jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	2 Kegiatan	Rp 347.510.000				Rp 347.510.000		2 Kegiatan	Rp 382.261.000
1	05	01	2,09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	11 Unit	Rp 110.420.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 110.420.000		11 Unit	Rp 110.420.000
1	05	01	2,09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	21 Unit	Rp 136.375.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 136.375.000		19 Unit	Rp 136.375.000
1	05	01	2,09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laiinnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	5 Unit	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000		5 Unit	Rp 5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Pendanaan							Target Capaian Kinerja	Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
										APBD Kab	APBD Prov	APBN	Dana Lain yang sah	Total				
1	05	01	2,09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	1 Unit	Rp 46.900.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 46.900.000		-	Rp -	
JUMLAH TOTAL										**Rp 10.699.773.015**				**Rp 10.699.773.015**			**Rp 13.442.273.015**	

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indicator), hasil keluaran yang terukur beserta rincian pendanaanya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyrakat yang sudah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan factor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 serta sebagai dasar evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah di tetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandung Barat, Juli 2023
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung Barat

Ir. JAROT PRASETYO
NIP. 196311181997031001

RENCANA KERJA 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

FEBRUARI 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan "**RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2024 (RENJA 2024)**".

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat (Renstra 2024 – 2026) yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang hendak dilaksanakan dalam upaya pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian selama satu tahun yaitu tahun 2024 yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan dinas yang menunjang tercapainya misi tersebut.

Dengan disusunnya Renja 2024 ini menjadi acuan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta bahan pengukuran akuntabilitas dan kinerja seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang tahun 2024. Sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Bandung Barat dapat terarah dan terencana sehingga tepat sasaran dan tercapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, Amin.

Bandung Barat, Febuari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bandung Barat

Dr. H.M LUKMANUL HAKIM, M.Si
NIP. 19690523 199002 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR ii

BAB. I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.2.1. Maksud I-6
1.2.2. Tujuan I-6
1.2.3. Sasaran I-7
1.2.4. Fungsi I-7
1.4. Sistematika Penulisan I-7
1.5. Pengertian dan Batasan I-8

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II-01
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II-01
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD II-14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-36

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-01
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Regional III-01
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III-02
3.3. Program dan Kegiatan III-6

BAB. IV PENUTUP IV-01

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Renja-DKPP) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat untuk periode satu (1) tahun kedepan, yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2024. Penyusunan Renja-DKPP Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaiman tugas pokok dan fungsinya "**Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian"**. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, dan Ketahanan Pangan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Ketahanan Pangan, pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka disusunlah Renja-DKPP Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Renja DKPP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (RKPD-KBB), Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 (Renstra DKPP 2024-2026) dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (RPD-KBB 2024-2026). Oleh karena itu penyusunan Renja DKPP dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja DKPP tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024-2026.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Telaahan terhadap rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
10. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11. Pembahasan forum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DKPP, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Organisasi dan tatalaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Barat ahun rencana;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan dari kecamatanbupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi.
12. Informasi lain terkait pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1.2. Pendekatan dan Proses Penyusunan Renja-SKPD

Terdapat lima pendekatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat yaitu :

1. Pendekatan *Politik,* yaitu bahwa penyusunan Renja SKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:
    a. Ada konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
    b. Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan Renja SKPD
    c. Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan Renja SKPD
    d. Ada pengesahan Renstra SKPD sebagai Peraturan Kepala SKPD yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

2. Pendekatan *Teknokratik,* Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas Dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Alur pemikiran strategis *(strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:
   a. Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
   b. Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak
   c. Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART *(specific, measurable, achievable,* result oriented*, time bound)*
   d. Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
   e. Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
   f. Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal SKPD)
   g. Ada prioritas program
   h. Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program
   i. Ada pagu indikatif program
   j. Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
   k. Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
   l. Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan ·
   m. Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
   n. Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan
3. Pendekatan *Demokratis-Partisipatif,* Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat *(stakeholder)* dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
   a. Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi, misi, dan agenda SKPD serta dalam proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD
   b. Ada kesetaraan antara *government* dan *non government stakeholder* dalam pengambilan keputusan
   c. Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
   d. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
   e. Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap Renstra SKPD
   f. Ada pelibatan dari media
   g. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program
4 Pendekatan *Atas-bawah (top-down),* Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:
   a. Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJM Nasional dan Renstra K/L
   b. Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD
   c. Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD

d. Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millennium Development Goals*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan sebagainya.

5. Pendekatan *Bawah-atas* (bottom-up), Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:
   a. Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
   b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
   c. Mempertimbangkan hasil Forum Multi *Stakeholder* SKPD
   d. Memperhatikan hasil proses penyusunan Renstra SKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian, pekebunan, hortikultura dan ketahanan pangan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja;
3. Musrenbang Desa;
4. Musrenbang Kecamatan;
4. Forum SKPD;
5. Musrenbang Kabupaten;
6. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas (Penetapan Renja SKPD).

Perumusan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mengacu kepada :

- RPJMN Tahun 2019-2024
- Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2019-2024
- RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
- Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
- Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2024-2026
- RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2028;
- RPD Kabupaten Bandung Barat Tahap Tahun 2024-2026;
- Ranwal RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026;
- Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun sebelumnya;
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kunci Kinerja (IKK)
- Hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional dan Forum SKPD dan
- Kebijakan – Kebijakan Nasional seperti Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabinet Nasional. Serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan pertanian, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknokratik, politis, konsultasi public dan atas bawa-bawah atas (*top down and button up*).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat Renja DKPP adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Hortikultura
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
17. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
18. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Badan Ketahanan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
21. Peraturan Badan Ketahanan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah 3 tahun 2019 tentang RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Bandung Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat;
31. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja DKPP dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 dan menjabarkan Renstra DKPP 2024-2026 ke dalam rencana tahunan sebagai pelaksananaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan terbaik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

Renja ini menjadi pedoman, acuan dan arahan bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan, pembangunan pertanian hortikultura, pembangunan pertanian perkebunan dan ketahanan pangan serta seluruh *stokeholder* satu tahun kedepan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024-2026;
2. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
5. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
6. Memberikan arah atau strategi pencapaian pembangunan satu tahun kedepan sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Bandung Barat antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan antar berbagai pemangku kepentingan;
7. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat.

1.2.3 Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Bandung Barat yang bersumber dana dari APBD Kabupaten selama tahun 2024.

1.2.3 Fungsi

Fungsi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 merupakan instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi :

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Sarana Pertanian, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dan Kesekretariatan.
2. UPTD lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan dan Alsintan Kabupaten Bandung Barat;
3. Dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
4. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Regional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV **PENUTUP**

1.6. Pengertian dan Batasan

1. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM* adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
2. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD* adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD* adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. *Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD* adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
5. *Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD* adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. *Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD* adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. *Visi* adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. *Misi* adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. *Strategi pembangunan* adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. *Kebijakan pembangunan* adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
11. *Program pembangunan* adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. *Standar Pelayanan Minimal, yang disingkat dengan SPM*, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. *Kinerja* adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. *Indikator kinerja* adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
15. *Sasaran (target)* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

16. *Keluaran (output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. *Hasil (outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18. *Pagu indikatif* merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
19. *Prakiraan maju* (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
20. *Stakeholder atau pemangku kepentingan* adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
21. *Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan* adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
22. *Forum SKPD* adalah forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas dan menyepakati rancangan Renja SKPD, dibawah koordinasi Kepala SKPD.
23. *Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor)* adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
24. *NGS* adalah singkatan dari Non-Government Stakeholder.
25. *Bintek* adalah singkatan dari Bimbingan Teknis.
26. *Agens Hayati* adalah organisme hidup (termasuk musuh alami berupa predator, parasitoid, dan pathogen) yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian OPT pada tanaman yang dibudidayakan.
27. *Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)* adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
28. *Bantuan Sosial* adalah transfer uang atau barang yang memberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga masyarakat melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
29. *Benih* adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau memproduksi tanaman pangan dan hortikultura.
30. *GAP (Good Agriculture Practices) atau cara budidaya yang baik dan benar* adalah panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman buah secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan.

31. *Kelembagaan Usaha* adalah kelembagaan petani merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha bisnis guna merespon pasar dan persaingan, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengefektifkan pelayanan yang menunjang pengembangan usaha agribisnis. Kelembagaan usaha menjadikan petani memiliki kemandirian usaha dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk mampu bersaing. Pengembangan kelembagaan di tingkat petani diarahkan untuk membentuk kelompok tani, asosiasi produsen atau koperasi usaha sehingga dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining position).
32. *Kelompok Tani* adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
33. *Konversi Lahan* adalah semua kegiatan untuk mencegah penurunan daya dukung lahan, menghindari erosi dan terbawanya unsur hara lahan, sehingga dapat melestarikan kualitas tanah dan tingkat kesuburannya.
34. *Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)* adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu dan menyebabkan kehilangan dan kerusakan pada tanaman yang dibudidayakan.
35. *Penyuluh Pertanian* adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
36. *Penyuluh Pertanian PNS* adalah pegawai negri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
37. *Pestisida* adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
38. *Pestisida Nabati* adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan.
39. *PHT (Pengendalian Hama Terpadu)* adalah sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan menerapkan berbagai macam cara pengendalian yang kompatibel (termasuk biologi, genetik, mekanis, fisik, kimia, dan peraturan) dengan cara seharmonis mungkin, guna mempertahankan populasi hama berada dalam suatu tingkat di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomi.
40. *PIP (Petugas Informasi Pasar)* adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang informasi, baik pada tingkat sentra produksi maupun pada tingkat sentra pasar, khususnya harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dipantau setiap hari.
41. *POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman)* adalah petugas lapang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
42. *Registrasi Kebun* adalah member status/identitas/apresiasi terhadap kebun-kebun yang telah menerapkan prinsip-prinsip GAP, SOP, dan PHT yang menunjukan bahwa produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik, aman dikonsumsi, memenuhi persyaratan lingkungan, dan mempertimbangkan keselamatan kerja.
43. *Sentra Produksi atau Sentra Komoditas* adalah suatu kawasan yang mencapai skala usaha ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis.

44. *SCM (Supply Chain Management) atau Pengelolaan Rantai Pasokan* adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir (konsumen). Konsep SCM dilakukan agar peningkatan daya saing tidak semata-mata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk, tetapi melalui pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penguatan kelembagaan dan penciptaan inovasi secara kontinyu dan sistematik.
45. *Sertifikasi Buah* adalah penilaian/apresiasi yang diberikan kepada petani/pemilik kebun atas penilaian terhadap usaha tani yang dilakukan. Hasil apresiasi atau penilaian terhadap objek tanaman dikelompokkan menjadi produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2),dan Prima Tiga (P-3).
46. *SOP (Standard Operating Procedure)* adalah petunjuk teknis baku yang singkat, jelas dan praktis dari setiap tahapan kegiatan untuk menjamin produk akhir yang dihasilkan berkualitas baik.
47. *Tanaman Biofarmaka* adalah tanaman yang dibudidayakan secara intensif dan dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai tanaman obat, baik manusia maupun untuk pengendalian hama/penyakit pada tanaman.
48. *Tanaman Buah* adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna, dan tanaman buah perdu.
49. *Tanaman Hias* adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman hias daun potong, tanaman hias bunga potong, tanaman hias pot, dan tanaman hias taman.
50. *Tanaman sayuran* adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman sayuran daun, tanaman sayuran buah, dan tanaman sayuran umbi.
51. *Varietas* adalah bagian dari satu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Renja DKPP) Tahun Lalu (2023) Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 (Renstra DKPP 2024-2026). Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan target kinerja kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 (*tiga puluh empat*) urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (*dua puluh enam*) urusan wajib dan 8 (*delapan*) urusan pilihan. Dari semua urusan tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk kedalam kelompok urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah urusan pilihan pertanian. Oleh karenanya Renja DKPP memuat 2 (dua) urusan yaitu urusan pilihan pertanian dan urusan wajib bukan pelayanan dasar Pangan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DKPP tahun-tahun sebelumya.

Urusan pemerintah daerah kabupaten yang menjadi kewenangan, tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. **Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi;
   a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan.
   b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan; dan

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan.

3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
   b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbang an pengambilan kebijakan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
   k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
   l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
   m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas :
   a. Seksi Distribusi Pangan; mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang distribusi pangan.
   b. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang cadangan pangan; dan
   c. Seksi Infrastruktur Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang infrastruktur pangan.

2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyeleng-garakan fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dibidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan; dan
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan.

3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanan tugas;
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas :
a. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kerawanan pangan;
b. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keamanan pangan; dan
c. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang konsumsi pangan.

3. Bidang Sarana Pertanian

(1) Bidang Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan

serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan; dan
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan dibidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan.

(3) Bidang Sarana Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Sarana Pertanian;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan;
c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan;
d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Sarana Pertanian terdiri atas :

a. Seksi Pengawasan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengawasan sarana pertanian;
b. Seksi Pendampingan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pendampingan sarana pertanian; dan
c. Seksi Pengelolaan SDG Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan SDG tumbuhan.

4. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

1) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;

b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian; dan
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian.

3) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian;
b. Seksi Tata Guna Air dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang tata guna air dan lahan; dan
c. Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penyuluhan pertanian.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Renstra DKPP), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.

   Misal : penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

   a. Terlambatnya pengesahan anggaran.
   b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
   c. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.
   d. Kenaikan indek harga satuan barang.
   e. Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana banjir, gempa bumi dsb).
   f. Kombinasi diantara a, b, c, dan d atau faktor lainnya.

   Faktor-faktor tersebut diatas menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada Renja-DKPP Tahun 2022.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil Review Evaluasi Pelaksanaan Renja-DKPP Tahun Lalu (2023) Berdasarkan Renstra DKPP Tahun 2018-2023, kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	CAPAIAN TAHUNAN			Akhir Periode Renstra	
					Target 2024	Realisasi 2024	%	Target	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	92.9	93,2				
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%		12,88				
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	%		76,36				
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP	Huruf Mutu	71.40/BB	76,01/ BB				

Analisis keberhasilan atau kegagalan disajikan per sasaran strategis dengan menampilkan parameter-parameter yang mempengaruhi penyebab keberhasilan atau kegagalan atas sasaran tersebut.

A. Terwujudnya Ketahanan Pangan

Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 sebesar 92,9 poin, melampaui target sebesar 82.5 poin, diperoleh dari hasil pengolahan database SUSENAS BPS 2022. Bila dibandingkan dengan Realisasi pada tahun 2022 yang berjumlah 76.8 mengalami kenaikan secara signifikan yaitu sebesar 16.1 poin.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat mulai memahami cara pola konsumi yang bergizi dan berimbang adapun faktor yag mendorong masyarakat agar bisa memahami cara pola konsumi yang bergizi dan berimbang salah satunya adalah memfasilitasi memsosialisaikan program B2SAH agar masyarakat bisa membuat menu dengan kaidah-kaidah yang bersumber dari pangan lokal seperti singkong, jagung dan lain-lain hingga masyarakat gemar mengkomsumsi berbagai macam menu pangan lokal. Berikut ini table PPH konsumsi tahun 2023 yang diolah dari data Susenas 2022 :

No	Kelompok Pangan	JUstivikasi		Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kuesioner	Tren		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	Aktual	Aktual	308,3	1	57,6	59,1	0,5	28,8	29,5	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	Aktual	Aktual	73,3	81	3,8	3,9	0,5	1,9	2,5	2,5	1,9
3	Pangan Hewani	Aktual	Aktual	115,0	255	11,9	12,2	2,0	23,7	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	Aktual	Aktual	28,5	255	11,8	12,1	0,5	5,9	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	Aktual	Aktual	0,8	5	0,2	0,2	0,5	0,1	1,0	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	Aktual	Aktual	31,0	75	3,5	3,6	2,0	7,0	10,0	10,0	7,2
7	Gula	Aktual	Aktual	14,1	55	2,5	2,6	0,5	1,3	2,5	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	Aktual	Aktual	240,6	119	5,5	5,7	5,0	27,6	30,0	30,0	28,4
9	Lain-lain	Aktual	Aktual	77,6	69	3,2	3,3	-	-	-	-	-
	Total				**2,155**	**100,0**	**102,6**		**96,3**	**98,8**	**100,0**	**92,9**

Keterangan *) = Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 Kkal/Kapita/Hari

Perbandingan Pola Konsumsi tahun 2022 dan 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari		Skor Aktual		Skor Maks	Skor PPH Konsumsi		Keterangan
		2022	2023	2022	2023		2022	2023	
1	Padi-padian	304,6	308,3	30,8	28,8	25,0	25,0	25,0	Tetap
2	Umbi-umbian	65,1	73,3	1,8	1,9	2,5	1,7	1,9	Naik
3	Pangan Hewani	99,3	115,0	20,6	23,7	24,0	20,3	24,0	Naik
4	Minyak dan Lemak	29,9	28,5	6,4	5,9	5,0	5,0	5,0	Tetap
5	Buah/ Biji Berminyak	0,8	0,8	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	Tetap
6	Kacang-kacangan	23,0	31,0	4,9	7,0	10,0	4,8	7,2	Naik
7	Gula	11,9	14,1	1,1	1,3	2,5	1,1	1,3	Naik
8	Sayur dan Buah	189,8	240,6	19,1	27,6	30,0	18,8	28,4	Naik
9	Lain-lain	61,0	77,6	-	-	-	-	-	
	TOTAL			**84,8**	**96,3**	**100,0**	**76,8**	**92,9**	Naik

Dari tabel perbandingan Pola Konsumsi tahun 2022 dengan 2023 terjadi kenaikan konsumsi pada semua kelompok pangan, kecuali konsumsi pada kelompok

pangan minyak dan lemak. Yang menggembirakan dari perbandingan data tersebut adalah semakin mendekatnya pada angka skor maksimal pada setiap kelompok pangan. Hal ini berarti masyarakat sudah mulai memahami akan pola pangan yang dianjurkan.

Parameter yang digunakan dalam upaya mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah :

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Akhir Periode Renstra	
1.	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	Point	76.8	82.5	92.9	82.5	112 %
		Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan	Point	83,14	86.00	77.3	86.00	89.88 %
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	10.00	10.00	10.00	40	50 %
		Penurunan jumlah desa rawan pangan	Desa	0	5	0	0 %	0 %
		Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Laporan	12	12	12	12	100 %
		Jumlah sertifikasi/ label produk pangan dan pangan aman	Sertifikat	5	5	4	25	80 %

Hasil pengukuran kinerja dari 5 indikator, semua indikator tercapai (80% - 120%). Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat untuk sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2023 dapat dikatagorikan **baik.**

1. Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan

Indikator kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2023 memiliki target 86 point dan pencapaian pada tahun 2023 sebesar 77,3 poin (88.9%). Berikut ini tabel pnghitungan PPH ketersediaan tahun 2023 :

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	1.272	53,0	0,5	26.49	25.00	25,0
2.	Umbi-umbian	79	3,3	0,5	1.64	1.64	2,5
3.	Pangan Hewani	221	9.2	2,0	18.39	18.39	24,0
4.	Minyak dan Lemak	270	11.2	0,5	5.62	5.00	5,0
5.	Buah/biji berminyak	1	0,0	0,5	0.01	0.01	1,0
6.	Kacang-kacangan	120	5.0	2,0	10.04	10.00	10,0
7.	Gula	36	1,5	0,5	0.75	0.75	2,5
8.	Sayuran dan buah	79	3.3	5,0	16.51	16.51	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-

	Jumlah	2.077	86.5		79.45	**77.30**	100,0

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan PPH ketersediaan yang sebesar 5.84 poin dari 83,14 point pada tahun 2022 menjadi 77,3 poin di tahun 2023. Perbandingan energi dan skor riil ketersediaan tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)		Skor Riil		Skor Maks	KET
		2022	2023	2022	2023		
1.	Padi-padian	1.202	1.272	25,04	26.49	25,0	Naik
2.	Umbi-umbian	74	79	1,53	1.64	2,5	Naik
3.	Pangan Hewani	164	221	13,68	18.39	24,0	Naik
4.	Minyak dan Lemak	292	270	6,09	5.62	5,0	Turun
5.	Buah/biji berminyak	3	1	0,06	0.01	1,0	Turun
6.	Kacang-kacangan	87	120	7,22	10.04	10,0	Naik
7.	Gula	31	36	0,64	0.75	2,5	Naik
8.	Sayuran dan buah	161	79	33,52	16.51	30,0	Turun
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**2.013**	**2.077**	**87,79**	**79.45**	100,0	**Turun**

Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 Kkal/Kapita/Hari

Nilai PPH Ketersediaan pangan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan tahun 2023 dengan menggunakan data dasar ATAP (Angka Tetap) tahun 2022 adalah 77,3 poin. Nilai tersebut menggambarkan bahwa rasio ketersediaan keberagaman pangan di wilayah Kabupaten Bandung Barat masih belum ideal. Skor PPH ketersediaan pangan riil diperoleh sebesar 79,45 poin, karena terdapat kelebihan energi dari perhitungan analisis neraca bahan makanan pada kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula. Namun, perhitungan skor PPH dibatasi oleh skor maksimal pada setiap kelompok pangan, dimana jika skor riil lebih besar nilainya, maka yang digunakan sebagai skor PPH adalah skor maksimal, sedangkan jika skor riil lebih kecil dari skor maksimal, maka yang digunakan sebagai skor PPH adalah skor riilnya. Sehingga hasil akhir skor PPH yang di justifikasi sesuai perhitungan pada analisis Neraca Bahan Makanan adalah 77,3 poin.

Penurunan skor PPH ketersediaan di tahun 2023 terlihat dari adanya Penurunan nilai energi total (kalori) dari sejumlah kelompok bahan pangan yaitu. Kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, serta sayuran dan buah memberikan kontribusi yang paling signifikan dalam Penurunan skor PPH ketersediaan, karena bobot konversi sayuran-buah memiliki nilai yang paling besar dalam perhitungan PPH diantara kelompok pangan yang lainnya. Namun kelompok pangan lainnya (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan

gula) menunjukkan terjadi tren penurunan nilai energi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat justifikasi perhitungan ekspor-impor pada aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) yang menghasilkan nilai PPH Ketersediaan menjadi lebih kecil dari nilai PPH Ketersediaan tahun sebelumnya.

2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) pada tahun 2023 memiliki target sebesar 10 ton dan terealisasi sebesar 10 ton beras premium atau 100 % yang disimpan di Gudang Badan Usaha Logistik (Bulog).

3. Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan

Indikator kinerja Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan pada tahun 2023 target sebanyak 5 desa yang rawan pangan prioritas 1 terealisasi sebanyak 0 desa yang masuk katagori desa rawan pangan prioritas 1 atau pencapaian 120%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat tidak ada desa rentan rawan pangan prioritas 1 dan prioritas 2 namun terdapat 39 desa rentan rawan pangan prioritas 3. dibandingkan dengan tahun 2022 yang masuk kedalam katagori prioitas 3 sejumlah 44 desa. Upaya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dalam menurunkan jumlah desa rentan rawan pangan pada tahun 2023 adalah dengan melakukan intervensi pangan pada daerah rentan rawan pangan. Intervensi dilaksanakan di Desa Saguling kecamatan Saguling (Prioritas 2) tanggal 1 Juni 2023 berupa beras premium sebanyak 3,5 ton untuk 141 KK atau 568 Jiwa penerima manfaat; di Desa/ Kecamatan Cililin sebanyak 2,2 ton untuk 359 jiwa penerima manfaat dan 3,6 ton untuk 630 jiwa di Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas (Prioritas 3). Kemudian di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang pada tanggal 12 Desember 2023 dengan komoditas yang disediakan berupa beras 2.675 Kg, Gula Pasir 535 Kg, Minyak Goreng 535 liter, Susu UHT 535 liter dan Sarden sebanyak 535 kaleng.

Faktor lain yang menjadi penyebab menurunnya jumlah desa rentan rawan pangan adalah karena adanya perbaikan dan perubahan parameter beberapa data yang digunakan untuk mengolah analisis peta tersebut dibanding tahun sebelumnya, seperti data masyarakat miskin dan akses rumah tangga tanpa air bersih di tingkat desa. Perolehan ini didapat dari analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2023.

4. Ketersediaan Informasi pasokan dan Akses pangan

Indikator kinerja Ketersediaan Informasi pasokan dan Akses pangan pada tahun 2023 memiliki realisasi sebesar 12 laporan atau tercapainya target kinerja 100% dengan penilaian kinerja baik. Pelaksanaan dalam pencapaian kinerja dengan melakukan analisis pasokan dan harga pangan yang dilakukan rutin oleh Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2023. Peninjauan langsung dan observasi ke lokasi 12 pasar kecamatan dan 4 pasar harian di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat rutin dilakukan setiap minggu oleh petugas enumerator Harga. Sehingga informasi penting seperti ketersediaan pangan, akses pasokan pangan, dan inflasi harga bisa langsung ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Daerah melalui laporan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5. Jumlah sertifikasi/ label produk pangan dan pangan aman

Indikator kinerja Jumlah sertifikasi/label produk pangan dan pangan aman pada tahun 2023 memiliki realisasi sebanyak 4 sertifikat dari target kinerja 5 Sertifikat (80%) dengan penilaian kinerja baik. Penilaian kinerja dilakukan dengan kegiatan labelisasi/regisitrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atas produk pertanian segar asal tumbuhan yang dihasilkan dan/atau dikemas di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selain kegiatan labelisasi/ registrasi, dilaksanakan juga pengawasan pangan aman dengan melaksanakan rapid tes / uji kandungan pestisida dan pengawet atas produk pangan di sejumlah pelaku usaha pengemasan pangan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Bandung Barat menghasilkan 4 sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai berikut :

No	Nama Pelaku / Poktan	Lokasi		Ruang Lingkup/ Komoditas	Jumlah Nomor Persetujuan Registrasi PSAT PDUK
		Kecamatan	Desa		
1	La Fresa	Lembang	Cibogo	Buah dan Sayuran Segar	7 Nomor Persetujuan Registrasi
2	Midori Farm	Lembang	Kayuammbon	Sayuran Segar	21 Nomor Persetujuan Registrasi
3	CV Soebi Pangan Nusantara	Lembang	Cibodas	Sayuran Segar	28 Nomor Persetujuan Registrasi
4	PT. ISM Fresh Berkah	Lembang	Kayuambon	Buah Beri-berian Segar	5 Nomor Persetujuan Registrasi

B. Analisis Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Capaian Indikator Program Urusan Pertanian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	CAPAIAN KINERJA			Akhir Renstra	
					Target 2023	Realisasi 2023	%	Target	%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	4.11	7.81	1,59 **)	20,36	7.81	20,36

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (termasuk di dalamnya sektor perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) pada tahun 2023 sementara belum dapat disajikan dikarenakan data PDRB dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data PDRB diperkirakan akan publis pada awal atau pertengahan Maret 2023.

Namun demikian kita dapat menganalisa dari Parameter-parameter yang menunjang terhadap pertumbuhan PDRB. Parameter-parameter yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Jumlah produksi Komoditas Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tan. Pangan, Tan. Hortikultura, Tanaman Perkebunan)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%	KET
1.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tan. Pangan, Tan. Hortikultura, Tanaman Perkebunan)	Ton	457.816	464.658	425.446	92	Baik
		Tangkai	35.605.770	88.613.470	117.643.635	132	Baik

Dari data yang disajikan kita berharap ada peningkatan capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian minimal diangka 7,5 %, dengan asumsi- asumsi capaian indikator perkomoditas pertanian seperti tersaji di bawah ini :

1.1 Jumlah Produksi Tanaman Pangan :
Capaian Produksi Tanaman Pangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Ket
		Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
	Produksi bahan pangan utama	**330.521**	**343.874**	**316.381**	**92**	**Baik**
1.	Padi (ton)	203.386	211.603	264.643	125	Baik
2.	Jagung (ton)	56.210	58.481	14.037	24	Kurang
3.	Kedelai (ton)	1.616	1.682	948	56	Kurang
4.	Kacang tanah (ton)	480	500	165	33	Kurang
5.	Ubi Kayu (ton)	57.631	59.960	31.966	53	Kurang
6.	Ubi Jalar (ton)	11.198	11.650	4.623	40	Kurang

Untuk komoditas pangan utama secara keseluruhan mengalami penurunan walaupun komoditas padi mengalami kenaikan produksi. Secara umum, penyebab menurunnya produksi adalah adanya anomali cuaca akibat dampak dari perubahan iklim dan iklim ekstrem sehingga mengakibatkan bergesernya pola tanam akibat fenomena iklim tersebut.

Penurunan produksi untuk komoditas kedelai, kacang tanah, ubi jalar lebih disebabkan karena faktor penerimaan hasil yang lebih rendah daripada biaya produksi sehingga petani tidak tertarik untuk menanam komoditas tersebut. Sebagian petani mensiasatinya dengan merubah varietas kedelai sehingga dapat dipanen muda seperti edamame yang harganya jauh lebih menguntungkan. Sedangkan untuk ubi jalar harga panen relative tidak berubah sedangkan masa panen nya lama sehingga kurang diminati para petani.

1.2 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura

Capaian Produksi Tanaman Hortikulura (sayuran dan buah-buahan, tanaman obat-obatan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				Ket
			Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
	Produksi Hortikultura						
1	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura (sayuran dan buah-buahan, tanaman obat-obatan)	Ton	82.394	112.726	107.886	96	Baik
2	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura (tanaman Hias)	Tangkai	35.605.770	88.613.470	117.643.635	133	Baik

Dari table diatas, realisasi produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan, tanaman obat-obatan) 2023 sebesar 107.886ton (96 %) tidak mencapai angka yang ditargetkan yaitu 112.726 ton. Namun melebihi realisasi 2022 dengan selisih 25.492 ton. Sedangkan untuk produksi tanaman hias menunjukkan tren meningkat yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun selama covid-19 dan pascacovid-19 (2020-2022) yaitu 117.643.635 tangkai (133 %) dari target 2023 sebanyak 88.613.470 tangkai. Bahkan jauh dari realisasi 2022 yang hanya 35.605.770 tangkai. Untuk menganalisa kinerja komuditas hortikultura dapat dilihat dari data berdasarkan dari subkomoditas hortikultura yaitu komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman obat-obatan dan komoditas tanaman hias di bawah ini.

1. **Jumlah Produksi Sayuran**

Tabel 3.1 Capaian Produksi Tanaman Hortikulura (sayuran)

No	Subkomoditas		Capaian Kinerja			Ket
		Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
	Sayuran :	***42.354***	***55.548***	***43.499***	***78***	***Cukup***
1.	Cabe Besar (ton)	16.727	17.686	8.369	47	Kurang
2.	Cabe Rawit (ton)	4.693	8.114	7.931	98	Baik
3.	Buncis (ton)	7.407	6431	6.073	94	Baik
4.	Paprika (ton)	1.431	9145	3.514	38	Kurang
5.	Tomat (ton)	8.731	11.160	13.898	125	Baik
6.	Kembang Kol (ton)	3.365	3.012	3.714	123	Baik

Untuk komoditas tanaman sayuran realisasi sebesar 78 % dari target 2023 sebesar 55.548 ton tetapi melebihi realisasi tahun 2022 sebesar 2,7 %. Dari enam indikator sayuran, cabe besar dan paprika tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 47 % dan 38 %. Tapi capaian produksi paprika masih diatas realisasi produksi paprika di tahun 2022. Kenaikan produksi paprika menunjukkan adanya semangat baru bagi para petani paprika pasca pandemic covid 19 yang cukup terasa dampaknya. Sedangkan untuk cabe besar penurunan produksi lebih disebabkan karena faktor eksternal dimana hampir sepanjang tahun 2023 terjadi anomali cuaca akibat dampak dari perubahan iklim dan iklim ekstrem yang dapat menurunkan produksi pertanian

Jumlah Produksi Buah-buahan

Capaian Produksi Tanaman Hortikulura (buah-buahan)

No	Subkomoditas		Capaian Kinerja			Ket
		Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
	Buah buahan:	**39.320**	***54.925***	***63.015***	***115***	***Baik***
1.	Jeruk (ton)	8.738	7.865	14.428	183	Baik
2.	Pisang (ton)	28.264	38.047	39.792	105	Baik
3.	Alpukat (ton)	2.318	9.013	3.717	41	Kurang

Untuk tanaman buah-buahan realisasi tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 63.015 ton atau 115 % dari target 54.925 ton. Walaupun

demikian terjadi penurunan yang sangat tajam pada komoditas alpukat, sehingga perlu ditanyakan apakah datanya sudah valid atau tidak.

Jumlah Produksi Tanaman Obat

Tabel 3.1.15 Capaian Produksi Tanaman Hortikulura (Tanaman Obat)

No	Subkomoditas		Capaian Kinerja			Ket
		Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
	Tanaman Obat :	**720**	***2.253***	***1.372***	***61***	**Cukup**
1.	Jahe (ton)	414	1.448	545	38	Kurang
2.	Kapolaga (ton)	306	806	827	103	Baik

Untuk komoditas obat produksi nya relative stagnan walupun ada kenaikan tapi relative kecil.

Jumlah Produksi Tanaman Hias

Tabel 3.1.16 Capaian Produksi Tanaman Hortikulura (Tanaman Hias)

No	Subkomoditas		Capaian Kinerja			Ket
		Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
	Tanaman Hias :	**35.605.770**	***88.613.470***	***117.643.635***	***133***	***Baik***
1.	Mawar (tangkai)	13.763.500	42.780.854	40.875.500	96	Baik
2.	Krisan (tangkai)	7.382.700	22.889.523	44.307.200	194	Baik
3.	Gerbera (tangkai)	14.459.570	22.943.093	32.460.935	141	Baik

Dari tiga subkomoditas unggulan tanaman hias, semuanya mengalami lompatan produksi yang sangat signifikan dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 walaupun realisasi 2023 tanaman mawar tidak memenuhi target yaitu 40.875.500 tangkai (96 %) dari target 42.780.854 tangkai. Tetapi mengalami lonjakan produksi sebesar 197 % dari produksi tahun 2022 yang sebanyak 13.763.500 tangkai. Demikian pula halnya dengan tanaman krisan yang mengalami lonjakan produksi sebesar 500 % dari 7.382.700 tangkai dan tanaman garbera sebesar 125 % dari 14.459.570 tangkai di tahun 2022. Peningkatan yang sangat tinggi pada tanaman hias yang meningkat, walaupun masih jauh dari jumlah produksi pada masa-masa sebelum pandemi tahun 2021, menunjukkan bahwa ada gairah dari petani untuk kembali membudidayakan tanaman hias yang sempat terpuruk sangat dalam pada tahun 2020 dan 2021.

1. **Jumlah produksi Tanaman Perkebunan**

Tabel 3.1.17 Capaian Produksi Tanaman Perkebunan

No	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja			Ket
		Realisasi 2022	Target 2023 *)	Realisasi 2023 *)	%	
Produksi Tan. Perkebunan		***9.119***	***8.060***	***6.722***	***83***	***Baik***
1.	Aren	2.993	531	1.535	290	Baik
2.	Cengkeh	314	308	280	91	Baik
3.	Karet	267	337	186	55	Kurang
4.	Kelapa Dalam	736	1439	638	44	Kurang
5.	Kopi Arabika	1.148	1255	1.100	88	Baik
6.	Kopi robusta	194	362	203	56	Kurang
7.	Lada	20	21	13	65	Cukup
8.	Panili	3	3	2	80	Baik
9.	The	2.782	3.130	2126	68	Cukup
10.	Serehwangi	663	676	636	94	Baik

Untuk komoditas perkebunan, dari sepuluh komoditas unggulan perkebunan yang dijadikan indikator hanya tiga komoditas yang realisasinya jauh dari target yang ditetapkan yaitu komoditas karet, kelapa dalam dan kopi robusta. Secara umum pencapaian realisasi komoditas perkebunan mencapai 83 % (6.722 ton) dari target 8.060 ton. Penurunan produksi karet disebabkan karena karena faktor eksternal dimana hampir sepanjang tahun 2023 terjadi anomali cuaca akibat dampak dari perubahan iklim dan iklim ekstrem yang dapat menurunkan produksi pertanian.

C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Indikator Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%	KET
3.	Nilai Sakip	Angka Mutu	73.52/ BB	A			

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dari urusan pangan yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan dan meningkatnya kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi, dapat diturunkan menjadi sasaran yang lebih kecil lagi cakupannya yaitu Nilai Evaluasi Sakip yang dapat diukur dengan menggunakan beberapa parameter yang mendukung untuk pencapaian Nilai Sakip yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.20 Capaian Parameter Pendukung Nilai SAKIP

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	% Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90	92	102	Baik
2	% Administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100	95,14	95,14	Baik

3	Jumlah SPM yang harus diterbitkan	100	100	100	Baik
4	Jumlah laporan keuangan dan aset tersusun	100	100	100	Baik
5	Jumlah laporan capaian kinerja tersusun	100	100	100	Baik
6	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	100	100	100	Baik

1. Analisa Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik :

Indicator ini dianalisis dengan melihat perbandingan antara jumlah keseluruhan asset yang ada dengan jumlah asset yang berada dalam kondisi layak pakai. Berdasarkan data yang ada bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki jumlah total asset tetap sebanyak 4.597 buah yang tersebar baik di kantor dinas, kantor UPTD dan Kantor BPP. Dari keseluruhan asset tersebut yang masih layak pakai kurang lebih berada diangka 4.230 buah baik kendaraan dinas, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan lain sebagainya. Bila dipersentasekan ada diangka 92 %.

2. Analisa Persentase Administrasi kepegawaian yang tepat waktu :

Indikator ini dianalisis berdasarkan jumlah pengajuan berkas-berkas kepagawaian yang diajukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2023. Dari 144 berkas pengajuan yang terdiri dari berbagai macam jenis seperti Surat Keputusan Pensiun, Kenaikan Gaji berkala, Izin Belajar, Jabatan Fungsional, SKP dan kenaikan pangkat yang selesai hingga keluar Surat Keputusannya yaitu berupa 137 berkas sehingga persentase kinerja untuk parameter ini sebesar 95,14 %.

3. Jumlah SPM yang harus diterbitkan

Indicator ini dianalisis pencapaiannya dengan melihat jumlah SPM (Surat Perintah Membayar) yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengeluarkan 216 SPM (Surat Perintah Membayar) yang diperuntukkan untuk Pengeluaran Belanja Operasi dan Belanja Modal.

4. Jumlah laporan keuangan dan aset tersusun

Indicator ini dinilai dengan melihat jumlah laporan keuangan dan asset yang telah disusun selama tahun 2023. Selama tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyelesaiakan 3 laporan keuangan dan 3 laporan asset. Ketiga laporan keuangan tersebut diantaranya, laporan keuangan semester 1 dan 2 serta laporan akhir tahun. Sedangkan laporan asset yang telah tersusun yaitu laporan keuangan semester 1 dan 2 serta laporan akhir tahun.

5. Jumlah laporan capaian kinerja tersusun

Indicator ini dianalisis dengan membandingkan jumlah laporan capaian kinerja yang harus dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2023. Laporan capaian kinerja selama tahun 2023 diantaranya adalah Laporan Realisasi Fisik dan Non-fisik sebanyak 12 laporan, Laporan RKPD 4 buah, LKPJ Tahun 2023, LPPD 2023, Lakip 2023, Laporan DAK 4 buah. Dari keseluruhan laporan tersebut apabila dijumlahkan terdapat 23 Laporan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2023. Keseluruhan laporan kinerja tersebut telah dapat terselesaikan baik pada tahun 2023 maupun di awal tahun 2023.

6. Jumlah dokumen perencanaan tersusun

Indicator kinerja dianalisa dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang seharusnya ada pada tahun 2023. Dokumen perencanaan yang ada pada tahun 2023 diantaranya Dokumen Renja Tahun 2023. Kedua dokumen perencanaan tersebut dapat tersusun pada awal dan akhir tahun 2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DKPP, kajian hasil evaluasi pelaksanaan DKPP, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra DKPP 2018-2023, maka dapat dirumuskanlah isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPP Kabupaten Bandung Barat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPP, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DKPP tahun sebelumnya (2023), serta capaian kinerja Renstra DKPP 2018-2023.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Hasil Analis Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Tingkat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, komoditas perkebunan dan komoditas kehutanan sebagian besar telah mencapai target yang telah ditentukan dan sebagian kecil ada target yang belum tercapai.

Telah tercapainya swasembada beras, berkontribusi dalam pencapaian Jawa Barat Surplus Beras

2. Kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat petani dengan meningkatkan pendapatan melalui pengembangan agrobisnis, agroindustry, aneka usaha pertanian dan kehutanan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan petani, penguatan kelembagaan dan akses permodalan.
3. Peningkatan daya saing produk pertanian dan nilai tukar petani (NTP) melalui peningkatan mutu, promosi produksi unggulan daerah dan penanganan rantai pasar serta peningkatan daya serap pasar
4. Peningkatan dan penguasaan teknologi dan inovasi pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam upaya mendukung peningkatan produksi
5. Peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) baik konsumsi maupun ketersediaan
6. Penyediaan Informasi Harga Kebutuhan Pangan Masyarakat
7. Pengentasaran daerah rawan pangan
8. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dan
9. Sertifikasi keamanan pangan dalam rangka menyediakan pasokan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DKPP 2013-2018 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DKPP, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk DKPP berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Barat.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program / kegiatan untuk Disranbunhut. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-VI.C.7.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018**.**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			20.207.211.564
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.553.164.564
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			118.600.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD DKPP Renja DKPP	1 Kegiatan 1 Dokumen	54.610.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	7.615.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKAP DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	10.290.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	4.660.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPA DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	7.700.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Monev DKPP Tahun 2022 LKPJ DKPP Tahun 2022 RKPD DKPP Tahun 2022	4 Laporan 1 Dokumen 4 Laporan	11.125.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP DKPP Tahun 2022 LPPD DKPP Tahun 2022	1 Dokumen 1 Dokumen	22.600.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.643.590.564
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN DKPP Tahun 2022 Tunjangan ASN DKPP Tahun 2022	1 Tahun 1 Tahun	14.595.914.564
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jasa Administrasi	1 Tahun	14.230.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	9.498.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan triwulan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	23.948.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			424.250.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kaos Olah Raga Pakaian Kerja Lapangan	330 Pcs 255 Stel	207.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bahan PDH Kerudung	660 Meter 75 Pcs	216.750.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			683.500.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer Desktop Laptop	3 Unit 9 Unit	197.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	66.000.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Paket	175.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	1 Paket	90.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/ majalah	720 eksemplar	55.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan minum Rapat Makan Minum Tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar	360 Box 240 Box 1 Tahun 1 Tahun	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			158.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda Dua	3 Unit	75.000.000
Pengadaan Mebel	Kursi Kerja Kursi Rapat Lemari Arsip Meja Kerja	4 Unit 50 Unit 4 Unit 5 Unit	83.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242.750.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa Administrasi Surat Menyurat Materai	1 Tahun 500 Lembar	4.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Internet Jasa Listrik Jasa Sumber Daya AIr	3 Lokasi 17 Lokasi 3 Lokasi	190.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	48.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			282.473.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	71.153.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional Roda Dua Kendaraan Operasional Roda Empat	23 Unit 5 Unit	198.050.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Laptop/ Komputer Mesin Fotocopy Printer	3 Unit 8 unit 1 Unit 5 Unit	13.270.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			466.600.000
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			466.600.000
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Dokumen lumbung sosialisasi	1 Buah 10 unit 2 Kegiatan	167.500.000
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dokumen lumbung sosialisasi	1 Buah 10 unit 2 Kegiatan	167.500.000
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dokumen Kecamatan sosialisasi	1 Buah 1 Kegiatan 2 Kegiatan	57.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dokumen Kelompok sosialisasi	2 Buah 5 kelompok 3 Kegiatan	74.600.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.224.974.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			837.400.000
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen sosialisasi Teknologi Informasi	2 Buah 3 Kegiatan 2 Aplikasi	100.000.000
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen Kecamatan sosialisasi	1 Buah 16 Sekolah 16 Kegiatan	137.400.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dokumen Kecamatan sosialisasi	1 Buah 16 kecamatan 2 Kegiatan	100.000.000
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Kecamatan sosialisasi	1 Buah 16 Pasar 2 Kegiatan	200.000.000
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dokumen Kecamatan sosialisasi	1 Buah 16 kecamatan 2 Kegiatan	100.000.000
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dokumen sosialisasi TTI C	1 Buah 2 Kegiatan 1 Unit	200.000.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			450.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen Kecamatan sosialisasi	1 Buah 1 kecamatan 2 Kegiatan	100.000.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen Kebutuhan Pangan Lokal Kebutuhan Pangan Lokal sosialisasi Dan Koordinasi	1 Buah 1 Kabupaten 2 Kegiatan	100.000.000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	CPPD	25000 Kg	250.000.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			937.574.000
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	bimtek penyusunan target konsumsi (PPH Konsumsi) perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas ke kota bandung	60 ok 12 kali 5 kali	238.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	belanja perlengkapan peserta belanja workshop inovasi pangan lokal perjalanan dinas luar daerah	300 Paket 40 ok 88 ok	539.465.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	evaluasi pencapaian konsumsi pangan perjalanan dinas dalam daerah perjalanan ke kota bandung rapat koordinasi pencapaian konsumsi pangan rapat sinkronisasi pencapaian konsumsi pangan	30 ok 60 kali 30 kali 30 ok 30 ok	160.109.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			523.767.200
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			260.000.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG Peta FSvA	1 dokumen 1 dokumen	260.000.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			263.767.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	perjalanan dinas dalam daerah	47 kali	31.659.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek paket sembako	1 kali 400 Paket	232.108.200
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			438.705.800
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			438.705.800
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Prima 3 Sosialisasi PSAT dan Prima 3	15 Paket 1 kali	128.359.500
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Prima 3 Sertifikat PSAT	20 Paket 10 Paket	199.167.800
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	pengadaan peralatan mini Lab	10 unit	111.178.500

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			4.388.703.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.198.703.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.500.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Koordinasi Kartu Tani Koordinasi Pengawsan Pupuk dan Pestisida Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsida dan Pengawasan Pupuk Pestisida Sarana produksi pertanian (pupuk nonsubsidi dan pestisida) Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi (e-verval) penyaluran pupuk bersubsidi Sosialisasi dan Monitoring perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi (e-rdkk)	16 Kecamatan 12 Kali 16 Kecamatan 3 Paket 12 Kali 4 Kali	500.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terfasilitasinya alsin Sarana Pascapanen Kopi Primer Terfasilitasinya alsin Sarana	3 Jenis 2 Jenis 3 Jenis	1.000.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			698.703.000
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sertifikasi Tanaman Hortikultura Sertifikasi Tanaman Perkebunan	1 komoditi 1 Komoditi	112.956.250
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bahan Kimia Laboratorium Kultur Jaringan	1 Paket	72.701.750
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura Bantuan Bibit Tanaman Pangan Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Belanja Stok Benih/Bibit	4 Komoditi 1 Komoditas 2 Komoditi 1 Paket	513.045.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			0
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1.039.950.000
Pengembangan Prasarana Pertanian			525.547.500
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	perbup lahan pertanian berkelanjutan peta lahan pertanian berkelanjutan	1 dokumen 1 dokumen	450.547.500
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	data master plan kawasan kopi peta master kawasan kopi	1 dokumen 1 dokumen	75.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian			514.402.500
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	rehabilitasi jaringan irigasi tersier	2 paket	287.780.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	pembangunan packing house	1 unit	226.622.500
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			190.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			190.000.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sarana Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	2 Paket	90.000.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sarana Produksi Pertanian untuk Recovery Dampak Perubahan Iklim	2 Paket	100.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			960.050.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			960.050.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	bimtek programa BOP penyuluh diklat penyuluh sewa BPP sewa lahan BPP	9 kali 1 tahun 1 angkatan 4 unit 5 unit	885.050.000
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	penyediaan sarana penyuluhan	1 tahun	75.000.000
TOTAL			24.595.914.564

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan kepada masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari lintas SKPD serta hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Forum Gabungan, Pra-Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten.

Tabel T-VI.C.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Bandung Barat, Urusan Pangan dan Pertanian

No.	Bidang	Jumlah Usulan PIKW	Anggaran PIKW	Jumlah Usulan Masyarakat	Anggaran Usulan Masyarakat	Total
1	Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5	210.000.000	1	70.000.000	280.000.000
2	Konsumsi dan Keamanan Pangan	18	600.500.000	1	100.000.000	700.500.000

3	Sarana Pertanian	101	2.937.441.931	39	1.610.000.000	4.547.441.931
4	Prasarana dan penyuluhan Pertanian	9	622.468.431	2	210.000.000	832.468.431
5	UPTD Perbenihan	3	68.000.000			68.000.000
6	UPTD Penyuluhan	2	50.000.000			50.000.000
TOTAL		138	4.488.410.362	43	1.990.000.000	6.478.410.362

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) selama tahun 2023 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2018. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, **ketahanan pangan**, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan. Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan

Sedangkan untuk kabupaten, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten

Tabel T-VI.C.11
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sektor Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Terkait Tugas Pokok dan Fungsi DKPP.

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	**KEBIJAKAN NASIONAL**		
	Sektor Pertanian		
1	Mempertahankan swasembada beras berkelanjutan	Renstra Kementan	
2	Mempertahankan swasembada jagung berkelanjutan	Renstra Kementan	
3	Pencapaian swasembada kedelai	Renstra Kementan	

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada & Swasembada Berkelanjutan	Renstra Kementan	
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	Renstra Kementan	
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan ubi-ubian	Renstra Kementan	
	- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Renstra Kementan	
	- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).	Renstra Kementan	
	- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	Renstra Kementan	
5	Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk Tanaman hortikultura berkelanjutan	Renstra Kementan	
	- Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Buah.	Renstra Kementan	
	- Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka.	Renstra Kementan	
	- Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Hias.	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura.	Renstra Kementan	
6	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Renstra Kementan	
	- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Renstra Kementan	
	- Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Renstra Kementan	
7	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Dan Ekspor Hasil Pertanian	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Mutu dan Standarisasi	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Pemasaran Domestik	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Pemasaran Internasional	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Usaha dan Investasi	Renstra Kementan	
	- Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Renstra Kementan	
8	Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani	Renstra Kementan	
	- Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.	Renstra Kementan	
	- Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.	Renstra Kementan	

b. Telaahan kebijakan Provinsi

Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal), Rencana Kerja SKPD Provinsi terkait (Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat serta Renja DKPP yang direncanakan.

Tabel T-VI.C.11
Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Terkait Tugas Pokok dan Fungsi DKPP.

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
B	**KEBIJAKAN PROVINSI**		
	Sektor Pertanian		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Renstra DTPH*)	2018-2023
2	Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	Renstra DTPH	
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman	Renstra DTPH	
4	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian	Renstra DTPH	
	Sektor Perkebunan	Resntra Disbun*)	2018-2023
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Resntra Disbun	
2	Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	Resntra Disbun	
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman	Resntra Disbun	

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian	Resntra Disbun	
	Sektor Ketahanan Pangan		
1	Peningkatan Ketersediaan dan Penanggulangan Rawan Pangan	Renstra DKPP*)	2018-2023
2	Sumber Daya dan Cadangan Pangan	Renstra DKPP	
3	Penguatan Pemasaran dan Distribusi Pangan	Renstra DKPP	

*) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKPP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan selama lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran disajikan dalam bentuk pernyataan. Perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar.G-VI.C.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA

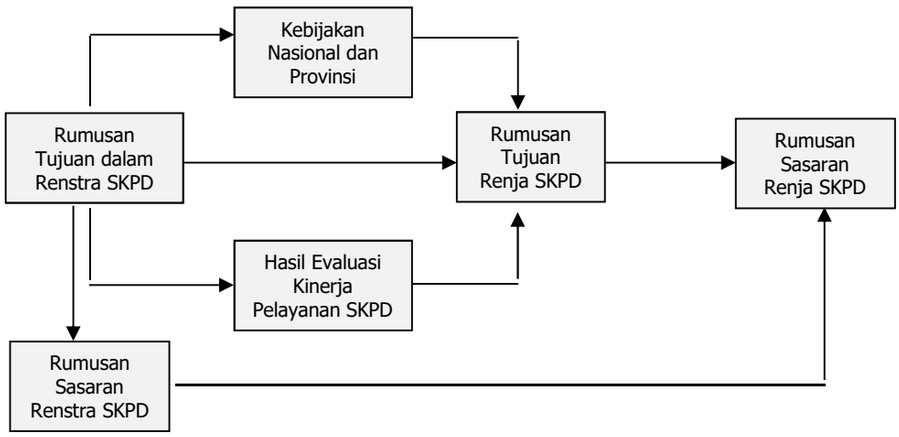

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Sasaran : Menurunnya angka stunting
Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Sasaran : Meningkatnya Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Tujuan 3 : Meningkatnya Ketahanan Pangan
Sasaran : Meningkatnya Desa Tahan Pangan
Tujuan 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rumusan Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

Strategi 1 : Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Kebijakan :
1. Pemberdayaan masyarakat mengenai pola konsumsi dengan khaidah B2SAH
2. Peningkatan Kualitas Pengawasan Makanan
3. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terutama ibu hamil, Baduta (bayi Di bawah 2 th) dan balita

Strategi 2 : Peningkatan Produksi Pertanian

Kebijakan :
1. Peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian
2. Mengurangi tingkat kehilangan hasil panen
3. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian
4. Penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian
5. Pengendalian hama terpadu (PHT) melalui Sekolah Lapang
6. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
7. Terjaminnya pasokan air untuk pertanian
8. Penguatan Kemitraan
9. Regenerasi Pelaku Pertanian

Strategi 3 : Persentase Desa Tahan Pangan

Kebijakan :
1. Peningkatan ketersediaan pangan
2. Penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat Miskin
3. Diversifikasi pangan dan Jaminan Keamanan Pangan Segar
4. Menjaga stabilitas harga pangan pokok
5. Peningkatan Cadangan Pangan
6. Pemanfaatan Pekarangan Rumah
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pangan

Strategi 4 : Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan :
1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. peningkatan disiplin aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD

Tabel. T-III.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bandung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun	Keterangan
			2024	
1	2	3	4	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Menurunnya Angka Stunting	Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77,2 poin	Realisasi PPH Konsumsi 2023 sebesar 92.9 poin sehingga target 2024 diubah menjadi 93,2 poin
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Meningkatnya Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	12,88 %	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya Desa Tahan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	76,36 %	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP	76,01/ BB	

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat **menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.**

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut rancangan

awal RKPD Kabupaten Bandung Barat, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Dalam Perumusan program dan kegiatan adalah : (1) hasil review terhadap rancangan awal RKPD; (2) Sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi; (3) prakiraan maju pada tahun sesudah tahun rencana; (4) kebutuhan pagu indikatif dengan mempertimbangkan angka inflasi; (5) sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan; (6) Memberikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran (a) program/kegiatan lanjutan; (b) program/kegiatan penanggulangan bencana; (c) program penanggulangan kemiskinan; (d) program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan (e) program/kegiatan prioritas hasil analis kebutuhan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   - Pengentasan kemiskinan,
   - Penanganan stunting,
   - Penangangan inflasi
   - Pencapaian SPM,
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   - Pengembangan daerah terisolir,
   - Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rancangan Prioritas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas pertanian untuk mempertahankan ketahanan pangan daerah.
2. Penanganan Stunting.
3. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim.
4. Penangan Inflasi.
5. pembangunan dan rehabilitasi Prasarana pangan dan pertanian
6. Peningkatan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani / penyuluh
7. Peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
8. peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian

Rencana Program Nasional Urusan Pertanian

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, & Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Berkelanjutan
   a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
   b. Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
   c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
   d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
   e. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
2. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk Tanaman hortikultura berkelanjutan
   a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Buah.
   b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka.
   c. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Hias.
   d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.
   e. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura.
3. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
   a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
   b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
4. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, & Ekspor Hasil Pertanian
   a. Pengembangan Mutu dan Standarisasi
   b. Pengembangan Pemasaran Domestik
   c. Pengembangan Usaha dan Investasi
   d. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
5. Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani
   a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.
   b. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

Rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan serta rencana pagu indikatif dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024 (Pagu Indikatif)

Uraian	Jumlah Program	Jumlah SubKegiatan	Pagu Anggaran Indikatif (Rp)
SKPD : DKPP			**20.044.007.851**
PENDAPATAN			**0**
BELANJA			**20.044.007.851**
- Belanja Urusan Bidang Pangan	3	7	345.062.100
- Belanja Sekretariat	1	8	17.487.075.458
- Belanja Urusan Bidang Pertanian	3	8	2.211.870.293

Rekapitulasi kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan seksinya masing-masing berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bidang Konsumsi dan KeamananPangan, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Kode rekening	**Sub kegiatan**	**uraian**	**Jumlah Anggaran**
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			**145.018.400**
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantuan P2L 16 Kecamatan, gebyar P2L	82.557.400
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan SKPG	43.161.000
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat PSAT	19.300.000

Rekapitulasi kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan seksinya masing-masing berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024

Kode rekening	**Sub kegiatan**	**uraian**	**Jumlah Anggaran**
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			**200.043.700**
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	PPH Ketrsediaan	12.575.000

2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan harga pangan pokok	25.260.000
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pemerintah Daerah	142.210.000
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran Bahan Pangan Pokok	19.998.700

Rekapitulasi kegiatan Bidang Sarana Pertanian sesuai dengan seksinya masing-masing berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bidang Sarana Pertanian, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Kode rekening	Sub kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran
Bidang Sarana Pertanian			**494.030.000**
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bantuan Pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi	129.532.000
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan Alat Mesin pertanian, bantuan alat pengolahan hasil pertanian	321.962.200
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Benih dan Bibit tanaman	42.535.800

Rekapitulasi kegiatan Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan seksinya masing-masing berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024

Kode rekening	Sub kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran
Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian			**1.977.505.975**
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	JUT	1.219.999.994
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Green House	64.965.560
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	JIUT	432.874.739
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Sewa Kantor dan Lahan BP3K	59.762.082
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		199.903.600

Rekapitulasi kegiatan Sekretariat sesuai dengan seksinya masing-masing berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Sekretariat, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Kode rekening	Sub kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran
Sekretariat			**17.227.409.776**
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, RKA, DPA	33.164.400
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip, LPPD, LKPJ	8.602.000
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	16.792.641.814
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK dan bahan cetak	63.592.122
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat, koordinasi dan konsultansi	141.861.600
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Langganan Listrik, air, internet 17 Kantor	112.947.840
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Ess II	9.500.000
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 4 roda 3 dan roda 2	65.100.000

Rincian program prioritas Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel :
Rekapitulasi Program, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2023 Kabupaten Bandung Barat

No.	Uraian	Jumlah SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
I.	**BELANJA OPERASI**	**52**	**20.044.007.851**
a.	**Belanja Kesekretariatan**	**8**	**17.227.409.776**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8	17.227.409.776
b.	**Belanja Bidang Pangan**	**7**	**345.062.100**
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6	325.762.100
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	19.300.000
c.	**Belanja Bidang Pertanian**	**8**	**9,633,922,900**

No.	Uraian	Jumlah SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3	**494.030.000**
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	**1.717.840.293**
6	Program Penyuluhan Pertanian	2	**259.665.682**

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 (Renja-DKPP 2024) ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 (RKPD-KBB 2023) dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 (Renstra-DKPP 2024-2026) dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (RPD-KBB 2024-2026) dengan mereview Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Renja Distan TP 2024), Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Renja Disbun 2024), Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Renja DKPP 2024) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (RKPD-Jabar 2024) serta Rencana Kerja Pembangunan Nasional, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Renja-DKPP 2024 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, indikator, program, kegiatan serta pendanaannya yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi DKPP dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki DKPP.

Penyusunan Renja-DKPP 2024 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan lingkungan strategis baik di intern DKPP maupun di lingkup daerah.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan diantaranya :

1. Rencana Renja-DKPP 2024 ini merupakan tahun pertama dari Renstra DKPP Tahun 2024-2026.
2. Dalam pencapaian Renstra DKPP 2018-2023, bebarpa indikator target telah tercapai dan beberapa indikator melebihi target, beberapa indikator dalam proses pencapaian target sesuai rencana dan beberapa lagi masih kurang dari target.
3. Pencapaian Renja-DKPP 2024 tidak terlepas dari tersedianya pendanaan dan seandainya Platfon anggaran tidak mencukupi, beberapa sekenario telah disiapkan diantaranya dengan mengupayakan untuk adanya pendanaan dari provinsi dan pusat serta meningkatkan swadaya masyarakat.
4. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta payung hukum yang menaunginya.

Dengan tersusunnya Renja-DKPP 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang akan sekaligus mencapai visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 **yaitu "KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN"**

Demikian Renja-DKPP 2024, semoga bermanfaat dan kami haturkan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, semoga pembangunan pertanian dapat menciptakan keadilan dan pemerataan di DKPP.

BANDUNG BARAT
BERKAH
BERSAMA KITA KUAT BERSATU KITA BANGKIT

RENCANA KERJA

KECAMATAN NGAMPRAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA
PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Ngamprah Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Ngamprah dalam kurun waktu tahun 2024.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngamprah tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Ngamprah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ngamprah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Revieu Renstra Kecamatan Ngamprah tahun 2021-2024.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Ngamprah, Januari 2024

CAMAT NGAMPRAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN NGAMPRAH

AGNES VIRGANTY,S.STP, M.Si
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19820911 200012 2 001

D A F T A R I S I

			Halaman
BAB I.		**PENDAHULUAN .....**	**1**
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Visi Misi Kecamatan Ngamprah ……	2
	1.3.	Landasan Hukum ….....	2
	1.4.	Tujuan dan Sasaran strategis …….	3
	1.5.	Proses Penyusunan Renja ……....	10
	1.6.	Sistematika ……..……..……	11
BAB II.		**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**	**13**
	2.1.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Secara Makro …….....	13
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan Realisasi Renja Tahun Lalu …….....	14
	2.3.	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
	2.4.	Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan	15
BAB III.		**RENCANA KERANGKA KEGIATAN KINERJA BESERTA KERANGKA PENDANAAN .....**	**18**
	3.1.	Rencana Kinerja …….....	18
	3.2.	Rencana Anggaran …….	19
	3.3.	Kerangka Pengukuran Kinerja ……	19
BAB IV.		**PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM KERJA TAHUN 2024 .....**	**21**
	4.1.	Prioritas Program Kerja …….....	21
	4.2.	Hasil Musrenbang …….	24
	4.3.	Alokasi Anggaran Kegiatan …….....	25
BAB IV.		**PENUTUP ……**	**27**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai dokumen perencaaan untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun. Hal ini sejalan dengan amanat:

- Undang-undang No. 17/2003 tentang keuangan Negara
- Undang-undang no. 25/2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
- Undang-undang no. 23/2014 tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang no.01/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, disusun mengacu kepada undang-undang nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan merupakan penjabaran dari : RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2024 dengan memperhatikan pada RKP tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat dan RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 serta Revieu RENSTRA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021-2024.

Dokumen yang disusun memuat rancangan tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan baik yang di laksanakan oleh pemerintah Kecamatan maupun masyarakat melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Pelaksanaan MUSRENBANG mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat no. 1/2009 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan rencana kerja ini selain memperhatikan kebijakan tersebut, juga menggunakan program-program kerja PD di lingkungan pemerintahan Kecamatan Ngamprah yang selanjutnya merupakan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah, yang secara substansial memuat program dan indikasi kegiatan yang terukur dan berorientasi kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

1.2 Visi dan Misi Kecamatan Ngamprah

1). Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, ke suatu arah instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, aspiratif, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran keadaan masa depan yang menantang dan diinginkan.

Visi Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi Kabupaten Bandung Barat adalah "**Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia**".

Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintah Kecamatan Ngamprah menjadi unit kerja yang didukung oleh aparatur yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku profesional, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna.

2). Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi menjadi hal konkrit, Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan misi, yaitu:

Misi : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi"

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan daerah kabupaten Bandung Barat nomor 13 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi kecamatan
8. Peraturan daerah kabupaten Bandung Barat nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024.

1.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi yang ditetapkan. Dengan perumusan Tujuan, Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan misi yang ditetapkan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Kantor Kecamatan Ngamprah dijabarkan dari misi organisasi yang menunjukkan arah Strategi dan memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
(2) Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas.

1.4.2 Sasaran Kecamatan Ngamprah merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan sebelumnya.Sasaran tersebut yang dikembangkan mencakup konsep ruang lingkup, arah dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
(2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut kami sajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam tabel :

Tabel 1.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target Kinerja Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih,akuntabel,efektif dan efisien	Prosentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan / Target jumlah dokumen perencanaan X 100 %	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentae penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian penyusunan RKA / Target jumlah dokumen capaian penyusunan RKA X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase dokumen penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian penyusunan RKA Perubahan / Target jumlah dokumen capaian penyusunan RKA Perubahan X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

			Prosentae penyusunan dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian penyusunan DPA / Target jumlah dokumen capaian penyusunan DPA X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentae penyusunan dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian penyusunan DPA Perubahan / Target jumlah dokumen capaian penyusunan DPA Perubahan X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase terfasilitasinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi tersedianya gaji ASN / Target penyediaan gaji ASN X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	Realisasi fasilitasi dokumen Laporan Keuangan / Target fasilitasi dokumen Laporan Keuangan X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas	Meningkatkan kualitas	Prosentase penyediaan pakaian dinas beserta atribut	Realisasi tersedianya pakaian dinas pegawai / Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

		pelayanan publik	kelengkapannya	penyediaan pakaian dinas pegawai X 100%					
			Prosentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor / Target tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase tersedianya bahan logistic kantor	Realisasi penyediaan logistic kantor / Target penyediaan logistic kantor X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi penyediaan jasa surat menyurat dan honor / Target tersedianya jasa surat menyurat X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Realisasi Penyediaan layanan internet kantor / Target tersedianya layanan internet kantor X 100%	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**

			Prosentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Realisasi terfasilitasinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya / Target tersedianya anggaran pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya X 100%			**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Realisasi terlaksananya kegiatan PHBN,Festival Kearifan Lokal,HUT KBB dan Perlombaan MTQ / Target penyediaan kegiatan PHBN, Festival Kearifan Lokal, HUT KBB dan Perlombaan MTQ X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada	Realisasi terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

			masyarakat di wilayah Kecamatan	terpadu (PATEN) / Target tersedianya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) X 100%					
			Prosentase penyediaan kegiatan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Realisasi terfasilitasinya kegiatan urusan pemerintahan yang terkait / Target tersedianya kegiatan urusan pemerintahan yang terkait X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase terfasilitasi kegiatan musrenbang	Realisasi terfasilitasinya kegiatan musrenbang / Target kegiatan musrenbang yang dilaksanakan X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat di	Realisasi terfasilitasinya kegiatan bidang PMD / Target tersedianya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

			wilayah kecamatan	kegiatan bidang PMD X 100%					
			Prosentase penyediaan kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara republic indonesia	Realisasi terfasilitasinya kegiatan insentif linmas / Target tersedianya kegiatan insentif linmas X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Prosentase terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Realisasi penyediaan kegiatan administrasi tata pemerintahan desa / Target tersedianya kegiatan administasi tata pemerintahan desa X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

			Prosentase terfasilitasinya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	Realisasi terfasilitasinya kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum / Target tersedianya kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum X 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

1.5 Proses Penyusunan RENJA

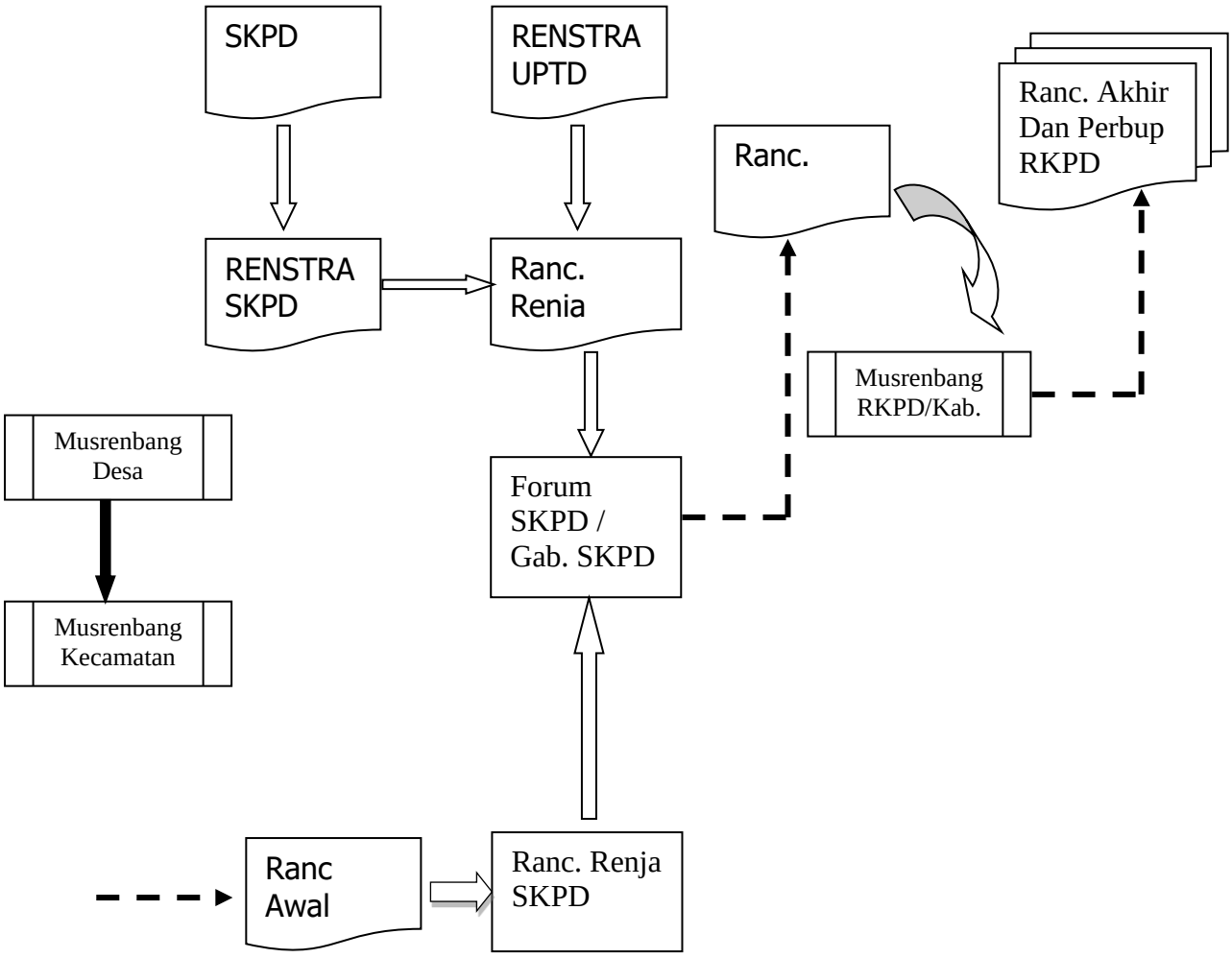

1.6 Sistimatika

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENJA kedudukan RENJA tahun rencana dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan RENJA

1.2 Visi dan Misi Kecamatan Ngamprah

Menggambarkan visi dan misi jangka menengah daerah.

1.3 Landasan Hukum

Merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan RENJA

1.4 Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENJA tahun rencana yang dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi jangka menengah Kepala Daerah

1.5 Proses Penyusunan RENJA

Menggambarkan alur pemikiran dalam penyusunan RENJA

1.6 Sistematika

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam RENJA

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan RENJA tahun sebelumnya, serta isu strategis.

2.1 Evaluasi Pencapaian kinerja secara makro

2.2 Evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan dan Realisasi RENJA

2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

2.4 Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

BAB III. RENCANA KERANGKA KEGIATAN KINERJA BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan rencana kerja dan sasaran, pengukuran kinerja dan rencana anggaran.

3.1 Rencana Kinerja

3.2 Rencana Anggaran

3.3 Kerangka Pengukuran Kinerja

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN

Menjelaskan prioritas dan program pembangunan daerah, hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta rencana kerja SKPD tahun 2021.

4.1 Prioritas dan Program Kerja

4.2 Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

4.3 Alokasi Anggaran Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Merupakan kaidah pelaksanaan yang memuat arahan dan penegasan Kepala Daerah dalam penerapan RENJA serta arahan untuk tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh pelaku pembangunan lainnya.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Secara Makro

Evaluasi kinerja pembangunan merupakan penilaian kinerja terhadap hasil pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Hasil identifikasi dan evaluasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi menjadi rujukan untuk menentukan isu-isu pada tahun mendatang yang nantinya disusun sebagai kebijakan prioritas pembangunan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk evaluasi kecil pembangunan di suatu daerah. Pengukuran pencapaian IPM terdiri dari 3 (tiga) variable yaitu:

- **Indeks pendidikan**
- **Indeks kesehatan**
- **Indeks daya beli**

Berdasarkan sumber dari BPS Kabupaten Bandung Barat, capaian angka IPM Kabupaten Bandung Barat selama 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020 capaian IPM : 68,08
- Tahun 2021 capaian IPM : 68,19
- Tahun 2022 capaian IPM : 69,04

Berdasarkan data tersebut menunjukan adanya peningkatan IPM setiap tahun di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini berarti kinerja pembangunan menunjukan adanya perubahan terutama di sector pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Pemerintah Kecamatan Ngamprah berupaya memberikan perhatian terhadap pembangunan manusia, indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM) serta menjadi salah satu tolak ukur pencapaian dari suatu proses pembangunan di Kecamatan Ngamprah.

Kecamatan Ngamprah sebagai ibukota Kabupaten Bandung Barat, memiliki peluang yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai sector perekonomian dan jasa yang dapat berimplementasi langsung pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta pendapat per kapita. Posisi strategis serta kekayaan alam yang cukup beragam, berpotensi besar bagi Kecamatan Ngamprah menjadi Kecamatan Termaju.

Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan SDM yang dimiliki Kecamatan Ngamprah dalam menjawab tantangan tersebut. Bila perkembangan kualitas manusianya lambat, niscaya akan tersisih dan pada akhirnya penduduk Kecamatan Ngamprah akan menjadi penonton roda pembangunan yang digerakkan oleh para pendatang. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Disisi lainnya yang menjadi solusi serta salah satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini adalah peningkatan kualitas SDM yang dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia dengan perbaikan derajat kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk serta kemampuan daya beli masyarakat. Dari gambaran tersebut diatas pencapaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat tahun lalu dengan indikatornya komponen kesehatan, pendidikan dan daya beli adalah : (sumber BPS KBB)

1. **Komponen kesehatan**
   - Indeksnya 80,80
2. **Komponen pendidikan**
   - Indeks 60,33
3. **Komponen daya beli**
   - Indeks 65,33

   Rata-rata IPM Kabupaten Bandung Barat adalah 69,04

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan Realisasi RENJA Tahun Lalu

Kecamatan Ngamprah mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar yaitu jiwa, dengan perbandingan jumlah laki-laki 89.097 orang (50,69%) dan jumlah perempuan 86.575 (49,26%) tersebar di 11 desa, 164 RW dan 773 RT.

Kecamatan Ngamprah mempunyai potensi unggulan di bidang pertanian padi sawah, sayuran dan buah-buahan. Sebaran komoditas tersebut terletak disebelah utara yaitu didesa Bojongkoneng, Cimanggu, Ngamprah dan Pakuhaji. Secara umum permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian
- System alih teknologi masih lemah dan kurang tepat sasaran
- Akses terhadap pelayanan usaha dan permodalan

- Kualitas, mentalitas dan keterampilan sumber daya petani masih rendah
- Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan lemahnya system birokrasi.

Perubahan fungsi lahan yang sangat cepat dan tidak terkendali menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, saat ini lahan-lahan banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman industry dan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan pasokan air permukaan maupun air tanah akan semakin sedikit akibat menurunnya kemampuan tanah menyimpan air.

2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan yang ada terdapat beberapa isu strategis yang timbul dari banyaknya permasalahan yang dihadapi dan sangat memerlukan perkaitan permasalahan ini timbul seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru.

Permasalahan tersebut dapat di rumuskan kedalam beberapa isu strategis antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
2. Belum meratanya pelayanan pendidikan
3. Kurangnya kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat
4. Masih kurangnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga masyarakat
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan keagamaan dan budaya local.

Capaian output yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efisien*.

2.4 Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan

Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mencapai tujuan telah berupaya melakukan efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis *efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian output yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas

100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *in-efisien*. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjuk-kan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *sesuai harapan*.

Pada tahun 2022, dari 5 Program 12 kegiatan 21 sub kegiatan yang telah dilaksanakan, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai harapan 100%.

Kegiatan-kegiatan dengan efisiensi di atas 99,82% terdiri dari:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (94,32 %)
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%)
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)
5) Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (100%)
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (98%)
7) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%)
8) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%)
9) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%)
10) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (100%)
11) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%)
12) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (99,86%)

Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara ***outcome*** dengan ***output*** baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau ***output*** mencapai di atas 100% menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan ***efektif*****.** Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian ***outcome*** lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja

diklasifikasikan ***in-efektif*****.**

Capaian indikator kinerja **sasaran stratejik** Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 seluruhnya berhasil dicapai dengan kategori **“Baik”** dan **“Sangat Baik”.**

BAB III

RENCANA KERANGKA KEGIATAN KINERJA BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Rencana Kinerja

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Stratejik Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024 berikut anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kecamatan Ngamprah tahun 2024, Rencana Kinerja Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat mencakup Sasaran berikut indikator kinerja, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Sasaran dalam Rencana Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*) berikut rencana capaiannya sesuai dengan DPA.

Dalam tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah merencanakan sasaran-sasaran stratejik yang akan dicapai, meliputi:

Sasaran		Indikator
3.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	- Indek Kepuasaan Masyarakat
3.1.2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	- Nilai Sakip

Selanjutnya, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran strategis dengan indikator tersebut di atas, dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Uraian selengkapnya Rencana Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2 Rencana Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan/pelayanan Pemerintah Kecamatan Ngamprah selama tahun 2024.

Anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	Rp	2.630.839.065
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.279.358.700
Jumlah	Rp	5.910.197.765

Dalam hal penerimaan pendapatan, dalam tahun 2024 ditargetkan penerimaan sbb:

Pajak Daerah	Target	
– Retribusi Daerah	Rp	0
– Retribusi izin HO	Rp	0
Jumlah	Rp	0

3.3 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada target yang telah ditetapkan, dan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Sedangkan kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan sesuai dengan DPA dan DPPA tahun

2024. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1). Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti bulanan, triwulanan, semesteran, maupun laporan kegiatan lainnya;
2). Data eksternal, sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, meliputi:

- Indikator masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*).
- Indikator keluaran (*output*), sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, dapat berupa fisik dan/ atau non fisik.
- Indikator hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN
PROGRAM KERJA TAHUN 2024

4.1 Prioritas Program Kerja

Penyusunan prioritas program kerja tahun anggaran 2024 di tetapkan berdasarkan isu strategis, evaluasi tahunan, kerangka pendanaan serta aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Substansi dari prioritas program kerja merupakan hasil rumusan dari isu strategis, usulan UPTD yang tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang di sepakati dalam MUSRENBANG.

Selanjutnya dari isu tersebut serta dengan mengacu pada arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Maka disusun prioritas program kerja dan program pendukung kegiatan lainnya:

A. Prioritas Kegiatan Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sasaran "**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"** yang digunakan adalah "Terlaksananya Perencanaan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah" indikator tersebut terbagi beberapa kegiatan antara lain:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Sasaran "**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**".
Indikatornya terdiri 2 (dua) kegiatan antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Sasaran "**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**" indikatornya terdiri 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya" dengan target kinerjanya tersedianya pengadaan pakaian tradisional, olahraga dan batik sebanyak 34 stel.
- Koordinasi dan Pelaksanaan SIstem Informasi Kepegawaian dengan target kinerjanya terfasilitasinya penyusunan laporan dan koordinasi pelaporan system informasi kepegawaian selama 12 bulan.

d. Sasaran "**Administrasi Umum Perangkat Daerah**" indikatornya:
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target kinerjanya Jumlah Peralatan Rumah Tangga sebanyak 3 jenis.
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinernya adalah tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 35 jenis.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target kinerjanya adalah tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan sebanyak 13 jenis.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengen target kinerjanya adalah terfasilitasinya rapat koordinasi dan laporan kegiatan selam 12 bulan.

e. Sasaran "**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"** indikatornya adalah :
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerjanya adalah "tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan "

f. Sasaran "**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**" indikatornya adalah:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerjanya adalah "terlaksananya pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 4 unit
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerjanya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Sasaran "**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"** indicator kegiatan tersebut adalah:

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan indicator targetnya adalah jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan.
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indicator targetnya adalah terfasilitasinya kegiatan event-event tingkat kecamatan sebanyak 2 (dua) kegiatan.

b. Sasaran "**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan"** indikator kegiatannya adalah:

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan indicator targetnya adalah jumlah pelayanan sebanyak 1 (satu) jenis.
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indicator targetnya adalah terlaksanannya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) selama 12 bulan.

c. Sasaran **"Koordinasi Pemeliharaan Prasaran dan Sarana Pelayanan Umum"** , indicator kegiatannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan target kegiatan terfasilitasinya penyampaian pelaporan dan rapat koordinasi selama 12 bulan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. **Sasaran " Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa",** indicator kegiatannya terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa" dengan indicator kegiatan

adalah terlaksananya pra musrenbang dan musrenbang tingkat kecamatan sebanyak 2 kegiatan.

- "Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan indicator kegiatan adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan sebanyak 2 kegiatan.

4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sasaran **"Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum"** indicator sub kegiatanya adalah harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat denga jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan.

b. Sasaran **"Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah"** indicator sub kegiatannya adalah "Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia"

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Sasaran **"Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"** indicator kegiatannya terdiri dari 4 (empat) yaitu:

- "Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa da Peraturan Kepala Desa"
- "Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa"
- "Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa"
- "Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan".

4.2 Hasil MUSRENBANG

Pelaksanaan MUSRENBANG Kecamatan Ngamprah di mulai dari tingkat desa dan dilanjutkan pada tingkat Kecamatan, hasil MUSRENBANG ditingkat Kecamatan di dapat hasil usulan program dan kegiatan yang selanjutnya disebut Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan pembangunan tahun berjalan.

Rencana kerja pemerintahan Kecamatan Ngamprah tahun 2024 merupakan program dan kegiatan berdasarkan pada skala prioritas program dan hasil MUSRENBANG tahun 2024.

Berdasarkan peraturan Bupati Bandung Barat No. 18/2020 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas pokok "Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah" dengan fungsinya pengkoordinasian, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil MUSRENBANG tahun 2024 secara garis besar tertuang di dalam rencana kerangka kegiatan kinerja dan kerangka pendanaan.

4.3 Alokasi Anggaran Kegiatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun anggaran 2024 total target PAD Kecamatan Ngamprah sebesar Rp. 0 . Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut diperoleh dari:

- Retribusi IMB Rp. 0
- Retribusi HO Rp. -

Jumlah Rp. 0

2. Belanja

a. Rincian anggaran belanja operasi SKPD Kecamatan Ngamprah tahun 2024 berdasarkan Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
7.01.7.01.0.001 .	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.932.651.165**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**66.760.600**
7.01.7.01.0.001 .2.01.0001.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	2700000
7.01.7.01.0.001 .2.01.0002.	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	2700000
7.01.7.01.0.001 .2.01.0003.	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	2700000
7.01.7.01.0.001 .2.01.0004.	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	2700000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
7.01.7.01.0.001 .2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2700000
7.01.7.01.0.001 .2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**44.860.600**
7.01.7.01.0.001 .2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8400000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.644.439.065
7.01.7.01.0.001 .2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**2.630.839.065**
7.01.7.01.0.001 .2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13600000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000
7.01.7.01.0.001 .2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3900000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.937.400
7.01.7.01.0.001 .2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	**76.937.400**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.368.200
7.01.7.01.0.001 .2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**63.015.800**
7.01.7.01.0.001 .2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4052400
7.01.7.01.0.001 .2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15300000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.245.900
7.01.7.01.0.001 .2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**58.245.900**
7.01.7.01.0.002 .	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**396.129.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**232.400.000**
7.01.7.01.0.002 .2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**81.600.000**
7.01.7.01.0.002 .2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**150.800.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	35.400.000
7.01.7.01.0.002 .2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35400000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.400.000
7.01.7.01.0.002 .2.03.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5400000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	122.929.000
7.01.7.01.0.002 .2.04.0003.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	122929000
7.01.7.01.0.003 .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1.737.772.000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1737772000
7.01.7.01.0.003 .2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**19.000.000**
7.01.7.01.0.003 .2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**1.718.772.000**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
7.01.7.01.0.004.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**791.352.800**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**791.352.800**
7.01.7.01.0.004.2.02.0001.	**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**791.352.800**
7.01.7.01.0.006.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**52.292.800**
	Fasilitasi, Rekomndasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**52.292.800**
7.01.7.01.0.006.2.01.0001.	**Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**	5400000
7.01.7.01.0.006.2.01.0002.	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**41.492.800**
7.01.7.01.0.006.2.01.0003.	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	5400000
JUMLAH		**5.910.197.765**

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 merupakan penjabaran dari Revieu RENSTRA Kecamatan tahun 2021-2024, RENJA memuat Rancangan Rencana Kerangka Kegiatan Program, pendanaan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dari hasil MUSRENBANG tahun 2022.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan penetapan kinerja SKPD Kecamatan Ngamprah untuk tahun anggaran 2024. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala seksi wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum MUSRENBANG untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
3. Berkaitan dengan pedoman pembangunan, masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan serta sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan.

Rangkaian proses penyusunan RENJA Kecamatan Ngamprah memerlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui MUSRENBANG desa/kecamatan, forum SKPD atau forum gabungan SKPD, yang berfungsi untuk

menghasilkan kesepakatan terutama SINKRONIASASI rencana kegiatan tahunan serta penjelasan program dan kegiatan.

Dokumen RENJA merupakan rencana prioritas pembangunan di Kecamatan Ngamprah tahun 2024 yang telah terintegrasi dan sinegritas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Ngamprah, Januari 2024
CAMAT NGAMPRAH

AGNES VIRGANTY,S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 198209112000122001

2024

RENJA 2024

RENCANA KINERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulilah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya, akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan bahwa dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan sudut pandang tentang apa yang dicita-citakan pada masa yang akan datang, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan. Semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi

siapapun termasuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintah.

Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dimasa yang akan datang.

Bandung Barat, 8 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung Barat

DENI ACHMAD ABDULRAHMAN, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 198312182002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) 10
BAB II 15
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023 15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 15
2.2. Analisis Capaian Kinerja 16
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 26
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26
BAB III 27
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN 27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27
BAB IV 42
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN 42
BAB V 44
PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Table 1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 15
Table 2 Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan secara merata & terjangkau 17
Table 3 Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat..... 20
Table 4 Penetapan Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja organisasi Dinkes berlandaskan Tata Kelola pemerintahan yang baik..... 22
Table 5 Capaian Anggaran Tahun 2021 25
Table 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja 3
Gambar 1.2 Bagan alur hubungan perencanaan dan penganggaran 5
Gambar 1.3 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja 2024 disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUPA-PPAS). Renja 2024 secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat. Rencana Kerja 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementrian Kesehatan RI, RPJM Propinsi Jawa Barat, Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kesehatan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.

Rencana Kerja 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan rencana program kerja tahunan selama Tahun 2024. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) OPD dapat dikerjakan secara simultan atau pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun angaran berjalan. Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain;

1. Substansi Rencana Kerja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

4. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

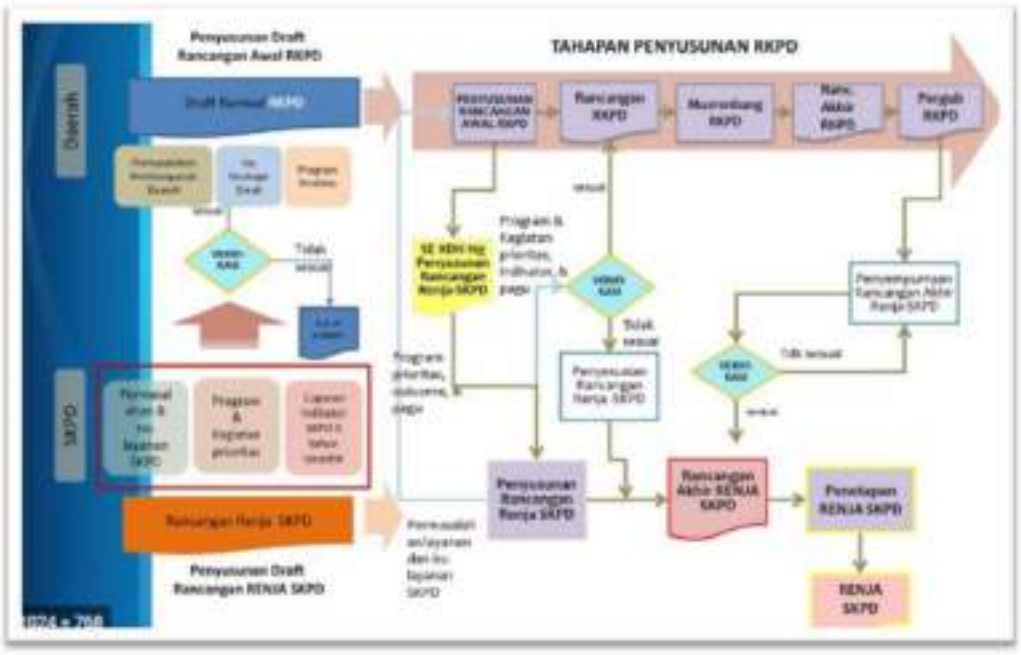

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja
   - Pengumpulan data dan informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil

analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi
   - Analisis gambaran pelayanan OPD
   - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD.
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
   - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
   - Perumusan tujuan dan sasaran
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
   - Perumusan kegiatan prioritas.
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
   - Penyempurnaan rancangan kerja OPD
   - Pembahasan forum OPD
   - Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
d. Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD.
f. Penetapan Renja.

Skema hubungan perencanaan dan penganggaran seperti terlihat pada bagan di bawah ini:

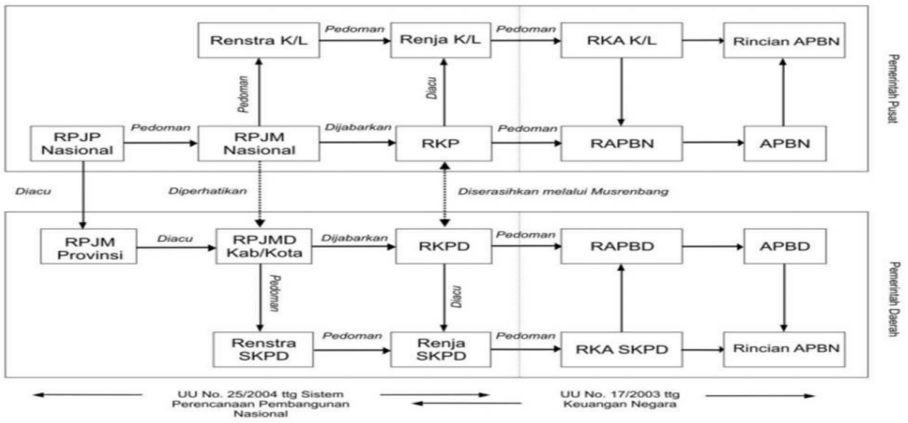

Gambar 1. 2 Bagan alur hubungan perencanaan dan penganggaran

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

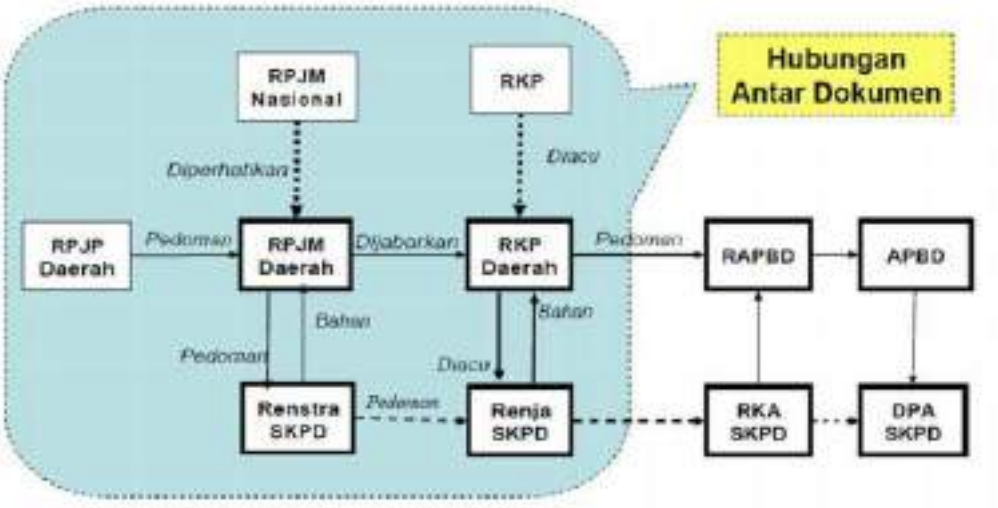

Gambar 1.3 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024;
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Permendagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes 328/2020 tentang Panduan dan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023.
24. Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan Pelaksanaan Pembangunan sektor kesehatan tahun berjalan. Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estiminasi kondisi yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Tahun 2024 adalah :

1. Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya terhadap indikator kinerja utama dan indikator SPM serta capaian Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
2. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas serta memperjelas arah pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024;
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Kesehatan;
4. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
5. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan, proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan,

keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2023 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan							
		Meningkatnya Mutu Layanan dan Akses Masyarakat terhadap	Presentasi Masyarakat miskin yang memiliki jaminan	100%	100%	100%	BAIK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Dapat Dijangkau oleh seluruh masyarakat		Layanan Kesehatan Secara Merata & Terjangkau.	kesehatan				
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	100%	100%	100%	BAIK
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Umur HarapannHidup (UHH)	72,05	73,10	101%	BAIK
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi Dinkes berlandas-kan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	88,41	100%	BAIK
			Nilai EvaluasiSAKIP	70 BB	63,01 B	90%	BAIK

2.2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, yang perlu pertama kali dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan tolak keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator utama menunjukkan hasil sebagai berikut :

Table 2, Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan secara merata & terjangkau

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2022	Capaian 2023			Akhir Renstra (2023)	
			Target	Realisasi	%	Target	%
1	Presentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan	99%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi	93.75%	100%	100%	100%	100%	100%

1. **Presentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan**

Cara perhitungan persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan Kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Masyarakat Miskin yang memiliki jaminan kesehatan}}{\sum \text{Penduduk Miskin}} \text{ x } 100\%$$

Presentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan tahun 2023 memperoleh hasil realisasi sebesar 100%, telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022, realisasi yang diperoleh dari indikator Presentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Bila disandingkan antara kondisi capaian sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir Renstra sebesar 78.000 Jiwa sedangkan capaian sebesar 94.196 jiwa. adalah 99,2% memiliki makna bahwa capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan target di akhir Renstra yaitu 100% di tahun 2023.

2. **Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang terakreditasi**

Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Puskesmas yang terakreditasi}}{\sum \text{Puskesmas di KBB}} \text{ x } 100\%$$

Presentase fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi tahun 2023 memperoleh hasil realisasi sebesar 100%, telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 capaiannya sebesar 93,75%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 artinya sudah mencapai target 100%, sebagaimana terlihat pada grafik di atas.

Kegiatan akreditasi fasilitas layanan kesehatan dilakukan sebagai salah satu cara pembinaan terhadap Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang ada di wilayah agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan.

Dengan harapan ketika fasilitas layanan kesehatan dasar tersebut sudah terakreditasi, maka akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada akan semakin meningkat kemudian kepuasan bagi masyarakat di bidang kesehatan juga akan meningkat dan pada akhirnya indeks kesehatan akan meningkat.

Table 3, Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023			Akhir Renstra (2023)	
					Target	Realisasi	%	Target	%
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Umur Harapan Hidup (UHH)	72,52	72,79	72,05	73,10	100%	72,05	100%

3. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Merupakan jumlah rata-rata yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Usia Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat Kesehatan bagi para penduduknya.

UHH Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 73.10, telah mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan dengan persentase capaiannya sebesar 101,4%.

Capaian UHH Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Table 4, Penetapan Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja organisasi Dinkes berlandaskan Tata Kelola pemerintahan yang baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023			Akhir Renstra (2023)	
					Target	Realisasi	%	Target	%
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi Dinkes berlandaskan tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.84	85.75	88.31	88.41	100 %	88.31	100 %
		Nilai Evaluasi SAKIP	67.22	62,11	BB	63,01 (B)	90%	BB	BB

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data daninformasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dari petugas kesehatan yang merupakan bagian dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara kebutuhan,harapan dengan kenyataan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan cara melakukan survei kepada masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) milik pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Survei ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan seperti apa sehingga nanti hasilnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Apabila penilaian

masyarakat dianggap kurang, maka akan dilakukan perbaikan

dan apabila penilaian masyarakat sudah bagus, maka akan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.

Untuk masyarakat pengguna layanan fasilitas kesehatan milik pemerintah, tentunya kegiatan survey ini sangat membantu mereka untuk menyampaikan harapannya, karena bagaimana pun juga yang namanya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari petugaskesehatan.

Perhitungan IKM dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\textit{Persentase total nilai persepsi per unsur}}{\textit{Total unsur yang diisi}} \times \textit{nilai penimbang} \times$$

IKM Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 88,41%, sudah melebihi target yang telah ditentukan dengan persentase capaiannya sebesar 100.1 %. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi yang diperoleh dari indikator IKM mengalami peningkatan. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat apabila dilihat dari kondisi capaian unsur penilaian, maka nilai yang harus ditingkatkan ada pada unsur pelayanan yaitu waktu penyelesaian, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

Adapun Upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan unsur pelayanan adalah

a. Upaya yang perlu ditingkatkan unsur pelayanan adalah :
   Mensosialisasikan Kembali kepada pengguna layanan bahwa mereka berhak mengisi kotak saran dan pengaduan bila ada pelayanan yang kurang memuaskan agar Dinkes bisa memahami kebutuhan pengguna layanan demi perbaikan untuk kedepannya, serta memberikan kelas tatacara menanggapi pengaduan yang baik dan benar bagi pengelola pengaduan yang ada di Dinkes.

b. Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan

Memberikan informasi dan arahan yang jelas kepada pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan melalui sosial media seperti facebook dan Instagram dan juga website dinkes berbentuk poster atau media informasi yang interaktif juga memberikan wawasan kepada pengguna layanan bahwa pelayanan di Dinkes bebas pungutan biaya alias gratis sampai produk layanan diterima kepada pengguna layanan.

5. Evaluasi Penilaian SAKIP

Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 63.01 dengan kategori Baik, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 70(BB) artinya realisasi pada tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditentukan dengan persentase capaiannya sebesar 90% .Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 62.11, realisasi yang diperoleh dari indikator Nilai SAKIP mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Table 5, Capaian Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	149.453.955.612	121.250.989.937	81
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.443.850.400	1.138.482.000	79

No	Program	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	616.577.000	616.577.000	100
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	721.806.800	721.601.700	99
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.785.285.301	134.124.197.298	97
	TOTAL	**291.021.475.113**	**257.851.847.935**	**88,60**

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah "Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia"

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah merencanakan 5 program dengan 18 kegiatan 64 sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar sebesar Rp. 300.295.435.853

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMN maupun yang tertuang dalam RKP (rancangan awal) dengan penekanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, pengembangan SDM kesehatan serta integrasi sistem informasi dan teknologi yang kompetitif terus mendapat perhatian, serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dan PHBS perlu terus ditingkatkan. Seiring dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pengawasan serta evaluasi berkala terhadap penerapan sistem pembiayaan kesehatan ini perlu dilakukan agar tepat sasaran yang diiringi dengan penguatan sistem pelayanan primer dan rujukan serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Seluruh kebijakan dan analisa tersebut merupakan tantangan dalam upaya pembangunan kesehatan daerah dan nasional yang menjadi landasan dasar dalam pengembangan program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Program kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 mengacu pada kebijakan nasional, diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Peserta PBI yang mendapat akses pelayanan kesehatan yang bermutu

3. Menurunnya kematian maternal dan neonatal
4. Meningkatnya status gizi balita
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor
7. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan factor resiko
8. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
9. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
10. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
11. Meningkatnya pembiayaaan kesehatan
12. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah
13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan sistem informasi kesehatan
14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar

a. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Sejalan dengan Misi Pemerintahan Daerah periode 2018- 2023, penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat masuk kedalam Misi Ke-1 RPJMD, yaitu Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya, serta membangun masyarakat yang berkarakter,menjunjung tinggi nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka membangun sumber daya manusia di Bandung Barat yang berkualitas. Langkah penjabaran dari misi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran, beserta indikator kinerjanya.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu, analisis strategis, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan Dinas Kesehatan adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Dapat Dijangkau oleh seluruh masyarakat Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah sasaran jangka menengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Indikator Sasaran	:	Angka Harapan Hidup
	:	Prevalensi Stunting
Sasaran 2	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator Sasaran	:	Nilai SAKIP

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Denganadanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di atas maka akan dilaksanakan 5 program, 20 kegiatan serta 83 sub kegiatan, yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

    1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1.4 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1.5 Peningkatan Pelayanan BLUD
    1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

3.1 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

3.2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3.3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

5.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

5.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

5.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Table 6, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Perubahan Kabupaten Bandung Barat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaanadalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dankegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertaikebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja (outcomes) didukung dengan pendanaanyang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam rangka pencapaian visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tertera dalam dokumen RPD dan RENSTRA adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang Cerdas, Maju, Makmur dan Agamis”. Untuk mewujudkan visi tersebut serta mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki maka ditetapkan 5 (lima) misi dimana kedudukan Dinas Kesehatan berada pada Misi ke 1 (satu) yaitu ‘Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif, adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreatifitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Kesehatan				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.177.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
2	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
3	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	32.378.300,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
4	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
5	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.525.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	6.004.700,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	15.665.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	A 0 Poin Nilai/Predikat	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14700 Orang/bulan	14700 Orang/bulan	172.067.782.996,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.920.400,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	6 Dokumen	26.256.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	15.823.600,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	172.117.782.996,00	173.737.169.226,00	173.737.169.226,00		
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	62.20 A Nilai/Predikat Poin	A 62.20 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Persentase administrasi perkantoran	0 % 100 Persen	0 % 100 Persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	62.20 A Nilai/Predikat Poin	A 62.20 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Persentase administrasi perkantoran	0 % 100 Persen	0 % 100 Persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	62.20 A Nilai/Predikat Poin	A 62.20 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Persentase administrasi perkantoran	0 % 100 Persen	0 % 100 Persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	62.20 A Nilai/Predikat Poin	A 62.20 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Persentase administrasi perkantoran	0 % 100 Persen	0 % 100 Persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.039.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.461.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2700 Dokumen	2700 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	0 A Nilai/Predikat Poin	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00		
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan jasa penunjang untuk urusan pemerintahan daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan jasa penunjang untuk urusan pemerintahan daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00		
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	32.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00		
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00		
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00		
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00		
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0 A Nilai/Predikat Poin	0 A Nilai/Predikat Poin	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00		
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terpenuhi	100 %	100 %	157.248.711.698,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	36 Unit Kerja	36 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP DINKES	A 0 Poin Nilai/Predikat	A 0 Poin Nilai/Predikat	329.516.494.694,00	173.887.169.226,00	163.265.987.123,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terpenuhi	100 %	100 %	157.248.711.698,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	2 Unit	0,00	0,00	4.262.087.889,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Se Standar	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	4.276.100.582,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	141.820.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
51	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	653.575.200,00	10.511.041.000,00	5.212.999.302,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	380 Unit	380 Unit	189.210.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
53	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	160 Unit	160 Unit	101.076.100,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 0 0 % % %	100 0 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	3.658.006.300,00	11.950.130.519,00	11.950.130.519,00		
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1.350.298.800,00	422.526.919,00	6.428.044.806,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	243.263 Keluarga	243.263 Keluarga	166.325.000,00	152.423.000,00	145.783.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0 Paket	0 Paket	505.701.200,00	413.736.100,00	656.216.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34455 Orang	34455 Orang	65.064.068,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
57	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	92.524.929,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
59	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
60	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37703 Orang	37703 Orang	75.489.553,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
62	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136277 Orang	136277 Orang	92.303.929,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
63	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	85862 Orang	85862 Orang	33.802.859,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
65	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
66	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828453 Orang	828453 Orang	247.949.100,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
68	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188065 Orang	188065 Orang	88.265.527,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
69	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95863 Orang	95863 Orang	155.890.111,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
71	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
72	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.479 Orang	7.479 Orang	112.583.192,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
74	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2668 Orang	2668 Orang	100.697.390,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
75	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19.116 Orang	19.116 Orang	161.466.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
77	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
78	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36.408 Orang	36.408 Orang	206.368.600,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
80	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	100.276.047,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
81	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
82	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	1.841.675.492,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
83	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
84	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	55.214.700,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
85	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
86	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	104.148.192,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
87	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	336.254.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
88	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.361.318,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
89	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
90	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	715 Orang	715 Orang	36.550.494,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
91	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
92	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1045 Orang	1045 Orang	58.890.794,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
93	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
94	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96 Dokumen	96 Dokumen	678.320.800,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
95	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	52.830.157.437,00	52.332.385.837,00	78.597.715.655,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
96	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	330 Orang	330 Orang	51.757.528,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
97	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
98	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	96 Paket	96 Paket	26.026.643,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
99	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
100	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	166.223.843,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
101	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
102	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16 Dokumen	16 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
103	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
104	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
105	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
106	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	1.160.537.611,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
107	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	36 Unit	36 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	98.585.768,00	38.290.000,00	51.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	39.434.307,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
108	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	412.742.500,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
109	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0 100 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	59.369.386.932,00	93.007.621.840,00	93.007.621.840,00		
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4649 Orang	4649 Orang	66.760.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	360 Orang	360 Orang	80.046.200,00	80.046.200,00	80.046.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100 Orang	29.272.000,00	0,00	35.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	0,00	131.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	- Tersedianya sistem informasi kesehatan	0 % 0 Jumlah	0 % 0 Jumlah	380.000.000,00	350.868.500,00	350.868.500,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	380.000.000,00	350.868.500,00	350.868.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
110	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 0 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	591.997.374,00	241.738.100,00	241.738.100,00		
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	80 Unit	80 Unit	234.485.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
111	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 0 0 % % %	0 100 0 % % %	63.999.390.606,00	105.550.358.959,00	112.863.782.402,00		
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	591.997.374,00	241.738.100,00	241.738.100,00		
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	32 Unit	32 Unit	357.512.374,00	179.405.400,00	268.187.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
112	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 0 % %	0 80 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 % 90 Persen	100 % 90 Persen	36.188.400,00	26.048.400,00	26.048.400,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37 Dokumen	37 Dokumen	36.188.400,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
113	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 0 % %	0 80 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 % 90 Persen	100 % 90 Persen	36.188.400,00	26.048.400,00	26.048.400,00		
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
114	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 80 % %	80 0 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan An ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	121.198.000,00	111.128.000,00	111.128.000,00		
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	35 Dokumen	35 Dokumen	16.760.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
115	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 80 % %	80 0 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan An ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	121.198.000,00	111.128.000,00	111.128.000,00		
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
116	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 80 % %	80 0 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan An ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	121.198.000,00	111.128.000,00	111.128.000,00		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	37 Orang	37 Orang	104.438.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
117	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 80 % %	80 0 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan An ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	121.198.000,00	111.128.000,00	111.128.000,00		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	104.052.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
118	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 0 % %	0 80 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Kesehatan Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100 % 80 Persen	100 % 80 Persen	814.832.000,00	334.070.000,00	334.070.000,00		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	82 Orang	82 Orang	814.832.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
119	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 0 % %	0 80 % %	972.218.400,00	471.246.400,00	2.288.116.815,00		
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Kesehatan Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100 % 80 Persen	100 % 80 Persen	814.832.000,00	334.070.000,00	334.070.000,00		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
120	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	80 0 % %	80 0 % %	342.599.000,00	826.514.000,00	826.514.000,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	70 Persen	70 Persen	86.965.000,00	652.309.000,00	652.309.000,00		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	122 Sarana	122 Sarana	86.965.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
121	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	80 0 % %	80 0 % %	342.599.000,00	826.514.000,00	826.514.000,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	70 Persen	70 Persen	86.965.000,00	652.309.000,00	652.309.000,00		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
122	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	0 80 % %	0 80 % %	342.599.000,00	826.514.000,00	826.514.000,00		
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya Persentase TPM yang memenuhi syarat	100 %	100 %	16.840.000,00	8.420.000,00	8.420.000,00		
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	50 Dokumen	50 Dokumen	16.840.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
123	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	0 80 % %	0 80 % %	342.599.000,00	826.514.000,00	826.514.000,00		
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya Persentase TPM yang memenuhi syarat	100 %	100 %	16.840.000,00	8.420.000,00	8.420.000,00		
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
124	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	80 0 % %	0 80 % %	342.599.000,00	826.514.000,00	826.514.000,00		
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Persen	100 Persen	147.539.000,00	64.280.000,00	64.280.000,00		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen	147.539.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
125	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	80 0 % %	0 80 % %	342.599.000,00	826.514.000,00	826.514.000,00		
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Persen	100 Persen	147.539.000,00	64.280.000,00	64.280.000,00		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	50 Persen	50 Persen	91.255.000,00	101.505.000,00	101.505.000,00		
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30 Unit	91.255.000,00	101.505.000,00	279.440.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
126	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif	25 0 % %	25 0 % %	346.653.553,00	208.634.283,00	401.926.583,00		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Persen	25 Persen	154.261.422,00	95.759.083,00	95.759.083,00		
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	154.261.422,00	95.759.083,00	113.155.983,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
127	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	0 25 % %	0 25 % %	346.653.553,00	208.634.283,00	401.926.583,00		
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga	100 Persen	100 Persen	127.328.065,00	74.248.400,00	74.248.400,00		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 Dokumen	6 Dokumen	127.328.065,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
128	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	0 25 % %	0 25 % %	346.653.553,00	208.634.283,00	401.926.583,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga	100 Persen	100 Persen	127.328.065,00	74.248.400,00	74.248.400,00		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
129	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	25 0 % %	0 25 % %	346.653.553,00	208.634.283,00	401.926.583,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Strata Posyandu Purnama Persentase UKBM yang disupervisi	100 % 60 Persen	100 % 60 Persen	65.064.066,00	38.626.800,00	38.626.800,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	65.064.066,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				395.177.356.253,00	280.943.922.868,00	279.646.326.923,00		
130	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	25 0 % %	0 25 % %	346.653.553,00	208.634.283,00	401.926.583,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Strata Posyandu Purnama Persentase UKBM yang disupervisi	100 % 60 Persen	100 % 60 Persen	65.064.066,00	38.626.800,00	38.626.800,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Dinas Kesehatan Tahun 2019–2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2024. Selain itu, rencana kerja bidang kesehatan ini dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bagian dari sebuah sistem terbuka yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan. Oleh karena itu penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini sangat terbuka dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, sehingga tercapai keselarasan antara program, kegiatan serta sumber daya yang ada.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja 2024 Dinas Kesehatan, maka penetapan prioritas pembangunan kesehatan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan good governance and clean governance di Kabupaten Bandung Barat.

Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 semoga dapat

bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan sekaligus mencapai visi Kabupaten Bandung Barat 2019-2023 yaitu: ”Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Bandung Barat, 8 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung Barat

DENI ACHMAD ABDULRAHMAN, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 198312182002121001

x

RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DISPARBUD

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, merupakan dokumen Rencana Kerja Dinas untuk Tahun Anggaran 2024. Renja ini merupakan salah satu acuan yang hendaknya dijadikan sebagai "*Guide lines*" oleh segenap perangkat kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan selama Tahun 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas dan semua pihak yang telah membantu membagikan kontribusinya dalam Penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita semua serta melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga seluruh pekerjaan yang kita laksanakan bersama menjadi amal ibadah dan dapat memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun untuk lingkungan kita semuanya, Amin.

Bandung Barat, 31 Mei 2023
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung Barat

AKHMAD FANJI HERNAWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196702171997031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.3.1 Maksud 9

1.3.2 Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 11

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 19

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 19

3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Peangkat Daerah..... 19

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB V PENUTUP 36

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 36

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 37

5.3 Rencana Tindak Lanjut 38

Lampiran..... 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, merupakan instansi dalam Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Barat 1 (satu) tahun ke depan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah;
b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah Orientasi diberikan kepadatim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yangterkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah;
c. Penyusunan Agenda Kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah;
d. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :
    1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
    2. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
    3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan dan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, guna mengoperasionalkan RPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapaioleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4688);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan;
13. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya;
14. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
25. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1999, tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005,tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 2 seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah ;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Barat tahun 2008 No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat No 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
46. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat;
47. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1.3 Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai acuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dalam mengoperasionalkan RPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Merumuskan program dan kegiatan Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat selama Tahun 2024;
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan Tahun 2024;
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, seni budaya, ekonomi kreatif serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta

Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Tahun Berjalan.

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Urusan Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53/2021 Tentang Tugas dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat memiliki4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat, serta 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun 4 (empat) bidang tersebut antara lain :

a. *Bidang Kepariwisataan*, membawahi :
    1. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata;
    2. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Pengelolaan Destinasi Wisata; dan
    3. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata.
b. *Bidang Pemasaran Pariwisata*, membawahi :
    1. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Strategi Pemasaran dan Komunikasi Pariwisata; dan
    2. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Analisis Data, Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata.
c. *Bidang Pengembagan Ekonomi Kreatif*, membawahi :
    1. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
    2. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Ruang Kreatif.
d. *Bidang Kebudayaan*, membawahi :
    1. Pamong Budaya Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian; dan
    2. Pamong Budaya Ahli Muda/Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya.
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

a. Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada;
b. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima;
c. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, transportasi, dll) yang belum memadai;
d. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri;
e. Terbatasnya pemasaran pariwisata ke daerah yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat;
f. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kabupaten Bandung Barat;
g. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya;

h. Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan;
i. Masih rendahnya sadar wisata dan penerapan sapta pesona oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata maupun masyarakat;
j. Belum optimalnya sinergi antar instansi (Perangkat Daerah) yang menangani sektor pariwisata secara holistik di Kabupaten Bandung Barat;
k. Belum optimalnya fasilitasi dan wadah yang pas serta belum memiliki zona kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kabupaten Bandung Barat;
l. Ekonomi kreatif belum memiliki data yang terupdate terkait keberadaannya dan legalitasnya;
m. Perlu disediakan wadah yang memadai bagi pelaku ekonomi kreatif (komunitas/masyarakat) di wilayah dan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb) yang ada di Kabupaten Bandung Barat;
n. Masih kurangnya Pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
o. Belum maksimalnya atraksi pariwisata dan kebudayaan yang diselenggarakan secara langsung, sebagai daya tarik wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat.

C. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

   Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

   a. Kompetensi dan kualitas SDM yang masih rendah;
   b. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi yang berdampak pada erosi ciri khas dan identitas nilai budaya lokal;
   c. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan nilai-nilai luhur bangsa masih rendah;

d. Keanekaragaman budaya belum dikelola secara sinergis dan menyeluruh;
e. Isu-isu terorisme, hak asasi manusia maupun bencana alam;
f. Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata di luar Kabupaten Bandung Barat;
g. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial;
h. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya disekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata;
i. Pemasaran dan promosi pariwisata di wilayah regional Jawa Barat maupun seluruh Indonesia terlebih yang menjangkau wilayah luar negeri masih minim;
j. Kemajuan teknologi (IT) belum mengakses kegiatan seni budaya/tradisional yang ada, sehingga berdampak pada existensi sanggar seni budaya yang ada.

2. Peluang

Beberapa peluang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dukungan masyarakat untuk terus mengembangkan pariwisata dan budaya di Jawa Barat;
b. Komitmen dari internal Disparbud Kabupaten Bandung Barat;
c. Kabupaten Bandung Barat yang indah dan didukung keramahtamahan masyarakat merupakan modal bagi Kabupaten Bandung barat untuk membangun industri pariwisata;
d. Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata;
e. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan wisatawan memperoleh akses informasi destinasi wisata Kabupaten Bandung Barat;

f. Keterbukaan dalam memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya;

g. Kesempatan meningkatkan kwalitas dan kwantitas bagi sanggar-sanggar seni budaya;

h. Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya.

D. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
    a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    c. Pemeliharaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Sejarah
    a. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
    a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
    b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kebudayaan/Kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah;
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
   b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
   c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pemasaran Pariwisata
   a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinas dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
   a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif} Sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
   b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RPD Tahun 2024 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya BAB V. Pencermatan pada BAB V tentang rencana kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, pelaksanaan musrenbang kecamatan serta Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kabupaten Bandung Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan, menjalankan program dan kegiatan guna mengembangkan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
TUJUAN 2: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI			
IKT 2.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		**%**	**4.95**
IKT 2.2 GINIS RASIO		**%**	**0.341**
Sasaran 2.2 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
IKS 2.2.a Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB		**%**	**3%**
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	33.33
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	12.86
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan yang Akan Didaftarkan HAKI	%	9.09
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata yang ditingkatkan kompetensinya	%	34.78

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
	Persentase sumber daya manusia ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	%	29.27
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensi	%	24.39
IKS 2.2.b Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan Dalam Mendukung Pariwisata		**%**	**36.14**
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	%	35
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	8.58
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah	%	51.00
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	50
TUJUAN 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
IKT 4 INDEKS REFORMASI BIROKRASI		**Nilai/ Katagori**	**62 / B**
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah			
IKS 4.1 Nilai SAKIP		Nilai/ Katagori	**70 / BB**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPARBUD	Nilai Katagori	61 (B)

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat memiliki 2 (dua) Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata. Dimana di Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat menjalankan 1 (satu) program internal (sekretariat), dan 8 (delapan) program yang langsung mendukung tugas fungsi pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kualifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka mendukung peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
   - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
   - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisiona

- Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka mendukung peningkatan Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
   - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
   - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka mendukung peningkatan Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka mendukung peningkatan Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan

. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
   - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
   - Penetapan Cagar Budaya
b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
   - Pelindungan Cagar Budaya
   - Pengembangan Cagar Budaya

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
   - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
   - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten /Kota :
   - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota
   - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Program Pemasaran Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka pemulihan ekonomi baik dari segi kepariwisataan maupun ekonomi kreatif. Langkah yang ditempuh adalah dengan meningkatkan jumlah penyebaran informasi, promosi dan pemasaran pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya, serta mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai *stakeholder*.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinas dan

Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
   - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
   - Pengembangan Sistem Pemasaran
   - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
   - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
   - Perlindungan Hasil Kreativitas
   - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya yang terkait langsung dengan pariwisata (seperti souvenir, oleh-oleh, dsb) guna pemulihan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar;
    - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
    - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
    - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
    - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
    - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

    a. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan secara rinci yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, terlampir dalam rencana kerja ini. Rangkuman rencana program, kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2. 421.083.400,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	300.000.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	300.000.000,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			916.102.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	530.000.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	100.082.000,00
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	286.020.000,00
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			904.981.400,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	100.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	804.981.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			200.049.800,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.049.800,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1 Orang	50.000.000,00
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	1 Sertifikat	50.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	99.999.800,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			239.794.600,00
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			239.794.600,00
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	140.000.000,00
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	99.794.600,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.098.838.500,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			899.065.700
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	499.999.900,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
Penetapan Cagar Budaya			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	399.065.800,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			199.772.800,00
Pelindungan Cagar Budaya			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	9 Objek	99.722.800,00
Pengembangan Cagar Budaya			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	100.050.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.225.599.840,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			154.664.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	91.370.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.246.800,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.646.800,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.777.649.140,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	6.706.424.740,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.888.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	57.336.400,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			195.104.200,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.645.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.919.200,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.300.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	57.240.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
Pengadaan Mebel			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	73.200.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.982.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	24.982.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00
Pemeliharaan Mebel			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			640.637.825,00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			0,00
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Lokasi	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0,00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			390.638.125,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit	390.638.125,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			249.999.700,00
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	0,00
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	0,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	249.999.700,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			0,00
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota			
	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	1 Usaha Pariwisata	0,00
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota			
	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	1 Usaha	0,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			324.962.700,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			324.962.700,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	47.197.000,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen	16.640.000,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	84.991.100,00
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	176.134.600,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			0,00
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			0,00
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	0,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			0,00
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0,00
Pengembangan Sistem Pemasaran			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0,00
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0,00
Perlindungan Hasil Kreativitas			
	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0,00
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Produk	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			250.000.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			200.000.000,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	50.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	150.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			50.000.000,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	50.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif			
	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	25 Orang	0
		TOTAL	**12.400.966.665,00**

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dan diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Apabila di dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 masih belum sempurna maka dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut;
c. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur pariwisata dan kebudayaan untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanan;
b. Aparatur kebudayaan dan pariwisata yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya bisa berimbang;
c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
d. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan harus lebih itensif dalam melaksanakan koordinasi baik di dalam intern dinas maupun SKPD lain agar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna;
e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparasi akan lebih terwujud;
f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Bandung Barat, 31 Mei 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Akhmad Farid Herdawan, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670217199703100

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Bandung Barat
Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								2. 421.083.400,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								600.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
	300.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Kajian Nilai Budaya dan Pelestarian Ritual Budaya Jumlah Kajian nilai budaya dan SDM yang meningkat kompetensinya	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kegiatan 0 %	1 Objek	0 Dokumen 100 %	20.000.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								
	300.000.000,00	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kajian Nilai Budaya dan Pelestarian Ritual Budaya Jumlah Kajian nilai budaya dan SDM yang	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kegiatan 0 %	1 Orang	0 Dokumen 100 %	20.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
			meningkat kompetensinya					
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								916.102.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
	530.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Objek	-	530.000.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional								
	100.082.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.000.000,00
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								
	286.020.000,00	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Sertifikat	-	50.000.000,00
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								904.981.400,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	100.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Objek	-	100.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat								
	804.981.400,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	1.350.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								200.049.800,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								200.049.800,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
	50.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	50.000.000,00
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	50.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Sertifikat	-	50.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional								
	99.999.800,00	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Lembaga	-	100.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								239.794.600,00
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								239.794.600,00
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota								
	140.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	125.000.000,00
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah								
	99.794.600,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								1.098.838.500,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								899.065.700
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya								
	499.999.900,00	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Objek	-	572.000.000,00
Penetapan Cagar Budaya								
	399.065.800,00	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Objek	-	443.436.000,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								199.772.800,00
Pelindungan Cagar Budaya								
	99.722.800,00	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Objek	-	350.000.000,00
Pengembangan Cagar Budaya								
	100.050.000,00	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Objek	-	650.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.225.599.840,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								154.664.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	91.370.400,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	91.370.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	6.600.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	6.600.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	6.600.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	6.600.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	25.246.800,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	25.246.800,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	11.646.800,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	11.646.800,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.777.649.140,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	6.706.424.740,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	27 Orang/bulan	-	6.507.384.188,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	13.888.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	17.888.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	57.336.400,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	37.336.400,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	0,00	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	0,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Orang	-	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Orang	-	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah								195.104.200,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	0,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	0,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	43.645.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	29.996.100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	79.919.200,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	70.291.600,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	14.300.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	14.300.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	57.240.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	57.240.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	48.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00
Pengadaan Mebel								
	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	0,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	0,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								73.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	24.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	73.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	73.200.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24.982.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	24.982.500,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Unit	-	24.982.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	0,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pemeliharaan Mebel								
	0,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								640.637.825,00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								0,00
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Lokasi	-	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik	-	- Kab. Bandung Barat, Semua	-	3 Dokumen	-	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
		Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Kecamatan, Semua Kel/Desa				
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								390.638.125,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	390.638.125,00	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 % 100 %	10 Unit	-	0,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								249.999.700,00
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Lokasi	-	0,00
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan	-	- Kab. Bandung Barat, Semua	-	1 Lokasi	-	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
		Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Kecamatan, Semua Kel/Desa				
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	249.999.700,00	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	75.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	0,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								0,00
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota								
	0,00	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Usaha Pariwisata	-	0,00
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	0,00	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Usaha	-	0,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								324.962.700,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								324.962.700,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
	47.197.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	0,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
	0,00	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
	16.640.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	0,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	84.991.100,00	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Kegiatan	-	0,00
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
	176.134.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Promosi	-	239.997.842,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								0,00
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota								0,00
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif								
	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								0,00
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan								
	0,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengembangan Sistem Pemasaran								
	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif								
	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								
	0,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00
Perlindungan Hasil Kreativitas								
	0,00	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	0,00	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Produk	-	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								250.000.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								200.000.000,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif								
	0,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
	50.000.000,00	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	99.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								
	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	-	- Kab. Bandung Barat, Semua	-	30 Orang	-	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
		bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Kecamatan, Semua Kel/Desa				
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
	150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	99.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								50.000.000,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
	50.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	99.210.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif								
	0	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	-	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	-	0
TOTAL								**12.400.966.665,00**

RENCANA KERJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan akan tercapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan pengganggaran yang nantinya dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengemban tugasnya dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu Kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Bandung Barat, 4 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. TONY PRIHANTORO, MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19690919 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv

BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP 29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan DPMPTSP 42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 48

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN 64
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP 65
3.3 Program dan Kegiatan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 78
4.1 Rencana Kerja DPMPTSP 2024 78

BAB V PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	24
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja DPMPTSP KBB	30
Tabel 2.4	Nilai Investasi PMDN Per Sektor	33
Tabel 2.5	Nilai Investasi PMA Per Sektor	34
Tabel 2.6	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	35
Tabel 2.7	Persentase Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP Tahun 2022	36
Tabel 2.8	Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dasar Tahun 2022	38
Tabel 2.9	Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Usaha/Operasional Tahun 2022	40
Tabel 2.10	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	50
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	67
Tabel 4.1	Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Nilai Investasi PMDN 32
Grafik 2.2 Jumlah Investor PMDN 32

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten yang pada masa transisi Kepala Daerah disebut RPD sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD dengan langkah-langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembanguan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan

yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pembenahan dan penataan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan usaha yang efektif dan efisien sehingga tercipta pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan dan akuntabel serta ada kepastian hukum.

Rencana Kerja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat. Rencana Kerja DPMPTSP sebagai dokumen perencanaan tahunan juga menjadi pedoman DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang sebagaimana Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat;
39. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
40. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);
41. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 19).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan, yang disusun berpedoman pada Renstra Tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat untuk Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2024, serta Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Memuat pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan DPMPTSP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP serta Program dan Kegiatan DPMPTSP.

BAB IV RENCANA KERJA

Bab ini menyajikan rencana kerja dan pengalokasian dana sesuai program dan kegiatan DPMPTSP

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**100%**			**100%**		
2.18.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**10 dokumen**		**10 dokumen**			**10 Dokumen**		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	3 Dokumen		
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen		
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen		
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen		
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realaisasi kinerja SKPD	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	3 Dokumen		
2.18.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**3 dokumen**		**3 dokumen**			**3 Dokumen**		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP	14 bulan		14 bulan	14 bulan	100%	29 Orang		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan		
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Laporan		
2.18.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**		**100%**			**100%**		
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	-		
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	204 Orang		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**100%**		**100%**		**100%**	**100%**		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	1 Paket		
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-		-	-	-	3 Paket		
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	1 Paket		
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan mamin rapat	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	1 paket		
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		12 bulan	1 paket	100%	1 paket		
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar lokal, regional dan nasional	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	2 Dokumen		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	1 Laporan		
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	1 Laporan		
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		**-**	**-**	**-**	**100%**		
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	-	20 Unit		
2.18.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**		**100%**			**100%**		
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen Melalui Jasa Pos	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	1 Laporan		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**100%**			**100%**		
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	17 Unit		
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	-		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Presentase Dokumen yang Ditindaklanjuti**	**100%**		**100%**		**100%**	**-**		
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**			**-**		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Investasi Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**100%**		**100%**			**100%**		
2.18.03.2.01	**PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal**	**100%**		**100%**			**100%**		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen		
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP**	**96%**		**96%**			**92%**		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.04.2.01	**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah perizinan dan non perizinan yang terbit**	**2400 izin/non izin**		**2400 izin/non izin**	**3248 izin/non izin**	**227,85%**	**3500 Izin/ Non Izin**		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	4000 izin/non izin		4000 izin/non izin	7342 izin/non izin	183,55%	4000 Pelaku Usaha		
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	150 Kegiatan Usaha		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Presentase Penyelesaian pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	100%		100%	100%	100%	800 Orang		
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM**	**195 perusahaan**		**195 perusahaan**	**425 perusahaan**		**200 perusahaan**		
2.18.05.2.01	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal**	**256 perusahaan**		**256 perusahaan**	**365 perusahaan**	**108,33%**	**256 perusahaan**		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	14 perusahaan		14 perusahaan	14 perusahaan	100%	50 Kegiatan Usaha		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	220 perusahaan		220 perusahaan	335 perusahaan	152,27%	272 Pelaku Usaha		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	22 perusahaan		22 perusahaan	16 perusahaan	72,73%	17 Kegiatan Usaha		
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	**100%**		**100%**			**100%**		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.06.2.01	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**4 Dokumen**		
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	4 Dokumen		

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa:

- Sebanyak 29 sub kegiatan mencapai realisasi > 90% atau Sangat Baik yaitu sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Fasilitasi Kunjungan Tamu; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non

Perizinan; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

- Sebanyak 1 sub kegiatan mencapai realisasi 80% ≤ 90% atau Tinggi yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**	**8,975,390,486**	**8,077,096,602**	**89.99%**
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7,557,877,854**	**6,690,400,352**	**88.52%**
	2.18.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**160,230,308**	**159,309,108**	**99.43%**
1	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59,776,779	59,729,579	99.92%
2	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,030,600	6,030,000	99.99%
3	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,930,200	3,930,200	100.00%
4	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,564,200	3,449,150	96.77%
5	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,177,800	2,549,600	80.23%
6	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83,750,729	83,620,579	99.84%

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6,740,999,479**	**5,931,086,975**	**87.99%**
7	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,649,255,950	5,857,129,796	88.09%
8	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,063,400	12,368,900	94.68%
9	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78,680,129	61,588,279	78.28%
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**107,609,000**	**100,321,000**	**93.23%**
10	2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50,000,200	49,400,200	98.80%
11	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	57,608,800	50,920,800	88.39%
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**260,110,109**	**246,660,336**	**94.83%**
12	2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	902,000	827,125	91.70%
13	2.18.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,873,600	5,352,989	91.14%
14	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153,090,304	150,160,950	98.09%
15	2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33,772,205	32,027,550	94.83%
16	2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	100.00%
17	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,680,000	4,667,000	99.72%
18	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56,792,000	48,624,722	85.62%
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69,174,358**	**69,125,578**	**99.93%**
19	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69,174,358	69,125,578	99.93%
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**219,754,600**	**183,897,355**	**83.68%**
20	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206,692,000	171,310,355	82.88%

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
21	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,062,600	12,587,000	96.36%
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**44,069,850**	**43,743,500**	**99.26%**
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**44,069,850**	**43,743,500**	**99.26%**
22	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	43,769,850	43,443,500	99.25%
23	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	300,000	300,000	100.00%
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**281,695,758**	**273,267,058**	**97.01%**
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**281,695,758**	**273,267,058**	**97.01%**
24	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	281,695,758	273,267,058	97.01%
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**294,780,587**	**294,404,587**	**99.87%**
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**294,780,587**	**294,404,587**	**99.87%**
25	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	116,245,529	115,869,529	99.68%
26	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	97,879,158	97,879,158	100.00%
27	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	80,655,900	80,655,900	100.00%
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**692,891,958**	**671,206,626**	**96.87%**
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**692,891,958**	**671,206,626**	**96.87%**

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
28	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	84,935,479	80,595,547	94.89%
29	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	557,537,729	540,262,329	96.90%
30	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50,418,750	50,348,750	99.86%
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**104,074,479**	**104,074,479**	**100.00%**
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**104,074,479**	**104,074,479**	**100.00%**
31	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	104,074,479	104,074,479	100.00%

Realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 8.077.096.602 atau 89,99% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.975.390.486.

- Sebanyak 25 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran diatas 90% atau Sangat Baik yaitu sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan; Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Fasilitasi Kunjungan Tamu; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

- Sebanyak 5 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 80% ≤ 90% atau Tinggi yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Sebanyak 1 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 50% ≤ 79% atau Sedang yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat. Keberhasilan kinerja DPMPTSP dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung Barat

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	
1	Jumlah Nilai Investasi			500.000.000.000 (PMDN)	550.000.000.000 (PMDN)	600.000.000.000 (PMDN)	6.500.000.000.000 (PMA + PMDN)	335.675.465.946 (PMDN)	253.778.400.013 (PMDN)	704.358.400.000 (PMDN)	600.000.000.000 (PMDN)	6.500.000.000.000 (PMA + PMDN)	
2	Jumlah Investor			200 investor	250 investor	300 investor	-	241 investor	131 investor	68 investor	200 investor	-	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan			79	79,5	80	83,67	79,78	78,17	83,97	80	83,67	

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran 1 melalui Meningkatnya Investasi PMDN diperoleh jumlah Nilai Investasi PMDN pada Tahun 2022 dengan jumlah nilai investasi sebesar Rp. 704.358.400.000 atau mencapai 128,07% dari target Tahun 2022. Sedangkan, jumlah investor pada Tahun 2022 sebanyak 68 investor atau mencapai 27,20% dari target Tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020 Nilai Investasi PMDN Tahun 2022 mengalami peningkatan, dibandingkan capaian realisasi Tahun 2020 naik sebesar Rp 368.682.934.034 atau mengalami kenaikan 109,83% sedangkan dibandingkan dari capaian realisasi Tahun 2021 naik sebesar Rp 450.579.999.987 atau mengalami kenaikan 177,55%. Untuk jumlah investor pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2021. Dibandingkan dengan Tahun 2020 jumlah investor turun sebanyak 173 Investor atau mengalami penurunan sebesar 71,78% dari jumlah investor Tahun 2020 sebanyak 241 investor, sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 jumlah investor turun sebanyak 63 investor atau mengalami penurunan sebesar 48,09% dari jumlah investor Tahun 2021 sebanyak 131 investor.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Investasi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan diharapkan dapat terus meningkat. Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini mendorong pencapaian investasi yang baik sehingga mampu membuka lapangan kerja baru. Capaian tersebut didorong oleh beberapa Kawasan Ekonomi Khusus berbasis industri.

Meningkatnya Investasi dikarenakan saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan

investasinya. Peningkatan investasi juga salah satunya melalui digitalisasi layanan publik bagi percepatan perizinan berusaha di daerah. Selain itu, adanya sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) yang menjadi platform satu pintu bagi kepengurusan izin usaha, menjadi solusi sektoral yang dulu seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha mengurus izin usahanya. Serta dengan dukungan berbagai upaya temu usaha dalam rangka sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan pelaku usaha menengah kecil maupun perusahaan besar.

Grafik 2.1
Nilai Investasi PMDN

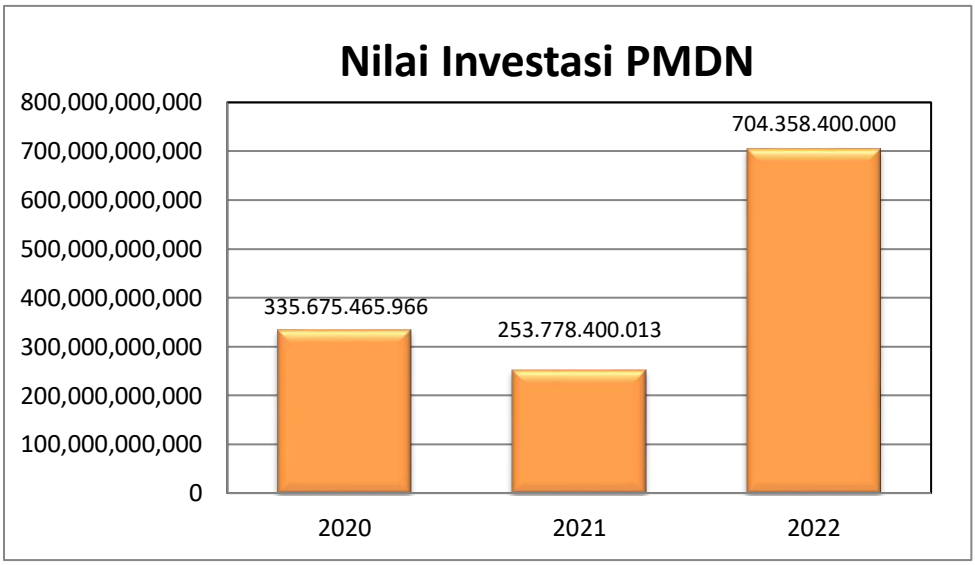

Grafik 2.2
Jumlah Investor PMDN

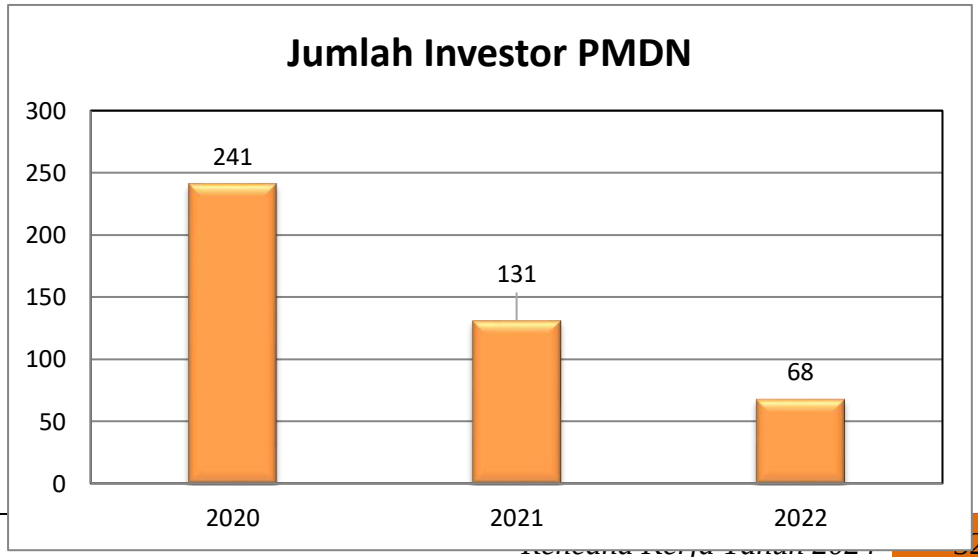

Terdapat 3 sektor pada masing - masing kategori investasi yang terdiri dari sektor primer yaitu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, sektor sekunder yaitu sektor yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi dan yang terakhir adalah sektor tersier yaitu sektor yang menghasilkan suatu jasa dari pada produk akhir seperti sektor sekunder.

Tabel 2.4
Nilai Investasi PMDN Per Sektor

Sektor	Nilai Investasi PMDN	LKPM PMDN	%
Sektor Primer	Rp 40.388.100.000	17	5,73%
Sektor Sekunder	Rp 595.335.800.000	282	84,52%
Sektor Tersier	Rp 68.634.500.000	323	9,74%
TOTAL	**Rp 704.358.400.000**	**622**	**100%**

Sumber: Bidang Penanaman Modal DPMPTSP, Kab. Bandung Barat 2022

Dari tabel 3.5, sektor yang paling besar dalam menyumbang investasi di Kabupaten Bandung Barat terdapat pada sektor sekunder yaitu sebesar 595.335.800.000 atau 33,25%. Pada sektor sekunder, bidang usaha Industri Tekstil penyumbang investasi terbesar yaitu Rp 234.217.000.000,00 atau 33,25% (data terdapat pada lampiran). Sektor yang paling besar Jumlah Proyek PMDN di Kabupaten Bandung Barat, ditanamkan pada sektor tersier di bidang usaha perdagangan dan reparasi sebanyak 323 buah proyek atau 52% dari jumlah keseluruhan Proyek PMDN.

Disamping nilai realisasi investasi PMDN pada Tahun 2022, terdapat juga realisasi investasi untuk PMA di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 yang ditanamkan oleh para investor yaitu sebesar

Rp 5.593.226.067.466 atau US.$. 389.771.800 (Kurs US$ 1 = Rp 14.350) meningkat sebesar Rp 2.967.429.574.264 atau US.$ 209.922.700 dari periode investasi yang sama pada Tahun 2021 sebesar 2.625.796.493.202 atau US.$ 179.849.100, jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.283 orang meningkat sebanyak 750 orang dari periode yang sama Tahun 2021 sebanyak 533 orang, jumlah proyek LKPM PMA meningkat dari 143 proyek LKPM PMA pada periode Januari s.d Desember Tahun 2021, menjadi 160 proyek LKPM PMA pada Bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 atau naik 17 proyek LKPM PMA.

Tabel 2.5
Nilai Investasi PMA Per Sektor

Sektor	Nilai Investasi PMA	Jumah Investor PMA	%
Sektor Primer	Rp 341.529.855	10	0,01%
Sektor Sekunder	Rp 276.010.801.227	82	4,93%
Sektor Tersier	Rp 5.316.873.736.384	68	95,06%
TOTAL	**Rp 5.593.226.067.466**	**160**	**100%**

Sumber: Bidang Penanaman Modal DPMPTSP, Kab. Bandung Barat 2022

Sektor yang paling besar Jumlah investasi di Kabupaten Bandung Barat, ditanamkan pada sektor tersier bidang Transportasi, Gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 4.337.364.460.307,49 atau 77,55%. Sektor yang paling besar Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Kabupaten Bandung Barat, ditanamkan pada sector tersier, bidang usaha Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sejumlah 663 Orang atau 52%. Sektor yang paling besar Jumlah Proyek PMA di Kabupaten Bandung Barat, ditanamkan pada sektor Sekunder, bidang Industri Kimia dan farmasi sebanyak 31 buah proyek atau 19%

(data dapat dilihat pada lampiran).

Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan serta bentuk penerapan indikator subjektif adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui kewajiban serta penyelenggaraan pelayanan publik dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan bagi penyelenggaraan selain digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan pelayanan publik. Ruang lingkup kegiatan SKM ini adalah melakukan kegiatan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2022.

Tabel 2.6
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022		
		REALISASI	REALISASI	TARGET 2022	REALISASI	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	79,82	78,17	79,50	83,97	105,62%

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 sebesar 79,50 nilai ini berada pada rentang 76,61 – 88,30 yang menunjukan mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori B yang artinya

menunjukkan kinerja dalam kategori Baik, dengan rata-rata unsur nilai terbaik adalah Kualitas Sarana dan Prasarana sedangkan yang terendah adalah Kecepatan waktu proses pelayanan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, nilai survey kepuasan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1,33 tetapi mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,32. Adapun persentase rata-rata proses perizinan pada Tahun 2022 dalam menunjang Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Persentase Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP Tahun 2022

No	Izin	SOP (Hari)	Jumlah Izin Terbit Tidak Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit	% SOP
1	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON-BERUSAHA	30	58	78	136	57,35
2	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR (SD & SMP)	12	16	0	16	0,00
3	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL	44	32	25	57	43,86
4	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK, PUSAT BELAJAR MASYARAKAT, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)	24	48	38	86	44,19
5	IZIN PRAKTIK DOKTER (MANDIRI & FASKES)	11	21	384	405	94,81
6	IZIN PRAKTIK PERAWAT	11	19	394	413	95,40
7	IZIN PRAKTIK BIDAN (MANDIRI & FASKES)	11	25	367	392	93,62
8	IZIN PRAKTIK APOTEKER	11	10	157	167	94,01

No	Izin	SOP (Hari)	Jumlah Izin Terbit Tidak Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit	% SOP
9	IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	11	3	128	131	97,71
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	11	1	7	8	87,50
11	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA	11	0	2	2	100,00
12	IZIN KERJA RADIOGRAFER	11	2	13	15	86,67
13	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	11	1	3	4	75,00
14	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL	11	0	0	0	0,00
15	IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS	11	3	53	56	94,64
16	IZIN PRAKTIK ANALIS/ AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	11	7	90	97	92,78
17	IZIN PRAKTIK GIZI	11	1	23	24	95,83
18	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (MANDIRI & FASKES)	11	2	7	9	77,78
19	IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	11	2	26	28	92,86
20	SURAT KETERANGAN TIDAK BERPRAKTIK DI KBB	11	10	833	843	98,81
21	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMANEN & INSIDENTIL)	14	127	27	154	17,53
22	TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	19	2	21	9,52
23	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL	8	0	0	0	0,00
24	IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	10	151	30	181	16,57
25	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	11	1	2	3	66,67

No	Izin	SOP (Hari)	Jumlah Izin Terbit Tidak Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit	% SOP
26	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
27	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PELAYANAN INSEMINATOR KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
28	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN	11	0	0	0	0,00
29	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI	11	0	0	0	0,00
TOTAL			**559**	**2689**	**3248**	**82,79**

Realisasi penerbitan perizinan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dasar Tahun 2022

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	136
2	Izin Pendirian Pendidikan Dasar (SD & SMP)	16
3	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal	57
4	Izin Pendirian Pendidikan Jalur Non Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan)	86
5	Izin Praktik Dokter (Mandiri & Faskes)	405
6	Izin Praktik Perawat	413
7	Izin Praktik Bidan (Mandiri & Faskes)	392
8	Izin Praktik Apoteker	167

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
9	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	131
10	Izin Praktik Fisioterapis	8
11	Izin Praktik Terapis Wicara	2
12	Izin Kerja Radiografer	15
13	Izin Kerja Refraksionis Optisien	4
14	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	0
15	Izin Praktik Rekam Medis	56
16	Izin Praktik Analis/ Ahli Teknologi Laboratorium Medik	97
17	Izin Praktik Gizi	24
18	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (Mandiri & Faskes)	9
19	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	28
20	Surat Keterangan Tidak Berpraktik di KBB	843
21	Izin Penyelenggaraan Reklame (Permanen & Insidentil)	154
22	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	21
23	Izin Pengumpulan Sumbangan dan Penyaluran Bantuan Sosial	0
24	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	181
25	Izin Praktik Dokter Hewan	3
26	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	0
27	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pelayanan Inseminator Kesehatan Hewan	0
28	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	0
29	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi	0
TOTAL		**3248**

Tabel 2.9
Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Usaha/Operasional
Tahun 2022

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	146
2	Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2
3	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	8
4	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	1
5	Surat Izin Usaha Perdagangan	10
6	Izin Usaha Toko Modern	10
7	Tanda Daftar Gudang	6
8	Izin Usaha Industri	10
9	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	6
10	Izin Penyelenggaraan Reklame	164
11	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5
12	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	0
13	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	8
14	Izin Pengumpulan Sumbangan Dan Penyaluran Bantuan Sosial	1
15	Izin Praktik Perawat	318
16	Izin Praktik Bidan (Mandiri & Faskes)	177
17	Izin Praktik Apoteker	156
18	Izin Kerja Teknis Kefarmasian	109
19	Izin Praktik Dokter (Mandiri & Faskes)	342
20	Izin Praktik Fisioterapis	4
21	Izin Kerja Radiografer	12

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
22	Izin Kerja Refraksionis Optisien	3
23	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)	38
24	Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS)	9
25	Izin Praktik Rekam Medis (SIPRM)	20
26	Izin Praktik Gizi (SIPGz)	11
27	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (Mandiri & Faskes)	12
28	Izin Apotek	27
29	Surat Keterangan Tidak Berpraktik	213
30	Izin Toko Obat	0
31	Sertifikast Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	110
32	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	10
33	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D	3
34	Izin Klinik Pratama	12
35	Izin Klinik Utama	1
36	Izin Penyelenggaraan Optik	0
37	Izin Pendirian Pendidikan Dasar (SD & SMP)	7
38	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal	8
39	Izin Pendirian Pendidikan Jalur Non Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan)	1
40	Izin Usaha Peternakan	1
41	Izin Praktek Dokter Hewan	7
42	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	1
43	Izin Usaha Perikanan	1
TOTAL		**1990**

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan DPMPTSP

2.3.1. Tingkat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan system informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan system informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan menanaman modal, dan system informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan menanaman modal, dan system informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan DPMPTSP lebih difokuskan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pembenahan dan penataan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan usaha yang efektif dan efisien sehingga tercipta pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan dan akuntabel serta ada kepastian hukum.

Selain itu kinerja DPMPTSP juga diukur dari peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya, baik itu dari segi persentase pertumbuhan jumlah investor dari tahun ke tahun serta jumlah nilai investasi. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat juga dapat diukur dari Survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh pemohon izin.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Identifikasi permasalahan DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Belum tersedianya dokumen investasi (Peta Potensi, Pra FS, FS atau DED) yang terukur untuk ditawarkan kepada investor;
b. Belum dilakukannya penyesuaian Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perbup RUPM;
c. Terbatasnya anggaran untuk penyusunan dokumen investasi dan pelaksanaan promosi;
d. Belum tersedianya regulasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal;

f. Rendahnya tingkat kesadaran perusahaan dalam menyampaikan LKPM;
g. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM penata kelola Penanaman Modal;
h. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan informasi;
i. Kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha di lapangan;
j. Kurangnya Sosialisasi, bimtek dan optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan keliling;
k. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik;
l. Rendahnya akses SDM terhadap peningkatan kapasitas SDM (Pelatihan, Diklat, Bimtek).

2.3.3. Dampak Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat

Visi pembangunan daerah mengarah pada pencapaian tujuan daerah, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, yang merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga membuka ruang dan potensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bandung Barat dan mempunyai korelasi yang signifikan dalam menunjang akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barat khususnya, Provinsi Jawa Barat dan nasional pada umumnya. Visi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang Cerdas, Maju, Makmur dan Agamasi dengan **Visi** pembangunan daerah Tahun 2005-2025 adalah:

“KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN”

Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah:

Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian

Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kreatif,
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*),
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pengembangan Industri Yang Berdaya Saing Serta Berkeadilan,
4. Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumber daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan,
5. Mengintegrasikan Kearifan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Dalam Pembangunan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”** dan misi 3 yakni **“Meningkatkan perekonomian masyarakat dan**

pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan".

Dampak pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
   - Pelayanan perizinan dengan sistem OSS dan pelayanan MPP menjadi lebih mudah;
   - Kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dan nonperizinan meningkat.

b. Optimalisasi Perencanaan, Promosi, pengembangan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal
   - Mempercepat Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
   - Terdapat penyusunan regulasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
   - Meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan LKPM.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Keberhasilan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat yang masih belum lengkap.
3. Belum tersedianya detail enginering design (DED) terhadap potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan.
4. Belum meratanya penyebaran infrastruktur yang mendukung pengembangan investasi.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi perizinan, masih ada pola pikir bahwa melengkapi/tertib izin itu bukan merupakan suatu kewajiban.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengembangan pelayanan adalah:

1. Adanya pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta dimana TOD nya terletak di Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang investasi di seluruh Kabupaten Bandung Barat.
3. Pengembangan lokasi wisata bertaraf Nasional maupun Internasional di Kabupaten Bandung Barat.
4. Pengembangan wilayah kawasan industri di Kabupaten Bandung Barat.
5. Penyederhanaan birokrasi perizinan melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Tersedianya Mal Pelayanan Publik.

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya layanan informasi perizinan secara menyeluruh;
2. Belum optimalnya penyusunan/penerapan inovasi pelayanan Perizinan;
3. Belum ada kajian yang lengkap (Masterplan, DED dan FS) potensi investasi dari dinas teknis;
4. Tingginya ketimpangan investasi antara wilayah
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal;
6. Penyediaan Infrastruktur dan penyediaan sistem informasi masih terbatas;
7. Ketidakpastian penerapan sistem informasi pelayanan perizinan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas

pembangunan daerah memuat program–program yang berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**				**10,488,404,877**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**				**9,488,707,236**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**DPMPTSP**	**Persentase Penunjang urusan pemerintah daerah**		**9,060,835,877**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**DPMPTSP**	**Persentase Penunjang urusan pemerintah daerah**		**7,707,198,272**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**124,499,700**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**74,500,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	32,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13,500,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	32,499,700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	13,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Keuangan Dinas**	**3 Dokumen**	**6,831,547,990**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**6,863,695,070**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang / Bulan	6,795,547,990	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang / Bulan	6,838,695,070	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**143,830,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**70,610,100**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	57,830,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	31,080,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	41,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	39,530,100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	45,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,720,885,887**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**458,927,596**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,493,947	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,493,947	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,356,594,200	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	168,413,407	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21,998,582	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16,490,341	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	146,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81,731,200	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45,008,058	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36,132,601	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7,800,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12,900,000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134,991,100	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134,766,100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPMPTSP**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**56,186,300**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**11,025,506**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5,037,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5,037,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	51,148,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	5,988,006	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPMPTSP**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**183,886,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**228,440,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	170,536,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	218,290,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	13,350,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	10,150,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**DPMPTSP**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**	**149,999,600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**	**211,007,800**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5 Kegiatan Usaha**	**149,999,600**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5 Kegiatan Usaha**	**111,269,500**	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	149,999,600	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	111,269,500	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Investasi**	**1 Dokumen**	**67,999,900**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Investasi**	**1 Dokumen**	**99,738,300**	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67,999,900	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	99,738,300	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**DPMPTSP**	**Persentase promosi penanaman modal**	**100%**	**319,999,300**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase promosi penanaman modal**	**100%**	**480,991,700**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**DPMPTSP**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**319,999,300**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**DPMPTSP**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**480,991,700**	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	199,999,800	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	427,916,700	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	119,999,500	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	53,075,000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**DPMPTSP**	**Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP**	**84%**	**619,570,200**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP**	**84%**	**519,374,000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit**	**3000 Izin dan Nonizin**	**619,570,200**	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit**	**3000 Izin dan Nonizin**	**519,374,000**	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Barusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	276,799,200	Penyediaan Pelayanan Perizinan Barusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	257,017,600	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	235,300,000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	179,269,400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	107,471,000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	83,087,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**DPMPTSP**	**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN LKPM**	**1082 KBLI**	**135,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN LKPM**	**882 KBLI**	**516,163,464**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		**135,000,000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**274 Perusahaan**	**516,163,464**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha	50,000,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	40,240,000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	50,000,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	326,494,464	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku; Dilakukan Inspeksi Lapangan; serya Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	35,000,000	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku; Dilakukan Inspeksi Lapangan; serya Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16 Kegiatan Usaha	149,429,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**DPMPTSP**	**PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIMANFAATKAN**	**100%**	**135,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIMANFAATKAN**	**100%**	**53,972,000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi**	**1 Dokumen**	**135,000,000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi**	**1 Dokumen**	**53,972,000**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	135,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	53,972,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi/usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2023, merumuskan visi sebagai berikut, “BKPM yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2020-2023, yaitu: (1) terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal dan (2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima. Tujuan BKPM pada Tahun 2020-2023, sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kreteria yang mudah dipahami. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan dan sasaran pertama :**

   Tujuan :

   Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha

   Sasaran :

   Meningkatnya investasi

2. **Tujuan dan sasaran kedua :**

   Tujuan :

   Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

   Sasaran :

   Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Pada Renja Tahun anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat merencanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga

puluh empat) Sub Kegiatan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.488.707.236 (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan APBN.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung Barat

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9,488,707,236**				**9,907,000,000**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**				**9,488,707,236**				**9,907,000,000**
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**70,45 / BB Nilai/ Predikat**	**7,707,198,272**			**70,50 / BB Nilai/ Predikat**	**8,642,500,000**
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**9 Dokumen**	**74,500,000**			**9 Dokumen**	**199,500,000**
1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 Dokumen	13,500,000	APBD		2 Dokumen	50,000,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	12,000,000	APBD		1 Dokumen	26,000,000
3	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	12,000,000	APBD		1 Dokumen	26,000,000
4	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	12,000,000	APBD		1 Dokumen	26,000,000
5	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	12,000,000	APBD		1 Dokumen	26,000,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	3 Laporan	13,000,000	APBD		3 Dokumen	45,500,000
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Dinas**	**DPMPTSP**	**3 Dokumen**	**6,863,695,070**			**3 Dokumen**	**7,481,500,000**
7	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	26 Orang / Bulan	6,838,695,070	APBD		27 Orang / Bulan	7,400,000,000
8	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	13,000,000	APBD		1 Laporan	45,000,000
9	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	2 Laporan	12,000,000	APBD		2 Laporan	36,500,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**100%**	**70,610,100**			**100%**	**173,000,000**
10	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	1 Paket	31,080,000	APBD			-
11	2.18.01.2.05.00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	45 Orang	39,530,100	APBD		60	87,000,000
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**100%**	**458,927,596**			**100%**	**547,100,000**
12	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	3,493,947	APBD		**1 Paket**	8,000,000
13	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	168,413,407	APBD		**1 Paket**	50,500,000
14	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	16,490,341	APBD		**1 Paket**	27,500,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	81,731,200	APBD		**1 Paket**	120,500,000
16	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	36,132,601	APBD		**1 Paket**	59,500,000
17	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	2 Dokumen	5,000,000	APBD		**2 Dokumen**	6,100,000
18	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	1 Laporan	12,900,000	APBD		**1 Laporan**	23,000,000
19	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	134,766,100	APBD		**1 Laporan**	252,000,000
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**100%**	**11,025,506**			**100%**	**22,100,000**
20	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 laporan	5,037,500	APBD		1 Laporan	11,600,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	1 laporan	5,988,006	APBD		1 Laporan	10,500,000
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**100%**	**228,440,000**			**100%**	**219,300,000**
22	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	19 Unit	218,290,000	APBD		20 Unit	183,800,000
23	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	8 Unit	10,150,000	APBD		10 Unit	35,500,000
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**PRESENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**100%**	**211,007,800**			**100%**	**-**

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**5 Kegiatan Usaha**	**111,269,500**			**-**	**-**
24	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	1 Dokumen	111,269,500	APBD		-	-
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Investasi**	**DPMPTSP**	**1 Dokumen**	**99,738,300**				**-**
25	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	99,738,300	APBD		-	-
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**100%**	**480,991,700**				**213,500,000**
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**DPMPTSP**	**100%**	**480,991,700**				**213,500,000**

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	427,916,700	APBD		1 Dokumen	213,500,000
27	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	53,075,000	APBD			-
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE WAKTU PROSES PELAYANAN PERIZINAN SESUAI SOP**	**DPMPTSP**	**84%**	**519,374,000**			**85%**	**441,000,000**
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit**	**DPMPTSP**	**3000 Izin dan Nonizin**	**519,374,000**			**3.500 Izin dan Nonizin**	**441,000,000**
28	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Barusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	6000 Pelaku Usaha	257,017,600	APBD		6500 Pelaku Usaha	221,000,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	300 Pelaku Usaha	179,269,400	APBD		350 Pelaku Usaha	145,000,000
30	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	15 Kegiatan Usaha	83,087,000	APBD		20 Kegiatan Usaha	75,000,000
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN LKPM**	**DPMPTSP**	**882 KBLI**	**516,163,464**			**982 KBLI**	**468,500,000**
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**DPMPTSP**	**274 Perusahaan**	**516,163,464**			**280 perusahaan**	**468,500,000**

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	8 Kegiatan Usaha	40,240,000	APBD		25 Kegiatan Usaha	125,000,000
32	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	250 Pelaku Usaha	326,494,464	APBD		255 Pelaku Usaha	257,000,000
33	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku; Dilakukan Inspeksi Lapangan; serya Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	16 Kegiatan Usaha	149,429,000	APBD		25 Kegiatan Usaha	86,500,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIMANFAATKAN**	**DPMPTSP**	**100%**	**53,972,000**			**100%**	**141,500,000**
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi**	**DPMPTSP**	**1 Dokumen**	**53,972,000**			**1 Dokumen**	**141,500,000**
34	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	53,972,000	APBD		**1 Dokumen**	141,500,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
1	**2.18**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**	**9,488,707,236**
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7,707,198,272**
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74,500,000**
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,500,000
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,000,000
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,000,000
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,000,000
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,000,000
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,000,000
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6,863,695,070**
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,838,695,070
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,000,000
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,000,000
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**70,610,100**
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31,080,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
	2.18.01.2.05.00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39,530,100
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**458,927,596**
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,493,947
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	168,413,407
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	16,490,341
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,731,200
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,132,601
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,900,000
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	134,766,100
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11,025,506**
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,037,500
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,988,006
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228,440,000**
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218,290,000
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,150,000

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**211,007,800**
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**111,269,500**
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	111,269,500
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**99,738,300**
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	99,738,300
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**480,991,700**
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**480,991,700**
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	427,916,700
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	53,075,000
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**519,374,000**
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**519,374,000**
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Barusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	257,017,600
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	179,269,400

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	83,087,000
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**516,163,464**
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**516,163,464**
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40,240,000
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	326,494,464
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	149,429,000
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**53,972,000**
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**53,972,000**
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	53,972,000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat bertujuan mencapai Sasaran serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melaksanakan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Belum optimalnya dukungan instansi teknis dalam Koordinasi Pengelolaan Perizinan, dikarenakan Tim Pengelola Perizinan/Tim Teknis masih lintas Perangkat Daerah, sehingga menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelayanan administrasi perizinan.
3. Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Bandung Barat sehingga akan meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu komponen dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Kaidah-kaidah pelaksanaan:

1. Mengkaji kegiatan yang menjadi prioritas.
2. Mengoptimalkan koordinasi pengelolaan perizinan dengan tim pengelola izin/tim teknis.
3. Mengoptimalkan data dan informasi mengenai potensi investasi di Kabupaten Bandung Barat terutama tentang kajian-kajian teknis.

Rencana tindak lanjut:

1. Melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas penunjang terhadap pelayanan perizinan dan penyelenggaraan penanaman modal.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
3. Meningkatkan kesadaran atau tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

semoga dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing–masing pejabat dan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 4 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. TONY PRIHANTORO, MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19690919 199003 1 003

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komp. Pemda Jl Raya Padalarang – Cisarua KM 2
Ngamprah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang- Undang Dasar 1945 pasal 31 menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hak konstitusional warga Negara dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya dan kemajuan bangsa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan PemerintahKabupaten Bandung Barat pasal 216 ayat 1 di tegaskan pula bahwa setiap penduduk Kabupaten Bandung Barat berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, agamis, terjangkau dan berdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Secara umum pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat masih dihadapkan pada empat kelompok permasalahan, yaitu : *Pertama*, masalah-masalah yang berkaitan dengan askes terhadap kesempatan belajar yang belum mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, *kedua,* masalah-masalah yang berkaitan dengan rendahnya kualitas, relevansi dan daya saing lulusan lembaga pendidikan, *ketiga,* masalah-masalah yang berkaitan dengan lemahnya manajemen pelayanan pendidikan yang ditandai dengan tata kelola (governance) yang kurang baik dan tingkat akuntabilitas yang rendah, dan *keempat,* masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi pendidikan berkarakter untuk mendukung kekhususan Kabupaten Bandung Barat.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan komitmen keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang beruntung dalam menjangkau layanan pendidikan, terutama bagi penduduk miskin, anak yatim/piatu, anak dengan kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, masyarakat di daerah terpencil, perbatasan. Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi tersebut dengan Fokus perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak seluruh lapisan masyarakat yang selama ini yang belum terlayani (*underserved)*.

Penyusunan Rencana Kerja ini menggunakan data pendukung dari berbagai sumber, antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bappeda Kabupaten Bandung Barat dan Kantor BPS Kabupaten Bandung Barat. Sebagai Rencana Kerja Tahunan SKPD, Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan Pihak terkait.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Salinan Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Salinan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 7/199/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 6/173/2017);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat;
25. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 49 Seri D);
26. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 28 Seri D).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
28. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan untuk kurun waktu satu tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembagunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan Dinas Pendidikan. Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional maka rencana kerja ini merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja ini juga pertimbangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tahun-tahun sebelumnya, serta perkiraan hasil kegiatan tahun 2023.

Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah untuk *:*

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sebagai pelaksana tahun keempat periode Renstra.
2. Memberikan gambaran tentang visi dan misi pembangunan pendidikn Kabupaten Bandung Barat yang diimplementasikan kedalam tahapan pelaksana setiap tahun anggaran.
3. Memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan pendidikan yang berkesinambungan untuk mewujudkan visi pendidikan.
4. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
5. Menyiapkan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam melaksanakan pembangunan pendidikan tahun 2024.

D. Sistematika

Rencana kerja ini terdiri dari enam bab, masing-masing terdiri dari :

Bab I, “Pendahuluan” menjelaskan hal-hal yang umum mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dan sistimatika rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Bab II, memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian da pelengkapan, tugas pokok dan fungsi serta permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas Pendidikan sebagai SKPD.

Bab III, mengurai tentang visi, misi dan strategi yang ditempuh dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Bab IV, memuat gambaran tentang arah kebijakan yang menguat uraian yang mengenai sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran.

Bab V, memuat uraian masing-masing komponen program dan rincian kegiatan menurut program pembangunan pendidikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

Bab VI adalah “Penutup” yang menjelasakan tentang penguatan peran stakeholders, mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksana program dan kegiatan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berikut adalah tabel evaluasi Renja 2023 dan perkiraan Renja pada tahun 2024, yaitu:

Tabel
Renja Tahun 2023

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Proktesan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proktesan Misi Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						508,306,265,361							1,355,051,648,000	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						468,213,834,867							1,019,753,520,000	
1	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						388,230,500							2,371,388,000	
1	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya wiang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan penguasan tinggi		1 Dokumen	116,160,000	Dinas Pendidikan
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya wiang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan penguasan tinggi				
1	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya wiang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan penguasan tinggi		1 Dokumen	116,160,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya wiang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan penguasan tinggi		1 Dokumen	116,160,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	21,000,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya wiang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan penguasan tinggi		1 Dokumen	116,160,000	Dinas Pendidikan

1	1	1	02.03		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	294.230.500	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta		13 Laporan	2.014.330.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**467.795.646.667**								**1.883.721.406.000**	
1	1	1	02.03		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7116 Orang/Bulan	467.552.140.817	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pegunaan tinggi		7116 Orang/Bulan	1.002.467.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pegunaan tinggi		1 Dokumen	205.920.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	92.505.250	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pegunaan tinggi		1 Dokumen	282.690.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	85.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pegunaan tinggi		1 Laporan	240.540.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	50.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pegunaan tinggi		2 Laporan	435.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	13.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbudaya saling dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pegunaan tinggi		1 Dokumen	83.160.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**488.411.250**								**1.020.600.000**	

1	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	486.411.250	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqya wang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		1 Laporan	1.029.630.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.04		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**489.747.150**								**1.375.450.000**	
1	1	1	02.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	397.747.150	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqya wang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		28 Paket	153.120.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.04	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	30.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqya wang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		21 Paket	104.250.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.04	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	35.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqya wang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		20 Dokumen	54.120.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.04	9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	47.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqya wang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		12 Laporan	78.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.05		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**146.000.000**								**203.440.000**	
1	1	1	02.05	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqya wang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		12 Laporan	43.560.000	Dinas Pendidikan

1	1	1	02.03	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	156,000,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tinggi		12 Laporan	209,880,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,800,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tinggi		12 Laporan	162,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**17,800,000**								**52,200,000**	
1	1	1	02.03	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	12,000,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tinggi		8 Unit	28,400,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02.03	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,800,000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tinggi		10 Unit	25,800,000	Dinas Pendidikan
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**38,888,218,344**								**339,577,446,000**	
1	1	2	02.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**						**22,011,769,085**								**204,347,428,000**	
1	1	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2,000,000,139	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tinggi		10 Ruang	1,740,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.01	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				32 Unit	3,580,000,244	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta		32 Unit	980,000,000	Dinas Pendidikan
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD							
1	1	2	02.01	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				57 Ruang	8,580,301,412	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbiaya ringan dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama dan kebangsaan, serta		57 Ruang	3,600,000,000	Dinas Pendidikan
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD							

1	1	1	2	02.01	14	Pengadaan Meleh Sekolah	Jumlah Meleh sekolah yang Tersedia				75 Paket	4.250.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta		75 Paket	3.957.360.000	Dinas Pendidikan
														Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				11 Paket	500.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		11 Paket	690.840.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10000 Unit	999.824.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		10000 Unit	3.750.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	02.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				60 Paket	1.500.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta		60 Paket	2.620.200.000	Dinas Pendidikan
														DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
1	1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				703 Satuan Pendidikan	80.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		703 Satuan Pendidikan	720.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	02.01	25	Pemrosoan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				525 Peserta Didik	85.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		525 Peserta Didik	680.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	02.01	27	Pengembangan Kurri Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kurri Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				11 Kegiatan	1.500.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		11 Kegiatan	9.150.000.000	Dinas Pendidikan

1	1	2	02.03	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.				1 Kegiatan	1.136.963.300	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum					1 Kegiatan	2.273.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	**2**	02.03		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**						**14.251.345.888**								**94.457.232.989**	
1	1	2	02.03	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	1.000.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tingg	Sekolah	10 Ruang	1.740.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	1.500.000.104	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta	Sekolah	50 Unit	990.000.000	Dinas Pendidikan
													DAK Fisik:Bidang Pendidikan-Reguler-SMP							
1	1	2	02.03	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				39 Ruang	5.000.001.080	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta	Sekolah	39 Ruang	8.209.840.000	Dinas Pendidikan
													DAK Fisik:Bidang Pendidikan-Reguler-SMP							
1	1	2	02.03	23	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				100 Paket	3.000.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta	Sekolah	100 Paket	3.957.393.000	Dinas Pendidikan
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi							
1	1	2	02.03	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				11 Paket	500.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tingg	Sekolah	11 Paket	690.900.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				7000 Paket	698.750.400	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunaan tingg	Sekolah	7000 Paket	3.750.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				22 Paket	1.250.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta	Sekolah	22 Paket	2.620.200.000	Dinas Pendidikan
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi							

1	1	2	02.03	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				150 Satuan Pendidikan	80.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengukuran tinggi	Sekolah	150 Satuan Pendidikan	726.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	39	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				600 Peserta Didik	100.800.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengukuran tinggi	Sekolah	600 Peserta Didik	1.200.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	40	Pengembangan Kurn Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1200 Orang	1.000.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengukuran tinggi	Sekolah	1200 Orang	560.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				5 Kegiatan	240.754.150	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengukuran tinggi	Sekolah	5 Kegiatan	2.270.400.000	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	02.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**						**2.210.851.341**								**40.579.840.000**	
1	1	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	882.850.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengukuran tinggi		1 Unit	124.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	555.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengukuran tinggi		2 Unit	240.840.000	Dinas Pendidikan

1	1	2	02.03	7	Pengadaan Meubel PAUD	Jumlah Meubel PAUD yang Tersedia				20 Paket	41.160.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi		20 Paket	1.087.680.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				50 Paket	253.365.800	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta		50 Paket	5.281.240.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	12	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Rosenta Didik PAUD yang Tersedia				2000 Paket	350.570.200	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi		2000 Paket	960.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				1 Kegiatan	50.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi		1 Kegiatan	145.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	15	Pengembangan Kurn Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2450 Orang	5.290.700	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi		2450 Orang	4.500.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				4 Kegiatan	155.801.900	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi		4 Kegiatan	755.040.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				895 Satuan Pendidikan	50.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, bertaqwa sang dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi		895 Satuan Pendidikan	145.200.000	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	02.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**						**280.131.900**								

1	1	2	02.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				10 Unit	100.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya asing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pergunan tinggi		10 Unit	400.500.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Kegiatan	50.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya asing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pergunan tinggi		1 Kegiatan	145.230.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.04	15	Pengembangan Kain Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengembangan Kain Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				1 Kegiatan	50.000.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya asing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pergunan tinggi		1 Kegiatan	145.230.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				2 Kegiatan	61.155.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya asing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pergunan tinggi		2 Kegiatan	969.550.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				41 Satuan Pendidikan	24.375.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya asing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pergunan tinggi		41 Satuan Pendidikan	120.120.000	Dinas Pendidikan
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**181.412.050**								**1.535.750.000**	
1	**1**	**3**	**02.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**						**39.900.000**								**1.424.250.000**	
1	1	3	02.01	2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				2 Buku	39.900.000	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya asing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pergunan tinggi		2 Buku	190.750.000	Dinas Pendidikan

1	1	2	02.03		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**						**141.412.250**							**414.480.000**	
1	1	2	02.03	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	39.999.800	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		2 Dokumen	124.080.000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02.03	2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				2 Buku	101.412.450	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		2 Buku	145.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	**9**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**45.000.200**							**855.320.000**	
1	1	**9**	02.01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**45.000.200**							**855.320.000**	
1	1	9	02.01	1	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				2 Dokumen	45.000.200	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berbaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan pengunan tinggi		2 Dokumen	145.200.000	Dinas Pendidikan
										TOTAL	**508.308.265.551**							**1.350.001.840.000**	

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pendidikan tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selain itu, rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat pun disinergikan dengan perencanaan pendidikan yang disusun baik oleh Dinas Provinsi Jawa Barat maupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang disusun kali ini merupakan dokumen perencanaan komprehensif dalam rangka penyusunan dan penetapan program dan kegiatan yang strategis untuk tiga tahun kedepan yaitu tahun 2024 - 2026 dengan mengakomodir SOTK yang ada di dalam Dinas. Renstra tersebut kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan Jajaran dibawahnya. Dari rencana strategis turun menjadi Renja dan Perjanjian Kinerja yang berisikan tentang sasaran serta indikator target yang harus dicapai oleh SKPD. Berikut adalah paparan sasaran strategis dan target indikator serta target anggaran untuk mencapai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, adalah:

Tabel
Target Renstra Peralihan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			2024	2025	2026		
2	3	4	7	8	9	10	11
Terwujudnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal	Harapan Lama Sekolah	11,93	11,96	11,98	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD
							APM SD
							APS (7-12)
							Ruang Kelas SD dalam kondisi baik
							Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
							Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
							Indeks Iklim Keamanan SD
							Indeks Iklim Kebinekaan SD
							Indeks Inklusivitas SD
							APK SMP
							APM SMP
							APS (13-15)
							Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik
							Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
							Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
							Indeks Iklim Keamanan SMP
							Indeks Iklim Kebinekaan SMP
							Indeks Inklusivitas SMP
							Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			2024	2025	2026		
2	3	4	7	8	9	10	11
							Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
							Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1
							Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)
							Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin
						Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD
							Rasio Pengawas SD
							Rasio Guru/Murid SMP
							Rasio Pengawas SMP
							Rasio Guru/Murid PAUD
							Rasio Penilik PAUD
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
							Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra
						Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat
			8,27	8,29	8,31	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			2024	2025	2026		
2	3	4	7	8	9	10	11
		Rata-Rata Lama Sekolah					APM SD
							APS (7-12)
							Ruang Kelas SD dalam kondisi baik
							Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
							Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
							Indeks Iklim Keamanan SD
							Indeks Iklim Kebinekaan SD
							Indeks Inklusivitas SD
							APK SMP
							APM SMP
							APS (13-15)
							Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik
							Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
							Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
							Indeks Iklim Keamanan SMP
							Indeks Iklim Kebinekaan SMP
							Indeks Inklusivitas SMP
							Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik
							Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			2024	2025	2026		
2	3	4	7	8	9	10	11
							Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1
							Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)
							Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin
						Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD
							Rasio Pengawas SD
							Rasio Guru/Murid SMP
							Rasio Pengawas SMP
							Rasio Guru/Murid PAUD
							Rasio Penilik PAUD
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
							Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra
						Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP	70.75 (BB)	71.10 (BB)	71.30 (BB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISDIK

C. Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021-2023 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi pendidikan dan identifikasi permasalahan pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Bandung Barat mengacu kepada isu-isu strategis RPJMD dalam urusan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, isu strategis tersebut digambarkan dalam tabel dibawah ini,

Tabel
Isu Strategis Penyelenggaraan Pendidikan Kab. Bandung Barat

URUSAN PEMERINTAHAN	ISU STRATEGIS
PENDIDIKAN	1. Masih kurangnya fasilitas pendidikan yang berkualitas baik dan merata di semua kecamatan; 2. Masih kurangnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi; 3. Belum seimbangnya perkembangan antara sistem pendidikan formal non formal dan informal; 4. Masih kurangnya akses terhadap fasilitas Pendidikan bagi masyarakat miskin; 5. Penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan; 6. Masih rendahnya pemahaman tentang sistem perijinan untuk satuan Pendidikan; 7. Belum meratanya informasi tentang kurikulum muatan lokal.

Sumber: RPJMD PERALIHAN KBB 2024-2026

Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menetapkan,

1. Perlunya solusi yang menyeluruh perihal pemerataan kesenjangan pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah, dan penurunan angka putus sekolah
    a. Indeks Pendidikan (Rata-rata lama Sekolah & Angka Melek Huruf) sebagai variabel IPM mengalami kenaikan yang cukup signifikan;
    b. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD dan SMP;
    c. Pemerataan kesenjangan pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya;

d. Pemenuhan fasilitas dan jaminan hidup bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

e. Kebutuhan jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM dan Jaminan atas karir tenaga pendidik dan kependidikan

   a. Rasio jumlah Guru terhadap murid untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP cenderung besar;

   b. Kondisi geografis dapat mempengaruhi rendahnya akses layanan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga berdampak pada penyebaran layanan tidak merata, termasuk layanan penyebaran dan penataan Tenaga Kependidikan;

   c. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

3. Perlunya sistem penjaminan mutu pendidikan pada tingkat dasar.

   a. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara nasional agar persentase sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) meningkat dari tahun ke tahun.

   b. Pemetaan mutu pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai sumber data mutu baik di pusat, maupun di sekolah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

   c. Tujuan akhir dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah tercapainya SNP dan terciptanya budaya mutu oleh seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah.

4. Penguatan kelembagaan institusi pendidikan melalui tata kelola birokrasi, delegasi kewenangan dan akuntabilitas kinerja

   a. Belum optimalnya singkronisasi kinerja antar bidang dalam kerangka kinerja pembangunan bidang pendidikan;

   b. Belum terpenuhinya sistem penunjang administrasi layanan pendidikan yang berkualitas;

   c. Belum berjalan secara baik sistem akuntabilitas kinerja bidang pendidikan;

   d. Terwujudnya tata kelola birokrasi dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
   a) Subbagian Perencanaan;
   b) Subbagian Keuangan; dan
   c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
   a) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
   b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; Dan
   c) Seksi Kesiswaan.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
   a) Seksi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana;
   b) Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
   c) Seksi Kesiswaan.
5. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Bahasa, membawahkan:
   a) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
   b) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
   c) Seksi Pengembangan Bahasa Dan Sastra
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, membawahkan:
   a) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
   b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal; dan
   c) Seksi Kesiswaan.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

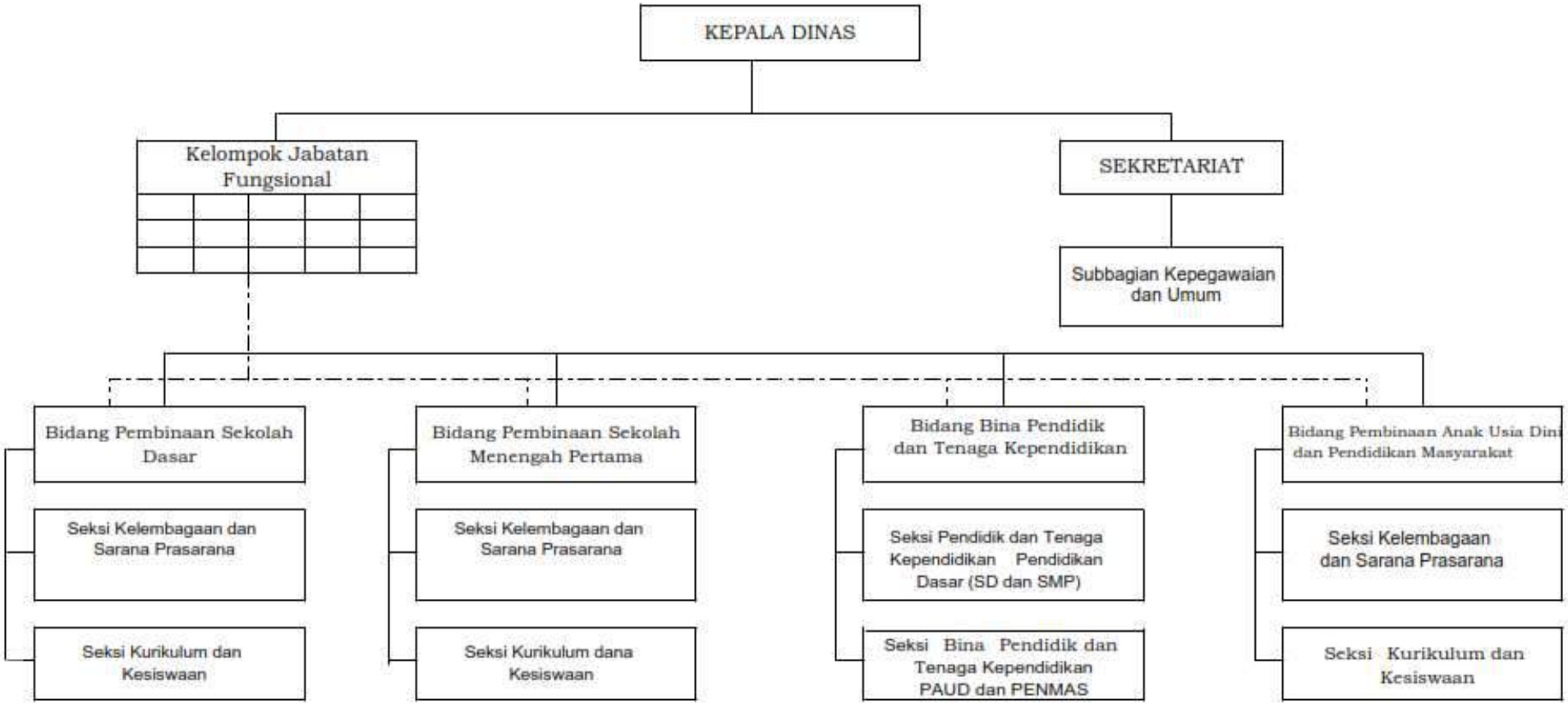

B. Fokus Pembangunan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Fokus pembangunan pendidikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas aparatur
2. Peningkatan kualitas Guru/Pendidik
3. Pengawasan penerapan kurikulum
4. Penguatan kelembagaan penyelenggaraan Paket A/B/C
5. Memastikan ketersediaan tenaga pengajar
6. Perbaikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
7. Penguatan manajemen pendidikan
8. Penyediaan dan perbaikan fasilitas penunjang Pendidikan

C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Barat adalah:

"KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN"

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan;
4. Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dan
5. Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.

Dalam mencapai visi dan misi pembangunan tersebut, dijabarkan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai arahan penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan penataan struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangan pusat primer untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (Pusat Primer Ngamprah).
2. Membagi wilayah kabupaten menjadi 4 (tiga) Wilayah Pengembangan yaitu di WP Padalarang, WP Cililin, WP Lembang, dan WP Cikalongwetan.
3. Mengembangkan sistem pusat Desa Pusat Pertumbuhan secara seimbang/proporsional sesuai pembagian jenjang pelayanannya.

4. Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial untuk dikembangkan di sekitar kota Bandung Barat, yaitu pada pusat-pusat WP yang akan dikembangkan: Ngamprah-Padalarang sebagai pusat utama Kabupaten Bandung Barat, yang didukung oleh kota hirarki yang lebih kecil. Pusat-pusat ini harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk mengalihkan pemusatan pergerakan ke kota inti.
5. Pengembangan sistem transportasi terutama diarahkan untuk menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang sesuai dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder, pada pembentukan struktur jaringan jalan dengan pola ring-radial, sehingga pusat-pusat WP yang akan terbentuk saling dihubungkan dengan jaringan jalan tersebut.

Kebijakan pola pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan wilayah terbangun diarahkan dan diprioritaskan ke arah barat dan timur serta bagian selatan-tengah.
2. Dalam kaitannya dengan keterbatasan daya dukung lingkungan, wilayah Kabupaten Bandung Barat ini perlu didukung dengan pembatasan dan pengendalian perkembangan pada kawasan-kawasan yang berdasarkan aspek lingkungan perlu mendapat perlindungan (kawasan konservasi), terutama di bagian utara dan bagian selatan serta bagian tengah yang berada di sempadan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya.
3. Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai kawasan penyangga (bukan lagi sebagai kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan kawasan terbangun vertikal.
4. Pengembangan kegiatan industri dilakukan melalui relokasi industri-industri yang ada di kota inti dan kota-kota kecil lainnya yang menghadapi masalah ketersediaan air tanah ke kawasan yang dekat dengan sumber air permukaan (Saguling, Cirata).

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pembangunan atau Pendidikan di KBB . Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.

Secara umum tujuan merupakan penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga atau instansi. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja organisasi. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Periode 2024 - 2026 ialah:

1. Terwujudnya kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Secara umum sasaran ialah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan dan sifatnya dapat diukur.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan guna menjadi indikator pencapaian RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026.

Tabel
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudanya kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas

Tabel

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1: MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN KREATIF	Terwujudnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal	Harapan Lama Sekolah	11.93	11.96	11.98	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Persentase pemenuhan kurikulum muatan lokal
							PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan bahasa dan sastra
							PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,27	8,29	8,31	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD APS SD Rasio Guru/Murid SD Ruang Kelas SD dalam kondisi baik Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Indeks Iklim Keamanan SD Indeks Iklim Kebinekaan SD Indeks Inklusivitas SD APK SMP APM SMP APS SMP Rasio Guru/Murid SMP Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Inklusivitas SMP Rasio Guru/Murid PAUD Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 Rasio Pengawas (SD-SMP) dan Penilik (PAUD) - SD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- SMP - PAUD Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Alat Pendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pemerintahan Daerah	

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rencana Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2026 pada bahasan sebelumnya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun langkah-langkah strategis yang lebih operasional untuk periode 2024–2026 meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam lima tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung tercapainya RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mempunyai 6 program, 16 kegiatan, dan 108 sub kegiatan untuk Tahun anggaran 2024.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, yang dilaksanakan secara optimal guna mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Bandung Barat dalam rangka tercapainya Visi Misi Kabupaten bandung Barat Tahun 2024-2026 Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 kegiatan	28 sub kegiatan
Program Pengelolaan Pendidikan	4 kegiatan	80 sub kegiatan
Program Pengembangan Kurikulum	2 Kegiatan	7 sub kegiatan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 kegiatan	2 sub kegiatan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1 kegiatan	1 sub kegiatan
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	1 kegiatan	3 sub kegiatan
TOTAL	**16 kegiatan**	**108 sub kegiatan**

C. Pendanaan

Dalam rangka mengetahui Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dilakukan penilaian kinerja tahun 2024-2026. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 tertuang selengkapnya pada tabel dibawah ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit dan sub unit organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyeseuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Oleh karena itu, laporan Rencana Kerja (Renja) ini masih merupakan dokumen yang tentatif, karena bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali dengan kondisi pada waktu pelaksanaannya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan mengkesampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak mengganggu sinergitas masing-masing kegiatan terhadap tujuan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat secara umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan, pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing sub unit perlu terus dilakukan untuk mendeteksi lebih awal setiap penyimpangan-penyimpangan di setiap kegiatan, sehingga apabila diketahui adanya penyimpangan dapat diperbaiki dan disesuaikan sedini mungkin. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sebagai institusi perencana. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka menunjang dan mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus mendapat dukungan dan antusiasme dari berbagai instansi dan stakeholders terkait. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan ridha oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas dan amanah yang telah dibebankan kepada kita.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,

ASEP DENDIH, S.Pd,M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196611161988031004

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN
Tahun 2024

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat
Jl. Raya padalarang – Cisarua KM. 2 Ngmaprah
Email : inspektorat@bandungbaratkab.go.id Web : Http//www.bandungbaratkab.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan mengembangkan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk terus berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan transparan melalui penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang di wujudkan kedalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga dapat sejalan dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 26 Agustus 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Drs. YADI AZHAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691130 199010 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah
Email : inspektorat@bandungbaratkab.go.id Web : Http//www.bandungbaratkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 700/Kep. -Itda/2024

Tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.
Kesatu	:	Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 selanjutnya disebut RENJA Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Rencana Kerja dalam Program dan Kegiatan 1 (satu) tahun berjalan;
Kedua	:	Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berisikan Evaluasi RENJA di sampai dengan triwulan II tahun berjalan, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2024, Indikator Kinerja Program dan Sasaran yang akan dicapai di Tahun 2024;
Ketiga	:	Ketetapan ini dibuat sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Drs. YADI AZHAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691130 199010 1 002

DAFTAR ISI

BAB I 2

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN 2

1. Maksud 2

2. Tujuan 2

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 3

1.3. LANDASAN HUKUM 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II 7

2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran 7

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan 9

BAB III 19

BAB IV 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada PD
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi, dengan tujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas yaitu

kinerja aparatur dan birokrasi.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD PD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Daerah Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
5. Peraturan Kabupaten Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah

dan Badan Daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi danNepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Propinsi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Presiden Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Presiden Republik Indonesia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah.
21. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.4

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Daerah tahun 2024 adalah :

1. Opini BPK-RI terhadap LKPD/ Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti, LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan persentase tindak lanjut atas rekomendasi mencapai 70,07% dari target sebesar 70%.
2. Persentase penangan kasus pengaduan Masyarakat yang ditangani Inspektorat Daerah mencapai 100% dari target 85%.
3. Nilai Maturitas SPIP mencapai nilai level 3 dari target level 3.
4. Nilai Kapabilitas APIP mencapai nilai level 3 dari target level 3.
5. Indeks persepsi korupsi (IPK)/Monitoring center for prevention KPK mencapai nilai 93,29 dari target 86.
6. Nilai Pembangunan zona integritas belum melakukan penilaian dikarenakan pada tahun 2024 yang dilakukan inspektorat daerah adalah Pembangunan zona integritas di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
7. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah mencapai nilai 70,60/BB dari target 72/BB.

Adapun capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah penilaian pada tahun 2023, berikut kami sajikan dalam bentuk tabel :

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	CAPAIAN TAHUN 2024	
								TARGET	REALISASI
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi									
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel	1	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan perangkat daerah	1	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	Nilai Mutu/ Persentase	ITDA	WTP/ 70	WTP/ 70,07
				2	Persentase penangan kasus pengaduan Masyarakat	Persentase	ITDA	85	100
				3	Nilai Maturitas SPIP	Level	ITDA	3	3
				4	Nilai Kapabilitas APIP	Level	ITDA	3	3
				5	Indeks persepsi korupsi (IPK)/ Monitoring center for prevention KPK	Nilai	ITDA	86	93,29

				6	Nilai Pembangunan zona integritas	PD	ITDA	1	0
				7	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai/ Mutu	ITDA	72/BB	70,60/ BB

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Terhadap sasaran program Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 memiliki 3 Program, yaitu 2 Program yang pengampu Pengawasan dan 1 program penunjang program Kinerja Inspektorat Daerah secara keseluruhan. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah :

Program Inspektorat Daerah	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
Program penyelenggaraan pengawasan					
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	WTP/ 70	WTP/ 70,07	WTP/ 72	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penangan kasus pengaduan Masyarakat	85	100	90	
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi					
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3	
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	
	Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3	
	Indeks Persepsi Korupsi/ Monitoring center for prevention KPK	86	93,29	87	
	Nilai Pembangunan Zona Integritas	1	0	1	Masih tahap pencanangan belum dilakukan pembangunan
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	BB/ 72	BB/ 70,60	BB/ 75	

Tabel 2.2 Program, Indikator, Target 2024 dan Realisasi serta Target 2025

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd Juni 2024) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Juni 2024) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	**19.315.268.364**	**10.531.477.313**	**56,23%**	**8.197.578.608**	**43,77%**
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**78.255.500**	**20.882.500**	**35,85%**	**37.370.000**	**64,15%**
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	31.742.500	20.882.500	65,79%	**10.860.000**	**34,21%**
Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	16.629.000	0	0,00%	**6.627.500**	**100,00%**
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	6.627.500	0	0,00%	**6.627.500**	**100,00%**
Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	16.629.000	0	0,00%	**6.627.500**	**100,00%**
Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	6.627.500	0	0,00%	**6.627.500**	**100,00%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**17.362.266.164**	**9.540.750.286**	**56,40%**	**7.376.964.435**	**43,60%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.348.116.164	9.540.750.286	56,44%	**7.362.814.435**	**43,56%**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.025.000	0	0,00%	**9.025.000**	**100,00%**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.125.000	0	0,00%	**5.125.000**	**100,00%**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**350.000.000**	**53.831.000**	**15,38%**	**296.169.000**	**84,62%**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	291.000.000	**53.831.000**	**15,38%**	**296.169.000**	**84,62%**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.028.182.700**	**777.095.727**	**75,58%**	**251.086.973**	**24,42%**
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	289.399.200	276.222.200	95,45%	**13.177.000**	**4,55%**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	423.309.400	275.693.440	65,13%	**147.615.960**	**34,87%**
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	257.972.100	180.995.900	70,16%	**76.976.200**	**29,84%**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.502.000	44.184.187	76,84%	**13.317.813**	**23,16%**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**48.150.000**	**12.800.000**	**26,58%**	**35.350.000**	**73,42%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.250.000	25,00%	**3.750.000**	**75,00%**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.150.000	11.550.000	26,77%	**31.600.000**	**73,23%**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**326.756.000**	**126.117.800**	**38,60%**	**200.638.200**	**61,40%**

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	326.756.000	126.117.800	38,60%	**200.638.200**	**61,40%**
Progam Penyelenggaraan Pengawasan	**3.251.843.500**	**1.609.067.000**	49,40%	**1.647.837.000**	**50,60%**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**2.844.468.000**	**1.486.691.500**	52,17%	**1.362.837.000**	**47,83%**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.200.815.000	988.835.000,00	72,45%	**376.000.000**	**27,55%**
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	769.435.000	55.295.000,00	8,21%	**618.220.000**	**91,79%**
Pengawasan Desa	462.201.500	363.701.500,00	69,48%	**159.880.000**	**30,54%**
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	412.016.500	78.860.000,00	27,42%	**208.737.000**	**72,58%**
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**407.375.500**	**122.375.500**	30,04%	**285.000.000**	**69,96%**
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	158.899.500	26.499.500	16,68%	**132.400.000**	**83,32%**
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	248.476.000	95.876.000	38,59%	**152.600.000**	**61,41%**
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**580.478.500**	**109.625.500**	15,29%	**607.453.500**	**84,71%**

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**397.225.000**	**80.025.500**	20,15%	**317.199.500**	**79,85%**
Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan	242.785.500	80.025.500	32,96%	**162.760.000**	**67,04%**
Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan	154.439.500	0	0	**154.439.500**	**100,00%**
Pendampingan dan Asistensi	**183.253.500**	**29.600.000**	9,25%	**290.254.000**	**90,75%**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35.635.000	14.300.000	23,87%	**45.615.000**	**76,13%**
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4.862.500	-	0,00%	**29.047.500**	**100,00%**
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14.057.500	-	0,00%	**43.515.000**	**100,00%**
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	128.698.500	15.300.000	8,17%	**172.076.500**	**91,83%**

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3) bahwa capaian anggaran 50% sampai dengan bulan Juli 2024 , dengan capaian keuangan sebesar 53,96% dari target yang direncanakan

sampai dengan 1 Juli 2024 sebesar 55%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Juni 2024) evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024 :

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Indikator RKPD 2024	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Keterangan		Keterangan
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP ITDA		A	Nilai Mutu	18.729.055.921	BB	10.531.477.313	49	56,23%	
1	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				68.252.500		20.882.500		35,86%	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (6 Dokumen)	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	31.742.500	3	20.882.500	50,00	65,79%	
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen (1 Dokumen)		1	Dokumen	6.627.500	-	-	-	0,00	
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen (1 Dokumen)		1	Dokumen	6.627.500	-	-	-	0,00	
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen (1 Dokumen)		1	Dokumen	6.627.500	-	-	-	0,00	
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen (1 Dokumen)		1	Dokumen	6.627.500	-	-	-	0,00	
2	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.917.714.721		9.540.750.286		56,40%	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN (69 Orang) 12 Bulan	Jumlah ASN	12	bulan	16.903.554.721	6	9.540.750.286	50,00	56,44%	

	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen (1 Dokumen)		1	Dokumen	9.025.000	-	-	-	0,00	
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen (1 Dokumen)		1	Dokumen	8.125.000	-	-	-	0,00	
3	**6.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**350.000.000**		**53.831.000**		**15,38%**	
	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	20	APIP	**350.000.000**	**3**	**53.831.000**	6,6	**15,38%**	
4	**6.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sumber daya aparatur yang terlatih**				**1.026.182.700**		**777.095.727**		**75,68%**	
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (24 Jenis)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis	289.399.200	-	276.222.200	-	95,45%	
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan (2 Kegiatan) selama 12 Bulan	Jumlah Kegiatan	12	Paket	423.309.400	6	275.593.440	50	65,13%	
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (24 Jenis)	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	257.972.100	6	180.986.900	50	70,16%	

	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 Bulan)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	44.184.187	6	57.502.000	50,00	76,84%	
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**48.150.000**		**12.800.000**		**26,58%**	
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 400	Jumlah Materai	400	Materai	5.000.000	125	1.250.000	31,25	25,00%	
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Dipelihara 12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Dipelihara	12	Bulan	43.150.000	6	11.550.000	50	26,77%	
0	**6.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Kondisi Baik**		**100**	**%**	**326.756.000**	**0**	**126.117.800**	**0**	**38,60%**	

	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara (12 Bulan)	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan	12	bulan	326.756.000	6	126.117.800	50,00	38,60%	
II	**6.01.02**	**PROGAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE REKOMENDASI TEMUAN BPK RI DAN APIP YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI OLEH PERANGKAT DAERAH**		**100**	**%**	**3.256.906.000**	**WTP**	**1.609.067.000**	**42**	**49,40%**	
1	**6.01.02.2.01**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase rekomendasi temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti**		**100**	**%**	**2.849.528.500**	**101**	**1.486.691.500**	**45**	**52,17%**	
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP (8 LHP)	Jumlah LHP	34	laporan	1.364.835.000	12	988.835.000,00	25	72,45%	
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP (70 LHP)	Jumlah LHP	23	Laporan	673.515.000	2	55.295.000,00	10	8,21%	
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP (330 LHP 165 Desa)	Jumlah LHP	165	Laporan	523.581.500	185	363.701.500,00	100	69,48%	
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan (3 Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	2	kegiatan	287.597.000	1	78.880.000,00	50,00	27,42%	
2	**6.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penyelesaian kasus – kasus / pengaduan.**		**16**	**laporan**	**407.375.500**	**11**	**122.375.500**	**38**	**30,04%**	
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15 Kasus	Jumlah Laporan	1	Laporan	158.899.500	3	26.499.500	10	16,68%	
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Kasus	Jumlah Laporan	3	Laporan	248.476.000	8	95.876.000	20	38,59%	

III	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	RATA-RATA NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		A	Nilai	717.079.000	B	109.625.500	100	15,29%	
1	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat		1	Dokumen dan Bimtek	397.225.000	1	80.025.500	100	20,15%	
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan	Jumlah Dokumen (Pedoman Audit Ketaatan dan Kinerja)	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	242.785.500	1	80.025.500	100.00	32,96%	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	1	Kegiatan	154.439.500	0	0	0	0	
2	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang meminta pendampingan dan asistensi		100	%	319.854.000	0	29.600.000	0	9,25	
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan (2 Laporan SPIP dan PK APIP)	Jumlah Laporan	2	Laporan	59.915.000	-	14.300.000	-	23,87	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan (PMPRB)	Jumlah Laporan	1	Laporan	29.047.500	-	-	-	0,00	
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring for prevention (MCP)	Jumlah Laporan	1	Laporan	43.515.000	-	-	-	0,00	
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Kegiatan (Zona Integritas dan Survey Zona Integritas)	Jumlah Kegiatan	2	Laporan	187.376.500	-	15.300.000	-	8,17	

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH

Program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banugn Barat disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kemudian turunan peraturannya adalah Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat pada anggaran perubahan 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah/kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Selanjutnya dilakukan penyelarasan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan berpedomankan pada RPD Bandung Barat 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah 2024-2026 maka disusunlah komposisi sebagaimana berikut:

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	SEBELUM				SESUDAH				SELISIH
					APBD KAB	APBD PROV	APBN	TOTAL	APBD KAB	APBD PROV	APBN	TOTAL	
1	2	3	4	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**1.825.491.200**			**1.825.491.200**	**19.315.268.364**			**19.315.268.364**	**141.661.000**
	6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**58.252.500**			**58.252.500**	**78.255.500**			**78.255.500**	**20.003.000**
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	31.742.500	-	-	31.742.500	31.742.500	-	-	31.742.500	-
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.627.500	-	-	6.627.500	16.629.000	-	-	16.629.000	10.001.500
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.627.500	-	-	6.627.500	6.627.500	-	-	6.627.500	-
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.627.500	-	-	6.627.500	16.629.000	-	-	16.629.000	10.001.500
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.627.500	-	-	6.627.500	6.627.500	-	-	6.627.500	-
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**16.917.714.721**			**16.917.714.721**	**17.362.266.164**			**17.362.266.164**	**444.551.443**
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	69 Orang	16.903.564.721	-	-	16.903.564.721	17.348.116.164	-	-	17.348.116.164	444.551.443

	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	9.025.000	-	-	9.025.000	9.025.000	-	-	9.025.000	-
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5.125.000	-	-	5.125.000	5.125.000	-	-	5.125.000	-
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**350.000.000**			**350.000.000**	**291.000.000**			**291.000.000**	**(59.000.000)**
	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	20 APIP	350.000.000	-	-	350.000.000	291.000.000	-	-	291.000.000	(59.000.000)
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.028.182.700**			**1.028.182.700**	**1.208.840.700**			**1.208.840.700**	**180.658.000**
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	289.399.200	-	-	289.399.200	289.399.200	-	-	289.399.200	-
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	423.309.400	-	-	423.309.400	466.880.500	-	-	466.880.500	43.571.100
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	24 Jenis	257.972.100	-	-	257.972.100	310.143.000	-	-	310.143.000	52.170.900
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	57.502.000	-	-	57.502.000	142.418.000	-	-	142.418.000	84.916.000
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**48.150.000**			**48.150.000**	**48.150.000**			**48.150.000**	-

	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400	5.000.000			5.000.000	5.000.000			5.000.000	-
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12	43.150.000			43.150.000	43.150.000			43.150.000	-
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**326.756.000**			**326.756.000**	**326.756.000**			**326.756.000**	-
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan	12 Bulan	326.756.000	-	-	326.756.000	326.756.000	-	-	326.756.000	-
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**3.256.904.000**			**3.256.904.000**	**3.251.843.500**			**3.251.843.500**	(5.060.500)
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			**2.849.528.500**			**2.849.528.500**	**2.844.468.000**			**2.844.468.000**	(5.060.500)
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	6 LHP	1.364.835.000	-	-	1.364.835.000	1.200.815.000	-	-	1.200.815.000	(164.020.000)
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	70 LHP	673.515.000	-	-	673.515.000	769.435.000	-	-	769.435.000	95.920.000
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP	165 LHP	523.581.500	-	-	523.581.500	462.201.500	-	-	462.201.500	(61.380.000)
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	287.597.000	-	-	287.597.000	412.016.500	-	-	412.016.500	124.419.500
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			**407.375.500**			**407.375.500**	**407.375.500**			**407.375.500**	-

	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus	18 Kasus	158.899.500	-	-	158.899.500	158.899.500	-	-	158.899.500	-
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus	20 Kasus	248.476.000	-	-	248.476.000	248.476.000	-	-	248.476.000	-
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**717.079.000**			**717.079.000**	**580.478.500**			**580.478.500**	**(136.600.500)**
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**			**397.225.000**			**397.225.000**	**397.225.000**			**397.225.000**	-
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	242.785.500	-	-	242.785.500	242.785.500	-	-	242.785.500	-
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	154.439.500			154.439.500	154.439.500			154.439.500	-
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**			**319.854.000**			**319.854.000**	**183.253.500**			**183.253.500**	**(136.600.500)**
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	59.915.000	-	-	59.915.000	35.635.000	-	-	35.635.000	(24.280.000)
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	1 Laporan	29.047.500	-	-	29.047.500	4.862.500	-	-	4.862.500	(24.185.000)
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan	1 Laporan	43.515.000			43.515.000	14.057.500			14.057.500	(29.457.500)
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	187.376.500	-	-	187.376.500	128.698.500	-	-	128.698.500	(58.678.000)
		JUMLAH			**22.703.038.921** -			**22.703.038.921** -	**23.147.590.364**			**23.147.590.364**	**444.551.443**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 (Cut Off Juni 2024) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp444.551.443,- atau 1,96% dari anggaran semula murni Rp22.703.038.921,- menjadi anggaran perubahan Rp23.147.590.364,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Inspektorat Daerah Tahun 2024.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Drs. YADI AZHAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691130 199010 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah

2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud & Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelaaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30

3.3. Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V PENUTUP 38

Daftar Tabel :

1. **Tabel 2.1** : Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8
2. **Tabel 2.2** : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
3. **Tabel 2.3** : Sasaran Strategis dan Isu 17
4. **Tabel 2.4** : Review Terhadap Rancangan Awal Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 21
5. **Tabel 3.1** : Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah 29
6. **Tabel 3.2** : Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat 31
7. **Tabel 4.1** : Rancangan Awal RENJA Perubahan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2024 33

Daftar Gambar :

1. **Gambar 1.1** : Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rekapitulasi Kabupaten Bandung Barat.....2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rakhmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat yang merupakan penajaman program dan kegiatan untuk tahun 2024.

Otonomi daerah pada era reformasi menuntut kesiapan dan dukungan yang optimal dari berbagai pihak dan diharapkan hasilnya menjadi lebih sinergi, selanjutnya dalam upaya penyusunan dan prioritas program pembangunan daerah serta peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat yang kebijakannya dituangkan dalam bentuk rumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat khususnya program dan kegiatan tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat ini diharapkan tercipta dukungan dari semua pihak terutama *stakeholders* sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama dalam rangka menciptakan Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat sebagai organisasi profesional melalui peningkatan manajemen Dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan dokumen Renja itu sendiri merupakan satu proses panjang yang melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam Tim Penyusun Renja (TPR) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja ini. Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tangan terbuka disertai hati yang tulus ikhlas, tentu sangat kami harapkan. Semoga Renja ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Bandung Barat, 3 September 2024
Plt. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

WEDA WARDIMAN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197906071998101001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Awal RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Sehubungan terbitnya Inmendagri No. 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru pada Diktum 1 Nomor 3 yang menyatakan bahwa Bupati / Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk Menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026.

Sebagai tindak lanjut atas Inmendagri di atas, maka telah disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan Badan Kesbangpol T.A 2024 mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat mempunyai tugas pokok :

" **Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah** "

Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sejalan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat perlu didukung dengan struktur organisasi yang ideal. Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat

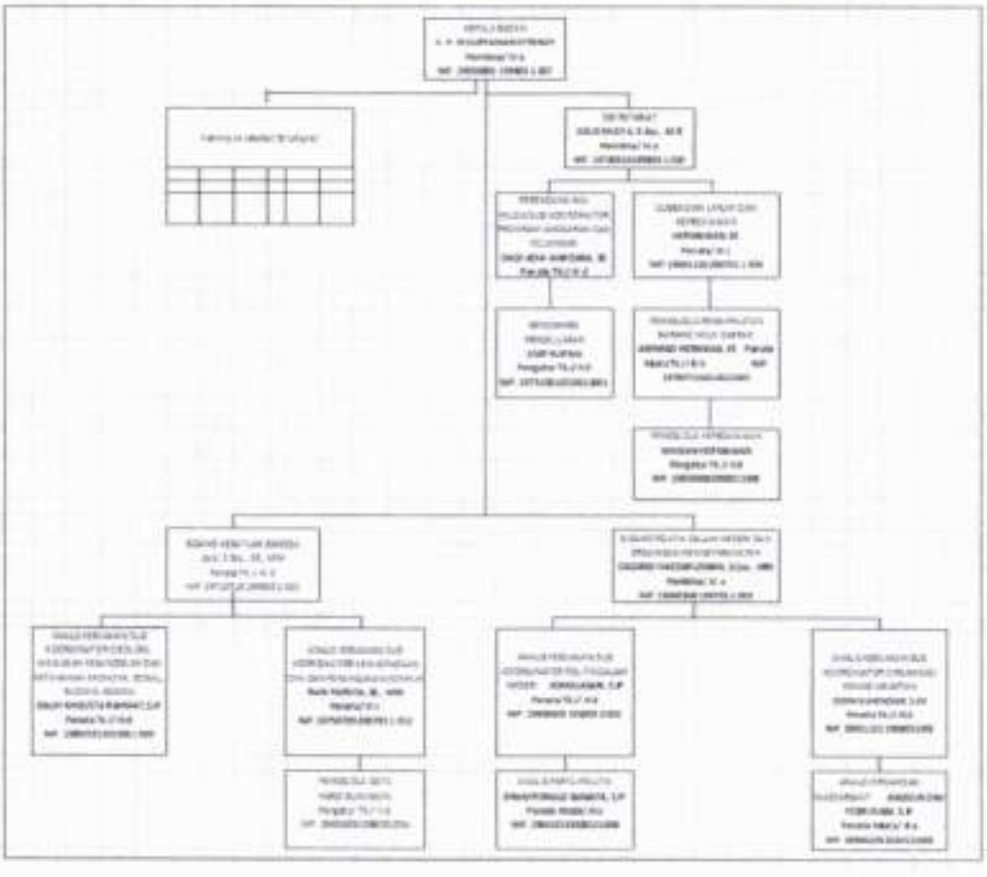

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Permendagri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Permendagri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri no 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat ;
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat;
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-206;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas tentang Latar belakang, pengertian ringkas tentang Rencana kerja PD, kedudukan renja PD dalam sistem perencanaan daerah, serta landasan yang mengatur tentang sistem perencanaan nasional

1.2 Landasan hukum

Merupakan landasan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan PD

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dari penyusunan Renja, serta tujuan yang ingin di capai dari tersusunnya rencana kerja PD tersebut.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan tentang isi bab per bab dalam menyusun Renja PD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan bangsa dan politik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan politik

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan politik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja perubahan tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD
S/D TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan / Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun n-1)			Target program / kegiatan renja SKPD tahun 2024 tahun berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024 (tahun berjalan)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	01.			Urusan Pemerintahan Umum										
3	01.	0	00.0.00. 01	Badan Kesatuan bangsa dan Politik										
3	01.	8	01.0.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP Badan Kesbangpol	80 (A)	83,26 (B)	80 (A)	83,51 (B)	79, 14 %	68,00 (B)	68,00 (B)	100 %	
8	01	01	2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	69 Dokumen	18 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	83,33%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	
8	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, renstra-P, Renja, Renja - P	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA (RKA-P)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	-	- Dokumen	-	100 %	- Dokumen	- Dokumen	100 %	
8	01	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	20 Dokumen	11 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	158 dokumen	46 dokumen	100 dokumen	82,76 dokumen	66,67 %	46 dokumen	46 dokumen	100 %	
8	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP SPM gaji dan tunjangan ASN	84 dokumen	28 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100 %	28 dokumen	28 dokumen	100 %	
8	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	- Dokumen	- %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	51 dokumen	17 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	17 dokumen	17 dokumen	100 %	
8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	165 Dokumen	31 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	3 Paket	32 Paket	32 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	
8	01	01	2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data Kepegawaian (ASN dan PTT)	90 Dokumen	29 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	35 dokumen	7 dokumen	100 dokumen	74,10 dokumen	76,08 %	7 dokumen	7 dokumen	100 %	

Kode				Uraian / Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun n-1)			Target program / kegiatan renja SKPD tahun 2024 tahun berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024 (tahun berjalan)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	33 Paket	8 Paket	24,24 %	2 Paket	2 Paket	100 %	
8	01	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	21 Paket	21 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	
8	01	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	45 Paket	45 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	
8	01	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8 Paket	8 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	
8	01	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	
8	01	01	2.06.08	Penyediaan Makanan dan Minuman/Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
8	01	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	0 laporan	12 laporan	1 Laporan	8,33 %	12 laporan	12 laporan	100 %	
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penalatan, perlengkapan, dan fasilitasi perkantoran yang terpenuhi	0 %	0 %	100 %	27,27 %	27,27 %	100 %	100 %	100 %	
8	01	01	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	22 Laporan	6 Laporan	27,27 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas dan ruangan kantor dalam kondisi baik	66 %	0 %	100 %	78,57 %	62,50 %	100 %	100 %	100 %	
8	01	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Paket	30 Paket	10 Paket	10 Paket	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	
8	01	01	2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	4 Unit	1 Unit	25,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	
8 .	01.	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	83,38 %	51,88 %	100 %	80,17 %	80,17 %	84 %	84 %	100 %	Bidang Kesbang
8 .	01.	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.250 orang	0 orang	100 orang	80,17 orang	80,17 %	500 orang	500 orang	100 %	Analis Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8 .	01.	02	2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
8 .	01.	02	2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan dan Pengembangan Karakter Bangsa	100 orang	0 orang	2 orang	5 orang	57,27 %	300 orang	300 orang	100 %	
8 .	01.	02	2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	70 orang	0 orang	6 orang	6 orang	91,79 %	500 orang	500 orang	100 %	

Kode				Urusan / Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun n-1)			Target program / kegiatan renja SKPD tahun 2024 tahun berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024 (tahun berjalan)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 -	01.	02	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental	1.500 orang	500 Orang	0 Orang	0 Orang	100 %	0 Orang	0 Orang	100 %	
8 -	01.	02	2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Pelaporan isu strategis masalah di KBB	15 kali	4 kali	5 kali	4 kali	80 %	0 kali	0 kali	0 %	
8 -	01.	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman politik masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100 %	47,62 %	100 %	77,48 %	204,12 %	60 %	60 %	100 %	Kabid Poldagri dan Ormas
8 -	01.	03	2.01.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah peserta dan personil yang mengikuti Penyusunan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum	2.650 orang	400 Orang	100 Orang	44,46 Orang	204,12 %	26 Orang	26 Orang	100 %	Analis Kebijakan Politik Dalam Negeri
8 -	01.	03	2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Hasil Verifikasi Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik	30 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	9 dokumen	56,68 %	10 dokumen	10 dokumen	100 %	
8 -	01.	03	2.01.02	Penyusunan Bahan Penerapan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Dibuat	3 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	5 dokumen	26, 12 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
8 -	01.	03	2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti forum-forum diskusi politik dan mendapatkan penyuluhan politik	1.500 orang	400 orang	5 orang	5 orang	93,57 %	750 orang	750 orang	100 %	
8 -	01.	03	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-undang politik bagi masyarakat dan Rapat Koordinasi Antar Lembaga	150 orang	0 orang	30 orang	30 orang	303,94 %	160 Orang	160 Orang	100 %	
8 -	01.	03	2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Situasi Politik dalam daerah KBB	30 laporan	0 laporan	12 laporan	3 laporan	28,83 %	12 laporan	12 laporan	100 %	

Kode				Urusan / Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun n-1)			Target program / kegiatan renja SKPD tahun 2024 tahun berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024 (tahun berjalan)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
3 .	01.	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	100 %	50,00 %	100 %	99,97 %	99,97 %	80 %	86 %	100 %	Bidang Poldagri dan Ormas
3 .	01.	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	1.200 orang	50 orang	100 orang	99.97 orang	99.97 %	20 orang	20 orang	100 %	Analis Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan
3 .	01.	04	2.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen database organisasi kemasyarakatan	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	99,55 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
3 .	01.	04	2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	33 Dokumen	11 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	
3 .	01.	04	2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi / bimbingan teknis Peraturan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bagi organisasi kemasyarakatan	150 Orang	50 Orang	1 Orang	1 Orang	100 %	920 Orang	920 Orang	100 %	
3 .	01.	04	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	0 Orang	5 Orang	1 Orang	100 %	460 Orang	460 Orang	100 %	
3 .	01.	04	2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 laporan	0 laporan	15 laporan	0 laporan	0 %	12 laporan	12 laporan	100 %	
3 .	01.	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	98,13 %	80 %	98,13 %	122,71 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Kesatuan Bangsa (Kesbang)

Kode				Urusan / Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2025 (akhir periode renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-2)	Target dan realisasi Kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun n-1)			Target program / kegiatan renja SKPD tahun 2024 tahun berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024 (tahun berjalan)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01.	05	2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diskusi, sosialisasi dan seminar peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	2.570 orang	1.074 orang	1.100 orang	1.074 orang	97,64 %	570 orang	570 orang	100 %	Analis Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8	01.	05	2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tercapainya Sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan NARKOBA	1.900 orang	80 Orang	50 Orang	80 Orang	160 %	50 Orang	50 Orang	100 %	
8	01.	05	2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mendapatkan hibah	12 lembaga	1 lembaga	6 lembaga	1 lembaga	16,67 %	6 lembaga	6 lembaga	100 %	
8	01.	05	2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	30 Orang	100 Orang	30 Orang	30 %	100 Orang	100 Orang	100 %	
8	01.	05	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000 Orang	934 Orang	1.000 Orang	934 Orang	93,40 %	50 Orang	50 Orang	100 %	Analis Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8	01.	05	2.01.05	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta Forum Group Diskusi (FGD) Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	270 Orang	30 Orang	135 Orang	30 Orang	22,22 %	135 Orang	135 Orang	100 %	
8	01.	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial**	100 %	84,86 %	80 %	84,86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang KESBANG
8	01.	06	2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta dan personil yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.000 Orang	1205 Orang	1500 Orang	1205 Orang	80,33 %	1.500 Orang	1.500 Orang	100 %	Analis Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
8	01.	06	2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan Dini	1.020 Orang	340 Orang	350 Orang	340 Orang	97,14 %	350 Orang	350 Orang	100 %	

Kode				Urusan / Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tk 2022 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun n-1)			Target program / kegiatan renja SKPD tahun 2024 tahun berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024 (tahun berjalan)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
1	01.	06	2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
1	01.	06	2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100 %	500 orang	500 orang	100 %	
1	01.	06	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.090 orang	1.840 orang	1.030 orang	1.840 orang	178,64 %	460 orang	460 orang	100 %	
1	01.	06	2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini oleh intel	1.440 Laporan	960 laporan	960 laporan	960 laporan	100 %	480 laporan	480 laporan	100 %	Analis Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisa kinerja pelayanan sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah dengan cara membandingkan tingkat capaian kinerja dengan :

1. Target kinerja yang tertuang dalam rencana kerja
2. Realisasi kinerja PD tahun sebelumnya

Berikut disajikan tabel realisasi kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun 2019 – 2023 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Kinerja	Target Indikator	Kondisi Awal	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat terhadap persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	68,6-69	69,1-69,5	69,6-70	70,1-70,5	70,6-71	52,5	49,89	61,20	64,31	92,49	76,09 %	71,78 %	116,00 %	119,59 %	130,27 %
2	Meningkatnya Tingkat pemahaman politik Masyarakat	Tingkat pemahaman politik Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pendidikan politik	-	68,79 - 70,78	70,79-71,78	71,79-72,78	72,79-73,78	73,79-74,78	15,6	32	34	52,18	74,81	22,32 %	44,66 %	46,71 %	70,72 %	100,04 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Bakesbangpol	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	60 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	62,90 (B)	62,90 (B)	63,32 (B)	63,26 (B)	63,31	104,83 %	96,77 %	90,46%	84,35 %	79,14 %

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesimpulan dari Tabel 2.2 tentang Pencapaian kinerja Pelayanan Kantor / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Tujuan 1 :** Terciptanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta Stabilitas Politik di Kabupaten Bandung Barat

1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat terhadap persatuan dan Kesatuan Bangsa

- Indikator : Indeks Kerukunan Umat Beragama

Tahun	Target	Capaian	Persentase Capaian	Analisis
1	2	3	4 (3/2) x 100%	5
2019	68,6-69	52,5	76,09 %	Kinerja Kesbangpol tidak mencapai target dikarenakan : - Belum terselesaikannya beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat - Belum Optimalnya kinerja forum2 strategis yang ada dikesbanggol seperti FKUB dan FKDM
2020	69,1-69,5	49,80	71,78 %	Kinerja kesbanggpol turun dari tahun sebelumnya (tidak mencapai target) dikarenakan adanya Pandemi covid-19
2021	69,6-70	83,20	116,00 %	Capaian kinerja meningkat dari tahun 2020 dan melebihi target yang ditetapkan karena minimnya konflik yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat
2022	70,1-70,5	84,31	119,59 %	Meningkat dari tahun 2021 sebesar 3,59 % karena : - Menurunnya kasus covid -19 tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sehingga kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan - Terdapatnya program dan kegiatan serta tersedianya anggaran yang menunjang terhadap peningkatan kerukunan umat beragama
2023	70,6-71	92,49	130,27 %	Meningkat dari tahun 2022 sebesar 10,68 % karena : - Tidak adanya lagi kasus covid -19 pada tahun 2023 sehingga kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan - Adanya peningkatan sosialisasi deteksi dini dan peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Bandung Barat

1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat pemahaman politik Masyarakat

- Indikator : Tingkat pemahaman politik masayarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pendidikan politik

Tahun	Target	Capaian	Persentase Capaian	Analisis
1	2	3	4 (3/2) x 100%	5
2019	68,79 - 70,78	15,8	22,32 %	Capaian target sebesar 15,8 dikarenakan di Tahun 2019 terdapat pemilihan serentak PILPRES dan PILEG DPR, DPRD Tk.I s.d DPRD TK. II yang mengakibatkan minimnya kegiatan sosialisasi dan Pendidikan politik
2020	70,79-71,78	32	44,58 %	Capaian target sebesar 32, mengalami peningkatan 16,20 dari tahun 2020, dikarenakan telah adanya Pilkada, Pilpres, Pileg maupun Pilkades, sehingga kegiatan sosialisasi dan Pendidikan politik dapat ditingkatkan
2021	71,79-72,78	34	46,71 %	Capaian target sebesar 34, mengalami kenaikan sebesar 2 % dari Tahun 2020, dikarenakan belum adanya pilkada, pilpres, pileg maupun pilkades, sehingga ada sedikit peningkatan sosialisasi dan Pendidikan politik dibanding tahun 2020
2022	72,79-73,78	52,18	70,72 %	Capaian target sebesar 52,18 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 18,18 % dari tahun 2022, sehubungan melandainya kasus covid-19, sehingga sosialisasi dan Pendidikan politik dapat ditingkatkan
2023	73,79-74,78	74,81	100,04 %	Capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi pendidikan politik

2. Tujuan 2 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

- Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Bakesbangpol
- Indikator : Nilai Evaluasi SAKIP

TAHUN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS
1	2	3	4	5
2019	60,00	62,90	104,83 %	Capaian target sebesar 62,90 dari target nilai SAKIP 60, tingkat capaian 104,83 %, atau melebihi target yang ditetapkan menunjukkan kinerja Badan Kesbanggpol tahun 2019 sudah baik
2020	65,00	62,90	96,77 %	Capaian target sebesar 62,90, sama dengan capaian tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan SOTK dari Kantor Kesbanggpol menjadi Badan Kesbanggpol, sehingga banyak terjadi penyesuaian di internal Kesbanggpol dari segi Tupoksi, SDM, Anggaran dll
2021	70,00	63,32	90,46 %	Capaian target sebesar 63,32 tidak mencapai target dikarenakan terlalu tingginya target yang ditetapkan (bertambah 5 % dari tahun 2020), namun capaiannya hanya mengalami kenaikan 0,42 dari tahun 2020
2022	75,00	63,26	84,35 %	Capaian target sebesar 63,26 tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan : - Dokumen perencanaan masih belum matang dan berubah-ubah karena banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi seperti : berubahnya SOTK Kantor ke Badan, berubahnya RPJMD dan Renstra KBB, berubahnya situasi politik nasional menjelang Pemilu Serentak - Belum adanya keselarasan antara dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan lainnya atau dengan dokumen SAKIP lainnya - Formulasi perhitungan pada indikator kinerja belum terjamin keandalannya - Indikator Kinerja Utama (IKU) Individu belum dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai - Pencapaian sasaran di dalam LAKIP belum seluruhnya berorientasi outcome, sebagian masih berorientasi output - Belum dilakukan evaluasi mendalam atas keberhasilan program, khususnya program yang strategis bagi PD
2023	80	63,31	79,14 %	Belum mencapai target dikarenakan : - Dokumen perencanaan Kinerja telah dipublikasikan pada e-perja namun belum di up date - Formulasi perhitungan pengukuran kinerja belum terjamin keandalannya - Pencapaian sasaran di dalam LAKIP belum seluruhnya berorientasi outcome, sebagian masih berorientasi output - Belum dilakukan evaluasi mendalam atas keberhasilan program, khususnya program yang strategis bagi PD - Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangas dan Politik, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Badan Kesatuan Bangas dan Politik sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Isu Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	Program	ISU STRATEGIS
1	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat terhadap persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal Wawasan Kebangsaan 2. Belum mantapnya kesadaran akan keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika 3. Belum optimalnya peran dan fungsi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
		2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Belum maksimalnya pemberdayaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama); 2. Perlunya peningkatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi
		3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Masih kurangnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa serta 2. Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing 3. Belum optimalnya peran dan fungsi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Lemahnya peran intelijen dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat 5. Perlunya peningkatan monitoring dan evaluasi di lingkungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban
2	Meningkatnya Tingkat pemahaman politik Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal Pendidikan Politik 2. Belum mantapnya stabilitas politik di lingkungan masyarakat
		2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Munculnya kekuatan kelompok masyarakat tertentu yang mengorganisir diri mereka ke dalam wadah Ormas dan gerakan LSM yang memerankan fungsi pemerintah dan negara, misalnya fungsi pengawasan, audit, pemeriksaan dan lain – lain terhadap lembaga pemerintah

NO	Sasaran Strategis	Program	Isu Strategis
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Bakesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	- Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran masih belum optimal dikarenakan keterbatasan jumlah dan kurangnya kapasitas SDM - Masih kurangnya kapasitas pegawai dalam urusan Kesatuan bangsa dan Politik dan dalam penguasaan teknologi IT - Belum optimalnya anggaran kegiatan yang menunjang SAKIP, seperti Bintek dan sosialisasi SAKIP, pengelolaan Kepegawaian, pengelolaan keuangan dll - Kurangnya anggaran untuk pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor - Minimnya anggaran untuk operasional kantor seperti untuk BBM kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan arahan kepala SKPD terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatip yang di sediakan untuk Badan kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rancangan awal

Berdasarkan Renstra untuk masa tahun 2024-2026, maka program dan kegiatan yang di susun di awal 2023 untuk rencana tahun 2024 perlu menyesuaikan dengan program dan kegiatan serta pagu indikatip yang tertuang sebagaimana tercantum pada RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, untuk itulah review terhadap rancangan awal RKPD dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2023**

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat	Meningkatnya nilai SAKIP Badan Kesbanggol	III	4.902.450.914	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat	Meningkatnya nilai SAKIP Badan Kesbanggol	III	5.268.919.851	
1.1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Terwujudnya dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	10 Dokumen	228.805.400	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	10 dokumen	228.805.400	
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen Renstra Perubahan, Renja dan Renja Perubahan	3 Dokumen	167.538.000	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen Renstra Perubahan, Renja dan Renja Perubahan	3 Dokumen	167.538.000	
	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	19.965.000	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	19.965.000	
	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen Perubahan RKA (RKA-P)	1 Dokumen	18.015.000	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen Perubahan RKA (RKA-P)	1 Dokumen	18.015.000	
	• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	3.291.700	• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	3.291.700	
	• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen perubahan DPA (DPPA)	1 Dokumen	4.071.700	• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat	Jumlah dokumen perubahan DPA (DPPA)	1 Dokumen	4.071.700	
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKIntar/Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	Jumlah Dokumen RKPD	4 Dokumen	-	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKIntar/ Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	Jumlah Dokumen RKPD	4 Dokumen	0	
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen LAKIP dan SAKIP	2 Dokumen	11.924.000	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen LAKIP dan SAKIP	11 Dokumen	11.924.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	**Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan**	**46** Dokumen	3.573.710.464	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	**Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan**	**46 Dokumen**	**3.979.015.551**	
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Jumlah dokumen SPP SPM gaji dan TPP ASN	28 Dokumen	3.554.914.064	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Jumlah dokumen SPP SPM gaji dan TPP ASN	28 Dokumen	3.960.219.151	Terdapat penambahan jumlah pegawai
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	1 Dokumen	10.065.200	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	1 Dokumen	10.065.200	
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	17 Dokumen	8.731.200	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	17 Dokumen	8.731.200	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	**Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian**	**30** Dokumen	478.033.250	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	**Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian**	**30 Dokumen**	393.626.600	
	• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbanggol KBB	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	46.500.000	• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbanggol KBB	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	46.500.000	Terdapat pengurangan tenaga non PNS yang pensiun 1 orang
	• Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat	Jumlah Data Kepegawaian ASN dan PTT Badan Kesbanggol	12 Dokumen	431.533.250	• Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat	Jumlah Data Kepegawaian ASN dan PTT Badan Kesbanggol	12 Dokumen	347.126.600	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	36 Dokumen	581.241.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	36 Dokumen	665.812.300	
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ruangan Bakesbanggol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	47.175.300	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ruangan Bakesbanggol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp70.645.600	
	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ruangan Bakesbanggol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.080.120	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ruangan Bakesbanggol	Jenis dan jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 Paket	7.710.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ruangan Bakesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.440.300	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.440.300	
	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.666.400	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.166.400	
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Sekretariat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	138.200.000	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	66.000.000	
	• Penyediaan Makanan dan Minuman/Fasilitasi Tamu	Sekretariat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen	271.250.000	• Penyediaan Makanan dan Minuman/Fasilitasi Tamu	Sekretariat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen	271.250.000	
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	49.800.000	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	167.800.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peralatan, perlengkapan kantor dalam keadaan baik	100 Persen	3.660.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peralatan, perlengkapan kantor dalam keadaan baik	100 Persen	3.660.000	
	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ruangan Bakesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	3.660.000	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ruangan Bakesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	3.660.000	
1.6	• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik	100 Persen	97.000.000	• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik	100 Persen	97.000.000	
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bakesbanggol	Jumlah paket pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Paket	47.000.000	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bakesbangpol	Jumlah paket pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Paket	47.000.000	
	• Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Ruangan Bakesbanggol	Jumlah ruangan kantor yang diperbaiki	1 Unit	50.000.000	• Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Ruangan Bakesbangpol	Jumlah ruangan kantor yang diperbaiki	1 Unit	50.000.000	
II	• PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Bandung Barat	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	100 Persen	573.820.000	• PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Bandung Barat	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	100 Persen	573.820.000	
2.1	• Kegiatan Penerapan Kebijakan Teknis dan Penerapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	402 Orang	573.820.000	• Kegiatan Penerapan Kebijakan Teknis dan Penerapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	402 Orang	573.820.000	
	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Terlaksanaanya Pendidikan Bela Negara	2 Kegiatan	47.200.000	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Terlaksanaanya Pendidikan Bela Negara	2 Kegiatan	47.200.000	
	• Penerapan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Terlaksanaanya Sosialisasi Pendidikan dan Pengembangan Karakter Bangsa	2 Kegiatan	47.200.000	• Penerapan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah kegiatan pendidikan dan pengembangan karakter bangsa	6 Kegiatan	230.370.000	Penambahan 4 kali Sosialisasi peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat		0 Orang	0	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100 Orang	140.000.000	Perlu diadakannya rakor forum pembauran kebangsaan
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan •	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Sosialisasi dan Rakor Revolusi Mental di Kab.Bandung Barat	300 Orang	47.200.000	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental	400 Orang	147.250.000	
	• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Pelaporan ini strategis masalah di KBB	-	47.200.000	• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Pelaporan ini strategis di KBB	-	0	
5	• PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Bandung Barat	Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman kehidupan Berpolitik yang Demokratis	100 Persen	14.312.405.370	• PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Bandung Barat	Tingkat partisipasi politik masyarakat yang menyalurkan Pendidikan politik dan sosialisasi	100 %	5.443.183.600	
	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penuntapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta dan personil yang mengikuti Penuntasan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum	400 Orang	14.312.405.370	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penuntapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta dan personil yang mengikuti Penuntasan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum	400 Orang	5.443.183.600	
	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Kab. Bandung Barat	Dokumen Hasil Verifikasi Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik	10 Dokumen	12.460.995.310	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Dokumen Hasil Verifikasi Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik	10 Dokumen	4.710.956.300	
	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	300.000.000	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	29.050.000	
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta forum-forum diskusi politik dan penyelahan politik	400 Orang	896.744.640	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penuntasan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta forum-forum diskusi politik dan penyelahan politik	400 Orang	407.631.200	
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-undang politik	30 Orang	448.942.700	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-undang politik	30 Orang	204.064.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		bagi masyarakat dan Rapat Koordinasi Antar Lembaga			Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		bagi masyarakat dan Rapat Koordinasi Antar Lembaga			
	• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Kab. Bandung Barat	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Situasi Politik dalam daerah KBB	31 Laporan	196.726.640	• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Situasi Politik dalam daerah KBB	31 Laporan	89.421.200	
III	• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Bandung Barat	Persentase data organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi memiliki kesekretariatan dan kepengurusan	100 Persen	1.823.239.220	• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Bandung Barat	Persentase data organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi memiliki kesekretariatan dan kepengurusan	100 %	828.745.100	
3.1	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bandung Barat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	1.190 Orang	1.823.239.220	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bandung Barat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	2020 HOK	828.745.100	
	• Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	penyusunan database organisasi kemasyarakatan	2 Dokumen	118.193.460	• Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	penyusunan database organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	47.136.200	
	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	Bidang Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sekarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33 Dokumen	616.000.000	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	35.587.800	
	• Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	sosialisasi / bimbingan teknis Peraturan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bagiorganisasi kemasyarakatan	250 Orang	310.384.120	• Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	sosialisasi / bimbingan teknis Peraturan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bagiorganisasi kemasyarakatan	440 Orang	85.301.200	
	• Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta jambore organisasi kemasyarakatan	940 Orang	661.856.300	• Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta jambore organisasi kemasyarakatan	250 Orang	110.707.400	
	• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah monitoring dan evaluasi kesekretariatan organisasi kemasyarakatan	15 Laporan	107.805.280	• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah monitoring dan evaluasi kesekretariatan organisasi kemasyarakatan	15 Laporan	23.075.600	
IV	• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Bandung Barat	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Peraturan dan Ketetuan Bangsa	100 %	247.450.000	• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Bandung Barat	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama serta ketahanan di bidang ekonomi,	100 %	982.213.300	
4.1	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Bandung Barat	Terlaksanaanya kegiatan diskusi, sosialisasi dan seminar peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	115 Orang	247.450.000	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Bandung Barat	Terlaksanaanya kegiatan diskusi, sosialisasi dan seminar peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	1065 Orang	982.213.300	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Terlaksanya Sosialisasi terkait NARKOBA	35 Orang	23.725.000	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah sosialisasi P4GN (Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika) kepada remaja rentan narkoba	35 Orang	23.725.000	
	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mendapatkan hibah	0	-	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mendapatkan hibah	1 lembaga	200.000.000	Penambahan Hibah untuk FKUB
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	200.000.000	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	100.800.000	
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	23.725.000	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	25.625.200	
	• Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta Forum Group Diskusi (FGD) Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	-	• Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Forum Group Diskusi (FGD) Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Bandung Barat	Persentase Penyelesaian kasus konflik Agama, Sosial dan Budaya	100 Persen	3.317.050.900	• PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Bandung Barat	Persentase Penyelesaian kasus konflik Agama, Sosial dan Budaya	100 %	6.054.287.403	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penuntasan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta dan personil yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penuntasan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	547 Orang	3.317.050.900	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penuntasan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta dan personil yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penuntasan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.211 Orang	6.054.287.403	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Bimbingan Teknis Kelembagaan bidang kewaspadaan	85 Orang	23.725.000	• Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Bimbingan Teknis Kelembagaan bidang kewaspadaan	340 Orang	136.000.000	Ada penambahan volume kegiatan dari 1 kali menjadi 5 kali
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kajasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	2 Dokumen	55.725.000	• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	2 dokumen	52.099.600	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan Konflik di Daerah yang Disesuaikan					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disesuaikan			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	411 Orang	1.466.242.200	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	411 Orang	2.872.882.805	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	460 Orang	680.416.200	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	460 Orang	604.132.800	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini oleh intel	480 Laporan	1.290.942.500	• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini oleh intel	480 Laporan	1.201.052.800	

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil dari Musrenbang tingkat kabupaten. Tujuan umum program dan kegiatan masyarakat yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kabupaten. Sedangkan tujuan khususnya adalah memprioritaskan kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang pemerintahan.

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah teranggarkan di Tahun 2023 :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :
   - Sosialisasi Peningkatan wawasan kebangsaan untuk Ormas : Kembara, LKP3M Bandung Barat, Yayasan Wahana Raksa Desa
   - Pendidikan dan Latihan Bela Negara generasi Muda untuk Ormas GM FKPPI Kab. Bandung Barat
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
   - Forum Group Diskusi (FGD) Politik Antar Tokoh Masyarakat usulan dari Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat
   - Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di 3 Desa usulan dari Anggota DPRD Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
   - Sosialisai politik kepada generasi milenial usulan dari Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi untuk Organisasi PWRI

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada poin ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat mengacu kepada kebijakn nasional dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementrian / Lembaga dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Visi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri "**. Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : " **Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa**" dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
   a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
   b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan

2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
   a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut :
      1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
      2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
      3) Penguatan demokrasi di daerah;
      4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
      5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.
      6) Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut :
         1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
         2) Deteksi dini oleh aparatur pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat yang dihadapkan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang poltik yang baik, kondisi keamanan dan ketentraman yang kondusif serta kewaspadaan dini di daerah	1. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat; 2. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 3. Belum adanya perda bidang Kesbangpol.	1. Rendahnya kualitas SDM; 2. Keterbatasan dana untuk mendukung progran/ kegiatan 3. Terbatasnya data dan informasi 4. Perencanaan program / kegiatan yang belum optimal

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Provinsi Jawa Barat sama halnya dengan Kabupaten Bandung Barat yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026.

Berdasarkan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

c. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat

d. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan pemuda

e. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan

b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan

c. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif

d. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha

e. Terkendalinya tingkat kemiskinan

f. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja

g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

h. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan

b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah, dengan sasara n:

a. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien

b. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera

c. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel

d. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas

e. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dokumen Rencana Kerja (RENJA) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik T.A 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2024	KEGIATAN 2024
1	Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tertib dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi	1. Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		2. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 yaitu dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Lampiran III.1.**

I. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :

" Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "

2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :**

" Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "

3. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :**

" Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan "

4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :**

" Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya "

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :**

" Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial "

II. NON URUSAN, terdiri dari :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan,** yaitu :

    1. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN PD TAHUN 2024

KODERING PD : 8.01
NAMA PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RENCANA TAHUN : 2024

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Urusan Wajib ...										
1	8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Sekretariat	68,00 (B)	4.405.630.912	APBD Bandung Barat	Sekretariat	68,00 (B)	4.044.630.707		(47.846.136)
	8	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Sekretariat	27 dokumen	110.701.800	APBD KBB	Sekretariat	9 dokumen	49.542.100	DAU	7.542.100
	8	01	01	2	01	01	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	3 dokumen	54.714.800	APBD KBB	Sekretariat	3 dokumen	49.542.100		7.542.100
	8	01	01	2	01	02	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	1 dokumen	9.982.500	APBD KBB	Sekretariat	1 dokumen	-		0
	8	01	01	2	01	03	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat	1 dokumen	9.982.500	APBD KBB	Sekretariat	1 dokumen	-		0
	8	01	01	2	01	04	• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sekretariat	1 dokumen	4.757.700	APBD KBB	Sekretariat	1 dokumen	-		0
	8	01	01	2	01	05	• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat	1 dokumen	4.757.700	APBD KBB	Sekretariat	1 dokumen	-		0
	8	01	01	2	01	06	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	5 Laporan	7.094.600	APBD KBB	Sekretariat	2 Laporan	-	DAU	0
	8	01	01	2	01	07	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen komponen Evaluasi Kinerja	Sekretariat	11 Laporan	19.412.000	APBD KBB	Sekretariat	1 dokumen	-		0
	8	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Sekretariat	46 dokumen	3.730.752.062	APBD KBB	Sekretariat	46 Dokumen	3.822.613.507		26.235.270
	8	01	01	2	02	01	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP SPM gaji dan TPP ASN	Sekretariat	28 Dokumen	3.710.700.737	APBD KBB	Sekretariat	28 dokumen	3.791.722.907	DAU	26.286.670
	8	01	01	2	02	05	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	1 dokumen	8.891.200	APBD KBB	Sekretariat	1 Laporan	-		0
	8	01	01	2	02	07	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Sekretariat	17 dokumen	11.070.125	APBD KBB	Sekretariat	17 Laporan	30.890.600	DAU	-629.400

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
	8	01	01	2	05		• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sekretariat	12 Dokumen	68.356.400	APBD KBB	Sekretariat	31 dokumen	-	DAU	-52.000.000
							• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat	3 paket	37.500.000	APBD KBB	Sekretariat	3 Paket	0		0
							• Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian ASN dan PTT Badan Kesbanggpol	Sekretariat	12 Dokumen	30.856.400	APBD KBB	Sekretariat	12 Dokumen	0	DAU	-52.000.000
	8	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Ruang Pendahara Barang	7 dokumen	419.960.650	APBD KBB	Sekretariat	45 Dokumen	109.650.700		(31.497.900)
	8	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ruang Kantor Bakesbang pol	2 Paket	36.037.500	APBD KBB	Ruang Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang	3 paket	0	DAU	0
	8	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ruang Kantor Bakesbang pol	1 Paket	7.710.000	APBD KBB	Ruang Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang	1 paket	25.727.300		-733.100
	8	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ruang Kantor Bakesbang pol	2 Paket	32.720.150	APBD KBB	Ruang Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang	2 paket	24.823.400	DAU	-16.804.800
	8	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ruang Kantor Bakesbang pol	4 Paket	14.400.000	APBD KBB	Ruang Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang	4 paket	0		0
	8	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ruang Kantor Bakesbang pol	360 Dokumen	19.800.000	APBD KBB	Ruang Kantor Bakesbang pol	12 dokumen	0	DAU	0
	8	01	01	2	06	08	Penyediaan Makanan dan Minuman/Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ruang Kantor Bakesbang pol	37 Laporan	218.500.000	APBD KBB	Ruang Kantor Bakesbang pol	12 Laporan	19.500.000		-27.360.000
	8	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam daerah dan luar daerah	166 Laporan	90.793.000	APBD KBB	Dalam daerah KBB, luar daerah KBB dalam Provinsi Jawa barat, Luar provinsi Jawa Barat	12 Laporan	39.600.000	DAU	13.600.000
	8	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase peralatan, perlengkapan kantor	Ruang	100%	3.660.000	APBD KBB	Ruang	100 %	-		-

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1			2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Urusan Pemerintahan Daerah	dalam keadaan baik	Kantor Bakesbang pol				Kantor Bakesbang pol				
	8	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ruang Kantor Bakesbang pol	6 laporan	3.660.000	APBD KBB	Ruang Kantor Bakesbang pol	7 Laporan	-	DAU	0
	8	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas dan ruangan kantor dalam keadaan baik	Ruang Kantor Bakesbang pol	100%	72.000.000	APBD KBB	Ruang Kantor Bakesbang pol	100 %	62.824.400		1.874.400
	8	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung Barat	10 unit	47.000.000	APBD Bandung Barat	Perda KBB	11 Unit	32.824.400	DAU	1.874.400
	8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung Barat	1 unit	25.000.000	APBD KBB	Perda KBB	1 Unit	30.000.000		0
	8	01	02				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	84 %	1.205.222.900	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	84 %	314.014.600		13.640.600
	8	01	02	2	01		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	1000 orang	773.797.900	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	1000 Orang	314.014.600	DAU	13.640.600
	8	01	02	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Bandung Barat	2 Dokumen	60.900.000	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	3 Dokumen	15.120.000	DAU	0
	8	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	500 Orang	615.022.900	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	500 Orang	298.894.600	DAU	13.640.600
	8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bandung Barat	500 Orang	97.875.000	APBD KBB		500 Orang	-		0
5	8	01	03				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase tingkat pemahaman politik masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Kab. Bandung Barat	**60%**	**296.779.800**	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	60 %	41.273.574.500		38.606.782.100
	8	01	03	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah orang yang mengikuti Penentapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Kab. Bandung Barat	750 orang	296.779.800	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	900 Orang	41.273.574.500		38.606.782.100

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum								
	8	01	03	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Bandung Barat	19 dokumen	70.018.200	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	10 Dokumen	40.966.027.300		38.339.634.900
	8	01	03	2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Bandung Barat	2 dokumen	35.820.000	APBD KBB		2 Dokumen	-		-
	8	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	750 Orang	120.911.600	APBD KBB		751 Orang	-		-
	8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	160 Orang	58.630.000	APBD KBB		161 Orang	-		-
	8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bandung Barat	12 laporan	11.420.000	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	13 Laporan	307.547.200		267.147.200
	8	01	04				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bandung Barat	**86%**	**359.317.725**	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	100 %	590.890.600		81.410.600

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1			2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							KEMASYARAKATAN										
	8	01	04	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	Kab. Bandung Barat	1500 orang	359.317.725	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	1500 Orang	599.890.600		81.410.600
	8	01	04	2	01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Subbid Ormas	1 dokumen	52.762.000	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	1 Dokumen	-		0
	8	01	04	2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Subbid Ormas	4 dokumen	23.025.600	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	4 Dokumen	590.000.000		80.000.000
	8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	920 Orang	77.452.500	APBD KBB		920 Orang	-		0
	8	01	04	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	460 Orang	130.839.025	APBD KBB		480 Orang	-		0
	8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung Barat	300 laporan	75.238.600		Kab. Bandung Barat	12 laporan	39.890.600		14.10.600
	8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kab. Bandung Barat	65%	**195.650.000**	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	65 %	127.890.600		-72.109.400
	8	01	05	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Bandung Barat	7 Dokumen	195.650.000	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	1 Dokumen	127.890.600		-72.109.400
	8	01	05	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	200 Orang	72.000.000	APBD KBB	Kab. Bandung Barat	160 Orang	50.000.000		(100.000.000)
	8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Kab. Bandung Barat	300 Orang	56.150.000	APBD KBB		300 Orang	77.890.600		27.890.600

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
	8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung Barat	100 Laporan	67.500.000	APBD KBB		100 Laporan	-		-
6	8	01	06				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bandung Barat	**75%**	**1.737.314.400**	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	75 %	3.836.010.100		2.459.673.700
	8	01	06	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanfapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanfapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bandung Barat	36 dokumen	1.737.314.400	APBD Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	36 Dokumen	3.836.010.100		2.459.673.700
	8	01	06	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Pemda Kab Bandung Barat	5 dokumen	51.500.000		Kab. Bandung Barat	1 Dokumen	10.100.000		-
	8	01	06	2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Bandung Barat	12 dokumen	522.200.000		Kab. Bandung Barat	10 dokumen	812.578.400		457.078.400
	8	01	06	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	400 orang	66.800.000			1 orang	-		-
	8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kab. Bandung Barat	2028 orang	664.814.400			2028 Orang	775.734.400		100.000.000

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024				BERTAMBAH /BERKURANG
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Konflik di Daerah	di Daerah									
	8	01	06	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung Barat	480 laporan	432.000.000		Kab. Bandung Barat	12 laporan	2.237.597.300		1.902.597.300
Jumlah Total											7.768.290.737						

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Bandung Barat, 3 September 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

WIDA WARDHANI, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197906071998101001

KABUPATEN BANDUNG BARAT

WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA

R E N J A

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN SAGULING

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyusun Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun, Permendagri no 90 tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Reviu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini merupakan Implementasi Penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja beserta Kelompok Sasarannya.

Dengan adanya Reviu Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih Objektif, karena Rencana Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Reviu Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan Anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Reviu Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ada.

Saguling, _ Agustus 2024

Camat Saguling,

BAMBANG WIJANARKO ISCHAN, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 198010201998111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD & TUJUAN 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saguling tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Saguling Tahun 2024 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saguling 25

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 27

2.4. Review terhadap RKPD 28

2 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (MUSRENBANG) 56

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **62**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 62

3.2. Tujuan dan sararan Renja Kecamatan Saguling 65

3.3. Program dan Kegiatan 68

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **84**

PENUTUP **102**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Saguling Tahun Anggaran 2020 6
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD 13
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saguling 26
Tabel 2.4 Review Terhadap l RKPD Tahun 2024 Kecamatan Saguling 29
Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2024 57
Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024..... 62
Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Saguling 64
Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2022 65
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024..... 70
Tabel 4.1 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2024 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reviu Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada Level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam Satu Tahun Anggaran dan Kerangka Regulasi serta memberikan Gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja dan bagaimana Pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Reviu Rencana Kerja Kantor Kecamatan Saguling Tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD periode satu tahun, hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Daerah nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026.

Penyusunan Reviu Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Saguling Tahun 2024 menjadi acuan di dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Penyusunan Reviu Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan prinsip- prinsip :

1. Perencanaan SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Reviu Rencana Kerja SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Reviu Rencana Kerja SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

4. Reviu Rencana Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah sesuai perkembangannya.
5. Reviu Rencana Kerja dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan anggaran sumberdaya dan waktu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Reviu Rencana Kerja Tahunan adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Tentative
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Perda 3 tahun 2019 tentang RPJMD
13. Perbup SOTK Tentang Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan

1.3 MAKSUD & TUJUAN

Penyusunan Reviu Rencana Kerja Kantor Kecamatan Saguling dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya. Sebagai implementasi dari Renstra SKPD. Sedangkan Tujuannya Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatkan pelayanan, menentukan target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
2. Menyelaraskan siklus perencanaan lima tahunan (Renstra) SKPD dengan rencana tahunan SKPD.
3. Menyelaraskan perencanaan tahunan SKPD dengan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan Visi dan misi Kepala Daerah

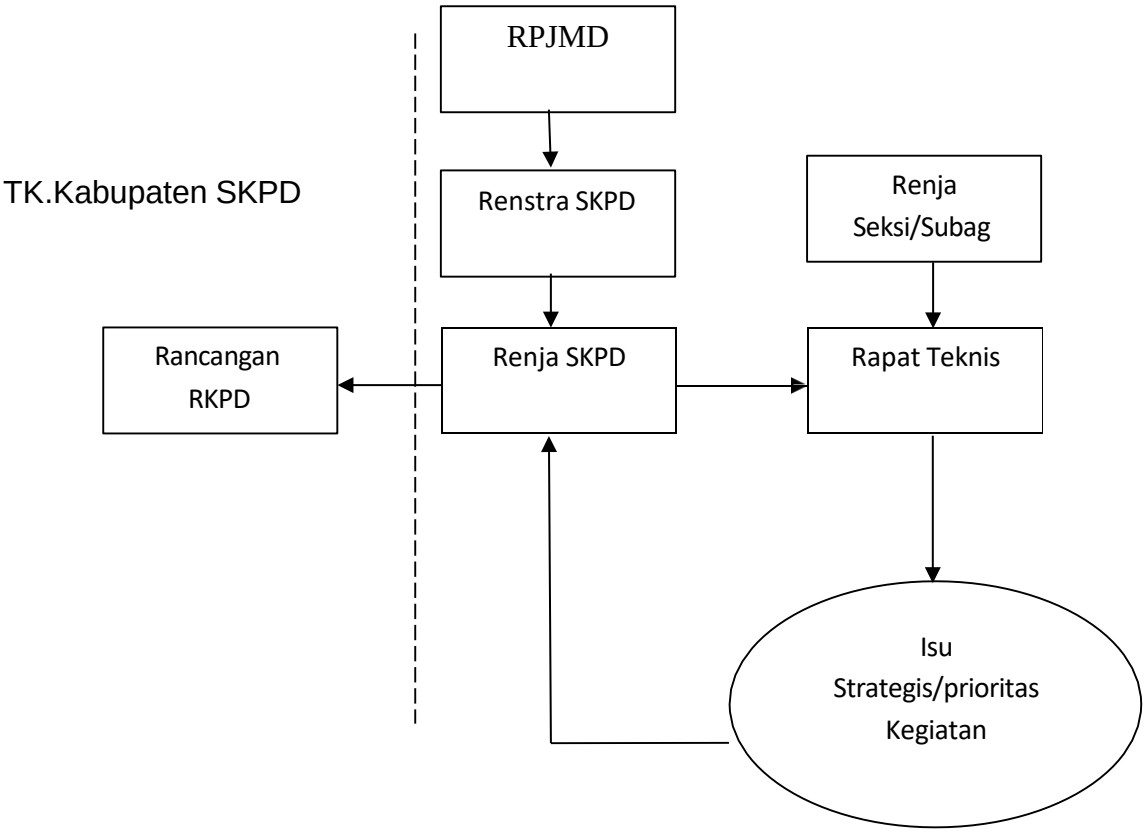

Gambar 1.1 PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Reviu Rencana Kerja Kantor Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas tentang Latar belakang, pengertian ringkas tentang Reviu Rencana Kerja SKPD, kedudukan renja SKPD dalam system perencanaan daerah, serta landasan yang mengatur tentang system perencanaan nasional

1.2 Landasan hukum

Merupakan landasan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan SKPD

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dari penyusunan Renja, serta tujuan yang ingin di capai dari tersusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD tersebut.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan tentang isi bab per bab dalam menyusun Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN Reviu RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN SAGULING TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Saguling

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saguling

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Saguling

2.4. Review terhadap Reviu RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Saguling

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saguling tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Saguling Tahun 2023

Reviu Rencana Kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan diskenariokan dalam Renja.

Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas dasar dokumen diatas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya, (anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2023 lengkap dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Saguling Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	5 Dok	100%
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
10	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 ASN	11 ASN	100%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100%
14	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah jenis	1 Paket	1 Paket	100%
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	30 paket	100%
17	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0%
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	100%
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
24	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor Dalam Satu Tahun**			
25	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	100%
27	**Kantor**	**Jumlah Asset Kantor Dalam Keadaan Baik**			
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	100%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%
30	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**			
31	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan**			
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100%
33	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**			
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	100%
35	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**			
36	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100%
38	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	3 Dokumen		0%
39	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		0%
40	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI**			
41	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Derah Dan Peraturan Kepala Daerah**			
42	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50 Laporan	50 Laporan	100%
43	**Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Derah Dan Peraturan Kepala Daerah**			
44	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
45	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				
46	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			
47	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	100%
48	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI**			
49	**Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananny A Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa**			
50	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
51	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
52	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Kesimpulan dari Tabel 2.1 Tentang Capaian target dan realisasi program dan kegiatan kecamatan Saguling tahun anggaran 2023 dapat di diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pengukuran kinerja melalui pendekatan pencapaian program, secara umum tingkat pencapaiannya berkisar 85,41%, Pencapaian kinerja program secara keseluruhan dikategorikan baik ,
2. Pencapaian kinerja keuangan berkisar antara 89,06%, atau dikategorikan baik.

Dari kedua poin diatas, aspek kinerja program yang dilaksanakan dinilai efektif, sedangkan aspek pencapaian keuangan dinilai efisien.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD

NAMA SKPD : Kantor Kecamatan Saguling

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33,33
7.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan					13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	33,33
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33
7.01.01.2.05	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	3 laporan					1 laporan	1 laporan	33,33
7.01.01.2.05.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100,00
7.01.01.2.05.03	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERANGKAT DAERAH									
7.01.01.2.05.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket					30 Paket	30 Paket	33,33
7.01.01.2.06	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
7.01.01.2.06.01	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah**								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket					7 Paket	7 Paket	33,33
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket					2 Paket	2 Paket	33,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket					5 Paket	5 Paket	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket					2 Paket	2 Paket	33,33
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit					5 Unit	5 Unit	33,33
7.01.01.2.07.05	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.08.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi**								
7.01.01.2.08.04	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
7.01.01.2.09	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33,33
7.01.01.2.09.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	ADA DI KECAMATAN									
7.01.01.2.09.06	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33
7.01.01.2.09.09	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
7.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
7.01.02.2.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan**								
7.01.02.2.01.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan					5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33,33
7.01.02.2.02.02	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**								
7.01.02.2.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								
7.01.02.2.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.03.01	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								
7.01.02.2.04	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33
7.01.02.2.04.03	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**								

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja OPD tahun 2024 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja OPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7.01.03.2.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33,33

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saguling

Analisis menggambarkan tingkat efektifitas kinerja / pencapaian program melalui tingkat capaian indicator dengan membandingkan antara target dengan realisasi, sehingga dicapai prosentase capaian, analisis efektifitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara target dengan realisasi, selain itu analisis juga dilakukan terhadap perbedaan kinerja yang terjadi, termasuk penyebabnya untuk dicari solusi pemecahannya.

Analisa kinerja pelayanan sesuai dengan PP No 6 tahun 2008 adalah dengan cara membandingkan tingkat capaian kinerja dengan :

1. Target kinerja yang tertuang dalam rencana kerja
2. Realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya

Format pencapaian kinerja kantor kecamatan Saguling Tahun 2023 sampai 2026 sebagai mana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saguling

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun - n (2024)	Tahun n+1 (2024)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n (2024)	T5n n+1 (2026)	
								2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**			**BB (69,80)**	**BB (70,01)**	**60,5 (B)**	**61 (B)**	**CC (55,8)**		**60,5 (B)**	**61 (B)**	
2	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			**81**	**82**	**85,5**	**85,75**	**82,01**		**85,5**	**85,75**	
3	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**				**BB (70,01)**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	

Kesimpulan dari Tabel 2.3 Tentang Pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saguling dapat di diuraikan sebagai berikut :

a) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun terakhir yaitu CC (55,8)
b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 tercapai 82,01

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Saguling, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Saguling sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kantor Kecamatan Saguling pada tahun 2024 mencapai angka 89,86% atau dengan kata lain cukup tinggi, hal ini diwujudkan dengan 2 indikator sebagai berikut :
    - Capaian > 100 % : sebanyak 0 indikator
    - Capaian 100 % : sebanyak 0 indikator
    - Capaian 99-100 % : 0 indikator
    - Capaian < 99 % : 2 indikator
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain masih tahap optimalisasi sarana dan prasarana kantor.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum optimalnya sistem pelayanan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah jumlah tenaga pegawai yang masih kurang disamping sarana kantor, dan peluang akan kebutuhan tersebut di atas dapat di usulkan/dipenuhi pada tahun berikutnya,
5. Sedangkan isu-isu penting yang perlu di tindak lanjuti pada tahun mendatang adalah berupa:
    - Belum optimalnya sarana Kantor yang memadai
    - Rendahnya aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi
    - Masih buruknya sarana perhubungan

2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD yang dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Kantor Kecamatan Saguling, dengan arahan kepala SKPD terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatip yang di sediakan untuk Kantor Kecamatan Saguling berdasarkan Reviu

Kalau kita lihat Reviu renja SKPD Tahun 2024, disusun pada awal tahun 2024, dimana tahun tersebut adalah merupakan Tahun kedua dari masa transisi pembangunan 3 tahun di Kabupaten Bandung barat, dimana sistem perencanaan SKPD mengacu pada perubahan RPJMD 2024 -2026.

Berdasarkan Renstra untuk masa tahun 2024-2026, maka program dan kegiatan yang di susun di awal 2024 untuk rencana Tahun 2024 perlu menyesuaikan dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatip yang tertuang sebagaimana tercantum pada RPJMD 2024-2026, untuk itulah review terhadap Reviu RKPD dapat di jabarkan pada table berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kecamatan Saguling

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan saguling			4.609.288.138	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan saguling			.4.412.054.097	
2	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		82.210.000	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		97.010.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.600.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.305.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.305.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.305.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.305.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.305.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.305.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	16.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.400.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	23.400.000	
10	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.881.688.902	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.708.873.029	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan saguling	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	2.770.288.902	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan saguling	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	2.555.023.029	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	7.800.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.250.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	103.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150.600.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 laporan	3.600.000	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 laporan	3.600.000	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	
17	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		125.361.000	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		128.950.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penignkatan sarana dan prasaranan	Kecamatan saguling	Jumlah Paket penignkata sarana dan prasarana	30 Paket	125.361.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	128.950.200	
20	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	2 Paket	147.968.300	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	2 Paket	143.771.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	41.491.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.128.400	
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.258.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.325.200	
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	29.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.150.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan saguling	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan saguling	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	0	
27	Pengadaan Mebel	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan saguling	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	
28	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		65.852.736	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.117.168	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.102.736	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kecamatan saguling	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.367.158	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan jasa pelayanan kantor		48.750.000					48.750.000	

30	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan saguling	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi		143.543.200	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan saguling	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi		157.058.800	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		65.400.000	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		78.915.400	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa		23.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa		23.400.000	

32	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	42.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	55.515.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		52.000.000	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		52.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.000.000	
35	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan	26.143.200	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan	26.143.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	26.143.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	26.143.200	
37	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan saguling	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		595.174.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan saguling	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		595.174.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		595.174.000	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		595.174.000	
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan saguling	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	39.424.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan saguling	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	39.424.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	555.750.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	555.750.000	
41	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan saguling	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %	409.950.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan saguling	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %	409.950.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan saguling			409.950.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan saguling			409.950.000	
43	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.750.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	78.750.000	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	78.750.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	331.200.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan saguling	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	331.200.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan saguling	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %	331.200.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan saguling	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %	49.400.000	
47	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	85.000.000	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	49.400.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	85.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan saguling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	49.400.000	
JUMLAH					4.609.288.138	JUMLAH				4.412.054.097	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (MUSRENBANG)

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Saguling, Kecamatan Saguling telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari

masyarakat melalui Forum PD dan Musrenbang Kecamatan dengan menghasilkan usulan daftar skala prioritas pada tahun 2024 yang akan direalisasikan Tahun 2024. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang atau mitra terkait perencanan pembangunan di Kecamatan Saguling. Berikut Daftar usulan skala prioritas Kecamatan Saguling :

Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2024 Kecamatan Saguling

NO	KAMUS USULAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	VOLUME	PAGU	TOTAL PAGU USULAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REHAB JALAN	JALAN ASPAL TEBAL 5 CM KERUSAKAN 100%	JALANAN RUSAK DAN BERLUBANG	KP. CISUDIN RT 01 RW 06 - KP. BOJONG JAMBU RT 02 RW 02	700 M X 2 M	285.259,62	411.344.000	SAGULING	JATI
2	TPT JALAN	TPT PASANG BATU RUAS JALAN	SERING TERJADI LONGSOR TANAH DI TEBING PINGGIR JALAN	JALAN DESA - PASIR BANDERA KP. CIPEUNDEUY RT 01 RW 04	64,36 M3	1.395.884,39	98.823.000	SAGULING	JATI
3	TPT JALAN	TPT JALAN DESA - PASIR BANDERA	SERING TERJADI LONGSOR TANAH DI TEBING PINGGIR JALAN	JALAN DESA PAKUWON - BOJONG JAMBU KP. PAKUWON RT 03 RW 01	65,48 M3	1.395.884,39	100.542.000	SAGULING	JATI
4	JALAN USAHA TANI	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI, JALAN PRODUKSI (PENGERASAN TELFORD)	AKSES JALAN USAHA TANI MASIH TANAH YANG MENGAKIBATKAN SULITNYA AKSES UNTUK MENGANGKUT HASIL PERTANIAN	KP. CIPEUNDEUY RT 05 RW 04	400 M X 1,5 M	161.433.700	161.433.700	SAGULING	JATI
5	JALAN USAHA TANI	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI, JALAN PRODUKSI (PENGERASAN TELFORD)	AKSES JALAN USAHA TANI MASIH TANAH YANG MENGAKIBATKAN SULITNYA AKSES UNTUK MENGANGKUT HASIL PERTANIAN	JALAN USAHA TANI PENGHUBUNG DESA JATI - DESA SAGULING KP. CIKETUNG RT 01 RW 002 (CIGELAP)	300 M X 2 M	146.820.000	146.820.000	SAGULING	JATI
6	SARPRAS JALAN	Penerangan Jalan Umum	Kurangnya Penerangan di sepanjang jalan desa bojonghaleuang	Jalan Desa Bojonghaleuang, Kab. Bandung Barat, Saguling, Bojonghaleuang	20 titik	20.000.000	400.000.000	SAGULING	BOJONGHALEUANG

NO	KAMUS USULAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	VOLUME	PAGU	TOTAL PAGU USULAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dari wilayah RW 01-09						
7	REHAB JALAN	Perkerasan Jalan Desa	Sudah rusak sepanjang jalan desa Bojonghaleuang wilayah Kp. Cikondang RW 004, Kp. Bojonghaleuang RW 008, Kp. Cilimus RW 009	Jalan Desa Bojonghaleuang, Kab. Bandung Barat, Saguling, Bojonghaleuang	600 m	75.000.000	225.000.000	SAGULING	BOJONGHALEUANG
8		Pengadaan Bibit Domba	Untuk Meningkatkan Peternak	Desa Bojonghaleuang	50 Ekor	4.000.000	200.000.000	SAGULING	BOJONGHALEUANG
9		Penyediaan Motor sampah	Kekurangan Untuk Pengangkutan	Desa Bojonghaleuang	2 Unit	36.000.000	72.000.000	SAGULING	BOJONGHALEUANG
10		Revitalisasi Bkb (Bina Keluarga Balita)	untuk mengaktifkan kembali/Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Desa Bojonghaleuang	9 Kegiatan	20.000.000	180.000.000	SAGULING	BOJONGHALEUANG
11	REHAB JALAN	Hotmix (Jalan Aspal) Jalan usaha tani	akses jalan rusak	Jl. Cilutung RW 03 Desa Cipangeran Kecamatan Saguling	P : 350 x L : 2,5 = 3.000 M2	129.057.700	129.057.700	Saguling	Cipangeran
12	TPT	Tembok penahan tanah jalan usaha tani	tanah yang sering longsor kalau musim hujan	Jl. Ciawitali Rw 03 Desa Cipangeran	P : 30 x t: 3	100.581.800	100.581.800	Saguling	Cipangeran
13	RTLH	Rumah Tidak Layak Huni	Banyak rumah dalam keadaan rusak	Jl. Cipangeran RT 02 RW 02 Desa Cipangeran	20 paket	15.000.000	300.000.000	Saguling	Cipangeran

NO	KAMUS USULAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	VOLUME	PAGU	TOTAL PAGU USULAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Bantuan Modal POKTAN	Bantuan modal kelompok ternak Domba	Tidak adanya modal awal untuk kelompok Domba	RW 01, RW 04	2 Kelompok	85.000.000	170.000.000	Saguling	Cipangeran
15	Bantuan Modal PEKKA	Bantuan Pengembangan usaha Kelompok PEKKA	perlunya pelatihan dan pengembangan Kelompok PEKKA	Desa Cipangeran	kelompok PEKKA	20.000.000	20.000.000	Saguling	Cipangeran
16	REHAB JALAN	Hotmix (Jalan Aspal) Jalan Poros Kabupeten	Akses jalan ruksak menuju sara pemerintahan baik ke kantor kecamatan maupun akses jalan menuju kantor kabupaten	Jl. Cikarang-Mariuk meliputi RW 01,03,04,06 Desa Girimukti Kecamatan Saguling	P : 1000 x L : 3 = 3.000 M2	312.609	1.059.744.500	Saguling	Girimukti
17	JALAN USAHA TANI	Rabat Beton Jalan Usaha Tani. Kelompok " TRI DARMA TANI"	Akses jalan Usaha tani ruksak sehingga mengganggu mobilitas pengangkutan hasil pertani	Jl. Sinarmukti RT 05 RW 02 Desa Girimukti	P : 500 x L : 3 = 1500 M2	285.259	427.888.500	Saguling	Girimukti
18	JALAN USAHA TANI	Rabat Beton Jalan Usaha Tani. Kelompok " SUBUR MAKMUR"	Akses jalan Usaha tani ruksak sehingga mengganggu mobilitas pengangkutan hasil pertani	Jl. Dunguskalong RT 02 RW 07 Desa Girimukti	P : 400 x L : 2,5 = 1000 M2	285.259	285.259.000	Saguling	Girimukti
19	JALAN USAHA TANI	Rabat Beton Jalan Usaha Tani. Kelompok "MEKAR MANDIRI"	Akses jalan Usaha tani ruksak sehingga mengganggu mobilitas pengangkutan hasil pertani	Jl. Ciwaru RT 02 RW 09 Desa Girimukti	P : 400 x L : 2,5 = 1000 M2	285.259	285.259.000	Saguling	Girimukti
20	Bantuan Modal PEKKA	Bantuan Modal PEKKA untuk 6 Kelompok	perlunya bantuan Modal pemberdayaan perempuan kepala kelurga untuk meningkatkan kesejhteraan kepala keluarga perempuan	RW 01, 02, 03, 04, 05, 06 desa girimukti	6 Kelompok	20.000.000	120.000.000	Saguling	Girimukti

NO	KAMUS USULAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	VOLUME	PAGU	TOTAL PAGU USULAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	REHAB JEMBATAN	Jembatan Beton Struktur Atas Bentang >5 M	Jembatan Desa Saguling - Jati	Saguling - Jati (Kp.Cibuluh-Ciketung)	50 X 2 M	7.706.583,20	770.658.320	Saguling	Saguling
22	REHAB JALAN	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Cimanggu RW 10	Jalan Perekonomian Masyarakat	Jl. Antar Desa Saguling - Jati	200 X 2,5 M	356.219,92	178.109.960	Saguling	Saguling
23	REHAB JALAN	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Cikaroya-Cisudin	Jalan Perekonomian Masyarakat	Desa Saguling-Jati	300 X 2 M	356.219,92	213.731.952	Saguling	Saguling
24	#Musrenbang pemberdayaan kelompok PEKKA	Bantuan Modal Usaha	Kelompok PEKKA	Desa Saguling	12 Kelompok	20.000.000	240.000.000	Saguling	Saguling
25	Pengembangan Kampung KB	Pelatihan Pengembangan Kampung KB Berupa pelatihan 8 pungsi keluarga	Kampung KB Desa Saguling	Desa Saguling	1 Desa	30.000.000	30.000.000	Saguling	Saguling
26	# Musrenbang. Dukungan Alat Kesenian	Bantuan Dukungan Kesenian Alat Degung 1 Set	Alat Kesenian	Desa Saguling	1 Set	150.000.000	150.000.000	Saguling	Saguling
27	SARPRAS JALAN	PJU (Tiang 7 Meter 80 Watt)	Belum Adanya Penerangan Jalan Umum di sepanjang Jalan Kabupaten	Kp. Babakan RT. 01 RW. 05, Kp. Ciiwur RT. 01, 02, 03, RW 10. dan Kp. Lebak Muncang RT. 01 dan 02 RW. 11	18 Unit	14.500.000	261.000.000	Saguling	Cikande
28	Alat dan Mesin Pertanian	Mesin Pompa Pengairan Pertanian	Belum adanya sarana Prasarana Pengairan Pertanian disaat musim kemarau	Kp. Babakan RT. 01 RW. 05 Desa Cikande	6 Unit (2 Kelompok Tani)	5.900.000	35.400.000	Saguling	Cikande
29	Bantuan Modal PEKKA	Bantuan Modal Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Belum Terealisasinya Bantuan Pemodalan PEKKA Tahun Anggaran sebelumnya	Kp. Lebak Muncang RT. 01 RW. 11 Desa Cikande dan Kp. Cilesang RT. 01 RW. 04 Desa Cikande	2 Kelompok	20.000.000	40.000.000	Saguling	Cikande

NO	KAMUS USULAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	VOLUME	PAGU	TOTAL PAGU USULAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dikarenakan pembatalan yang tidak jelas alasannya						
30	Bantuan Budidaya Ikan	Benih Ikan, Indukan, Pakan dan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Gurame	Belum adanya Bibit Ikan	Kp. Cilesang RT. 01 RW. 04 Desa Cikande	1600 ekor (1 Kelompok Ternak)	16.266.000	32.532.000	Saguling	Cikande
31	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Pelatihan Menjahit di LPK Mekarsari 2 untuk masyarakat pencari kerja desa cikande	Belum adanya Keterampilan pencari Kerja dalam mencari kerja	Kp. Cileueur RT. 01 RW. 08 Desa Cikande (LPK Mekarsari 2)	25 Orang	2.500.000	62.500.000	Saguling	Cikande
JUMLAH ANGGARAN	**6.907.685.432**								

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah **"PENINGKATAN EKONOMI DAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MELALUI PENGEMBANGAN SDM DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR"** dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pembangunan Wilayah Sumatera
	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
	Pembangunan Wilayah Kalimantan
	Pembangunan Wilayah Sulawesi

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
	Pembangunan Wilayah Maluku
	Pembangunan Wilayah Papua
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
	Pengentasan Kemiskinan
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
	Pembangunan Rendah Karbon
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi
	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
	Penegakan Hukum Nasional
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Saguling Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Misi ke – 4 Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Saguling

NO.	PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SAGULING
1	**Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi “**

NO.	PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SAGULING

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan lagi menjadi tujuan Kecamatan Saguling sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Tujuan dan sararan Renja Kecamatan Saguling

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Saguling diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	**Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3	**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.2 Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah konsistensi dengan Renstra SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat.

Program dan Kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi SKPD, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di SKPD baik sumberdaya manusia, sarana, serta anggaran yang tersedia.

Program yang tersedia yaitu dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat, dan untuk Kecamatan terdiri dari 2 urusan yaitu :

I. **NON URUSAN, terdiri dari :**

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , yaitu:**
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II . URUSAN KEWILAYAHAN

Terdiri dari 4 (dua) Program , yaitu:

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
   1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Saguling								4.609.288.138					4.900.102.736,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								4.609.288.138					4.900.102.736,00
7	01				KECAMATAN								4.609.288.138					4.900.102.736,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.422.278.802					3.612.602.736,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								82.020.000					92.500.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								-					
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	18.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								-					
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	9.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								-					
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	9.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								-					
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling,	-	1 Dokumen	-	9.305.000	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Semua Kel/Desa					Alokasi Umum				
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								-					
						-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	9.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-					
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	16.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.945.156.066					3.135.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-					
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	13 Orang/bulan	-	2.812.356.066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	3.000.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								-					
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	-	Kab. Bandung Barat, Saguli	-	1 Laporan	-	7.800.000	Dana Transfer Umum-		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	8.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Keuangan Akhir Tahun SKPD		ng, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum		Keuangan Akhir Tahun SKPD		
7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								-					
						-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								-					
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	120.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.000.000					5.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								-					
						-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.500.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								115.000.000					126.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								-					
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	30 Paket	-	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	16.000.000,00
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								-					
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	-	Kab. Bandung	-	6 Dokumen	-	100.000.000	Dana Transfer		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	6 Dokumen	110.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Informasi Kepegawaian		Barat, Saguling, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi Kepegawaian		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								210.000.000					232.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-					
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.500.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-					
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semu	-	7 Paket	-	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Aloka		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	110.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									a Kel/Desa					si Umum				
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								-					
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Aloksi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-					
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Aloksi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-					
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	-	Kab. Bandung	-	2 Paket	-	15.000.000	Dana Transfer		Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	16.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Penggandaan yang Disediakan		Barat, Saguling, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Penggandaan yang Disediakan		
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								-					
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.000.000					4.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								-					
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua	-	5 Unit	-	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	4.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Kel/Desa					Umum				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15.102.736					17.102.736,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-					
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	15.102.736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.102.736,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								162.059.336					179.500.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								65.000.000					72.500.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								-					
						-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semu	-	4 Dokumen	-	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Aloka		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	72.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									a Kel/Desa					si Umum				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								70.000.000					77.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								-					
						-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								27.059.336					30.000.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								-					
						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua	-	4 Laporan	-	27.059.336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Kel/Desa					Umum				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								530.000.000					583.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								530.000.000					583.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								-					
						-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								-					
						-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	550.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								409.950.000					435.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								78.750.000					85.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								-					
						-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	78.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								331.200.000					350.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								-					
						-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua	-	12 Laporan	-	331.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	12 Laporan	350.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Negara Republik Indonesia		Kel/Desa					Umum		Negara Republik Indonesia		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								85.000.000					90.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								85.000.000					90.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								-					
						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	90.000.000,00
TOTAL													4.609.288.138					**4.900.102.736,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Reviu Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian Rencana Kerja perubahan diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam Reviu Rencana Kerja mengemukakan secara eksplisit Reviu Rencana Kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Reviu Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Reviu Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Reviu Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa Reviu Rencana Kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. demi mewujudkan Reviu Rencana Kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan Reviu Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025

Unit Organisasi : Kecamatan Saguling

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULING KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN SAGULING							**3.312.356.066,00**	**4.609.288.138,00**	**4.412.054.097,00**	**1.099.698.031,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.312.356.066,00**	**4.609.288.138,00**	**4.412.054.097,00**	**1.099.698.031,00**
	7.01	**KECAMATAN**							**3.312.356.066,00**	**4.609.288.138,00**	**4.412.054.097,00**	**1.099.698.031,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP KEC. Saguling**				**60,5 (B) Nilai/Predikat**	**60,5 (B) Nilai/Predikat**	**2.964.884.866,00**	**3.454.280.938,00**	**3.200.471.497,00**	**368.215.134,00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	33.900.000,00	85.210.000,00	97.010.000,00	63.110.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.900.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	5.700.000,00
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	9.305.000,00	9.305.000,00	5.405.000,00
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	7.800.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	9.305.000,00	9.305.000,00	5.405.000,00
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	7.800.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	16.200.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.400.000,00	16.200.000,00	23.400.000,00	18.000.000,00

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				19 Laporan	19 Laporan	2.797.336.830,00	2.881.688.902,00	2.708.873.029,00	-88.463.801,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	2.745.436.830,00	2.770.288.902,00	2.555.023.029,00	-190.413.801,00
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	7.800.000,00	3.250.000,00	-650.000,00
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri				18 Laporan	18 Laporan	48.000.000,00	103.600.000,00	150.600.000,00	102.600.000,00

			wulana n/Semestera n SKPD									
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-900.000,00
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-900.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*				30 Unit	30 Unit	12.000.000,00	125.361.000,00	128.950.200,00	116.950.200,00
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30 Unit	30 Unit	12.000.000,00	125.361.000,00	128.950.200,00	116.950.200,00

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket penyediaan administrasi umum*				29 Paket	29 Paket	76.045.300,00	234.418.300,00	143.771.100,00	67.725.800,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	46.916.100,00	147.968.300,00	58.169.500,00	11.253.400,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.416.600,00	41.491.400,00	39.126.400,00	18.709.800,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.712.600,00	15.258.600,00	18.325.200,00	9.612.600,00
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	29.700.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang*				3 unit	3 unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				24 Laporan	24 Laporan	41.102.736,00	65.852.736,00	60.117.168,00	19.014.432,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.102.736,00	17.102.736,00	11.367.168,00	-5.735.568,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	24.750.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 unit	3 unit	0,00	58.150.000,00	58.150.000,00	58.150.000,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	32.550.000,00	32.550.000,00	32.550.000,00
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**146.047.200,00**	**143.543.200,00**	**157.058.600,00**	**-117.547.200,00**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	37.290.000,00	65.400.000,00	78.915.400,00	41.625.400,00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat				2 Laporan	2 Laporan	14.040.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	9.360.000,00

			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	23.250.000,00	42.000.000,00	55.515.400,00	32.265.400,00
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-38.000.000,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-38.000.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				2 Laporan	2 Laporan	18.757.200,00	26.143.200,00	26.143.200,00	7.386.000,00

			kepada Camat									
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	18.757.200,00	26.143.200,00	26.143.200,00	7.386.000,00
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan**				**100 %**	**100 %**	**122.824.000,00**	**552.114.000,00**	**595.174.000,00**	**-22.824.000,00**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				5 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakat	5 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakat	122.824.000,00	552.114.000,00	595.174.000,00	472.350.000,00
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	39.824.000,00	39.824.000,00	39.424.000,00	-400.000,00
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	83.000.000,00	512.290.000,00	555.750.000,00	472.750.000,00
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**51.900.000,00**	**409.950.000,00**	**409.950.000,00**	**-34.900.000,00**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah*				2 Laporan	2 Laporan	41.100.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	37.650.000,00

			Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum									
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	41.100.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	37.650.000,00
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	331.200.000,00	331.200.000,00	320.400.000,00
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	331.200.000,00	331.200.000,00	320.400.000,00
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**26.700.000,00**	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**-14.700.000,00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	26.700.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	22.700.000,00
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	26.700.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	22.700.000,00
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	J U M L A H								**3.312.356.066,00**	**4.609.288.138,00**	**4.412.054.097,00**	**1.099.698.031,00**

PENUTUP

Program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 merupakan lanjutan serta penambahan dari program sebelumnya. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam pelaksanaanya adalah bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 telah disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan SKPD dilihat dari berbagai kepentingan yang terintegrasi, dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Adapun kemungkinan jika terdapat terdapat perubahan kebijakan program serta anggarannya pada masa tahun tersebut dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang menuntunnya dan di implementasikan pada penyusunan dokumen berikutnya.

Reviu Rencana Kerja Kantor Kecamatan Saguling Tahun 2024 ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, proporsional, partisipatif dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh stake horlder SKPD, dengan kaidah pada pelaksanaanya sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan/regulasi yang melandasi penyusunan suatu dokumen
2. Pelaksanaan kegiatan di dasarkan pada mekanisme yang di sesuaikan dengan kewenangan (PP. 19/2008) yang di jabarkan dengan Perbup Bandung Barat No 45/2011, dan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi (Perbup 71/2012).
3. Penyusunan dokumen selanjutnya berkewajiban menjaga konsistensi dengan penyusunan Reviu renja SKPD ini.
4. Penyesuaian/pergeseran jumlah anggaran hendaknya dikonsultasikan dan mendapat arahan dari TAPD Kabupaten Bandung Barat.

Kami yakin bahwa Reviu Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan pendapat diharapakan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua.

Saguling, Agustus 2024

Camat Saguling,

BAMBANG WIJANARKO ISCHAN, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 198010201998111001

RENJA KECAMATAN CIHAMPELAS PERUBAHAN TAHUN 2024

kecamatan Cihampelas

KABUPATEN BANDUNG BARAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun, Permendagri no 90 tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2024 ini merupakan Implementasi Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja beserta Kelompok Sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih Objektif, karena Rencana Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan Anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ada.

Cihampelas, 31 Desember 2024

CAMAT CIHAMPELAS

AGUS RUDIANTO, S.Sos

NIP. 19620809 199303 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....**i**

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR TABEL .....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR .....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1. LATAR BELAKANG..... 4

1.2. LANDASAN HUKUM..... 5

1.3. MAKSUD & TUJUAN 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA.....8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cihampelas tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cihampelas 8

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cihampelas 21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 23

BAB III CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CIHAMPELAS..... Error! Bookmark not defined.**0**

3.1. Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja .....**Error! Bookmark not defined.**0

3.2. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cihampelas .**Error! Bookmark not defined.**2

BAB IV PENUTUP 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada Level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam Satu Tahun Anggaran dan Kerangka Regulasi serta memberikan Gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja dan bagaimana Pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cihampelas tahun 2025 mempunyai fungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD periode satu tahun, hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Daerah nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 - 2026.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Cihampelas tahun 2025 menjadi acuan di dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Rencana Kerja SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Rencana kerja SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
4. Rencana Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah sesuai perkembangannya.
5. Rencana Kerja dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan anggaran sumberdaya dan waktu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Dalam Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Permendagri no 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Permendagri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
8. Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2011, tentang pelimpahan urusan Pemerintahan kepada Camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 52 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan.

11. Permendagri no 90 tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

1.3 MAKSUD & TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Kantor Kecamatan Cihampelas dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya. Sebagai implementasi dari Renstra SKPD. Sedangkan Tujuannya Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatkan pelayanan, menentukan target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
2. Menyelaraskan siklus perencanaan lima tahunan (Renstra) SKPD dengan rencana tahunan SKPD.
3. Menyelaraskan perencanaan tahunan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan Visi dan misi Kepala Daerah

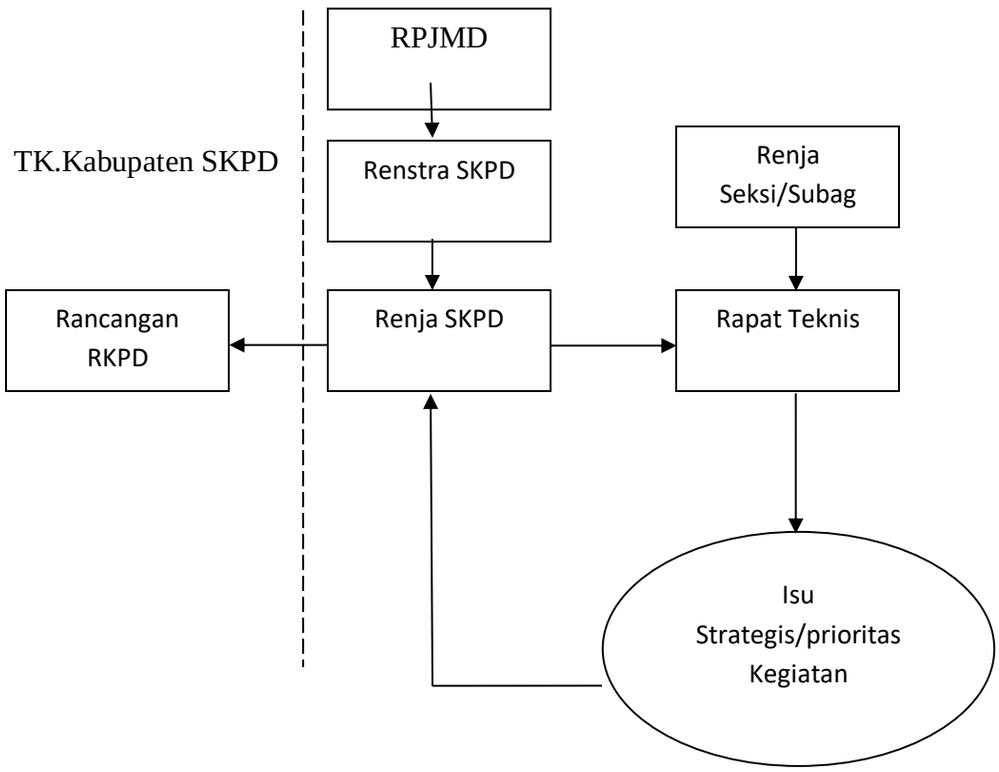

Gambar 0.1 PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2024 Kantor Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas tentang Latar belakang, pengertian ringkas tentang Rencana kerja SKPD, kedudukan renja SKPD dalam system perencanaan daerah, serta landasan yang mengatur tentang system perencanaan nasional

1.2 Landasan hukum

Merupakan landasan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan SKPD

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dari penyusunan Renja, serta tujuan yang ingin di capai dari tersusunnya rencana kerja SKPD tersebut.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan tentang isi bab per bab dalam menyusun Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN CIHAMPELAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cihampelas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cihampelas

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Cihampelas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

BAB III CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CIHAMPELAS

3.1. Penyerapan Realisasi Anggatan dan Evaluasi Kinerja

3.2. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cihampelas tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cihampelas

Rencana kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan diskenariokan dalam Renja.

Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas dasar dokumen diatas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya, (anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2023 lengkap dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cihampelas Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**NILAI SAKIP KEC. CIHAMPELAS**	**60 (BB)**	**2.984.143/150,-**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**64.554.000,-**
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Tersusunya Dokumen Perencanaan RKA 2023	1 Dokumen	2.600.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersusunya Dokumen Perencanaan RKA Perubahan 2023	1 Dokumen	2.600.000,-
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunya Dokumen Perencanaan DPA Tahun 2023	1 Dokumen	2.600.000,-
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersusunya Dokumen Perencanaan DPA Perubahan Tahun 2023	1 Dokumen	2.600.000,-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Dokumen Renstra Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.154.000,-
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai Non PNS Dalam Asuransi Kesehatan BPJS**	**12 Orang Non PNS**	**2.760.907.850**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpenuhi	100%	2.60.907.850,-
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**	**1 Unit Gedung Kantor**	**22.700.000,-**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	22.700.000,-
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kedisiplinan Aparatur Sesuai Dengan Ketentuan**	**70 Stel**	**125.920.400**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	70 Stel	713.400
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	11 Dok	61.872.600,-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	5 Dok	50.718.100,-
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	6 Dok	16.000.000,-
1	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaraan Tepat Waktu**	**5 Dok**	**10.060.900,-**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaraan Perangkat Daerah Tepat Waktu	5 Dok	2.600.000,-
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Ususlan DSP yang Masuk Ke RKPD**	**2 Kegiatan**	**514.921.400,-**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaraan Tepat Waktu**	**5 Dok**	**386.061.900,-**
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan oleh PKK	100%	386.061.900,-
2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yan Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**Terlaksananya Kegiatan TP PKK**	**19 Keg**	**18.848.500,-**
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan Sesuai SOP	100%	106.709.500
3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang DIlimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**12 Jenis Pelayanan**	**22.150.000,-**
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan	100%	287.779.400,-
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan.**	**2 Keg**	**287.779.400,-**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Bidang PMD.	2 Keg	24.300.000,-
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Bidang Trantib.	1 Keg	219.179.400,-
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring,	1 Keg	44.300.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Evaluasi Bidang PSU.		
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Bidang EP2D.**	**1 Keg**	**1.6228.300.000,-**
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Kegiatan KDH yang Terfasilitasi	100%	1.628.300.000,-
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	12 Keg	22.150.000,-
2	Fasilitasi Penyeenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			462.550.000,-
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			1.143.600.00

Tabel 2.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	KECAMATAN	**BB Nilai**	**Rp. 6.578.489.748**	APBD KABUPATEN BANDUNG BARAT		**100%**	**Rp. 6.578.489.748**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**		**100%**	**Rp. 15.600.000**			**100%**	**Rp. 15.600.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp. 2.600.000			2 Dokumen	Rp. 2.600.000

7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	Rp.	2.600.000			1 Dokumen	Rp. 2.600.000
7.01.01.2.01.0003	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	Rp.	2.600.000			1 Dokumen	Rp. 2.600.000
7.01.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			1 Dokumen	Rp.	2.600.000			1 Dokumen	Rp. 2.600.000
7.01.01.2.01.0005	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA			1 Dokumen	Rp.	2.600.000			1 Dokumen	Rp. 2.600.000
7.01.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	Rp.	2.600.000			1 Dokumen	Rp. 2.600.000

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**		**100%**	**Rp.** 3.812.535.963			**100 %**	**Rp.** 3.812.535.963
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang/Bulan	Rp. 3.812.535.963			16 Orang/Bulan	Rp. 3.812.535.963
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 Laporan	Rp. 9.000.000			18 Laporan	Rp. 9.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Dokumen	Rp. 6.000.000			12 Dokumen	Rp. 6.000.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**		**100%**	**Rp. 79.826.100**			**100%**	**Rp. 79.826.100**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		4 Paket	Rp. 3.873.000			4 Paket	Rp. 3.873.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pakai Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		3 Paket	Rp. 41.584.000			3 Paket	Rp. 41.584.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3 Paket	Rp. 14.868.500			3 Paket	Rp. 14.868.500
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48 Laoran	Rp. 19.500.000			48 Laoran	Rp. 19.500.000

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi**		**100%**	**Rp. 184.390.400**			**100%**	**Rp. 184.390.400**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp. 5.340.000			36 Laporan	Rp. 5.340.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**Rp. 25.691.285**			**100%**	**Rp. 25.691.285**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		2 Unit	Rp. 2.600.000			2 Unit	Rp. 2.600.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi		1 Unit	Rp. 23.0991.285			1 Unit	Rp. 23.0991.285
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**		**87.5 Nilai**	**Rp. 664.876.400**			**88**	**Rp. 664.876.400**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelayanan Pemerinatahan yang terverifikasi**		**100 %**	**Rp. 561.676.400**			**100 %**	**Rp. 561.676.400**

7.01.02.2.1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp.	16.944.000			1 Laporan	Rp.	16.944.000
7.01.02.2.1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Rp.	522.196.400			4 Dokumen	Rp.	522.196.400
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**			Rp.	30.000.000				Rp.	30.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		**5 Laporan**	Rp.	30.000.000			**5 Laporan**	Rp.	30.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi**	**100 %**	**Rp.**	**73.200.000**			**100 %**	**Rp.**	**73.200.000**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	2 Laporan	Rp.	73.200.000			2 Laporan	Rp.	73.200.000

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**				**Rp. 113.860.000**				**Rp. 113.860.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**Rp. 113.860.000**				**Rp. 113.860.000**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa			**5 lembaga kemasyarakatan**	Rp. 19.850.000			**5 lembaga kemasyarakatan**	Rp. 19.850.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			**2 Laporan**	Rp. 94.010.000			**2 Laporan**	Rp. 94.010.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM**	**% PERMASALAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERSELESAIKAN**		**100 %**	**Rp. 654.600.000**			100 %	**Rp. 654.600.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**100 %**	**Rp. 145.600.000**			**100 %**	**Rp. 145.600.000**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			**12 Laporan**	Rp. 639.600.000			**12 Laporan**	Rp. 639.600.000
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			**2 Laporan**	Rp. 15.000.000			**2 Laporan**	Rp. 15.000.000
7.01.06.2.01	**Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa**				Rp. 1.191.160.000				Rp. 1.191.160.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**2 Dokumen**	Rp. 1.191.160.000			**2 Dokumen**	Rp. 1.191.160.000
TOTAL					**Rp. 5.906.992.485**				**Rp. 5.906.992.485**

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cihampelas

Analisis menggambarkan tingkat efektifitas kinerja / pencapaian program melalui tingkat capaian indicator dengan membandingkan antara target dengan realisasi, sehingga dicapai prosentase capaian, analisis efektifitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara target dengan realisasi, selain itu analisis juga dilakukan terhadap perbedaan kinerja yang terjadi, termasuk penyebabnya untuk dicari solusi pemecahannya.

Analisa kinerja pelayanan sesuai dengan PP No 6 tahun 2008 adalah dengan cara membandingkan tingkat capaian kinerja dengan :

1. Target kinerja yang tertuang dalam rencana kerja
2. Realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya

Format pencapaian kinerja kantor kecamatan Cihampelas tahun 2023 dan 2022 sebagai mana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cihampelas

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun - n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Thn n-2 2023	Thn n-1 2024	Thn n (2025)	Thn n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			58,66 (CC)	60,00 (BB)	61,00 (B)	61,00 (B)	-	-	58 (CC)	58,50 (CC)	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap PATEN			87,25	87,50	88,00	88,86	85,80	-	86	66,50	
3	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %

Kesimpulan dari Tabel 2.2 Tentang Pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cihampelas dapat di diuraikan sebagai berikut :

a) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Tahun 2023 mencapai Nilai CC.
b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Tahun 2023 mencapai 85,80

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Cihampelas, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Cihampelas sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kantor Kecamatan Cihampelas pada tahun 2023 mencapai angka 93,18 % atau dengan kata lain cukup tinggi, hal ini diwujudkan dengan 2 indikator sebagai berikut :
    - Capaian > 100 % : sebanyak 0 indikator
    - Capaian 100 % : sebanyak 0 indikator
    - Capaian 99-100 % : 0 indikator
    - Capaian < 99 % : 2 indikator
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain masih tahap optimalisasi sarana dan prasarana kantor.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum optimalnya sistem pelayanan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah jumlah tenaga pegawai yang masih kurang disamping sarana kantor, dan peluang akan kebutuhan tersebut di atas dapat di usulkan/dipenuhi pada tahun berikutnya,

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja

yang di capai oleh Kantor Kecamatan Cihampelas, dengan arahan kepala SKPD terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatip yang di sediakan untuk Kantor Kecamatan Cihampelas berdasarkan rancangan awal.

BAB III

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CIHAMPELAS

3.1 Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja

Tujuan Pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan yakni, terdiri dari:

3.1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

3.1.2 Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan tentram dalam kerangka demokrasi

Pada Tahun 2024 di Kecamatan Cihampelas telah disusun rencana kerja dengan rincian 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan yang mempunyai Rata-Rata Capaian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

dengan indikator Nilai SAKIP KEC. Cihampelas mempunyai target nilai mutu 61 (B) dengan pagu indikatif Rp. 3.282.496.085,- ,dengan pagu realisasi Rp. 3.134.575.175,- atau 95,49%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi mempunyai target 100% dengan pagu Rp. 664.876.400,-, dengan pagu realisasi Rp. 583.000.800 atau 8 7 , 6 9 %.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan mempunyai target 100% dengan pagu Rp.113.860.000,- dengan pagu realisasi Rp. 113.560.000,- atau 99,74%.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

dengan indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi mempunyai target 100% dengan pagu Rp. 1.191.600.000,-, dengan pagu realisasi Rp. 1.177.600.000,- atau 98,86%.

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

dengan indikator Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi mempunyai target 100% dengan pagu Rp.654.600.000,- mempunyai nilai rata-rata capaian program 100,00% dengan pagu realisasi Rp. 654.600.000,- atau 100,00%.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja

dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi serta untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota. Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Kecamatan. Untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan IV serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Interval Realisasi Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	*Sangat tinggi*
2	76% ≤ 90%	*Tinggi*
3	66% ≤ 75%	*Sedang*
4	51% ≤ 65%	*Rendah*
5	≤ 50%	*Sangat Rendah*

3.2 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cihampelas

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada Triwulan 4 akhir Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

3.2.1 Capaian Kinerja

Rata-rata Kinerja keseluruhan Program Kecamatan Cihampelas disandingkan dengan Renja Perubahan Tahun 2024 adalah 95,88 % dengan kategori *Sangat Tinggi* pada akhir tahun

anggaran 2024.

3.2.2 Capaian Keuangan

Rata-rata Keuangan keseluruhan Program Kecamatan Cihampelas disandingkan dengan Renja Perubahan Tahun 2024 adalah 95,88 % dengan kategori *Sangat Tinggi* pada akhir tahun anggaran 2024.

Realisasi anggaran pada sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 5.663.335.975 (Lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

BAB IV

PENUTUP

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan lanjutan serta penambahan dari program sebelumnya. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam pelaksanaanya adalah bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan SKPD dilihat dari berbagai kepentingan yang terintegrasi, dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Adapun kemungkinan jika terdapat terdapat perubahan kebijakan program serta anggarannya pada masa tahun tersebut dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang menuntunnya dan di implementasikan pada penyusunan dokumen berikutnya.

Rencana kerja Kantor Kecamatan Cihampelas tahun 2024 ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, proporsional, partisipatif dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh stake horlder SKPD, dengan kaidah pada pelaksanaanya sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan/regulasi yang melandasi penyusunan suatu dokumen
2. Penyusunan dokumen selanjutnya berkewajiban menjaga konsistensi dengan penyusunan rancangan awal renja SKPD ini.

3. Penyesuaian/pergeseran jumlah anggaran hendaknya dikonsultasikan dan mendapat arahan dari TAPD Kabupaten Bandung Barat.

Kami yakin bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan pendapat diharapakan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua**.**

Cihampelas, 31 Desember 2024

CAMAT CIHAMPELAS

AGUS RUDIANTO, S.Sos

NIP. 19720809 199303 1 004

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN CIPONGKOR

TAHUN 2024

KECAMATAN CIPONGKOR
Jln.PLTA Saguling No 1 Cipongkor
Kabupaten Bandung Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini merupakan Implementasi Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja beserta Kelompok Sasarannya.

Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja Perubahan ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

Demikian semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja pemerintah daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Cipongkor, 05 September 2024
CAMAT CIPONGKOR

REGA WIGUNA,S.STP.,M.IP
NIP. 19811102 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I 1

PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BALAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II 10

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA **10**

KECAMATAN CIPONGKOR TAHUN SEBEUMNYA **10**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Capaian Kinerja 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyrakat (MUSRENBANG) 43

BAB III 79

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **79**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat 79

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandug Barat 80

3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cipongkor 82

BAB V 90

PENUTUP **90**

4.1 Catatan 90

4.3 Rencana Tindak Lanjut 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cipongkor Tahun 2021 12
Tabel 2.2.1 Nilai Unsur pelayanan SKM Kecamatan Cipongkor tahun 2021 22
Tabel 2.2.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cipongkor Tahun 2024 23
Tabel 2.2.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Cipongkor Tahun 2021 29
Tabel 2.2.3 Capaian Indokator Kinerja Sasaran Kecamatan Cipongkor Tahun 2021 33
Tabel 3.2.1 Telaahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandug Barat 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
Gambar 3.1.1 Tema RKP 2024 Prov.Jawa Barat 79
Gambar 3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Prov.Jawa Barat Tahun 2024 79
Gambar 3.1.3 Isu Strategis Prov.Jawa Barat Tahun 2024 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BALAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Secara sistematis, Renja Perubahan Kecamatan Cipongkor memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya. Dengan demikian, substansi yang dimuat dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesinambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, menjadi tolak ukur dan menjadi tantangan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Cipongkor Tahun 2024.

. Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cipongkor dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cipongkor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); dan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2020-2024;
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2003 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 27 Seri D.)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan Kecamatan Cipongkor disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Cipongkor dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta efisiensi terhadap program dan penganggaran

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Menjelaskan realisasi pencapaian sasaran pembangunan RENSTRA 2024-2026 dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja 2024 triwulan II yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Gambaran pelayanan Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat memuat penjelasan

tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat memuat penjelasan tentang identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap rancangan Perubahan RKPD.

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat memuat penjelasan tentang telaahan pada Rancangan Perubahan RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terahadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, perumusan isu strategis, strategi dan arah kebijakan serta tema pembangunan Bandung Barat Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 sebagai penjabaran Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Cipongkor

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan memuat penjelasan mengenai program-progam dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN CIPONGKOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahanpermasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Rencana Strategis Kecamatan Cipongkor Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Cipongkor dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD-Perubahan sebesar Rp. 5.272.418.257 (lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah),dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.079.833.544 (lima milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau persentase capaian realiasi anggaran 96,35%.

Kecamatan Cipongkor pada tahun anggaran 2024 memiliki pagu murni sebesar Rp. 5.671.998.239 (lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilah puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.2.727.876.606,atau persentase capaian realiasasi anggaran 48,09%.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cipongkor Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cipongkor Tahun 2024-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cipongkor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
(T-C.29) Rekapitulasi Evalauasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra S/D Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		ANGGARAN		
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran (Rp.)
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9 Stel	100 %	20.250.000	20.250.000	100 %
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**68.105.100**	**68.105.100**	**100 %**

	Penyediaan Komponen Instalasi					

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		ANGGARAN		
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran (Rp.)
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	100 %	38.587.000	38.587.000	100 %
5	Penyediaan Barang	3 Jenis	100 %	1.878.600	1.878.600	100 %

	Cetakan Dan					
No	**Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**KINERJA**		**ANGGARAN**		
		Target Capaian Kinerja	**Realisasi Capaian Kinerja (%)**	**Pagu (Rp.)**	**Realisasi (Rp)**	**Capaian Kinerja Anggaran (Rp.)**
3	Pemeliharaan Peralatan	6 Unit	100 %	4.300.000	4.300.000	100 %
1	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	100 %	2.000.000	2.000.000	100 %
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	3 Unit	100 %	11.580.000	11.580.000	100%

	dan Mesin Lainnya					
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**341.853.912**	**341.853.912**	**100 %**
6	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemrintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terfasilitasinya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**99.531.000**	**99.531.000**	**100 %**
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	100 %	99.531.000	99.531.000	100 %
7	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**Terpenuhinya Pelayanan Terpadu Kecamatan**	**100 %**	**211.935.412**	**211.935.412**	**100 %**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		ANGGARAN		
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran (Rp.)

1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Jenis Pelayanan	100 %	211.935.000	211.935.000	95,80 %
8	**Pelaksanaa Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**30.387.500**	**30.387.500**	**100 %**
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Kegiatan	100 %	30.387.500	30.387.500	100 %
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**	**100 %**	**1.226.163.804**	**1.226.163.804**	**100 %**
9	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**222.763.804**	**222.763.804**	**100 %**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		ANGGARAN		
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja

			Kinerja (%)			Anggaran (Rp.)
1	Peningkatan Partisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	2 Kegiatan	100 %	53.983.000	53.983.000	100 %
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	22 Kegiatan	100 %	162.780.804	162.780.804	100 %
10	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terfasiltasi Pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan**	100 %	**1.003.400.000**	**1.003.400.000**	100 %
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12 Kegiatan	100 %	1.003.400.000	1.003.400.000	100 %
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	100 %	**710.224.608**	**710.224.608**	100 %

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		ANGGARAN		
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja

			Kinerja (%)			Anggaran (Rp.)
11	**Koordinasi Penerapan Dan Penegakan peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terfasilitsinya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah**	100 %	**710.224.608**	**710.224.608**	100 %
1	Koordinasi/Sinegi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	100 %	710.224.608	710.224.608	100 %

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		ANGGARAN		
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja

			Kinerja (%)			Anggaran (Rp.)
E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 %	**42.640.000**	**42.640.000**	100 %
12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 %	**42.640.000**	**42.640.000**	100 %
1	Fasilitasi tata Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	100 %	25.810.000	25.810.000	100 %
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Kegiatann	100 %	16.830.000	16.830.000	100 %

2.2 Analisis Capaian Kinerja

Capain kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Berikut ini adalah capaian sasaran kinerja dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan :

1. Capaian Sasaran (S.1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Hasil survey IKM tahun 2021 yang dilaksanakan Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Kepmenpan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan kategori baik, dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi = 82.51

Untuk lebih jelasnya indeks kepuasan masyarakat untuk setiap unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Nilai Unsur pelayanan SKM Kecamatan Cipongkor tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan (U1)	3.24
2	Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)	3.26
3	Waktu pelaksanaan (U3)	3.22
4	Biaya / tariff (U4)	3.83
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	3.32
6	Kompetensi pelaksana (U6)	3.31
7	Perilaku pelaksana (U7)	3.33
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)	3,15
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3.04

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cipongkor tahun 2021

Untuk peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan :

A. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur Biaya/Tarif (U4) dan Perilaku Pelaksana (U7) dengan nilai masing-masing **3.83** dan **3.33**.

B. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur Sarana dan Prasarana (U9) dan Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan (U8) dengan nilai masing-masing **3.04** dan **3.15**.

Tujuan dari penentuan indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), adalah untuk mengukur tercapai tidaknya misi dan tujuan kecamatan Cipongkor yaitu Menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menghadirkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat.

Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan indicator Nilai IKM pada tahun 2020, terrealisasi nilai IKM sebesar 82,36 sementara capain sasaran kinerjanya adalah :

$$= \frac{\text{Realisasi IKM Tahun 2021}}{\text{Target IKM Tahun 2021}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{82{,}54}{82.50} \text{ X 100 \%}$$

$$= \mathbf{100{,}04\ \%}$$

Tabel 2.2.2
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan Cipongkor Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Capaian 2021			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKM	Angka	82,06	82,30	82,50	82,51	100,04	82,70	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Indikator IKM tahun 2021 adalah 82,51 dibanding target tahun 2021 yaitu 82,50 capaian kinerja

sasaran dengan indikator Kinerja IKM adalah 100,01% tampak ada kenaikan dibanding capaian IKM tahun 2020 yang mencapai 82,37, sebagai mana terlihat pada grafik dibawah ini :

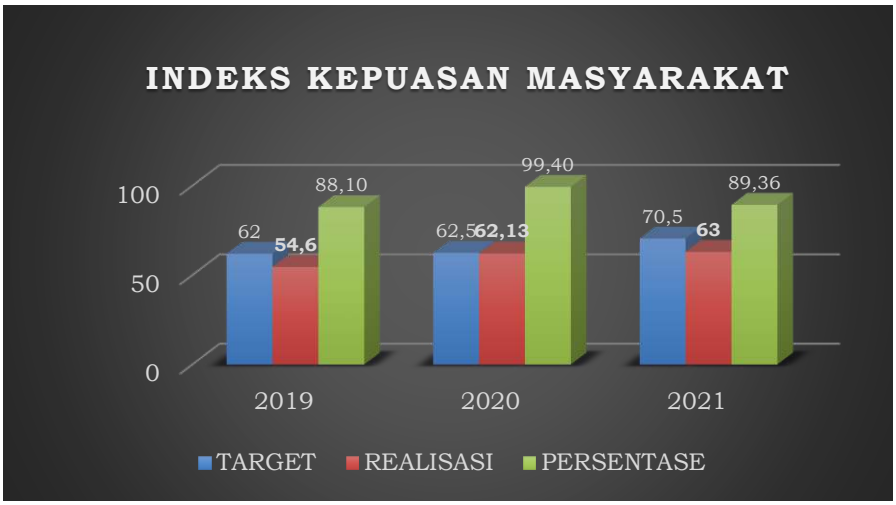

hal ini disebabkan karena Unsur Persyaratan (U1),Sistem,Mekanisme dan Prosedur (U2), unsur Biaya/tarif (U4) dan unsur Sarana dan Prasarana (U9) masih harus ditingkatkan. Keempat unsur pelayanan dimaksud diatas menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Unsur Persyaratan dilakukan sosialisasi agar terkait dengan Persyaratan dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa.
2. Untuk unsur Sistem,Mekanisme dan Prosedur perlu dilakukan sosialiasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada pegawai agar pelayanan dapat terselesaikan secara tepat waktu.
3. Untuk unsur biaya dan Tarif ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi yang menurun.
4. Untuk unsur Sarana dan Prasarana ini disebabkan oleh keterbatasan alat Solusi yang bisa dilakukan

adalah mengupgrade perlatan dan melakukan perbaikan.

Untuk unsur jenis pelayanan yang mempunyai nilai tertinggi yakni Waktu penyelesaian (U3),Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) dan Kompetensi Pelaksana (U6), nilainya sangat signifikan berpengaruh pada indek kepuasan masyarakat (IKM) secara keseluruhan, oleh karenanya perlu dipertahankan,bahkan semakin ditingkatkan.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang di tentukan

1. Tidak dikenakannya biaya/tarif dalam proses pelayanan, yang membuat masyarakat aman dan nyaman.
2. Perilaku Petugas memberikan pelayanan prima dengan semangat kerja menjungjung tinggi kesopanan dan keramahan kepada masyarakat disituasi pandemic Covid-19 Petugas memberikan arahan pelayanan agar di pahami oleh masyarakat yang diharuskan melalui *online*.

B. Faktor Penghambat / Permasalahan dalam pencapaian target

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dalam Jaringan internet atau koneksi internet yang sering terjadi gangguan sehingga sinyal jaringan tidak stabil.
2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yang seolah tidak ditindaklanjuti atau kurang mendapat respon. Solusi yang bisa dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana

sarana pengaduan baik itu berbentuk surat atau digital.

3. Waktu penyelesaian beberapa jenis pelayanan, terutama berkaitan dengan jenis pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK tidak bisa maksimal dikarenakan saat pandemic covid-19 persyaratan beralih dengan sistem online, maka dari itu masyarakat sedikit terkendala dengan ketidaktahuan soal teknologi online tersebut.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan sarana dan prasarana terutama memperbaiki jaringan internet, kendala tersebut memang hal yang tidak dapat diduga atau diprediksi dengan melakukan kualitas layanan yang optimal.Terkait kebijakan pelayanan dilakukan dengan system online para petugas terus mensosialisasikan kepada masyarakat tahapan yang harus dilaksanakan.

2. Menyediakan sarana pengaduan,masukan dan saran yang mudah di akses oleh masyarkat melalui hotline pengaduan dengan menyediakan admin nomor whatapps Petugas.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja dengan indicator kinerja niilai IKM tidak lepas dari strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung target kinerja yang telah ditetapkan, secara umum pencapain sasaran

kinerja ini ditopang oleh program dan kegiatan berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah an ditingkat Kecamatan.
   b. Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum

   Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terealisasinya program dan kegiatan menunjukkan bahwa indicator program dan kegiatan tercapai dengan capain kinerja anggaran rata-rata 100 %, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik efektif dalam mendukung peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Jika memperhatikan dengan target tahun 2021, masih ada tugas berat untuk meningkatkan nilai IKM dimaksud, dengan target nilai IKM 82,50 atau capaian kinerja 100.04%. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan lebih meningkatkan disiplin dan kualitas SDM pelayanan, peningkatan sarana prasarana pelayanan dan harus ada, meningkatkan kembali koordinasi dengan desa dan kabupaten terutama berkaitan dengan SOP pelayanan, sementara kepada masyarakat dapat diupayakan lagi sosialisasi berkaitan dengan kelengkapan persyaratan untuk tiap-tiap jenis pelayanan.

2. Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Kecamatan

Tujuan dari penentuan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas instansi kecamatan dengan Indikator Kinerja (Nilai SAKIP), adalah untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan pembangunan kecamatan

Cipongkor yaitu Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik baik dan akuntabel.

Capaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas instansi kecamatan dapat dilihat dengan nilai indicator kinerja (Nilai SAKIP) pada Tahun 2021 adalah sebesar 70.00 Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021}}{\text{Target Nilai SAKIP Tahun 2021}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{\text{B (63)}}{\text{BB (70,50)}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \text{89,36 \%}$$

Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas instansi Kecamatan Cipongkor Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Cipongkor Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Capaian 2021			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	%	Target	%
1	2		3	4	5	6		
Nilai SAKIP	Angka Mutu	54,60 (CC)	62,13 (B)	70,50 (BB)	63 (B)	89,36 %	80 (BB)	78,75%

Dari realisasi Nilai SAKIP tahun 2021 yaitu 63 (B) dari target BB (70,50), capain indikator sasaran kinerjanya 89,36%, dengan skala capaian kinerja termasuk kategori baik, ada peningkatan jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2020 sebesar

62,13 (kategori B) dari target 62,50 atau capaian sasaran kinerja 99,40% %, jadi ada peningktan sekitar 0,87 %.

Untuk mencapai target capaian sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas instansi kecamatan telah dilaksanakan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan dukungan program dan kegiatan dimaksud, diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran kinerja dengan terealisasinya output kegiatan yakni tersedinaya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah seperti dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),Dokumen Rencana dan Anggaran Perubahan (RKAP),Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang menjadi pedoman semua perangkat kecamatan dalam melaksnakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian selain daripada itu untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja ditunjang oleh kegiatan lain yakni kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,Administrasi Umum Perangkat Daerah,Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilihat dari anggaran program dan kegiatan sebesar Rp. 208.341.904,-dan terealisasi sebesar Rp. 208.341.904,- atau realisasi anggaran 100 %, hal ini membuktikan bahwa terealisasinya kinerja anggaran dapat meningkatkan Capaian nilai SAKIP kecamatan Cipongkor tahun 2021, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya capaian nilai SAKIP tahun 2021 dibanding Tahun 2020. Walaupun belum mencapai target tahun 2021 seperti yang diharapkan

Dari evaluasi pencapaian Nilai SAKIP tahun 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang di tentukan

1. Perencanaan target capaian Kinerja dan anggaran sesuai dengan relaisasi kinerja dan anggaran.
2. Perencanaan sesuai dengan Dokumen Perubahan RENSTRA 2019-2024.

B. Faktor Penghambat / Permasalahan dalam pencapaian target

Belum maksimalnya kinerja pegawai dan adanya kekosongan pada jabatan esselon IV sehingga kurang terjalinnya koordinasi.

C. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Evaluasi Kinerja Pegawai secara berkala.
2. Penentuan program dan kegiatan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung berdampak pada sasaran capain kinerja, dengan alokasi dana yang cukup.

3. Profesinalisme, kualitas dan kapabilitas SDM perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan semnagat kerja yang kolektif kolegial.
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kinerja disiapkan lebih baik lagi sehingga upaya pencapaian sararan kinerja dapat diwujudkan di akhir periode Renstra.
5. Dalam aspek pelaporan unsur-unsur penilaian SAKIP seperti adanya Renstra (Rencana Strategis lima tahunan), Penetapan Target indicator sasaran, Rencana Kerja (Renja), Penjanjian Kinerja (PK) baik Tingkat Esselon III maupun Tingkat esselon IV, Rencana Aksi dan laporan kinerja harus disiapkan lebih baik lagi terutamaberkaitan dengan akurasi data, keselaranan diantara setiap dokumen perencanaan, sistematika pelaporan maupun dari sisi kelengkapan berkas laporan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk capaian sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas instansi kecamatan, termasuk kategori baik, walaupun realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja perubahan tahun 2021 yaitu **B** oleh karenanya perlu dievaluasi lagi kenapa nilai SAKIP belum tercapai secara optimal.Terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja kecamatan Cipongkor tidak terlepas dari komitmen seluruh aparat kecamatan dari mulai Camat, Sekcam, para PPTK / Kasi dan Kasubbag dari setiap leading sector dan para pelaksana serta dukungan dari stake holder lainnya yang secara bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan tugas dan fungsi

kecamatan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel. Secara umum Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024.

Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Tahun 2018- 2024 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sebagai berikut : Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.3 Capaian Indokator Kinerja Sasaran Kecamatan Cipongkor Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan	Persentase Nilai SAKIP	Huruf	BB (70,50)	B (63)	89,36
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	82,51	100,4

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Cipongkor, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Cipongkor sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kantor Kecamatan Cipongkor pada tahun 2021 mencapai angka 96,58 % atau dengan

kata lain cukup tinggi, hal ini diwujudkan dengan 2 indikator sebagai berikut :

- Capaian > 100 %: sebanyak 0 indikator
- Capaian 100 % : sebanyak 0 indikator
- Capaian 99-100 % : 0 indikator
- Capaian < 99 % : 2 indikator

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain masih tahap optimalisasi sarana dan prasarana kantor.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum optimalnya sistem pelayanan.
4. Dampak Pandemi Covid-19
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah jumlah tenaga pegawai yang masih kurang disamping sarana kantor, dan peluang akan kebutuhan tersebut di atas dapat di usulkan/dipenuhi pada tahun berikutnya
6. Sedangkan isu-isu penting yang perlu di tindak lanjuti pada tahun mendatang adalah berupa:

- Belum optimalnya sarana Kantor yang memadai
- Penanggulangan dampak Covid - 19
- Rendahnya aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi
- Masih buruknya sarana perhubungan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Kantor Kecamatan Cipongkor, dengan arahan kepala SKPD terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatip yang di sediakan untuk Kantor Kecamatan Cipongkor berdasarkan rancangan awal.

Kalau kita lihat rancangan awal renja SKPD tahun 2024, disusun pada awal tahun 2024, dimana tahun tersebut adalah merupakan Tahun 4 dari masa pembangunan lima tahun yang ketiga di Kabupaten Bandung barat, dimana sistem perencanaan SKPD mengacu pada perubahan RPJMD 2019 -2024.

Berdasarkan Perubahan Renstra untuk masa tahun 2018-2024, maka program dan kegiatan yang di susun di awal 2024 untuk rencana tahun 2024 perlu menyesuaikan dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatip yang tertuang sebagaimana tercantum pada RPJMD 2019-2024, untuk itulah review terhadap rancangan awal RKPD dapat di jabarkan pada table berikut :

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proksiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proksiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**URUSAN KEWAJIBAN**														
7	01				**KECAMATAN**						**3,882,962,459**								**3,470,096,930**	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	NILAI SAKIP	Angka Mutu		Angka Mutu	BB Angka Mutu	**3,311,962,759**						BB Angka Mutu	**3,864,486,321**	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	**62,490,000**						6 Laporan	**13,028,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	52,480,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pemanfaatan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,880,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pemanfaatan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	1 Dokumen	3,120,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,430,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pemanfaatan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	1 Dokumen	1,560,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,430,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pemanfaatan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	1 Dokumen	1,560,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,430,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pemanfaatan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	1 Dokumen	1,560,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2,860,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pemanfaatan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	3 Laporan	3,120,000	Kecamatan Cipongkor

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	7 Dokumen 7 Laporan	**2,047,820,459**						7 Dokumen 7 Laporan	**2,816,644,800**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/Bulan	3,012,518,459	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	196 Orang/Bulan	2,768,644,800	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	34,510,350	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	7 Laporan	48,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pengadaan Jumlah Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Stel Bulan		Stel Bulan	24 Stel 12 Bulan	**73,563,750**						24 Stel 12 Bulan	**114,425,322**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	10,800,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	24 Paket	10,800,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	63,763,750	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	12 Dokumen	63,763,750	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran yang terpenuhi	Bulan		Bulan	12 Bulan	**68,780,600**						12 Bulan	**77,887,800**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	32,628,600	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	3 Paket	34,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 jenis	3,976,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	9 jenis	3,976,300	Kecamatan Cipongkor

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	32,880,100	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	29 Paket	29,720,800	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5,023,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	3 Paket	5,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan				11 Laporan	4,960,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	11 Laporan	5,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	**01**	**01**	2.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Kebersihan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	**34,080,000**						12 Bulan	**34,080,000**	
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cipongkor	12 Laporan	36,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		Unit	8 Unit	**22,220,000**						8 Unit	**22,888,608**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	20,800,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8 Unit	20,800,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1,420,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4 Unit	3,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%		%	100 %	**378,756,200**						100 %	**179,038,608**	

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Cipongkor Tahun 2023

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	**106,240,000**						3 Kegiatan	**106,240,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Laporan	106,240,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	3 Laporan	106,240,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**208,339,200**						12 Dokumen	**208**	
7	01	02	2.02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	208,339,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	12 Laporan	208	Kecamatan Cipongkor
7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Keg		Dokumen Keg	1 Dokumen 1 Keg	**14,900,000**						1 Dokumen 1 Keg	**14,900,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Laporan	14,900,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor	1 Laporan	14,900,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	**49,275,000**						8 Kegiatan	**14,890,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode (RPJMD)	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.04	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tertaut dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	49,275,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Pemerintah Desa Se-Kecamatan Cipongkor	6 Laporan	54,890,400	Kecamatan Cipongkor
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kemitraan kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%		%	100 %	**366,117,500**						100 %	**370,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	**366,117,500**						9 Kegiatan	**370,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	89,140,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan Cipongkor,Pemerintah Desa,Tim Penggerak PKK,Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Masyarakat	7 Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	87,152,500	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan Cipongkor,Pemerintah Desa,Tim Penggerak PKK,Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Masyarakat	2 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	189,825,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan Cipongkor,Pemerintah Desa,Tim Penggerak PKK,Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Masyarakat	6 Laporan	100,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%		%	100 %	**703,274,000**						100 %	**703,748,800**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode (RPJMD)	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Maju Renstra Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Laporan		Kegiatan Laporan	6 Kegiatan 6 Laporan	**39,174,000**						6 Kegiatan 6 Laporan	**39,648,800**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	19,640,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Instansi Vertikal terkait,Pemerintah Desa,Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	19,640,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	19,534,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Instansi Vertikal terkait,Pemerintah Desa,Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	20,800,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**664,100,000**						12 Dokumen	**664,100,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	664,100,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kecamatan Cipongkor	12 Laporan	664,100,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Penerapan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%		%	100 %	**1,123,765,000**						100 %	**1,115,648,800**	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	21 Dokumen	**1,123,765,000**						21 Dokumen	**1,115,648,800**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode (RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Laporan	18,000,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Aparatur Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	4 Laporan	20,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Laporan	62,000,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Aparatur Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	1 Laporan	65,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Laporan	48,050,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Aparatur Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	9 Laporan	50,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	06	2.01	07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Laporan	23,675,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Aparatur Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Cipongkor
7	01	06	2.01	12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Laporan	585,840,000	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government	Aparatur Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	12 Laporan	585,840,000	Kecamatan Cipongkor
												TOTAL	3,882,962,450						3,470,096,820	

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyrakat (MUSRENBANG)

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cipongkor telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Forum PD dan Musrenbang Kecamatan dengan menghasilkan usulan daftar skala prioritas pada tahun 2024 yang akan direalisasikan tahun 2024.

Usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang atau mitra terkait perencanan pembangunan di Kecamatan Cipongkor. Berikut Daftar usulan skala prioritas Kecamatan Cipongkor :

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan Jalan	1.Perlu segera direalisasikan Peningkatan Mutu Jalan dari jalan Tanah Merah Rabat Beton yang berlokasi Kp. Gading (Jalan TPU Pasirpogor) 2.Pembangunan Peningkatan Mutu Jalan ini selain menumbuhkan sinergi perekonomian Desa khususnya bidang pertanian,bidang prekonomian dan Bidang Pariwisata Desa juga merupakan aspek penataan lingkungan pedesaan	Kp. Gading (Jalan TPU Pasirpogor), Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Usulan telah diterima, agar dijadikan pertimbangan kembali pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Koefisien : 1 Paket Anggaran : 75000000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Usulan disetujui
2	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	"1. susah nya mencar lapangan pekerjaan sementara banyak angkatan kerja yang jadi pengangguran 2. mahalnya harga mesin cetak /printing untuk sablon digital sehingga selama ini menggunakan sablon manual yang haslnya jauh dari maksimal"	Kp. Sukawarna, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan Jalan	masih banyak jalan Desa yang belum memiliki saluran air yang baik, sehingga saat musim penghujan datang akan menimbulkan permasalahan, salah satunya jalan menjadi rusak karena tergerus air. maka diperlukan pembangunan Drainase jalan yang baik.	Kp. Bojonghaur RT 001 RW 003 Dusun 2, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : untuk ditindaklanjut Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Usulan disetujui
4	Kelautan dan Perikanan	#Musrenbang Bibit Perikanan	Kelompok Ternak Sari Mukti memerlukan bantuan dalam pengadaan bibit untuk peningkatan produksi peternakannya	Kelompok Ternak Sari Mukti, Kp. Bojongpari RT 003 RW 001 Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : untuk diproses lebih lanjut Koefisien : 1 Paket Anggaran : 35000000	Dinas Perikanan dan Peternakan	Usulan disetujui
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan TPT	Jalan sempit dan rusak akibat hujan deras, sehingga perlu di TPT agar jalan lebar karna jalan ini merupakan jalan penghubung antar dusun	Kp. Singadirya Rt 00 Rw 008 Sampai Kp. Cinumas Rt 02 Rw 08, Kab. Bandung Barat		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
6	Sekretariat Daerah	#Hibah Operasional Lembaga Keagamaan	Ponpes Darul Ikhlas memerlukan bantuan untuk pembangunan Pondok Putri	Ponpes Darul Ikhlas Kp. Balieur RT 003 RW 002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
7	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	be;um mendapatkan bantuan dan sedang membutuhkan bantuan untuk pengembangan kelompok	Kp. Cimarel RT 002 RW 004 Dusun 3, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	belum mendapatkan bantuan dari pihak manapun, sedang membutuhkan permodalan untuk memajukan kelompok	Kp. Cikadu RT 001 RW 006 Dusun 4, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : untuk diproses Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000	Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
9	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	sedang membutuhkan bantuan modal dan belum pernah mendapatkan bantuan	Kp. Cikadu RT 001 RW 007 Dusun 4, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
10	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kelompok UMKM Sabengket belum mendapatkan batuan dari manapun sehingga membutuhkan modal untuk pengembangan usaha	Kp. Cinumas RT 002 RW 008 Dusun 2, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan Jalan	Jalan merupakan akses utama bagi masyarakat namun banyak sekali jalan yang rusak sehingga perekonomian pun menjadi sangat terganggu karna banyak jalan yang berlubang, ada genangan air, sebagian bahu jalan habis terkikis air hujan	Kp. Bojong Loa RT 003 RW 003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Usulan telah diterima, agar dijadikan pertimbangan kembali pada tahap selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku Koefisien : 1 Paket Anggaran : 123244000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Usulan disetujui
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan Jalan	1 Jalan Rusak Berat 2 Bahu Jalan Sebagian Ruksak Tergerus Air 3 Jalan Berlubang dan Banyak Genangan	Kp Cibinong Rt 02/03 - Kp Cilimus Rt 03/01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Usulan telah diterima, agar dijadikan pertimbangan kembali pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Koefisien : 1 Paket Anggaran : 123244000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Usulan disetujui
13	Keuangan	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Saraya	Kecamatan Cipongkor Desa Mekarsari, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Mohon dilengkapi dengan DED, Back Up Volume, Dokumentasi Kerusakan, serta Output Pekerjaan. Mohon diperiksa kembali agar PPN sesuai dengan ketentuan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 3373976000	Dinas Sumber Daya Air	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
14	Keuangan	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Leuwi Gugur	Cakupan terdiri dari 15 Kecamatan : Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Mohon dilengkapi dengan DED, Back Up Volume, Dokumentasi Kerusakan, serta Output Pekerjaan. Mohon diperiksa kembali agar PPN sesuai dengan ketentuan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5177304000	Dinas Sumber Daya Air	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
15	Keuangan	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi permukaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat	tersebar di 11 Kecamatan : Cipatat, Ngamprah, Padalarang, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipongkor, Gununghalu, Rongga, Cihampelas, Sindangkerta dan Cisarua dan terdiri dari 43 Desa, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Mohon dilengkapi dengan RAB, DED, Back Up Volume, Dokumentasi Kerusakan, serta Output Pekerjaan untuk masing-masing daftar kegiatan Koefisien : 44 Paket Anggaran : 8482476000	Dinas Sumber Daya Air	Usulan disetujui
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#BKDes Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Bantuan Keuangan Pembangunan Sumur Bor Kp.Cipait RT.03/04	Kp.cipait RT.03/04, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : 1) Untuk meningkatkan akses air minum layak/aman; 2) Usulan diterima untuk dipertimbangkan pembiayaannya Koefisien : 1 Pekerjaan Anggaran : 75000000	Dinas Perumahan dan Permukiman	Usulan disetujui
17	Kesatuan Bangsa dan Politik	#Hibah Organisasi Kemasyarakatan	Bantuan Dana Hibah Pelatihan Kewirausahaan Santri di LKP3M Bandung Barat	Kp.Pasir Panjang RT.02/03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : untuk diproses Koefisien : 1 kali Anggaran : 100000000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Usulan disetujui
18	Sekretariat Daerah	#Hibah Lembaga Keagamaan	Diperlukan Pembangunan Gedung Yayasan Al Firdaus Bandung Barat	Kp.Lemah Neundeut RT.02/04, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 20000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
19	Sekretariat Daerah	#Hibah Lembaga Keagamaan	Diperlukan Rehab Masjid Nurul Iman	Kp.Bebedahan RT.02/01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan Jalan	Hotmix Jalan Desa - Peningkatan Rasio Jalan sangat dibutuhkan Panjang 400 m, Lebar 2,50 m	Kp. Pasar Jumat RW 07 - Kp. Cigalunggung, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Usulan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan ketentuan yang berlaku Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Usulan disetujui
21	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Aspirasi Masyarakat. BANTUAN MODAL 50 JUTA Rupiah 10 Kelompok UMKM "MOTEKAR BARANANGSIANG"Ketua NANI KURNIATI.	jalan cagak RT.004 RW.004 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 20000000	Dinas Sosial	Usulan disetujui
22	Pertanian	#Musrenbang Benih/Bibit Peternakan	Aspirasi Masyarakat: Bantuan Bibit Domba 25 ekor Kelompok Ternak Domba "MAKMUR". Kp.LOJI RT.006 RW.004.	KP.LOJI RT.006 RW.004 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : untuk diproses lebih lanjut Koefisien : 1 Paket Anggaran : 70000000	Dinas Perikanan dan Peternakan	Usulan disetujui
23	Sekretariat Daerah	#Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Bantuan Keuangan Renovasi dan Sarana Prasarana Masjid	Kp.Pasir Mindi RT.006 RW.007, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 20000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
24	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Pengajuan Untuk Bantuan Modal "Kelompok UMKM MOTEKAR" Rp. 50 Juta	Kp. Jalan Cagak Rt. 004 Rw. 004, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Musrenbang Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah	Pemberian Bantuan Alat Usaha Mesin Fotokopi dan Mesin Percetakan Sablon Untuk Kelompok Usaha Bersama Vimbi Bhakti Copy Center	Kp. Pasir Muncang RT.002/001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : bisa di proses selama sesuai dengan peraturan tentang hibah (catatan dalam hal ini pemohon bantuan adalah lembaga/kelompok nirlaba) Koefisien : 1 paket Anggaran : 70700000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Musrenbang Pembangunan TPT	karena sering terjadi hujan. posisi tanah terjadi longsor menutup badan jalan	Kp. Coblong RT.002 RW.007, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Usulan telah diterima, agar dijadikan pertimbangan kembali pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Koefisien : 1 Paket Anggaran : 160000000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Usulan disetujui
27	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	#Bankeu Sarana Prasarana Desa	Belum dibangunnya Rabat Jalan Lingkungan Kp. Jati RT.005/001	Kp. Jati RT.005/001, Kab. Bandung Barat		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
28	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Masji Darussalam	Kp. Pasir Huni RT.004/002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 20000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
29	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Masjid Al-Hidayah	Kp. Cikeueus RT.002/004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 20000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
30	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Pembangunan Mushola Nurul Ikhsan	Kp. Sindangpalah RT.006/001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
31	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Masjid Baeturohman	Kp. Bojong Menteng RT.002/006, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
32	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Masjid Al-Muna	Kp. Pasir Jengkol RT.003/009, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
33	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Mushola AL-Amanah	Kp. Pasir Huni RT.003/003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
34	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Masjid Sabilul Fitroh	Kp. Cipicung RT.004/009, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
35	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Mushola Al-Bidayah	Kp. Pasir Muncang RT.002/001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
36	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitasi Masjid Al-Muhajirin	Kp. Tipar RT.001/001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Untuk diproses Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui
37	Pertanian	#Musrenbang Benih/Bibit Peternakan	Dibutuhkannya bibit peternakan/pertanian	Desa Cijenuk, Kab. Bandung Barat		Dinas Perikanan dan Peternakan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
38	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	belum mempunyai tempat wudhu yang memadai dan kondisi bangunan masjid yang sudah tidak memadai	kp. cinangka Rt 03 rw 02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 363950000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
39	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	bangunan sudah tua sudah layak di perbaiki/renovasi/bangun	Kp. Pasir kolotok Rt 01 Rw 1p, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 402350000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
40	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Kekurangan Ruang Belajar	Kp. Cibangban RT. 003 RW. 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 574000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
41	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Tambahan Modal Usaha Warung Sembako ZAIN	Kp. Pasir Gombong RT 002 RW 006, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : dapat di akomodir Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 15000000	Dinas Sosial	Usulan disetujui
42	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Tambahan Modal Usaha "MADU USWAH HONEY"	Kp. Pasir Gombong RT 003 RW 006, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : dapat di akomodir Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 15000000	Dinas Sosial	Usulan disetujui
43	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rehabilitas Mesjid Al Isti'''''''la	Kp. Cibuni RT 002 RW 009, Kab. Bandung Barat		Sekretariat Daerah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
44	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Bantuan Modal Usaha "KERUPUK CIKUR"	Kp. Pangkalan RT 001 RW 005, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
45	Energi dan Sumber Daya Mineral	#HB Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki listrik	Jl. Sarongge-Sodong No 15 Kp. Bojonghaur RT 001 RW 003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 225 Satuan Sambungan Anggaran : 488000250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
46	Energi dan Sumber Daya Mineral	#HB Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Masih Banyak Warga Masyarakat Yang Belum Memasang Kwh Listrik	Jl Girimukti No 01 Rt 01 Rw 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 298 Satuan Sambungan Anggaran : 646329220	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
47	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	lembaga kami membutuhkan sarana belajar, karena sampai saat ini kami melakukan kegiatan belajar karna kurangnya gedung belajar kami melakukan 2 sift	Kp Pasir Panjang RT 002/003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
48	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	permohonan bantuan sarana belajar sekolah madrasah aliyah syarif hidayatulloh	kp pasir panjang rt 002 rw 003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
49	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	MDTA Al Hidayah belum memiliki ruang belajar sehingga proses pembelajaran kurnag efektif	Kp Cicariu RT 05 RW 06, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
50	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	belum mempunyai bangunan untuk kegiatan keagamaan	Kp. Cisaladak Rt 02 Rw 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 646262750	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
51	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	Kondisi masjid jami kami sangat membutuhkan bantuan untuk perbaikan, untuk sementara lokasi kegiatan sholat jum''at di pindahkan ke lokas lain, karena masjid kami sudah tidak layak untuk di pakai	Jl Desa Cintaasih RT 006 RW 001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
52	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	rusaknya bangunan masjid dan kurangnya sarana prasarana	Kp. Langgar Rt 02 Rw 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 613500000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
53	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	bangunan rusak. perlu dibangun/renovasi	Kp. Kaum Rt 02 Rw 04, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
54	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	bangunan sudah tidak layak. banyak kerusakan	Kp. Tegal Datar Rt 03 Rw 09, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 303000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
55	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kebutuhan modal keuangan untuk usaha kelompok usaha bersama warung klontongan	Jl. Raya Citalem No. 416, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
56	Sekretariat Daerah	#Hibah Lembaga Keagamaan	belum memadainya pondok asrama santri untuk Ponpes Alhusaeni Darul Muhajirin	Kp. Cibanteng Rt. 001/005, Kab. Bandung Barat		Sekretariat Daerah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
57	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Musrenbang Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah	kebutuhan modal usaha untuk para kelompok pelaku bidang usaha	Jl. Raya Citalem No. 416, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : bisa di proses selama sesuai dengan peraturan tentang hibah (dalam hal ini adalah pemohon bantuan merupakan lembaga nirlaba) Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui
58	Sosial	#Musrenbang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kebutuhan modal usaha dari kelompok usaha bersama	jl. Raya Citalem no.416, Kab. Bandung Barat		Dinas Sosial	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
59	Pertanian	#Musrenbang Benih/Bibit Peternakan	Kebutuhan bibit domba dari kelempok ternak	Jl. Raya Citalem no. 416, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Proposal agar dilengkapi, untuk diproses lebih lanjut Koefisien : 1 Paket Anggaran : 210000000	Dinas Perikanan dan Peternakan	Usulan disetujui
60	Sekretariat Daerah	#Musrenbang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	kebutuhan sarana prasarna lembaga keagamaan	jl. Raya Citalem No. 416, Kab. Bandung Barat		Sekretariat Daerah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
61	Sekretariat Daerah	#HB Renovasi Gedung/Bangunan Keagamaan	Perbaikan Ruang Belajar MI Joglo karena Ruang Belajar yang ada sudah tidak layak digunakan sehingga kegiatan belajar mengajar kurang efektif	Kp Joglo RT 03 RW 02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 499983000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
62	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	terbatasnya sarana ruang kelas demi lancarnya pembelajaran	Kp.Ciceuri Rt 02 Rw 07, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 600000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
63	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Madrasah kami kekurangan ruang kelas, kami memiliki 10 rombel namun baru 6 ruang kelas yang tersedia, kami sangat berharap ajuan ini dapat ter realisasi	Jl. Cijambe RT 02 RW 01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 450000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
64	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	rusaknya ruang kelas di lembaga kami	Kp. Ciselang Rt 02 Rw 09, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : termasuk indikasi kegiatan yang mendukung SPM Koefisien : 1 paket Anggaran : 300000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
65	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	terbatasnya sarana ruang kelas demi lancarnya pembelajaran	Kp.Pasirmindi Rt 06 Rw 07, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
66	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Kekurangan ruang kelas dan sarana prasarana di sekolah kami	kp pasir panjang RT 003 RW 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 560000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
67	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Kekurangan Ruang Kelas Baru untuk kegiatan belajar mengajar	Kp Pasar Joglo RT 03 RW 02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 600000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
68	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	kami kekurangan ruang belajar sehingga para siswa harus di 2 sift kan dan sampai sekarang berharap kepada bapak gubernur agar bisa direalisasikan	Kp Pasir Panjang RT 004/003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
69	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Kami sangat kekurangan ruang kelas untuk sarana belajar hingga saat ini kamimengalami pelaksanaan belajar 2 sift	Kp Pasir Panjang RT 004/003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
70	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Kami sangat kekurangan ruang kelas untuk sarana belajar hingga saat ini kamimengalami pelaksanaan belajar 2 sift	Kp Pasir Panjang RT 004/003,, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
71	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	belum memiliki kelas untuk kegiatan belajar mengajar	Kp Cimenet RT 02 RW 01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 170000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
72	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Sarana dan Prasarana yang sudah tidak layak	Kp. Cibolang RT. 004 RW. 001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 275602003	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
73	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	terbatasnya sarana ruang bangunan demi lancarnya kegiatan pembelajaran	Kp.Nangewer Rt 03 Rw 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
74	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	yang terjadi di pondok pesantren kami dengan kondisi jumlah santri yang semakin banyak namun kondisi bangunan sudah penuh dan mbeberapa asrama sudah tildak layak guna kami membutuhkan kondisi sarpras pembangunan sarana keagamaan	Kp Lembur sawah RT 001/004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
75	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	belum mempunyai asrama untuk para santri	Kp. Cijambe Rt 04 Rw 01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 372767000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
76	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	rusaknya sarana prasarana terutama asrama putra	Kp. sarongge rt 01 rw 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500019750	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
77	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti asrama. dll	Kp. Cipongkor Rt 01 Rw 06, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 372767000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
78	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Belum punya asrama ponpes	Kp. Bojong Sempur RT. 004 RW. 002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 512000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
79	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Kekurangan Ruang Belajar dan Ruang Pondok	Kp. Cibangban RT. 003 RW. 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 720000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
80	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Sarana dan Prasarana Yang Tidak Layak	Kp. Cibangban RT. 003 RW. 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 720000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
81	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	permasalahn yang terjadi kekurangan sarana untuk kegiatan santri di pondok pesantren	Kp Cidemang RT 01/04, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
82	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	kekurangan sarana dan sarana untuk kegiatna belajr mengaji di pesantren	KP. CINAGEN RT 05 RW 01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 383967000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
83	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Kami pengurus PONPES PUSAKA BARU dalam hal ini kami Memerlukan bantuan Dana untuk Renovasi /Membangun Asrama Putra yang saat ini kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan atau Tidak layak huni Oleh Para Santri. karna itu kami sangat membutuhkan batuan Dana dari Bapak/Ibu.	Kp. Joglo RT 001/RW 002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 425133000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
84	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Sarana & Prasarana Ponpes yang tidak memadai	Kp. Joglo RT. 001 RW. 002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 646263000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
85	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	kami sangat membutuhkan saran belajar gedung asrama dan aula untuk sarana belajar para santri terkhusus pondok/ asrama untuk santri laki-laki	Kp Cieja RT 001 RW 005, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
86	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	PEMBANGUNAN ASRAMA	Kp.ciporang rt 002/rw 005 desa neglasari kecamatan cipongkor, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
87	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	KEBUTUHANAN PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA SANTRI	KP. WARUNG RT.001/011, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 390210045	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
88	Sekretariat Daerah	#HB Renovasi Gedung/Bangunan Keagamaan	REnopasi Sarana Dan Prasarana Ponpes Darunnajah	Kp.Cigombong RT.02/06, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
89	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	belum mempunyai banguanan Asrama Putri	Kp. Rabian Rt 03 Rw 08, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 701381000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
90	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Minimnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kami, mengakibatkan kurang optimalnya proses belajar mengajar pada peserta didik	Kp. Cipancur RT.04 RW.06, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
91	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	USULAN BPMU SMA MUSLIMIN CIPONGKOR	Jl.PLTA Saguling Kp.Panyindangan RT.008 RW.003, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 83300000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
92	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	usulan bpmu	JL. PLTA SAGULING Kp. warung Tilu RT 06 RW 06 Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 88200000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
93	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	Proposal Calon Penerima BPMU 2024 - SMK AL FATIH CIPONGKOR	Dawuan Rt 003 Rw 005, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 58800000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
94	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	Proposal Calon Penerima BPMU | SMK Pembangunan Bandung Barat Tahun Anggaran 2024	Jl Rawatampele No 45 RT 01/05, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 42000000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
95	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Musrenbang Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan Mesin Sangrai Kopi 30 kg dan Alat Kelengkapan Warung Kopi KUPP Karang Taruna SERUMPUN	Kp. Cijambe RT 04 RW 09 Desa Cicangkanghilir, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : bisa di proses selama sesuai dengan peraturan tentang hibah (catatan dalam hal ini adalah pemohon harus kelompok/lembaga nirlaba) Koefisien : 1 paket Anggaran : 43150000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui
96	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Sarana dan Prasarana TPQ yang tidak memadai pembangunan belum selesai	Kp. Pasir Picis RT. 002 RW. 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 728380000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
97	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Sangat Membutuhkan RKB	Kp. Panyindangan RT. 002 RW. 002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 560000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
98	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Kurangya Sarana Prasarana penunjang pendidikann di pesantren	Kp sumurkembang rt 01 rw 07, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1664835000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
99	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	permohonan sarana gedung pembangunan keagamaan di lembaga kami yayasan al-wajid nurul khoir	kp.Pangkalan RT 01 RW 05, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : 1. Kegiatan perlu ditelaah lebih lanjut agar sinergi dengan program prioritas pembangunan daerah 2. Dipertimbangkan dengan catatan memenuhi kriteria pemberian hibah sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 Paket Anggaran : 293110000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
100	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	kekurang sarana dan prasarana di lembaga kami	kp. Warung Rt 01 Rw 11, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 390210045	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
101	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Permohonan bantuan sarana asrama pondok pesantren di bawah naungan lembaga kami yayasan alamiah indah bojongpari	Kp Bojongpari RT 002 RW 001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
102	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	kekurangan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan	Kp. Cikancana Rt 02 Rw 08, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 646562750	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
103	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Karena terbatasnya sarana ruang kobong pondok demi kelancaran kegiatan pembelajaran	Kp.Mariuk Rt 02 Rw 02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 418040000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
104	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	rusaknya sarana prasaran terutama gedung asrama santri	kp Kaum Rt. 02 rw. 04, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Pake Anggaran : 1299000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
105	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	Belum mempunya Kelas Untuk Proses Kegiatan belajar Mengajar	Kp. Pasir Gombong RT 02 RW 06, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 401488196	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
106	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	Pengajuan Proposal BPMU Tahun 2024	Jl. PLTA Saguling No. 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 32200000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
107	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	Asrama Pesantren dan Madrasah yang dimiliki Yayasan masih belum memadai dan dapat menampung jumlah ideal bagi Santri/ Santriwan yang mukim dan belajar di lingkungan Yayasan dan Pondok Pesantren.	Kp. Cidangdeur RT 02 RW 04 Desa Karanganyar Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk ke dalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1500000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
108	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	kekurangan gedung keagamaan di lembaga kami	Kp. Suramanggala Rt 08 Rw 01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 paket Anggaran : 760000854	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
109	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Belum memiliki Gedung/bangunan yang memadai untuk kegiatan keagamaan dan sosial	Kp Ciparay RT 002 RW 005, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 607564996	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
110	Sekretariat Daerah	#HB Renovasi Gedung/Bangunan Keagamaan	perbaikan sarana dan asrama laki-laki di pondok pesantren kami	kp lembur sawah RT 01 RW 04, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 892270000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
111	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Bangunan KBM Tidak Layak Pakai	Kupanenggang RT. 002 RW. 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 646262750	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
112	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Sarana & Prasarana Yayasan Belum selesai tidak layak pakai	Kp. Cikawung RT. 003 RW. 002, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 646262750	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
113	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	perbaikan sarana majlis ta''lim dan sarana asrama untuk para santriah	KP BUNDER RT 004 RW 004, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 646262750	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
114	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	Pengajuan Proposal BPMU SMK AZZAHRA Tahun 2024	Jl. Desa Karanganyar RT.05 RW.05, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung pencapaian indikator kinerja gubernur Koefisien : 1 tahun Anggaran : 65219000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
115	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	Permohonan Bantuan Menengah Universal	Kp Babakan Jempol RT 04/02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 130900000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
116	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Peningkatan sarana prasarana Gedung Serbaguna Yayasan Pendidikan Islam Daaru Syifa Cipongkor	Jl. PLTA Saguling RT. 002 RW. 001 Desa Cijambu, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 300000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
117	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	karena kurangnya sarana dan prasarana ruang kelas dalam menunjangnya pembelajaran	JL. PLTA SAGULING RT. 002 RW. 001, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
118	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	kekurangan ruang kelas belajar	Jl. Plta saguling no. 346, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diperhatikan dengan catatan sesuai dengan program prioritas pembangunan dan bersinergi dengan usulan kegiatan yang berkaitan Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 7005000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
119	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	kekurangan ruang kelas belajar sehingga kegiatan KBM dilakukan secara 2 shift	Jl. Plta saguling no. 346, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 705000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
120	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	kurangnya dana untuk hnor guru yang tidak di danai bos	Jl PLTA Saguling RT 04 RW 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 TAHUN Anggaran : 42000000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
121	Sekretariat Daerah	#HB Pesantren Juara (Sarana dan Prasarana Operasional Pesantren)	pembangunan Kobong/aula untuk santri karena sudah tidak layak huni dan kurangnya tempat untuk para santri	KP Cibalok RT 1 RW 4, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diterima, Dipertimbangkan prioritas ketercapaian target indikator pembangunan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 560000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
122	Sekretariat Daerah	#HB Masjid Juara	renovasi mejid Jami al Mashduqiyah Cibalok karena sudah tidak layak dan sempit untuk jema''ah	KP. CIBALOK RT 1 RW 4, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diterima, Dipertimbangkan prioritas ketercapaian target indikator pembangunan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 644390000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
123	Pertanian	#HB Ternak Domba/Kambing	PROPOSAL BANTUAN UNTUK PEMBERDAYAAN TERNAK DOMBA DI PESANTREN	KP CIBALOK RT 1 RW 4, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Disetujui, untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Usulan disetujui
124	Kelautan dan Perikanan	#HB Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung	PROPOSAL UNTUK BUDIDAYA IKAN LELE BIOFLOK KELOMPOK TANI MANDIRI	KP. CIBALOK RT 1 RW 4, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
125	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	belum mempunyai bangunan/gedung keagamaan di lembaga kami	Kp. Cibanas Rt 05 Rw 03, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 418108300	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
126	Sekretariat Daerah	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	belum mempunyai kantor/gedung di lembaga kami	kp. pasir muncang Rt 02 Rw 05, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Termasuk kedalam indikasi kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 600000000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Usulan disetujui
127	Pendidikan	#HB Bantuan Pendidikan Menengah Universal	Pembayaran Honor Pendidik dan Tendik	Jl. PLTA Saguling RT.04 RW. 01, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Merupakan prioritas bidang dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 49000000	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
128	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan	Pembangunan Gedung Yayasan Wahana Raksa Desa	Kp.Kebon Gelang RT.03/02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya JIKA bisa memperbaiki/melengkapi dokumen sebagaimana catatan rekomendasi Disperkim Jabar Koefisien : 1 pekerjaan Anggaran : 1	Dinas Perumahan dan Permukiman	Usulan disetujui

No	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Pagu Anggaran	OPD Tujuan	Status Usulan
129	Pariwisata	#Musrenbang Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif	Bantuan Dana Pelatihan Internet Marketing di Era Distrupsi Industri 4.0 Yayasan Wahana Raksa Desa	Kp.Kebon Gelang RT.03/02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : Usulan diproses sesuai ketentuan. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
130	Kesatuan Bangsa dan Politik	#Hibah Organisasi Kemasyarakatan	Bantuan Dana Pelatihan Wawasan Kebangsaan Dan Idiologi Panca Sila " Yayasan Wahana Raksa Desa "	Kp.Kebon Gelang RT.03/02, Kab. Bandung Barat	Rekomendasi : untuk diproses Koefisien : 1 kali Anggaran : 75000000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Usulan disetujui

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.1.1 Tema RKP 2024 Prov.Jawa Barat

Gambar 3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Prov.Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 3.1.3 Isu Strategis Prov.Jawa Barat Tahun 2024

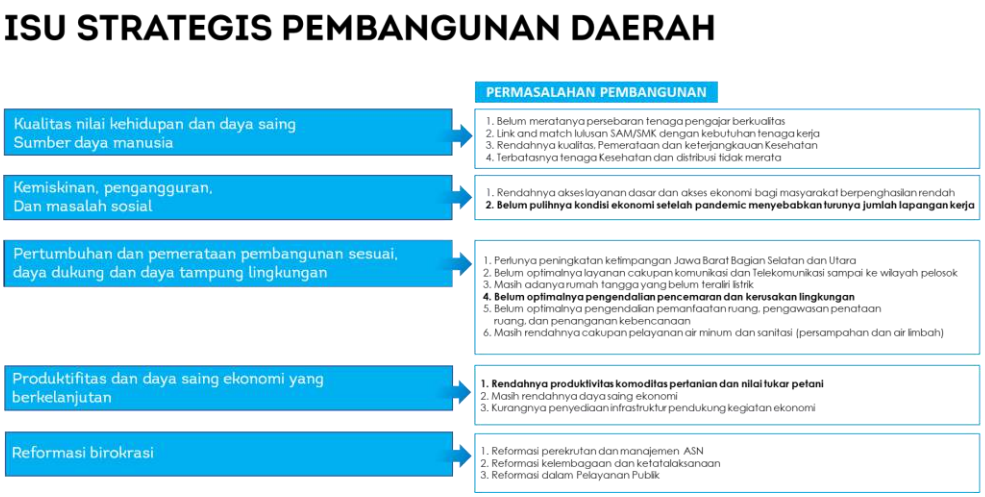

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandug Barat

Tabel 3.2.1 Telaahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandug Barat

VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis padapengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
Misi 4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi		
Tujuan 4.1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dengan indikator : a.Indeks Merit b.Nilai SAKIP c.Opini BPK d.Indeks SPBE	Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis padapengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
Misi 4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi		
			pembangunan serta monitoring dan pengendalian
Tujuan 4.2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	4.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator : a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring

VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis padapengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
Misi 4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi		
			dan pengendalian

3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cipongkor

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2024 dan tahun kedua pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2024. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bersumber dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
Mewujudkan tata keola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan tang bersih,akuntabel, efektif dan efesien	Nilai SAKIP KEC. Cipongkor	BB
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	100%
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	100%
Mewujudk an pelayanan publik yang berkualitas	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100%

Adapun Uraian Tujuan Sasaran Program Kecamatan Cipongkor adalah Sebagai Berikut :

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bandung Barat
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Cipongkor
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.19.3000 Kecamatan Cipongkor

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KECAMATAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP Kec. CIPONGKOR	BB Angka Mutu BB Angka Mutu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.080.800	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.060.800	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.620.800	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.600.800	
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.800	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.060.800	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen 7 Laporan	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/Bulan	3.812.519.839	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	54.510.900	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24 Set 12 Bulan	Pengelolaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Pakaian	10.080.800	
										Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Bulan	12 Bulan	0	
										Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	62.763.750	

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bandung Barat
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cipongkor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cipongkor

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran yang terjaminya	12 Bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	92,679,600	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 jenis	3,976,200	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Paket	22,860,100	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	5,423,700	
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	11 Laporan	4,840,000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Kebersihan Kantor	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36,000,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	20,800,000	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1,420,000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terkoordinasi	100 %	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	106,260,000	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Dokumen	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	208,335,000	
							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen 1 Keg	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sosial dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	14,900,000	

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bandung Barat
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cipongkor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cipongkor

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9 Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	49.275.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	100 %	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	89.140.000	
										Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	87.112.500	
										Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	109.875.000	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 Kegiatan 6 Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19.840.000	
										Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	19.844.800	
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Dokumen	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	864.100.000	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 Dokumen	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Laporan	18.900.000	
										Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Laporan	52.300.000	

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bandung Barat
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cipongkor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cipongkor

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Laporan	46,050,000	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	20,675,000	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Pemberdayaan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Pemberdayaan	12 Laporan	985,835,000	
												JUMLAH	**52,480,000**	

Kabupaten Bandung Barat .....

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Drs. Asep Wahyu,S.IP,MM

NIP. 196506191986101005

3.3.1Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah konsistensi dengan Renstra SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat.

Program dan Kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi SKPD, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di SKPD baik sumberdaya manusia, sarana, serta anggaran yang tersedia.

Program yang tersedia yaitu dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat, dan untuk Kecamatan terdiri dari 2 urusan yaitu :

A. NON URUSAN, terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. URUSAN KEWILAYAHAN

Terdiri dari 4 (dua) Program , yaitu:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V
PENUTUP

4.1 Catatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cipongkor berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan ditahun terakhir yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Cipongkor Tahun 2024-2026.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematik/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Beberapa bulan terakhir, pandemik Covid-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pandemik Covid-19 dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Pandemik Covid-19 ini juga menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban merasionalisasi dan merefocusing anggaran baik pada tahun berjalan (tahun 2022) maupun rasionalisasi pada perencanaan anggaran tahun 2024.

Pada Kecamatan Cipongkor beberapa kegiatan dikurangi karena adanya pengurangan pagu indikatif sebagai akibat Pandemik Covid-19 sehingga berpotensi mengganggu/mengurangi capaian target akhir renja.

Renja Kecamatan Cipongkor selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Cipongkor.

Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (feed back) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Kecamatan Cipongkor berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tuuan,sasaran,program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024 dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bandung Barat.
2. Kecamatan Cipongkor berkewajiban menyusun Recana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Cipongkor Tahun 2024 dengan berpedoman pada Renja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024.
3. Dalam Rangka meningkatakan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Cipongkor Tahun 2024,wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk dapat merealisasikan program dan keiatan yang telah ditetapkan dalam renja kecamatan Cipongkor tahun 2024 tentu juga dipengaruhi sumber pembiayaan/pendaan yang memadai serta kompetensi dan semangat serta tekad

kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat mencakup 1 (satu) Non Urusan yang terdiri 1 (Satu) Program,6 (Enam) Kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub kegiatan dengan besaran Anggaran Rp. 3,311,052,759,- dan 4 (Empat) urusan Kewilayahan yang terdiri dari 4 (Empat) Program,8 (Delapan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub-Kegiatan dengan besaran Anggaran Rp. 2.571.910.700,- sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cipongkor ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung Barat.

Cipongkor, Juli 2022
CAMAT CIPONGKOR

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CIPONGKOR

YAYAT RUHYAT, S.IP.M.Si
NIP. 196504091993031006

RENJA
PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dinas Arsip dan Perpustakaan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat dapat selesai.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam perumusan program, kegiatan, indikator, kinerja dan pagu indikatif. Perubahan Renja Tahun 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk 1 (satu) tahun ke depan, sehingga pencapaiannya dapat terukur untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya *(Good Governance)*.

Akhir kata, Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat ini sebagai dokumen perencanaan memerlukan komitmen dalam pelaksanaan kegiatannya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Bandung Barat, September 2024
Kepala Dinas
Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Bandung Barat

HERI PARTOMO, S.I.P
NIP. 19690514 198803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 43

3.3 Program dan Kegiatan 44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat	9
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat	21
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat	26
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung Barat	46
4.1	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Disarpus KBB Tahun 2024	19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang

merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat perubahan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Perubahan Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Penyusunan rancangan awal perubahan;
2. Penyusunan rancangan akhir perubahan;
3. Penyusunan rancangan;
4. Penetapan Perubahan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai 2025;
5. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Arsip;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bandung Barat No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007, tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat;
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Disarpus dimaksudkan sebagai berikut :

1. Pedoman perencanaan pembangunan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat sepanjang 1 (satu) tahun berjalan.
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (P-RKA) tahun 2024 bagi unit kerja di lingkup Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.
3. Pedoman bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan penyelesaian seluruh program dan kegiatan di Tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah :

1. Pedoman dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan.
2. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rencana kerja serta pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Untuk mencapai serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Disarpus yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Pada Tahun 2024 untuk urusan Kearsipan ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Perpustakaan ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, sekretariat masuk ke urusan Kearsipan ada 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 15 (limabelas) sub kegiatan yang terurai dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengkaji (*review*) pencapaian target Renstra Disarpus berdasarkan realisasi program dan kegiatan, serta faktor-faktor penyebab terhadap target kinerja program dan kegiatan, implikasi terhadap target capaian program Renstra dan kebijakan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sampai Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun berjalan 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun berjalan yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi	Tingkat Realisasi (%)	
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	%
			Target	Satuan		Target	Satuan		Target	Satuan		
1	2	3	4			5			6			7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEPUSTAKAAN											
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**52**	**Point**	**909.975.000**	**B**	**Predikat**	**6.963.295.600**			**823.742.000**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**0,82**	**%**	**605.000.000**	**1916**		**1.397.254.800**			**623.401.500**	
2.23.02.2. 01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Perpustakaan	50.000.000	5	Perpustakaan	416.475.500	3	Perpustakaan	144.342.400	

		Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya										
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada SatuanPendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8	Perpustakaan	75.000.000	43	Perpustakaan	566.630.800	4	Perpustakaan	143.280.500	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70	Orang	250.000.000	50	Orang	135.300.000	45	Orang	200.528.600	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang tercetak dan diadakan	100	Eksemplar	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	1500	Eksemplar	100.000.000	1818	Eksemplar	278.848.500	-	-	36.000.000	

2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah	2	Dokumen	100.000.000	-	-	-	2	Dokumen	99.250.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	**Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca dimasyarakat**	**3**	**Kegiatan**	**304.975.000**	**3**	**Kegiatan**	**5.566.040.800**	-	-	**200.340.500**	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2	Lokus	90.000.000	4	Lokus	704.880.600	1	Lokus	111.590.500	
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perpust akaan	50.000.000	64	Perpust akaan	4.861.160.200	-	-	-	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Secara tepat sasaran	3	Orang	39.975.000	-	-	-	1	Orang	7.300.000	

2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50	Perpustakaan	50.000.000	-	-	-	25	Perpustakaan	81.450.000	
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	32	Orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi SAKIP DISARPUS**	**67,00 / B**	**Nilai Mutu**	**6.476.512.065**	**70,25 /BB**	**Nilai Mutu**	**5.047.699.037**	**-**	**-**	**-**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9**	**Dokumen**	**80.588.000**	**5**	**Dokumen**	**4.917.000**	**-**	**-**	**-**	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	42.588.000	1	Dokumen	99.616.100	-	-	-	
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	1.797.500	-	-	-	

2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	1.794.000	-	-	-	
2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	2.401.500	-	-	-	
2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	1.426.500	-	-	--	
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	4.000.000	3	Laporan	3.503.000	-	-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**%**	**4.964.120.365**	**100**	**%**	**4.036.899.437**	-	-	-	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	20	Orang/Bulan	4.962.120.365	20	Orang/Bulan	3.810.001.494	18	Orang/Bulan	2.336.545.186	

2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	1.751.500	-	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2.24.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	156	Unit	70.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20	Paket	10.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.24.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	156	Orang	35.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000	4	Paket	10.043.800	-	-	-	
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Paket	318.856.000	5	Paket	19.850.000	-	-	-	
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	7	Paket	10.522.600	1	Paket	11.886.100	
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	30	Paket	66.192.800	1	Paket	41.308.100	

2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	20.000.000	10	Paket	73.323.100	2	Paket	11.460.000	
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	12.000.000	1	Dokumen	9.840.000	1	Dokumen	3.500.000	
2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
2.24.01.2.09.0008	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	26	Unit	78.500.000	5	Unit	10.608.000	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12	Laporan	25.000.000	26	Laporan	676.840.800	6	Laporan	334.838.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	12	Unit	50.000.000	12	Unit	39.033.000	-	-	-	

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya										
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	60.000.000	6	Unit	26.595.900	-	-	-	
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	60.000.000	3	Unit	188.801.234	-	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku**										
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2350	Berkas	84.282.500	3	Berkas	33.760.000	500	Berkas	4.030.000	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan	1907	Berkas	61.914.000	3	Berkas	126.700.000	955	Berkas	412.106.000	

		Pemeliharaan dan Penyusutan										
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Laporan	113.651.800	-	-	-	22	Laporan	43.386.000	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2	Arsip	73.285.000	10	Arsip	156.900.000	-	-	910.000	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	-	-	1	Pengguna	606.531.600	-	-	-	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5	Laporan	84,474,000	-	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Disarpus pada saat ini adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Barat No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Disarpus mempunyai tugas membantu Bupati Bandung Barat melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Disarpus menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang Perpustakaan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Disarpus terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Kearsipan;
d. Bidang Perpustakaan;

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disarpus KBB Tahun 2024

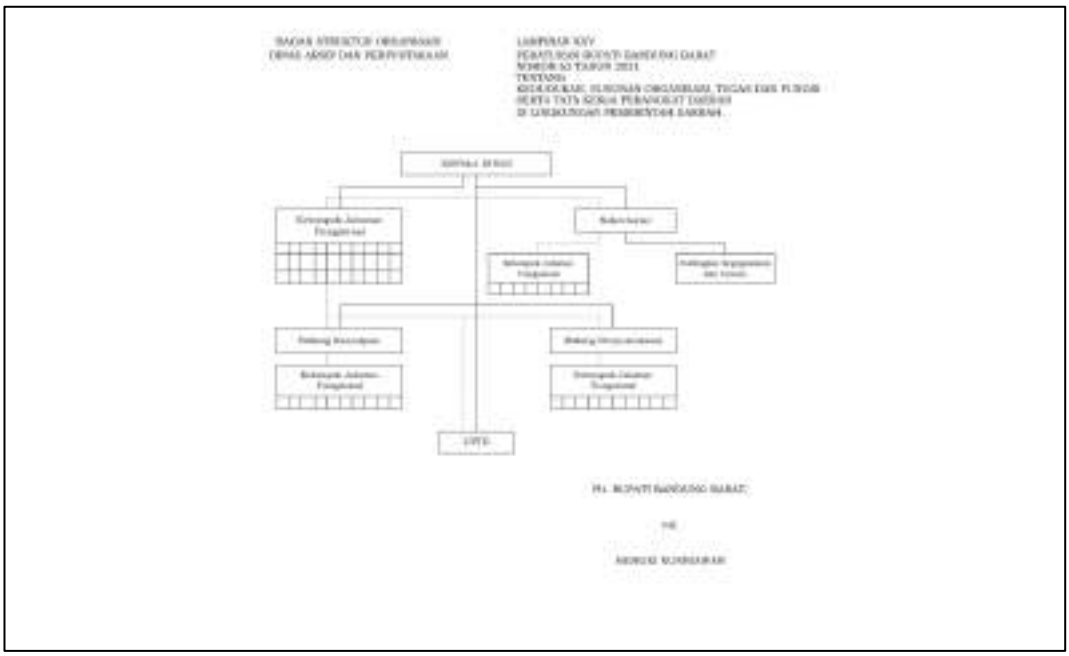

Sumber: Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Sumber Daya Manusia Disarpus Tahun 2024 terdiri dari 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 132 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mekanisme pelaksanaan

perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif *participatory planning*, bahwa perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup *long life education* menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan dan pembangunan kearsipan modern yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan kearsipan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Bandung Barat

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Sakip	-	-	A	67/B	68,87 / B	70,25 / BB	64,60/B	N/A	-	-	-
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-	-	32.400	-	-	-	68.528	N/A	-	-	-
3	Indek SPBE	-	-	3,00	-	-	-	3,32	N/A	-	-	-
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	-	-	73,15	73,20	73,30	73,10	N/A	-	-	-
5	Indeks Kearsipan	-	-	-	57,94	60,59	63,66	49,64	N/A	-	-	-

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disarpus:

1. Tingkat kinerja Disarpus di Bidang Perpustakaan dalam hal pelayanan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling (pusling) terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung dan bertambahnya jumlah koleksi bahan pustaka. Perpustakaan juga proaktif dalam membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial melalui kegiatan pelatihan, lomba *story telling* dan pemilihan Duta Baca. Sedangkan di Bidang Kearsipan pengelolaan arsip menunjukkan data yang baik dalam hal manajemen arsip yang ada meskipun persentase cakupan arsip statis dan dinamis yang sudah dikelola masih relatif rendah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungi Disarpus antara lain:
    a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelayanan Arsip dan Perpustakaan;
    b. Budaya membaca yang rendah karena minat baca masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang masih kurang;
    c. Pustakawan yang belum memenuhi kebutuhan Disarpus;
    d. Sadar Arsip di setiap Perangkat Daerah yang belum optimal;
    e. Arsiparis yang belum memenuhi kebutuhan setiap Perangkat Daerah.
3. Dampak dari isu-isu strategis tersebut yaitu:
    a. Masyarakat atau sumber daya manusia yang memiliki minat baca akan berpengaruh terhadap kualitasnya karena

belum mempunyai sarana dan prasarana pembelajaran representatif yang berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup sehingga belum terciptanya budaya membaca.

b. Belum terkelolanya arsip secara baku dan sistematis sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, karena ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, juga merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dampak terhadap capaian program nasional adalah perpustakaan harus mampu membuka dan menyediakan akses publik, penyedia sumber informasi,, penyediaan hasil penelitian, penyediaan ruang inklusif, penyediaan staf yang berdedikasi, pemerataan akses informasi, dokumentasi dan pelestarian budaya serta memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi lebih kepada sarana pembelajaran sepanjang hayat serta pemberdayaan masyarakat. Tak lain semua itu untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, perpustakaan mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan menerima perubahan, menawarkan kesempatan berusaha, melindungi serta memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan akhir yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disarpus.
   a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Perpustakaan adalah Perpustakaan harus dapat memenuhi kebutuhan bahan bacaan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dengan menyediakan sumber-sumber bahan bacaan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dalam mewujudkan Perpustakaan Digital. Sedangkan tantangan di bidang Kearsipan adalah adanya paradigma yang salah tentang arsip yang dianggap tidak penting atau sebagai limbah sehingga tidak dikelola secara khusus. Sebenarnya arsip mempunyai arti yang sangat penting dalam tata pemerintahan, karena arsip merupakan bahan bukti resmi pertanggung-jawaban pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kebangsaan, yang harus dipelihara dan diselamatkan. Untuk itu perlu diciptakan suatu sistem kearsipan yang efektif dan efisien baik secara manual maupun digital dalam mewujudkan Arsip Digital sehingga mengarah pada optimalisasi peran dan fungsi arsip sebagai sumber informasi bagi manajemen pemerintah serta pengambilan keputusan.
   b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Disarpus antara lain adanya: *political will* dari pusat tentang Arsip dan Perpustakaan, otonomi daerah sehingga Disarpus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, landasan hukum tentang kearsipan dan perpustakaan, lembaga Arsip dan Perpustakaan, serta SDM/Tenaga Teknis Profesional Kearsipan dan Perpustakaan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain:
   a. Pengajuan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang berasal dari sumber dana APBD, bantuan provinsi atau pusat.
   b. Pemenuhan tenaga arsiparis dan pustakawan baik secara pembinaan atau rekrutmen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Review dilakukan dengan membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis kebutuhan berdasarkan program, kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan anggarannya. RKPD merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Sedangkan hasil analisis kebutuhan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menemukan kemungkinan adanya perbedaan dalam perencanaan program, kegiatan dan anggarannya sehingga akan berpengaruh kepada target capaian. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bandung Barat

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	Program Pembinaan Perpustakaan		**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca**	**52 (sedang)**	**Point**	**1.000.780.200**	**Program Pembinaan Perpustakaan**		**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca**	**52 (sedang)**	**Point**	**1.000.780.200**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**0,82**	**Persen**	**658.675.400**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**0,82**	**Persen**	**658.675.400**	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	Perpustakaan	75.382.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	Perpustakaan	75.382.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan	Kab. Bandung Barat,	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8	Perpustakaan	85.060.500	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan	8	Perpustakaan	85.060.500	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	Standar Nasional Perpustakaan						Standar Nasional Perpustakaan		Standar Nasional Perpustakaan				
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70	Orang	202.897.200	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70	Orang	202.897.200	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	100	Eksemplar	9.440.700	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	100	Eksemplar	9.440.700	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung Barat	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500	Eksemplar	172.776.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500	Eksemplar	172.776.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung Barat	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	113.119.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	113.119.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah		**Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca dimasyarakat**	**3**	**Kegiatan**	**342.526.000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah**		**Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca dimasyarakat**	**3**	**Kegiatan**	**342.526.000**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab. Bandung Barat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2	Lokus	125.031.500	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2	Lokus	125.031.500	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perpustakaan	49.845.600	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perpustakaan	49.845.600	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Bandung Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	Orang	27.200.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	Orang	27.200.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50	Perpustakaan	88.860.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50	Perpustakaan	88.860.000	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	32	Orang	51.167.700	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	32	Orang	51.167.700	
	Program Pengelolaan Arsip		**Nilai pengawasan kearsipan eksternal**	**63,24**	**%**	**349.211.800**	**Program Pengelolaan Arsip**		**Nilai pengawasan kearsipan eksternal**	**63,24**	**%**	**349.211.800**	
			Nilai pengawasan kearsipan iksternal	**50,21**	**%**				**Nilai pengawasan kearsipan iksternal**	**50,21**	**%**		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan**	**47**	**PD**	**302.175.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan**	**47**	**PD**	**302.175.000**	
			Persentase kinerja pengelolaan arsip dinamis pada lembaga kearsipan daerah	**58,95**	**%**				**Persentase kinerja pengelolaan arsip dinamis pada lembaga kearsipan daerah**	**58,95**	**%**		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Bandung Barat	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2350	Berkas	70.137.000		Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2350	Berkas	70.137.000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Bandung Barat	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1907	Berkas	165.193.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1907	Berkas	165.193.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Laporan	66.845.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Laporan	66.845.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kinerja pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah**	**45,81**	**%**	**47.036.800**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kinerja pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah**	**45,81**	**%**	**47.036.800**	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Bandung Barat	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2	Arsip	47.036.800	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Bandung Barat, Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2	Arsip	47.036.800	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai Evaluasi SAKIP Disarpus**	**67,00 / B**	**Nilai Mutu**	**5.312.123.965**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai Evaluasi SAKIP Disarpus**	**67,00 / B**	**Nilai Mutu**	**6.025.071.565**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**Dokumen**	**4.429.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9**	**Dokumen**	**9.731.600**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpusta kaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1.349.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustaka an	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1.349.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
			Dokumen RKA-SKPD						Dokumen RKA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.453.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.349.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.453.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.453.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	Laporan	1.627.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3	Laporan	1.627.600	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	2.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**4.964.149.865**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**4.964.149.865**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/bulan	4.962.120.365	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/bulan	4.962.120.365	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.029.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.029.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**63.851.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase terpenuhinya administrasi umum**	**100**	**Persen**	**541.118.700**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
									Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Paket	477.267.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	14.998.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	14.998.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.297.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.297.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	10.155.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	10.155.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	8.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	8.400.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**--**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**1**	**Paket**	**80.352.000**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
									Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	Pengadaan Mebel	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	80.352.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Laporan**	**258.993.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Laporan**	**258.993.400**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	258.993.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	258.993.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**18**	**Unit**	**20.700.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**21**	**Unit**	**170.726.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	10.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	10.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	9	10		6	7	8	9	10		11	12
	atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	10.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	10.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	150.026.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil pelaksanaan dari forum Musrenbang tingkat Desa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan tahunan di tingkat desa dengan membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari Musrenbang Desa yaitu penetapan usulan prioritas program kemudian dibahas lebih lanjut pada forum Musrenbang tingkat Kecamatan. Hasil penetapan usulan program ditingkat Kecamatan selanjutnya dibahas dan di verifikasi pada forum PD sesuai rancangan Renja PD yang masing-masing sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN. Hasil dari kesepakatan forum PD tersebut selanjutnya dibawa ke forum Musrenbang tingkat Kabupaten untuk disepakati, kemudian ditetapkan berupa RKPD. Tahun 2024 program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tidak termasuk kedalam kamus usulan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas rencana pembangunan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L)dan Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sangat penting. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat arah kebijakan nasional secara tahunan. RKP Tahun 2024 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural akan melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional antara lain: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; **(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;** (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; **(7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi: (1) Industri; (2) Pariwisata; (3) Ketahanan Pangan; (4) UMKM; (5) Infrastruktur; (6)Transformasi Digital; (7) Pembangunan Rendah Karbon; (8) Reformasi Kesehatan; (9) Reformasi Perlindungan Sosial; serta (10) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.

RKP 2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L 2024 dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 untuk disinergikan dengan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, secara substantif bidang Kearsipan merupakan bagian dari agenda ke-4 (empat) dan ke-7 (tujuh), yaitu **"Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan"** serta **"Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik"**. sedangkan yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu **"Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan"**. Arah kebijakan dan strategi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bidang kearsipan dirumuskan atas dasar urgensi kearsipan bagi pembangunan bangsa dan negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan pokok perlunya kearsipan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Kebutuhan Praktis Administrasi dan Manajemen Dalam kontek pemenuhan kebutuhan praktis administrasi dan manajemen nasional, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
   a. menjamin tersedianya arsip yang reliabel, autentik, lengkap dan dapat digunakan sepanjang dibutuhkan, melalui proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem kearsipan nasional;
   b. menyediakan sistem kearsipan yang andal baik untuk arsip analog maupun digital yang digunakan oleh K/L/D;
   c. membantu K/L/D dalam mengelola arsip untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, proteksi/mitigasi/sengketa hukum, dan kebutuhan lainnya.
2. Kebutuhan Kesinambungan Ilmu Pengetahuan Dalam kontek pemenuhan kebutuhan menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
   a. menjamin arsip hasil kinerja K/L/D dan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan dapat terkelola dan tersedia dalam mekanisme yang ideal untuk proses manajemen pengetahuan di K/L/D;
   b. menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi;
   c. menjamin terwujudnya pusat referensi dan rujukan nasional untuk memperpanjang ingatan masyarakat dan mencegah munculnya gejala bangsa pelupa.
3. Kebutuhan Pemajuan Kebudayaan Dalam kontek pemenuhan kebutuhan pemajuan kebudayaan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:

a. menyelamatan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif, jati diri dan identitas bangsa, serta menjaga arsip untuk kepentingan keberadaan dan keutuhan wilayah NKRI;
b. mendiseminasikan informasi arsip kepada masyarakat agar memiliki rasa sejarah dan budaya Indonesia;
c. mempersiapkan arsip sebagai bahan dan sumber diplomasi internasional di bidang budaya.

Adapun arah kebijakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:
   a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
   b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi , penguatan *influencer* literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta *public figure*;
   c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;

d. Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.

2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:
   a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir;
   b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:
   a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;
   b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
   c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;
   d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Telaahan kebijakan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi Disarpus Kabupaten Bandung Barat sejalan dengan arah kebijakan ANRI dan Perpusnas sebagai berikut:

1. Bidang Kearsipan dalam proses mengarah pada sistem kearsipan yang andal baik untuk arsip analog maupun digital. Dimasa pandemi Covid-19 ini bidang Kearsipan akan melakukan pengelolaan arsip secara digital (*e-arsip*) yaitu

diawali pemilahan arsip aktif dan in-aktif secara digital dari setiap PD. Kegiatan tersebut memerlukan keputusan dari Kepala Daerah untuk mewajibkan setiap PD menerapkan *e-arsip* baik sarana dan prasarana maupun arsiparis sebagai penunjangnya.

2. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca dilakukan oleh bidang Perpustakaan melalui penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling dan motor perpustakaan keliling.
3. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui pemilihan duta baca.
4. Bidang Perpustakaan melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;
5. Dimasa pandemi Covid-19 bidang Perpustakaan akan melakukan penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional. Bidang Perpustakaan akan menerapkan sistem *e-book*. *E-book* merupakan buku cetak yang dikonversikan ke dalam bentuk eletronik yang dapat dibaca menggunakan perangkat genggam dan komputer, sehingga aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan mulai beralih ke perpustakaan digital karena mudah diakses juga tidak membatasi ruang dan waktu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mengarahkan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Disarpus. Untuk mendukung upaya tersebut perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

- Perumusan Tujuan
  1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
  2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
- Perumusan Sasaran
  1. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
  2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan dirancang untuk pencapaian tujuan dengan target dan indikator yang disesuaikan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan, antara lain:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
   a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Program Pengelolaan Arsip
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Namun pagu indikatif belum mendukung kebutuhan pelaksanaan seluruh kegiatan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bandung Barat

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan**		**B**	**5.450.000.000**				**4.800.000.000**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**3.850.000.000**				**3.050.000.000**
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Perpustakaan	350.000.000	APBD	-	5 Perpustakaan	500.000.000
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perpustakaan	300.000.000	APBD	-	25 Perpustakaan	350.000.000
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	600.000.000	APBD	-	200 Orang	700.000.000
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Eks	1.000.000.000	APBD	-	4000 Eks	1.500.000.000

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1.600.000.000**				**1.750.000.000**
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Lokus	1.000.000.000	APBD	-	8 Lokus	1.100.000.000
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	600.000.000	APBD	-	12 Orang	650.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi SAKIP DISARPUS**		**A**	**5.887.000.000**			**A**	**6.582.000.000**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**123.000.000**				**149.000.000**
	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	110.000.000	APBD	-	1 Dokumen	120.000.000
	2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	5.000.000
	2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	5.000.000
	2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	3.000.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	5.000.000
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Laporan	4.000.000	APBD	-	3 Laporan	8.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.602.000.000**				**4.803.000.000**
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 tahun	4.600.000.000	APBD	-	1 tahun	4.800.000.000
	2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 dokumen	2.000.000	APBD	-	1 dokumen	3.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**152.000.000**				**180.000.000**
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4 Paket	15.000.000	APBD	-	4 Paket	20.000.000
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10 Paket	40.000.000	APBD	-	10 Paket	45.000.000
	2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	7 Paket	15.000.000	APBD	-	7 Paket	20.000.000
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	30 Paket	50.000.000	APBD	-	30 Paket	55.000.000
	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10 Paket	20.000.000	APBD	-	10 Paket	25.000.000

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	12.000.000	APBD	-	1 Dokumen	15.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**700.000.000**				**800.000.000**
	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	26 Laporan	700.000.000	APBD	-	26 Laporan	800.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**310.000.000**				**350.000.000**
	2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Jenis	50.000.000	APBD	-	12 Jenis	55.000.000
	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6 Jenis	40.000.000	APBD	-	6 Jenis	45.000.000
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Unit	220.000.000	APBD	-	3 Unit	250.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Nilai pengawasan kearsipan eksternal**		**63,24**				**66,67**	**115.000.000**
			Nilai pengawasan kearsipan internal		**50,21**	**100.000.000**			**51,49**	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				**55.000.000**				**65.000.000**

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Bandung Barat	3 Berkas	45.000.000	APBD	-	3 Berkas	50.000.000
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Bandung Barat	3 Berkas	10.000.000	APBD	-	3 Berkas	15.000.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				**45.000.000**				**50.000.000**
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Bandung Barat	10 Arsip	45.000.000	APBD	-	10 Arsip	50.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat selama 1 (satu) tahun yang berasal dari usulan masyarakat dan kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. Pendanaan bersumber dari dana APBD Kabupaten. Renja dan Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat

Renja 2024						
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	2024		Catatan Penting
				Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan**		**B**	**6.562.804.300**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**833.379.450**	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Perpustakaan	42.000.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Perpustakaan	591.003.250	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	20.300.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	1250 Eks	180.076.200	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**5.729.424.850**	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Lokus	729.424.850	

Renja 2024						
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	2024		Catatan Penting
				Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Perpustakaan	5.000.000	
2.24.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi SAKIP Disarpus**			**6.554.169.387**	
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**A**	**690.123.200**	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	26 Laporan	690.123.200	
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**115.882.100**	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4 Paket	12.739.100	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10 Paket	34.308.800	
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	7 Paket	10.855.300	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	30 Paket	36.313.300	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10 Paket	11.825.600	
2.24.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	9.840.000	

Renja 2024						
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	2024		Catatan Penting
				Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**210.574.200**	
2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6 jenis	210.574.200	
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**267.254.700**	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Jenis	45.482.500	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6 Jenis	32.500.000	
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Unit	189.272.200	
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**110.835.000**	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	99.912.500	
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	1.797.500	

Renja 2024						
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	2024		Catatan Penting
				Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	1.794.000	
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	2.401.500	
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	1.426.500	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Laporan	3.503.000	
2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.159.500.187**	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 tahun	5.159.500.187	
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 dokumen	1.751.500	
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Jumlah Arsip yang Sudah Dilakukan Penyelamatan**			**1.020.728.100**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				**40.460.000**	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Bandung Barat	3 Berkas	36.260.000	

Renja 2024						
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	2024		Catatan Penting
				Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Bandung Barat	3 Berkas	4.200.000	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**				**39.900.000**	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Bandung Barat	10 Arsip	39.900.000	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**				**694.912.500**	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Bandung Barat	1 Pengguna	694.912.500	

BAB V
PENUTUP

1. Catatan penting

   Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan dokumen pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat selama (satu) tahun yang memerlukan komitmen dalam pelaksanaan kegiatannya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Program dan kegiatan yang direncanakan memerlukan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya untuk mencapai target yang ditentukan. Realisasi program dan kegiatan diharapkan optimal, dapat meminimalisir permasalahan dan hambatan serta menyelesaikan tantangan yang dihadapi sehingga tujuan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dapat dicapai. Seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan kegiatan yang prioritas terlebih dahulu atau mengajukan bantuan baik yang bersumber dana APBD Provinsi maupun APBN.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

   - Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan atau mendukung program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
   - Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dengan berpedoman kepada Perubahan Renja dan Perubahan RKPD Tahun 2024;

- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut;
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2024;
- Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat harus memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Bandung Barat, September 2024

Kepala Dinas
Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Bandung Barat

Heri Partomo, S.I.P
NIP. 19690514 198803 1 001

RENCANA KERJA
(RENJA PERUBAHAN)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024–2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun–tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bandung Barat, Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Barat,

DUDI SUPRIADI., S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19741221 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2024 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2024 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN 31

3.1. Pelaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD 31

3.2. Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 35

BAB V PENUTUP 64

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024–2026, sebagai implementasi Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;

13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan

15. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat
5. Sebagai bahan Evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMD Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
- 3.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. Pelaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan DPMD Tahun 2024

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat berkewajiban memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini mewujudkan :

Misi ke ***satu*** : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan *pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia di Bandung Barat yang berkualitas*.

Tujuan : Pemberdayaan Masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Lembaga Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2024 upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, telah melaksanakan 5 Program dan 9 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s.d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2020 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.07.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercapainya Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan**								
2.07.2.07.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Telepon Dan Internet Kantor	Rp 51,943,758	807,974,595	7,800,000	6,803,824	87.23	Rp 7,488,000	**Rp 822,266,419**	
2.07.2.07.01.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Rp 159,934,640	16,800,000	24,000,000	24,000,000	100.00	Rp -	**Rp 40,800,000**	
2.07.2.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Rp 866,233,123	123,649,410	128,988,000	127,288,150	98.68	Rp 149,283,290	**Rp 400,220,850**	
2.07.2.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp 528,290,283	139,167,305	72,843,100	72,789,200	99.93	Rp 56,764,000	**Rp 268,720,505**	

2.07.2.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Rp 63,902,400		9,500,000	9,500,000	100.00	Rp -	**Rp 9,500,000**	
2.07.2.07.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Rp 987,976,349	272,583,500	49,070,000	48,940,000	99.74	Rp 232,439,710	**Rp 553,963,210**	
2.07.2.07.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 67,383,194	9,130,000	10,034,709	10,034,700	100.00	Rp 10,098,000	**Rp 29,262,700**	
2.07.2.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Rp 236,001,960	47,800,000	36,000,000	36,000,000	100.00	Rp 31,200,000	**Rp 115,000,000**	
2.07.2.07..01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makan Dan Minum	Rp 311,450,865	54,490,822	46,500,000	46,500,000	100.00	Rp 10,564,000	**Rp 111,554,822**	
2.07.2.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 516,244,438	131,614,580	38,800,000	32,141,500	82.84	Rp 4,425,000	**Rp 168,181,080**	
2.07.2.07.01.01.019	Rapat-Rapat konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Rp 143,123,420		12,600,000	11,940,000	94.76	Rp -	**Rp 11,940,000**	
2.07.2.07.01.01.025	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai Non PNS Dalam Asuransi Kesehatan BPJS	Rp 91,240,686	5,859,000	**43,850,000**	**43,624,000**	99.48	Rp 22,920,000	**Rp 72,403,000**	
2.07.2.07.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tercapainya Kelancaran Tugas**								

2.07.2.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	1,943,633,796	107,992,700	**41,180,000**	**41,180,000**	100.00	Rp 14,200,000	**Rp 163,372,700**	
	Program peningkatan disiplin aparatur	**Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur**								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Olah Raga, Pakaian Dinas Harian Dan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	183,948,378	106.741.500	**79,858,596**	**79,800,000**	99.93	Rp 12,000,000	**#VALUE!**	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur		596,826,004							
	Manajemen Penata Usahaan Keuangan	Terlaksananya bimbingan teknis Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	596,826,004							
2	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**									
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya bimbingan teknis Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	838,376,984	48,591,800	**253,320,200**	**249,070,200**	98.32	Rp 112,468,000	**Rp 410,130,000**	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	129,367,920	28,958,200	127,840,000	123,590,000	96.68	Rp 11,709,000	**Rp 164,257,200**	

2.07.2.07.01.06.001	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	562,183,029	56,756,000	19,200,000	19,200,000	100.00	Rp 112,013,000	**Rp 187,969,000**	
2.07.2.07.01.06.002	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD**	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	637,156,815		106,280,200	106,280,200	100.00	**Rp 240,024,500**	**Rp 346,304,700**	
2.07.2.07.01.06.004	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	637,156,815	129,952,200	**85,650,000**	**83,025,000**	96.94	Rp 240,024,500	**Rp 453,001,700**	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	**Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran**								
2.07.2.07.01.07.001	Penyelenggaraan Desiminasi Bagi Masyarakat	Prosentase Desa Swasembada	1,658,304,083	129,952,200	**1,015,828,100**	**1,012,558,380**	99.68	Rp 26,000,000	**Rp 1,168,510,580**	
2.07.2.07.01.015	Pelaksanan Kegiatan Lomba Desa	Prosentase Desa Berprestasi Melalui Lomba Desa	1,448,600,423	155,014,000	191,781,200	189,840,700	98.99	Rp 104,195,700	**Rp 449,050,400**	
2.07.2.07.01.15.003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Prosentase LKD Aktif	5,989,385,223	174,350,000	824,046,900	822,717,680	99.84	Rp 361,967,500	**Rp 1,359,035,180**	
2.07.2.07.01.15.004	Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan/Kecamatan	Prosentase Desa Berkembang	1,468,437,500		**860,566,900**	**844,565,123**	98.14	Rp 39,000,000	**Rp 883,565,123**	
2.07.2.07.01.15.005	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**	Prosentase LKD Aktif								

2.07.2.07.01.15.008	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengurus BUMDES dan Pelaku Pemberdayaan Perekonomian Desa	1,570,000,000	801,952,100	**2,965,464,900**	**2,701,516,700**	91.10	Rp 952,918,000	**Rp 4,456,386,800**	
2.07.2.07.01.16	Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Revitalisasi Bumdes	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi Serta Monev Serta Tercapainya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	532,000,000	177,595,000	109,778,900	108,653,900	98.98	Rp 319,500,000	**Rp 605,748,900**	
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Sosialisasi Dan Pembinaan TTG Serta Gelar TTG Tingkat Kabupaten Serta Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan TTG Sesuai Dengan Kebutuhan Di Lingkungan Masing-Masing	700,000,000	406,180,500	125,000,000	125,000,000	100.00	Rp 743,600,000	**Rp 1,274,780,500**	
2.07.2.07.01.16.011	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Persentase Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**								
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Lokasi Desa Pelaksana BSMSS	1,319,926,988	132,192,000	692,142,000	497,526,000	71.88	Rp 132,089,800	**Rp 761,807,800**	

	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Peningkatan Kapasitas Dan Partisipasi Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaku Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa	965,975,000		850,000,000	802,412,000	94.40	Rp 581,117,000	**Rp 1,383,529,000**	
	Pelaksanaan Pencanangan BBGRM	Lokasi Desa Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten Bandung Barat	1,369,335,938	121,726,600	510,000,000	504,394,500	98.90	Rp 7,000,000	**Rp 633,121,100**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan, Kapasitas Aparatur Desa Dan Pelaksana Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Peserta Desa, Kecamatan, PDTI	805,255,000	40,680	225,000,000	224,925,000	99.97	Rp 90,000,000	**Rp 314,965,680**	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
2.07.2.07.01.17.009	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelatihan Perangkat Desa Di Bidang Keuangan Desa	2,372,975,000	2,372,975,000	198,000,495	197,737,000	99.87	Rp 176,000,000	**Rp 2,746,712,000**	

2.07.2.07.01.17.010	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Terlaksananya Peningkatan Kapsitas Badan Permusyawaratan Desa	1,260,875,000		429,354,000	409,517,000	95.38	Rp 806,133,306	**Rp 1,215,650,306**	
2.07.2.07.01.18	**Program Penataan Manajemen Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**								
	Penyusunan dan Review Peraturan Tentang Desa	Penataan Regulasi Desa	612,990,653	142,235,000				Rp -	**Rp 142,235,000**	
	Pendampingan Penyusunan RPJMDes	Percentase pendampingan ke desa						Rp 118,636,000	**Rp 118,636,000**	
	Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2,698,825,000	521,050,000				Rp 227,500,000	**Rp 748,550,000**	
	Pembinaan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Desa	974,000,000	119,111,600				Rp -	**Rp 119,111,600**	
	Penataan Aset Desa	Persentase Proses Penataan Desa	1,308,340,000	168,050,000				Rp -	**Rp 168,050,000**	
	Pengembangan Kerjasama Desa	Terwujudnya Kerjasama UPK Dengan Pihak Lainnya	570,107,000	-				Rp 842,965,000	**Rp 842,965,000**	
Jumlah										

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

Analisis Kinerja Pelayanan Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need approach), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (bottom up approach), pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (community institusional approach), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (prosperity approach), pendekatan lintas sektoral dan program (cross sectoral program approach), pendayagunaan teknologi tepat guna (appropite technologi approach) serta pemberdayaan masyarakat perdesaan (urban community approach).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat saat ini masih relatif tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi cukup besar pula, kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat mengharuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaannya. Dengan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana yang ada serta dukungan anggaran, maka dapat digambarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel : 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			50%	60%	82.34	91.17	50%	73,51 %	82.34	91.17	
2	Kontribusi BumDes Terhadap PADes			40%	56%	70%	85%	48%	45%	70%	85%	
3	Persentase Desa Mandiri											
4	Indek Kepuasan Masyarakat			**B**	**B**	B	B	B	B	-	-	
5	Nilai Evaluasi SAKIP			BB	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan ujung tombak dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada di perdesaan, mulai dari tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan. LKD merupakan garda terdepan dalam melaksanakan Misi Bupati Bandung Barat, terutama Misi ke 1. Keberadaan LKD memiliki dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat baik melalui bidang administrasi kependudukan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan layanan social dasar lainnya.

Pada tahun 2023 jumlah LKD di Bandung Barat sebanyak 19.730 LKD, meliputi Posyandu (Pokjanal), PKK, LPMD, Karang Taruna, LPM, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Adapun LKD yang Aktif sebanyak 19730 LKD atau ….. %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 LKD Aktif di Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan cukup significan sebesar …. %, dimana pada tahun 2019 LKD aktif sebesar 50 %. Kenaikan LKD aktif ini belum sepenuhnya merupakan keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bandung Barat, karena terdapat beberapa kegiatan untuk peningkatan kapasitas pengurus maupun penguatan kelembagaan tidak dilaksanakan, karena pada tahun anggaran 2023 telah terjadi rasionalisasi anggaran. Namun demikian ada beberapa solusi yang lakukan antara lain,

a. Pemberian bantuan keuangan kepada LKD
b. Bersinergi dengan Desa, agar menyediakan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas LKD melalui Dana Desa

Pada indikator Persentase Desa Mandiri Tahun 2024 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pendekatan baru dalam upaya meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sistem kerja BUMDes di Kabupaten Bandung Barat adalah menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang dikelola secara professional namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

Bupati Bandung Barat memberikan perhatian penuh terhadap keberadaan BUMdes di Kabupaten Bandung, dengan harapan agar BUMDes –BUMDes di Kabupaten Bandung Barat mampu mengembangkan unit usahanya menjadi DESAMart. Pada saat ini jumlah DESAMart yang sudah terbentuk sebanyak 5 unit usaha, berlokasi di Desa Rajamandala Kulon, Desa Kayu Ambon, Desa Padalarang, Desa Sukajaya dan Desa Cikahuripan. Selain itu terdapat beberapa BUMDes yang telah membangun BUMDes Bersama, sebagai bentuk

pengembangan usaha, yaitu Mukti Raharja dan KSC mandiri di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat.

Saat ini BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 165 BUMDes, yang tersebar di 165 desa. Adapun yang sudah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADes sebanyak 74 BUMDes atau sekitar 45 %. Capaian ini ini masih dibawah target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 56 % atau 92 BUMDes. Ketidaktercapaian ini disebabkan beberapa factor, diantaranya :

a. recofusing anggaran tahun 2020, dimana program/kegiatan pengembangan usaha BUMDes tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
b. Penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat dari pandemic covid-19.

Namun demikian DPMD Kabupaten Bandung terus melakukan upaya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes - BUMDes yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat dalam sasaran keberhasilan tata kelola, manajemen, administrasi dan organisasi pemerintahan desa memberikan kontribusi terhadap IKM pada tahun 2023 dengan nilai A. Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dengan jumlah responden sebanyak 58 orang dengan dibagikan 9 pertanyaan pada quisioner. Sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 81,03 %, Terdapat peningkatan ditahun 2019.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan salah satu kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. Selain itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pencapaian sasaran Tata Kelola, Manajemen, Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target

yang telah ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa, antara lain didukung oleh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, seperti Bimbingan Teknis tentang management administasi desa maupun tentang pengelolaan keuangan Desa di Bidang Penataan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi perhatian, diantaranya:

1) Perlunya pembentukan dan pengembangan Kawasan perdesaan yang berbasis sumber daya yang dimiliki
2) Perlunya perwujudan desa mandiri
3) Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial
4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik
6) Peningkatan pengelolaan administrasi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang optimal
7) Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
8) Peningkatan pengeloaan aset desa yang baik
9) Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan untuk meningkatkan pendapatan msyarakat
10) Perlunya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas APBDes

11) Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa

12) Penerapan aplikasi sistem aset desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada akhir tahun sebelum awal tahun kegiatan berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rancangan Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan revieu.

Adapun revieu terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	394,347,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	394,347,200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan RKA-SKPD	1 Dokumen	16,864,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan RKA-SKPD	1 Dokumen	16,864,600	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,814,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,814,800	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,089,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,089,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,351,200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,351,200	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung Barat		2 Dokumen	80,113,300				2 Dokumen	80,113,300	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	57,315,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	57,315,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung Barat	Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara	14 Bulan 25 ASN PNS	5,558,193,432	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung Barat	Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara	14 Bulan 25 ASN PNS	5,558,193,432	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung Barat		1 Laporan	26,619,000				1 Laporan	26,619,000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	16,736,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	16,736,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Paket	45,000,000	

12	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Bandung Barat		46 Orang	176,082,650		Kabupaten Bandung Barat		46 Orang	176,082,650	
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya bimtek Penatausahaan Keuangan dan Bimtek Keuangan	3 Kegiatan	76,770,600	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya bimtek Penatausahaan Keuangan dan Bimtek Keuangan	3 Kegiatan	76,770,600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	16,807,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	16,807,100	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	32 Paket	136,467,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	32 Paket	136,467,900	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan	25 Jenis	176,262,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan	25 Jenis	176,262,600	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung Barat	Terfasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan	1404 Dus	48,732,800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung Barat	Terfasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan	1404 Dus	48,732,800	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Terfasilitasinya perjalanan koordinasi & konsultasi ke luar daerah	14 OK	27,520,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung Barat	Terfasilitasinya perjalanan koordinasi & konsultasi ke luar daerah	14 OK	27,520,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung Barat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya sarana Penunjang Operasional Dinas	5 Unit	49,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya sarana Penunjang Operasional Dinas	5 Unit	49,400,000	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	4,790,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung Barat	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	4,790,000	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Desa Cepat Berkembang			PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Desa Cepat Berkembang			
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Desa Cepat Berkembang			Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Desa Cepat Berkembang			
21	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	55 Desa	198,913,200	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	55 Desa	198,913,200	
22	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	165 Unit	380,102,650	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	165 Unit	380,102,650	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi			
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa					Fasilitasi Kerja sama antar Desa					
23	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa	5 Dokumen	637,270,500	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa	5 Dokumen	637,270,500	
24	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	5 Dokumen	497,181,400	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	5 Dokumen	497,181,400	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Desa Mandiri			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Desa Mandiri			

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Desa Cepat Berkembang			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Desa Cepat Berkembang			
25	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	165 Dokumen	276,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	165 Dokumen	276,000,000	
26	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 Kepala Desa	3,809,346,084	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 Kepala Desa	3,809,346,084	
27	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	165 Dokumen	163,092,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	165 Dokumen	163,092,000	
28	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terselenggaranya pemilihan kepala desa	12 Laporan	765,503,400	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terselenggaranya pemilihan kepala desa	12 Laporan	765,503,400	
29	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 Dokumen	51,321,500	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 Dokumen	51,321,500	
30	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penglolaan aset desa	165 dokumen	136,863,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penglolaan aset desa	165 dokumen	136,863,000	

31	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 Orang	149,375,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 Orang	149,375,000	
32	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanana penetapan Perbup tentang Penegasan Batas Desa pada masing-masing kecamatan	165 Desa	78,758,500	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksanana penetapan Perbup tentang Penegasan Batas Desa pada masing-masing kecamatan	165 Desa	78,758,500	
33	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya data profile desa, perkembangan desa dan penetapan juara lomba desa	16 Laporan	130,390,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung Barat	Tersusunnya data profile desa, perkembangan desa dan penetapan juara lomba desa	16 Laporan	130,390,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			

34	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BSMSS dan TMMD	2 dokumen	2.500.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BSMSS dan TMMD	2 dokumen	2.500.000.000	
35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa, pendataan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa, perlombaan LKD	6 Lembaga	1.050.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa, pendataan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa, perlombaan LKD	6 Lembaga	1.050.000.000	
36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 dokumen	1.133.964.600	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 dokumen	1.133.964.600	
37	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Bimtek TTG dan Lomba TTG Kabupaten Gelar TTG TK Kabupaten, partisipasi Gelar TTG TK Provinsi dan TK Nasional	1 laporan	51.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung Barat	Terlaksananya Bimtek TTG dan Lomba TTG Kabupaten Gelar TTG TK Kabupaten, partisipasi Gelar TTG TK Provinsi dan TK Nasional	1 laporan	51.000.000	
38	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung Barat	Peningkatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	500.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung Barat	Peningkatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	500.000.000	
			JUMLAH		**19,959,359,516**	-	-	-	-	**19,959,359,516**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat merupakan usulan pembangunan dari desa, yang dipilih oleh kecamatan melalui Forum Musrembangcam dan ditetapkan sebagai program prioritas untuk diusulkan menjadi program perangkat daerah yang akan dibahas pada forum Musrembang Kabupaten.

Daftar usulan program dan kegiatan pembangunan dari kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : 4

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bandung Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME (Rp)	CATATAN
1	Administrasi Desa	Kabupaten Bandung Barat	BPD	200.000.000	
2	Administrasi Desa	Kabupaten Bandung Barat	APDESI	250.000.000	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	LPMD	825.000.000	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	PKK	825.000.000	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Pokja Desa	825.000.000	
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Lomba BBGRM	825.000.000	
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Lomba Posyandu	825.000.000	
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung Barat	Stunting	600.000.000	
9	Penataan Desa	Kabupaten Bandung Barat	Pembangunan Desa Berbasis RW	100.000.000 per RW	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kabijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, dipandang sebagai suatu solusi yang dianggap efektif dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak sedikit proyek pembangunan yang dihasilkan selama ini terkesan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, karena persoalan tidak dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan tersebut, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk pula dalam pemeliharaannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan DPMD

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat periode 2024-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengemban amanat tupoksi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan **misi ke satu** yaitu :

Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya, serta *membangun masyarakat* yang berkarakter, menjunjung tinggi nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka *membangun sumber daya manusia di Bandung Barat yang berkualitas*. **Bertujuan** untuk Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, sasarannya meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat dengan indikator sasaran persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam point 3.2, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 39 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5

Program/kegiatan dan sub kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
			Fasilitasi tata Wilayah Desa
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
			Fasilitasi Penamaan dan Kode dsa
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			Fasilitasi Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
			Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersifat teknokratis, top down, bottom up maupun politis.

Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode RENSTRA.

Rencana kerja yang bersifat top down merupakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengakomodir program - program dari instansi vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Desa. Adapun Rencana Kerja yang bersifat bottom up merupakan program dan kegiatan yang mengakomodir pemerintahan desa yang diusulkan melalui musrembang kecamatan.

Sedangkan rencana kerja yang bersifat politis merupakan program kegiatan yang mengakomodir usulan pokok - pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Bandung Barat. Pendanaan dari pelaksanaan program kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Program dan kegiatan pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : 6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	6 Laporan	394.347.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Laporan	433.781.920

2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Laporan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Dokumen	16.864.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	18.551.060
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Laporan Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	13.814.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.196.280
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Laporan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	14.089.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.497.900
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Laporan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	14.351.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.786.320
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 Dokumen	80.113.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	88.124.630

2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	3 Dokumen	57.315.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	63.047.050
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									-
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	14 Bulan 25 ASN PNS	5.558.193.432	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 Bulan 25 ASN PNS	6.114.012.775
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	26.619.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	29.280.900
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersusunnya Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 Laporan	16.736.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	18.409.600
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									

2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	50 Paket	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Paket	49.500.000
2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	46 orang	176.082.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		46 orang	193.690.915
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya bimtek Penatausahaan Keuangan dan Bimtek Keuangan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	50 orang	76.770.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 orang	84.447.660
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									-
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 paket	16.807.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 paket	18.487.810
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	32 paket	136.467.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		32 paket	150.114.690

2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	17 paket	176.262.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		17 paket	193.888.860
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terfasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1404 Dus	48.732.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1404 Dus	53.606.080
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terfasilitasinya perjalanan koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	14 OK	27.520.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 OK	30.272.000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									-
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya sarana Penunjang Operasional Dinas	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	5 Unit	49.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Unit	54.340.000

2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	36 Unit	4.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		40 Unit	5.269.000
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**									
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**									
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Pemekaran	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Desa	198.913.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		55 Desa	218.804.520
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa Pemekaran	Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Unit	380.102.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 Unit	418.112.915
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**									-
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**									-

2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	637.270.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	700.997.550
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	497.181.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	546.899.540
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**									-
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**									-
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	276.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 desa	303.600.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	3.809.346.084	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 desa	4.190.280.692

2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 dokumen	163.092.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 dokumen	179.401.200
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Tersusunnya database perangkat desa sebagai dasar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	765.503.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	842.053.740
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 dokumen	51.321.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 dokumen	56.453.650
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksanannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penglolaan aset desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 dokumen	136.863.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 dokumen	150.549.300
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 orang	149.375.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 orang	164.312.500

2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Terlaksanana penetapan Perbup tentang Penegasan Batas Desa pada masing-masing kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Desa	78.758.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		165 Desa	86.634.350
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Cepat Berkembang	Tersusunnya data profile desa, perkembangan desa dan penetapan juara lomba desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	130.390.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		16 Dokumen	143.429.000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**									-
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**									-

2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BSMSS dan TMMD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 Dokumen	2.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.650.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa, pendataan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa, perlombaan LKD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	6 Lembaga	1.050.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Lembaga	1.155.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Dokumen	1.133.964.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.247.361.060
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Terlaksananya Bimtek TTG dan Lomba TTG Kabupaten Gelar TTG TK Kabupaten, partisipasi Gelar TTG TK Provinsi dan TK Nasional	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	51.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	56.100.000

2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BBGRM	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	550.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Peningkatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	550,000,000
TOTAL										**19.959.359.516**				**20.305.295.468**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersifat teknokratis, top down, bottom up maupun politis.

Rencana Kerja Perubahan yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode RENSTRA.

Rencana kerja yang bersifat top down merupakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengakomodir program-program dari instansi vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Desa. Adapun Rencana Kerja yang bersifat bottom up merupakan program dan kegiatan yang mengakomodir pemerintahan desa yang diusulkan melalui musrembang kecamatan.

Sedangkan rencana kerja yang bersifat politis merupakan program kegiatan yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Bandung Barat. Pendanaan dari pelaksanaan program kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Baraat Tahun 2024.

Rencana pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 7
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	6 Laporan	14,000,000	DAU	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Dokumen	25,000,000	DAU	
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	25,000,000	DAU	

2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Laporan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	23,000,000	DAU	
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Laporan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Laporan	25,000,000	DAU	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Dokumen	26,000,000	DAU	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					DAU	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	23 ASN PNS	5,550,005,732	DAU	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Tersusunnya Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 Laporan	284,999,406	DAU	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	5 Jenis	175,100,000	DAU	
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek Penatausahaan Keuangan dan Bimtek Keuangan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 Kegiatan	383,159,200	DAU	

2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					DAU	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	3 Jenis	14,999,300	DAU	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Perbaikan Kantor	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	36 Unit	404,142,400	DAU	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	36 Jenis	51,357,400	DAU	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	14 Jenis	151,341,200	DAU	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	25 Jenis	59,591,400	DAU	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	756 Eksemplar	0	DAU	
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1600 Dus	74,975,600	DAU	

2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya perjalanan koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	98 HOK	116,506,000	DAU	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					DAU	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa telepon, sumber daya air dan listrik	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	12 Bulan	18,600,000	DAU	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					DAU	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya sarana Penunjang Operasional Dinas	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	17 Unit	223,070,000	DAU	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	36 Unit	39,393,200	DAU	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA					DAU	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa					DAU	

2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terfasilitasinya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	5 Desa	50,000,000	DAU	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Desa	75,000,000	DAU	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Desa	344,750,000	DAU	
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,000,000	DAU	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Desa	550,000,000	DAU	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					DAU	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa					DAU	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 BKAD, PD/PLD 16 Kecamatan 165 Desa 12 UPK	570,000,000	DAU	

2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 UPK 16 Kecamatan, PD/PLD 165 Desa 12 BKAD, PD/PLD	300,000,000	DAU	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi Kawasan Perdesaan dan penguatan Kawasan Perdesaan melalui Peraturan (Legal Drating)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan Perdesaan	199,999,972	DAU	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					DAU	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					DAU	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Desa	50,000,000	DAU	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan dan penetapan produk hukum desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 perbup	100,000,000	DAU	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes, RAPBDes dan APBDes	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	93,810,000	DAU	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	475,139,800	DAU	

2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	3,899,999,728	DAU	
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Tersedianya pedoman dan bimbingan teknis mengenai musyawarah desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	143,810,000	DAU	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peraturan desa sesuai dengan kewenangan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	50,000,000	DAU	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	100,000,000	DAU	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersusunnya database perangkat desa sebagai dasar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	50,000,000	DAU	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profile desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	97,180,000	DAU	
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	126,960,000	DAU	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksanannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penglolaan aset desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	140,440,000	DAU	

2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksanaanya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	173,830,000	DAU	
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksanana penetapan Perbup tentang Penegasan Batas Desa pada masing- masing kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kecamatan	444,750,000	DAU	
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksanaanya penyusunan LKPPD, LPPD, LPJ, dan laporan semester I dan II keuangan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	73,830,000	DAU	
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya evaluasi urusan kewenangan kabupaten yang dilaksanana oleh Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 desa	0	DAU	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersusunnya data profile desa, perkembangan desa dan penetapan juara lomba desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 kecamatan	99,999,800	DAU	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					DAU	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					DAU	

2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BSMSS dan TMMD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	2 Desa	100,000,000	DAU	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa, pendataan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa, perlombaan LKD	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	165 Desa	6,544,750,000	DAU	
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	16 Kecamatan 16 PDTI 165 Desa 165 TPKD	75,000,000	DAU	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	165 Desa	400,000,000	DAU	

2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Bimtek TTG dan Lomba TTG Kabupaten Gelar TTG TK Kabupaten, partisipasi Gelar TTG TK Provinsi dan TK Nasional	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	165 Posyantek Desa	450,000,000	DAU	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BBGRM	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	1 Desa	100,000,000	DAU	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	165 TP PKK Desa	250,000,000	DAU	
TOTAL									23,839,490,138		

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja ini memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana tindak lanjut jika dalam proses pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan yang disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan baru atau adanya peraturan baru maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, semoga dapat memberi dukungan terhadap pencapaian Visi Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 31 Juli 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Barat,

DUDI SUPRIADI., S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19741221 199803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Gedung A Lantai 3, Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Mekarsari, Ngamprah website http://www.bandungbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 800/ kep. 181 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan RENJA pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 13 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 13/404/2016);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Ketua;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DPMD
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DUDI SUPRIADI, S.Sos
19741221 199803 1001

LAMPIRAN I
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 800/ kep. 181 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengarah	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat
Penanggungjawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat
Ketua	:	Kasubag Penyusunan Perencanaan dan Keuangan
Sekretaris	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Anggota	:	1. Kepala Bidang Kelembagaan 2. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa 3. Kepala Bidang Administrasi Desa

KEPALA DPMD
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DUDI SUPRIADI, S.Sos
19741221 199803 1001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 800/ kep. 181 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN RENCANA KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Tugas Pokok

Menyusun RENJA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat

B. Fungsi

1. Pengumpulan bahan RENJA dari setiap bidang
2. Pengkoordinasian Penyusunan RENJA;
3. pengevaluasian dan pelaporan RENJA.

C. Rincian Tugas

1. Pengarah
   a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
   b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.

2. Penanggungjawab
   a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
   b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil Pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah.

3. Ketua
   a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
   b. Mengarahkan mengawasi dan mengendalikan kegiatan Anggota;
   c. Mengevaluasi kegiatan Anggota;
   d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.

4. Sekretaris
   a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;

b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;

c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;

d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;

e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;

f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.

5. Anggota

a. Melaksanakan penyusunan RENJA;

b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tiap bagian di lingkup Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Menyusun laporan.

6. Operator

a. menginput data kinerja masing-masing SKPD pada aplikasi e-porja
b. mengolah dan memenej data kinerja SKPD terkait pada aplikasi e-porja.

KEPALA DPMD
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DUDI SUPRIADI, S.Sos
19741221 199803 1001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA)

TAHUN 2024

KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rakhmat-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padalarang yang merupakan penajaman program dan kegiatan untuk tahun 2024

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa berubahnya pola penyelenggaraan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan tonggak sejarah pembangunan nasional yang bertumpu pada paradigma baru bahwa pembangunan terkonsentrasi di daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota dan ini merupakan proses yang multi dimensi.

Otonomi daerah pada era reformasi menuntut kesiapan dan dukungan yang optimal dari berbagai pihak dan diharapkan hasilnya menjadi lebih sinergi, selanjutnya dalam upaya penyusunan dan prioritas program pembangunan daerah serta peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat yang kebijakannya dituangkan dalam bentuk rumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Padalarang

Rencana Kerja Kecamatan Padalarang khususnya program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam Rencana Rencana Strategis Kecamatan Padalarang periode 2018 – 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Padalarang ini diharapkan tercipta dukungan dari semua pihak terutama *stakeholders* sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama dalam rangka Menciptakan Kecamatan Padalarang Sebagai Organisasi Profesional Melalui Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik Dalam Menunjang Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Yang "AKUR" di Tahun 2021. Penyusunan dokumen Renja Perubahan itu sendiri merupakan satu proses panjang yang melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam Tim Penyusun Renja Perubahan (TPR) Kecamatan Padalarang.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja Perubahan ini. Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tangan terbuka disertai hati yang tulus ikhlas, tentu sangat kami harapkan.Semoga Renja Perubahan ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Bandung Barat, 1 November 2024

Camat Padalarang

AGUS ACHMAD SETIAWAN., S.E., S.IP., MM

Pembina / IV.a

NIP. 19710809 200801 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.3.1 MAKSUD 3

1.3.2 TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 5

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 5

2.1.1 KEDUDUKAN SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI 5

2.1.2 SUSUNAN ORGANISASI 6

2.1.3 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA 6

2.2 VISI DAN MISI 9

2.2.1 VISI 9

2.2.2 MISI 10

2.2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 11

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN 11

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU 15

3.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN KECAMATAN PADALARANG 15

3.2 REVIEW CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022 15

3.2.1 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 16

3.2.2 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022 17

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19

4.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 19

4.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADALARANG 20

4.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 21

BAB V PENUTUP 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keberadaan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan ... 7

Tabel 2.2 Keberadaan PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal ... 8

Tabel 2.3 Keberadaan PNS berdasarkan Jabatan ... 8

Tabel 2 4 Keberadaan PNS berdasarkan Status Kepegawaian ... 9

Tabel 2 5 Misi Keempat: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi ... 11

Tabel 2 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ... 14

Tabel 3 1 Realisasi Kinerja Tahun 2022 ... 16

Tabel 3.2 Capaian IKU Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Koordinasi Perumusan Pelaporan ... 17

Tabel 3 3 Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah ... 18

Tabel 3.4 Capaian IKU Pada Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik ... 18

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padalarang ... 21

Tabel 4 2 Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Padalarang Tahun 2024 ... 22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja Perubahan) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD

Kecamatan Padalarang sebagai unit kerja pelaksana teknis kewilayahan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah sangat diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan perencanaan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Padalarang, maka disusunlah Renja Perubahan Kecamatan Padalarang tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Padalarang sebagai ber

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Propinsi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan makasud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Padalarang tahun 2024.

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2022 bagi Kecamatan Padalarang, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2021.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Padalarang;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Padalarang; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja Perubahan, landasan hukum penyusunan Renja Perubahan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan dan sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan.

Bab ini menggambarkan tentang gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja beserta sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi Kecamatan Padalarang KabupatenBandung Barat pada tahun 2022 serta kaitannya dengan capaian visi dan misi.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD, serta program, kegiatan dan sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1. Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsi

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Kecamatan Padalarang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pedoman Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun 2021 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kecamatan.

Kecamatan Padalarang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
2. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADALARANGKABUPATEN BANDUNG BARAT

(Peraturan Bupati Bandung Barat No.84 Tahun 2020)

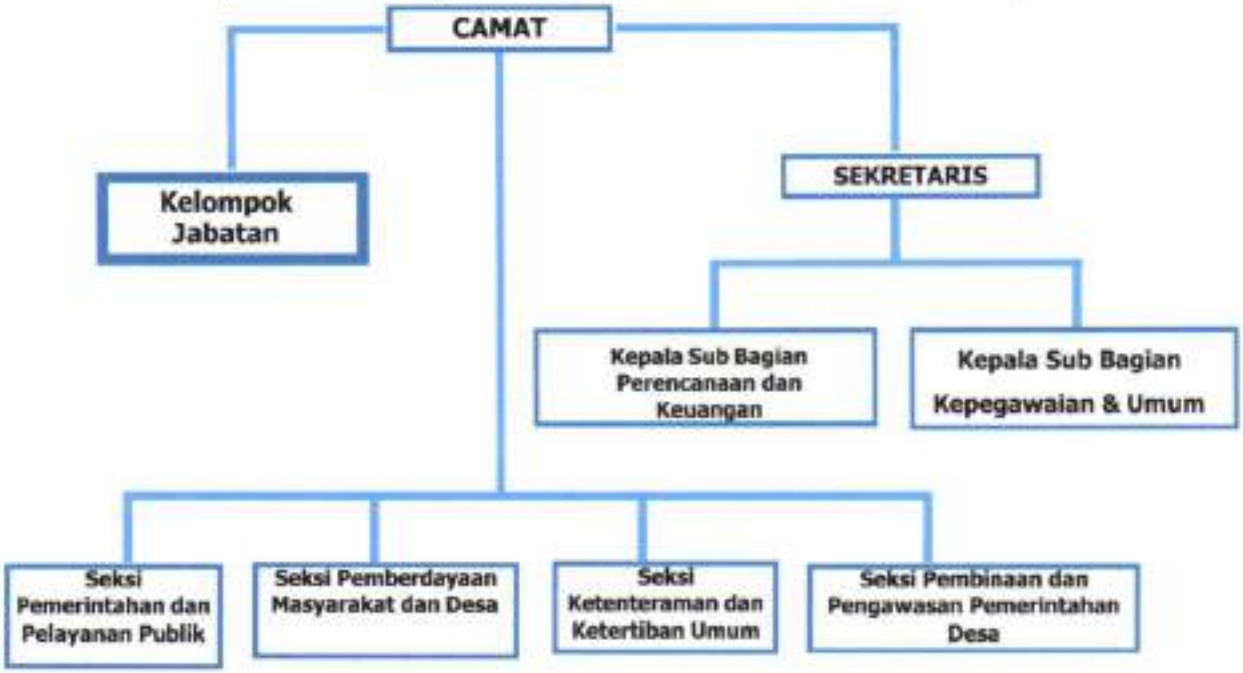

Gambar 2.1.Struktur Organisasi Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Susunan Organisasi Kecamatan Padalarang diberikan dalam **Gambar 2.1** sebagai berikut:

1) Camat;
2) Sekretariat terdiri dari:
   a) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
   b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4) Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5) Seksi Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 30 orang yang terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sejumlah 15 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sejumlah 15 orang. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diuraikan berdasarkan golongan, pendidikan formal, dan pendidikan dalam jenjang struktural dimana rinciannya diberikan pada **Tabel 2.1. – Tabel 2.4.**

Tabel 2.1. Keberadaan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Nama Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah (Orang)
	Golongan IV			
1	**Pembina Utama**	**IV**	**E**	-
2	**Pembina Utama Madya**	**IV**	**D**	-
3	**Pembina Utama Muda**	**IV**	**C**	-
4	**Pembina Tingkat I**	**IV**	**B**	1
5	**Pembina**	**IV**	**A**	1
	Golongan III			
1	**Penata Tingkat I**	**III**	**D**	4
2	**Penata**	**III**	**C**	2
3	**Penata Muda Tingkat I**	**III**	**B**	2
4	**Penata Muda**	**III**	**A**	1
	Golongan II			
1	**Pengatur Tingkat I**	**II**	**D**	2
2	**Pengatur**	**II**	**C**	1
3	**Pengatur Muda Tingkat I**	**II**	**B**	1
	Jumlah			**15**

Sumber : Kecamatan Padalarang 2022

Tabel 2.2. Keberadaan PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S2)	3
2	Strata 1 (S1)	7
3	Diploma III/Sarjana Muda	1
4	SLTA	4
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		15

Sumber : Kecamatan Padalarang 2020

Tabel 2.3. Keberadaan PNS berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		IIIA	IIIB	IVA	IVB	
1.	STRUKTURAL	1	1	4	2	8
2.	FUNGSIONAL					
3.	FUNGSIONAL UMUM					
JUMLAH						8

Sumber : Kecamatan Padalarang 2022

Tabel 2.4. Keberadaan PNS berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	CPNS	-
2.	PNS	15
3.	PTT	15
JUMLAH		30

Sumber : Kecamatan Padalarang 2022

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Visi

Visi Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2024 dalam rangka menunjang Visi **KABUPATEN BANDUNG BARAT YANG AKUR (ASPIRATIF, KREATIF, UNGGUL DAN RELIGIUS), BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI, OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.**

Visi tersebut merupakan suatu gambaran mengenai keadaan internal yang diharapkan pada masa yang akan datang serta sejalan dengan kebijakan pengembangan daerah. Rumusan visi tersebut harus tersosialisasikan dan diharapkan mendapat tanggapan berupa masukan kearah perbaikan untuk dapat diwujudkan serta dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada akhirnya memperlihatkan suatu keunggulan yang menyeluruh pada setiap kegiatan. Berikut dijabarkan penjelasan visi Kabupaten Bandung Barat guna menghasilkan persamaan persepsi atau cara pandang yang pada akhirnya akan menciptakan komitment bersama secara berkesinambungan.

Penjelasan Visi

Organisasi professional : Mengandung pengertian bahwa KecamatanPadalarang sebagai salah satu SKPD/OPD yang bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai keinginan untuk menjadi organisasi yang professional

yaitu organisasi yang selalu melaksanakan tugas dan fungsi secara proporsional, efektif dan efisien didalam pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan daerah.

Peningkatan manajemen : Mengandung pengertian bahwa KecamatanPadalarang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) dan memanfaatkan unsur-unsur manajemen dengan lebih efektif dan efisien untuk pencapaian visi dan misi Bupati.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik : Mengandung pengertian bahwa KecamatanPadalarang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsive dan prespektif gender secara konsisten dan berkelanjutan

"AKUR" : Mengandung pengertian bahwa KecamatanPadalarang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu bertujuan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul Dan Religius (AKUR).

2.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Bandung Barat menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya, serta membangun masyarakat yang berkarakter, menjunjung tinggi nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka membangun sumberdaya manusia di Bandung Barat yang berkualitas.

2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sector unggulan beserta sector dan potensi sumberdaya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur fisik, social dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang ditetapkan. Perumusan tujuan ini membantu Kecamatan Padalarang untuk mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan dan sasaran strategis khusus untuk Kecamatan Padalarang dapat disajikan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.5. Misi Keempat: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi

NO.	TUJUAN	NO.	SASARAN
T1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	S1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
T2	Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas	S2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran dalam Rencana Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan disajikan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Kelompok indikator kinerja kegiatanditetapkan dalam komponen kegiatan, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) berikut rencana capaiannya sesuai dengan DPA.

Indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Padalarang merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Padalarang. Indikator kinerja sasaran strategis menggunakan pendekatan hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) kegiatan. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran dari faktor kunci keberhasilan utama dari masing-masing saseran strategis. Hubungan antar unsur indikator kinerja digambarkan dalam bentuk diagram yang diberikan pada **Gambar 2.2**.

Gambar 2.2 Hubungan Unsur Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dapat dikategorikan ke dalam kelompok *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*, dimana penjabaran singkat mengenai hal tersebut diberikan dalam uraian di bawah ini.

1. Masukan (*Input*)

   Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

2. Keluaran (*Output*)

   Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

3. Hasil (*Outcome*)

   Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Manfaat (*Benefit*)

   Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh Publik.

5. Dampak (*Impact*)

   Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang dalam hubungan ini penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan program atau kegiatan.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan, sasaran yang ditetapkan, dan data pendukung yang harus diorganisasi, serta memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas;
2. Dapat diukur secara obyektif;
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai; dan
4. Tidak bias.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis dengan indikator dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Padalarang tahun 2019 2024 diberikan pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Padalarang Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai Sakip
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Angka IKM

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

3.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN KECAMATAN PADALARANG

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Padalarang, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Padalarang sebagaiberikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Peningkatan Aksesibilitas Baik Antar Wilayah Dalam Kabupaten Bandung Barat Maupun Keluar Daerah;
4. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak BencanaBelum optimalnya peningkatan dan pemerataan pembangunan;
5. Transformasi Tata Kelola Pemenntahan yang Baik;
6. Pandemi Covid-19;

3.2 Review Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja sasarandan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: nilai akuntabilitas instansi pemerintah dan nilai kualitas pelayanan publik.

Rencana Kerja Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, keluaran, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Tingkat ketercapaian pencapaian sasaran ditentukan berdasarkan besaran nilai persentase realisasi target. Sasaran kinerja dikatakan tercapai, apabila persentase pencapaian lebih dari 85 %. Sasaran kinerja tidak tercapai, apabila persentase pencapaian kurang dari 85 %.

3.2.1 Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.1. Realisasi Kinerja Tahun 2024.

No.	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tercapai/Tidak
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik							
A	**Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah**						
	1	Nilai SAKIP		BB	B	B	Tidak Tercapai
Tujuan 2 : Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas							
B	**Meningkatkan penyelenggaraan monitoring, evaluasi kewilayahan**						
	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Angka	81,50	84.09	103,17 %	Tercapai

Berdasarkan tabel 3.1. di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja sudah tercapai melalui 2 Sasaran.
2. Dari keseluruhan pencapaian target kinerja hampir seluruh sasaran kegiatan target 100%.
3. Secara keseluruhan pencapaian target di tahun 2022 telah mencapai 99,34%.

3.2.2 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022

Tabel 3.2. Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Koordinasi Perumusan Pelaporan.

Tabel 3.2

Capaian IKU Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Koordinasi Perumusan Pelaporan

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		%	Status Capaian	Akhir Renstra	
			Target	Realisasi			Target	%
Nilai IKM	Anggka	81,61	81,50	84.09	103,17	Tercapai	83	100 %
Nilai SAKIP	Hurup	CC	BB	B	92,54	Tidak Tercapai	A	100 %

Berdasarkan tabel 3.2. di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

Tingkat kinerja (sasaran) penyelenggaraan koordinasi perumusan pelaporan diukur melalui 3 indikator dan target sebagai berikut :

1. Nilai IKM

   Tingkat kinerja (sasaran) penyelenggaraan koordinasi perumusan pelaporan diukur melalui indikator Persentase penyelenggaraan koordinasi perumusan pelaporan. Persentase penyelenggaraan koordinasi perumusan pelaporan tahun 2021 memperoleh nilai 84.09 dibandingkan 2019 Persentase penyelenggaraan koordinasi perumusan pelaporan memperoleh nilai 81,61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase penyelenggaraan koordinasi perumusenpelaporan telah mencapai target.

2. Nilai SAKIP

   Nilai SAKIP merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN). Nilai SAKIP tahun 2021 memperoleh nilai B (Baik) dibandingkan dengan tahun 2020 Nilai SAKIP memperoleh nilai B, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP tidak mencapai target. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 nilai SAKIP mengalami peningkatan.

Tabel 3.3. Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Tabel 3.3

Capaian IKU Sasaran Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		%	Status Capaian	Akhir Renstra	
			Target	Realisasi			Target	%
Nilai SAKIP	hurup	CC	BB	B	92,54%	Tidak Tercapai	A	100%

Berdasarkan tabel 3.3. di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

Tingkat kinerja (sasaran) 92,54 diukur melalui indikator Sasaran Meningkatkan akuntabilitas Instansi pemenntah. Nilai Sakip tahun 2020 memperoleh nilai B dibandingkan 2019 nilai SAKIP memperoleh nilai CC. Sehingga dapat disimpulken bahwa nilai Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah belum mencapai target dan dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Tabel 3.4. Capaian IKU Pada Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.4

Capaian IKU Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		%	Status Capaian	Akhir Renstra	
			Target	Realisasi			Target	%
Nilai IKM	Angka	81,61	81,50	84.09	103,17 %	Tercapai	83	100%

Berdasarkan tabel 3.4. di atas dapat diambil analisa sebagai berikut .

Tingkat kinerja (sasaran) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah diukur melalui indikator Sasaran Meningkatkan akuntabilitas instansi pemenntah. Nilai IKM tahun 2022 memperoleh nilai 84.09% dibandingkan 2021 nilai IKM memperoleh nilai 81,61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah telah mencapai targetdan mengalami peningkatan..

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padalarang selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

4.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait dengan pembangunan seperti penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mentaldan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup .

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi untuk menganalisis kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJM Provinsi Jawa Barat, maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang terkait dengan pembangunan seperti

1) Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
2) Meningkatkan penataan struktur organisasi yang proporsional
3) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi
4) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah,

5) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat.
6) Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.
7) Menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah.
8) Meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADALARANG

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Kecamatan Padalarang selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Padalarang pada dokumen Rencana Kerja (Renja Perubahan) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padalarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2020	2021
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai SAKIP	BB	BB
Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	81,50	81,75

4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padalarang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Tabel 4.2 :**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan Padalarang tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padalarang Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran karyawan dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padalarang.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Padalarang, penyusunan Renja Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Padalarang maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Padalarang tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2019-2024 yaitu: " Bandung Barat Yang Akur (Aspiratif, Kreatif, Unggul Dan Religius), Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi, Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Bandung Barat, 1 November 2024

Camat Padalarang

AGUS ACHMAD SETIAWAN, S.E., S.IP., MM

Pembina

NIP. 19710809 200801 1 006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH
RKUD BELANJA
SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pasirjaya

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Tahun N	Jumlah Tahun N+1

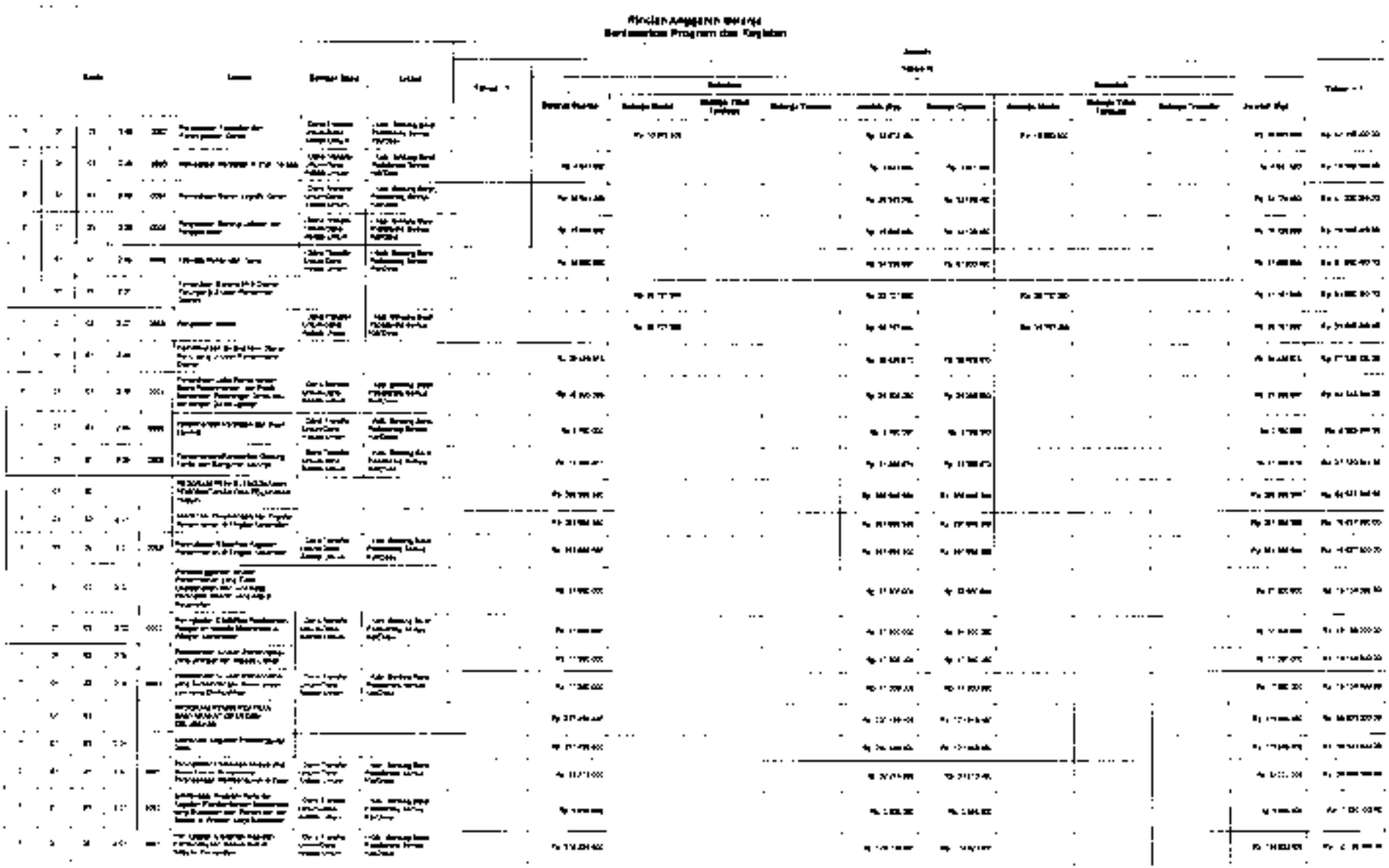

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Belanja					Belanja				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	04	2.02		Koordinasi Penegakan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Bantuan Kamtibmas Negara Republik Indonesia	- Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	- Kab. Sindang Barat, Pasadaleng, Kemus Kab/Desa		Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	08			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 1.858.170.000				Rp. 1.858.170.000	Rp. 1.858.170.000				Rp. 1.858.170.000	Rp. 20.750.000,00
7	01	08	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 1.858.170.000				Rp. 1.858.170.000	Rp. 1.858.170.000				Rp. 1.858.170.000	Rp. 20.750.000,00
7	01	08	2.01	0005	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	- Kab. Sindang Barat, Pasadaleng, Kemus Kab/Desa		Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	08	2.01	0006	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	- Kab. Sindang Barat, Pasadaleng, Kemus Kab/Desa		Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	08	2.01	0008	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	- Kab. Sindang Barat, Pasadaleng, Kemus Kab/Desa		Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	08	2.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	- Kab. Sindang Barat, Pasadaleng, Kemus Kab/Desa		Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
7	01	08	2.01	0010	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Tata/Sistem Lembaga Kemasyarakatan	- Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	- Kab. Sindang Barat, Pasadaleng, Kemus Kab/Desa		Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]				Rp. [illegible]	Rp. [illegible]
Jumlah									Rp. [illegible]	Rp. [illegible]			Rp. [illegible]	Rp. [illegible]	Rp. [illegible]			Rp. [illegible]	Rp. [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN PADALARANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PADALARANG KAB. BANDUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
								RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang
1	2					3	4	7	8	9	10
						Kecamatan Padalarang		3.909.793.948,00	6.857.888.520,00	6.366.568.062,00	-491.320.458,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		3.909.793.948,00	6.857.888.520,00	6.366.568.062,00	-491.320.458,00
	7	01				KECAMATAN		3.909 793.948,00	6 857.888.520,00	6.366 568 062,00	-491.320.458,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Padalarang Nilai SAKIP KEC. PADALARANG Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.559.669.548,00	3.728.195.620,00	3.328.276.762,00	-399.918.858,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.775.000,00	9.775.000,00	9 775.000,00	-
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.494.500,00	9.775.000,00	9 775 000,00	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.038.000,00	9.775.000,00	9 775 000,00	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.038.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	-
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.277.500,00	1.038.000,00	1.038.000,00	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.851.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.337.294.748,00	3.371.985.350,00	3.371.985.350,00	-
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.309.794.948,00	3.339.468.950,00	2.848.148.492,00	-491.320.458,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.326.000,00	3.326.000,00	3.326.000,00	-
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.874.400,00	27.890.600,00	27.890.600,00	-
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.139.400,00	171.615.000,00	171.615.000,00	-
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12.500.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	-
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	71.639.400,00	123.015.000,00	123.015.000,00	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.158.200,00	99.686.400,00	99.686.400,00	-
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.829.300,00	1.829.300,00	1.829.300,00	-
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.108.600,00	33.872.300,00	46.997.300,00	13.125.000,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.686.800,00	4.941.800,00	4.941.800,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28.221.700,00	28.543.200,00	51.457.800,00	27.914.600,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14.761.800,00	15.949.800,00	18.061.800,00	2.112.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					

							Jumlah Laporan Hasiltasi Kunjungan Tamu	14.550.000,00	14.550.000,00	67.800.000,00	53.250.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.707.000,00	35.707.000,00	35.707.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35.707.000,00	35.707.000,00	35.707.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Asset Kantor	23.595.200,00	39.426.670,00	39.426.670,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	-
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	-
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.535.200,00	11.366.670,00	11.366.670,00	-
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	183.445.000,00	366.998.500,00	366.998.500,00	-
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan	146.295.000,00	291.698.500,00	291.698.500,00	-
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146.295.000,00	291.698.500,00	291.698.500,00	-
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	8.000.000,00	57.800.000,00	57.800.000,00	-
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000,00	57.800.000,00	57.800.000,00	-
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	9.150.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.150.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	110.764.400,00	237.459.400,00	173.948.400,00	- 63.511.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.764.400,00	237.459.400,00	237.459.400,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.275.000,00	52.275.000,00	33.275.000,00	- 19.000.000,00
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.639.400,00	179.334.400,00	134.823.400,00	- 44.511.000,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	48.765.000,00	669.065.000,00	641.174.400,00	- 27.890.600,00
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah	48.765.000,00	669.065.000,00	669.065.000,00	-
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.765.000,00	669.065.000,00	641.174.400,00	- 27.890.600,00
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	27.150.000,00	1.856.170.000,00	1.856.170.000,00	-
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomentasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	27.150.000,00	1.856.170.000,00	1.856.170.000,00	-

	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	-
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000,00	1.811.520.000,00	1.811.520.000,00	-
							JUMLAH	**3.909.793.948,00**	**6.857.888.520,00**	**6.366.568.062,00**	**-491.320.458,00**

DISKOMINFOTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RENCANA KERJA

RENJA PERUBAHAN

DISKOMINFOTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

KABUPATEN BANDUNG BARAT
WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA

KABUPATEN BANDUNG BARAT 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Dengan memanjatkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, Renja perubahan ini memuat tentang Penyusunan Rencana Kinerja Dinas yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat , Rencana kerja (RENJA) Perubahan Diskominfotik ini juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. RENJA Perubahan 2024 ini dibuat dengan memperhatikan dinamika regulasi dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan secara bertingkat dari nasional, provinsi sampai dengan pemerintahan level Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024-2026. maka rencana kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rancangan

Renja Perubahan harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran perubahan 2024.

Mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 atas dasar usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi yang sesuai dengan regulasi dalam keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran Perubahan 2024.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan perubahan sehingga terdapat arah yang jelas dari program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun dan melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta mengampuni segala kesalahan kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung Barat, 8 Oktober 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Bandung Barat,

YOPPIE INDRAWAN ISKANDAR,SE
NIP.197301121999011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..... i

DAFTAR ISI ……..... iii

I BAB I PENDAHULUAN ……. 1

1.1. Latar Belakang …… 1

1.2. Landasan Hukum ……..... 5

1.3. Maksud Dan Tujuan ……... 6

1.4. Sistematika Penulisan ……... 7

II BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS ……. 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2024…….. 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfotik ……. 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfotik ……... 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD …… 27

2.5. Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan …… 34

III BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH… 41

3.1. Telahaan Terhadap Program Nasional ……. 41

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat T.A. 2024 …… 45

3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Diskominfotik…….. 48

IV BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH …….. 56

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah ……. 56

V BAB V PENUTUP ……. 63

DAFTAR TABEL

TABEL T-C 29	**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dan pencapaian Renstra Diskominfotik s/d tahun 2024……**	15
TABEL T-C 30	**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfotik Kabupaten Bandung Barat ……**	20
TABEL T-C 31	**Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat ……..**	28
TABEL T-C 32	**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat …….....**	35
TABEL T-C 33	**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Kominfotik Tahun 2023 Dan Prakiran Maju Perubahan Tahun 2024 ……...**	50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangat diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif antar 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah (government), masyarakat (civil society) dan sektor swasta (private sector) dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai dengan tuntutan reformasi.Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan OPD untuk tahun 2024. Rencana kerja Perubahan tersebut memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dengan mengacu pada permasalahan Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana Diskominfotik menggabungkan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pelayanan komunikasi dan informatika pembangunan kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk dilingkungan pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja dibidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan informasi. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat optimal, efektif, efisien serta tepat sasaran. Sesuai dengan komitmen nasional, maka arah pembangunan komunikasi dan informatika perlu mensinergikan entitas sumber daya pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam kiprah pembangunan, yang kesemuanya itu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan. Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti sinergis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya. Penggunaan media telematika akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi secara internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Good governance dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi dibidang administrasi pemerintah daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Oleh karena itu diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan pokok serta indikator kinerja serta dukungan sumber yang jelas, agar hasil nyata pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi lebih nyata manfaat dan kontribusinya bagi daerah dan masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Rencana Kerja Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan masukan dan bahan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/kota agar tercipta sinergitas. Adapun kegiatannya seperti pusat layanan pengaduan, pembuatan aplikasi, Digitalisasi Tanda Tangan Elektronik, dan sebagainya.

Tindak lanjut dari Renja ini adalah dengan melakukan Penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. hal ini tercermin di dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam peraturan perundangan ini mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dimana di dalam RKPD tersebut memuat Renja Perubahan

Perangkat Daerah termasuk di dalamnya Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan;
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 Nomer 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peremendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE;
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat;
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah No. 18 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 62 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
20. Perbup SOTK Nomor 71 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Perubahan Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk satu periode Tahun Anggaran, dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan Tujuan penyusunan RENJA Perubahan Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2024;
2. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program pelayanan publik;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik;
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kominfotik, Dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Dinas Kominfotik, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfotik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja Perubahan.

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Diskominfotik

Sub ini memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Renja dengan pencapaian target Dinas berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Perubahan SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfotik

Sub ini memuat beberapa capaian Dinas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DisKominfotik

Sub ini berisi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Sub ini memuat bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

Berisi tentang usulan kegiatan kepada Perangkat Daerah baik usulan dari Pemangku Jabatan Dinas Kominfotik.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat

Sub ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan SKPD

Sub ini berisi Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan uraian garis yang meliputi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah

Sub ini berisi Rencana Kerja program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

- **BAB V PENUTUP**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Diskominfotik Tahun 2024

Evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun 2024, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam RENJA Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 - 2026. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat merupakan proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang dengan Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (input), proses (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan Organisasi pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, buah, hari, persen dan sebagainya.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan yang dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi Perangkat

Daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Capaian kinerja pembangunan bidang Komunikasi, Informatika Dan Statistik pada tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Jenis pelayanan dasar bidang Komunikasi Informatika dan Statistik meliputi :

a. Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media baru dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan;
b. Penyediaan Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD);
c. Layanan Maintenance, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet;
d. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
e. Collecting data dan security data agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali

dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang uptodate/terkini dan real time

Sehingga review hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD dan pencapaian kinerja Renstra SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik berdasarkan fungsi pelayanan urusan bidang Aplikasi Informasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya tingkat pemahaman dan kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum optimalnya Tim Koordinasi SPBE serta tingkat pemahaman SDM bidang kominfo, persandian dan statistik yang belum merata;
3. Belum optimalnya jangkauan infrastruktur dan tata kelola TIK serta aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi;
4. Tidak adanya Tim pelaksana Smart City dan Dewan SmartCity.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional. Adapun dampak terhadap pencapaian Dinas

Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Keterbatasan lokasi untuk informasi wilayah.
2. Banyaknya perangkat IT baik software maupun hardware yang belum terintegrasi sehingga pencarian / sinkronisasi data menjadi sulit
3. Belum terhubungnya antar perangkat daerah secara teknologi / IT
4. Masih banyak SDM yang belum mempunyai kompetensi di bidang IT.
5. Masih minimnya sarana dan Prasarana yang tersedia.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah memahami dan mematuhi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan regulasi lainnya di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Dalam rangka implementasi layanan aplikasi, terutama layanan perizinan online, aplikasi e-presisi (absensi) dan e-kinerja diperlukan spesifikasi server yang mencukupi. dalam hal ini server yang dimiliki oleh Diskominfotik belum mendukung untuk implementasi aplikasi dengan baik;
3. Ruang server yang belum terstandarisasi internasional dan belum tersedianya back up plan Disaster Recovery Center (DRC);
4. Tidak adanya anggaran peningkatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang Teknologi Informasi;
5. Masih kurangnya perangkat pendukung jaringan internet dikarenakan usia perangkat yang ada saat ini sudah tidak layak, perangkat pendukung jaringan internet ini berfungi untuk menghubungkan jaringan kepada pengguna;
6. Belum terkoreksinya seluruh media yang bekerjasama

dengan organisasi KBB dan Belum terkoordinasinya pemberitaan dengan perangkat daerah;

7. Dengan telah ditetapkannya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terdapat beberapa kendala terkait tata kelola data di Kab. Bandung Barat :
    a. Bahwa Data statistik yang dikumpulkan harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia terkait data harus memenuhi standar data, harus memiliki metadata harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan harus menggunakan Kode Referensi;
    b. Belum adanya penentuan Data Prioritas yaitu Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data;
    c. Bahwa sesuai Perpres 39 tahun 2019 bahwa Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
8. Dalam rangka integrasi dan publikasi data masih secara manual belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi;
9. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan audit, pertimbangan kelayakan keamanan dalam pembangunan infrastruktur seperti pusat data nasional, sistem jaringan pemerintah, dan badan penghubung layanan pemerintah;
10. Masih rendahnya pengetahuan aparatur sipil perangkat daerah di lingkup Pemkab Bandung Barat tentang keamanan informasi.

Selain hal terurai diatas, penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja perubahan tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan perubahan tahun 2024; dan
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Tahun 2024 Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan RKAP/DPPA Tahun 2024 adalah :

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 21.617.253.076**	**Rp. 24.770.049.968**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 5.229.284.776	Rp. 5.302.743.435
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 16.387.968.300	Rp. 19.467.306.533
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 13.147.321.039**	**Rp. 26.399.803.456**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 13.067.049.200	Rp. 26.322.543.456
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 3.011.839	Rp. 0
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 77.260.000	Rp. 77.260.000
			Jumlah Belanja	**Rp. 34.764.574.115**	**Rp. 51.169.853.424**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp. 34.764.574.115)**	**(Rp. 51.169.853.424)**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat

Dinas Kominfotik (Tabel T-C.29 lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
				Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2024(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=((9/3)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi Dan Informatika									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**BB**	**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dok**		**-**	**11**	**11**	**100 %**	**11**	**22**	**200 %**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	1	2	2	100 %	2	5	250 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	100 %	1	3	300 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	100 %	1	3	300 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Dok	1	1	1	1	100 %	1	3	300 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	1	1	100 %	1	3	300 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	5	5	5	100 %	5	15	375 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37 Dok**		**-**	**28**	**28**	**100 %**	**28**	**56**	**151 %**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	12	-	12	12	100 %	12	36	300 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	-	6	6	100 %	6	18	150 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	1	1	100 %	1	3	300 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Lap	12	2	9	9	100 %	9	27	225%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Lap**		**-**	**1**	**1**	**100 %**	**1**	**3**	**300 %**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	12	-	1	1	100 %	1	3	300 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200**	**200 %**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Unit	4	-	61	61	100 %	61	183	475 %
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dok	12	-	5	5	100 %	4	14	140 %

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200**	**200 %**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	Paket	6	-	9	9	100 %	10	28	280 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	20	-	2	2	100 %	2	6	60 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	8	17	9	9	100 %	9	27	159 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	20	12	35	35	100 %	45	115	958 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Lap**		**-**	**12**	**12**	**100 %**	**12**	**24**	**218 %**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	-	12	12	100 %	12	24	218 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	-	12	12	100 %	12	24	200 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10 Unit**		**2**	**2**	**2**	**100 %**	**10**	**14**	**140 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	2	2	2	100 %	10	14	140 %
Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	-	3	3	100 %	4	7	88 %
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100 %	-	2	200 %
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**100 %**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**5 Unit**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	5	4	12	12	100 %	12	28	560 %
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Meningkat Kreteria**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dok	1	-	4	4	100 %	12	16	400 %
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	7	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dok	1	-	4	4	100	12	16	400 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dok	1	-	-	-	-	3	3	75 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektroni	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	2	-	2	2	100 %	3	5	83 %
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	6	-	2	2	100 %	3	5	500 %
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diiimplementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	Dok	1	-	-	-	-	3	3	75 %
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok	1	-	2	2	100 %	3	5	83 %
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dok	1	-	2	2	100 %	3	5	500 %
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100 %**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**88.50 %**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dok	1	-	-	-	-	12	12	100 %
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok	1	-	12	12	100 %	12	24	200 %

Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	27	-	4	4	100 %	4	8	267 %
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	840	-	3	3	100 %	1	4	400 %
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	49	-	3	3	100 %	9	12	400 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**2 Poin**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2 Poin**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	3	-	4	4	100 %	3	7	233 %
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Orang	46	-	-	-	-	2	2	200 %
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	31	-	-	-	-	2	2	200 %
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**2 Poin**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**322 Indeks**		**-**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**200 %**
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dok	1	-	-	-	-	2	2	200 %
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lap	2	-	-	-	-	-	-	-

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	47	-	-	-	-	4	4	133 %
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anta Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	31	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfotik

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024

(Tabel T-C.30 lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 Analisis (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 Analisis (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfotik			80	n/a	n/a	n/a	82,37	82.50	82.61	82.69	
2	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100	100	100	100	99.66	95.65	94.15	89.81	
3	Persentase Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			100	100	100	100	100	97.62	73.18	98.60	
4	Persentase Program Pengelolaan aplikasi Informatika			100	100	100	100	99.23	93.06	64.51	96.45	
5	Persentase Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			100	100	100	100	99.22	99.05	68.84	87.64	
6	Persentase Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi			100	100	100	100	97.22	99.17	82	81.10	
7	Nilai Sakip Diskominfotik			BB	BB	A	BB	BB 70,20	BB 71.61	BB 71.80	n/a	
8	Indeks SPBE			2.71	2,81	3.00	2.75	2.85	2.65	3.32	3.78	

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Anggaran Sebelum Perubahan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Sesudah Perubahan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024 (n-1)
				Perkiraan Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**Rp. 5.886.509.115**	**Rp. 6.258.067.585**	**BB Huruf Mutu**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp. 100.922.200**	**Rp. 141.062.200**	**10 Dokumen**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 41.440.900	Rp. 43.470.900	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Rp. 5.392.300	Rp. 5.392.300	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Rp. 5.149.700	Rp. 5.149.700	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Rp. 4.496.100	Rp. 4.496.100	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Rp. 4.604.400	Rp. 4.604.400	1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 39.838.800	Rp. 77.948.800	4 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp. 5.270.792.476**	**Rp. 5.316.465.835**	**37 Dokumen**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RP. 5.197.714.776	RP. 5.252.333.435	12 Orang/bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 2.640.800	RP. 2.640.800	12 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 4.287.700	RP. 4.287.700	1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 66.149.200	RP. 57.203.900	12 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp. 32.726.500**	**Rp. 19.659.050**	**1 Laporan**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 3.239.500	Rp. 3.239.500	1 Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 29.487.000	Rp. 16.419.550	12 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp. 165.558.000**	**Rp. 172.262.200**	**100 %**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Rp. 27.093.000	Rp. 27.093.000	4 Unit
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 56.631.000	Rp. 145.169.200	12 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp. 81.154.000**	**Rp. 338.883.800**	**100 %**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	Rp. 20.366.300	Rp. 264.325.300	6 Paket

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp. 5.926.000	Rp. 5.926.000	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Rp. 26.843.400	Rp. 26.843.400	20 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Rp. 7.123.300	Rp. 7.797.100	8 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 20.895.000	Rp. 33.992.000	20 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp. 70.013.000**	**Rp. 56.513.400**	**12 Laporan**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 28.741.200	Rp. 15.241.600	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 41.271.800	Rp. 41.271.800	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp. 165.342.939**	**Rp. 213.221.100**	**10 Unit**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ,Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp. 87.902.900	Rp. 90.402.900	10 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RP. 4.990.000	Rp. 4.990.000	8 Unit
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 72.450.039	Rp. 117.828.200	1 Unit
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**Rp. 13.039.681.800**	**Rp. 16.410.275.585**	**100 %**
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**Rp. 8.960.830.000**	**Rp. 10.809.274.279**	**5 Unit**
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 8.945.360.000	Rp. 10.809.274.279	5 Unit
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Rp. 4.078.851.800**	**Rp. 5.601.001.306**	**Meningkat Kreteria**
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47.431.000	Rp. 83.191.000	1 Dokumen
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 79.554.400	Rp. 5.200.000	1 Dokumen
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Rp. 1.848.780.000	Rp. 1.584.815.500	7 Unit
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp. 229.187.500	Rp. 178.735.500	1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rp. 53.281.500	Rp. 6.851.000	1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Rp. 73.788.000	Rp. 47.616.050	2 Perangkat Daerah

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Rp. 687.449.400	Rp. 684.405.400	6 Unit
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Di implementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	Rp. 485.035.600	Rp. 2.352.532.856	1 Dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	RP. 166.395.000	Rp. 290.933.000	1 Dokumen
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp. 235.409.000	Rp. 364.121.000	1 Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Rp. 73.950.400	Rp. 2.600.000	1 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Rp. 13.936.486.100**	**Rp. 26.890.654.500**	**100 %**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**Rp. 13.936.486.100**	**Rp. 26.890.654.500**	**88.50 %**
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 68.623.000	Rp. 68.623.000	1 Dokumen
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp. 291.785.400	Rp. 418.814.800	1 Dokumen
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Rp. 71.888.100	Rp. 250.016.300	1 Dokumen
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Rp. 837.120.000	Rp. 2.362.166.500	27 Layanan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Rp. 896.216.000	Rp. 507.540.000	840 Orang
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.531.673.600	Rp. 23.283.493.900	49 Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**Rp. 760.948.800**	**Rp. 857.035.450**	**2 Poin**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Rp. 760.948.800**	**Rp. 857.035.450**	**2 Poin**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 541.464.300	Rp. 671.963.950	3 Dokumen
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Rp. 64.190.900	Rp. 62.570.900	46 Orang
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp. 69.687.000	Rp. 84.277.000	1 Dokumen
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Rp. 27.411.000	Rp. 3.000.000	31 Orang
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp. 58.195.600	Rp. 35.223.600	1 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**Rp. 1.140.948.300**	**Rp. 753.820.304**	**2 Poin**

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**Rp. 971.695.300**	**Rp. 643.997.304**	**322 Indeks**
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rp. 109.193.800	Rp. 168.852.804	1 Dokumen
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 538.708.500	Rp. 459.778.500	2 Laporan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Rp. 323.793.000	Rp. 15.366.000	47 Perangkat Daerah
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah**	**Rp. 169.253.000**	**Rp. 109.823.000**	**31 Perangkat Daerah**
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Rp. 169.253.000	Rp. 109.823.000	31 Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfotik

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2024-2026 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
4. Meningkatkan Keamanan Informasi.

5. Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral.

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi setiap tahunnya selalui dievaluasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dievaluasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Aspek penilaian dalam SPBE meliputi domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam

berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama yang belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

a. Perlu dilakukan pemetaan dan penyusunan masterplan pengendalian dan pengawasan;
b. Mewujudkan Data/Informasi guna mendukung program nasional “Satu Data Indonesia;
c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia , khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan data dan informasi melalui program persandian untuk pengamanan informasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Telaahan terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024–2026 dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan perubahan Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Tahun 2024-2026. rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat telah mengakomodir semua program, kegiatan

dan sub kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Perubahan RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikTahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. perencanaan awal dan perubahan anggaran Tahun 2024 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dan hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika ada beberapa kegiatan tambahan maupun kegiatan lanjutan yang memerlukan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan sebagaimana terlihat berikut ini :

Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024

Kabupaten Bandung Barat

(Tabel T-C.31 lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2024					Catatan Penting
Program/ Penting Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Penting Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**34.764.574.115**					**51.169.853.424**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**KBB**	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**BB Huruf Mutu**	**5.886.509.115**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**KBB**	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**BB Huruf Mutu**	**6.258.067.585**	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KBB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**100.922.200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**141.062.200**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.440.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43.470.900	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1 Dokumen	5.392.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1 Dokumen	5.392.300	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.149.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.149.700	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1 Dokumen	4.496.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1 Dokumen	4.496.100	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.604.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.604.400	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.838.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	77.948.800	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KBB**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37 Dokumen**	**5.270.792.476**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37 Dokumen**	**5.316.465.835**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KBB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang /bulan	5.197.714.776	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KBB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.252.333.435	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.640.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.640.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.287.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.287.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	66.149.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	57.203.900	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KBB**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**32.726.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**19.659.050**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KBB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.239.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KBB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.239.500	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KBB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	29.487.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KBB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	16.419.550	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**KBB**	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	165.558.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KBB**	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**172.262.200**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KBB**	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	4 Unit	27.093.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KBB**	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	4 Unit	27.093.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**KBB**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	16.698.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**KBB**	-	-	-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KBB**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	56.631.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KBB**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	145.169.200	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**KBB**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	65.136.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**KBB**	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KBB**	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**81.154.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KBB**	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**338.883.800**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	6 Paket	20.366.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	6 Paket	264.325.300	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.926.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.926.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	26.843.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	26.843.400	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KBB**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	7.123.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KBB**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	7.797.100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20.895.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	33.992.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KBB**	**Jumlah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan/ Lap**	**70.013.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**56.513.400**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.741.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.241.600	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.271.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.271.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19 Unit**	165.342.939	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10 Unit**	**213.221.100**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KBB**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	87.902.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KBB**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	90.402.900	
Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	**KBB**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	**KBB**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.990.000	

Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KBB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.450.039	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KBB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.828.200	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KBB	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**13.936.486.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	KBB	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**26.890.654.500**	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**88.50 %**	**13.936.486.100**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**88.50 %**	**26.890.654.500**	
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	68.623.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	68.623.000	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	291.785.400	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	418.814.800	
Pelayanan Informasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	71.888.100	Pelayanan Informasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	250.016.300	
Layanan Hubungan Media	KBB	Jumlah Layanan Hubungan Media	27 Layanan	837.120.000	Layanan Hubungan Media	KBB	Jumlah Layanan Hubungan Media	27 Layanan	2.362.166.500	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	KBB	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	239.180.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	KBB	-	-	-	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	840 Orang	896.216.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	840 Orang	507.540.000	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49 Unit	11.531.673.600	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49 Unit	23.283.493.900	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	KBB	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**100 %**	**13.039.681.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	KBB	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**100 %**	**16.410.275.585**	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**5 Unit**	**8.960.830.000**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**5 Unit**	**10.809.274.279**	
Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1** Dokumen	15.470.000	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**-**	**-**	-	

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	8.945.360.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	10.809.274.279	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Meningkat Kreteria**	**4.078.851.800**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Meningkat Kreteria**	**5.601.001.306**	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.431.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.191.000	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	79.554.400	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	5.200.000	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	KBB	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	1.848.780.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	KBB	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	1.584.815.500	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	229.187.500	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	178.735.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	53.281.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	6.851.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	73.788.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektroni	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	47.616.050	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	KBB	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Dokumen	687.449.400	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	KBB	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	684.405.400	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	KBB	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	98.590.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	KBB	-	-	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	KBB	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diiimplementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	1 Dokumen	485.035.600	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	KBB	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Di implementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	1 Dokumen	2.352.532.856	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	166.395.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	290.933.000	
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	KBB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	235.409.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	KBB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	364.121.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	KBB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	73.950.400	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	KBB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	2.600.000	

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**2 Poin**	**760.948.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**2 Poin**	**857.035.450**	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2 Poin**	**760.948.800**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2 Poin**	**857.035.450**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	541.464.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	671.963.950	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	KBB	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	46 Orang	64.190.900	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	KBB	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	46 Orang	62.570.900	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	69.687.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	84.277.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	27.411.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	3.000.000	
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	KBB	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	58.195.600	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	KBB	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	35.223.600	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**2 Poin**	**1.140.948.300**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**2 Poin**	**753.820.304**	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**322 Indeks**	**971.695.300**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**322 Indeks**	**643.997.304**	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	109.193.800	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	168.852.804	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	KBB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	538.708.500	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	KBB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	459.778.500	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	323.793.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	15.366.000	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anta Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**	**169.253.000**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**	**109.823.000**	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	169.253.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	109.823.000	

Perencanaan awal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 yang bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp. 34.764.574.115.00,- dan hasil analisis kebutuhan perubahan tahun 2024 bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp.51.169.853.424.00,- Berdasarkan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik menghasilkan kesepakatan diantaranya bahwa perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik telah disesuaikan dengan rancangan RKPD perubahan tahun 2024 dan target capaian yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan dan target capaian di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2024 sudah sejalan dan bisa mengakomodasi kebutuhan stakeholder Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.

2.5. Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan

Dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat mengambil pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pembuatan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam merumuskan program internal, dinas ini juga memberikan perhatian besar pada usulan-usulan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan yang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan TA. 2024 sebelum dan sesudah perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat mencoba semaksimal mungkin memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Daerah

Kabupaten Bandung Barat. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pemerintah pusat. Usulan ataupun permintaan dari Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat melalui mekanisme Forum RKPD, Musrenbang, maupun melalui surat usulan secara langsung melalui dinas. Bebagai permasalahan yang terjadi berkaitan keterbukaan informasi publik adalah manajemen keamanan informasi, insfrastruktur TIK serta ketimpangan wilayah yang belum semuanya terjangkau sarana informasi-informasi yang memadai. Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah perlu dilakukannya sistem manajeman keamanan informasi, pembangunan insfrastruktur TIK serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat

Dinas Kominfotik (Tabel T-C.32 lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif sebelum perubahan Tahun 2024 (Rp)	Pagu Indikatif sesudah perubahan Tahun 2024 (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**KBB**	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**5.886.509.115**	**6.258.067.585**	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.922.200**	**141.062.200**	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.440.900	43.470.900	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	5.392.300	5.392.300	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	5.149.700	5.149.700	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	4.496.100	4.496.100	

7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	4.604.400	4.604.400	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KBB**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.838.800	77.948.800	
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.270.792.476**	**5.316.465.835**	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**KBB**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.197.714.776	5.252.333.435	
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	2.640.800	2.640.800	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.287.700	4.287.700	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	66.149.200	57.203.900	
14	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**32.726.500**	**19.659.050**	
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**KBB**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.239.500	3.239.500	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.487.000	16.419.550	
17	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KBB**	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**165.558.000**	**172.262.200**	
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KBB**	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	27.093.000	27.093.000	
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**KBB**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16.698.000	-	
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KBB**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	56.631.000	145.169.200	
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**KBB**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.136.000	**-**	
22	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KBB**	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81.154.000**	**338.883.800**	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	20.366.300	264.325.300	

24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.926.000	5.926.000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	26.843.400	26.843.400	
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KBB**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7.123.300	7.797.100	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.895.000	33.992.000	
28	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**70.013.000**	**56.513.400**	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.741.200	15.241.600	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41.271.800	41.271.800	
31	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**165.342.939**	**213.221.100**	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KBB**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	87.902.900	90.402.900	
33	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	**KBB**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.990.000	4.990.000	
34	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KBB**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72.450.039	117.828.200	
35	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**KBB**	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**13.039.681.800**	**16.410.275.585**	
36	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**8.960.830.000**	**10.809.274.279**	
37	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.470.000	-	
38	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.945.360.000	10.809.274.279	
39	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**4.078.851.800**	**5.601.001.306**	

40	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.431.000	83.191.000	
41	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	79.554.400	5.200.000	
42	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	**KBB**	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1.848.780.000	1.584.815.500	
43	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	229.187.500	178.735.500	
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informas	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	53.281.500	6.851.000	
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektroni	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	73.788.000	47.616.050	
46	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	**KBB**	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	687.449.400	684.405.400	
47	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	**KBB**	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	98.590.000	**-**	
48	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	**KBB**	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diiimplementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	485.035.600	2.352.532.856	
49	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	166.395.000	290.933.000	
50	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	**KBB**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	235.409.000	364.121.000	
51	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	**KBB**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	73.950.400	2.600.000	
52	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**KBB**	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**13.936.486.100**	**26.890.654.500**	
53	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**13.936.486.100**	**26.890.654.500**	

54	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	68.623.000	68.623.000	
55	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	291.785.400	418.814.800	
56	Pelayanan Informasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	71.888.100	250.016.300	
57	Layanan Hubungan Media	**KBB**	Jumlah Layanan Hubungan Media	837.120.000	2.362.166.500	
58	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	**KBB**	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	239.180.000	-	
59	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	896.216.000	507.540.000	
60	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.531.673.600	23.283.493.900	
61	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**760.948.800**	**857.035.450**	
62	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**760.948.800**	**857.035.450**	
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	541.464.300	671.963.950	
64	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	**KBB**	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	64.190.900	62.570.900	
65	Membangun Metadata Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	69.687.000	84.277.000	
66	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	27.411.000	3.000.000	
67	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	**KBB**	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	58.195.600	35.223.600	
68	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**1.140.948.300**	**753.820.304**	
69	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**971.695.300**	**643.997.304**	

70	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	109.193.800	168.852.804	
71	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	**KBB**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	538.708.500	459.778.500	
72	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	323.793.000	15.366.000	
73	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anta Perangkat Daerah**	**169.253.000**	**109.823.000**	
74	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	169.253.000	109.823.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Program Nasional

Dalam rangka menciptakan Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur - unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.

d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

Sehubungan dengan keamanan informasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat untuk lingkup Data Center sejak tahun 2020. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik membangun interaksi Pemda dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi publik melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan,

aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik).

Dalam penyebaran informasi di Daerah Kabupaten Bandung Barat mempunyai tantangan tersendiri, Belum semua kecamatan/desa terjangkau sarana informasi yang memadai Melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke Kecamatan/desa-desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberadaan KIM adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (disseminator) informasi kepada masyarakat.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Berikut tantangan dan peluang serta Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

1. Tantangan Tantangan yang dihadapi lima tahun ke depan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi.

b. Tenaga operator di OPD, kab/kota dan kecamatan belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi.

c. kemanfaatan internet dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;

d. penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

e. Lemahnya kebijakan sebagai acuan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

f. Rencana induk/strategic plan/masterplan/blueprint teknologi informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat;

g. Belum optimalnya integrasi data dan interoperabilitas sistem informasi;

h. Belum optimalnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

2. Peluang Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK.

b. Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

c. Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK.

d. Tersebarnya Informasi berbasis TIK.

e. Meningkatnya mediasi dan ajudikasi sengketa informasi.

f. Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat.

3. Isu Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Guna mengatasi permasalahan pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan beberapa isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah serta nasional di bidang komunikasi dan informatika. Berikut beberapa isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan :

a. Pembangunan Infrastruktur e-government;

b. Peningkatan Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik;

c. Diseminasi Informasi;

d. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

e. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

f. Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

g. Integrasi Data guna tercapai satu data Jabar;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja T.A 2024 Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan apabila didukung oleh prinsip yang dapat meningkatkan kepercayaan publik yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, pemerintah terbuka dalam menginformasikan pelaksanaan tugas dan kinerjanya, serta terbuka dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini juga berarti membuka peluang bagi publik untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi,

dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Asas-asas umum pemerintahan negara yang baik menurut Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai yang telah diubah menjadi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan asas pemerintahan yang baik meliputi :

1. Asas kepastian hokum.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas profesionalitas.
7. Asas akuntabilitas

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 tidak bisa mendasarkan kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 tetap mengacu pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025; Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2024-2026; dan Isu Strategis Aktual. Adapun

tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 adalah :

1. T1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sedangkan untuk Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk Renstra 2024 – 2026 yang akan di capai sebagai berikut :

1. S1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator; a. Nilai SAKIP Diskominfotik.

2. S2. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) dengan indikator : a. Indeks SPBE

Tujuan dan Sasaran Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-		
			1	2	3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Diskominfotik	**BB 70,50**	**BB 71,00**	**BB 71,20**
	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	**2.75**	**2.85**	**3.00**

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi, akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Tipe Indikator terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuan memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka yang digunakan sebagai indikator kinerja menghasilkan beberapa tipe indikator seperti :

1. Kualitatif : menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang).
2. Persentase : menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%).

3. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).

3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Diskominfotik

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Guna mendapat hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, secara terinci disusun program, indikator, dan kegiatan dari Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dalam Tahun Anggaran 2024 dan memiliki target kinerja yang akan dicapai sesuai Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik yang bersumber dari anggaran APBD merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator :
  a. Nilai SAKIP Diskominfotik.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2 :

- Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) indikator :
  a. Indeks SPBE

2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan :**
   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan :**
   a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan :**
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan :**

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik **(Tabel T-C.33 lampiran Permendagri 86 tahun 2017)**

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Perubahan Tahun 2024					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**KBB**	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**BB Huruf Mutu**	**5.886.509.115**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**KBB**	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**BB Huruf Mutu**	**6.258.067.585**	APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KBB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**100.922.200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**141.062.200**	APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.440.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43.470.900	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1 Dokumen	5.392.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1 Dokumen	5.392.300	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.149.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.149.700	DAU

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1 Dokumen	4.496.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1 Dokumen	4.496.100	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.604.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**KBB**	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.604.400	DAU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KBB**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.838.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KBB**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	77.948.800	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KBB**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37 Dokumen**	**5.270.792.476**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37 Dokumen**	**5.316.465.835**	APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**KBB**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang /bulan	5.197.714.776	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**KBB**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang /bulan	5.252.333.435	DAU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.640.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.640.800	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.287.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.287.700	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	66.149.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	57.203.900	DAU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KBB**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**32.726.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**19.659.050**	APBD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**KBB**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.239.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**KBB**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.239.500	DAU
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	29.487.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	16.419.550	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**KBB**	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	165.558.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KBB**	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**172.262.200**	APBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KBB**	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	4 Unit	27.093.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KBB**	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	4 Unit	27.093.000	DAU
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**KBB**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	16.698.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**KBB**	-	-	-	DAU
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KBB**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	56.631.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KBB**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	145.169.200	DAU
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**KBB**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	65.136.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**KBB**	**-**	**-**	**-**	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KBB**	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**81.154.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KBB**	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**338.883.800**	APBD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	6 Paket	20.366.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	6 Paket	264.325.300	DAU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.926.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KBB**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.926.000	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	26.843.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KBB**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	26.843.400	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KBB**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	7.123.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KBB**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	7.797.100	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20.895.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KBB**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	33.992.000	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KBB**	**Jumlah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan/ Lap**	**70.013.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**56.513.400**	APBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.741.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.241.600	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.271.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KBB**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.271.800	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19 Unit**	165.342.939	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10 Unit**	**213.221.100**	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KBB**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	87.902.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KBB**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	90.402.900	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	**KBB**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	**KBB**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.990.000	DAU
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KBB**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.450.039	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KBB**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.828.200	DAU
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**KBB**	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**13.936.486.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**KBB**	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**26.890.654.500**	APBD
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**88.50 %**	**13.936.486.100**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**88.50 %**	**26.890.654.500**	APBD
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	68.623.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	68.623.000	DAU
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	291.785.400	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	418.814.800	DAU
Pelayanan Informasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	71.888.100	Pelayanan Informasi Publik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	250.016.300	DAU
Layanan Hubungan Media	**KBB**	Jumlah Layanan Hubungan Media	27 Layanan	837.120.000	Layanan Hubungan Media	**KBB**	Jumlah Layanan Hubungan Media	27 Layanan	2.362.166.500	DAU

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	**KBB**	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	239.180.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	**KBB**	-	-	-	DAU
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	840 Orang	896.216.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	**KBB**	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	840 Orang	507.540.000	DAU
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49 Unit	11.531.673.600	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49 Unit	23.283.493.900	DAU
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**KBB**	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**100 %**	**13.039.681.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**KBB**	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**100 %**	**16.410.275.585**	APBD
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**5 Unit**	**8.960.830.000**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**5 Unit**	**10.809.274.279**	APBD
Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1** Dokumen	15.470.000	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	-	**-**	-	DAU
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	8.945.360.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	10.809.274.279	DAU
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Meningkat Kreteria**	**4.078.851.800**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Meningkat Kreteria**	**5.601.001.306**	APBD
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.431.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.191.000	DAU
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	79.554.400	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	5.200.000	DAU
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	**KBB**	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	1.848.780.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	**KBB**	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	1.584.815.500	DAU
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	229.187.500	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	178.735.500	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	53.281.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	**KBB**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	6.851.000	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektroni	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	73.788.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektroni	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	47.616.050	DAU
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	**KBB**	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Dokumen	687.449.400	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	**KBB**	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	684.405.400	DAU

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	**KBB**	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	98.590.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	**KBB**	-	-	-	DAU
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	**KBB**	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diiimplementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	1 Dokumen	485.035.600	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	**KBB**	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Di implementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	1 Dokumen	2.352.532.856	DAU
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	166.395.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	**KBB**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	290.933.000	DAU
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	**KBB**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	235.409.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	**KBB**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	364.121.000	DAU
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	**KBB**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	73.950.400	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	**KBB**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	2.600.000	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**2 Poin**	**760.948.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**2 Poin**	**857.035.450**	APBD
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2 Poin**	**760.948.800**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2 Poin**	**857.035.450**	APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	541.464.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	671.963.950	DAU
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	**KBB**	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	46 Orang	64.190.900	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	**KBB**	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	46 Orang	62.570.900	DAU
Membangun Metadata Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	69.687.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	**KBB**	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	84.277.000	DAU
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	27.411.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	3.000.000	DAU
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	**KBB**	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	58.195.600	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	**KBB**	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	35.223.600	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**2 Poin**	**1.140.948.300**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**2 Poin**	**753.820.304**	APBD
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**322 Indeks**	**971.695.300**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**322 Indeks**	**643.997.304**	APBD
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	109.193.800	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**KBB**	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	168.852.804	DAU
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	**KBB**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	538.708.500	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	**KBB**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	459.778.500	DAU

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	323.793.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**KBB**	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	15.366.000	DAU
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anta Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**	**169.253.000**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**	**109.823.000**	APBD
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	169.253.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	109.823.000	DAU

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik perlu mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan. Saat ini, penggunaan TIK bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi suatu keharusan. TIK dapat menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Penggunaan TIK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024 mempunyai 5 program, 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Alokasi Pendanaan Perencanaan Awal Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 34.764.574.115.00,- dan Alokasi Pendanaan Perencanaan Perubahan sebesar Rp. 51.169.853.424.00,- Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur TIK, pelatihan sumber daya manusia, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, peningkatan keamanan informasi, serta kampanye dan edukasi masyarakat. Penentuan anggaran secara rinci harus didasarkan pada kebutuhan yang spesifik dan ketersediaan sumber daya keuangan yang tersedia.

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024- 2026. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dapat dicapai. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, sebagai berikut :

RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif sebelum perubahan 2024	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif sesudah perubahan 2024	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**34.764.574.115**	51.169.853.424	**APBD**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**32.862.677.015**	49.558.997.670	**APBD**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**KBB**	**Nilai SAKIP Diskominfotik**	**BB Huruf Mutu**	**5.886.509.115**	**6.258.067.585**	**APBD**
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**100.922.200**	**141.062.200**	**APBD**
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.440.900	43.470.900	DAU
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1 Dokumen	5.392.300	5.392.300	DAU
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.149.700	5.149.700	DAU

0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1 Dokumen	4.496.100	4.496.100	DAU
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.604.400	4.604.400	DAU
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.838.800	77.948.800	DAU
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37 Dokumen**	**5.270.792.476**	**5.316.465.835**	**APBD**
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KBB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang /bulan	5.197.714.776	5.252.333.435	DAU
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.640.800	2.640.800	DAU
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.287.700	4.287.700	DAU
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	66.149.200	57.203.900	DAU

2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**32.726.500**	**19.659.050**	**APBD**
0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KBB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.239.500	3.239.500	DAU
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KBB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	29.487.000	16.419.550	DAU
2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KBB**	**Presentasi terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**165.558.000**	**172.262.200**	**APBD**
0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	KBB	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai	4 Unit	27.093.000	27.093.000	DAU
0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KBB	-	-	16.698.000	-	DAU
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KBB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	56.631.000	145.169.200	DAU
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KBB	**-**	**-**	65.136.000	**-**	DAU
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KBB**	**Persentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**81.154.000**	**338.883.800**	**APBD**
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KBB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	6 Paket	20.366.300	264.325.300	DAU

0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KBB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.926.000	5.926.000	DAU
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KBB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	26.843.400	26.843.400	DAU
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KBB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	7.123.300	7.797.100	DAU
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KBB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20.895.000	33.992.000	DAU
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**70.013.000**	**56.513.400**	**APBD**
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KBB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.741.200	15.241.600	DAU
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KBB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.271.800	41.271.800	DAU
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KBB**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10 Unit**	**165.342.939**	**213.221.100**	**APBD**
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KBB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	87.902.900	90.402.900	DAU

0006	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	KBB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.990.000	4.990.000	DAU
0011	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KBB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.450.039	117.828.200	DAU
16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**KBB**	**Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**13.936.486.100**	**26.890.654.500**	**APBD**
2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**	**88.50 %**	**13.936.486.100**	**26.890.654.500**	**APBD**
0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	68.623.000	68.623.000	DAU
0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	291.785.400	418.814.800	DAU
0006	Pelayanan Informasi Publik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	71.888.100	250.016.300	DAU
0007	Layanan Hubungan Media	KBB	Jumlah Layanan Hubungan Media	27 Layanan	837.120.000	2.362.166.500	DAU
0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	KBB	-	-	239.180.000	-	DAU

0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	KBB	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	840 Orang	896.216.000	507.540.000	DAU
0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49 Unit	11.531.673.600	23.283.493.900	DAU
16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**KBB**	**Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE**	**100 %**	**13.039.681.800**	**16.410.275.585**	**APBD**
2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**	**5 Unit**	**8.960.830.000**	**10.809.274.279**	**APBD**
0002	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**-**	**-**	15.470.000	-	DAU
0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	8.945.360.000	10.809.274.279	DAU
2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE**	**Meningkat Kreteria**	**4.078.851.800**	**5.601.001.306**	**APBD**

0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.431.000	83.191.000	DAU
0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	79.554.400	5.200.000	DAU
0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	KBB	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	1.848.780.000	1.584.815.500	DAU
0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	229.187.500	178.735.500	DAU
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	53.281.500	6.851.000	DAU
0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	73.788.000	47.616.050	DAU
0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	KBB	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	687.449.400	684.405.400	DAU
0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	KBB	-	-	98.590.000	-	DAU

0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	KBB	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Di implementasikan Sesuai dengan Master Plan Smart City	1 Dokumen	485.035.600	2.352.532.856	DAU
0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	166.395.000	290.933.000	DAU
0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	KBB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	235.409.000	364.121.000	DAU
0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	KBB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	73.950.400	2.600.000	DAU
20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**	**2 Poin**	**760.948.800**	**857.035.450**	**APBD**
2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2 Poin**	**760.948.800**	**857.035.450**	**APBD**
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	541.464.300	671.963.950	DAU

0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	KBB	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	46 Orang	64.190.900	62.570.900	DAU
0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	69.687.000	84.277.000	DAU
0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	27.411.000	3.000.000	DAU
0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	KBB	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	58.195.600	35.223.600	DAU
21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KBB**	**Tingkat Kematangan Penerpan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah**	**2 Poin**	**1.140.948.300**	**753.820.304**	**APBD**
2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Indeks Keamanan Informasi KAMI**	**322 Indeks**	**971.695.300**	**643.997.304**	**APBD**
0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	109.193.800	168.852.804	DAU
0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	KBB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	538.708.500	459.778.500	DAU

0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	323.793.000	15.366.000	DAU
2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**KBB**	**Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**	**169.253.000**	**109.823.000**	**APBD**
0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	169.253.000	109.823.000	DAU

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan implementasi dan operasionalisasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja Perubahan dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi guna mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan urusan komunikasi dan informatika di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) sebagai pusat komunikasi dan koordinasi antara SKPD untuk penyampaian informasi yang relevan, koordinasi respons, serta kolaborasi dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam peningkatan Command Center, Sosialisasi Digital Desa, Aplikasi dan KIM di Kabupaten Bandung Barat, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi.

Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan, komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik mutlak diperlukan untuk tercapaianya sasaran satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung Barat, 8 Oktober 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bandung Barat,

YOPPIE INDRAWAN ISKANDAR,SE
NIP.197301121999011001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)

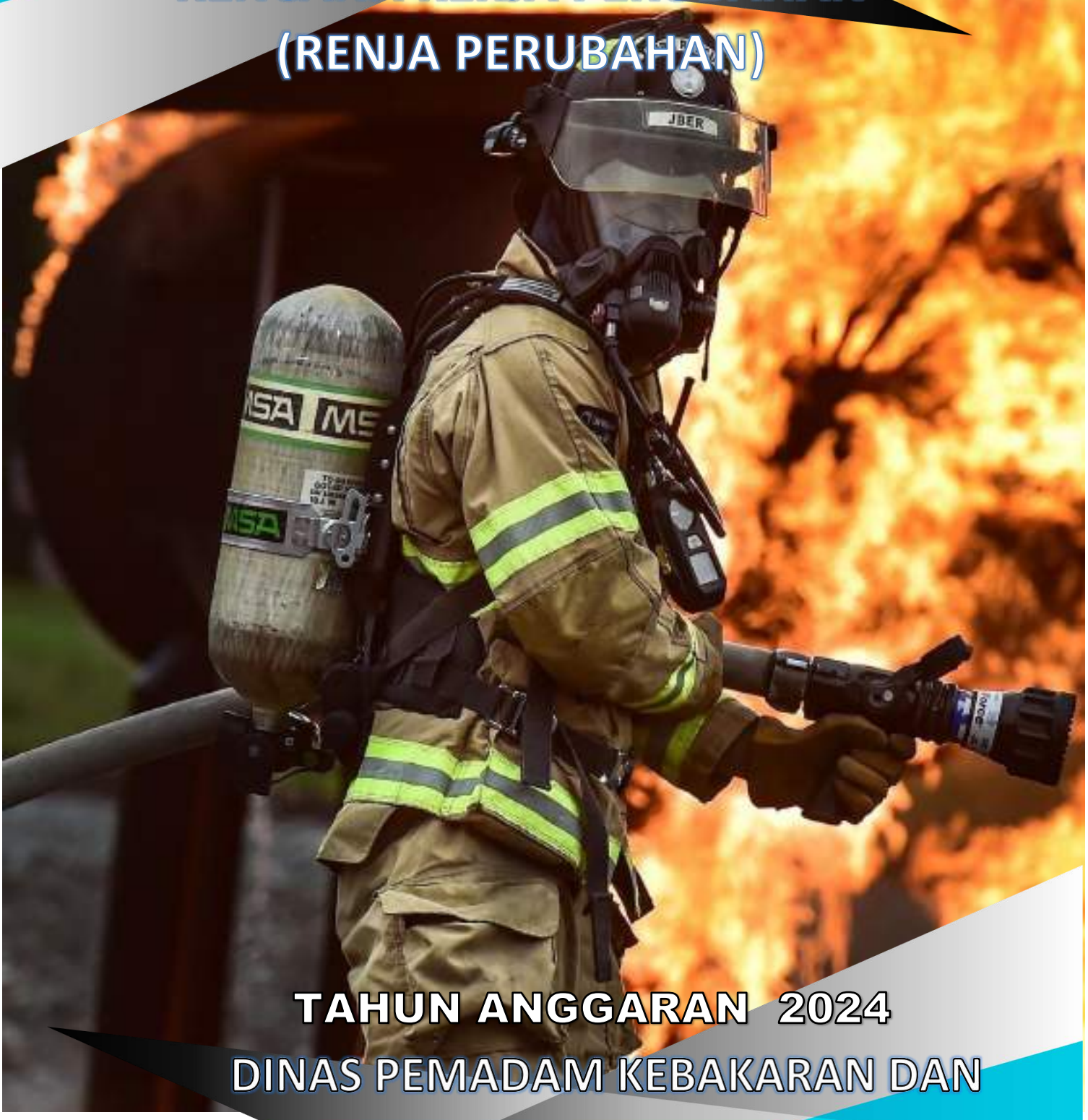

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat dapat diselesaikan. Penyelesaian Rencana Kerja (Renja) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat

Penyusunan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan penyelamatan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dinas yang baru terbentuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah diwilayah Kabupaten Bandung Barat secara signifikan, efektif dan disiplin.

Bandung Barat , Agustus 2024

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Dra. SITI AMINAH ANSHORIAH M,Pd
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19690626 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG ..... - 1

1.2 LANDASAN HUKUM ..... - 7

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ..... - 10

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ..... - 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..... - 13

2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT . - 14

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... - 22

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ..... - 23

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 27

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..... - 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 56

BAB V PENUTUP..... 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat..... - 17
Tabel 2 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ..... - 22
Tabel 2 3 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 26
Tabel 2 4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... - 29
Tabel 2 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ..... - 35

Tabel 3 1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri.. - 36
Tabel 3 2 Perumusan KonsepDalam Rangka Penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 ..... - 47

Tabel 3 3 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan..... ..... - 50
Tabel 3 4 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan..... 51

Tabel 3 5 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ...- 52

Tabel 3 6 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat..... 55

Tabel 4 1 Pagu Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2026 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penerapan SPM Urusan Pemadam Kebakaran 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penysunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Renstra merupakan dokumen strategis perangkat daerah untuk perencanaan 5 (lima) tahunan, memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaannya. Renstra berfungsi sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat.

Rencana kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kerja ditetapkanuntuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sebagaimana

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten BandungBarat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat jo Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dijelaskan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Selain itu, dalam melaksanakan tugas, dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran.
d. Pelaksanaan administrasi dinas ssuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan bentuk implemantasi pelaksana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sekaligus mempedomani RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bandung Barat Tahun 2021, tertanggal 30 Juli 2020.

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi.

Namun Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang menurut *World Health Organization* (WHO) kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renja. Khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis satu tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemiCovid-19 tersebut akan berakhir sehingga diberlakukan Undang-undang No.2 Tahun 2020 tentang *"Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan*

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang".

Wabah Corona memaksa seluruh pemerintah daerah untuk merevisi perencanaan pembangunan masing-masing pemerintah daerah. Penyesuaian target menjadi agar menjadi lebih realistis sesuai dengan keadaan terkini dan prioritas jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemi *Covid 19*. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Kabupaten Bandung Barat akibat pandemi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya sehubungan dengan adanya pandemi *Covid 19* maka perlu adanya penyesuaian Renja Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid19 agar dapat menenentukan langkah yang tepat, cepat, terarah dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dasar perubahan tersebut disesuaikan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah, Perubahan RPJMD yang telah dilaksanakandan perubahan SOTK.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang *"*Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan", Permendagri No.70. Tahun 2019 tentang "Sistem Informasi Pemerintah Daerah"*,* dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang *"*Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*".* Renstra PD Tahun 2019-2023 merupakan rancangan kerangka ekonomi PD, prioritas pembangunan dan kewajiban PD. Renstra merupakan dokumen PD yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas yang disertai adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2019-2023 dan perubahan regulasi Nasional maka Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya menyatu dengan Pol-PP Kabupaten Bandung Barat melakukan kegiatan perencanaan strategis Perangkat Daerah dengan menyusun Renstra Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat.

Proses perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kabakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Perencanaan 2024-2026, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan perubahan rencana strategis mendorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta mampu eksis dan unggul serta melakukan perubahan ke arah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat, merupakan tindak lanjut dari visi, misi, program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024-2026 yang menjadi salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikut dijelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan

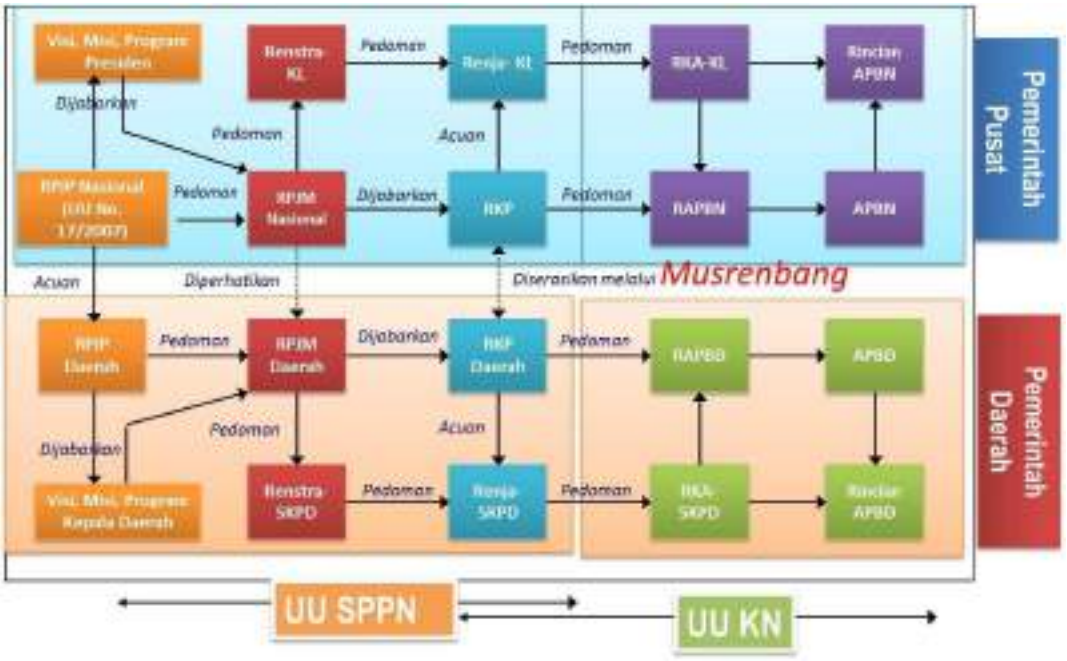

Perencanaan Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun Kedua untuk periode perencanaan pembangunan tahun 2024-2026, sehingga dasar yang diacu adalah RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana yang telag diubah dengan Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 serta RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

Secara umum, substansi Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bandung Barat berisi prioritas program dan kegiatan yang merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratik, bottom up dan

top down yang dihimpun secara partisipatif dan politis serta melalui proses sinkronisasi dalam forum Perangkat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam tahapan penganggaran, hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undag-undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permen PU. Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 dan 2019 Tentang PakaianDinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

20. Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota.

21. Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
27. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai acuan atau merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2024 - 2026. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan PD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana;

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh PD;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas- tugas sesuai dengan kewenangannnya;
4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
6. Mewujudkan visi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam memberikan pelayanan yang terbuka, optimal dan prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Berdasarkan amanat konstitusi salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran.sesuai dengan Fungsi dari dinas pemadam kebakaran yang sangat sentral dimana dinas pemadam kebakaran memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan.

Petugas teknis lapangan atau lebih sering disebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Petugas inilah yang dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor Pemadam kebakaran karena petugas teknis lapanganlah yang menentukan buruk atau baiknya kualitas pelayanan yang diberikan. Institusi Pemadam kebakaran merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan ini tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti

hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung Barat agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Jam kerja 1x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih popular dengan anggota pemadam kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 telah membuat 2 (dua) program yang sifatnya supporting program terhadap program utama. program utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.2 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan program tersebut diantaranya:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan Sebagai berikut :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
    e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
    f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
    c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semester SKPD
3. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
    b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan
    f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
    a. Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
    b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah

    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

    b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2.2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, pengendalian dan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub kegiatan

    a. Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

    b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

    a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Tabel 2.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun 2024

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan (output)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan					Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Tahun 2023					Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
			Target Kinerja		**Realisasi Target Kinerja**				**Target**			
			Capaian		**Hasil Program dan Keluaran**				**Program**	**Realisasi**		
			(Renstra PD)						**Kegiatan**	**Capaian Program**		
			Tahun 2024		**Kegiatan s/d**					**dan Kegiatan**	**Tingkat Capaian Realisasi**	
					Tahun 2023	**Target Renja PD**	**Realisasi Renja PD**	**Tingkat Realisasi**	**(Renja PD Tahun 2024)**	**s/d tahun berjalan**	**Target Renstra (%)**	
						Tahun 2023	**Tahun 2023**	**%**		**-2024**		
										10		
			4		5	6	7	8	9	(5+7+9)	11=(10/4)	
1.05.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah/kota**				6.496.605.851			9.443.140.200			
1.05.01.2.01	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran evaluasi Kinerja perangkat Daerah	100	%		115.900.800			525.890.000			
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		100.991.600			493.662.800			

1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen		3.000.200			5.052.200			
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	Dokumen		3.000.200			7.000.000			
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	Dokumen		3.000.200			5.015.000			
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	Dokumen		3.000.200			7.990.000			
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan		2.908.400			7.170.000			
1.05.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			6.642.718.914			
1.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Persen		-			6.623.742.914			
1.05.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		4.356.200			10.100.000			
1.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan		243.284.150			8.876.000			
1.05.01.2.05.02	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**46.236.500**			81.995.900			
1.05.01.2.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		-			81.995.900			
1.05.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**					320.690.796			**776.880.296**			
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3	Paket		90.553.596			125.509.696			
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	3	paket		63.914.200			125.816.100			

		Kantor										
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan rumah tangga	3	Paket		38.207.100			28.159.800			
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor	6	Paket		88.366.100			405.445.200			
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	1	Paket		13.649.800			20.669.500			
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		26.000.000			13.000.000			
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		122.362.000			58.280.000			
1.05.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				9.100.700			6.125.200			
01.2.07.1.5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1	Unit		9.100.700			6.125.200			

1.05.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Jenis		90.800.000			10.850.000			
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	12	Laporan		90.800.000			3.750.000			
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	12	Laporan		-			7.100.000			
1.05.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah				538.307.416			1.398.679.890			
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operassional atau lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operassional atau lapangan	11	Unit		289.650.000			749.850.000			
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	4	unit		248.657.416			648.829.890			
1.05.04	***PROGRAM PENCEGAHAN ,PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN***	Terlaksananya Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran	12	Laporan		**4.893.688.250**			4.403.117.650			
1.05.04.2.01	**PENCEGAHAN , PENGENDALIAN PEMADAMAN ,PENYELAMATAN DAN PENANGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.834.088.250			**4.403.117.650**			
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan		3.306.045.150			2.798.411.600			

1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25	Unit					1.604.706.050			
1.05.04.2.01.13	**INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN**	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Kegiatan		59.600.000			0			
1.05.04.2.01.14	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Dokumen		59.600.000			**0**			

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Indikator	Kategori		Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
		SPM/Standar Nasional	IKU	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan		41 Menit								
2	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dan kejadian lainnya kabupaten/kota		80 %								
3	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi penyelamatan		82 %								

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam dan Penyelamatan, perlunya menetapkan permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong terlaksananya program-program kegiatan.

Dalam penyusunan program belum terintegritasnya perencanaan program secara lintas sektor dan wilayah tidak terpadu, maka diperlukannya pemahaman standar teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebakaran, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu-isu urusan kebakaran, maka terdapat beberapa isu penting Kabupaten Bandung Barat yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada waktu yang akan datang perlu digali lebih dalam lagi mengingat kapasitas personil yang ada beserta pemberdayaan personilnya belum sepenuhnya optimal. Pemadam kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu pelaksana teknis yang melayani masyarakat selama 1x24 jam. Guna memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, maka seluruh anggota wajib menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selain itu, kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai perlu ditingkatkan mengingat masih kurangnya sarana dan prasarana alat

pemadam kebakaran dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Sehingga dipandang perlu adanya standardisasi sarana dan prasarana untuk kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal lain yang menjadi kendala juga adalah belum adanya penetapan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Bandung Barat. Tidak adanya wilayah manajemen tersebut akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat seperti waktu tempuh ke tempat kejadian kebakaran. Selain jarak yang cukup jauh dari pos wilayah yang ada.

2.4.2 Permasalahan

Sebagaimana telah diketahui bahwa tugas dan fungsi institusi pemadam kebakaran dan Penyelamatan bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. *Pra kebakaran* dengan lingkup kegiatan dalam situasi melakukan pencegahan seperti melakukan pemetaan, pendeteksian, mitigasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. *Operasi Pemadamanan Kebakaran* dengan lingkup kegiatan meliputi; komunikasi, tindakan kajian dan analisis pemadamanan secara cepat tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda. Pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; pendataan, analisis kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekostruksi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat saat ini memiliki 4 (Empat) pos wilayah kerja (Lembang, Cikalong Wetan, Cililin dan Cipatat) dan 1 (satu) Mako (Padalarang) yang masih menyatu dengan kesekretariatan. Hal tersebut tentunya tidak ideal untuk

Dinas yang melayani 16 Kecamatan dengan 165 Desa. Sampai tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten bandung Barat mencapai 1.826.946 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.305,77 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 1.238 jiwa/km². Sedangkan untuk memenuhi standar SPM di setiap Kecamatan diperlukan 16 Pos Wilayah kerja Pemadam Kebakaran. Setiap pos terdiri dari 1unit mobil pemadam dengan personil 25 orang di bagi ke dalam 3 regu (1 danru dan 7 anggota) dibawahi oleh 1 Danton. Dilihat dari kebutuhan SPM tersebut untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat di perlukan 400 Aparatur Pemadam Kebakaran.

Atas dasar itu tentunya memberikan pokok-pokok Permasalahan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

b) Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

c) Perlu adanya penambahan pos dengan rincian setiap populasi penduduk 30.000 jiwa harus dilindungi 1 Pos Kebakaran (tingkat Kelurahan), setiap populasi 120.000 jiwa harus dilindungi 1 Kantor Sektor Pemadam Kebakaran (tingkat Kecamatan), sedang untuk populasi 1.500.000 jiwa harus dilindungi 1 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (tingkat Kabupaten/ Kotamadya).

d) Perlu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;

e) Perlunya sosialisasi resiko kebakaran terhadap pemilik bangunan yang tidak memperhatikan standar keselamatan gedung.

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	• Kualitas dan Kuantitas SDM • Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana	• Belum seluruh SDM memperoleh Diklat Teknis • Kekurangan Alat Operasional
B	Area Cakupan Wilayah	Pos Pemadam masih terbatas	Kantor Operasional
C	Partisipasi Masyarakat	Kurang optimalnya Relawan	Program pelatihan yang tidak berkelanjutan

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.4.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Program

Dinas Pemadam Kebakaran Dan penyelamatan Kabupaten Bandung Barat adalah merupakan salah satu Dinas dalam Struktur Organisasi Pemerintah Bandung Barat yang baru terbentuk dengan Perda No 8 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang kondisi obyektif dalam pelayanan yang diberikan belum optimal. Banyak permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya layanan tersebut antara lain, kecakapan SDM masih sangat rendah, kurangnya sarana dan prasarana operasional dan belum menempatkan kepuasan pengguna sebagai suatu keharusan.

Sistem manajemen kepegawaian yang menjadi salah satu kendala tidak tercapainya suatu profesionalisme. Seharusnya diadakan pembenahan secara menyeluruh yang meliputi sistem rekruitmen pegawai, pengukuran kinerja, sistem penggajian maupun penerapan *reward* yang konsisten dan jelas bagi segenap aparatur pemerintah.

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah terhadap pencapaian program, perlunya dilengkapi sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM, serta perlu disetujui program-program yang telah direncanakan.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pola pikir penyusunan Renja diawali oleh kegiatan untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen dan pengerahan tenaga serta diikutioleh pengumpulan data dan analisisnya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati. Dalam penyusunan renja ini diperlukan tahap perumusan yaitu:

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan pengerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisisnya, sehingga diperoleh rumusan yang disepakati;
2. Mengimbas tata nilai yang merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu: kualitas, responsibilitas/tanggap dan bertanggungjawab, mutual/bersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien serta kebebasan/inovasi;
3. Memformulasi visi dan misi sehingga tergambar tujuan dan saran serta strategi kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan dan perubahan;
4. Menetapkan modal strategis mengikuti sistem, organisasi dan mekanisme yang relevan dengan pelaksanaan;
5. Berkaca diri untuk menilai kinerja dan membandingkannya dengan sasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya;
6. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program dan kegiatan;
7. Menyusun skenario alternatif/kemungkinan dengan merujuk Kepada hasil analisis SWOT, sehingga ditentukan strategis kebijakan yang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dan dampaknya ;

Dari hasil analisis kebutuhan program,/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa kegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan dana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kebutuhan dana pada Rancangan Perubahan sebesar

Rp. 13.846.257.850

Tabel 2.4

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan											
	Rancangan Awal RKPD				**Hasil Analisi Kebutuhan**						
			Target Kinerja		**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
No	**Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program Outcome/Kegiatan (output)**									
					(Rp)					(Rp)	
					Tahun 2024						
1	2	3	4		5	6	7	8			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah/kota**			10.015.144.910	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***			Hasil	9.443.140.200	
	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran evaluasi Kinerja perangkat Daerah			211.350.100 -	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**		Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran evaluasi Kinerja perangkat Daerah		525.890.000 -	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	179.122.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Dinas Pemadam kebakaran dan	Terlaksananya Penyusunan	3 Dokumen	493.662.800	APBD

	Daerah	Perangkat Daerah				Daerah	Penyelamatan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	5.052.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.052.200	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	7.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	7.000.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	5.015.000,-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	5.015.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	7.990.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	7.990.000	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	7.170.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	7.170.000	APBD
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			7.415.358.882	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		6.642.718.914	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Persen	7.396.382.882	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100% Persen	6.623.742.914	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.100.000	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	8.876.000	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.876.000	APBD

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			81.995.900	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		81.995.900	
10	Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	81.995.900	Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	81.995.900	APBD
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				589.682.296	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**				776.880.296	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Telpon , air	3	Paket	109.999.696,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3 Paket	125.509.696	APBD
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	13.818.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	125.816.100	APBD
13	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan rumah tangga	3	Paket	9.267.600	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan rumah tangga	3 Paket	28.159.800	APBD
14	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor	6	Paket	365.297.600	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor	6 Paket	405.445.200	APBD
15	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	1	Paket	20.019.400	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	1 Paket	20.669.500	APBD
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	13.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.000.000	APBD
17	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	58.280.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.280.000	APBD

	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			6.125.200	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		6.125.200	
18	Pengadaan mebelair	Terlaksananya Pengadaan mebelair	2	Unit	6.125.200	Pengadaan mebelair	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya Pengadaan mebelair	2 Unit	6.125.200	APBD
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.850.000	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10.850.000	
19	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.750.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.750.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	11	Jenis	7.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	11 Jenis	7.100.000	APBD
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah			1.644.206.332	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah		1.398.679.890	APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan,Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan,Dinas Operasional atau Lapangan	11	Unit	749.850.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan,Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan,Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	749.850.000	APBD
22	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	6	unit	894.356.332	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1 unit	648.829.890	APBD
	PROGRAM PENCEGAHAN ,PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran			**5.397.972.200**	***PROGRAM PENCEGAHAN ,PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN***		Terlaksananya Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non		**4.403.117.650**	APBD

	PENCEGAHAN , PENGENDALIAN PEMADAMAN ,PENYELAMATAN DAN PENANGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.326.572.700	**PENCEGAHAN , PENGENDALIAN PEMADAMAN ,PENYELAMATAN DAN PENANGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.403.117.650	APBD
24	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16	Kecamatan	2.952.081.600	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16 Kecamatan	2.798.411.600	APBD
25	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	70	Orang	60.999.500	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	70 orang	0	APBD
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri	25	unit	2.313.491.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri	25 Unit	1.604.706.050	APBD
	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Kegiatan	71.399.500	**INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN**		Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**0**	
27	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Dokumen	71.399.500	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	0	APBD

2.6 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

ProgramKegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegaiatan yang insidentil dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran.

Usulan Program dari para pemangku kepentingan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Sumber Usulan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi dan Misi Kementrian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementrian Dalam Negeri adalah :

VISI: *Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi Bangsa.*

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnyadalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementrian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, dapat dimaknai bahwa Kementrian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai rugas dan fungsinya yaitu menangani urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri.

b. Meningkatkan Pelayanan Publik. Kementrian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pemgawalan secara optimal terhadap

penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

c. Menegakkan Demokrasi, merupakan bahwa Kementrian Dalam Negeri mempunyai peran yang strategis untuk berada di tengah masyarakat, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

d. Menjaga Integrasi Bangsa. Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementrian Dalam Negeri yaitu :

a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.

d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Tabel 3.1
Telaahan Terhadap Renstra
Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar	SPM	Anggaran yang terbatas dan bervariasi di setiap daerah	Dukungan pemerintah daerah Peraturan-peraturan yang mendukung Sub Urusan Kebakaran
		Aparatur	Aparatur yang kurang kompeten dibidangnya	Meningkatnya pendidikan dan pelaihan di daerah-daerah
		Sarpras	Masih minimnya sarana dan prasarana di daerah-daerah	Standarisasi sarana dan prasarana
		Kebijakan Layanan	meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas atau mutu pelayanan di daerah	pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

SPM adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan prioritas anggaran. Target pencapaian SPM menjadi acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Oleh karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota harus melakukan asistensi dalam proses perencanaan di daerah dalam upaya mengintegrasikan SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen perangkat daerah, serta dokumen anggaran pemerintah daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja. Pengintegrasian perencanaan ini diperlukan untuk menjamin tersedianya alokasi anggaran dalam APBD sebagai dokumen anggaran daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, bahwa:

Gambar 3. 1
Penerapan SPM Urusan Pemedam Kebakaran

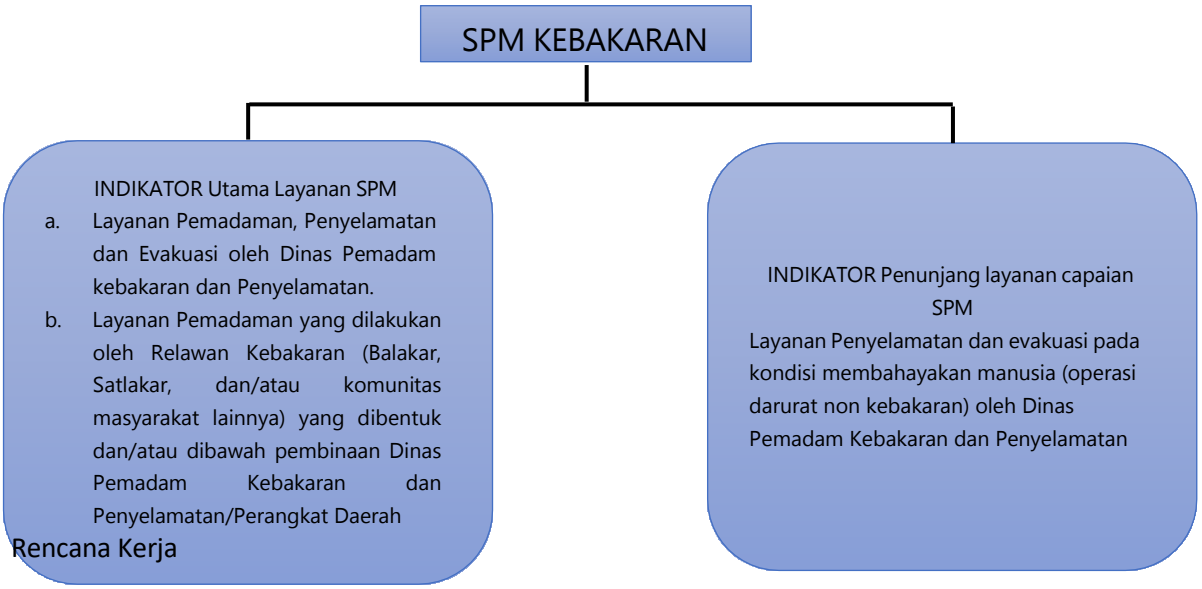

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan kebakaran baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi bahaya kebakaran secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bahaya kebakaran selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Tabel 3. 1
Telaah Renstra Provinsi Jawa Barat

No	Renstra Provinsi Jawa Barat	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM	Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran	Faktor Penghambat : 1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 2. Keterbatasan personil dan pos pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
			Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Belum optimalnya	Faktor Penghambat :

			penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran	Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
			Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan Gedung	Faktor Penghambat : Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait
				Faktor Pendorong : 1. Pembentukan Balakar di Kecamatan, Desa/Kelurahan 2. Pelatihan /Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM 3. Kerjasaman CSR untuk pendirian pos pos pemadam kebakaran dengan swasta

3.1.3 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat

3.1.3.1 Visi Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

Visi Pembangunan Daerah mengacu Pada Pencapaian Tujuan Daerah, seperti tertuang Dalam Undang undang nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, yang merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Sehingga membuka ruang dan potensi bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat di wilayah bandung Barat dan Mempunyai Korelasi yang signifikan dalam menunjang akselerasi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat khususnya, Propinsi jawa Barat dan Nasional Umumnya. Visi Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang cerdas, Maju, Makmur dan Agamis dengan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005- 2025

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 adalah :

“ KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN”

Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah: Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance*)

2. Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Tahapan Pertama RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 terbagi dalam 2 (dua) periode, periode tahun 2005-2007 merupakan periode perintisan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat dan periode 2007-2008 merupakan periode pembangunan pondasi berupa penataan birokrasi, pembentukan regulasi dan inventarisasi asset daerah. Tahap selanjutnya RPJPD dibagi menjadi RPJM Daerah Kedua (2008-2013), RPJM Daerah Ketiga (2013-2018), RPJM Daerah Keempat (2018-2023) dan RPJM Daerah Kelima (2023-2025). Penentuan tujuan dan sasaran dalam rangka penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, didasarkan pada visi misi RPJPD dan atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan

RPJPD tahap ke lima (tahun 2023-2025). dengan prioritas berdasarkan masing-masing Misi pada RPJPD adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

   Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah dalam era demokratisasi dewasa ini. Perubahan sosial yang cepat, yang ditandai dengan peningkatan taraf pendidikan menyebabkan masyarakat makin kritis dalam menilai kinerja pemerintahan. Karena itu, dalam upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, maka pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada tujuan dan prioritas sebagai berikut:

   a. meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang dihasilkan olehpostur kelembagaan (organisasi) birokrasi yang efektif dan efisien dengan kualitas sumberdaya manusia aparat birokrasi yang kompeten;

   b. meningkatnya kinerja kecamatan dan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas;

   c. meningkatnya kapasitas manajemen pemerintahan yang profesional, efektif , efisien, dan akuntabel serta bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

   d. meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan pemerintahan; dan

   e. terwujudnya jejaring kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sinergis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Pada misi ini ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup. Guna mewujudkan pemeliharaan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pembangunan daerah pada misi ini diarahkan untuk mencapai tujuan dengan prioritas sebagai berikut:

a. meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air baku;
b. meningkatnya upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
c. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
d. terpeliharanya kawasan lindung;dan
e. terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

3.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan antar periode dan keselarasan pembangunan pusat dan daerah, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 dalam penetapannya memperhatikan sinergitas pembangunan antar pusat dan daerah.

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional tahun 2020-2024, diantaranya sebagai berikut:

a. Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

b. Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

c. Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;

d. Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan *Major Project*, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat sama halnya dengan Kabupaten Bandung Barat yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026.

Berdasarkan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 – 2026.

Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah, dengan sasaran:

a. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien
b. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
c. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel
d. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas
e. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

c. Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, merupakan perumusan hasil analisis capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan periode pembangunan jangka menengah sebelumnya (RPJMD 2018-2023) dan sinergitas pembangunan antar pusat dan daerah sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan,

dengan memperhatikan mempertimbangkan hal-halsebagai berikut,

a. 5 Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;

b. 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;

c. 4 Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2026, dan

d. 6 Isu-isu strategis 2024-2026.

Dalam rangka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 3.2
Perumusan Konsep Dalam Rangka Penentuan Tujuan dan SasaranRencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

RPJPD 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPD Prov Jabar 2024-2026	ISU STRATEGIS	TUJUAN
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah	6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Tujuan 4** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi 4 Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Tujuan 3 : Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	**Tujuan 3** Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan (PN 6)		5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	

Berdasarkan tabel tersebut, telah ditentukan 5 (lima) tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dari lima (lima) tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, perlu dijabarkan dalam target sasaran yang akan dicapai selama 3 (tiga) pada RPD tahun 2024-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan,

dengan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
    b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
    c. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
    d. Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
    e. Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
    b. Meningkatnya Aksebilitas Wilayah
    c. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
    d. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
    e. Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan
    f. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.3
Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan
Memperhatikan Kualitas Lingkungan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realiasasi 2022	Target			Kondisi Akhir 2026
					2024	2025	2026	
3	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DENGAN MEMPERHATIKAN KUALITAS LINGKUNGAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	poin	26.78	26.37	26.09	25.81	25.81
3.4	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0.47	0.49	0.50	0.51	0.51

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
    b. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
    c. Berkembangya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
    d. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
    e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
    f. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Tabel 3.4
Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2022	target			Kondisi Akhir 2026
					2024	2025	2026	
4	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai/Kategori	60,97 / B	62/BB	66/BB	70/BB	70/BB
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai/Kategori	64,57 / B	70/BB	72/BB	75/BB	75/BB
4.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	37,59	42,42	44,85	46,67	46,67

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

4. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi, dengan sasaran:

   a. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   b. Menurunnya Potensi Konflik Sosial
   c. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat

3.1.3.3 Program Prioritas Pembangunan

Adapun tahapan dan prioritas pembangunan pembangunanKabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman	- Penataan permukiman dan pengembangan kawas permukiman - Pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan - Pembangunan sistem drainase permukiman	- Program pengembangan permukiman - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Program peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum (PSU) - Program kawasan permukiman

	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	***Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alam dan non alam***	- Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana - Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana - Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan	- Program Penanggulangan Bencana - ***Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*** - Program Penanganan Bencana
			Penyelamatan korban bencana - Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana - Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	- Program penataan bangunan dan lingkungannya - Program pengembangan perumahan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Penataan Perundang-undangan - Penataan dan penguatan organisasi - Penyusunan Laporan penyelenggaraan	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Perencanaan,

			pemerintahan yang tepat waktu - Penguatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan bidang ekonomi - Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah - Center of excelent pengadaan barang jasa - Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan - Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Pembangunan Zona Integritas dan pencegahan korupsi - Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan dan penerapan Inovasi daerah - Peningkatankualitas Penunjangurusan Pemerintahan	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.4 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Periode 2024-2026

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

Tabel 3-6
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Misi 2				
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Belum tersedianya kebijakan dalam penyelenggaraan sistem informasi public Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewenangan urusan perangkat daerah Belum terintegrasinya sistem informasi masing-masing perangkat daerah.	Fungsi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta aparatur pemerintah yang kredibel, bersih dan bertanggungjawab (good governance). Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada proses pembangunan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada. Pemutakhiran sistem informasi di masing-masing perangkat daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat merupakan Program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kegiatan yang di pilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

URAIAN							2023	2024	2025	2026
						Pagu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.390.294.101	13.846.257.850	12.713.635.518	13.086.630.583
5	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.496.605.851	9.443.140.200	7.248.635.518	7.456.630.583
5	**2**	**1**	**2.01**			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	115.900.800	525.890.000	48.000.000	44.469.065
5	2	1	2.01	1		Penyusunan dokumen perangkat daerah	100.991.600	493.662.800	8.000.000	9.069.065
5	2	1	2.01	2		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	3.000.200	5.052.200	8.000.000	7.000.000
5	2	1	2.01	3		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	3.000.200	7.000.000	8.000.000	7.000.000
5	2	1	2.01	4		Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	3.000.200	5.015.000	8.000.000	7.000.000
5	2	1	2.01	5		Koordinas dan penyusunan perubahan DPA SKPD	3.000.200	7.990.000	8.000.000	7.000.000
5	2	1	2.01	7		Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.908.400	7.170.000	8.000.000	7.400.000
5	**2**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	6.642.718.914	5.227.635.518	5.227.635.518
5	2	1	2.02	1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	6.623.742.914	5.213.635.518	5.213.635.518
5	2	1	2.02	5		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.356.200	10.100.000	7.000.000	7.000.000
5	2	1	2.02	7		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	243.284.150	8.876.000	7.000.000	7.000.000
5	**2**	**1**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**46.236.500**	**81.995.900**	**90.000.000**	**156.069.000**
5	2	1	2.06	2		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	-	81.995.900	5.000.000	7.000.000

5	**2**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	320.690.796	776.880.296	453.000.000	501.526.065
5	2	1	2.06	1		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90.553.596	125.509.696	110.000.000	120.526.000
5	2	1	2.06	2		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63.914.200	125.816.100	50.000.000	65.000.000
5	2	1	2.06	3		Penyediaan peralatan rumah tangga	38.207.100	28.159.800	40.000.000	40.000.000
5	2	1	2.06	4		Penyediaan bahan logistik kantor	88.366.100	405.445.200	90.000.000	97.000.000
5	2	1	2.06	5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.649.800	20.669.500	7.000.000	12.000.000
5	2	1	2.06	8		Fasilitas kunjungan tamu	26.000.000	13.000.000	17.000.000	17.000.000
5	2	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.362.000	58.280.000	124.000.000	128.000.000
5	**2**	**1**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	9.100.700	6.125.200	10.000.000	60.000.000
5	2	1	2.07	5		Pengadaan mebel	9.100.700	6.125.200	1.500.000	4.000.000
5	**2**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	90.800.000	10.850.000	5.000.000	7.000.000
5	2	1	2.08	1		Penyediaan jasa surat menyurat	90.800.000	3.750.000	4.000.000	5.000.000
5	2	1	2.08	3		Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan Kantor		7.100.000	1.000.000	2.000.000
5	**2**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	538.307.416	1.398.679.890	1.415.000.000	1.460.000.000
5	2	1	2.09	2		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	289.650.000	749.850.000	310.000.000	340.000.000
5	2	1	2.09	9		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	248.657.416	648.829.890	1.000.000	1.000.000
5	**2**	**4**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**4.893.688.250**	**4.403.117.650**	**5.465.000.000**	**5.630.000.000**
5	2	4	2.01	2		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	3.306.045.150	2.798.411.600	1.350.000.000	1.500.000.000
5	2	4	2.01	17		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	1.528.043.100	1.604.708.050	3.500.000.000	3.500.000.000

BAB V PENUTUP

Demikian Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 ini disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 serta pedoman pelaksanaannya di tahun 2024. Semoga substansi yang telah disusun dapat menggambarkan upaya pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mendukung tercapainya target kinerja Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dapat dicapai.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung Barat, Januari 2024

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Dra. SITI AMINAH ANSHORIAH M,Pd
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19690626 199003 2 003

LAPORAN RENCANA KINERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2024

KABUPATEN BANDUNG BARAT

WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat telah menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024. Tersusunnya dokumen ini merupakan sebagian dari Rencana Kerja PD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah satu pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2024. Melalui Renja ini pula disampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 beserta kebutuhan anggaran kegiatannya. Selain itu, dalam Rencana Kerja ini di informasikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja SKPD ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan hidayah-Nya dalam rangka pelaksanaan amanah dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Bandung Barat, Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung Barat

RICKY RIYADI, S.Sos
Pembina TK.I / IVb
NIP.19681204 198803 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... I
DAFTAR ISI..... ii
BAB I
PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 7
1.3.1 Maksud..... 7
1.3.2 Tujuan..... 7
1.4. Sistematika Penulisan..... 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU..... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD..... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. 15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD..... 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 29
3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra OPD Propinsi Jawa Barat Yang Terkait..... 29
3.1.1 Telaahan Kementerian Perdagangan..... 31
3.1.2 Telahaan Kementerian Perindustrian..... .....
3.1.3 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat..... 33
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan..... 34
3.4 Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan..... 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 47
4.1 **Penetapan Target dan Pendanaan Daerah** 47
BAB V PENUTUP..... 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 nilai-nilai yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (TUPOKSI). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan karena dokumen renja ini merupakan kesepakatan antara penyelenggara pemerintah dengan *stake*

*holde*r atau unsur masyarakat dalam musyawarah pembangunan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dimana berisi mengenai informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan tupoksinya. Di samping itu juga dokumen renja ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sesuai sasaran dan kebijakan serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026.

Secara umum Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat disusun untuk memperhatikan hasil kinerja Program/Kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang mempertimbangkan sinergi antar sektor pembangunan, koordinasi antar SKPD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Review Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang harus selaras dengan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Propinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat serta Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dengan adanya keselarasan keseluruhan perencanaan diatas,

maka tindak lanjut yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan proses penyusunan RAPBD sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024;
15. Peraturan Presisden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Kewenangan Kabupaten-Kota.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023.
25. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2024 bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta mengacu kepada RKPD Tahun 2024 sebagai bahan dalam melakukan evaluasi untuk rencana kerja tahun selanjutnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja (Renja) 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja keselarasan dokumen renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menjelaskan dan memuat pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI PD, Review terhadap Ranwal SKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab ini menyajikan tentang Telaahan terhadap program nasional, tujuan dan sasaran Renja PD serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 serta pendanaan kegiatan pada masing- masing bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun lalu merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih menitikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri yang meliputi indikator mikro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator mikro Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan keluaran, hal ini mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum sepenuhnya terbangun. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro.

Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang teroranganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi dimana kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut.

Berdasarkan Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

PD : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan										
	Urusan Pilihan Industri										
3.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien**	**100**	**%**	**50%**	**100%**	**85%**	**85%**	**100%**	**235%**	**2,35%**
3.31.3.31.3.301.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	12	12	12	1	12	36	36
3.31.3.31.3.301.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	12	12	12	1	12	36	36
3.31.3.31.3.301.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	12	12	12	1	12	36	36
3.31.3.31.3.301.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	1	Dok	100	100	100	1	100	300	300
3.31.3.31.3.301.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	100	100	100	1	100	300	300
3.31.3.31.3.301.2.01.06.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	19	19	19	1	19	57	57
3.31.3.31.3.301.2.02.01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	12/4	12/4	12/4	1	12/4	133989	133989
3.31.3.31.3.301.2.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prosentase eningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	12	Bln	12	12	12	1	12	36	3
3.31.3.31.3.301.2.05.09.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	Unit	47	47	47	1	47	141	10,85
3.31.3.31.3.301.2.06.02.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	%	50%	100%	80%	80%	25%	155%	1,55%
3.31.3.31.3.301.2.06.04.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	12	12	12	1	12	36	3
3.31.3.31.3.301.2.06.05.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bln	12	12	12	1	12	36	3
3.31.3.31.3.301.2.06.06.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	12	Bln	12	12	12	1	12	36	3
3.31.3.31.3.301.2.06.08.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100	%	50%	100%	85%	85%	25%	160%	1,60%
3.31.3.31.3.301.2.07.05.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	%	25%	100%	90%	90%	25%	140%	1,40%
3.31.3.31.3.301.2.08.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	%	25%	100%	90%	90%	25%	140%	1,40%
3.31.3.31.3.301.2.08.02.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	25%	100%	90%	90%	25%	140%	1,40%
3.31.3.31.3.301.2.08.03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	%	25%	100%	85%	85%	25%	135%	1,35%
3.31.3.31.3.301.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	3	Unit	2	2	2	1	2	6	2
3.31.3.31.3.301.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	2	2	2	1	2	6	2

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.3.31.3.302.2.01	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan**	**3880**	**Jumlah**	**9,83**	**10,24**	**9,44**	**92,18**	**10,24**	**29,51**	**0,01**
3.30.3.31.3.303.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Keg	100	91,88	89,66	97,58	95,00	284,66	284,66
3.30.3.31.3.303.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan**	**33**	**%**	**9,83**	**10,24**	**9,44**	**92,18**	**10,24**	**29,51**	**0,89**
3.30.3.31.3.303.2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Jumlah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	Pasar	3	3	2	66,67	1	6	100,00
3.30.3.31.3.303.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Keg	1	2	1	50,00	1	3	75,00
3.30.3.31.3.303.2.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6	Keg	3	2	1	50,00	2	6	100,00
3.30.3.31.3.303.2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	%	25,00	30,00	30,00	100,00	35,00	35,00	0,70
3.30.3.31.3.304.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**8,45**	**%**	**7,63**	**7,95**	**7,82**	**98,38**	**7,95**	**23**	**2,77**
3.30.3.31.3.304.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	Keg	2	2	1	50,00	1	4	100,00
3.30.3.31.3.304.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8,45	%	7,63	7,95	7,82	98,38	7,95	23	2,77
3.30.3.31.3.304.2.01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	Keg	3	1	1	100,00	1	4	100,00
3.30.3.31.3.304.2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	Keg	3	2	1	50,00	2	6	100,00
3.30.3.31.3.304.2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	8,45	%	7,63	7,95	7,82	98,38	7,95	23	2,77
3.30.3.31.3.304.2.03	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	100	%	7,63	7,95	7,82	98,38	7,95	23	0,23
3.30.3.31.3.304.2.03	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.30.3.31.3.304.2.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.30.3.31.3.306.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase standarisasi dan pelayananan Metrologi Lega**	**30**	**%**	**7,63**	**7,95**	**7,82**	**98,38**	**7,95**	**23**	**0,78**
3.30.3.31.3.306.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100	%	2	1	1	100,00	1	4	4,00
3.30.3.31.3.306.2.01.02.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.30.3.31.3.307.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota**	**7**	**Promosi**	2	1	1	100,00	1	4	57,14
3.30.3.31.3.307.2.01.01.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.30.3.31.3.307.2.01.02.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.30.3.31.3.307.2.01.03.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.3.31.3.302.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Prosentase Pengembangan IKM**	**30**	**%**	**7,63**	**7,95**	**7,82**	**98,38**	**7,95**	**23**	**0,78**
3.31.3.31.3.302.2.01.01.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.302.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Prosentase Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.302.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Prosentase Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.302.2.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.302.2.01.05.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.302.2.01.06.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.303.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Pertumbuhan Industri yang berizin**	**2132**	**Jumlah**	**9,83**	**10,24**	**9,44**	**92,18**	**10,24**	**29,51**	**0,01**
3.31.3.31.3.303.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.304.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI**	**Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS**	**260**	**Jumlah**	**9,83**	**10,24**	**9,44**	**92,18**	**10,24**	**29,51**	**0,01**
3.31.3.31.3.304.2.01.01.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3.31.3.31.3.304.2.01.02.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1	Keg	2	1	1	100,00	1	4	400,00

Tabel. 1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, bahwasannya keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENCAPAIAN SASARAN TAHUN KE-								
		2021			2022			2023		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Persentase Pengembangan Industri Kecil Menengah	30%	28,11	93,70	40%	38,20	95,50	30%	26,75	89,17
	Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	33%	30,10	91,24	33%	27,24	82,57	34%	33,81	99,44
	Persentase Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	30%	28,54	95,16	40%	39,46	98,67	30%	26,41	87,70
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP	60,3	59,3	98,34	80,5	80	99,39	80,5	79,00	98,14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	85	84,49	99,40	85	83,75	98,52	85	84,59	99,52

Pencapaian indikator kinerja utama Berdasarkan Indikator RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan ukuran keberhasilan kinerja membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan program dan indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN			CAPAIAN TAHUN			CAPAIAN TAHUN		
	2021			2022			2023		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	8,11	8,37	103,26	8,28	8,01	96,74	8,45	8,33	98,58
Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	10,48	9,97	95,11	10,67	9,21	86,32	10,89	8,37	76,86

Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi, maka isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/ penolong impor;
2. Daya saing produk industri kecil menengah (IKM) belum kuat;
3. Akses pasar tradisional masih rendah;
4. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar tradisional;
5. Sektor perdagangan sebagai sektor kedua terbesar (13.58 persen) terus menunjukan pelambatan dari 5.68 persen pada tahun 2018 sampai 3.84 persen pada tahun 2019.
6. Belum ada hilirisasi hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;

7. Perlu dibangun keterkaitan industri besar yang ada di Bandung Barat dengan UMKM setempat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 setelah diterima dan telah direview dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja SKPD sesuai Target dan Capaian akhir selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada dokumen Renstra SKPD tahun 2018-2023, hal ini dapat dilihat pada tabel hasil capaian berikut ini :

Kode					Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Tahun Anggaran 2023			
							Lokasi	Capaian Kinerja		
								Target	Realisasi	%
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan**	**Wilayah KBB**	**4.696**	**4.696**	**100**
3	***30***	***2***	***2.01***		***Penerbitan Tanda Daftar Gudang***	***Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang***	***Wilayah KBB***	***1 Dokumen***	***1***	**100**
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	***30***	***2***	***2.03***		***Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri***	***Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik dan Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri***	***Wilayah KBB***	***1 Dokumen***	***1***	**100**
3	30	2	2.03	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	***30***	***2***	***2.04***		***Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri***	***Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri dan Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri***	***Wilayah KBB***	***1 Dokumen***	***1***	**100**
3	30	2	2.04	1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba(STPW) Terintegrasi secara elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100

3	***30***	***2***	***2.05***		***Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual Langsung Minum di tempat***	***Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik***	***Wilayah KBB***	***1 Dokumen***	***1***	**100**
3	30	2	2.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan**	**Pasar, Wilayah KBB**	**34%**	**25%**	**74**
3	***30***	***3***	***2.01***		***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan dan Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana***	***Wilayah KBB***	***4 Unit***	***1***	***25,00***
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	1 Unit	1	100
3	***30***	***3***	***2.02***		***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan***	***Pasar, Wilayah KBB***	***2 Dokumen***	***2***	***100***
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	1 Dokumen	1	100
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	1 Dokumen	1	100
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Pasar, Wilayah KBB**	**180 Monitoring**	**180**	**100**
3	***30***	***4***	***2.01***		***Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	***Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat danLaporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat***	***Pasar, Wilayah KBB***	***3 Laporan***	***3***	***100***
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Pasar, Wilayah KBB	1 Laporan	1	100
3	30	4	2.01	2	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	Pasar, Wilayah KBB	1 Laporan	1	100
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Pasar, Wilayah KBB	1 Laporan	1	100
ZZ	***30***	***4***	***2.02***		***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota***	***Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota***	***Pasar, Wilayah KBB***	***3 Laporan***	***2***	***66,67***
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pasar, Wilayah KBB	1 Laporan	1	100
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pasar, Wilayah KBB	1 Laporan	1	100
3	***30***	***4***	***2.03***		***Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen, Laporan Pengawasan Pengadaan dan Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%***	***Wilayah KBB***	***3 Dokumen/Laporan***	***3***	***100***
3	30	4	2.03	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Wilayah KBB	1 Laporan	1	100

3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Prosentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota**	**Wilayah KBB, Provinsi Dan Nasional**	**50%**	**50%**	**100**
3	***30***	***5***	***2.01***		***Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1***	***Wilayah KBB, Provinsi Dan Nasional***	***1 Kegiatan***	***1***	**100**
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Provinsi DKI Jakarta	3 Pelaku Usaha	2	66,67
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Provinsi Jawa Barat	3 Pelaku Usaha	2	66,67
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Nasional	3 Pelaku Usaha		
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase standarisasi dan pelayananan Metrologi Legal**	**Wilayah KBB**	**30%**	**30%**	**100**
3	***30***	***6***	***2.01***		***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Wilayah KBB***	***1 Kegiatan***		
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Wilayah KBB	1 Unit	1	100
3	30	6	2.01	3	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Wilayah KBB	50 Orang	50	100
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota**	**Wilayah KBB, Provinsi Dan Nasional**	**7 Promosi**	**5**	**71,43**
3	***30***	***7***	***2.01***		***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Wilayah KBB, Provinsi Dan Nasional***	***9 UMKM/IKM***	***9***	***100***
3	30	7	2.01	2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Provinsi/Nasional	1 Dokumen	1	100
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					
3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien**	**Disperindag**	**100%**	**100%**	**100**
3	***31***	***1***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Disperindag***	***1 Kegiatan***	***1***	**100**
3	31	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperindag	1 Dokumen	1	100
3	31	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperindag	1 Dokumen	1	100
3	31	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperindag	1 Dokumen	1	100
3	31	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Disperindag	1 Dokumen	1	100
3	31	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperindag	1 Dokumen	1	100
3	31	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperindag	1 Laporan	1	100
3	***31***	***1***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah***	***Disperindag***	***1 Kegiatan***	***1***	***100***
3	31	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disperindag	97 Orang/bulan	84	86,60
3	31	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperindag	1 Laporan	1	100
3	***31***	***1***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Disperindag***	***1 Kegiatan***	***1***	**100**
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disperindag	1 Paket ATK	1	100
3	31	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disperindag	1 Paket Barang Cetakan	1	100
3	31	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disperindag	60 dokumen	60	100
3	31	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperindag	10 Laporan		
3	31	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperindag	2 Laporan	-	
3	***31***	***1***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahn daerah***	***Disperindag***	***1 Kegiatan***	***1***	**100**
3	31	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperindag	1 Laporan	1	100
3	31	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disperindag	1 Laporan	1	100
3	31	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disperindag	1 Laporan	1	100
3	***31***	***1***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Disperindag***	***1 Kegiatan***	***1***	**100**
3	31	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disperindag	6 Unit	6	100
3	31	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disperindag	14 Unit	14	100

3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Prosentase Pengembangan IKM**	**Wilayah KBB**	**30%**	**30%**	**100**
3	***31***	***2***	***2.01***		***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Wilayah KBB***	***1 Kegiatan***	***1***	**100**
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Wilayah KBB	15 Dokumen	15	100
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Wilayah KBB	3 Dokumen	3	100
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Pertumbuhan Industri yang berizin**	**Wilayah KBB**	**2.350**	**2.350**	**100**
3	***31***	***3***	***2.01***		***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Wilayah KBB***	**1 Dokumen**	**1**	100
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS**	**Wilayah KBB**	**350**	**350**	**100**
3	**31**	**4**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota dan Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Melalui SIINAS dan**	**Wilayah KBB**	**2 Dokumen**	**2**	**100**
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIInas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Wilayah KBB	1 Dokumen	1	100

Tabel 1.3 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setelah diikuti pelaksanaan Musrenbang pada beberapa kelurahan dan kecamatan, untuk bidang ekonomi khususnya yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak begitu banyak yang diusulkan oleh masyarakat atau stake holder. Yang banyak diusulkan dan dibahas pada Musrenbang pada kegiatan fisik. Namun yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah dilakukan dialog/ diskusi dengan stakeholders ada beberapa masukan yang secara detail dapat dilihat pada Lampiran Renja SKPD ini. Dan setelah ditelaah dan hasilnya akan dimasukkan pada Renja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2024. Penyusunan program dan kegiatan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 23 tahun 2014. Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam RPD 2024-2026. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta indikator capaian kinerjanya sesuai dengan RPD.

Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra OPD Propinsi Jawa Barat Yang Terkait

3.1.1 Telaahan Kementerian Perdagangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang

berdimensi lintas bidang. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 3.1 Keterkaian Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 yang tercantum dalam Undang- Undangl 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah

kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi.

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan peningkatkan ekspor produk non migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukungpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi globaluntuk meningkatkan ekspor barang terutama produkmanufaktur
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasaprioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor nonmigas (jasatransportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi) serta jasayang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitasekonomi (jasa logistik, jasa distribusi dan jasa keuangan).

3.1.2 Telahaan Kementerian Perindustrian

Untuk mewujudkan visi, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

KementerianPerindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Strategis yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut :

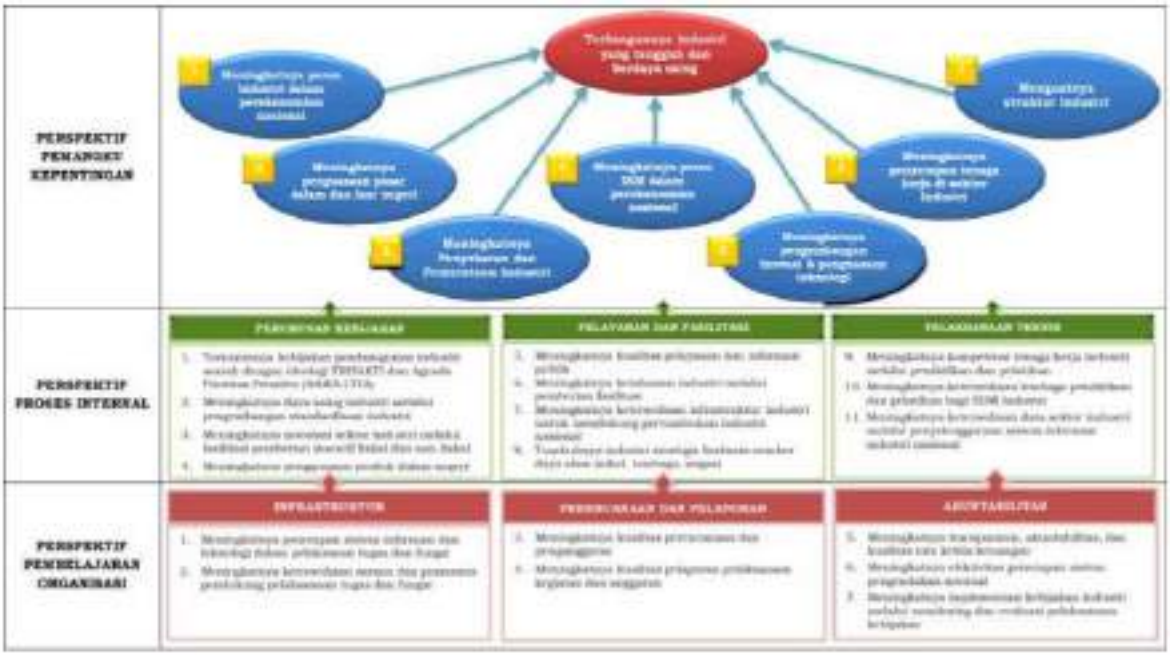

Gambar 3.2. Peta Strategis Kementerian Perindustrian

3.1.3 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Keberadaan Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat mewujudkan sosok provinsi Jawa Barat yang maju di bidang Industri kearah perkembangannya produk-produk industri baik dalam konteks substitusi impor maupun orientasi ekspor secara mandiri maupun aliansi/kolaborasi sebagai hasil pengembangan klaster industri yang semakin kompetitif. Untuk bidang perdagangan diharapkan berkembangnya aktifitas perdagangan dalam dan luar negeri baik yang bersumber dari produk dengan lokal konten tinggi maupun terdapat kandungan impor dalam keseimbangan transaksi antar daerah dan antar negara yang mampu memberikan surplus kepada pendapatan regional Jawa Barat.

Setelah melakukan telaahan pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, maka dapat dirangkum yang menjadikan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.10

Isu-Isu Strategis Renstra Kementerian dan OPD Propinsi Jawa Barat

NO	BIDANG	ISU STRATEGIS
1	Perindustrian	▪ Lemahnya prasarana dan sarana ▪ Ekonomi biaya tinggi ▪ Kesenjangan pembangunan antar daerah ▪ Lemahnya penguasaan teknologi dan keterbatasan industri berteknologi tinggi ▪ Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) ▪ Terbatasnya pasokan bahan baku & energi, serta tingginya impor bahan baku dan penolong ▪ Terbatasnya produksi barang setengah jadi dan komponen ▪ Terbatasnya penerapan standarisasi ▪ Belum optimalnya kapasitas produksi ▪ Terbatasnya penguasaan pasar domestic ▪ Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan ▪ Terbatasnya pengembangan merek lokal.

2	Perdagangan	▪ Menurunnya permintaan ekspor akibat krisis ekonomi global ▪ Kendala akses dan pengamanan pasar luar negeri ▪ Diversifikasi ekspor baik produk maupun pasar tujuan ekspor ▪ Daya saing ekspor yang masih rendah dan ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh aspek institusional, infrastruktur dan logistic ▪ Sistem distribusi barang yang belum optimal dan perdagangan dalam negeri ▪ Perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri ▪ Manajemen sektor informal dan pedagang kaki lima (PKL) ▪ Perangkat hukum bidang perdagangan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pada logframe perencanaan terintegratif untuk pencapaian misi 3 dalam RPD, dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada posisi tugas mewujudkan agro industri sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dalam Review Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

   Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

   Sasaran:

   1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

      Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja dalam sektor:

      a. Industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

         • Persentase pengembangan IKM

         • Persentase industri yang berizin

         • Persentase industri yang beritegrasi ke dalam SIINAS

      b. Perdagangan, dengan indikator kinerja:

         • Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen

         • Nilai ekspor barang dan jasa

         • Pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan

         • Peningkatan sarpras dan distribusi perdagangan

         • Presentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk

dalam negeri

• Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu

2. Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Sasaran:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- Nilai SAKIP Disperindag

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana Kinerja (Renja) Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKAB. BANDUNG BARAT

TAHUN 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Prioritas	
						Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			17.536.186.989,00			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.536.186.989,00			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			248.145.100,00			
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERTUMBUHAN PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	0 % 4696 Jumlah	16.500.000,00			
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0 Dokumen	1.500.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	1.500.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0 Dokumen	3.000.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik						
		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri						
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Terlaksananya penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	0 Dokumen	3.000.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi

	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri						
		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri						
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0 Dokumen	1.500.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						
		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	4.500.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya						
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2						
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	0 Dokumen	1.500.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						
		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi

2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan PENINGKATAN SARPRAS DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN	34 % 0 %	60.125.700,00			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	0 Unit	34.983.400,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	14.977.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	20.006.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0 Dokumen	25.142.300,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	15.062.300,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0 NILAI 180 Jumlah	16.839.400,00			
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan	6.230.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	2.030.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	2.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0 Laporan	6.109.400,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.009.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	4.500.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan						
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						
		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	NILAI EKSPOR BARANG DAN JASA Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	0 MILYAR 50 %	95.000.000,00			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Pelaku Usaha	95.000.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pameran Dagang Nasional						
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi

	Pameran Dagang Lokal						
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Peningkatan Citra Produk Ekspor						
		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen PERSENTASE STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30 % 0 %	25.000.000,00			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	terciptanya alat UTTP yang tertib ukur Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	35 % 0 Laporan	25.000.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PRESENTASE PELAKU USAHA TERFASILITAS DALAM PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	0 % 7 Jumlah	34.680.000,00			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0 Laporan	34.680.000,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 UMKM	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 UMKM	14.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			17.288.041.889,00			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DISPERINDAG	0 NILAI MUTU	15.443.198.889,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	11.998.800,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan	15.215.409.873,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	15.211.410.273,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Orang	20.000.000,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	120 Unit	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	97.337.100,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.268.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.216.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.001.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	31.360.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.950.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.740.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Jenis	7.106.100,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah

	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.106.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	33.639.152,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.809.152,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	7.830.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	10.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	57.707.864,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	42.382.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	9.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.325.364,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah

8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pengembangan IKM PERSENTASE PENGEMBANGAN IKM	30 % 0 %	1.793.985.900,00			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6295 Jumlah 0 Dokumen	1.793.985.900,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	945.099.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8 Dokumen	765.113.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	33.773.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS PERSENTASE INDUSTRI YANG TERINTEGRASI KE DALAM SIINAS	350 Jumlah 0 %	50.857.100,00			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	50.857.100,00		-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas						
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.857.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
				17.536.186.989,00			

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Seluruh program dan kegiatan di atas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2024 – 2026 khususnya pada Misi 3 yaitu ***Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan***, oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai mengakomodir kegiatan yang bersifat penunjang pelaksanaan teknis kegiatan dan kebutuhan lainnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran yang berbasis kinerja. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Seluruh pendanaan program dam kegiatan masing- masing bagian atau bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

4.1 Penetapan Target dan Pendanaan Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 – 2026 Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran tahun 2024 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja, Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Bandung Barat dan RKPD Provinsi Jawa Barat yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2024 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokan ke dalam 10 Program dan 25 Kegiatan Tahun 2024 diantaranya yaitu :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

   Berisi kegiatan sebagai berikut :

   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Berisi kegiatan sebagai berikut :

   a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

3) Program Pengembangan Ekspor, Berisi kegiatan sebagai berikut :

   a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

b) Pembinaan terhadap Pengelola sarana distribusi

5) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

b) Penerbitan Tanda Daftar Gudang

c) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dari Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

d) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

e) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat

f) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota

g) Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten/Kota

6) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

b) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

c) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

9) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

10) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Berisi kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun Penetapan Target dan Pendanaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

(TERLAMPIR)

PENUTUP

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit dan sub unit organisasi yang ada di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyeseuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Oleh karena itu, laporan Rencana Kinerja (Renja) ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, karena bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali dengan kondisi pada waktu pelaksanaannya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan mengesampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak mengganggu sinergitas masing-masing kegiatan terhadap tujuan organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat secara umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan, pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing sub unit perlu terus dilakukan untuk mendeteksi lebih awal setiap penyimpangan-penyimpangan di setiap kegiatan, sehingga apabila diketahui adanya penyimpangan dapat diperbaiki dan disesuaikan sedini mungkin. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat sebagai institusi teknis pembangunan. Oleh karena

itu semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam rangka menunjang dan mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus mendapat dukungan dan antusiasme dari berbagai instansi dan stakeholder terkait.

Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan ridha oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas dan amanah yang telah dibebankan kepada kita.

Bandung Barat, Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung Barat

RICKY RIYADI, S.Sos
Pembina TK.I / IVb
NIP.19681204 198803 1 002

RENCANA KERJA (RENJA) DISPERINDAG TAHUN ANGGARAN 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Bidang Urusan/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian 2024		Lokasi	Sasaran	TAHUN N + 1
												Target	Rp			
MENGUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	MISI KE 3 PERKUAT KEMANFAATAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP DISPERINDAG	X	XX	XX			NILAI SAKIP DISPERINDAG		NILAI MUTU	63	13.543.719.163			17.304.338.259
				X	XX	01			Terlaksananya Perencanaan, Pengorganisasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				X	XX	01	201	01	Terlaksananya Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	4	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	76.000.000
				X	XX	01	201	02	Terlaksananya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	20.000.000
				X	XX	01	201	03	Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	20.000.000
				X	XX	01	201	04	Terlaksananya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	20.000.000
				X	XX	01	201	05	Terlaksananya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	20.000.000
				X	XX	01	201	06	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	80.000.000
				X	XX	01	202		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				X	XX	01	202	01	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	67	13.216.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	15.343.338.259
				X	XX	01	202	02	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	80.000.000
				X	XX	01	202	17	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	1.999.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	80.000.000
				X	XV	01	203		Administrasi Aset/pasangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Aset/pasangan Perangkat Daerah						
				X	XX	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sirkuit Pangsur	Terlaksanya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Sirkuit Pangsur	Unit	120	10.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	120.000.000
				X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Terlaksanya Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	1	10.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	100.000.000
				X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	11.899.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	200.000.000
				X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksanya Peralatan Rumah Tangga	Paket	3	8.216.400	DISPERINDAG	DISPERINDAG	70.000.000
				X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksanya Bahan Logistik Kantor	Paket	4	25.001.800	DISPERINDAG	DISPERINDAG	120.000.000
				X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	21.382.800	DISPERINDAG/UPTD/HAGAB	DISPERINDAG/UPTD/HAGAB	100.000.000
				X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	10.800.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	70.000.000
				X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanaanya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	4.800.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	30.000.000
				X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4.740.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	100.000.000
				X	XX	01	207	01	Pengadaan Mobil	Terlaksanya Mobil	Unit	2	7.100.100	DISPERINDAG	DISPERINDAG	70.000.000
				X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	100.000.000
				X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	7.609.152	DISPERINDAG	DISPERINDAG	20.000.000
				X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanya Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	7.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	20.000.000
				X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	10.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	200.000.000
				X	XV	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				X	XX	01	209	01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	42.982.500	DISPERINDAG	DISPERINDAG	75.000.000
				X	XX	01	209	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	16	9.000.000	DISPERINDAG	DISPERINDAG	120.000.000
				X	XX	01	209	04	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	8.320.364	DISPERINDAG/UPTD/HAGAB	DISPERINDAG/UPTD/HAGAB	75.000.000
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN MERATAKEUNAAN	1 A.03 PERTUMBUHAN EKONOMI	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	X	IX				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB/ PERDAGANGAN				240.145.100			2.073.000.000
				3	IX	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERTUMBUHAN PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN	%	10%	16.300.000			310.000.000
				3	IX	02	201		Penetapan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko Serta Toko Swalayan	Terlaksanaanya Penetapan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko Serta Toko Swalayan						
				3	IX	02	201	01	Fasilitasi, Pemeriksaan Kondisi/ver Peralatan Pencatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Modul, Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Terlaksanaya Rekomendasi Pemeriksaan Kondisi/ver Peralatan Pencatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Modul, Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Dokumen	1	1.000.000	DISPERINDAG	Rotasi Usaha Perdagangan	30.000.000
				3	IX	02	202		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksanaanya Penerbitan Tanda Daftar Gudang						
				3	IX	02	202	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksanaanya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	1.000.000	DISPERINDAG	Rotasi Usaha Perdagangan	40.000.000

RENCANA KERJA

(R E N J A)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024

dispora
Pemuda Bandung Barat

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini mutlak diperlukan demi sinergitas dengan dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan Renja ini, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya merupakan acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat untuk dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan selama satu tahun guna mendukung ketercapaian RENSTRA dan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, dokumentasi Renja ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) selanjutnya

Akhirnya, semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat.

Bandung Barat,…….2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

LUDI AWALUDIN, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681228 198803 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah hingga Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dilakukan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra PD dan pada akhirnya Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja PD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir dan Penetapan, untuk lebih jelasnya bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renja seperti dijelaskan pada gambar berikut:

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

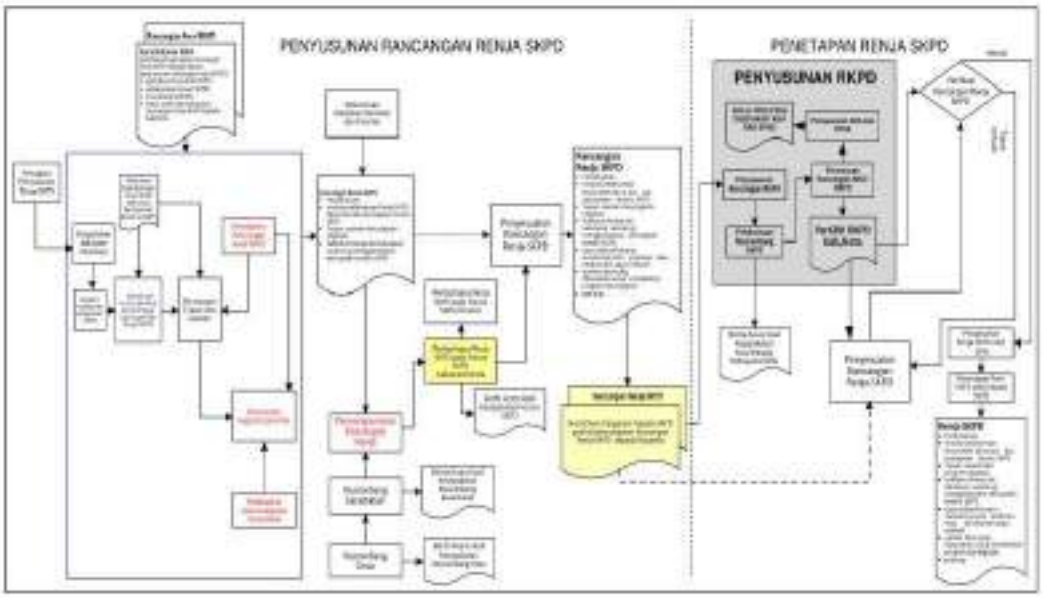

Table 1.1

Perubahan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini berakibat pada lahirnya berbagai regulasi baru yang mempengaruhi terhadap perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah, sehingga diperlukan adanya beberapa perubahan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Hal ini pun menjadi latar belakang dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, karena dengan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2024 – 2026 hal ini menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta perubahan Renstra ini pun merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam rangka menyusunan rencana kerja tahunan (Renja). RPJMD Kabupaten Bandung Barat akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan Penyusunan Renja Perangkat

Daerah, adapun keterkaitannya dokumen Renja Dispora dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.2

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4535)
4. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5067)
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5887)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024
13. Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
14. Permenpora Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga keolahragaan dan Organisasi Olahraga

15. Permenpora Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Pemuda dan keolahragaan (Berita Negara RI tahun 2016 Nomor 1425)
16. Permenpora Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PD dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara RI tahun 2016 Nomor 1425)
17. Permenpora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenpora Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2023
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Pemuda (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5)

25. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai pedoman dalam:

1. Pelaksanaan pelayanan Perangkat ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1) yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya; menyajikan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; memberikan informasi su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana

BAB V PENUTUP

Bab ini Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Adanya perubahan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini berakibat pada lahirnya berbagai regulasi baru yang mempengaruhi terhadap perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah, diantaranya:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Hal tersebut diatas, melatarbelakangi perlu adanya beberapa perubahan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Perubahan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Sehingga evaluasi Renja Dispora tahun lalu (2023) yang masih mengacu pada Renstra Dispora Lama (2024-2026) terdapat perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dan target/indicator capaian kinerja pada Renja Dispora tahun berjalan (2023) akibat dengan adanya perubahan Renstra Dispora 2024-2026.

Evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat menyajikan target tahun 2023, Karena adanya perubahan Renstra Dispora 2024-2026 dengan penyesuaian indikator dan target capaiannya sehinga Renja Dispora 2024 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana, dengan perkiraan tingkat pencapaian Renja Dispora tahun 2023 bila dikaitkan dengan capaian Renstra Dispora 2024-2026 untuk tahun berjalan/tahun ke-1 (2024), sebagaimana terlampir pada tabel 2.1:

Tabel 2.1.
Target Dan Perkiranaan Realisasi Program Dan Kegiatan Renja Dispora dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Dispora 2019-2023 (Tahun Berjalan/Tahun Ke-5/2023)

NO	KODE RING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023	TARGET PROGRAM DAN KEG. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
						REALISASI CAPAIAN PROG. & KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023/TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**NILAI SAKIP**	**77**	**75**	**76**	**98,70**
1	**201**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan capaian kinerja tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**90,91%**
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen tahun an dan lima tahunan Dispora	3 Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan	67%
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA Dispora	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA Perubahan Dispora	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Dispora	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perubahan Dispora	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%
6	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP dan Laporan Money Triwulanan Dispora	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	**202**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	23 orang ASN	24 orang ASN	23 orang ASN	100%
8	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Dok. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	1 Dokumen Laporan Keuanagan	1 Dokumen Laporan Keuanagan	1 Dokumen Laporan Keuanagan	100%
9	07	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Lap. Keungan Bulanan / triwulanan / Semesteran	6 Dokumen Laporan Keuanagan	6 Dokumen Laporan Keuanagan	6 Dokumen Laporan Keuanagan	100%
3	**205**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**
10	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Dispora	1 Dinas	1 Dinas	59 Orang	100%
11	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terfasilitasinya pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian ASN	23 orang ASN	24 Orang ASN	23 orang ASN	100%
12	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersampaikannya perpu tentang Kepemudaan dan Olahraga kepada pegawai Dispora	49 orang	54 Orang	49 orang	100%
13	11	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kapasitas ASN dalam penyusunan regulasi kepemudaan dan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	100%
4	**206**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi umum perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**93%**
14	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	90%
15	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kegiatan kantor	16 jenis bahan logistik untuk kegiatan kantor	14 jenis bahan logistik untuk kegiatan kantor	14 jenis bahan logistik untuk kegiatan kantor	100%
16	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dinas	17 Jenis cetakan dinas	9 jenis cetakan dinas	9 jenis cetakan dinas	100%
17	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan buku Perpu	860 eksemplar media cetak	1 Media	120 eksemplar media cetak	82%
18	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makan dan minum jamuan tamu	500 HOK	250 Hok	500 HOK	100%
19	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi terkait urusan perencanaan, keuangan, kepemudaan dan olahraga keluar daerah	215 HOK	12 Bulan	12 bulan	87%
5	**207**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**	**Presentase pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**
20	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeulair untuk keperluan kantor	8 Jenis Meubelair	2 Jenis Mebeler	3 Jenis Meubelair	100%
21	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin untuk keperluan kantor	3 jenis peralatan dan mesin untuk keperluan kantor	-	-	0%
6	**208**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase terpenuhinya pelayanan umum kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
22	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan surat menyurat dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
23	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
7	**209**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**	**Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**
24	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan layak pakai	3 unit mobil dinas dan 1 unit motor dinas	1 Untit Mobili Dinas	3 unit mobil dinas dan 1 unit motor dinas	100%
25	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dalam kondisi baik dan layak pakai	2 jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Kegiatan	1 kegiatan	100%
II		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PRESENTASE LAYANAN KEPEMUDAAN**	**10,30%**	**7,41%**	**7,41%**	**7,41%**
8	**201**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan**	**2.850 orang pemuda**	**2.315 orang pemuda**	**2.315 orang pemuda**	**81,23%**
26	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina dan dikembangkan	350 orang	120 orang	120 orang	44%
27	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang dilatih dalam berwirausaha	450 orang	250 orang	250 orang	56%
28	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah pemuda kader yang dibina dan dikembangkan	225 orang	120 orang	120 orang	53%
29	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi	Jumlah pemuda yang terdata melalui pelayanan kepemudaan	49.350 orang	32.900 orang	32.900 orang	67%
30	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Sapras Kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang tersedia dan termanfaatkan	50 unit prasarana kepemudaan	39 unit prasarana kepemudaan	39 unit prasarana kepemudaan	78%
31	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegitan kepemimpinan, kepeloporan dan	150 orang	100 orang	100 orang	67%
32	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan dilatih untuk menjadi Paskibra	300 orang	170 orang	170 orang	57%
9	**202**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab.**	**Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan**	**86 Organisasi**	**86 Organisasi**	**86 Organisasi**	**100%**
33	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang beraktifitas dalam organisasi kepemudaan	1.700 orang	1.500 orang	1.500 orang	88%
III		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA**	**0,299 - 0,799 (Sedang)**	**0,299 - 0,799 (Sedang)**	**0,299 - 0,799 (Sedang)**	**0,299 - 0,799 (Sedang)**
10	**201**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	**Jumlah ruang terbuka yang tersedia untuk melaksanakan aktifitas olahraga**	**2.600 lokasi**	**2.500 lokasi**	**2.562 lokasi**	**96,5%**
34	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun, disediakan, dipelihara dan termanfaatkan	20 lokasi Sarana olahraga dan 15 Jenis Prasarana Olahraga	5 lokasi Sarana olahraga dan 17 Jenis Prasarana Olahraga	5 lokasi Sarana olahraga dan 17 Jenis Prasarana Olahraga	96,5%
11	**202**	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada event / kejuaran olahraga**	**90 cabor**	**20 Cabor**	**20 Cabor**	**100,00%**
35	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tk. Kab/Kota	Jumlah penyelenggaraan kejuaraan yang dilaksanakan	2 cabor	2 Cabor	2 Cabor	100%
36	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Cabor dalam kejuaraan / pekan olahraga Tk. Kab	32 Cabor	-	1 kegiatan	100%
37	03	Partisipasi & Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabor yang diikuti dalam penyelenggaraan kejuaraan	86 Cabor	18 Cabor	18 Cabor	100%
12	**203**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet Berprestasi minimal tingkat Prov.**	**1.175 Atlet**	**205 Atlet**	**205 Atlet**	**52%**
38	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang diseleksi	2.420 Atlet	-	-	34%
39	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan	571 atlet	-	-	38%
40	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	1.175 Atlet	205 Atlet	205 Atlet	100%
41	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Tersedianya data sektoral keolahrgaan	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	67%
13	**204**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Olahraga**	**Presentase peningkatan SDM Pelaku Olahraga**	**60%**	**20%**	**20%**	**33%**
42	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organiasai dan pelaku olahraga yang bersertifikat	70 orang pelatih/wasit	20 orang pelatih/wasit	20 orang pelatih/wasit	60%
43	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	5 organisasi dan 5 Cabor	3 organisasi dan 2 Cabor	3 organisasi dan 2 Cabor	60%
44	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama olahraga dengan lembaga terkait	4 organisasi / lembaga / instansi	2 organisasi / lembaga / instansi	2 organisasi / lembaga / instansi	50%
14	**205**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga**	**30%**	**10%**	**10%**	**19,98%**
45	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas olahraga	4.801 orang			
46	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga yang telah diberdayakan	2 Perkumpulan/Klub olahraga	1 Perkumpulan/Klub olahraga	1 Perkumpulan/Klub olahraga	50%
47	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dipelihara dan termanfaatkan	10 lokasi prarana olahraga rekreasi dan 18 Jenis Prasarana Olahraga	8 lokasi prarana olahraga rekreasi dan 18 Jenis Prasarana Olahraga	8 lokasi prarana olahraga rekreasi dan 18 Jenis Prasarana Olahraga	80%
48	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah aktifitas olahraga wisata, tantangan dan petualangan	1 kegiatan	-		0%
49	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah aktifitas olahraga tradisional dalam masyarakat	5 cabor otrad	-	-	0%
IV		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan**	**30%**	**10%**	**10%**	**33%**
15	**201**	**Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**100%**
50	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	2.600 orang	2.200 orang	2.200 orang	85%

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dispora sesuai dengan tabel 2.1 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada Tahun 2023 total anggaran Dispora Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp.29.637.772.835,- dan terealisasi sebesar Rp.28.155.884.193,- atau 95,00%, yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 (empat) Program ,14 (empat belas) Kegiatan dan 45(empat puluh lima) Subkegiatan
  1) Pada tahun 2023 realisasi penyerapan anggaran porposional pada seiatiap Program serapan dianalisa melebihin 90% dan target capaian kinerja tercapai.
  2) Pada Indek Pembangunan Olahraga IPO masih kurangnya SDM keolahrgaan dan masih batas menimal pada angka partisipasi masyrakat dalam bnerolahraga diharpkan pada tahun 2024 nanti angka partisipasi masyrakat lebih meningkat.
  3) Capaian Kinerja pada IPO terbantunya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV dan Bandung Barat berhasil menduduki peringkat 8 Besar.
  4) Perlunya anggaran pemberian Bonus Atlet bagi atlet berprestasi pada ajang PORPROV 2022 untuk di anggarkan pada tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dispora Tahun 2024 - 2026 seperti pada tabel 2.3 :

Tabel 2.2
Target dan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Ke-1/2024	Ke-2/2025	Ke-3/2026
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat bidang Kepemudaan	Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan	Persentase Layanan kepemudaan	10,30%	10,35%	10,40%
		Meningkatnya Pembangunan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga	0,44	0,46	0,48

Sumber : Perubahan Renstra Dispora 2024-2026

Interpretasi atas hasil evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

a. Pada indikator capaian kinerja Dispora tahun 2019-2020 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 bertujuan dalam rangka mewujudkan: Misi 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan Tujuan: Pemberdayaan masyarakat pada bidang kepemudaan dan olahraga dan Sasaran: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat, dengan hasil evaluasi adalah sabagai berikut:
   - Terdapat kesenjangan/gap pada indikator pelayanan kepemudaan dan pelayanan olahraga dimana lebih banyak pada pelayanan kepemudaan hal ini disebabkan sebagaimana tertuang pada target indikator RPJMD 2018-2020 yang menjadi prioritas pembangunan 2018-2023 adalah pelayanan kepemudaan

- Terdapat kesenjangan/gap pada indikator pelayanan kepemudaaan dengan target indikatornya adalah presentasi pemuda yang memiliki kecakapan hidup padahal sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda
- Pada indikator jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan telah tercapai dengan capaian lebih dari 100%, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah:
  1) Dari total jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.739.911 jiwa terdapat 379.792 jiwa yang berusia 16 – 30 tahun, dengan kata lain sebanyak 21,83% jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah pemuda
  2) Terdapat 85 organisasi kepemudaan sebagai wadah pemuda untuk mendukung peran aktif pemuda dalam pembangunan
- Pada indikator presentase pemuda yang memiliki kecakapan hidup dan indikator presentase kenaikan pemuda yang berwirausaha pada tahun 2019 target indikator tidak tercapai, tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena:
  1) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda
  2) Belum adanya landasan hukum daerah dalam bentuk Perda/Perbup yang mengatur secara teknis tentang penyelenggaraan urusan Kepemudaan
  3) Belum adanya prasarana kepemudaan berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda
  4) Masih tingginya angka pengangguran pemuda yaitu sebesar 8,17% pemuda adalah menganggur.

5) Penyerapan lapangan pekerjaan bagi pemuda pada sektor manufaktur menyerap tenaga kerja pemuda sebanyak 69.542 jiwa atau 32,12% dan pada lapangan usaha untuk menggarap lahan pertanian menyerap tenaga kerja pemuda sebanyak 21,18%.
6) Belum adanya program dan kegiatan yang mendukung terhadap perlindungan pemuda, khususnya dari pengaruh destruktif (bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa
7) Belum terlaksananya koordinasi strategis lintas sector dalam pelayanan kepemudaan
8) Belum tersedianya data dan informasi kepemudaan yang update dan terintegrasi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evalausi pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan
9) Adanya pandemic covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 sangat berdampak pada seluruh sendi kehidupan tidak terkecuali pada pelayanan kepemudaan

- Pada indikator pelayanan keolahragaan tidak ada satupun target indikator yang telah tercapai, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, diantaranya:

1) Belum adanya landasan hukum daerah dalam bentuk Perda/Perbup yang mengatur secara teknis tentang penyelenggaraan urusan Olahraga
2) Belum adanya prasarana olahraga berupa gelanggang/gedung/lapang olaraga/Gedung Diklat olahraga sebagai pusat aktifitas masyarakat maupun atlet dalam penyelenggaraan olahraga
3) Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga yang dipengaruhi oleh kurang tersedianya sarana

dan prasarana serta ruang terbuka untuk melakukan kegiatan berolahraga

4) Pembangunan bidang olahraga masih dianggap tidak terlalu penting hal ini ditunjukan dengan tidak adanya target indikator dan program prioritas pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023
5) Masih Lemahnya koordinasi lintas Lembaga/stakeholder dalam hal penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga
6) Selama ini keberhasilan pembinaan olahraga selalu diukur dengan keberhasilan meraih medali, padahal kemajuan pembangunan olahraga bisa diukur melalui melalui Sport Development Index (Indeks Pembangunan Olahraga) yaitu indeks keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, SDM atau tenaga keolahragaan yang terlibat, partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur, dan derajat kebugaran jasmani yang dicapai masyarakat.
7) Masih minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku olahraga terutama atlet dan pelatih berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah diberbagai ajang kejuaraan tingkat provinsi, nasional bahkan dunia.
8) Belum adanya prioritas program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM/Pelaku olahraga yang terdiri dari olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan (pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi dan psikolog.
9) Belum tersedianya data dan informasi keolahragaan yang update dan terintegrasi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evalausi pelaksanaan pembangunan bidang olahraga
10) Adanya pandemic covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 sangat berdampak pada seluruh sendi kehidupan tidak terkecuali pada kegiatan dan pelayanan keolahragaan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sedangkan pembangunan bidang olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan 5 tahunan (Renstra Dispora tahun 2024-2026) tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat mempunyai peran yang cukup strategis untuk mencapai misi peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kepemudaan dan olah raga bagi masyarakat luas serta dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Begitu pula dengan keselarasan atau sinergitas program dan kegiatan kepemudaan dan olahraga antara Dispora Kabupaten Bandung Barat dengan Dispora Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian pemuda dan Olahraga terkait Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan pada indicator layanan kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

dalam rangka pencapaian indicator target meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraaga serta peningkatan prestasi olahraga.

Dalam pelaksanaannya untuk pencapaian target kinerja sebagaimana telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat mengidentifikasi permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan permasalahan pokok pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

1) Pencapaian pembangunan kepemudaan belum diarahkan dalam bentuk pelayanan kepemudaan
2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan aktifitas olahraga karena ketidak tersediaan prasarana olahraga yang cukup dan memadai.

Berdasarkan hasil identifikasi mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga juga berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (2023), kemudian dirumuskan beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Tantangan pelayanan kepemudaan dan olahraga, diantaranya:
    a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada (era digital) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan social pemuda tetapi dampak negatif dari perkembangan TIK yaitu pengaruh destruktif (bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa

b. Tantangan pelayanan pembangunan bidang kepemudaan pada saat dan pasca terjadinya endemi covid-19 yang berdampak kepada seluruh sendi kehidupan terutam dalam bidang ekonomi adalah terkait dengan persoalan produktivitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian
c. Tantangan dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga daerah pada tingkat nasional dan internasional dengan segala Keterbatasan dengan belum adanya prasarana olahraga terpadu dalam mendukung aktifitas dan prestasi olahraga dan keterbatasan
d. Para atlet Kab. Bandung Barat yang berlaga pada PORPROV lalu tahun 2023, harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah melalui pemeberian bonus atlet sebagai bentuk perhatian kepada pejuan-pejuang olahraga yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bandung Barat.

2) Peluang pelayanan kepemudaan dan olahraga, diantaranya:
   a. Jumlah penduduk usia muda (16-30 tahun) di Kab. Bandung Barat sebanyak 499.792 jiwa atau sebesar 28,77% merupakan potensi/asset yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan kepemudaan
   b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada (era digital) merupakan peluang dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat
   c. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Kepemudaan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait pelaksanaan program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat
   d. Keberadaan pusat pendidikan instansi TNI/Polri dengan segala prasarana olahraganya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi dan aktifitas olahraga masyarakat.

e. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat.

f. Pemulihan ekonomi dengan gerakan pemuda bangkit dalam pemulihan ekonomi ini menjadi bentuk perhatian kami, dengan menciptakan wirausaha pemuda pemula,sehingga mengubah pola pikir pemuda bahwasanya selesai menjalani pendiikan pormal harus bekerja,sedangkan jumlah lulusan sekolah dan ketersediaan lapangan kerja sangatlah jauh sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga berusaha mereubah pola pikir tersebut bahwasanya pemuda bisa berwirausaha sehingga dapat membuka lapangan kerja melalui metoda pelatihan dan bantuan alat wirausaha.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (Tahun 2024) diantaranya:

1) Pelayanan kepemudaan yang diarahkan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda untuk mewujudkan semua dimensi pelayanan kepemudaan
2) Selama ini keberhasilan pembinaan olahraga selalu diukur dengan keberhasilan meraih medali, padahal ada istilah baru dalam olahraga Indonesia berupa metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru

untuk megukur kemajuan pembangunan olahraga melalui Sport Development Index (SDI) / IPO (Indeks Pembangunan Olahraga) yaitu indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar (Ruang terbuka, SDM/Tenaga Keolahragaan, Partisipasi Masyarakat dan derajat kebuagaran jasmani) sehingga diharapkan target indicator pencapaian program dan kegiatan pada bidang olah raga dapat terukur tidak hanya melalui pencapaian olahraga prestasi dalm bentuk raihan medali

3) Kerjasama dan pemanfaatan prasarana serta fasilitas umum olahraga untuk dikelola dan dimanfaatakan untuk kepentingan masyarakat.
4) Dinas Pemuda dan Olahraga berusaha mereubah pola pikir tersebut bahwasanya pemuda bisa berwirausaha sehingga dapat membuka lapangan kerja melalui metoda pelatihan dan bantuan alat wirausaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun kebijakan anggaran yang menjadi dasar penetapan kebijakan umum APBD, dan tentunya dalam penyusunan Rencana Kerja Dispora Tahun 2024 ini disesuaikan / mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang sudah ditetapkan, dengan mengutamakan kebutuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna merealisasikan pencapaian target kinerja di tahun 2024.

Adapun reviu antara rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Barat dengan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat sebagaimana terlampir pada table 2.3:

Tabel 2.3
Reviu Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2023
Terhadap RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

NO	KODE RINC	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.19.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**NILAI SAKIP**	**76**	**5.787.374.092**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**NILAI SAKIP**	**76**	**5.882.261.762**
	201	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan capaian kinerja tepat waktu**	**100%**	**76.100.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan capaian kinerja tepat waktu**	**100%**	**69.980.000**
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandung Barat	Tersedianya dokumen tahunan dan lima tahunan Dispora	2 Dokumen Perencanaan	38.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandung Barat	Tersedianya dokumen tahunan dan lima tahunan Dispora	2 Dokumen Perencanaan	55.030.000
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan RKA Dispora	1 Dokumen Perencanaan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan RKA Dispora	1 Dokumen Perencanaan	2.990.000
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan RKA Perubahan Dispora	1 Dokumen Perencanaan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan RKA Perubahan Dispora	1 Dokumen Perencanaan	2.990.000
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan DPA Dispora	1 Dokumen Perencanaan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan DPA Dispora	1 Dokumen Perencanaan	2.990.000
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan DPA Perubahan Dispora	1 Dokumen Perencanaan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bandung Barat	Penyusunan DPA Perubahan Dispora	1 Dokumen Perencanaan	2.990.000
6	06	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandung Barat	Penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP dan Laporan Monev Triwulanan Dispora	4 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandung Barat	Penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP dan Laporan Monev Triwulanan Dispora	4 Dokumen	2.990.000
	202	**Kegiatan Administrasi KeuanganKegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**5.377.374.092**	**Kegiatan Administrasi KeuanganKegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**5.401.081.892**
7	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandung Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	23 orang ASN	5.362.374.092	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandung Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	23 orang ASN	5.370.123.092
8	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandung Barat	Penyusunan Dok. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	1 Dokumen Laporan Keuangan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandung Barat	Penyusunan Dok. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	1 Dokumen Laporan Keuangan	2.990.000
9	07	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandung Barat	Penyusunan Lap. Keungan Bulanan / triwulanan / Semesteran	6 Dokumen Laporan Keuanagan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandung Barat	Penyusunan Lap. Keungan Bulanan / triwulanan / Semesteran	6 Dokumen Laporan Keuanagan	27.968.800
	205	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**75.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**100.254.900**
10	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bandung Barat	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Dispora	49 Stell	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bandung Barat	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Dispora	49 Stell	414.900
11	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandung Barat	Terfasilitasinya pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian ASN	23 orang ASN	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandung Barat	Terfasilitasinya pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian ASN	23 orang ASN	27.950.000
12	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bandung Barat	Tersampaikannya perpu tentang Kepemudaan dan Olahraga kepada pegawai Dispora	49 orang	35.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bandung Barat	Tersampaikannya perpu tentang Kepemudaan dan Olahraga kepada pegawai Dispora	49 orang	71.890.000
13		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bandung Barat	Tersampaikannya perpu tentang Kepemudaan dan Olahraga kepada pegawai Dispora	49 orang	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bandung Barat	Tersampaikannya perpu tentang Kepemudaan dan Olahraga kepada pegawai Dispora	49 orang	650.000
	206	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan administrasi umum perkantoran**	**85%**	**177.500.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan administrasi umum perkantoran**	**85%**	**184.907.600**
14	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	77.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	70.415.600
15	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandung Barat	Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kegiatan kantor	16 jenis bahan logistik untuk kegiatan kantor	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandung Barat	Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kegiatan kantor	16 jenis bahan logistik untuk kegiatan kantor	40.460.000
16	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bandung Barat	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dinas	8 Jenis cetakan dinas	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bandung Barat	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dinas	8 Jenis cetakan dinas	3.017.000
18	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandung Barat	Terpenuhinya makan dan minum jamuan tamu	500 HOK	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandung Barat	Terpenuhinya makan dan minum jamuan tamu	500 HOK	26.000.000
19	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandung Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi terkait urusan perencanaan, keuangan, kepemudaan dan olahraga keluar daerah	32 HOK	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandung Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi terkait urusan perencanaan, keuangan, kepemudaan dan olahraga keluar daerah	32 HOK	45.015.000
	207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase pengadaan barang milik daerah**	**90%**	**30.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase pengadaan barang milik daerah**	**90%**	**3.455.700**
19	05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan meubeulair untuk keperluan kantor	3 Jenis Meubelair	30.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan meubeulair untuk keperluan kantor	3 Jenis Meubelair	3.455.700
	208	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase terpenuhinya pelayanan umum kantor**	**100%**	**26.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase terpenuhinya pelayanan umum kantor**	**100%**	**65.999.100**
20	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya pelayanan surat menyurat dinas	12 bulan	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya pelayanan surat menyurat dinas	12 bulan	30.000.000
21	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhinya pelayanan umum kantor	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhinya pelayanan umum kantor	12 bulan	35.999.100
	209	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai**	**75%**	**25.400.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai**	**75%**	**56.582.570**
22	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan layak pakai	3 unit mobil dinas dan 5 unit motor dinas	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan layak pakai	3 unit mobil dinas dan 5 unit motor dinas	10.400.000
23	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dalam kondisi baik dan layak pakai	1 jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	10.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dalam kondisi baik dan layak pakai	1 jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	46.182.570
2.19.02		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**PRESENTASE LAYANAN KEPEMUDAAN**	**10,30%**	**900.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**PRESENTASE LAYANAN KEPEMUDAAN**	**10,30%**	**3.813.527.800**
	201	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan**	**2.560 orang pemuda**	**750.000.000**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan**	**2.560 orang pemuda**	**3.549.491.400**
24	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Bandung Barat	Jumlah pemuda pelopor yang dibina dan dikembangkan	315 orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Bandung Barat	Jumlah pemuda pelopor yang dibina dan dikembangkan	315 orang	479.005.000
25	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang dilatih dalam berwirausaha	350 orang	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang dilatih dalam berwirausaha	350 orang	383.882.600
26	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Bandung Barat	Jumlah pemuda kader yang dibina dan dikembangkan	75 orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Bandung Barat	Jumlah pemuda kader yang dibina dan dikembangkan	75 orang	109.173.600
27	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang terdata melalui pelayanan kepemudaan	41.100 orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang terdata melalui pelayanan kepemudaan	41.100 orang	104.133.600
28	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah sapras kepemudaan yang tersedia & termanfaatkan	45 unit prasarana kepemudaan	100.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah sapras kepemudaan yang tersedia & termanfaatkan	45 unit prasarana kepemudaan	2.197.555.200
29	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang terlibat dalam keg. kepemimpinan, kepeloporan & kesukarelawan	120 orang	100.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang terlibat dalam keg. kepemimpinan, kepeloporan & kesukarelawan	120 orang	275.741.400
	202	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan**	**86 Organisasi**	**150.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan**	**86 Organisasi**	**264.036.400**
31	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang beraktifitas dalam organisasi kepemudaan	1.600 orang	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bandung Barat	Jumlah pemuda yang beraktifitas dalam organisasi kepemudaan	1.600 orang	264.036.400
2.19.03		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Indeks Pembangunan Olahraga**	**0,299 - 0,799 (Sedang)**	**1.220.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Indeks Pembangunan Olahraga**	**0,299 - 0,799 (Sedang)**	**27.067.644.346**
	201	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah ruang terbuka yang tersedia untuk melaksanakan aktifitas olahraga**	**2.550 lokasi**	**250.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah ruang terbuka yang tersedia untuk melaksanakan aktifitas olahraga**	**2.550 lokasi**	**2.672.995.000**
32	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Bandung Barat	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun, disediakan, dipelihara dan termanfaatkan	7 lokasi Sarana olahraga dan 13 Jenis Prasarana Olahraga	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Bandung Barat	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun, disediakan, dipelihara dan termanfaatkan	7 lokasi Sarana olahraga dan 13 Jenis Prasarana Olahraga	2.672.995.000
	202	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada event / kejuaran olahraga**	**63 Cabor**	**450.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada event / kejuaran olahraga**	**63 Cabor**	**718.230.400**
33	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tk. Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah event / kejuaran olahraga yang diikuti dan dilaksanakan	2 Cabor	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tk. Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah event / kejuaran olahraga yang diikuti dan dilaksanakan	2 Cabor	3.600.000
34	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Bandung Barat	Jumlah cabor yang diikuti dalam penyelenggaraan kejuaraan	61 Cabor	300.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Bandung Barat	Jumlah cabor yang diikuti dalam penyelenggaraan kejuaraan	61 Cabor	714.630.400
	203	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Atlet Berprestasi minimal tingkat Prov.**	**235 Atlet**	**55.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Atlet Berprestasi minimal tingkat Prov.**	**235 Atlet**	**16.259.618.350**
35	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan	121 Atlet	20.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Bandung Barat	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan	121 Atlet	1.029.130.800
36	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Bandung Barat	Jumlah atlet berprestasi	235 Atlet	15.000.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Bandung Barat	Jumlah atlet berprestasi	235 Atlet	15.009.750.000
37	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Bandung Barat	Tersedianya data sektoral keolahrgaan	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Bandung Barat	Tersedianya data sektoral keolahrgaan	2 Dokumen	220.737.550
	204	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Presentase peningkatan SDM Pelaku Olahraga**	**20%**	**60.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Presentase peningkatan SDM Pelaku Olahraga**	**20%**	**5.007.904.400**
38	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Bandung Barat	Jumlah organisasi dan pelaku olahraga yang bersertifikat	50 orang pelatih/wasit	20.000.000	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Bandung Barat	Jumlah organisasi dan pelaku olahraga yang bersertifikat	50 orang pelatih/wasit	20.000.000
39	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Bandung Barat	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	5 organisasi dan 5 Cabor	15.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Bandung Barat	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	5 organisasi dan 5 Cabor	4.905.850.000
40	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Bandung Barat	Jumlah kerjasama olahraga dengan lembaga terkait	3 organisasi / lembaga / instansi	25.000.000	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Bandung Barat	Jumlah kerjasama olahraga dengan lembaga terkait	3 organisasi / lembaga / instansi	82.054.400
	205	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga**	**20%**	**405.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga**	**20%**	**2.408.896.196**
41	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bandung Barat	Jumlah masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas olahraga	4.801 orang	150.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bandung Barat	Jumlah masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas olahraga	4.801 orang	1.494.073.000
42	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Bandung Barat	Jumlah perkumpulan olahraga yang telah diberdayakan	2 Perkumpulan/Klub olahraga	25.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Bandung Barat	Jumlah perkumpulan olahraga yang telah diberdayakan	2 Perkumpulan/Klub olahraga	29.892.000
43	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Bandung Barat	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dipelihara dan termanfaatkan	8 lokasi prarana olahraga rekreasi dan 10 Jenis Prasarana Olahraga	200.000.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Bandung Barat	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dipelihara dan termanfaatkan	8 lokasi prarana olahraga rekreasi dan 10 Jenis Prasarana Olahraga	823.083.996
44	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Bandung Barat	Jumlah aktifitas olahraga wisata, tantangan dan petualangan	1 kegiatan	30.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Bandung Barat	Jumlah aktifitas olahraga wisata, tantangan dan petualangan	1 kegiatan	61.847.200
45	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Bandung Barat	Jumlah Kegiatan Oalhraga Traditional	1 kegiatan	7.500.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Bandung Barat	Jumlah Kegiatan Oalhraga Traditional	1 kegiatan	1.950.000
2.19.04		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan**	**10%**	**15.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan**	**10%**	**224.830.000**
	201	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan**	**1 Kegiatan**	**15.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan**	**1 Kegiatan**	**224.830.000**
45	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	2.400 orang	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	2.400 orang	224.830.000
TOTAL ANGGARAN						**7.922.374.092**					**36.988.263.908**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme MUSRENBANG yang diusulkan pada aplikasi SIPD yang selanjutnya diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappelitbangda Kabupaten Bandung dan Dinas Pemuda Olahraga secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan bahwa:

- Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Hibah termasuk klasifikasi Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek

Berdasarkan hal tersebut, bahwa usulan dari badan/Lembaga/Organisasi kepemudaan dan olahraga termasuk ke dalam usulan masyarakat yang dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut haruslah menunjang terhadap capaian target kinerja dan isu-isu penting tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian usulan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Usulan Dari Masyarakat/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No.	Rincian	CPCL	Kecamatan	Desa	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Sarana Prasarana Olah Raga Rekreasi	Kp. Leuwinutug Rw. 014	Cililin	BATULAYANG	150.000.000
2	Penyediaan Sarana Prasana Olahraga lapang Sepak Bola Desa Cicadas	Kp. Cimacan RT 4 RW 15 Ds. Cicadas	Rongga	Cicadas	150.000.000
3	Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi (Penyediaan lapangan)	Kp. Cibali RT 3 RW 5 Cicadas	Rongga	Cicadas	150.000.000
4	SARANA PRASARANA OLAHRAGA Lapangan Bola (Meningkatkan akses Olahraga diwilayah Batujajar)	BLOK CARI DS. BATUJAJAR BARAT RW 1 RT 4	Batujajar	BATUJAJAR BARAT	150.000.000
5	Penyediaan sarana prasarana olah raga DESTINASI WISATA (LEBAK NENG GEULIS)		Batujajar	GIRIASIH	150.000.000
6	Pengembangan Olah Raga Wisata Dan	RW 07	Cisarua	PADAASIH	100.000.000
7	Pembangunan Tribun Lapang Sepakbola Ciptaharja	rt 01 rw 05 kp. cijuhung	**CIPATAT**	Ciptaharja	150.000.000
8	Sarana prasarana Olah raga (Lapangan volly)	rw 06 rt 02 kp. Cirawa	**CIPATAT**	Cirawamekar	150.000.000
9	Penyedian Sarana Prasaran Wirausaha Pemuda	Kelompok Wirausaha MANDIRI Kp. Sukarasa Rw 02	Cikalongwetan	WANGUNJAYA	50.000.000
10	Penyediaan Sarana Prasana Olahraga Rekreasi	Gedung Serbaguna Desa Cikalong	Cikalongwetan	CIKALONG	150.000.000
11	KORMI Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat			750.000.000
12	KONI Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat			4.000.000.000
13	NPCI (National Paralympic Comitte Indonesia) Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat			150.000.000
14	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kab.Bandung Barat	Bandung Barat			150.000.000
15	KNPI	Bandung Barat			200.000.000
JUMLAH					**6.600.000.000**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah terutama keterkaitannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat.

Dengan dilakukannya RPD Kabupaten Bandung Barat 2024 – 2026 hal ini menjadi pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menyempurnakan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga periode tahun 2024-2026 akibat belum adanya Bupati Devinitip, sehingga berimplikasi pula belum adanya RPJMD Kabupaten Bandung Barat.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dalam hal ini tahun 2024 adalah tahun ke-1 dalam Capaian Renstra Dispora Tahun 2024-2026.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang pada RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat menetapkan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepemudaan dan Olahraga
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan, dengan indikator sasaran adalah Presentase Layanan Kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan:
   a. Penyadaran Pemuda yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan melalui peningkatan iman dan takwa serta berakhlak mulia, pendidikan wawasan kebangsaan, penumbuhan semangat bela negara, pemantapan kebudayaan nasional berbasis kebudayaan lokal; penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
   b. Pemberdayaan Pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, melalui peningkatan IPTEK; pendidikan bela negara; peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan serta peran aktif dalam organisasi kepemudaan
   c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda, melalui pendidikan dan pelatihan, kaderisasi, bimbingan dan pendampingan serta forum kepemimpinan pemuda
   d. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diarahkan untuk menyiapkan dan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berwira usaha untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja dalam upaya mendukung perekonomian, melalui pelatihan dan pemagangan, bimbingan dan pendampingan; kemitraan dan promosi serta fasilitasi akses permodalan dalam berwirausaha
   e. Pengembangan Kepeloporan Pemuda diarahkan untuk mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah untuk melahirkan kader pemuda yang berprestasi
2. Meningkatnya Pembangunan Olahraga, dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Olahraga, yang terdiri dari 4 (empat) dimensi dasar, yaitu:
   a. Jumlah ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga

b. Presentase SDM/Tenaga Keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga
c. Partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur
d. Derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat

3. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dengan indikator sasaran NILAI SAKIP

Tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat beserta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dispora 2024-2026 untuk tahun ke-1 (tahun 2024) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Tahun 2024
Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Ke-1/2024	Ke-2/2025	Ke-3/2026
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat bidang Kepemudaan	Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan	Persentase Layanan kepemudaan	10,30%	10,35%	10,40%
		Meningkatnya Pembangunan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga	0,44	0,46	0,48
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efesien	Meningkatnya Akuntabilitasi Instasi Pemerintahan	Nilai Evaluasi Sakip	78,01	78,05	78,10

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan pencapaian Renstra Dispora tahun 2024-2026, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian program pembangunan yang selaras dan berpedoman pada RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas, hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Dengan adanya perubahan kebijakan terutama dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan mengubah banyak kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah akan menuntut adanya keseragaman perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Dan terakhir rencana program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Sebagai perwujudan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dilakukan penyempurnaan yang telah disesuaikan dengan peraturan baru dengan berpedoman pada perubahan RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan juga berdasarkan perubahan Renstra Dispora 2024-2026, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 adalah:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, yaitu:
    1) Kegaiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan
    2) Kegaiatan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, yaitu:
    1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan
    2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan
    3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan
    4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan
    5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
    1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, yaitu:
   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan
   3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan
   4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan
   5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan
   6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan
   7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

Dari rencana program dan kegiatan tersebut, untuk dapat direalisasikan pada tahun 2023 didukung oleh pendanaan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan sumber pendanaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan dan sasaran serta indikatornya yang dipakai sebagai pedoman dan acuan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat serta bertujuan untuk mencapai target kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini tentunya dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Di dalam Rencana kerja ini berisi kaidah – kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, yaitu

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan program – program dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini secara murni dan konsekuen berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat.
2. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung Barat
3. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat berkewajiban untuk menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis melalui menejemen yang baik.
4. Dalam implementasinya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan ketercapaian target kinerja serta program, kegiatan dan sub kegiatannya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Bandung Barat, Juni 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Ludi Awaludin, S. IP., M.S.i
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19681228 198803 1 001

2024

RENCANA KERJA(RENJA) PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024. Melalui penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini diharapkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target walaupun terdapat beberapa penyesuaian sebagai akibat dari adanya perubahan regulasi. Kami menyadari bahwa Renja Perubahan ini tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja Perubahan yang akan datang.

Semoga Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini dengan segala keterbatasannya dapat bermanfaat khususnya untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan internal dan umumnya bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam hal meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan**.**

Bandung Barat, 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

A.FAUZAN AZIMA,Amd.LLAJ., S.Sos., MH.
NIP. 198005202001121005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA Perubahan SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

Dengan demikian RENJA Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Perubahan SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Pemerintah Daerah (RPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Perhubungan supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya adalah untuk mensinergikan seluruh kegiatan yang ada supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan solusi bagi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang, sub bidang dan staf dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan atau peningkatan kondisi yang ada sesuai dengan target pencapaian perubahan rencana strategis (renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap RPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS

Bab ini menjelaskan Telaahaan terhadap kebijalkan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas serta Program dan Kegiatan Dinas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi maupun Sistem Transportasi Jalan Yang Handal Berbasis Teknologi-Informatika Dalam Mendukung Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Wilayah di Kabupaten Bandung Barat, serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja PerubahanDinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian

target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelsanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (sasaran) adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya aksebilitas wilayah	1. Meningkatnya Kemantapan Jalan dan Angkutan Kabupaten yang Berkeselamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2. Meningkatnya Capaian Komponen Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026 :

Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024- 2026

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	97,92	98,42	98,93
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	96,25	98,13	100
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan	71 (BB)	75 (BB)	81 (A)

Pencapaian hasil realisasi kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2024 terbagi ke dalam 1 (satu) Program Non Urusan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2 (dua) Program Urusan Perhubungan yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran, dan 16 Kegiatan dan 48 Sub-Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 63.031.687.191,- terealisasi sebesar Rp. 61.462.439.300,- atau 97,51%., dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Non Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 26 Sub-Kegiatan. Realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub-kegiatan, yaitu:
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.806.928,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.895.428,- Atau 92,79%.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.115.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.115.200,- Atau 100%.
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.209.200,- dan terealisasi sebesar Rp.12.209.200,- Atau 100%.
    d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.630.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.630.200,- Atau 100%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.127.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.699.800,- Atau 90,33%.

f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.628.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.012.100,- Atau 93,53%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 5 sub-kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.594.243.686,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.388.361.296,- Atau 97,60%.

   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.534.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.284.400,- Atau 99,55%.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.876.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.876.900,- Atau 100%.

   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.810.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.745.500,- Atau 99,69%.

   e. Penyusunan Pelaporan dan Analisasis Prognosis Realsasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- Atau 100%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan berupa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.517.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 496.701.675,- atau 99,44%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (Lima) sub-kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.851.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.851.100,- Atau 100 %.

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.214.000- Atau 99,26%.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 48.600.000,- Atau 99,26%.

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.673.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.673.200,- Atau 100%.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggran sebesar Rp. 28.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.260.000,- Atau 100%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (Tiga) sub-kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.785.000,- Atau 99,94%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.500.000,- Atau 100%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.500.000,- Atau 100%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (Tiga) sub-kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp38.554.600,- dan terealisasi sebesar Rp 34.794.100,- Atau 90,25%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 461.139.200,- dan terealisasi sebesar Rp.454.070.766,- Atau 98,47%.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.450.399,- dan terealisasi sebesar Rp.263.450.399 Atau 100%.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 9 Kegiatan dan 32 Sub-Kegiatan. Realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (Dua) sub-kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.017.833.300,- dan terealisasi sebesar Rp.41.306.774.593,- Atau 99,23 %.
   b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.228.260.850,- dan terealisasi sebesar Rp 1.021.653.034,- Atau 100%.
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, terdiri dari 1(satu) sub-kegiatan, yaitu:
   a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 328.672.514,- dan terealisasi sebesar Rp. 328.672.514,- Atau 100%.

3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, terdiri dari 2 (dua) sub-kegiatan, yaitu:
    a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 608.020.940,- dan terealisasi sebesar Rp. 576.013.840,- Atau 94,74%.
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.402.255,- dan terealisasi sebesar Rp. 318.928.500,- Atau 92,07%.
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, terdiri dari 7 sub-kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.071.281.268,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.005.290.261,- Atau 93,84%.
    b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 354.859.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 327.766.172,- Atau 92,37%.
    c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.116.000,- dan terealisasi sebesar Rp.107.116.000,- Atau 100%.
    d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- Atau 100%.
    e. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp34.600.000,- Atau 100%.

f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.327.301.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.289.580.959,- Atau 97,16%.

g. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp10.085.000,- Atau 96,23%.

5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) sub-kegiatan, yaitu:

   a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.829.365.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 826.012.700,- Atau 99,60%.

   b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.036.126.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 892.399.200,- Atau 86,13%.

   c. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.093.991.831,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.093.991.831,- Atau 100%.

   d. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.014.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.878.800,- Atau 72,69%.

6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, berupa sub-kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.505.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.190.600,- Atau 99%.

7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, terdiri dari 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.342.600,- dan terealisasi sebesar Rp 23.342.600,- Atau 100%.

b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.697.500,- Atau 100%.

c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.358.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.358.000,- Atau 100%.

8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, berupa sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 274.264.000,- Atau 100%.

9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 2(dua) Daerah Kabupaten/Kota,

a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.307.500,- dan terealisasi sebesar Rp290.307.500,- Atau 100%.

b. Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebiajakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 629.846.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 611.402.032,- Atau 97,07%.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Program Pengelolaan Pelayaran hanya terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan. Realisasi Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal,

berupa sub kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan alokasi anggaran sebesar 263.994.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 250.874.400,- Atau 95.03%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Pada Tahun Sebelumnya s/d Tahun 2024
Kabupaten Bandung Barat

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUPUT) / SUB KEGAITAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024	
				K		K		K	
1	2	3	4	5		6		7	
1		**NON URUSAN**							
1	**Meningkatnya capaian komponen perencanaan penganggaran, pengukuran kinerja, pelaopran dan evaluasi kinerja**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1.212**		**171**		**321**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**36**		**8**		**9**	**0**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja	6	dok	2	dok	2	dok
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	3	dok	1	dok	1	dok
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKAP	3	dok	1	dok	1	dok
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA	3	dok	1	dok	1	dok
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPPA	3	dok	1	dok	1	dok
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	1	Laporan	2	Laporan
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**384**		**16**		**17**	
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	303	Orang/Bulan	12	Orang/Bulan	12	Orang/Bulan

9		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya jasa administrasi keuangan yang tepat sasaran	36	Dok	1	Dok	1	Dok
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	36	Laporan	2	Laporan	2	Laporan
12		Penyusunan Pelaporan dan Analisasis Prognosis Realsasi Anggaran	Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Laporan	-	Laporan	1	Laporan
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**456**		**1**		**163**	
13		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	6	Paket	1	Paket	163	Stell
14		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	450	Orang	-	Orang	0	Orang
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**90**		**50**		**40**	
15		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	-	-	-	-
16		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	3	paket	1	paket	1	paket
17		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik berupa Alat Tulis Kantor	3	paket	1	paket	1	paket
18		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	paket	12	paket	12	paket
19		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	36	dokumen	12	dokumen	12	dokumen
20		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum untuk kunjungan tamu, rapat dan acara lainnya	36	laporan	12	laporan	12	laporan
21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	laporan	12	laporan	2	laporan
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**108**		**36**		**36**	
22		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
23		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan

24		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**138**		**60**		**56**	
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	2	Unit	1	Unit
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129	Unit	55	Unit	53	Unit
27		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	3	Unit	2	Unit
		URUSAN PERHUBUNGAN							
1	**Meningkatnya Kemantapan Jalan dan Angkutan Kabupaten yang Berkeselamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**38.617**	**0**
1		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**13.090**	**0**	**6.253**	**0**	**1.771**	**0**
1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan diruas jalan	9.103	Unit	5.834	Unit	1.171	Unit
2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terslaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan diruas jalan	3.987	unit	419	Unit	600	Unit
2		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**23**	**0**	**80**	**0**	**1**	**0**
3		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana Terminal	5	Unit	-	Unit	-	Unit
4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pelaksanaan pemeliharaan terminal	3	Unit	3	Unit	1	Unit
5		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Terbinanya SDM pengelola terminal	15	Orang	77	Orang	-	Orang
3		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**6**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

6		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya manajemen pengelolaan perparkiran	3	Dok	1	Dok	1	Dok
7		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanana monev pengelolaan perparkiran	3	Dok	1	Dok	1	Dok
4		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**122.176**	**0**	**16.786**	**0**	**36.052**	**0**
8		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	31	Unit	9	Unit	10	Unit
9		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor yang bersertifikat kompetensi	52	Orang	16	Orang	16	Orang
10		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya data kendaraan wajib uji	60.000	Unit	15.014	Unit	18.000	Unit
11		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor	62.000	Dok	1.725	Dok	18.000	Dok
12		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Sosialisasi ke pengguna kendaraan	9	Laporan	-	-	-	-
13		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksanany kegiatan uji keliling di daerah	15	Laporan	3	Laporan	5	Laporan
14		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kondisi sapras Pengujian	60	Unit	15	Unit	20	Unit
15		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya koodinasi pelaksanaan pengujian	3	Laporan	2	Laporan	1	Laporan
16		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersusunya perda retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	Laporan	-	Laporan	-	Laporan
17		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya SKM Terhadap Pelayanan UPTD PKB	3	Laporan	2	Laporan	-	Laporan
5		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**21**	**0**	**56**	**0**	**773**	**0**
18		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian ruas jalan	3	Laporan	2	Laporan	1	Laporan
19		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Terlaksananya Forum LLAJ Kabupaten	0	Dok	50	Dok	2	Dok

20		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya perlengkapan jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	6	Dok	2	Dok	768	unit
21		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi	6	Laporan	2	Laporan	-	Laporan
22		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasdi ruas jalan kabupaten	6	Laporan	0	Laporan	2	dok
6		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**60**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**
23		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya penilaian hasil ANDALALIN	30	Laporan	10	Laporan	10	Laporan
24		Pengawsan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	30	Laporan	0	Laporan	-	Laporan
7		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**123**	**0**	**12**	**0**	**5**	**0**
25		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	tersedianya SDM sertifikat kompetensi keselamatan	9	Orang	0	Orang	-	Orang
26		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya penyelangaraan Inspeksi di terminal	15	Laporan	3	Laporan	2	Laporan
27		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penyelengaraan Inspeksi Kompetensi pengemudi	90	Laporan	0	Laporan	-	Laporan
28		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Audit SMK Perusahaan Angkutan Umum	3	Laporan	7	Laporan	1	Laporan
29		Pelaksanaan Pengawas Melalui Uji Petik Terhadap Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kencaraan Bermotor	terlaksannya inspeksi,audit dan pemantauan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	6	Laporan	2	Laporan	2	Laporan
8		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**3**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
30		Pengendalian dan Pengawas Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan

9		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**3**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**
31		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Terlaksananya rerouting trayek, Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	1	Dok
32		Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebiajakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Tersedianya Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dok	1	Dok	1	Dok
2		**Program Pengelolaan Pelayaran**						**4**	**Laporan**
10		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**12**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**4**	**Laporan**
33		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan lokal	12	Laporan	1	Laporan	4	Laporan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalm NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam perjalanannya, penganggaran program dan kegiatan di Dinas Perhubungan berfokus dalam peningkatan pelayanan perhubungan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur perhubungan guna mendorong perkembangan daerah terutama daerah yang jauh dari pusat perekonomian, dengan harapan semua masyarakat di wilayah bandung barat dapat menikmati pertumbuhan daerah khususnya di bidang perhubungan.

Namun demikian, pelayanan transportasi harus mengikuti laju pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien, seperti penyediaan prasarana lalu lintas; pelayanan perizinan bidang Perhubungan serta operasional lainnya. Selain itu Dinas Perhubungan dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dampak pertumbuhan daerah.

Selain itu disajikan beberapa Capaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian kinerja anggaran Dinas Perhubungan
Tahun 2024

No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	%
1.	Kinerja Penyerapan Anggaran	63.031.687.191	61.462.439.300	97,51
2.	Kinerja Pendapatan Dinas	800.000.000	553.225.664	69,15

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada Tahun 2022, secara umum mengalami peningkatan di banding tahun lalu, tetapi terdapat beberapa capaian yang masih belum memenuhi target karena refocusing anggaran untuk memprioritaskan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan selama penyelenggaraan bidang Perhubungan selama tahun 2022 adalah Pembatasan anggaran di sektor perhubungan akibat pemusatan (refocusing) program dan kegiatan dalam Pembangunan daerah agar mencapai target sehingga efektif dan efisien dalam mengejar ketinggalan akibat pengananan Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

Dengan adanya beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan teknis Bidang Perhubungan pada tahun 2022 dalam Pembangunan Daerah pasca pandemi, maka hal tersebut memberikan dampak terhadap capaian program visi dan misi Bupati Bandung Barat yang tertuang dalan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023. Dengan konseksuensi tersebut maka nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan secara umum adalah tidak mencapai target.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan adalah diantaranya :

a. Minimnya anggaran yang ada di Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan Bidang Perhubungan;
b. Dalam mencapai pelayanan perhubungan khususnya pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan minimnya anggaran dan Sumber daya Manusia.

Peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan adalah diantaranya :

a. Mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada untuk pelayanan bidang Perhubungan baik secara administrative dan teknis dilapangan;
b. Memperioritaskan anggaran berbasis kinerja yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

• **Peluang (Opportunity)**

1) Letak geografis yang strategis
2) Dukungan Insfratruktur dalam hal Fasilitas Transportasi
3) Mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada untuk pelayanan bidang Perhubungan baik secara administrative dan teknis dilapangan;
4) Memperioritaskan anggaran berbasis kinerja yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

• **Tantangan (threat)**

1) Minimnya anggaran yang ada di Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan Bidang Perhubungan;
2) Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas
3) Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

1. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal dan pelabuhan penyeberangan.
2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.
3. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.
4. Keterbatasan ruang parkir dan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat menempuh beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan kualitas aparatur yang mengikuti bimtek/diklat, membangun sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan, melakukan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran serta Mengoptimalkan sarana dan prasarana Penerangan jalan umum (PJU).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Daerah.

Berikut disajikan Tabel Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Lembar : Dari :

No	Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**33.683.632.526**		**18.921.392.039**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.028.858.024**		**11.462.920.148**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				155.416.100		290.362.228	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen Perencanaan (Renja dan Renstra)	1 Dokumen	25.890.600	2 Dokumen	95.806.928	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen RKA	1 Dokumen	42.053.200	1 Dokumen	12.115.200	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen RKAP	1 Dokumen	16.109.200	1 Dokumen	12.209.200	
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen DPA	1 Dokumen	8.630.200	1 Dokumen	0	
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen DPPA	1 Dokumen	8.630.200	1 Dokumen	8.630.200	
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	1 Laporan	25.890.600	1 Laporan	86.718.600	

g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Laporan	28.212.100	2 Laporan	74.882.100	
No	**Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Rancangan Awal RKPD**		**Hasil Analisis Kebutuhan**		**Catatan Penting**
				Target Capaian	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.819.498.324**		**9.816.971.220**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung Barat	tersedianya gaji dan tunjanganASN	1 tahun	9.450.323.624	1 tahun	9.531.626.720	
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya Pelaporan penatausahaan dan pegujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	295.739.200	12 Dokumen	235.343.700	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	13.357.500	1 Laporan	20.000.100	
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran	12 Laporan	21.078.000	12 Laporan	20.000.500	
e.	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Bandung Barat	Tersusunnya pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 Dokumen	39.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**168.000.000**		**499.517.200**	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	1 Paket	168.000.000	1 Paket	499.517.200	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**98.548.800**		**314.744.300**	
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Bahan Logistik berupa Alat Tulis Kantor	1 Paket	52.800.000	1 Paket	38.851.100	

b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	-	-	12 Dokumen	120.000.000	
No	**Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Rancangan Awal RKPD**		**Hasil Analisis Kebutuhan**		**Catatan Penting**
				Target Capaian	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	-	-	12 Bulan	48.960.000	
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Penyediaan makan minum untuk kunjungan tamu, rapat dan acara lainnya selama 1 tahun	4 Laporan	45.748.800	12 Laporan	78.673.200	
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	3 Laporan	28.260.000	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**111.000.000**		**33.790.000**	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	-	-	12 Laporan	8.790.000	
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	12 Bulan	111.000.000	12 Laporan	18.500.000	
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	1 paket	6.500.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**676.394.800**		**507.535.200**	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 tahun	12 Bulan	60.044.000	12 bulan	33.356.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 1 tahun	12 Bulan	478.150.800	12 bulan	399.779.200	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Paket pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Paket	138.200.000	1 paket	74.400.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**7.259.231.067**	
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				16.000.000.000		**2.432.247.144**	
a.	Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya PembangunanPenerangan Jalan Umum	1.300 TC	15.405.698.100	150 TC	1.712.675.550	
b.	Rehabilitasi dan PemeliharaanPerlengkapan Jalan	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Pemeliharaan PJUdi wilayah Kabupaten BandungBarat	500 Unit	594.301.900	600 Unit	719.571.594	
2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**159.000.000**		**326.446.575**	
a.	Rehabilitasi dan PemeliharaanTerminal (Fasilitas Utama danPendukung)	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya PemeliharaanTerminal Type C	1 Terminal	159.000.000	1 Terminal	326.446.575	

No	Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**477.269.802**		**436.552.800**	
a.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Manajemen pengelolaan perparkiran	16 Dokumen	259.365.402	10 Dokumen	89.839.400	
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kegiatan monev pengelolaan perparkiran	1 Laporan	217.904.400	1 Laporan	346.713.400	
4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				1.191.004.500		**1.164.256.800**	
a.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	6 Unit	236.954.000	10 Unit	352.264.800	
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor yang bersertifikat kompetensi	16 orang	291.302.400	16 orang	265.068.000	
c.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Pendataan kendaraan wajib uji	18.000 Unit	143.911.400	18.000 Unit	134.116.000	
d.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor	18.000 Dokumen	297.990.200	18.000 Dokumen	200.000.000	
e.	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan BermotorWajib Uji	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kegiatan uji keliling di daerah	10 Laporan	49.546.500	5 Laporan	24.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
f.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kondisi alat pengujian	20 Unit	171.300.000	20 Unit	171.760.000	
g.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kegiatan koodinasi pelaksanaan pengujian	-	-	1 Laporan	17.048.000	
5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				1.123.404.600		2.037.874.800	
a.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan kabupaten	1 Laporan	83.781.200	2 Laporan	610.485.600	
b.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di ruas jalan	1 Dokumen	71.639.400	2 Dokumen	353.176.000	
c.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kegiatan uji coba dan sosialisasi di ruas jalan	1 Dokumen	48.765.000	2 Dokumen	144.550.800	
d.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengendalian ruas jalan	1 Laporan	919.219.000	1 Laporan	929.662.400	
6	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				25.890.600		**29.505.600**	
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Bandung Barat	terlaksannya Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	10 Laporan	25.890.600	10 Laporan	29.505.600	

No	Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
7	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**				**78.080.000**		**100.640.800**	
a.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bandung Barat	terlaksannya inspeksi,audit danpemantauan pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor	-	-	2 lokasi	38.077.800	
b.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Bandung Barat	terlaksannya inspeksi,audit danpemantauan keselamatan diterminal	3 Laporan	72.680.000	2 Laporan	53.925.000	
c.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Bandung Barat	terlaksannya inspeksi,audit dan pemantauan keselamatan di perusahaan angkutan	1 Laporan	5.400.000	1 Laporan	8.638.000	
8	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**214.405.000**		**249.083.959**	
a.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Dokumen hasil kajian angkutan barang	1 Laporan	214.405.000	1 Laporan	249.083.959	
9	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**3.235.001.800**		**482.622.589**	
a.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Tersedianya Kajian Trayek Angkutan Umum KBB	2 Dokumen	3.235.001.800	1 Dokumen	482.622.589	

No	Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				**150.718.200**		**199.240.824**	
1	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**				**150.718.200**		**199.240.824**	
a.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Bandung Barat	terlaksananya Kegiatan bintek keselamatan pelayaran	4 Laporan	150.718.200	4 Laporan	199.240.824	

2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Daerah. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritisasi terhadap usulan yang ada.

Dinas perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Teknik Prasarana, Bidang Angkutan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas.

Terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan : usulan pemasangan Penerangan jalan umum, Rambu, Marka, Pagar Pengaman Jalan dan Fasilitas lalu lintas lainnya yang tersebar di wilayah Kab. Bandung Barat;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan Prioritas Nasional 5 (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar). Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi. Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).

3.1.1. Arah kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2020-2024) meliputi hal-halsebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Penguatan jaringan transportasi eksisting; • Perluasan jaringan layanan transportasi; • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; • Penerapan *Traffic Demand Management* pada semua layanan transportasi; • Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal.	Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui: • Optimalisasi simpul transportasi eksisting; • Pembangunan simpul transportasi baru; • Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; • Reaktivasi jalur moda transportasi; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; • Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; • Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia; • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; • Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Penggunaan Traffic Demand Management di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan Traffic Demand Management • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	• Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi.	Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara: • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna jasa transportasi;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada; • Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan; • Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT; • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi; • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan; Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi; • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP; • Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Melakukan koreksi dan pemberian disinsentitif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya; • Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan; • Pencatatan jumlah pengguna pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan. Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	• Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum; • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi; • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan; • Edukasi keselamatan transportasi.	Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbanga; • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; • Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording; • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi; Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan; • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum. Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi; • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian; • Pengembangan sistem informasi terkait *security awareness* di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Penyediaan fasilitas *baggage x-ray checking* di setiap lokasi simpul utama transportasi;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Pengembangan sistem online monitoring di setiap simpul utama transportasi. Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api; • Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda); • Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi security awareness kepada masyarakat (untuk semua moda); • Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda; • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda; • Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Hasil Analisis (2019)

3.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan Darat

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN)	• Revitalisasi/optimalisasi terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP eksisting pada jalur utama nasional (PKN, PKW, PKSN) dan pendukung kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI); • Pembangunan dan rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke kawasan proiritas nasional; • Penguatan jaringan AKAP dan TSDP pendukung konektivitas kawasan prioritas (termasuk subsidi angkutan bus/TSDP penghubung KSPN); • Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan dan penunjuk arah).
		Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	• Revitalisasi/optimalisasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP di kawasan DTPK; • Pembangunan dan/atau rehabilitasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK); • Pembangunan kapal penyeberangan dan bus air; • Subsidi operasional angkutan bus (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi keperintisan angkutan barang jalan pendukung tol laut.
		Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	• Optimalisasi MRLL untuk *debottlenecking* jaringan jalan; • Pengendalian ODOL pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting; • Optimalisasi/pembangunan/rehabilitasi terminal penumpang, terminal barang, dan pelabuhan TSDP pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.
	Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan sistem transportasi darat pada jalur utama logistik nasional	• Pengembangan terminal barang dan pelabuhan SDP pada jalur logistik utama; • Pelaksanaan subsidi Ro-Ro *Long Distance Ferry*.
		Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	• Pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi pada simpul utama transportasi;

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
			• Penguatan jaringan layanan moda bus dan SDP eksisting terhadap simpul utama transportasi (termasuk pelaksanaan Subsidi Angkutan Multimoda dan Antarmoda); • Pengembangan dukungan untuk pengembangan kawasan ekonomi di sekitar simpul transportasi (pendukung aerotropolis, port estate industry area).
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	• Pengembangan sistem database penyelenggaraan angkutan umum; • Pengembangan sistem database MRLL jalan; • Penguatan sistem informasi manajemen transportasi darat (termasuk SIMLALIN); • Penerapan sistem pelaksanaan JTO (Jembatan Timbang *Online*); • Penerapan e-tilang; • Penguatan pelaksanaan E-SRUT dan E-RUJe
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	• Pengembangan SMART terminal dan pelabuhan; • Pengembangan ATCS di sejumlah koridor jaringan jalan nasional dan perkotaan; • Kajian dan penerapan ITS; • Pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis on-line (integrasi jadwal, ticketing, dan pembayaran); • Pengaturan sarana transportasi darat berteknologi baru (mobil listrik dan lain sebagainya).
	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penguatan kelembagaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	• Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; • Peningkatan efektivitas koordinasi antar stakeholders dan prosedur pengambilan keputusan.
		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	• Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; • Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (real-time); • Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya fasilitas dan layanan transportasi perkotaan berbasis jalan	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan	• Penyelenggaraan subsidi angkutan massal perkotaan (melalui skema *buy the service*); • Pembinaan dan Penyusunan Masterplan Transportasi Perkotaan (Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan) dengan Pemerintah Daerah; • Penguatan integrasi sistem transportasi dan tata ruang perkotaan; • Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan di kota-kota besar dan metropolitan (termasuk ibukota baru) melalui pembangunan *integrated land transport system* (ILTS) yang terdiri dari: a) Pengembangan ITS pada kawasan perkotaan; b) Pembangunan fasilitas integrasi antarmoda di kawasan perkotaan.
		Perencanaan dan pengembangan transportasi darat untuk Ibu Kota Negara (IKN)	• Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan di kawasan IKN; • Optimalisasi, pembangunan, rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke ibukota baru (selama proses konstruksi maupun operasional IKN); • Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana keselamatan transportasi jalan dan TSDP pendukung IKN; • Penataan jaringan pelayanan transportasi darat pendukung IKN; • Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi perkotaan IKN.
		Penguatan sistem penyelenggaraan transportasi perkotaan	• Pembinaan dan pendampingan perencanaan angkutan perkotaan (termasuk Technical Assistance melalui Program SUTRINAMA-INDOBUS (hibah); • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi; • Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan.

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan sistem pengawasan keselamatan LLAJ	• Pelaksanaan MRLL pada jaringan jalan nasional; • Implementasi Batas Kecepatan Jalan Nasional; • Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB; • Pengawasan ODOL di luar UPPKB; • Penguatan/penertiban uji tipe dan akreditasi uji berkala (termasuk Pengembangan Fasilitas Pengujian Proving Ground BPLJSKB); • Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (ramp check/inspeksi).
		Penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ	• Penerapan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK); • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; • Penyediaan fasilitas keselamatan jalan; • Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), perlintasan sebidang dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS, RASS); • Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
	Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem pengawasan keselamatan SDP	• Peningkatan kelaikan kapal SDP; • Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP; • Peningkatan pengawasan operasional SDP (*ramp check*).
		Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP	• Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional; • Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau; • Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan (termasuk Pembangunan Alat Penimbangan/Jembatan Timbang pada Lintas Penyeberangan Utama); • Pembangunan VTS (Manajemen Lalu Lintas SDP) atau sistem pengawasan lalu lintas kapal SDP.

Sumber: *Hasil Analisis (2019)*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Tujuan pembangunan bidang Perhubungan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat adalah :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas insfrastruktur ekonomi dan sosial

Sasaran pembangunan Perhubungan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, Kawasan perkotaan, dan pusat kegiatan perdesaan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 terbagi ke dalam 1 (satu) Program Non Urusan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2 (dua) Program Urusan Perhubungan yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran, dan 16 Kegiatan dan 48 Sub-Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 63.031.687.191,- terealisasi sebesar Rp. 61.462.439.300,- atau 97,51%.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan Sub kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan insfrastuktur bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya Program,Kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat 2024 akan disampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Pagu Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								303.571.428				
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen Perencanaan (	Tersedianya Dokumen Renja	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	2 Dok	Tersedianya Dokumen Renja	95.806.928	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	195.806.928
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen RKA	Tersedianya Dokumen RKA	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 dok	Tersedianya Dokumen RKA	12.115.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	112.115.200
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen RKAP	Tersedianya Dokumen RKAP	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 dok	Tersedianya Dokumen RKAP	12.209.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok	112.209.200
2	15	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen DPA	Tersedianya Dokumen DPA	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 dok	Tersedianya Dokumen DPA	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	100000000
2	15	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen DPPA	Tersedianya Dokumen DPPA	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 dok	Tersedianya Dokumen DPPA	8.630.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 dok	108.630.200
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen LAKIP	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 Laporan	Tersedianya Dokumen LAKIP	87.127.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	187.127.800
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	2 laporan	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	87.682.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	187.682.100
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	tersedianya gaji dan tunjanganASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	101 Orang/Bulan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	8.594.243.686		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/Bulan	8.694.243.686

2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya Pelaporan penatausahaan dan pegujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya jasa administrasi keuangan yang tepat sasaran	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 dok	Terlaksananya jasa administrasi keuangan yang tepat sasaran	235.343.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	335.343.700
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	85.876.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	185.876.900
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Sakip	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	2 laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	20.810.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Dok	120.810.500
2	15	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sakip	Tersusunya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 Laporan	Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	110.000.200
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sakip	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	163 Stell	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	499.517.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	599.517.200
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	0	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Paket	100000000
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Nilai Sakip	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	0	Tersedianya Peralatan rumah tangga	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan rumah tangga	1 Paket	100000000
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip	Tersedianya Bahan Logistik berupa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Bahan Logistik berupa Alat Tulis Kantor	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 Paket	Tersedianya Bahan Logistik berupa Alat Tulis Kantor	38.851.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	138.851.100
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 paket	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	220.000.000
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Sakip	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	48.960.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	148.960.000

2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip	Tersedianya Penyediaan makan minum untuk kunjungan tamu, rapat dan acara lainnya selama 1 tahun	Tersedianya Penyediaan makan minum untuk kunjungan tamu, rapat dan acara lainnya selama 1 tahun	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 laporan	Tersedianya Penyediaan makan minum untuk kunjungan tamu, rapat dan acara lainnya selama 1 tahun	78.673.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen	178.673.200
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip	Tersedianya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 laporan	Tersedianya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Dokumen	128.260.000
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip	Tersedianya kendaraan dinas Operasional	-		Nilai Sakip	1 unit	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 unit	100.000.000
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Nilai Sakip	Tersedianya Paket pengadaan	-	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 Paket	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	100.000.000
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33.790.000				33.790.000
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 Laporan	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	8.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	108.790.000
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	18.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.500.000
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	12 Laporan	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan	106.500.000
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								763.144.199				763.144.199
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	1 Unit/Buah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.554.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemelihraan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit/Buah	138.554.600
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 1 tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	53 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.139.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemelihraan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	- Unit/Buah	561.139.200

2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip	Tersedianya Paket pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. BandungBarat	Nilai Sakip	2 Unit/ Buah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	263.450.399	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit/ Buah	363.450.399
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								43.246.094.150				43.246.094.150
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya PembangunanPenerangan Jalan Umum	Tersedianya perlengkapan jalan diruas jalan	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	1171 Unit	Tersedianya perlengkapan jalan diruas jalan	42.017.833.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2750 Unit	42.117.833.300
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan PemeliharaanPerlengkapan Jalan	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Pemeliharaan PJUdi wilayah Kabupaten BandungBarat	Terslaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan diruas jalan	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	600 unit	Terslaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan diruas jalan	1.228.260.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1250 Unit	1.328.260.850
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								328.672.514				
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan PemeliharaanTerminal (Fasilitas Utama danPendukung)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya PemeliharaanTerminal Type C	Pelaksanaan pemeliharaan terminal	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	1 unit	Pelaksanaan pemeliharaan terminal	328.672.514	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Terminal Tipe C Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Dokumen	428.672.514
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDMPengelola Terminal Tipe C	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Tersedianya Tenaga PenunjangPengelolaan Terminal selama 12Bulan	Terbinanya SDM pengelola terminal	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	0	Terbinanya SDM pengelola terminal	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								954.423.195				
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Manajemen pengelolaan perparkiran	Terlaksananya manajemen pengelolaan perparkiran	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	1 Dokumen	Terlaksananya manajemen pengelolaan perparkiran	608.020.940	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	708.020.940
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan monev pengelolaan perparkiran	Terlaksanana monev pengelolaan perparkiran	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	1 Dokumen	Terlaksanana monev pengelolaan perparkiran	346.402.255	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	1 Dokumen	446.402.255

2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								3.005.637.988				
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	10 Unit/Buah	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1.071.281.268	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit/Buah	1.171.281.268
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Tersedianya Jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor yang bersertifikat kompetensi	Tersedianya jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor yang bersertifikat kompetensi	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	16 Orang	Tersedianya jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor yang bersertifikat kompetensi	354.859.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Orang	454.859.000
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Tersedianya Pendataan kendaraan wajib uji	Tersedianya data kendaraan wajib uji	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	18000 Unit	Tersedianya data kendaraan wajib uji	107.116.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	18000 Unit	100.000.000
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Tersedianya Bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor	Tersedianya bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	18000 Unit	Tersedianya bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18000 Unit	100.000.000
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi SOP pengujian berkala	Terlaksananya Sosialisasi ke pengguna kendaraan	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	0	Terlaksananya Sosialisasi ke pengguna kendaraan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Laporan	100.000.000
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan BermotorWajib Uji	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan uji keliling di daerah	Terlaksanany kegiatan uji keliling di daerah	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	5 Laporan	Terlaksanany kegiatan uji keliling di daerah	34.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	134.600.000
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kondisi alat pengujian	Terpeliharanya kondisi sapras Pengujian	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	20 Unit	Terpeliharanya kondisi sapras Pengujian	1.327.301.720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 Unit	1.427.301.720
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan koodinasi pelaksanaan pengujian	Terlaksananya koodinasi pelaksanaan pengujian	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	1 Laporan	Terlaksananya koodinasi pelaksanaan pengujian	10.480.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	110.480.000
2	15	2	2.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Tersedianya Naskah akademik Raperda retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersusunya perda retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	0	Tersusunya perda retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	0

2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya SKM Terhadap Pelayanan UPTD PKB	Terlaksananya SKM Terhadap Pelayanan UPTD PKB	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	0	Terlaksananya SKM Terhadap Pelayanan UPTD PKB	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	0
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								3.062.498.331				
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan kabupaten	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian ruas jalan	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	2 dok	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian ruas jalan	829.365.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	929.365.200
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di ruas jalan	Terlaksananya Forum LLAJ Kabupaten	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	2 dok	Terlaksananya Forum LLAJ Kabupaten	1.036.126.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-Dokumen	1.136.126.500
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan uji coba dan sosialisasi di ruas jalan	Tersedianya perlengkapan jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	0	Tersedianya perlengkapan jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengendalian ruas jalan	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	1 Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi	1093991831	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1193991831
2	15	2	2.06	5	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasdi ruas jalan kabupaten	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	2 Dokumen	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasdi ruas jalan kabupaten	103.014.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	203.014.800
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								31.505.600				
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi	terlaksannya Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	Terlaksananya penilaian hasil ANDALALIN	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	10 Laporan	Terlaksananya penilaian hasil ANDALALIN	31.505.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	131.505.600

2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								83.400.600				183.400.600
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	tersedianya SDM sertifikatkompetensi keselamatan	tersedianya SDM sertifikatkompetensi keselamatan	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	0	tersedianya SDM sertifikatkompetensi keselamatan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Orang	0
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	terlaksanya inspeksi,audit danpemantauan pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor	terlaksanya inspeksi,audit danpemantauan pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	2 Laporan	terlaksanya inspeksi,audit danpemantauan pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor	56.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5 Laporan	156.700.000
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	terlaksanya inspeksi,audit danpemantauan keselamatan diterminal	terlaksanya inspeksi,audit danpemantauan keselamatan diterminal	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	0	terlaksanya inspeksi,audit danpemantauan keselamatan diterminal	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	30 Laporan	0
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	terlaksanya penyelenggaraan inspeksi kompetensi pengemudi	terlaksanya penyelenggaraaninspeksi kompetensi pengemudi	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	1 Laporan	terlaksanya penyelenggaraaninspeksi kompetensi pengemudi	3.358.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah penyelenggaraan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	1 Laporan	103.358.000
2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	Terlaksananya penyelenggaraan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Kab. BandungBarat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam	2 laporan	Terlaksananya penyelenggaraan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	23.342.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	2 laporan	123.342.600
2	15	2	2.09		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								274.264.000				
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	Tersedianya Dokumen hasil kajian angkutan barang	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Kab. BandungBarat	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	1 Laporan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	274.264.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	1 Laporan	374.264.000
2	15	2	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								920.154.300				
2	15	2	2.12	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	Tersedianya Kajian Rerouting Trayek Angkutan Umum KBB	Terlaksananya rerouting trayek, Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Kab. BandungBarat	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	1 Dokumen	Terlaksananya rerouting trayek, Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	290.307.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	390.307.500
2	15	2	212	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	Tersedianya sosialisai dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek	Tersedianya Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. BandungBarat	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	629.846.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	729.846.800
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								263.994.400				
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal								263.994.400				
2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Persentase armada angkutan ASDP	terlaksananya Kegiatan bintek keselamatan	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan	Kab. BandungBarat	Persentase armada angkutan	4 Laporan	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan	263.994.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian	4 Laporan	363.994.400

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit dan sub unit organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, karena bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali dengan kondisi pada waktu pelaksanaannya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan mengkesampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak mengganggu sinergitas masing-masing kegiatan terhadap tujuan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat secara umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan, pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing sub unit perlu terus dilakukan untuk mendeteksi lebih awal setiap penyimpangan-penyimpangan di setiap kegiatan, sehingga apabila diketahui adanya penyimpangan dapat diperbaiki dan disesuaikan sedini mungkin. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang dan mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus mendapat dukungan dan antusiasme dari masyarakat.

Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan ridha oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas dan amanah yang telah dibebankan kepada kita.

Bandung Barat, 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

A.FAUZAN AZIMA,Amd.LLAJ., S.Sos., MH.
NIP. 198005202001121005

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena Dengan Rahmat dan Karunianya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 diharapakan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana Kegiatan Tahunan, Rencana Kerja Perubahan disusun dengan memperhatikan Kondisi factual serta perkembangan yang ada di lingkungan internal dan eksternal, Sehingga diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Kami Menyadari Bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi harapan agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bandung Barat, Agustus 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ANNI ROSLIANTI, ST, MM
Pembina Tk I / IV b
Nip. 197210161998032004

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan 3

1.4. Sistematika Penyusunan Renja 3

BAB II 4

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat 22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51

BAB III 52

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 52

3.1. Tujuan 52

3.2. Sasaran 52

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 54

BAB IV 72

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 72

4.1. Rencana Kerja 72

4.2. Rencana Kegiatan 78

4.3. Bantuan Keuangan 79

BAB V 81

PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Dan Tahun 2024 perkiraan realisasi capaian tahun Berjalan..... 5

Tabel 2.2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat 23

Tabel 2.3. 1 Pemetaan Masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 23

Tabel 2.4. 1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat 26

Tabel 2.5. 1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Bandung Barat 51

Tabel 3.2. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024..... 53

Tabel 3.3. 1 Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024..... 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. Perubahan Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun berpedoman pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan juga didasarkan pada Renstra / RPD Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja perubahan yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang tentunya berdasarkan skala prioritas program/kegiatan dan besaran anggaran masing-masing program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan tersebut di bidang Sekretariat, Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan adalah sebagai alat pengendali rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 , dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu organisasi kelembagaan merencanakan kegiatannya, apakah sudah sesuai dengan Rencana Strategis yang dibuat oleh institusi tersebut serta keterpaduan dengan Rencana Kerja Instansi lainnya.

Sasaran Renja Perubahan adalah penilaian rencana kegiatan yang disusun oleh organisasi kelembagaan untuk tahun berikutnya disesuai dengan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Target Kinerja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fusngi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Rencana Kegiata

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Derah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 merupakan kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja peubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 dan tahun 2024 perkiraan realisasi capaian tahun berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1.05.	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban**									
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP DISPERKIM**	**315**	**371**	**B**	**B**	**76,25%**	**68,61/B**	**0**	**0**
1.05.01.2.01	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah***	***48 Dokumen***	***32 Dokumen***	***18 Dokumen***	***18 Dokumen***	***100%***	***9 Dokumen***	***0***	***33,33%***
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokuemn	100%	1 Dokumen	0	0
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	100%
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokuemn	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	100%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	36 Dokumen	20 Dokumen	1 Laporan	4 Laporan	400%	3 Laporan	0	33,33%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	0
1.05.01.2.02	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas***	***18 Dokumen***	***18 Dokumen***	***6 Dokumen***	***19 Dokumen***	***110%***	*8 Dokumen*	*0*	*0*
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang	149 Orang	12 Bulan	12 Bulan	100%	33 orang/bulan	0	57%
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam satu tahun	36 Bulan	25 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	50%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	0	50%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	8 Dokumen	2 Laporan	3 Laporan	150%	2 Laporan	0	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*6 Dokumen*	*5 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*100%*	*2 Dokumen*	*0*	*50%*
1.05.01.2.05	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu***	***9 Jenis***	***7 Jenis***	***45 Orang***	***0***	***0***	***100%***	***0***	***0***
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas berserta atribut kelengkapan	0	0	0	0	0	2 Paket	0	0
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Kegiatan	7 Kegiatan	45 Orang	0	0	30 Orang	0	0
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrai Umum Perangkat Daerah**	**36 Bulan**	**36 Bulan**	**31 Paket**	**6 Paket**	**75 %**	**100%**	**0**	**0**
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	1 Paket	0	0
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*8 Jenis*	*10 Jenis*	*2 Paket*	*2 Paket*	*100%*	1 Paket	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	63 Jenis	43 Jenis	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	0	0
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Bulan	16 Bulan	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	0	0
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Jenis	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	0
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*9 Lokasi*	*3 Lokasi*	*12 Laporan*	*0*	*0*	*1 Laporan*	*0*	*0*
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD**	**9 Jenis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 Paket**	**0**	**0**
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Jenis	0	0	0	0	3 Unit	0	0
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 Unit*	*0*	*0*
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	***Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah***	***36 Bulan***	***40 Bulan***	***16 Laporan***	***16 Laporan***	***100%***	***3 Paket***	***0***	***0***

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		OPD								
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*36 Bulan*	*26 Bulan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*100%*	*1 Laporan*	*0*	*0*
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik yang disediakan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Laporan*	*0*	*0*
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*36 Bulan*	*26 Bulan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*100%*	*1 Laporan*	*0*	*0*
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara***	***159 Unit***	***261 Unit***	***2 Unit***	***2 Unit***	***100%***	***25 Unit***	***0***	***0***
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*9 Unit*	*17 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*100%*	*19 Unit*	*0*	*21,05%*
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*0*	*144 Unit*	*0*	*0*	*0*	*1 Unit*	*0*	*0*
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*150 Unit*	*100 Unit*	*0*	*0*	*0*	*5 Unit*	0	*40%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase penanganan rumah korban bencana***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***0***	***0***
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	***Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 Dokumen***	***0***	***0***
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terverifikasi								
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	***Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 Dokumen***	***0***	***0***
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 Orang*	*0*	*0*
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0	0	*0*	*0*	*0*	25 Orang	0	0
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme	0	0	*0*	*0*	*0*	25 Orang	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan								
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	***Jumlah Rumah Korban Bencana yang terrehabilitasi***	***25 Unit Rumah***	***122 Unit Rumah***	***25 Unit Rumah***	***83 Unit Rumah***	***332 %***	***30 Unit Rumah***	***0***	***0***
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	*25 Unit Rumah*	88 Unit Rumah	*25 Unit Rumah*	*83 Unit Rumah*	*332 %*	*30 Unit Rumah*	*0*	*0*
1.04.02.2.03.0002	Penyusunan Site Plane dan / atau detail engginering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen siteplane dan / atau DED yang dibuat	*1 Dokumen*	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**1 Laporan**	**33 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**2 Dokumen**	**0**	**0**
1.04.02.2.04.0001	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah rumah yang di bagikan bagi korban bencana	1 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	0	0
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	1 Rumah Tangga	**0**	**0**
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	***Jumlah dokumen pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 Dokumen***	***0***	***0***

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pengembangan perumahan								
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku Pembangunan rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Laporan*	*0*	*0*
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha***	***100%***	***100%***	***100%***	***90,72%***	***90,72%***	***33,33 %***	***0***	***0***
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	***Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani***	***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***100%***	***2 Dokumen***	***0***	***0***
1.04.03.2.01.0002	Penyusunan dan / atau review serta legalisasi rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah legalisasi rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan peremukiman dan permukiman kumuh	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*	*0*	*0*	*0*
1.04.03.2.01.0003	Koordinasi dan Singkronisasi pengendalian Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah kegiatan koordinasi dan singkronisasi pengembangan Kawasan	*0*	*0*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*100%*	*0*	*0*	*0*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		permukiman dan permukiman kumuh								
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*0*	*0*	*0*	*1 Laporan*	*0*	*0*
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	***Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha***	***1 Dokumen***	***18 Dokumen***	***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***100%***	***7 Dokumen***	***0***	***0***
1.04.03.2.02.0002	Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dokumen rencana pecegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	*1 Dokumen*	*18 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*			
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 lAPORAN*	*0*	*0*
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Kelompok Masyarakat*	*0*	*0*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 Keluarga*	*0*	*0*
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	***Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	***200 Unit Rumah***	***380 Unit Rumah***	***200 Unit Rumah***	***233 Unit Rumah***	***116,50%***	***100%***	***0***	***0***
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	*200 Unit Rumah*	*369 Unit Rumah*	*200 Unit Rumah*	*233 Unit Rumah*	*116,50%*	*120 Unit Rumah*	*0*	*0*
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	*1 Dokumen*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*	*1 Dokumen*	*0*	*0*
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	*1 Laporan*	*17 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*100%*	*6 Dokumen*	*0*	*0*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 Ha*	*0*	*0*
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh***	***100%***	***100%***	***100%***	***50%***	***50%***	***25%***	***0***	***0***
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**500 Unit Rumah**	**214 Unit Rumah**	**500 Unit Rumah**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	500 Unit Rumah	214 Unit Rumah	*500 Unit Rumah*	*0*	*0*	*50 Unit Rumah*	*0*	*0*
1.04.04.2.01.0002	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserrta PSU diluar Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Terlaksananya Pembangunan taman alun alun cililin	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru								
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah**	**100%**	**10 Perumahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**66,67%**	**0**	**0**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase ketercapaian penyelenggaraan PSU Perumahan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	100%	0	0
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	10 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	100%	2 Lokasi	0	50%
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	0	0
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	0	0	0	0	3 Laporan	0	33,33%
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	BIDANG PERTANAHAN									
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan**	**6 Dokumen**	**7 Dokumen**	**6 Dokumen**	**3 Dokumen**	**50%**	3 Dokumen	0	0
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kasus sengketa tanah	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	100%
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah	0	0	3 Berita acara	0	0	2 Berita Acara	0	0
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita acara	3 Berita Acara	0	0	0	0	0	0
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	7 Dokumen	0	0	0	0	0	0
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan**	**0**	**0**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50%**	**100%**	**0**	**0**
2.10.05.2.01.	**Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah**	**Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat**	0	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	kabupaten/kota	**penerima**								
2.10.05.2.01.0001	Penetapan daftar Masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan TanahÂ	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan singkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**0**	**0**
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria**	**5 Dokumen**	**2 Dokumen**	**5 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50%**	**2 Dokumen**	**0**	**0**
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan objek redistribusi tanah	Jumlah dokumen pendataan subjek dan objek redistribusi tanah	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah	Jumlah Rekomendasi objek redistribusi tanah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah kegiatan redistribusi tanah objek reforma agararia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Capaian inventarisasi, kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**
2.10.08.2.01	**Penyelesaian masalah tanah kosong**	**Jumlah dokumen masalahan tanah kosong yang terselesai-kan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Dokumen**	**0**	**0**
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan singkronisasi penyelesaian tanah kosong didalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan penyelesaian tanah kosong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**0**	**0**	**0**
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan tanah kosong	Jumlah layanan pemanfaatan tanah kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**6 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**	**5 Dokumen**	**0**	**0**
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0	0
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	0	0	0	0	0	2 Dokumen	0	0
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi tercapainya target kinerja

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait;
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Indikator kinerja yang ditetapkan **Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.** mengacu pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pencapaiannya hingga tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat

No	SPM/ Standar nasional	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					Catatan Anallisis
			Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)		(11)
1.	Pelayanan Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Unit	0 Unit	83 Unit	83 Unit	131 Unit	Capaian indicator pada tahun 2023 sebesar 100%, hal ini berarti target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra dari target 83 unit dan realisasi 83 unit maka dari itu indikator ini tercapai sesuai dengan target renstra PD. Akan tetapi jika Pada Tahun sebelumnya target sebesar 50 Unit, realisasi tidak tercapai dikarenakan tidak adanya Ketersediaan anggaran dan proses pembuatan perbup tentang rehabilitasi rumah korban bencana.
2.	Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	Untuk target dan realisasi pada indikator ini belum bisa di laksanakan dikarenakan di dinas perkim belum melaksanakan relokasi rumah yang terkena dampak bencana.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan optimal, hal ini didasarkan kepada beberapa permasalahanpermasalahan pokok yang masih dijumpai, antara lain :

Tabel 2.3.1. Pemetaan Masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

N0	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1.	Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat	Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada	1	Koordinasi yang lemah antar pemangku kepentingan
			2	Pemahaman yang relatif masih rendah terkait pengaturan penyelenggaraan urusan perumahan
			3	Masih banyaknya kondisi PSU perumahan yang kurang diperhatikan/ terabaikan oleh pengembang
			4	Masih banyaknya jumlah backlog
			5	Data perumahan yang belum valid/ berubah-ubah

			6	Belum adanya pengembangan kawasan permukiman yang terpadu
			7	Belum adanya lokasi yang disediakan khusus untuk pengembangan perumahan
2.		Belum memadainya alokasi kegiatan penanganan rumah korban bencana alam pada PD teknis	1	Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani (pasca bencana)
			2	Belum adanya Bank Tanah sebagai lokasi Relokasi Korban Pasca Bencana
N0	**Masalah Pokok**	**Masalah**	**Akar Masalah**	
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	Masih adanya lokasi kumuh dan Rumah Tidak Layah Huni yang belum ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan Belum memadainya alokasi k penanganan kumuh dan Rumah Tidak Layah Huni	1	Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Tidak memperhatikan pola Tata Ruang)
			2	Masih ada lokasi kumuh
			3	Masih adanya kebiasa-an buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
			4	Masih banyaknya jumlah RTLH
		Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	1	Kurang tersosialisasi-kannya program-program pemerintah terkait kekumuhan
			2	Masih belum berkembangnya potensi ekonomi dan sosial di kawasan
			3	Munculnya gejala kekumuhan akibat perkembangan desa yang menuju kota
BIDANG PERTANAHAN				
1	Masalah Penguatan, Kepemilikan, dan Pemanfaatan Lahan	Bukti kepemilikan yang belum lengkap		Administrasi lahan Masyarakat
2	Data yang kurang akurat dan kurang lengkap	Minimnya data		Ketersediaan data
3	Ketersediaan lahan yang semakin terbatas	Makin lama lahan di manfaatkan		Pemanfaatan lahan Meningkat
4	Belum adanya kejelasan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pertanahan	Kurangnya peraturan pemerintah atau Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut		Belum adanya aturan pendukung dari Pemda
5	Keterbatasan anggaran, alat-alat dan Sumber Daya Manusia (SDM	PAD Pemda masih minim		Anggaran yang terbatas
6	Belum adanya kejelasan pembagian tupoksi antara Bidang Pertanahan dengan BPN	Dominasi tupoksi di BPN		Antisipasi Penganggaran ganda

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan engerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk mengahasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rancangan Rencana Kerja Anggaran Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan misi, kebijakan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 1 tahun dengan cara mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	KBB			**19.603.105.542**	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	KBB			**20.394.480.301**
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	*KBB*			**19.603.105.542**	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban**	*KBB*			**20.394.480.301**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Nilai SAKIP DISPERKIM**	68,61/B Nilai/Predika	**9.681.649.875**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Meningkatnya Nilai SAKIP DPKP**	68,61/B Nilai/Predika	**8.783.353.420**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	**393.301.213**	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	**279.344.713**
	Penyusunan Dokumen	KBB	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan	KBB	Jumlah	1 Dokumen	11.877.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	83.781.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	75.857.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KBB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.999.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KBB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.999.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*KBB*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	*10.239.213*	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	*KBB*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	*10.239.213*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Perubahan DPA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KBB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	175.781.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KBB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	72.870.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	80.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	80.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KBB	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokumen	**8.371.005.774**	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	KBB	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokumen	**7.400.007.905**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*KBB*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	*8.120.412.174*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*KBB*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	*7.155.732.705*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KBB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	75.781.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KBB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	73.516.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	44.624.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	62.515.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/ Semesteran SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	110.188.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/Semesteran SKPD	KBB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	102.333.300
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KBB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KBB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2 Dokumen	5.910.900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
								Prognosis Realisasi Anggaran		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*KBB*	*Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu*	*100%*	*24.999.000*	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*KBB*	*Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu*	*100%*	*181.704.000*
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KBB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	24.999.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KBB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	*181.704.000*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*KBB*	*Persentase Penyelenggaraan Administrai Umum Perangkat Daerah*	*100%*	*366.380.500*	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*KBB*	*Persentase Penyelenggaraan Administrai Umum Perangkat Daerah*	*100%*	*440.256.000*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KBB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.499.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KBB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.499.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KBB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.091.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KBB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	285.124.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KBB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.998.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KBB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.998.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KBB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.816.000	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	KBB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.202.400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KBB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.947.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KBB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.808.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KBB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	9.408.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KBB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KBB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.644.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KBB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.644.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KBB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	119.974.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	KBB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	46.977.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
			dan Konsultasi SKPD			SKPD		dan Konsultasi SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KBB	**Tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD**	**5 Paket**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	KBB	**Tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD**	**5 Paket**	
	Pengadaan Mebel	KBB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Mebel	KBB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KBB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	KBB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KBB	Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD	**1 Lpaoran**	**327.104.088**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	KBB	Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD	**1 Lpaoran**	**268.422.402**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KBB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	118.804.388	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KBB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	119.003.902
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	KBB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	9.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	KBB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa	KBB	Jumlah Laporan	1 Laporan	198.699.700	Penyediaan Jasa	KBB	Jumlah Laporan	1 Laporan	149.418.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KBB	**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara**	**25 Unit**	**198.859.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	KBB	**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara**	**25 Unit**	**213.618.400**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KBB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	136.459.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KBB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	183.878.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	47.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	14.840.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KBB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KBB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.900.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KBB	**Persentase penanganan rumah korban bencana**	**33,33 %**	**2.365.916.385**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	KBB	**Persentase penanganan rumah korban bencana**	**33,33 %**	**2.116.918.592**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KBB	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**5 Dokumen**	**454.082.285**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	KBB	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**5 Dokumen**	**304.466.392**
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	KBB	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	159.250.735	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	KBB	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	KBB	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang	1 Dokumen	106.536.800	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	KBB	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian	1 Dokumen	81.536.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
			Belum Tertangani					Sebelumnya yang Belum Tertangani		
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KBB	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KBB	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	161.562.400
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88.294.750	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.367.192
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	KBB	**Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan**	**3 Dokumen**	**125.000.000**	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau**	KBB	**Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan**	**3 Dokumen**	**54.400.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Kabupaten/Kota		**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**		
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	KBB	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	KBB	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	29.400.000
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	KBB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 Orang	25.000.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	KBB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 Orang	25.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	KBB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	25 Orang	50.000.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	KBB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	25 Orang	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KBB			**1.736.834.100**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	KBB			**1.708.052.200**
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KBB	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30 Unit Rumah	1.736.834.100	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KBB	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30 Unit Rumah	1.708.052.200
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KBB	**Jumlah dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KBB			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	KBB	**Jumlah dokumen pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**2 Dokumen**	**50.000.000**	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	KBB	**Jumlah dokumen pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**2 Dokumen**	**50.000.000**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik.	KBB	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang / Pelaku Pembangunan rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan terintegarasi seacara elektronik	1 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik.	KBB	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang / Pelaku Pembangunan rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan terintegarasi seacara elektronik	1 Dokumen	25.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	25.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KBB	**Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha**	**33,33 %**	**6.037.624.500**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	KBB	**Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha**	**33,33 %**	**5.447.009.707**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	KBB	**Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	**2 Dokumen**	60.000.000	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	KBB	**Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	**2 Dokumen**	**216.371.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	216.371.000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	KBB	**Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**7 Dokumen**	**362.920.600**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	KBB	**Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas**	**7 Dokumen**	**1.975.831.700**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
								di bawah 10 (sepuluh) Ha		
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	30.000.000		KBB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	KBB	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	242.920.600	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	KBB	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1.927.506.700
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	30.000.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	48.325.000
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	30.000.000	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	KBB	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	15 Rumah Tangga	30.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	KBB	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang	15 Rumah Tangga	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
								Kepemilikan Rumah		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	KBB	**Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100 %**	**5.614.703.900**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	KBB	**Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100 %**	**3.254.807.007**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	KBB	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	120 Unit Rumah	2.632.920.600	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	KBB	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	170 Unit Rumah	2.049.450.200
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	KBB	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	30.000.000	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	KBB	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	351.783.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	KBB	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	2.600.000.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	KBB	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	1.205.356.807
	PROGRAM PERUMAHAN	KBB	**Persentase**	**25 %**	**537.920.600**	**PROGRAM**	KBB	**Persentase**	**25 %**	**1.493.258.470**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		**rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh**			**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**537.920.600**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**1.493.258.470**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	KBB	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	507.920.600	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	KBB	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.493.258.470
	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka	KBB	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan	1 Laporan	30.000.000	Pengawasan dan Pengendalian dalam	KBB	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan	1 Laporan	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
	pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KBB	**Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah**	**66,67 %**	**979.994.182**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	KBB	**Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah**	**66,67 %**	**2.553.940.112**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KBB	**Persentase ketercapaian penyelenggaraan PSU Perumahan**	**100 Persentase**	**878.375.000**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	KBB	**Persentase ketercapaian penyelenggaraan PSU Perumahan**	**100 Persentase**	**2.553.940.112**
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	373.681.882	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KBB	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	596.711.500
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KBB	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi	2 Lokasi	311.061.800	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KBB	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	1.754.122.212

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Hunian					yang Menunjang Fungsi Hunian		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	84.899.900	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KBB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	65.474.900
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	KBB	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	210.350.600	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	KBB	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	137.631.500
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KBB			**3.717.306.632**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	KBB			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	KBB			**3.717.306.632**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	KBB			
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KBB	**Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan**	**100 %**	**301.241.600**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	KBB	**Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus**	**100 %**	**327.411.600**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			sengketa dan mediasi pertanahan					**permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan**		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan**	**3 Dokumen**	**301.241.600**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	**Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan**	**3 Dokumen**	**327.411.600**
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	201.241.600	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	288.816.600
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	38.595.000
	PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KBB	**Persentase capaian dokumen penetapan**	**100 %**	**1.065.137.232**		KBB	**Persentase capaian dokumen penetapan**	**100 %**	**774.996.032**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			daftar masyarakat penerima santunan					**daftar masyarakat penerima santunan**		
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan**	**2 Dokumen**	**1.065.137.232**		KBB	**Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan**	**2 Dokumen**	**774.996.032**
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 dokumen	914.703.232	**Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 dokumen	698.227.432
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	1 dokumen	150.434.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	1 dokumen	76.768.600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Daerah Kabupaten/Kota					Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	KBB	**Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria**	**100 %**	**205.675.400**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	KBB	**Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria**	**100 %**	**277.578.800**
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasika**	**2 Dokumen**	**205.675.400**	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1**	KBB	**Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan**	**2 Dokumen**	**277.578.800**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			n, tersinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria			**(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria**		
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	KBB	Jumlah Data Inventarisasi dan rekoemendasi objek redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Dokumen	205.675.400	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	KBB	Jumlah Data Inventarisasi dan rekoemendasi objek redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Dokumen	277.578.800
	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten / kota	KBB	Jumlah Dokumen siding panitia pertimbangan dan reform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	1 Dokumen		Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten / kota	KBB	Jumlah Dokumen siding panitia pertimbangan dan reform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	KBB	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1	1 Dokumen		Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	KBB	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah	1 Dokumen	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			(Satu) Kabupaten/Kota					dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KBB				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KBB			
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	KBB				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	KBB			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	KBB	**Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**100 %**	**2.145.252.400**	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	KBB	**Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**89.400.000**
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**5 dokumen**	**2.145.252.400**	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KBB	**Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota**	**5 dokumen**	**89.400.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.145.252.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.400.000
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4 Dokumen		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	KBB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
Jumlah Total					**23.320.412.174**	**Jumlah Total**				**21.863.866.733**

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dilakukan pula telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Bandung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat didasarkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis dan dilakukan pula penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dalam hal dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan yang dirumuskan dalam renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024-2026 sejalan dengan rencana pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Terkendalinya Tingkat Kemiskinan;
2. Meningkatnya Infrastruktur Permukiman;
3. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
4. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rumusan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain adalah :

1. Meningkatnya Penataan Kawasan Kumuh Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Ketersediaan Infrastuktur di Perumahan;
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Penatagunaan Tanah;

4. Meningkatnya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;

5.Meningkatnya capaian komponen perencanaan penganggaran, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Penataan Kawasan Kumuh Berkelanjutan	Persentase penataan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	33,33%
			Persentase Penangan-an Rumah Tidak layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	25%
Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Ketersediaan Infrastuktur di Perumahan	Persentase Penangan-an PSU di Perumahan Formal yang sudah Diserahterimakan	66,67%
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Tata Kelola dan Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesai-an Sengketa Tanah Garapan yang Ditindaklanjuti	100%
			Persentase penetapan dokumen ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	100%
			Persentase capaian inventari-sasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan ter-koordinasikan, tersinkroni-sasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria	100%
			Persentase penyeleng-garaan pengelolaan tanah kosong	100%
			Persentase pelaksana-an koordinasi dan sinkronisasi penata-gunaan tanah	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Rumah Korban Bencana	33%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP DPKP	Meningkatnya capaian komponen perencanaan penganggaran, pengukuran kinerja, pelaopran dan evaluasi kinerja	Nilai komponen Perencanaan Kinerja	20,58 Poin
			Nilai Komponen Pengukuran kinerja	20,58 Poin
			Nilai Komponen evaluasi kinerja	17,15 Poin
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10,29 Poin

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditentukan untuk Rencana Kerja perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 9 program, 20 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan yang meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sejumlah 4 Program, 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sejumlah 4 program, 4 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan;
3. Urusan Rutin pemerintahan sejumlah 1 program, 7 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

Tabel 3.3.1. RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**			**23.320.412.174**	**21.863.866.733**	**29.658.111.500**
	Bidang Kawasan Permukiman							**6.575.545.100**	**6.940.268.177**	**5.184.200.000**
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha**	**33,33**	**Persentase**	**33,33**	**Persentase**		**6.037.624.500**	**5.447.009.707**	**3.999.700.000**
1.04.03.2.01	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***	**Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**		***60.000.000***	***216.371.000***	***101.200.000***
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60.000.000	216.371.000	101.200.000
1.04.03.2.02	***Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	**Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**7**	**Dokumen**	**7**	**Dokumen**		***362.920.600***	***1.975.831.700***	***264.500.000***

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000	-	34.500.000
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	3	Dokumen	3	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	242.920.600	1.927.506.700	126.500.000
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1	Kelompok Masyarakat	1	Kelompok Masyarakat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000	48.325.000	34.500.000
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000	-	34.500.000
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	15	Keluarga	15	Keluarga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000	-	34.500.000

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.03.2.03	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	***Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	***100***	***Persentase***	***100***	***Persentase***		***5.614.703.900***	***3.254.807.007***	***3.634.000.000***
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	120	Unit Rumah	120	Unit Rumah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.632.920.600	2.049.450.200	2.875.000.000,00
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000	-	34.500.000,00
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	6	Dokumen	6	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	351.783.300	-	690.000.000,00
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipuga	1	Ha	1	Ha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.600.000.000	1.205.356.807	34.500.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh**	**25**	**Persentase**	**25**	**Persentase**		**537.920.600**	**1.493.258.470**	**1.184.500.000**
1.04.04.2.01	***Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota***	***100***	***Persentase***	***100***	***Persentase***		***537.920.600***	***1.493.258.470***	***1.184.500.000***
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50	Unit Rumah	50	Unit Rumah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	507.920.600	1.493.258.470	1.150.000.000,00
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000	-	34.500.000,00
	Bidang Pengembangan Perumahan							**3.345.910.567**	**4.670.858.704**	**8.235.437.500**
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penanganan rumah korban bencana**	**33,33**	**Persentase**	**33,33**	**Persentase**		**2.365.916.385**	**2.116.918.592**	**7.716.500.000**

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.02.2.01	***Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***5***	***Dokumen***	***5***	***Dokumen***		***454.082.285***	***304.466.392***	***402.500.000***
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	159.250.735	-	115.000.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	106.536.800	81.536.800	57.500.000,00
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000	161.562.400	57.500.000,00
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	88.294.750	11.367.192	57.500.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000	50.000.000	115.000.000
1.04.02.2.02	***Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***3***	***Dokumen***	***3***	***Dokumen***		***125.000.000***	***54.400.000***	***143.750.000***
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	25	Orang	25	Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000	29.400.000	86.250.000
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	25	Orang	25	Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25.000.000	25.000.000	57.500.000
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	25	Orang	25	Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000	50.000.000	

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.02.2.03	***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	***Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi***	***30***	***Unit Rumah***	***30***	***Unit Rumah***		***1.736.834.100***	***1.708.052.200***	***7.112.750.000***
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30	Unit Rumah	30	Unit Rumah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1.736.834.100	1.708.052.200	7.112.750.000
1.04.02.2.06	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan***	***pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan***	***2***	***Dokumen***	***2***	***Dokumen***		***50.000.000***	***50.000.000***	***57.500.000***
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25.000.000	25.000.000	28.750.000
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25.000.000	25.000.000	28.750.000
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah**	**66,67**	**Persentase**	**66,67**	**Persentase**		**979.994.182**	**2.553.940.112**	**518.937.500**

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.05.2.01	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	***Persentase ketercapaian penyelenggaraan PSU Perumahan***	***100***	***Persentase***	***100***	***Persentase***		***979.994.182***	***2.553.940.112***	***518.937.500***
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2	Dokumen	2	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	373.681.882	596.711.500	230.000.000
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2	Lokasi	2	Lokasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	311.061.800	1.754.122.212	115.000.000
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	84.899.900	65.474.900	58.937.500,00
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3	Laporan	3	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	210.350.600	137.631.500	115.000.000
	Bidang Pertanahan							**3.717.306.632**	**1.469.386.432**	**5.750.000.000**

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan**	**100**	**Persentase**	**100**	**Persentase**		**301.241.600**	**327.411.600**	**345.000.000**
2.10.04.2.01	***Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan***	***3***	***Dokumen***	***3***	***Dokumen***		***301.241.600***	***327.411.600***	***345.000.000***
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100.000.000	38.595.000	115.000.000,00
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	2	Berita Acara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	201.241.600	288.816.600	230.000.000,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan**	**100**	**Persentase**	**100**	**Persentase**		**1.065.137.232**	**774.996.032**	**1.667.500.000**
2.10.05.2.01	***Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan***	***2***	***Dokumen***	***2***	***Dokumen***		***1.065.137.232***	***774.996.032***	***1.667.500.000***

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	914.703.232	698.227.432	1.495.000.000,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	150.434.000	76.768.600	172.500.000,00
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria**	**100**	**Persentase**	**100**	**Persentase**		**205.675.400**	**277.578.800**	**287.500.000**
2.10.06.2.01	***Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria***	***2***	***Dokumen***	***2***	***Dokumen***		***205.675.400***	***277.578.800***	***287.500.000***
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	205.675.400	277.578.800	287.500.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**100**	**Persentase**	**100**	**Persentase**		**2.145.252.400**	**89.400.000**	**3.450.000.000**
2.10.10.2.01	***Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota***	***Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota***	***5***	***Dokumen***	***5***	***Dokumen***		***2.145.252.400***	***89.400.000***	***3.450.000.000***
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.145.252.400	89.400.000	3.450.000.000
	SEKRETARIAT									
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SaKIP Disperkim**	**68,61/B Nilai/Predikat**		**68,61/B Nilai/Predikat**			**9.681.649.875**	**8.783.353.420**	**10.488.474.000**
1.04.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah***	***9***	***Dokumen***	***9***	***Dokumen***		***393.301.213***	***279.344.713***	***253.000.000***

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15.000.000	11.877.400	57.500.000,00
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	83.781.200	75.857.600	46.000.000,00
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13.500.000	13.500.000	23.000.000,00
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14.999.600	14.999.600	23.000.000,00
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10.239.213	10.239.213	17.250.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	175.781.200	72.870.900	57.500.000,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	80.000.000	80.000.000	28.750.000,00
1.04.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas***	***8***	***Dokumen***	***8***	***Dokumen***		***8.371.005.774***	***7.400.007.905***	***9.453.474.000***
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang	33	Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8.120.412.174	7.155.732.705	9.338.474.000,00
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	75.781.200	73.516.000	28.750.000,00
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	44.624.400	62.515.000	28.750.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	110.188.000	102.333.300	28.750.000,00
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20.000.000	5.910.900	28.750.000,00
1.04.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu***	***100***	***Persentase***	***100***	***Persentase***		***24.999.000***	***181.704.000***	***143.750.000***
1.04.01.2.05.00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	20	Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	24.999.000	181.704.000	143.750.000,00
1.04.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Penyelenggaraan Administrai Umum Perangkat Daerah***	***100***	***Persentase***	***100***	***Persentase***		***366.380.500***	***440.256.000***	***362.250.000***
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7.499.800	7.499.800	8.625.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	147.091.900	285.124.800	46.000.000
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9.998.800	9.998.800	11.500.000
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	49.816.000	53.202.400	86.250.000,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9.947.600	24.808.800	11.500.000
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9.408.000	-	11.500.000
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	12.644.400	12.644.400	14.375.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
							ALOKASI UMUM			
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	119.974.000	46.977.000	172.500.000,00
1.04.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD***	***5***	***Paket***	***5***	***Paket***		***-***	***-***	***109.250.000***
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	109.250.000
1.04.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD***	***3***	***Paket***	***3***	***Paket***		***327.104.088***	***268.422.402***	***34.500.000***
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	118.804.388	119.003.902	11.500.000,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	9.600.000	-	11.500.000,00

Kodering	Urusan/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	target	Satuan	target	Satuan	Sumber dana	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tahun +1
							UMUM			
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	198.699.700	149.418.500	11.500.000,00
1.04.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara***	***25***	***Unit***	***25***	***Unit***		***198.859.300***	***213.618.400***	***132.250.000***
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Unit	19	Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	136.459.300	183.878.400	57.500.000,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	19	Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	47.500.000	14.840.000	57.500.000,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	19	Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14.900.000	14.900.000	17.250.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
  1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
  3. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
  4. Program Penatagunaan Tanah

Selanjutnya program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada Dokumen Rencana Strategis. Setelah diidentifikasi maka ditetapkan program yang kemudian diaplikasikan ke dalam beberapa kegiatan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :**
  1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
     - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
       - ➢ Sub kegiatan:
         a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
➢ Sub kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
➢ Sub kegiatan:
a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
➢ Sub kegiatan:
a. Pengadaan Mebel

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
➢ Sub kegiatan:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

❖ Kegiatan Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
d. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
e. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

❖ Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
b. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
c. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

❖ Kegiatan Pembangunan dan Rehabillitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

❖ Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

➢ Sub kegiatan:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

❖ Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

➢ Sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

❖ Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

➢ Sub kegiatan:

a. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
b. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
c. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

d. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
e. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

❖ Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

➢ Sub kegiatan :

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
b. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh
d. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

❖ Kegiatan Pencegahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah pada Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
b. Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

❖ Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan

➢ Sub kegiatan:

a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
b. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian
c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

d. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

❖ Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

❖ Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub Kegiatan

a. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

❖ Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tnah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

➢ Sub kegiatan:

a. Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

4. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

❖ Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

4.2. Rencana Kegiatan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merencanakan anggaran kegiatannya bersumber pada pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung Barat 2024 (Matriks Renja Terlampir) Rencana Kerja Perubahan pada Tahun Anggaran 2024 adalah

a. Bidang Kawasan Permukiman :

1. Pemutakhiran data RTLH untuk penentuan CPCL baru Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Membuat kajian kumuh untuk memenuhi kelengkapan rediness criteria bantuan dari provinsi seperti Penataan dan penyusunan DED kawasan permukiman kumuh Desa Cimerang Kec. Padalarang, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masterplan Penanganan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Kawasan Station Kereta Cepat (KCIC/KCJB) Padalaranguntuk mendukung Pengembangan Konsep TOD Padalarang, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED kawasan Kumuh Skala Kawasan Curug Agung - Cihaliwung Curug Agung, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED kawasan Kumuh Skala Kawasan Babakan Cianjur Cihampelas, Belanja Jasa Konsultansi DED kawasan Kumuh Skala Kawasan Kebon Kalapa Cijerah Tanimulya-Ngamprah, Penataan dan Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajaya Kec. Lembang
3. Perbaikan jalan lingkungan di 10 titik lokasi kumuh di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Ngamprah dan Padalarang
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 120 unit rumah pada lokasi kawasan kumuh dan 77 unit rumah di lokasi luar kawasan kumuh

b. Pengembangan Perumahan

1. Membuat DED perencanaan untuk beberapa lokasi PSU dan TPU yang sudah melakukan serah terima ke pemda agar di ttahun 2024 dapat melaksanakan kegiatan fisik (penataan Psu perumahan), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perumahan 1 (TPU GUNUNGMASIGIT), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perumahan 2 (BLOK TUGU), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Perumahan (PURI INDAH LESTARI), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Perumahan II (PESONA PRIMA PATARUMAN 1 & 2), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Perumahan III (NUANSA BUKIT CIHAMPELAS), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Perumahan IV (CIPATAT ELOK)
2. Penataan beberapa TPU dan PSU yang sudah serah terima PSU, Penataan TPU Blok Barunagrai perumahan Century Hill, Graha PinuS, Pondok Hijau), Penataan TPU Blok Gunung Masigit, Penataan TPU Perumahan Setiabudi Regency, Perbaikan jalan Lingkungan Di Perumahan Pangauban Silih Asih, Perbaikan jalan Lingkungan Di Perumahan Puri Indah Lestari
3. Pemenuhan SPM bencana berupa bantuan stimulan bagi korban bencana sebanyak 65 unit rumah berdasarkan rekom BPBD.

c. Bidang pertanahan

1. Belanja Patok untuk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Tanah Negara
2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Desa Mekarsari
3. Jasa Konsultansi Penyusunan SOP Bidang Pertanahan

4.3 Bantuan Keuangan (Bankeu)

Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa. Anggaran Bankeu (Bantuan Keuangan) provinsi dapat diajukan melalui pengajuan dari masing masing kabupaten/kota tidak terkecuali Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal ini, Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajukan Bantuan Keuangan untuk penanganan kumuh yaitu Perbaikan Rumah

Tidak Layak Huni dan Pembangunan Fisik seperti Jalan Lingkungan, Drainase, Tembok Penahan Tanah, Air minum dan menunggu Keputusan dari provinsi apakah diakomodir untuk tahun 2024 atau tidak.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusanan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja ini selain sebagai pedoman dalam pelaksaan kegiatan selama tahun anggaran 2024, juga berperan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Kabupaten Bandung Barat serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 masih jauh dari sempurna, yang pada akhirnya untuk penyempurnaan memerlukan saran dan masukan guna meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik.

Bandung Barat, Agustus 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ANNI ROSLIANTI, ST, MM
Pembina Tk.I / IV b
Nip. 197210161998032004

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN SINDANGKERTA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KECAMATAN SINDANGKERTA

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata pengantar ii

BAB I, PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 3
3. Maksud dan tujuan 4
4. Sistematika penulisan 4

BAB II, HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu 5

BAB III, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 8

DAERAH 8

1. Tujuan Rencana Kerja SKPD 8
2. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 9

Daerah 9

1. Penjabaran Renca Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta Tahun 2025

BAB IV, PENUTUP 11

1. Kesimpulan 11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) pada Kantor kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024. Ranwal RENJA disusun dengan harapan agar dapat berguna untuk membantu perkembangan program Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat kedepan.

Kami sangat sadar, bahwa dalam penyusunan Ranwal RENJA ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu mohon kiranya memaklumi serta, kami mengucapkan terima kasih kepada staf Kantor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang telah bekerja sama dan berperan secara aktif sehingga Ranwal RENJA ini akhirnya dapat disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan Masyarakat dan Negara. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Sindangkerta, Februari 2024
Camat Sindangkerta,

Drs. ACHMAD SODIKIN
NIP.19660706198610101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rangkan melaksnakan amanat pasal 124 bagian ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Sindangkerta berusaha untuk menyusun Ranwal Renja Kecamatan Sindangkerta Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2025 .

Renja Kecamatan Sindangkerta Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam system Perencanaan Pembangunan Daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Renja Kecamatan Sindangkerta menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung Barat kedalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan pengangagarannya.

Penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Sindangkerta mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sindangkerta Tahun 2024 – 2026 (Renstra

SKPD tahun terakhir), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Ranwal Renja Kecamatan Sindangkerta memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanankan pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Sindangkerta, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Sindangkerta merupakan daerah yang bersifat urban dan mempunyai tingkat mobilitas baik penduduk maupun perekonomian yang cukup tinggi karena merupakan wilayah penyangga Ibukota Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Sindangkerta terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat dengan jarak dari pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Sindangkerta dengan:

- Desa yang terjauh 15 km, dengan waktu tempuh 1 Jam
- Ibu Kota Kabupaten 30 km, dengan waktu tempuh 2 Jam
- Ibu Kota Provinsi 55 km, dengan waktu tempuh 3 Jam

Luas Kecamatan Sindangkerta adalah 7.954.784 Ha meliputi 11 Desa, 129 RW dan 523 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cipongkor
- Sebelah Selatan :Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Gununghalu
- Sebelah Timur : Kecamatan Cililin

Dengan kondisi masyarakat yang urban dan kompleks pada umumnya masyarakat Kecamatan Sindangkerta mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai baik itu anggota TNI Aktif/Pensiunan, PNS Aktif/Pensiunan dan pegawai BUMN disamping sebagian sebagai Petani .

Penduduk Kecamatan Sindangkerta berdasarkan data akhir Tahun 2021 berjumlah 72.812 jiwa yang terdiri dari 36.846 penduduk laki-laki dan 35.966

jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 23.107 KK, sedangkan data kelembagaan 43 Dusun, 523 RT, dan 129 RW.

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sindangkerta Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat, yaitu : “Bersama Membangun Masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat berbasis pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melalui jaminan akses dan pemerataan terhadan layanan dasar kesehatan, Pendidikan dan keagamaan;
2. Mememnuhi kebutuhan Infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, social dan budaya;
3. Menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat masyarakat berbasis kearifan lokan dan kreatifitas;
4. Melakukan optimalisasi Sumber Daya Alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan;
5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan dan industry yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment;
7. Mengembangan system Pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayaniberbasis inovasidan teknologi.

ALUR PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

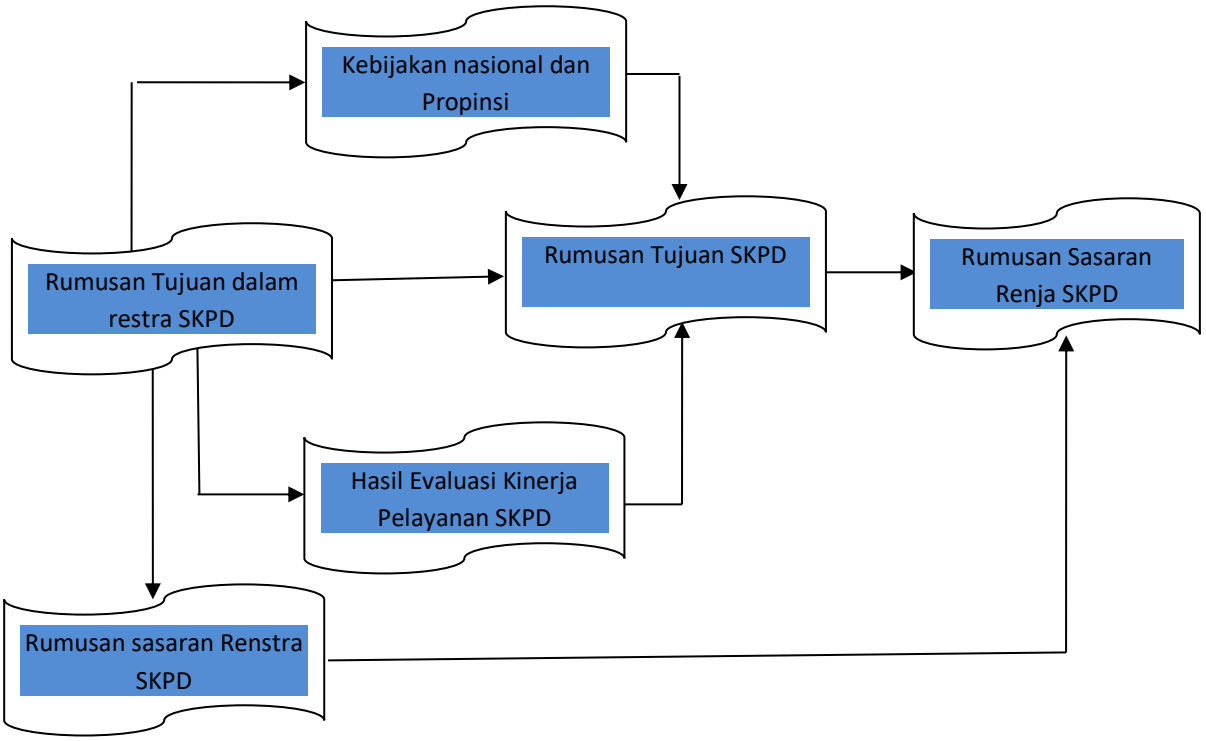

1.2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang – undang nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat
d. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
e. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
f. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
g. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Barat;
m. Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021, tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintahan Daerah.
n. Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 84 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok, fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor kecamatan Sindangkerta dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya, yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD.

1.3.2. Tujuan

Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatkan pelayanan, menentukan target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
2. Menyelaraskan siklus perencanaan lima tahunan (Renstra) SKPD dengan rencana tahunan SKPD.
3. Menyelaraskan perencanaan tahunan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan Visi dan misi Kepala Daerah

1.4. Sistem Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 , secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II, HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Sindangkerta) Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1. Penjabaran Renca Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta

BAB IV, PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Sindangkerta) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Salah satu cara untuk mengukur sejauhmana realisasi pelaksanaan Rencana kerja SKPD yang telah dilaksanakan, yakni dengan diadakannya evaluasi terhadap apa yang dilkasnakan, sejaumana capaian yang telah dicapai, apakah telah sesuai atau belum, dimana SKPD sudah merancang/merencakan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta, pada Tahun 2023 kegiatan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena adanya devisit anggaran sehingga mengakibatkan pergeseran anggaran dari kegiatan yang sudah direncakan kepada kegiatan yang diproritaskan itu merupakan dampak dari adanya Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021.

Secara rinci Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta dan Pencairan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahaan	100%					100%	1.298.785.585	45,91%
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	5 Keg					5 Keg	11.325.000	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	1.650.000	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	-	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	1.685.000	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	-	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / Jumlah Kegiatan	3 Dokumen 4 Keg					3 Dok	-	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	13 ASN					13 ASN	1.143.510.735	44.63%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ S emesteran SKPD	Jumlah Dokumen / Jumlah Kegiatan	7 Dok					7 Dok	47.962.000	54.18

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%					100%		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27 Stel					27 Stel	4.455.000	100
7.01.01.2.05.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Kegiatan**	4 Keg					4 Keg	4.900.000	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%					100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis					6 Jenis	3.110.500	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis					3 Jenis	24.744.000	92.87
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis					7 Jenis	4.999.000	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan	12 Keg					12 Keg	25.151.200	77.15
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	16076 Lembar					16076 Lembar	4.622.700	82.16
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	12 Keg					12 Keg		

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua	1 unit					1 Unit		0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Kebersihan Kantor	100 %					100%		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	6 jenis					6 Jenis	12.557.000	58.25
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Asset Kantor**	**100 %**					**100%**		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Asset Kantor	6 unit					5 Unit	3.664.200	37.70
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor	2 Jenis					2 jenis	1.420.000	39.81
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	2 Unit					2 unit	3.029.250	100
7.01.02	**PROGRAM**	Persentase	100%					100 %	186.579.900	42.16

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan**	**100%**					**100%**		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan					5 Kegiatan	**44.945.000**	**26.18**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %					100%		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan	2 Jenis Pelayanan					2 Jenis Pelayanan		0

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan	2 Jenis Pelayanan					2 Jenis Pelayanan	112.658.900	53.75
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2 Keg							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%					100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		2 Jenis							
	Pemerintahan yang terkait		2 Jenis							

	dengan Non perizinan									
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan	3 Keg					3 Keg	28.976.000	47.30
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 %**					**100 %**	**649.967.550**	**50.99**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %					100 %		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan	2 keg					2 Keg	59.999.750	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Keg					4 Keg	56.167.800	42.36
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan bagi Lembaga						100%		

		Kemasyarakatan								
7.01.03.2.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan						12 Keg	65.200.000	45.39
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**					**100 %**	**345.579.700**	**50.97**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	4 Keg							
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 keg							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananny a Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah	100%					100 %		

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan	243 orang					243 orang	345.579.700	50.97
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**11 Desa**					**11 Desa**	**27.510.000**	**67.06**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%					100%		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	2 Keg							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan	4 Keg					4 Keg	14.000.000	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		2 Keg							

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kegiatan								
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Keg							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu cara untuk mengukur sejauhmana realisasi pelaksanaan Rencana kerja SKPD yang telah dilaksanakan, yakni dengan diadakannya evaluasi terhadap apa yang dilkasnakan, sejaumana capaian yang telah dicapai, apakah telah sesuai atau belum, dimana SKPD sudah merancang/merencakan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan di skenariokan dalam Renja. Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas dasar dokumen di atas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya,(anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2025 dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta

Kabupaten Bandung Barat

No	Tujuan	Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan(SAKIP)	62 (B)	63 (B)	64 (BB)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemberdayaan Desa dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Merujuk kepada Peraturan Bupati Bandung Barat No. 84 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, bahwa Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Upaya Penanganan

1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan yang telah ada
2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
3) Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Rutin, *Continue* dan berkesinambungan disamping mengupayakan program *reward.*
4) Melaksanakan kegiatan pembinaan atau sosialisasi pelayanan kesehatan
5) Mengadakan siskamswakarsa dan pelatihan bagi anggota Linmas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oelh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait

prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp…..)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp…)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sindangkerta			**2.712.022.683**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kecamatan Sindangkerta			**2.712.022.683**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	25.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.155.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	2.972.874.251	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	2.972.874.251	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	170.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	170.000.000	

	Administrai Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6 Layanan	174.237.295	Administrai Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6 Layanan	174.237.295	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN JASA PENUNJANG KEBUTUHAN KANTOR DALAM SATU TAHUN	1 Layanan	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH LAYANAN JASA PENUNJANG KEBUTUHAN KANTOR DALAM SATU TAHUN	1 Layanan	35.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK	2 jenis belanja modal	60.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kecamatan Sindangkerta	JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK	2 jenis belanja modal	60.000.000	
	PROGRAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Sindangkerta**	**JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**	**100%**	**330.000.000**	**PROGRAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Sindangkerta**	**JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**	**100%**	**330.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	2 Dokumen	110.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	2 Dokumen	110.000.000	

	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	1 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	1 Laporan	150.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Laporan	70.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Laporan	70.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan Sindangkerta	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	620.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan Sindangkerta	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	620.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	3 Keg	620.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sindangkerta	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	3 Keg	620.000.000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sindangkerta	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	**1.045.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Sindangkerta	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	**1.045.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Sindangkerta	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	12 Laporan	**45.000.000**	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Sindangkerta	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	12 Laporan	**45.000.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sindangkerta	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	**1.000.000.000**	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Sindangkerta	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	**1.000.000.000**	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sindangkerta	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	**1.218.120.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Sindangkerta	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	**1.218.120.000**	
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintah Desa	Kecamatan Sindangkerta	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	**1.218.120.000**	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintah Desa	Kecamatan Sindangkerta	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	**1.218.120.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Sindangkerta untuk Usulan Prioritas Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024 belum dilaksanakan menunggu Jadwal dari Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah tentunya harus selaras dengan Rencana yang ditetapkan secara Nasional, dalam arti bahwa arah kebijakan Perangkat Daerah harus sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Awal Tahun 2020 Negara Indonesia mulai dilanda suatu wabah penyakit yakni dengan munculnya wabah Virus Covid 19 sehingga mau tidak mau klebijakan yang sudah dibuat diawal harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penanggulanan bencana pandemik covid19.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Ranhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mempermudah Pelayanan dan memperpendek rentang pelayanan Kepada Masyarakat;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, kapasitas dan kewenangan Kecamatan;
3. Meningkatkan Kualitas dan kapabilitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
4. Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan parasarana ;

3.2.2. Sasaran

Rencana kerja Perangkat daerah Kecamatan Sindangkerta dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapai, didasarkan pada sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Membenahi prosedur , mekanisme dan sarana pelayanan masyarakat di Kecamatan ;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pelimpahan sebagaian Urusan Pemerintahan kepada Camat ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa melalui Pembinaan dan Pemahaman TUPOKSI masing-masing;
4. Melaksanakan inventarisasi dan analisa Kebutuhan Barang dan sarana lainnya ;
5. Merumuskan perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat secara efektif dan aspiratif ;

3.3. Program dan Kegiatan

Renca Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 di Kecamatan Sindangkerta didasarkan atas beberapa factor, diantaranya :

Kecamatan merupakan bagian dari Subsistem Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan, sehinggan dalam pelaksanaannya mengacu pada misi ke- 4 (empat) Bupati Bandung Barat periode tahun 2024-2026

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2014 bahwa Kecamatan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan desa, oleh karenanya sesuai dengan tufoksi yang dijabarkan dalam kegiatan disetiap Kasi.

Jumlah Program yang akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019, yaitu sebanyak 5 (lima) Program yang terdiri dari :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta

Renca Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sindangkerta yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat digambarkan dalam bentuk table penjabaran Renja 2025 sebagai berikut :

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024

SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sindangkerta

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sindangkerta									Rp5.623.981.546,00	Rp1.026.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.650.231.546,00	Rp5.191.360.248,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.217.610.248,00	(Rp1.432.621.298,00)	(27.46)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp5.623.981.546,00	Rp1.026.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.650.231.546,00	Rp5.191.360.248,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.217.610.248,00	(Rp1.432.621.298,00)	(27.46)	
7	01				KECAMATAN				Rp5.623.981.546,00	Rp1.026.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.650.231.546,00	Rp5.191.360.248,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.217.610.248,00	(Rp1.432.621.298,00)	(27.46)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp3.189.380.954,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.630.954,00	Rp2.756.759.656,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.783.009.656,00	(Rp432.621.298,00)	(15.55)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp15.292.603,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.292.603,00	Rp15.292.603,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.292.603,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.447.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.447.200,00	Rp2.447.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.447.200,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.481.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.481.003,00	Rp2.481.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.481.003,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.476.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.476.600,00	Rp2.476.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.476.600,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.447.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.447.500,00	Rp2.447.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.447.500,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.447.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.447.500,00	Rp2.447.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.447.500,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.992.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.992.800,00	Rp2.992.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.992.800,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.959.150.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.959.150.651,00	Rp2.526.529.353,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.526.529.353,00	(Rp432.621.298,00)	(17.12)	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.887.874.251,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.887.874.251,00	Rp2.455.252.953,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455.252.953,00	(Rp432.621.298,00)	(17.62)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.819.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.819.700,00	Rp3.819.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.819.700,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp65.506.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.506.700,00	Rp65.506.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.506.700,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp117.539.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.539.300,00	Rp117.539.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.539.300,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.190.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.190.700,00	Rp24.190.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.190.700,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp93.348.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.348.600,00	Rp93.348.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.348.600,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp44.073.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.073.400,00	Rp44.073.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.073.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.482.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.482.300,00	Rp1.482.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.482.300,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.973.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.973.100,00	Rp1.973.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.973.100,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.404.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.404.800,00	Rp18.404.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.404.800,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.763.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.763.000,00	Rp5.763.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.763.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.450.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.450.200,00	Rp16.450.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.450.200,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp3.125.000,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.375.000,00	Rp3.125.000,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.375.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.125.000,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.375.000,00	Rp3.125.000,00	Rp26.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.375.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp50.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.200.000,00	Rp50.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.200.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.100.000,00	Rp43.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.100.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp287.992.800,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.287.992.800,00	Rp287.992.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.992.800,00	(Rp1.000.000.000,00)	(347.23)	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp88.457.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.457.600,00	Rp88.457.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.457.600,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.457.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.457.600,00	Rp88.457.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.457.600,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				Rp128.980.800,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.980.800,00	Rp128.980.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.980.800,00	(Rp1.000.000.000,00)	(775.31)	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp128.980.800,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.128.980.800,00	Rp128.980.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.980.800,00	(Rp1.000.000.000,00)	(775.31)	
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				Rp70.554.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.554.400,00	Rp70.554.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.554.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.554.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.554.400,00	Rp70.554.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.554.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp1.281.733.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.733.400,00	Rp1.281.733.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.733.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp1.281.733.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.733.400,00	Rp1.281.733.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.733.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.100.000,00	Rp50.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.100.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.231.633.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.231.633.400,00	Rp1.231.633.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.231.633.400,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp806.719.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp806.719.392,00	Rp806.719.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp806.719.392,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp24.838.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.838.992,00	Rp24.838.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.838.992,00	Rp0,00	0.00	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.838.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.838.992,00	Rp24.838.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.838.992,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				Rp781.880.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.880.400,00	Rp781.880.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.880.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp781.880.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.880.400,00	Rp781.880.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.880.400,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp58.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.155.000,00	Rp58.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.155.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp58.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.155.000,00	Rp58.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.155.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.215.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.215.000,00	Rp53.215.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.215.000,00	Rp0,00	0.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.702.237.653,00
Februari	Rp196.506.650,00
Maret	Rp253.366.674,00
April	Rp233.947.700,00
Mei	Rp291.148.750,00
Juni	Rp232.715.678,00
Juli	Rp205.817.950,00
Agustus	Rp253.862.550,00
September	Rp160.780.250,00
Oktober	Rp252.751.945,00
November	Rp243.295.100,00
Desember	Rp191.179.348,00
Jumlah	**Rp5.217.610.248,00**

Ngamprah, Tanggal 08 Oktober 2024
CAMAT SINDANGKERTA

REGA WIGUNA, S.STP., M.IP
NIP. 198111022001121004

Mengesahkan,
PPKD

H. Heru Budi Purnomo, S.Sos, M.si
NIP. 197009011995031003

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Rancangan Awan Rencana kerja merupakan kunci utama dari suatu system akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kerja akan menjadi acuan dlam menjalankan Tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sindangkerta dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan focus perbaikan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan presepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai dengan yang direncanakan.

Kecamatan Sindangkerta sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat akan berupaya se optimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat menyusun Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Sindangkerta yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sindangkerta demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Sindangkerta telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada

Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang timbul.

Sindangkerta, 2024

CAMAT SINDANGKERTA

Drs. ACHMAD SODIKIN

Pembina Tk.I

NIP.1966070619861001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

KECAMATAN CILILIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KECAMATAN CILILIN

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Dafar Isi	ii
BAB I, PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan tujuan	6
4. Sistematika penulisan	7
BAB II, HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu	10
BAB III, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
1. Tujuan Rencana Kerja SKPD	37
2. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	38
BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
1. Penjabaran Renca Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Cililin Tahun 2024	51
BAB IV, PENUTUP	56
Kesimpulan	56

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) pada kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024. RENJA PERUBAHAN disusun dengan harapan agar dapat berguna untuk membantu perkembangan program Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat kedepan.

Kami sangat sadar, bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu mohon kiranya memaklumi serta, kami mengucapkan terima kasih kepada staf Kantor Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang telah bekerja sama dan berperan secara aktif sehingga Rencana Kerja ini akhirnya dapat disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan Masyarakat dan Negara. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Cililin, Juli 2024
Camat Cililin,

OPA MUSTOPA, SH.
NIP.196906211999031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rangkan melaksnakan amanat pasal 124 bagian ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Cililin berusaha untuk menyusun Renja Kecamatan Cililin Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 12 Bulan dalam tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2025 .

Renja Kerja Perubahan Kecamatan Cililin Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam system Perencanaan Pembangunan Daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026. Renja Kecamatan Cililin menerjemahkan RPD dan RKPD Kabupaten Bandung Barat kedalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan pengangagarannya.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cililin mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Cililin Tahun 2024 – 2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Kecamatan Cililin memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanankan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Cililin, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Cililin merupakan daerah yang bersifat urban dan mempunyai tingkat mobilitas baik penduduk maupun perekonomian yang cukup tinggi karena merupakan wilayah penyangga Ibukota Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Cililin terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat dengan jarak dari pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Cililin dengan:

- Desa yang terjauh 15 km, dengan waktu tempuh 1 Jam
- Ibu Kota Kabupaten 12 km, dengan waktu tempuh 2 Jam
- Ibu Kota Provinsi 55 km, dengan waktu tempuh 3 Jam

Luas Kecamatan Cililin adalah 5.774.04 Ha meliputi 11 Desa, 44 Dusun, 138 RW dan 581 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cihampelas
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Cililin dan Kecamatan Cipongkor
- Sebelah Timur : Kecamatan Cihampelas

Dengan kondisi masyarakat yang urban dan kompleks pada umumnya masyarakat Kecamatan Cililin mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai

baik itu anggota TNI Aktif/Pensiunan, PNS Aktif/Pensiunan dan pegawai BUMN disamping sebagian sebagai Petani .

Penduduk Kecamatan Cililin berdasarkan data berjalan Tahun 2024 berjumlah 96.622 jiwa yang terdiri dari 49.461 penduduk laki-laki dan 47.161 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 58.130 KK, sedangkan data kelembagaan 44 Dusun, 581 RT, dan 138 RW.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cililin Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat, yaitu : “Bersama Membangun Masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat berbasis pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melalui jaminan akses dan pemerataan terhadan layanan dasar kesehatan, Pendidikan dan keagamaan;
2. Mememnuhi kebutuhan Infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, social dan budaya;
3. Menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat masyarakat berbasis kearifan lokan dan kreatifitas;
4. Melakukan optimalisasi Sumber Daya Alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan;
5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan dan industry yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment;
7. Mengembangan system Pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayaniberbasis inovasidan teknologi.

ALUR PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

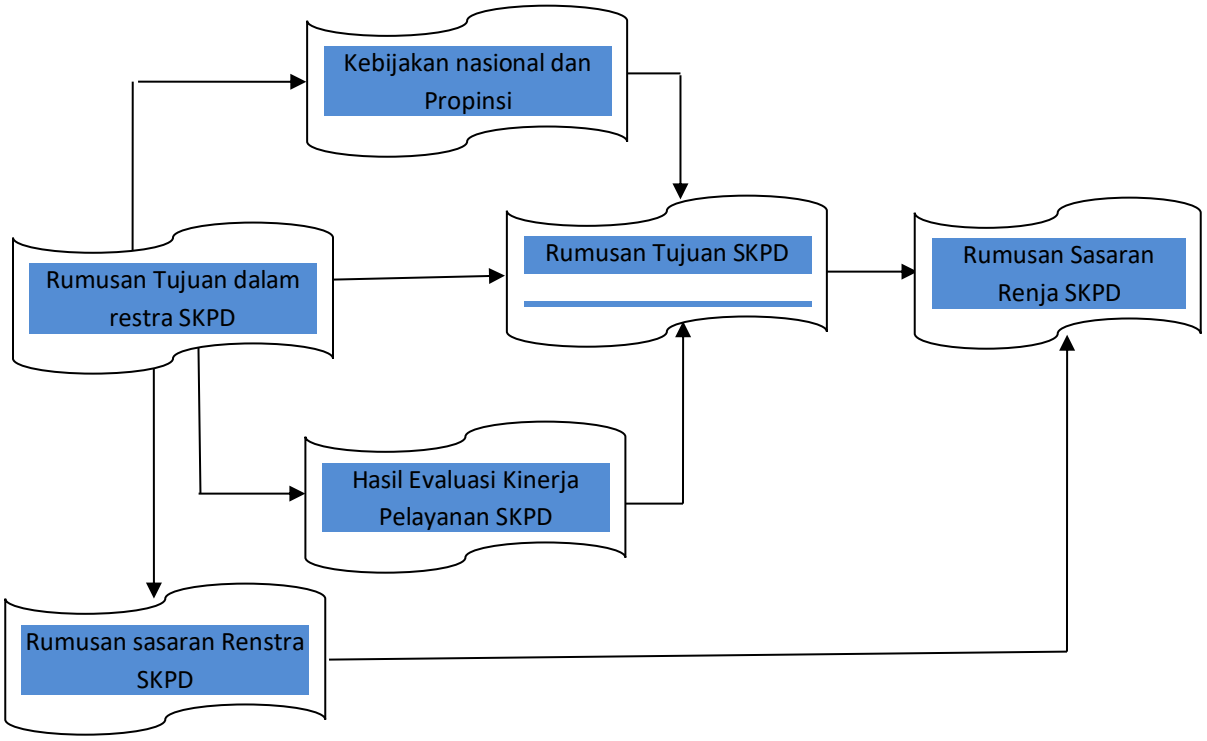

1.2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
d. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 288);
n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun

2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang memerintahkan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023;

p. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2024 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
s. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026.
t. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bandung Barat;
u. Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021, tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintahan Daerah.
v. Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 84 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok, fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja OPD kecamatan Cililin dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya, yang merupakan implementasi dari Renstra OPD.

1.3.2. Tujuan

Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program

dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemberdayaan Desa dan kemasyarakatan
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kecamatan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 , secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II, HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEMESTER 1

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Cililin) Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

1.1. Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cililin

BAB IV, PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Cililin) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Salah satu cara untuk mengukur sejauhmana realisasi pelaksanaan Rencana kerja SKPD yang telah dilaksanakan, yakni dengan diadakannya evaluasi terhadap apa yang dilaksanakan, sejauhmana capaian yang telah dicapai, apakah telah sesuai atau belum, dimana SKPD sudah merancang/merencanakan program dan kegiatan tahunan yang diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cililin, pada Tahun 2023 terdiri dari 5 Program, 14 Kegaiatan dan 35 Sub Kegiatan, secara keselurhan hanya terealisasi 96% hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan pemda Kabupaten Bandung Barat, sehingga pelaksanaan anggaran tidak maksimal.

Secara rinci Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cililin Tahun 2023

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi		Modal		Realisasi	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01	Kecamatan Cililin	5.545.059.324	5.272.296.350	68.691.600	68.691.600	5.340.987.950	96,32
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.071.355.874	2.934.038.191	68.691.600	68.691.600	3.002.729.791	97,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.967.500	62.967.500	0	0	62.967.500	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	100,00
	Belanja Barang	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	100,00
	Belanja Jasa	45.500.000	45.500.000	0	0	45.500.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.500.000	45.500.000	0	0	45.500.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	45.500.000	45.500.000	0	0	45.500.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.500	613.500	0	0	613.500	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
	Belanja Jasa	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Lembur	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.500	613.500	0	0	613.500	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
	Belanja Jasa	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Lembur	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.500	613.500	0	0	613.500	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
	Belanja Jasa	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Lembur	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.500	613.500	0	0	613.500	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
	Belanja Jasa	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Lembur	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.500	613.500	0	0	613.500	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
	Belanja Jasa	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Lembur	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.605.580.774	2.491.551.566	0	0	2.491.551.566	95,62
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.584.488.474	2.473.521.396	0	0	2.473.521.396	95,71
	Belanja Pegawai	2.584.488.474	2.473.521.396	0	0	2.473.521.396	95,71
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	937.625.274	863.630.013	0	0	863.630.013	92,11
	Belanja Gaji Pokok ASN	717.108.245	664.683.000	0	0	664.683.000	92,69
	Belanja Gaji Pokok PNS	717.108.245	664.683.000	0	0	664.683.000	92,69
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	77.647.850	66.676.824	0	0	66.676.824	85,87
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	77.647.850	66.676.824	0	0	66.676.824	85,87
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	77.203.000	73.800.000	0	0	73.800.000	95,59
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	77.203.000	73.800.000	0	0	73.800.000	95,59
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.713.250	15.495.000	0	0	15.495.000	98,61
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.713.250	15.495.000	0	0	15.495.000	98,61
	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.843.669	42.438.120	0	0	42.438.120	86,89
	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.843.669	42.438.120	0	0	42.438.120	86,89
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.093.470	526.690	0	0	526.690	48,17
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.093.470	526.690	0	0	526.690	48,17
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.790	10.379	0	0	10.379	65,73
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.790	10.379	0	0	10.379	65,73
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.646.863.200	1.609.891.383	0	0	1.609.891.383	97,76
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	975.774.000	963.701.708	0	0	963.701.708	98,76
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	975.774.000	963.701.708	0	0	963.701.708	98,76
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	50.688.000	38.489.500	0	0	38.489.500	75,93

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	50.688.000	38.489.500	0	0	38.489.500	75,93
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	620.401.200	607.700.175	0	0	607.700.175	97,95
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	620.401.200	607.700.175	0	0	607.700.175	97,95
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.593.500	2.593.500	0	0	2.593.500	100,00
	Belanja Barang	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	913.500	913.500	0	0	913.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.500	613.500	0	0	613.500	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
	Belanja Jasa	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Belanja Lembur	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.498.800	15.436.670	0	0	15.436.670	83,45
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	83,33
	Belanja Lembur	1.680.000	840.000	0	0	840.000	50,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.218.800	996.670	0	0	996.670	81,77
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.100.000	898.490	0	0	898.490	81,68
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	52.800	43.635	0	0	43.635	82,64
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.000	54.545	0	0	54.545	82,64
	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.647.800	185.149.850	0	0	185.149.850	95,12
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.600.000	25.600.000	0	0	25.600.000	100,00
	Belanja Barang	25.600.000	25.600.000	0	0	25.600.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	25.600.000	25.600.000	0	0	25.600.000	100,00
	Belanja Pakaian KORPRI	12.800.000	12.800.000	0	0	12.800.000	100,00

	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.800.000	12.800.000	0	0	12.800.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	100,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	131.670.400	122.172.450	0	0	122.172.450	92,79
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000	16.477.500	0	0	16.477.500	87,18
	Belanja Jasa	112.770.400	105.694.950	0	0	105.694.950	93,73
	Belanja Jasa Kantor	105.000.000	98.000.000	0	0	98.000.000	93,33
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	105.000.000	98.000.000	0	0	98.000.000	93,33
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.770.400	7.694.950	0	0	7.694.950	99,03
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.820.000	6.820.000	0	0	6.820.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	389.400	389.400	0	0	389.400	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	561.000	485.550	0	0	485.550	86,55
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.377.400	13.377.400	0	0	13.377.400	100,00
	Belanja Barang	2.877.400	2.877.400	0	0	2.877.400	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	2.877.400	2.877.400	0	0	2.877.400	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	602.400	602.400	0	0	602.400	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.275.000	2.275.000	0	0	2.275.000	100,00
	Belanja Jasa	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.589.800	90.422.675	68.691.600	68.691.600	159.114.275	171,85
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.177.800	7.177.800	0	0	7.177.800	100,00
	Belanja Barang	7.177.800	7.177.800	0	0	7.177.800	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	7.177.800	7.177.800	0	0	7.177.800	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.177.800	7.177.800	0	0	7.177.800	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.006.500	0	68.006.500	68.006.500	68.006.500	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.006.500	0	68.006.500	68.006.500	68.006.500	100,00

	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.006.500	0	68.006.500	68.006.500	68.006.500	100,00
	Belanja Modal Alat Kantor	11.601.300	0	11.601.300	11.601.300	11.601.300	100,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.601.300	0	11.601.300	11.601.300	11.601.300	100,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	56.405.200	0	56.405.200	56.405.200	56.405.200	100,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	20.973.600	0	20.973.600	20.973.600	20.973.600	100,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.431.600	0	35.431.600	35.431.600	35.431.600	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.477.600	6.477.600	685.100	685.100	7.162.700	110,58
	Belanja Barang dan Jasa	6.477.600	6.477.600	0	0	6.477.600	100,00
	Belanja Barang	6.477.600	6.477.600	0	0	6.477.600	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	6.477.600	6.477.600	0	0	6.477.600	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.181.300	6.181.300	0	0	6.181.300	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	296.300	296.300	0	0	296.300	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685.100	0	685.100	685.100	685.100	100,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	685.100	0	685.100	685.100	685.100	100,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	685.100	0	685.100	685.100	685.100	100,00
	Belanja Modal Alat Dapur	685.100	0	685.100	685.100	685.100	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.698.400	50.051.600	0	0	50.051.600	98,72
	Belanja Barang dan Jasa	50.698.400	50.051.600	0	0	50.051.600	98,72
	Belanja Barang	50.698.400	50.051.600	0	0	50.051.600	98,72
	Belanja Barang Pakai Habis	50.698.400	50.051.600	0	0	50.051.600	98,72
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.267.300	12.787.450	0	0	12.787.450	96,38
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.458.800	6.387.025	0	0	6.387.025	98,89
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.694.300	5.647.575	0	0	5.647.575	99,18
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.458.000	7.409.550	0	0	7.409.550	99,35
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.820.000	17.820.000	0	0	17.820.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.631.200	5.140.875	0	0	5.140.875	77,53
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.435.200	717.600	0	0	717.600	50,00

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.196.000	4.423.275	0	0	4.423.275	85,13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.604.800	21.574.800	0	0	21.574.800	99,86
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.204.800	1.174.800	0	0	1.174.800	97,51
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.400.000	20.400.000	0	0	20.400.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.235.200	19.804.400	0	0	19.804.400	81,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.920.000	12.489.200	0	0	12.489.200	73,81
	Belanja Jasa	16.920.000	12.489.200	0	0	12.489.200	73,81
	Belanja Jasa Kantor	16.920.000	12.489.200	0	0	12.489.200	73,81
	Belanja Tagihan Air	16.920.000	12.489.200	0	0	12.489.200	73,81
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.315.200	7.315.200	0	0	7.315.200	100,00
	Belanja Barang	7.315.200	7.315.200	0	0	7.315.200	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	7.315.200	7.315.200	0	0	7.315.200	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.176.000	6.176.000	0	0	6.176.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	242.800	242.800	0	0	242.800	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	896.400	896.400	0	0	896.400	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.334.800	84.142.200	0	0	84.142.200	92,13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.700.000	36.507.400	0	0	36.507.400	83,54
	Belanja Jasa	3.200.000	252.300	0	0	252.300	7,88
	Belanja Jasa Kantor	3.200.000	252.300	0	0	252.300	7,88
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.200.000	252.300	0	0	252.300	7,88
	Belanja Pemeliharaan	40.500.000	36.255.100	0	0	36.255.100	89,52
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.500.000	36.255.100	0	0	36.255.100	89,52
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000	20.060.900	0	0	20.060.900	89,16
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000	16.194.200	0	0	16.194.200	89,97

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.634.800	47.634.800	0	0	47.634.800	100,00
	Belanja Barang	47.634.800	47.634.800	0	0	47.634.800	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	47.634.800	47.634.800	0	0	47.634.800	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.082.000	16.082.000	0	0	16.082.000	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	31.552.800	31.552.800	0	0	31.552.800	100,00
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	293.170.100	270.446.375	0	0	270.446.375	92,25
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	127.369.400	127.369.400	0	0	127.369.400	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	127.369.400	127.369.400	0	0	127.369.400	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.614.400	3.614.400	0	0	3.614.400	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.005.000	38.005.000	0	0	38.005.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.100.000	5.100.000	0	0	5.100.000	100,00
	Belanja Jasa	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	100,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	100,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	100,00
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	100,00
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	100,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.150.000	61.150.000	0	0	61.150.000	100,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	100,00
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	100,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.150.000	49.150.000	0	0	49.150.000	100,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	49.150.000	49.150.000	0	0	49.150.000	100,00

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	120.977.100	119.765.175	0	0	119.765.175	99,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.977.100	119.765.175	0	0	119.765.175	99,00
	Belanja Barang	1.906.400	694.475	0	0	694.475	36,43
	Belanja Barang Pakai Habis	1.906.400	694.475	0	0	694.475	36,43
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	290.500	290.500	0	0	290.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.615.900	403.975	0	0	403.975	25,00
	Belanja Jasa	119.070.700	119.070.700	0	0	119.070.700	100,00
	Belanja Jasa Kantor	111.000.000	111.000.000	0	0	111.000.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.000.000	111.000.000	0	0	111.000.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.070.700	8.070.700	0	0	8.070.700	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.150.000	7.150.000	0	0	7.150.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	409.200	409.200	0	0	409.200	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	511.500	511.500	0	0	511.500	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.823.600	23.311.800	0	0	23.311.800	52,01
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.823.600	23.311.800	0	0	23.311.800	52,01
	Belanja Barang	6.723.600	3.361.800	0	0	3.361.800	50,00
	Belanja Barang Pakai Habis	6.723.600	3.361.800	0	0	3.361.800	50,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	181.500	90.750	0	0	90.750	50,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	290.500	145.250	0	0	145.250	50,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	401.600	200.800	0	0	200.800	50,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000	2.925.000	0	0	2.925.000	50,00
	Belanja Jasa	36.300.000	18.150.000	0	0	18.150.000	50,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.300.000	18.150.000	0	0	18.150.000	50,00
	Belanja Sosialisasi	36.300.000	18.150.000	0	0	18.150.000	50,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	100,00

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	237.084.200	226.684.200	0	0	226.684.200	95,61
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	205.184.200	194.784.200	0	0	194.784.200	94,93
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.303.200	34.303.200	0	0	34.303.200	100,00
	Belanja Barang	6.653.200	6.653.200	0	0	6.653.200	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	6.653.200	6.653.200	0	0	6.653.200	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	803.200	803.200	0	0	803.200	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000	5.850.000	0	0	5.850.000	100,00
	Belanja Jasa	27.650.000	27.650.000	0	0	27.650.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.650.000	27.650.000	0	0	27.650.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	27.650.000	27.650.000	0	0	27.650.000	100,00
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	84.051.000	84.051.000	0	0	84.051.000	100,00
	Belanja Barang	57.401.000	57.401.000	0	0	57.401.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	57.401.000	57.401.000	0	0	57.401.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.415.000	7.415.000	0	0	7.415.000	100,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.246.000	22.246.000	0	0	22.246.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.740.000	27.740.000	0	0	27.740.000	100,00
	Belanja Jasa	19.650.000	19.650.000	0	0	19.650.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000	5.500.000	0	0	5.500.000	100,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	100,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.650.000	9.650.000	0	0	9.650.000	100,00
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	100,00
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	100,00

	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	100,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	100,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	100,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	100,00
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.830.000	76.430.000	0	0	76.430.000	88,02
	Belanja Barang	25.680.000	15.280.000	0	0	15.280.000	59,50
	Belanja Barang Pakai Habis	25.680.000	15.280.000	0	0	15.280.000	59,50
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.680.000	15.280.000	0	0	15.280.000	59,50
	Belanja Jasa	61.150.000	61.150.000	0	0	61.150.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	61.150.000	61.150.000	0	0	61.150.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	61.150.000	61.150.000	0	0	61.150.000	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.900.000	31.900.000	0	0	31.900.000	100,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	31.900.000	31.900.000	0	0	31.900.000	100,00
	Belanja Barang	4.550.000	4.550.000	0	0	4.550.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	4.550.000	4.550.000	0	0	4.550.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.550.000	4.550.000	0	0	4.550.000	100,00
	Belanja Jasa	27.350.000	27.350.000	0	0	27.350.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.350.000	27.350.000	0	0	27.350.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	27.350.000	27.350.000	0	0	27.350.000	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	569.014.600	546.749.834	0	0	546.749.834	96,09
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.100.000	15.875.000	0	0	15.875.000	41,67
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	38.100.000	15.875.000	0	0	15.875.000	41,67
	Belanja Barang	35.100.000	14.625.000	0	0	14.625.000	41,67

	Belanja Barang Pakai Habis	35.100.000	14.625.000	0	0	14.625.000	41,67
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.100.000	14.625.000	0	0	14.625.000	41,67
	Belanja Jasa	3.000.000	1.250.000	0	0	1.250.000	41,67
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000	1.250.000	0	0	1.250.000	41,67
	Belanja Sosialisasi	3.000.000	1.250.000	0	0	1.250.000	41,67
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	530.914.600	530.874.834	0	0	530.874.834	99,99
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	530.914.600	530.874.834	0	0	530.874.834	99,99
	Belanja Barang	28.800.000	28.800.000	0	0	28.800.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	28.800.000	28.800.000	0	0	28.800.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.800.000	28.800.000	0	0	28.800.000	100,00
	Belanja Jasa	502.114.600	502.074.834	0	0	502.074.834	99,99
	Belanja Jasa Kantor	497.400.000	497.400.000	0	0	497.400.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	455.400.000	455.400.000	0	0	455.400.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.000.000	42.000.000	0	0	42.000.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.714.600	4.674.834	0	0	4.674.834	99,16
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.180.000	4.180.000	0	0	4.180.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	237.600	222.334	0	0	222.334	93,57
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	297.000	272.500	0	0	272.500	91,75
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.374.434.550	1.294.377.750	0	0	1.294.377.750	94,18
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.374.434.550	1.294.377.750	0	0	1.294.377.750	94,18
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.531.200	0	0	0	0	0,00
	Belanja Barang	8.881.200	0	0	0	0	0,00
	Belanja Barang Pakai Habis	8.881.200	0	0	0	0	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	301.200	0	0	0	0	0,00

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.580.000	0	0	0	0	0,00
	Belanja Jasa	27.650.000	0	0	0	0	0,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.650.000	0	0	0	0	0,00
	Belanja Sosialisasi	27.650.000	0	0	0	0	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	44.270.000	44.270.000	0	0	44.270.000	100,00
	Belanja Barang	11.670.000	11.670.000	0	0	11.670.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	11.670.000	11.670.000	0	0	11.670.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.670.000	11.670.000	0	0	11.670.000	100,00
	Belanja Jasa	32.600.000	32.600.000	0	0	32.600.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	32.600.000	32.600.000	0	0	32.600.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	32.600.000	32.600.000	0	0	32.600.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	35.302.400	35.302.000	0	0	35.302.000	100,00
	Belanja Barang	6.002.400	6.002.000	0	0	6.002.000	99,99
	Belanja Barang Pakai Habis	6.002.400	6.002.000	0	0	6.002.000	99,99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	602.400	602.000	0	0	602.000	99,93
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000	100,00
	Belanja Jasa	29.300.000	29.300.000	0	0	29.300.000	100,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.300.000	29.300.000	0	0	29.300.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	29.300.000	29.300.000	0	0	29.300.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.258.330.950	1.214.805.750	0	0	1.214.805.750	96,54
	Belanja Barang	172.560.000	129.035.000	0	0	129.035.000	74,78
	Belanja Barang Pakai Habis	172.560.000	129.035.000	0	0	129.035.000	74,78
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.560.000	129.035.000	0	0	129.035.000	74,78
	Belanja Jasa	57.370.950	57.370.750	0	0	57.370.750	100,00
	Belanja Jasa Kantor	54.000.000	54.000.000	0	0	54.000.000	100,00

	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000	54.000.000	0	0	54.000.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.370.950	3.370.750	0	0	3.370.750	99,99
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.970.000	2.970.000	0	0	2.970.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	178.200	178.000	0	0	178.000	99,89
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	222.750	222.750	0	0	222.750	100,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.028.400.000	1.028.400.000	0	0	1.028.400.000	100,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.028.400.000	1.028.400.000	0	0	1.028.400.000	100,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.028.400.000	1.028.400.000	0	0	1.028.400.000	100,00
	Jumlah	5.545.059.324	5.272.296.350	68.691.600	68.691.600	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu cara untuk mengukur sejauhmana realisasi pelaksanaan Rencana kerja OPD yang telah dilaksanakan, yakni dengan diadakannya evaluasi terhadap apa yang dilkasnakan, sejauhmana capaian yang telah dicapai, apakah telah sesuai atau belum, dimana OPD sudah merancang/merencanakan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPD untuk jangka waktu tiga tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar dari pada OPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan di skenariokan dalam Renja. Kemudian OPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai atas dasar dokumen di atas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya (anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja OPD secara garis besar terdiri dari:

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2023 dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai kuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	CC	CC	B	CC	-	CC	B	
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya Pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemberdayaan Desa dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan Masyarakat(IKM)	82	82,50	82,75	83	77,52	-	80	80	
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Merujuk kepada Peraturan Bupati Bandung Barat No. 84 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, bahwa Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Upaya Penanganan

1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan yang telah ada
2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
3) Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Rutin, *Continue* dan berkesinambungan disamping mengupayakan program *reword.*
4) Melaksanakan kegiatan pembinaan atau sosialisasi pelayanan kesehatan
5) Mengadakan sistem keamanan swakarsa dan pelatihan bagi anggota Linmas

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cililin untuk Usulan Prioritas Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024 diawali dengan Musrenbang di Tingkat Desa yang berlangsung mulai 29 September s/d 13 Desember 2023 di 11 Desa se wilayah Kecamatan Cililin.

Hasil Musrenbang Desa berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa dibawa ke Musrenbang di Tingkat Kecamatan oleh 5 (lima) Delegasi dari masing-masing Desa.

Pada tanggal 25 Januari 2024 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Cililin, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cililin dengan dihadiri oleh 55 orang peserta yang terdiri dari: Tim Musrenbang Kabupaten, Tim Delegasi Desa, Unsur Perangkat Kecamatan dan wakil dari kelompok/tokoh masyarakat.

Hasil Musrenbang di Tingkat Kecamatan berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan, diusung ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan diwakili 3 (tiga) orang Delegasi Kecamatan Cililin.

Adapun Skala Prioritas Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2024 yang telah melalui proses rasionalisasi di tingkat Kabupaten, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2024

NO	KAMUS USULAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	VOLUME	TOTAL PAGU USULAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehab Jalan	Pembangunan Hotmix Jalan Desa	Jalan Aspal Tebal 5cm Kerusakan 100%	Kp. Cidangdeur S/D Kp. Cimalik	Panjang : 1.200 M X L : 2,5 M	480.203.000	Cililin	Karanganyar
2	Rehab Jalan	Rutin Jalan Aspal Dijalan Eksisting (Hotmix Kualitas Bagus	Sudah Rusak Parah Jalan Protokol Desa	Sepanjang Jalan Protokol Desa	P: 4.700 X L :3 M	4.407.786.900	Cililin	Karanganyar
3	Drainase	Drainase Pasangan Batu	Belum Adanya Saluran Air Yang Memadai Di Ruas Jalan Kabupaten	Jl. Karyamukti No.1	2.800 M	1.784.632.724	Cililin	Karyamukti
4	Tpt Jalan	Tpt Pasangan Batu Ruas Jalan	Karena Pinggir Jalan Kabupaten Rawan Longsor	Jl. Karyamukti No.1	150 M X 50 CM X 3 M	311.823.988	Cililin	Karyamukti
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Belanja Sosial Berupa Uang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp. 15.000.000,00 Juta/ Unit	Masih Adanya Rumah Yang Tidak Layak Huni, Dan Belum Mendapat Bantuan Sama Sekali	Desa Bongas	70 Unit	1.050.000.000	Cililin	Bongas
6	Prasarana Pengolahan Sampah	Mesin Pencacah Sampah Organik	Terkendalanya Akan Mesin Pencacah Yang Belum Ada	Desa Bongas	2 Unit	72.980.600	Cililin	Bongas
7	Rehab Jalan	Jalan Aspal Tebal 5 Cm, Kerusakan 100%	Jalan Rusak Parah Banyak Berlubang	Jalan Raya Cikakak – Leuwinutug	P= 1.500 m L= 5 m	2.139.447.150	Cililin	Batulayang

8	Rehab Jalan	Jalan Penetrasi	Jalan Sudah Rusak	Kp. Talagawaden Rw. 017	P= 1.100 m L= 2,5 m	599.105.183	Cililin	Batulayang
9	Rehab Jalan	Hotmix Jalan Desa	Peningkatan Kualitas Jalan Desa Gedugan-Cicapeu-Cihanjuang	Kp. Gedugang Rw 05 S/D Cihanjuang Rw 06	6.500	2.031.960.060	Cililin	Kidangpananjung
10	Rehab Jalan	Hotmix Jalan Kabupaten	Peningkatan Kualitas Poros Jalan Kabupaten Tanjungwangi-Kidangpananjung-Mukapayung	Kp. Walahir Rw 02 S/D Kp Pasir Haur Rw 03 (Dusun Iii)	6.000	1.875.655.440	Cililin	Kidangpananjung
11	Tpt Jalan	Putr	Jalan Rusak Menjadi Miring Tidak Adanya Tpt	Kp. Sadang Rw. 02	200	279.176.878	Cililin	Budiharja
12	Tpt Jalan	Putr	Jalan Rusak Menjadi Miring Tidak Adanya Tpt	Kp. Bojong Cibodas Rw. 08	65	90.732.485	Cililin	Budiharja
13	Bantuan Banke	Bantuan Modal Usaha	Kurangnya Modal Usaha Dan Sarana Kelompok Usaha	Kp. Ciririp Rw 01	1 keg	20.000.000	Cililin	Mukapayung
14	Pelatihan Wira Usaha Pemuda Pemula	Pelatihan Wirausaha Pemuda Pemula Untuk 15-20 Orang	Kurangnya Ilmu Terkait Kewirausahaan Di Kalangan Pemuda	Desa Mukapayung	1 keg	50.000.000	Cililin	Mukapayung
15	Bantuan Alat Kesenian	Alat Pencak Silat	Alat Yang Sudah Ada Rusak	Desa Rancapanggung	1 UNIT	15.000.000	Cililin	Rancapanggung

16	Jalan Usaha Tani	Pembangunan,Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani,Jalan Produksi	Rusak	Desa Rancapanggung	1250	356.573.500	Cililin	Rancapanggung
17	Rehab Jalan	Rutin Jalan Aspaleksisting Aspal Hotmix Kualitas Bagus	Jalan Poros Desa Karangtanjung - Desa Cililin Rusak Parah	Kp. Cinangsi Rw. 002	618 x 2,5	482.981.276	Cililin	Karangtanjung
18	Tpt Jalan	Bronjong	(Jalan Poros Desa Karangtanjung - Desa Cililin)Pencegahan Terjadinya Putus Jalan Poros Desa	Kp. Cinangsi Rw. 003	15 x 30 x 1	675.582.300	Cililin	Karangtanjung
19	Dashsat (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Operasional Pengelolaan Dashat Tingkat Desa Penyediaan Bahan Untuk Pemberian Makan Tambahan (Pmt) Balita Beresiko Stunting	Pencegahan Stunting	Desa	Paket	30.000.000	Cililin	Cililin
20	Jalan Usaha Tani	Pembengunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi	Jalan Rusak	Desa	13 RW	260.000.000	Cililin	Cililin
21	Rehab Jalan	Rutin Jalan Aspal Di Jalan Eksisting Aspal (Hotmik Kualitas Bagus)	Terkendala Aktivitas Perekonomian, Pendikdikan Dan Pertanian Warga Masyarakat	Kp. Jamarun – Cibitung	5.000	1.563.045.000	Cililn	Nanggerang
22	Tpt Jalan	Tpt Pasangan Batu Ruas Jalan	Sering Terjadi Pengikisan Tanah Sehingga Lebar Jalan Berkurang	Kp. Pasir Karamat – Cibitung	180	251.259.000	Cililn	Nanggerang
23	Tpt Jalan	Tpt Pasangan Batu Jalan	Antisipasi Tanah Longsor Ketika Musim Penghujan	Ruas Jalan Desa (Rw06) Desa Karanganyar	P : 250 M X T : 1,5 M	275.138.400	Cililin	Karanganyar

24	Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Akses Jalan Pertanian Sudah Rusak	Kp. Babakan Rt 05 S/D Kp. Cimalik Rt 06 Rw 003	P : 700 M X L : 1 M	105.058.500	Cililin	Karanganyar
25	Drainase Lingkungan	Pekerjaan Saluran Drainase Jadi Pasangan Batu Muka	Belum Adanya Saluran Air Yang Memadai Di Ruas Jalan Desa Karyamukti Kp. Cileutik	Kp. Cileutik Rt 003 Rw 007	300 M X 50 CM X 60 CM	304.059.396	Cililin	Karyamukti
26	Sapras Jalan	Pju (Tiang 7 Meter 80 Watt)	Kurangnya Pencahayaan Di Sepanjang Ruas Jalan Kabupaten	Jl. Karyamukti No.1	50 Unit	725.000.000	Cililin	Karyamukti
27	Prasarana Pengolahan Sampah	Mesin Pencacah Sampah Plastik	Terkendalanya Akan Mesin Pencacah Yang Belum Ada	Desa Bongas	2 Unit	58.384.400	Cililin	Bongas
28	Rehab Jalan	Jalan Beton K-350 Kerusakan 100% Tebal 25 Cm	Ruksaknya Jalan Kabupaten Yang Menjadi Akses Utama Warga Desa Bongas	Kp. Kandang Sapi - Kp. Bongas	2.000 M	1.338.728.260	Cililin	Bongas
29	Rehab Jalan	Rutin Jalan Aspal Dijalan Eksisting Aspal (Hotmik Kualitas Bagus)	Jalan Rusak Dengan Geografis Jalan Pebgunungan	Kp. Tegalega Rw. 016 - Kp. Cisitu Rw. 009	P= 2.500 m L= 2,5 m	1.953.807.750	Cililin	Batulayang
30	Rehab Kirmir Tpt Irigasi	Pembangunan Rehab Saluran (Kirmir) Tpt T=100/50 (Rehab)	Tpt Irigasi Rusak Dan Banyak Yang Roboh	Jalan Raya Cikakak – Leuwinutug	P = 700 m T = 1 m	502.384.847	Cililin	Batulayang
31	Rehab Jalan	Hotmix Jalan Desa	Peningkatan Kualitas Jalan Desa Kubang-Cijontor	Kp Cikopeng Rw 01 S/D Kp. Cijontor (Dusun I)	1.600	507.990.015	Cililin	Kidangpananjung

32	Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Pelatihan Menjahit	Kurangnya Keterampilan Bagi Calon Tenaga Kerja	Desa Mukapayung	1 Paket	77.164.800	Cililin	Mukapayung
33	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.Belanja Sosial Berupa Uang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp. 15.000.000,00 Juta/ Unit	Masih Banyaknya Rumah Yang Tidak Layak Huni Di Setiap Dusun	Desa Mukapayung	15 unit	225.000.000	Cililin	Mukapayung
34	Sapras Jalan	Pju (Tiang 7 M, 80 Watt)	Kurangnya Penerangan Jalan	Desa Rancapanggung	20	290.000.000	Cililin	Rancapanggung
35	Rehab Jalan	Jalan Beton K-350	Rusak 100 %	Jalan Kabupaten Rancapanggung	200	133.873.000	Cililin	Rancapanggung
36	Rehab Jalan	Perbaikan Jalan Hotmix Kualitas Bagus (Jalan Poros Desa Karangtanjung - Desa Cililin)	Peningkatan Kapasitas Ekonomi	Kp. Jaladri Rw. 09	800 x 2,5	500.174.784	Cililin	Karangtanjung
37	Drainase	Normalisasi Drainase (Drainase Pasang Batu 40 X 60cm)	Tergenangnya Air Drainase Ke Jalan Dan Banjir Ke Rumah Warga	Kp. Saar Mutiara Rw. 06	500 m	318.684.415	Cililin	Karangtanjung
38	Bantuan Alat Kesenian	Kendang Pencak Silat 10jt/Buah Alat Pencak Silat 15jt/Set Baju Tanding Pencak Silat 200rb/Stel	Perlengkapan Dan Alat Sudah Rusak/Sudah Tidak Layak Pakai	Desa (Paguron)	3 Buah 3 Set 30 Stel	81.000.000	Cililin	Cililin
39	Irigasi	Pembangunan Irigasi Baru Atau Rehab Berat (Rehabilitasi)	Sudah Rusak Dan Sekarang Tidak Berfungsi	Desa		49.109.588	Cililin	Cililin

40	Drainase	Drainase Pasangan Batu 40x60 Cm	Kurangnya Fasilitas Penampungan Saluran Air Sepanjang Jalan Sehingga Air Meluap Kejalan Mengakibatkan Jalan Rusak Dan Longsor	Kp. Pasir Karamat – Cibitung	720	458.904.960	Cililn	Nanggerang
41	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Belanja Sosial Berupa Uang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp. 15,000,000 Juta/Unit	Banyak Rumah Warga Yang Sudah Tidak Layak Ditempati Karena Keadaannya Sudah Rusak, Kumuh Sehingga Bisa Berdampak Pada Kesehatan Dan Juga Keselamatan, Dan Warga Tersebut Tidak Bisa Merehab Rumahnya Dikarenakan Fartor Ekonominya Kurang	Desa Nanggerang	24	450.000.000	Cililn	Nanggerang
42	Tpt Jalan	Tpt Pasangan Batu Jalan	Antisipasi Tanah Longsor Ketika Musim Penghujan	Ruas Jalan Desa (Rw03) Desa Karanganyar	P : 250 M X T : 1,5 M	275.138.400	Cililin	Karanganyar
43	Tpt Jalan	Tpt Pasangan Batu Jalan	Antisipasi Tanah Longsor Ketika Musim Penghujan	Ruas Jalan Desa (Rw05) Desa Karanganyar	Panjang : 250 M X T : 1,5 M	275.138.400	Cililin	Karanganyar
44	Irigasi	Pembangunan Irigasi Baru	Kurangnya Pasokan Air Ke Pesawahan Warga Karyamukti	Kp., Cimanong Rt 003 Rw 002	1 Unit	49.109.588	Cililin	Karyamukti
45	Drainase Lingkungan	Pekerjaan Saluran Drainase Jadi Pasangan Batu Muka	Belum Adanya Saluran Air Yang Memadai Di Ruas Jalan Desa Karyamukti Kp. Honjengupuk	Kp. Honjengupuk Rt 003 Rw 005	300 M X 50 CM X 60 CM	138.044.547	Cililin	Karyamukti

46	Drainase	Drainase Pasangan Batu 40 X 60 Cm	Belum Adanya Pembungan Air, Yang Mengakibatkan Sering Terjadinya Genangan Air Di Jalan Desa Yang Membahayakan Pengguna Jalan	Kp. Sukamanah - Kp. Perelas	1.000 M	637.362.830	Cililin	Bongas
47	Sarpras Jalan	Pju (Tiang 7 Meter 80 Watt)	Kurangnya Penerangan Di Jalan Desa Dan Kabupaten	Desa Bongas	100 Unit	1.450.000.000	Cililin	Bongas
48	Rehab Kirmir Tpt Irigasi	Pembangunan Rehab Saluran (Kirmir) Tpt T=100/50 (Rehab)	Tpt Irigasi Rusak Dan Banyak Yang Roboh	Kp Cikakak Rt. 004 Rw. 002	P = 60 m T = 1 m	71.769.264	Cililin	Batulayang
49	Rehab Kirmir Tpt Irigasi	Pembangunan Rehab Saluran (Kirmir) Tpt T=100/50 (Rehab)	Tpt Irigasi Rusak Dan Banyak Yang Roboh	Kp. Jelegong Rw. 018	P = 500 m L = 1,2 m	432.159.008	Cililin	Batulayang
50	Rehab Jalan	Masih Banyaknya Rumah Yang Tidak Layak Huni Di Setiap Dusun	Rusaknya Ruas Jalan Kabupaten Di Wilayah Dusun 3 Dan 4	Desa Mukapayung	3500 m		Cililin	Mukapayung
51	Irigasi	Pembangunan Irigasi Baru Atau Rehab Berat	Rusaknya Saluran Irigasi Untuk Pesawahan Warga	Desa Mukapayung	250 m		Cililin	Mukapayung
52	Spam	Pembangunan Sumur Dalam Diatas 75-100m,	Kekurangan Air Bersih	Desa Rancapanggung	1 UNIT	262.191.999	Cililin	Rancapanggung
53	Prasarana Persampahan	Motor Sampah	Tidak Adanya Alat Angkut Sampah Di Lingkungan	Desa Rancapanggung	1 UNIT	60.159.731	Cililin	Rancapanggung

54	Bantuan Budidaya Ternak	Paket Bibit Ternak Domba Jantan Dan Betina	Dapat Menambah Pendapatan Para Peternak	Kp. Saar Mutiara Rw. 01	1	28.000.000	Cililin	Karangtanjung
55	Bantuan Budidaya Ternak	Paket Bibit Ternak Domba Jantan Dan Betina	Dapat Menambah Pendapatan Para Peternak	Kp. Cipetir Rw. 01	1	28.000.000	Cililin	Karangtanjung
56	Pelatihan Budidaya Perikanan	Pelatihan Budidaya Perikanan	Sangat Diperlukan Untuk Pengembangan Perikatan Terutama Pembibitan	Kelompok	3	18.750.000	Cililin	Cililin
57	Bibit / Benih	Bantuan Bibit Dan Benih Sayuran Buah-Buahan, Tanaman Obat	Pemenuhan Kebutuhan Program Pangan	Kelompok	2	15.000.000	Cililin	Cililin
58	Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi	Terhambatnya Produksi Pertanian Warga Masyarakat Karena Akses Jalan Yang Belum Terbangun Sehingga Untuk Kendaraan Tentunya Pada Musim Hujan Sulit Untuk Sampai Di Lokasi Pertanian	Desa Nanggerang	3.000	300.000.000	Cililn	Nanggerang
59	Bantuan Alat Kesenian	Kendang 7,5 Jt/Set Kendang Pencak Silat 10jt/Buah Alat Pencak Silat 15jt/Set, Baju Tanding Pencak Silat 200rb/Stel, Gamelan Degung Kuningan 50jt/Set, Calung 16jt/Set, Kacapi Kawih 5,5jt/Set.	Seni Budaya Di Desa Nanggerang Belum Maksimal Karena Kurangnya Alat Kesenian Pada Bidang Bidang Tertertu	Desa Nanggerang	1	148.700.000	Cililn	Nanggerang
60	Sarpras Jalan	Pemasangan Pengurang Kecepatan-Speed Bump Garis (Untuk Jalan 5 M) Untuk Kecepatan Dibawah 40km/Jam	Terdapat Sekolah Sekolah Yang Berbatasan Langsung Dengan Jalan Kabupaten	Desa Mukapayung	3 titik		Cililin	Mukapayung

61	Bantuan Budidaya Ikan	Benih Ikan, Indukan, Pakan, Dan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Lele	Dapat Menambah Pendapatan Para Peternak	Kp. Cinangsi Rw. 02	1	24.864.000	Cililin	Karangtanjung
62	Bantuan Alat Kesenian	Kendang Pencak Silat 10jt/Buah Qasidah/Marawis/Nasyid 15jt/Set	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Di Ruanglingkup Seni Yang Ada	Desa Mukapayung	1 buah 1 set	25.000.000	Cililin	Mukapayung
63	Event/Pestival Parawisata	Pestival Wajit Cililin	Untuk Pelestarian Makanan Tradisional Khas Cililin	Desa Karangtanjung	1 Kegiatan	150.000.000	Cililin	Karangtanjung
64	Pengembangan Sentra/Klaster/Kelompok UMKM	Vokasi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Dan Bantuan Alat Produksi Pada Lokus Kantong Kemiskinan Extrim	Pelatihan Vokasi Peningkatan Mutu Produksi Inovasi Wajit Cililin Dan Kerupuk Gurilem Serta Bantuan Alat Produksi	Desa Cililin	1 Kegiatan	75.000.000	Cililin	Bongas
65	Pengembangan Sentra/Klaster/Kelompok UMKM	Vokasi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Dan Bantuan Alat Produksi Pada Lokus Kantong Kemiskinan Extrim	Pelatihan Vokasi Peningkatan Mutu Produksi Inovasi Olahan Ikan Serta Bantuan Alat Produksi	Desa Cililin	1 Kegiatan	75.000.000	Cililin	Cililin

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah tentunya harus selaras dengan Rencana yang ditetapkan secara Nasional, dalam arti bahwa arah kebijakan Perangkat Daerah harus sesuai dengan Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Ranhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cililin mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Cililin yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mempermudah Pelayanan dan memperpendek rentang pelayanan Kepada Masyarakat;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, kapasitas dan kewenangan Kecamatan;
3. Meningkatkan Kualitas dan kapabilitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
4. Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan parasarana ;

3.2.2. Sasaran

Rencana kerja Perangkat daerah Kecamatan Cililin dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapai, didasarkan pada sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Membenahi prosedur , mekanisme dan sarana pelayanan masyarakat di Kecamatan ;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pelimpahan sebagaian Urusan Pemerintahan kepada Camat ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa melalui Pembinaan dan Pemahaman TUPOKSI masing-masing;
4. Melaksanakan inventarisasi dan analisa Kebutuhan Barang dan sarana lainnya ;
5. Merumuskan perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat secara efektif dan aspiratif ;

3.3. Program dan Kegiatan

Renca Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 di Kecamatan Cililin didasarkan atas beberapa factor, diantaranya :

Kecamatan merupakan bagian dari Subsistem Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan, sehinggan dalam pelaksanaannya mengacu pada RPD Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2014 bahwa Kecamatan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan desa, oleh karenanya sesuai dengan tufoksi yang dijabarkan dalam kegiatan disetiap Kasi.

Jumlah Program yang akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019, yaitu sebanyak 5 (lima) Program yang terdiri dari :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program dan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.3

Rumusan Renca Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kecamatan Cililin								5.794.888.488					0,00
	UNSUR KEWILAYAHAN								5.794.888.488					0,00
	KECAMATAN								5.794.888.488					0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.295.470.688					0,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								66.757.100					0,00
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
		-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

		-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
		-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
		-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	2.947.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.974.110.838					0,00
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	14 Orang/bulan	-	2.926.009.438	Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	0,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
		-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
		-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	18 Laporan	-	46.326.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								53.993.400					0,00

0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	14 Paket	-	24.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	0,00
0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	29.193.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								107.400.000					0,00
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

		-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	26.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.000.000					0,00
0005	Pengadaan Mebel													
		-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29.985.000					0,00
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	11.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.224.350					0,00
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	22.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0,00
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	3.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

		-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	26.594.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								243.524.400					0,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								44.544.800					0,00
0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	44.544.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								176.618.200					0,00
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	9 Laporan	-	176.618.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								22.361.400					0,00
0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
		-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin,	-	12 Laporan	-	22.361.400	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	12 Laporan	0,00

					Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Lain yang Dilimpahkan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								161.291.800					0,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								161.291.800					0,00
0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
		-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	36.596.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
		-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	22.922.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	0,00

0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	101.773.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	0,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								745.059.400					0,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								745.059.400					0,00
0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
		-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	745.059.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								1.349.542.200					0,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								1.349.542.200					0,00
0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													

		-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	12.642.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	0,00
0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
		-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	12.642.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	0,00
0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
		-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00
0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
		-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0,00

0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
		-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.263.257.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	0,00
									5.794.888.488					**0,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Penjabaran Renca Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cililin

Renca Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cililin yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat digambarkan dalam bentuk table penjabaran Renja 2024 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN CILILIN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP)	CC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.000.000	SEKCAM
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.400	SEKCAM
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.952.400	SEKCAM
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.952.400	SEKCAM
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.952.400	SEKCAM
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.947.500	SEKCAM
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.839.936.74	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.775.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	46.326.400	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.800.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.193.400	Kasubag Kepegawaian dan Umum
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.400.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	10.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.985.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.950.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.680.000	Kasubag Kepegawaian dan Umum
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.594.350	Kasubag Kepegawaian dan Umum
2	Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemberdayaan Desa dan kemasyarakatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.544.800	KASI Pemerintahan dan Pelayanan Publik
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	176.618.200	KASI Pemerintahan dan Pelayanan Publik

					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.361.400	KASI Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.596.400	KASI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22.922.400	KASI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	101.773.000	KASI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.642.400	KASI Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.642.400	KASI Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	31.000.000	KASI Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	30.000.000	KASI Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.263.257.400	KASI Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	745.059.400	KASI Ketentraman dan Ketertiban Umum
JUMLAH							**5.708.815.791**	

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Rencana kerja merupakan kunci utama dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan menjadi acuan dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Cililin dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan presepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai dengan yang direncanakan.

Kecamatan Cililin sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat akan berupaya se optimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat menyusun Perubahan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Cililin yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cililin demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Cililin telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun

2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang timbul.

Cililin, Juli 2024
CAMAT CILILIN

OPA MUSTUPA, SH.
Pembina
NIP.196906211999031003

LAPORAN
EVALUASI
RENCANA KERJA (RENJA)

TRIWULAN IV

KECAMATAN LEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyelesaikan dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Lembang Tahun Anggaran 2024. Laporan Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Lembang merupakan salah satu dokumen penilaian Perencanaan jangka pendek yang merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran setiap Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang telah digunakan dalam 1 (satu) periode anggaran. Didalam penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Lembang ini kami uraikan sesuai dengan Rencana Pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan penilaian kinerja dalam mengejar tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun anggaran 2024. Upaya koreksi konstruktif ataupun masukan masukan sangat diperlukan oleh semua pihak untuk menyempurnakan Laporan Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Lembang ini dan khususnya masukan bagi Langkah-langkah penyusunan tahapan selanjutnya. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusun Laporan Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Lembang Tahun Anggaran 2024

Lembang Januari 2025
CAMAT LEMBANG
Kabupaten Bandung Barat

Drs. BAMBANG EKO SETYOWAHJUDI
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690725 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**1**
DAFTAR ISI		**2**
DAFTAR TABEL		**3**
DAFTAR GAMBAR		**4**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**5**
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Landasan Hukum	8
	1.3 Maksud dan Tujuan	10
	1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II	**GAMBARAN UMUM KECAMATAN LEMBANG**	**13**
	2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	13
	2.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lembang	25
	2.3 Metadata Indikator Kinerja	41
BAB III	**CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LEMBANG**	**45**
	3.1 Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja	45
	3.2 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB IV	**FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCAPAIAN KINERJA**	**59**
	4.1 Permasalahan Umum	59
	4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja	59
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	61
BAB V	**PENUTUP**	**63**
	5.1 Kesimpulan	63
LAMPIRAN TABEL		**64**

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran	25
2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lembang	29
2.3	Formulasi Capaian Pengukuran Kinerja	30
2.4	Perbandingan Target Keuangan dan Kinerja Renstra, Renja, DPA	30
2.5	Perjanjian Kinerja Utama Kecamatan Lembang	41
2.6	Formulasi Capaian Pengukuran Kinerja	43
2.7	Formulasi Capaian Pengukuran Kinerja	43
2.8	Formulasi Capaian Pengukuran Kinerja	43
3.1	Interval Kriteria Realisasi Kinerja	46
3.2	Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kecamatan Lembang Triwulan IV tahun anggaran 2024	48
4.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lembang Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	60
4.2	Rencana Tindak Lanjut Faktor Penghambat Kecamatan Lembang	62

DAFTAR GAMBAR

1.1	bagan ilir tahapan penyusunan renja kecamatan	6
1.2	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	7
1.3	Tindaklanjut renja dengan proses penyusunan RAPBD	7

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen penilaian perencanaan sebagai pedoman awal perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembang Tahun 2024 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Lembang Tahun 2024-2026 dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Lembang. Musrenbang Desa/Kelurahan membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024. Usulan dari setiap Desa/Kelurahan selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan Narasumber dari seluruh Perangkat Daerah, perwakilan dari Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat dalam skala Kecamatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

A. persiapan penyusunan;
B. penyusunan rancangan awal;
C. penyusunan rancangan;
D. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
E. perumusan rancangan akhir; dan
F. penetapan.

Perumusan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, merupakan proses Penilaian tingkat capaian Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan awal penyusunan Renja Perangkat Daerah berikutnya berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD terkait Perumusan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertahankan konsistensi dan kesesuaian program, kegiatan dan pagu indikatif .Dibawah ini bagan alir proses penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah yang telah dihitung menjadi tingkat capaian Kecamatan Lembang :

Gambar 1.1 bagan ilir tahapan penyusunan renja kecamatan

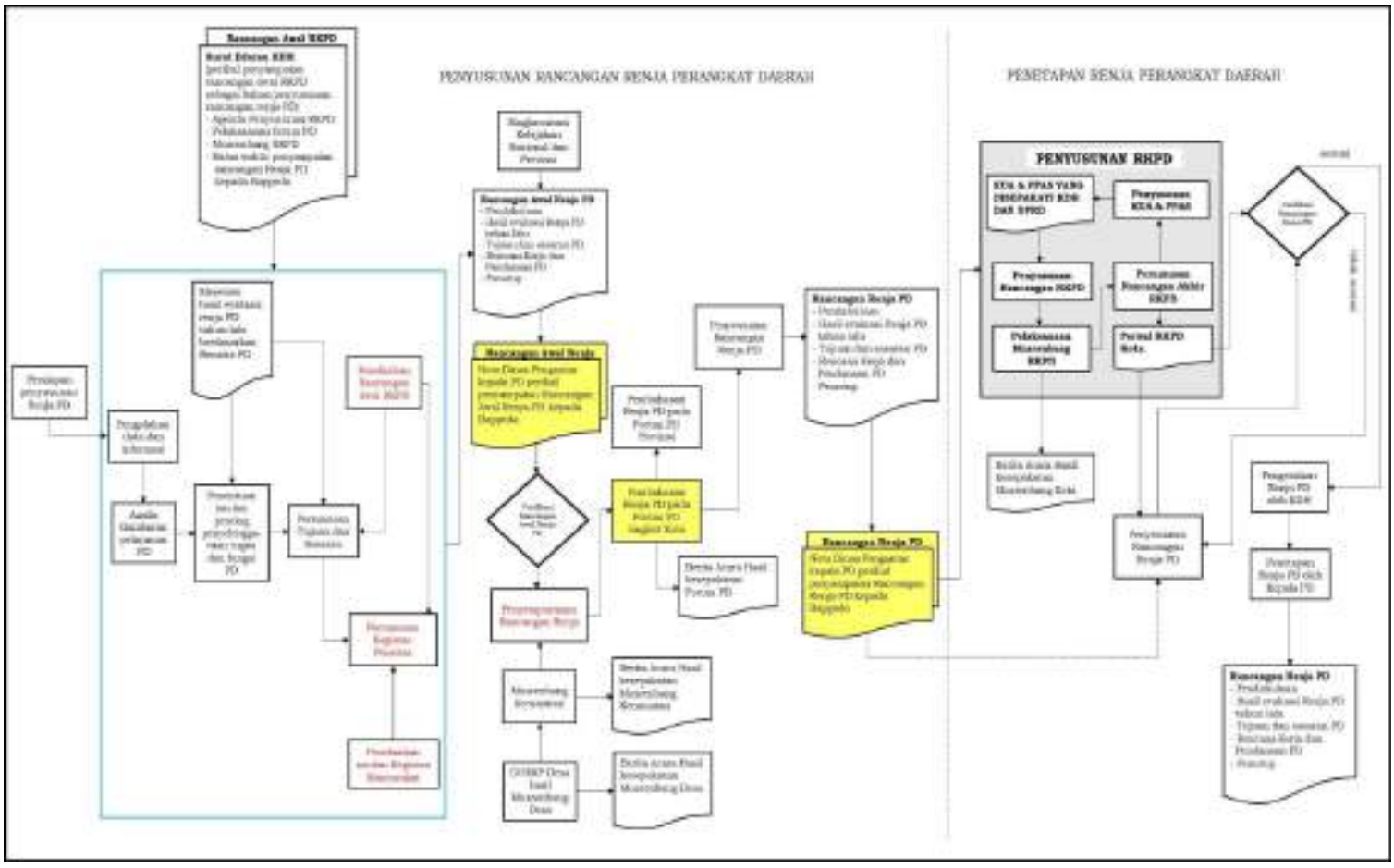

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

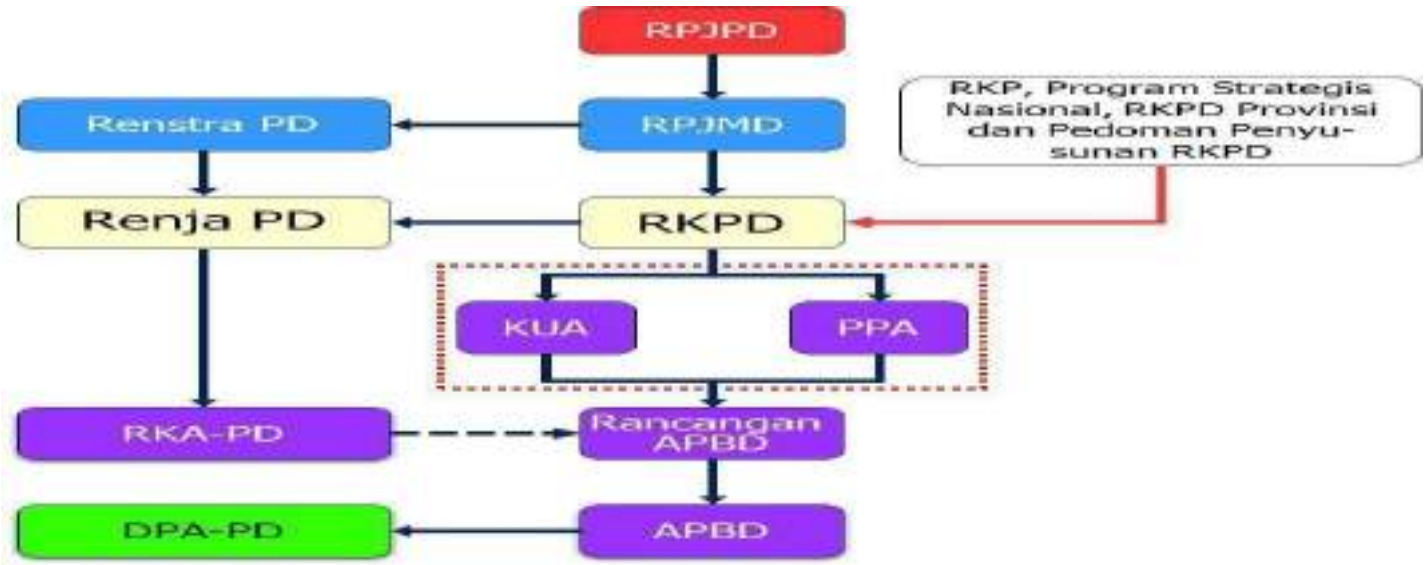

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :

Gambar 1.3 Tindaklanjut renja dengan proses penyusunan RAPBD

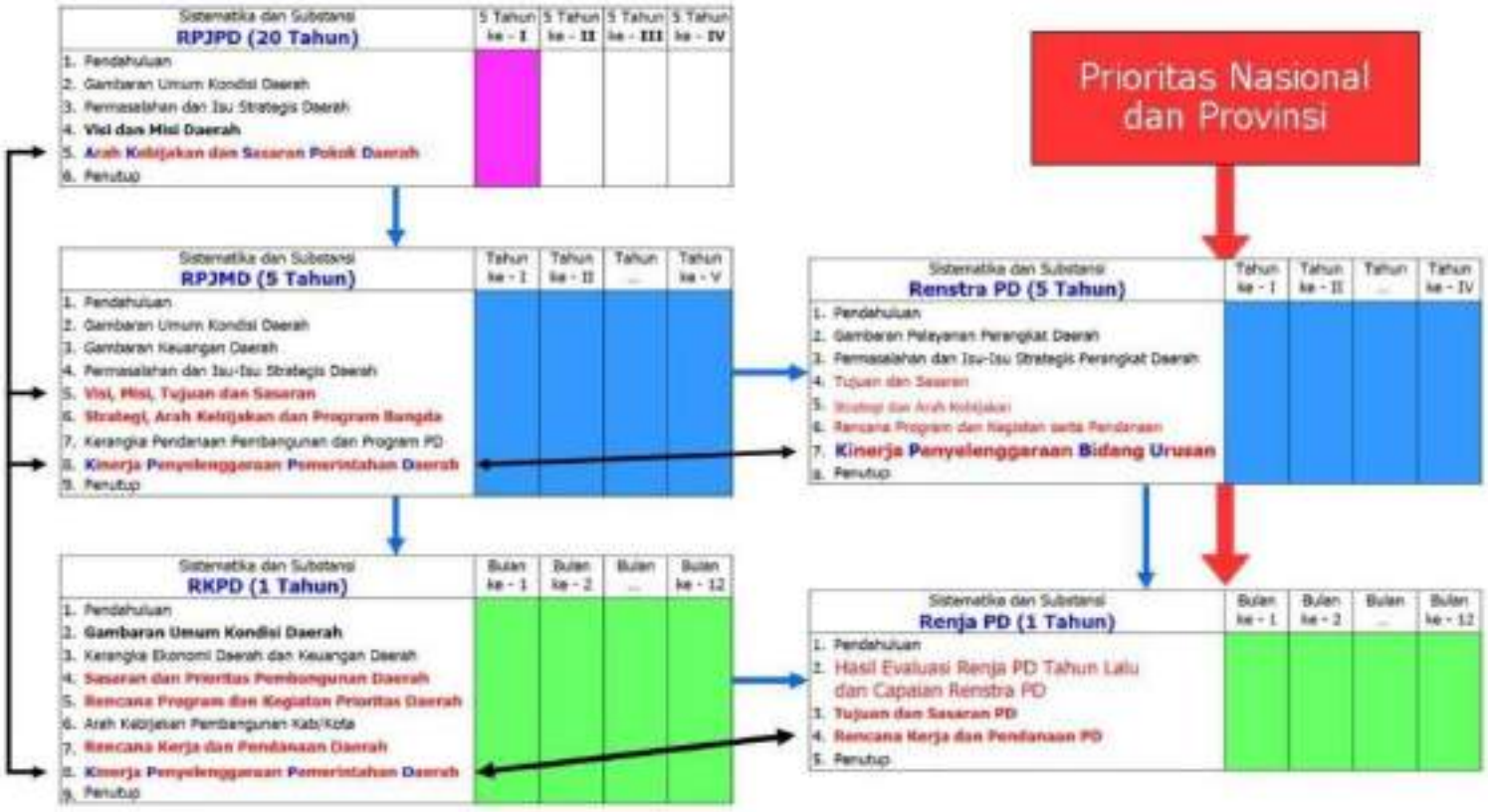

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat triwulan IV tahun 2024 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bandung Barat; dan
23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya laporan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) triwulan IV ini, adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Banjar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga sebagai panduan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Banjar Tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan pembangunan daerah

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari laporan evaluasi renja triwulanan ini adalah, sebagai berikut:

1) Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja.
2) Sebagai monitoring pada program/kegiatan/sub kegiatan yang sedang berjalan.
3) Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
4) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran.
5) Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalammewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi;
6) Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Lembang yang mengacu kepada aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
2.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
2.3 Metadata Indikator Kinerja

BAB III CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA

4.1 Permasalahan Umum

4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KECAMATAN LEMBANG

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat Bab III Bagian 32 Kecamatan mempunyai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) **Kecamatan** dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2) **Kecamatan** sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3) **Camat** diangkat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
c. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;

b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
d. mengkoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
f. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum ; dan
c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan dan keuangan; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan kecamatan;
d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Kecamatan
g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
j. melaksanakan administrasi anggaran Kecamatan;
k. melaksanakan verifikasi keuangan;
l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja tekait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan

umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai lingkup Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup Kecamatan;
h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai lingkup Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kecamatan;
j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Kecamatan;
m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai
n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Kecamatan;
q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pelayanan publik;
d. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan survei kepuasan masyarakat;
f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
h. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pertanahan;
i. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
c. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
f. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
h. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
c. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang tata ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan;
e. melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
f. melakukan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;

h. melaksanakan penyusunan bahan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan bahan penanganan kasus-kasus di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
j. melaksanakan pengkajian perumusan langkah-langkah antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi tata pemerintahan desa;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
f. melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
g. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa;
h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
j. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
k. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
l. melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang musyawarah desa;
m. melaksanakan penyusunan profil dan monografi desa;
n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan

b) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan Lembang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon III a yaitu Camat, dan diisi oleh seorang pejabat Eselon III b sebagai Sekretaris Kecamatan, 6 Orang Pejabat Eselon IV secara rinci untuk mengejar Indikator dan Target Kinerja tujuan sasaran yang dapat dilihat di bawah ini :

TABEL 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Tahun 2024
			Target Kinerja
TUJUAN 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK		**Nilai/ Katagori**	**62 / CC**
IKT 4 INDEKS REFORMASI BIROKRASI			
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		**Nilai/Katagori**	**70 / B**
IKS 4.1 Nilai SAKIP Pemda			
Sasaran 4.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks**	**83,67**
IKS 4.5 Indeks Kepuasan Masyarakat			
TUJUAN 5: TERWUJUDNYA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG TERTIB DAN TENTRAM DALAM KERANGKA DEMOKRASI		**indeks**	**70**
IKT 6 INDEKS DEMOKRASI			
Sasaran 6.1 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		**%**	**100%**
IKS 6.1 Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta			

2.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lembang

Perencanaan Kecamatan Lembang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan Pelaksana Jabatan Bupati dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, Rencana Strategis Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD. Renstra Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan stakeholder dalam menentukan strategi, kebijakan program dan kegiatan serta menentukan tujuan, sasaran kinerja yang ingin dicapai selama 3 tahun kedepan.

Selanjutnya Renstra dan Review Renstra Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang, menyusun formulasi dan besaran anggaran yang mewujudkan pencapaian target dan sasaran kinerja tahunan. Dalam rangka mewujudkan program

pembangunan yang menjadi fokus Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 yang dilaksanakan adalah :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   c) **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

   d) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

   e) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu

   f) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
      - Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
   a) **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
      - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b) **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
      - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   c) **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
   a) **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
      - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Untuk Melihat Kesesuaian antara Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Perbandingan Target Keuangan dan Kinerja Renstra, Renja, DPA

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUPUT) / SUB KEGAITAN	Target Kinerja Kecamatan Lembang								
			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Target Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dievaluasi		
			Kinerja	Satuan	Pagu	Kinerja	Satuan	Pagu	Kinerja	Satuan	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14,992,695,912			**4,596,667,054**			**7,899,088,131**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Lembang**	**71.6**	**nilai mutu**	**13,294,843,384**	**69**	**nilai mutu**	**4,251,727,754**	**69**	**nilai mutu**	**4,302,582,631**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19**	**Dokumen**	**133,240,000**	**5**	**dokumen**	**14,620,000**	**5**	**dokumen**	**15,705,000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	49,965,000	2	dokumen	0	2	dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	16,655,000	1	dokumen	2,924,000	1	dokumen	3,141,000

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	16,655,000	1	dokumen	2,924,000	1	dokumen	3,141,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	16,655,000	1	dokumen	2,924,000	1	dokumen	3,141,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	16,655,000	1	dokumen	2,924,000	1	dokumen	3,141,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	16,655,000	1	laporan	2,924,000	1	laporan	3,141,000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18**	**dokumen**	**12,013,318,162**	**4**	**dokumen**	**4,023,822,554**	**4**	**dokumen**	**3,983,819,031**
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	orang	11,990,001,162	23	orang	3,996,667,054.00	23	orang	3,950,349,031

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	36	laporan	16,655,000	24	laporan	26,435,500.00	24	laporan	32,750,000
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Dokumen	6,662,000	4	laporan	720,000.00	4	laporan	720,000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Baratng Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**30**	**dokumen**	**25,417,000**	**2**	**laporan**	**1,080,000**	**2**	**laporan**	**540,000**
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	dokumen	6,662,000	4	dokumen	540,000	4	dokumen	540,000
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	dokumen	6,662,000	4	dokumen	540,000	4	dokumen	540,000
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	laporan	6,662,000	2	laporan		2	laporan	

13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan	5,431,000	1	laporan		1	laporan	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**39**	**dokumen**	**249,172,750**	**14**	**dokumen**	**35,340,000**	**14**	**dokumen**	**88,610,000**
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9	paket	133,240,000	2	paket	27,900,000	2	paket	27,900,000
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30	dokumen	9,993,000	10	dokumen	0	10	dokumen	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	30	dokumen	62,658,750	12	dokumen	7,440,000	12	dokumen	60,710,000
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	53	dokumen	3,331,000	23	dokumen	0	23	dokumen	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96	orang	33,310,000	32	orang	0	32	orang	

19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96	orang	6,640,000	32	orang	0	32	orang	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**45**	**laporan**	**560,566,472**	**9**	**laporan**	**85,177,100**	**9**	**laporan**	**122,220,500**
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	26,648,000	2	paket	5,150,200	2	paket	5,150,200
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	166,550,000	1	paket	16,367,400	1	paket	23,843,800
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22	paket	300,748,472	6	paket	46,379,500	6	paket	53,446,500
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	laporan	66,620,000	12	laporan	17,280,000	12	laporan	39,780,000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan P**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42**	**laporan**	**146,564,000**	**12**	**laporan**	**24,000,000**	**12**	**laporan**	**24,000,000**

24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	jenis	66,620,000	2	laporan	0	2	laporan	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	laporan	79,944,000	12	laporan	24,000,000	12	laporan	24,000,000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**15**	**unit**	**166,565,000**	**5**	**unit**	**67,688,100**	**5**	**unit**	**67,688,100**
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	49,965,000	4	unit	14,900,000	4	unit	14,900,000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	116,600,000	1	unit	52,788,100	1	unit	52,788,100
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilita**	**100**	**%**	**465,861,764**	**100.00**	**%**	**185,946,000**	**100.00**	**%**	**328,821,100**

8	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**11**	**dokumen**	**333,100,000**	**3**	**dokumen**	**69,827,400**	**3**	**dokumen**	**141,906,900**
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	dokumen	333,100,000	3	dokumen	69,827,400	3	dokumen	141,906,900
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**23**	**laporan**	**16,175,764**	**5.00**	**laporan**	**96,329,000**	**5.00**	**laporan**	**124,594,800**
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	laporan	16,175,764	12	laporan	96,329,000	12	laporan	124,594,800
10	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama**	**6**	**laporan**	**116,586,000**	**2.00**	**laporan**	**19,789,600**	**2.00**	**laporan**	**62,319,400**
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14	laporan	116,586,000	3	laporan	19,789,600	3	laporan	62,319,400

3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan**	**100**	**%**	**858,918,764**	**100**	**%**	**78,776,600**	**100.00**	**%**	**2,056,220,600**
11	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12**	**dokumen**	**599,100,764**	**100**	**%**	**78,776,600**	**100.00**	**%**	**2,056,220,600**
31	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	lembaga	166,550,000	7	lembaaga	8,275,000	7	lembaaga	8,275,000
32	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3	dokumen	16,175,764	2	dokumen	31,650,000	2	dokumen	114,541,800
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	laporan	416,375,000	3	laporan	38,851,600	3	laporan	1,933,403,800
12	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**24**	**laporan**	**259,818,000**			**-**			

34	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	21	lembaga pemasyarakatan	99,930,000	7	lembaga		7	lembaga	
35	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21	lembaga pemasyarakatan	99,930,000	7	lembaga		7	lembaga	
36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9	laporan	29,979,000	3	laporan		3	laporan	
37	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9	laporan	29,979,000	3	laporan		3	laporan	
4	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**203,191,000**	**100**	**%**	**41,365,100**	**100.00**	**%**	**85,400,000**
13	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**204**	**dokumen**	**203,191,000**	**3.00**	**dokumen**	**41,365,100**	**3.00**	**dokumen**	**85,400,000**
38	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	112	dokumen	53,296,000	16	dokumen	0	16	dokumen	
39	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	116,585,000	3	dokumen	41,365,100	3	dokumen	85,400,000

40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80	Dokumen	33,310,000	16	dokumen	0	16	dokumen	
5	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**100**	**%**	**169,881,000**	**100**	**%**	**38,851,600**	**100.00**	**%**	**1,126,063,800**
14	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**18**	**laporan**	**53,296,000**	**12.00**	**laporan**	**-**	**12.00**	**laporan**	**-**
41	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	26,648,000	4	laporan	0	4	laporan	
42	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	laporan	26,648,000	4	laporan	0	4	laporan	

15	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**36**	**laporan**	**116,585,000**	**12.00**	**laporan**	**38,851,600**	**12.00**	**laporan**	**1,126,063,800**
43	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32	laporan	116,585,000	3	laporan	38,851,600	3	laporan	1,126,063,800

Sumber : Kecamatan Lembang (2024)

2.3 Metadata Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Menindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Lembang Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lembang sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan LembangTahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lembang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Nilai/Katagori	70 / B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,67
3	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	92,64

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,302,582,631	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	328,821,100	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	173,948,400	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,126,063,800	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85,400,000	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lembang (2024)

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 5 (Program) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp 7,899,088,131,-

Setelah menetapkan IKU maka Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan jelas.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

TABEL 2.6 Formulasi Capaian Pengukuran Kinerja

Persentase Capaian Kinerja	=	Realisasi / Rencana	X 100 %

SUMBER : Perbup Bandung Barat No 7 Tahun 2024

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah capaian kinerja, maka digunakan rumus :

TABEL 2.7 Formulasi Capaian Pengukuran Kinerja

Persentase Capaian Kinerja	=	Rencana – (Realisasi – Rencana) / Rencana	X 100%

SUMBER : Perbup Bandung Barat No 7 Tahun 2024

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut :

TABEL 2.8 Kategori Capaian Kinerja

KATEGORI	INTERVAL
BAIK	> 80
CUKUP	> 60-80
KURANG	≤ 60

SUMBER : Perbup Bandung Barat No 7 Tahun 2024

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator sasaran yang mencapai lebih dari 80% termasuk pada kategori capaian kinerja Baik. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator sasaran yang mencapai lebih dari 60-80% termasuk kategori capaian kinerja Cukup, dan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian

indikator sasaran yang mencapai kurang dari atau sama dengan 60 termasuk kategori capaian kinerja Kurang.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran Unsur Kewilayahan Kabupaten Bandung Barat dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

BAB III
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LEMBANG

3.1 Penyerapan Realisasi Anggaran dan Evaluasi Kinerja

Tujuan Pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan yakni, terdiri dari:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan tentram dalam kerangka demokrasi

Pada Tahun 2024 di Kecamatan Lembang telah disusun rencana kerja dengan rincian 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh enam) Sub kegiatan yang mempunyai Rata-Rata Capaian Program sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Lembang mempunyai target nilai mutu 69 dengan pagu indikatif Rp.4,251,727,754 mempunyai nilai rata-rata capaian program 91.07% dengan pagu realisasi Rp. 4,138,136,768 atau 97.33 %.
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi mempunyai target 100% dengan pagu Rp. 185,946,000 mempunyai nilai rata-rata capaian program 100 % dengan pagu realisasi Rp. 328,443,566 atau 176.63 %.
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan mempunyai target 100% dengan pagu Rp.78,776,600 mempunyai nilai rata-rata capaian program 100 % dengan pagu realisasi Rp.2,055,050,616 atau 2,608.71 %.
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** dengan indikator Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi mempunyai target 100% dengan pagu

Rp.38,851,600 mempunyai nilai rata-rata capaian program 100% dengan pagu realisasi Rp. 1,125,993,816 atau 2,898.19 %.

5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** dengan indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi mempunyai target 100% dengan pagu Rp.41,365,100 mempunyai nilai rata-rata capaian program 100% dengan pagu realisasi Rp.85,313,816 atau 206.25 %.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi serta untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota. Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Kecamatan. Untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan IV serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Interval Kriteria Realisasi Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	*91% ≤ 100%*	*Sangat tinggi*
2	*76% ≤ 90%*	*Tinggi*
3	*66% ≤ 75%*	*Sedang*
4	*51% ≤ 65%*	*Rendah*
5	*≤ 50%*	*Sangat Rendah*

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

3.2 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lembang

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Triwulan 4 akhir Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. **CAPAIAN KINERJA**
   - Rata Rata Capaian Kinerja keseluruhan Program Kecamatan Lembang disandingkan dengan renstra 2024-2026 adalah 24.95 % dengan kategori *sangat rendah* pada akhir tahun anggaran 2024.
   - Rata Rata Capaian Kinerja keseluruhan Program Kecamatan Lembang disandingkan dengan renja tahun 2024 adalah 98.21 % dengan kategori *Sangat tinggi* pada akhir tahun anggaran 2024.
   - Rata Rata Capaian Kinerja keseluruhan Program Kecamatan Lembang disandingkan dengan Target DPAP tahun 2024 adalah 98.21 % dengan kategori *sangat tinggi* pada akhir tahun anggaran 2024
2. **CAPAIAN KEUANGAN**
   - Tingkat capaian realisasi Keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renstra Kecamatan Lembang pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar 51.58 % dengan kategori *rendah*
   - Tingkat capaian realisasi Keuangan disandingkan dengan pagu indikatif Renja Kecamatan Lembang pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar 168.23 % dengan kategori *sangat tinggi*
   - Tingkat capaian realisasi Keuangan disandingkan dengan pagu DPAP Kecamatan Lembang pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar 97.90 % dengan kategori *sangat tinggi.*

Realisasi anggaran pada triwulan IV mencapai Rp.7.732.938.582 (tujuh Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.2 Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kecamatan Lembang Triwulan IV tahun anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUPUT) / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (%)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (%)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DPA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (%)	
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	2	3	15	16	17	18	10	20
KECAMATAN LEMBANG			**24.95**	**51.58**	**98.21**	**168.23**	**98.21**	**97.90**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Lembang**	**26.79**	**31.13**	**91.07**	**97.33**	**91.07**	**96.18**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.56**	**11.79**	**100.00**	**107.42**	**100.00**	**100.00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.00	18.86	100.00	107.42	100.00	100.00

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.33	18.86	100.00	107.42	100.00	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	33.33	18.86	100.00	107.42	100.00	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	33.33	18.86	100.00	107.42	100.00	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.33	18.86	100.00	107.42	100.00	100.00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**66.67**	**32.02**	**100.00**	**95.59**	**100.00**	**96.55**
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	31.64	100.00	94.91	100.00	96.02

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	66.67	314.00	100.00	197.83	100.00	159.69
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.33	10.81	100.00	100.00	100.00	100.00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Baratng Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.46**	**4.25**	**62.50**	**100.00**	**62.50**	**200.00**
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.50	8.11	25.00	100.00	25.00	100.00
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.33	8.11	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-				
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-				

4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.37**	**35.56**	**100.00**	**250.74**	**100.00**	**100.00**
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22.22	20.94	100.00	1,395,000,000	100.00	100.00
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-				
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.00	96.89	100.00	815.99	100.00	100.00
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-				
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-				
19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-				

5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**23.48**	**21.16**	**75.00**	**139.26**	**75.00**	**97.05**
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33.33	19.33	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	14.32	-	145.68	-	100.00
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27.27	16.57	100.00	107.46	100.00	93.25
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.33	59.71	100.00	230.21	100.00	100.00
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan P**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.67**	**16.38**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-				
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33.33	30.02	100.00	100.00	100.00	100.00

7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**33.33**	**26.32**	**100.00**	**64.76**	**100.00**	**64.76**
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33.33	26.11	100.00	87.56	100.00	87.56
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33.33	26.40	100.00	58.32	100.00	58.32
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilita**	**64.09**	**70.50**	**100.00**	**176.63**	**100.00**	**99.89**
8	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**37.50**	**42.60**	**100.00**	**203.23**	**100.00**	**100.00**
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.50	42.60	100.00	203.23	100.00	100.00

9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**133.33**	**767.92**	**100.00**	**128.95**	**100.00**	**99.70**
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	133.33	767.92	100.00	128.95	100.00	99.70
10	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama**	**21.43**	**53.45**	**100.00**	**314.91**	**100.00**	**100.00**
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.43	53.45	100.00	314.91	100.00	100.00
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan**	**20.83**	**239.26**	**100.00**	**2,608.71**	**100.00**	**99.94**
11	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**41.67**	**343.02**	**100.00**	**2,608.71**	**100.00**	**99.94**

31	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.33	4.97	100.00	100.00	100.00	100.00
32	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	66.67	708.11	100.00	361.90	100.00	100.00
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.00	464.06	100.00	4,973.37	100.00	99.94
12	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**-**	**-**				
34	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-				
35	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-				

36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-				
37	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-				
4	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**	**8.33**	**41.99**	**100.00**	**206.25**	**100.00**	**99.90**
13	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.33**	**41.99**	**100.00**	**206.25**	**100.00**	**99.90**
38	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-				
39	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.00	73.18	100.00	206.25	100.00	99.90
40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-				

5	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**4.69**	**662.81**	**100.00**	**2,898.19**	**100.00**	**99.99**
14	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**-**				
41	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-				
42	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-				
15	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**9.38**	**965.81**	**100.00**	**2,898.19**	**100.00**	**99.99**

43	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.38	965.81	100.00	2,898.19	100.00	99.99

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Lembang (2024)

BAB IV
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Permasalahan Umum

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khuusnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana tabel berikut. Adapun faktor pendorong dan penghambat tersebut akan dijelaskan pada sub bab 4.2

4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Dalam Pelaksanaannya Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan apa saja yang sudah direncanakan oleh Kecamatan Lembang Hal tersebut yang menjadi contoh seperti kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Adapun Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lembang Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.	Tata kelola Pemerintahan yang belum efektif, menyebabkan Belum optimalnya kualitas perencanan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Tata kelola Pemerintahan yang belum efektif, menyebabkan Pelayanan publik yang belum maksimal 2. Sinergi antara program pemerintah baik dari pusat maupun daerah sampai ke tingkat perangkat daerah semakin baik dan kolaboratif. 3. Semakin meningkatnya promosi informasi daerah terutama di bidang kesehatan, pendidikan, agroindustri, wisata dan UMKM. 4. Semakin meratanya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana tranportasi, jaringan irigasi, pendidikan, energi dan kesehatan	Tata kelola Pemerintahan yang belum efektif, menyebabkan Pelayanan publik yang belum maksimal
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tidak ideal nya Penentuan indikator kinerja sasaran harus berorientasi outcome, pemilihan sasaran strategis termasuk didalamnya penentuan Indikator kinerja dan targetnya, harus senantiasa mempertimbangkan kondisi aktual yang ada dan didasarkan pada isu-isu strategis kewilayahan yang relevan.
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan sesuai prinsip good governance terutama mitra di kebanyakan desa
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat capaian dan kinerja keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dikarenakan perencanaan yang tidak ideal pada urusan ketrentaman ketertiban umum

Sumber : Kecamatan Lembang

Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan tersebut dapat terumuskan permasalahan utama terjadi karena kondisi

5. Belum lengkapnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga berdampak pada implemetasi kepada penyelenggaraan pemerintah yang belum optimal.
6. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan pelayanan.
7. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses-proses pembangunan.
8. Belum lengkapnya perangkat peraturan daerah yang mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Barat untuk mendorong agribisnis dan wisata ramah lingkungan
9. Kurang didorongnya pengembangan industri berbasis sumber daya local yang menyerap tenaga kerja lokal, berwawasan lingkungan, dan memperhatikan keadilan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Didalam permasalahannya terdapat kategori perumusan masalah yang dirumuskan menjadi 3 bagian.:

1. Perencanaan Penganggaran;
2. Teknis Pelaksanaan;
3. Faktor Eksternal dan Internal.

Dalam proses pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, senantiasa mempertimbangkan aspek kualitas layanan. Secara spesifik tidak ada definisi mengenai kualitas layanan yang diterima karena kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Namun secara universal, dari definisi yang ada terdapat beberapa persamaan yakni kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

Berdasarkan kondisi sumberdaya kewilayahan yang spesifik dan bidang/urusan yang menjadi tugas dan kewenangan Kecamatan Lembang.

Berikut adalah rencana tindak Lanjut yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut Faktor Penghambat Kecamatan Lembang

NO	PROGRAM	FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tata kelola Pemerintahan yang belum efektif, menyebabkan Belum optimalnya kualitas perencanan	1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus lebih konsisten, hal ini dapat diawali dengan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyelesaran program, kegiatan dan sub kegiatan harus terus dilakukan dengan baik. 2. Penentuan indikator kinerja sasaran harus berorientasi outcome, pemilihan sasaran strategis termasuk didalamnya penentuan Indikator kinerja dan targetnya, harus senantiasa mempertimbangkan kondisi aktual yang ada dan didasarkan pada isu-isu strategis kewilayahan yang relevan. 3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan, seyogyanya diprioritaskan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. 4. Kemajuan Teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tata kelola Pemerintahan yang belum efektif, menyebabkan Pelayanan publik yang belum maksimal	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tidak ideal nya Penentuan indikator kinerja sasaran harus berorientasi outcome, pemilihan sasaran strategis termasuk didalamnya penentuan Indikator kinerja dan targetnya, harus senantiasa mempertimbangkan kondisi aktual yang ada dan didasarkan pada isu-isu strategis kewilayahan yang relevan.	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan sesuai prinsip good governance terutama mitra di kebanyakan desa	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat capaian dan kinerja keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dikarenakan perencanaan yang tidak ideal pada urusan ketrentaman ketertiban umum	

Sumber : Kecamatan Lembang (2024)

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan, sebagaimana evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024, disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperhatikan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Renja Triwulan IV Tahun 2024, yaitu koordinasi yang baik antar unit kerja di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat serta kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, tentunya hal ini akan dipertahankan serta akan diupayakan mengeliminir faktor-faktor pengahambat pencapaian kinerja;
2. Agar capaian kinerja ditahun mendatang dapat lebih optimal, kedepan mekanisme evaluasi kinerja dan anggaran akan dikembangan sistem informasi evaluasi kinerja agar pelaksanaanya lebih efektif dan terdokumentasi secara elektonik.
3. Pentingnya memahami tentang sasaran beserta indikator nya karena konsistensi adalah hal utama dalam penilaian capaian kinerja jika ingin hasilnya menggambarkan kondisi sesungguhnya.
4. Tingkat capaian terhadap perencanaan saat ini masih belum bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dimana pagu indikatif hampir pada seluruh program selalu lebih kecil daripada pagu DPA. Ini yang menggambarkan bahwa perencanaan yang dibuat tidak ideal

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN CIPEUNDEUY

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2024. Rencana Kerja perubahan ini disusun karena adanya perubahan anggaran terkait dengan Belanja Pegawai yang mana didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perubahan ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Rencana Kerja (RENJA) perubahan ini dapat dijadikan acuan oleh semua fihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan Kecamatan Cipeundeuy Bandung Barat ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan datang agar lebih baik. Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) perubahan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ada.

Cipeundeuy, Januari 2024
Camat Cipeundeuy

Drs.AGUS GANJAR HIDAYAT,M.Si
Nip. 196903101994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD & TUJUAN 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA **5**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cipeundeuy tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2024 5

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cipeundeuy 11

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (MUSRENBANG) 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **33**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan sararan Renja Kecamatan Cipeundeuy 35

3.3. Program dan Kegiatan 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

PENUTUP **49**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cipeundeuy Tahun Anggaran 2023 5

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD .....

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Cipeundeuy.....15

Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2024 ..27

Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 33

Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipeundeuy 35

Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2024 36

Tabel 4.1 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada Level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam Satu Tahun Anggaran dan Kerangka Regulasi serta memberikan Gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja dan bagaimana Pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rencana Kerja perubahan Kantor Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD periode satu tahun, hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Daerah nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2024.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2024 menjadi acuan di dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Rencana Kerja SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Rencana kerja SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
4. Rencana Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah sesuai perkembangannya.
5. Rencana Kerja dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan anggaran sumberdaya dan waktu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Tentative
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Perda 3 tahun 2019 tentang RPJMD
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman umum pendelegasian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan pemerintah Daerah.
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas fungsi dan rincian tugas Kecamatan.

1.3. MAKSUD & TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Kantor Kecamatan Cipeundeuy dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya. Sebagai implementasi dari Renstra SKPD. Sedangkan Tujuannya Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatkan pelayanan, menentukan target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
2. Menyelaraskan siklus perencanaan lima tahunan (Renstra) SKPD dengan rencana tahunan SKPD.
3. Menyelaraskan perencanaan tahunan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan Visi dan misi Kepala Daerah

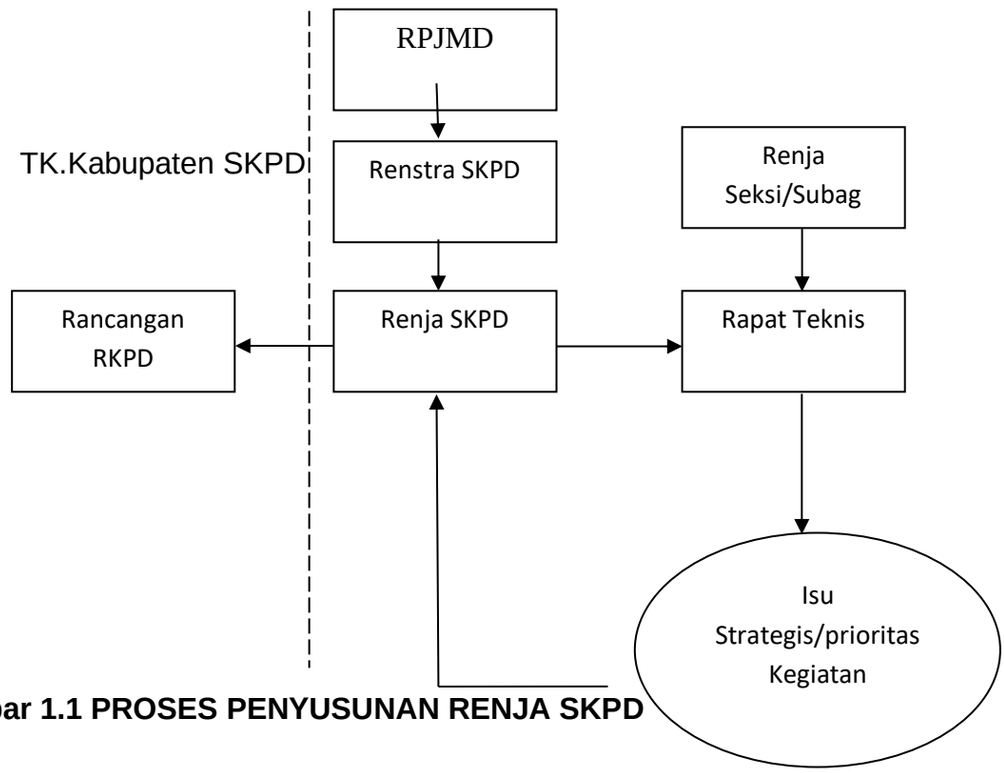

Gambar 1.1 PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas tentang Latar belakang, pengertian ringkas tentang Rencana kerja SKPD, kedudukan renja SKPD dalam system perencanaan daerah, serta landasan yang mengatur tentang system perencanaan nasional

1.2 Landasan hukum

Merupakan landasan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan SKPD

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dari penyusunan Renja, serta tujuan yang ingin di capai dari tersusunnya rencana kerja SKPD tersebut.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan tentang isi bab per bab dalam menyusun Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN CIPEUNDEUY TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cipeundeuy

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cipeundeuy

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Cipeundeuy

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Cipeundeuy

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cipeundeuy tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2023

Rencana kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan diskenariokan dalam Renja.

Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas dasar dokumen diatas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya, (anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2023 lengkap dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cipeundeuy Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN , DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**1 Tahun**	**1**	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Laporan/Kali	3 Dokumen	100%
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	100%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	9 ASN	9 ASN	100%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%
12	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jml Pakaian Khusus	117	117	100%
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	100%
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	99,17%
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	9 Jenis	9 Jenis	100 %
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	16 Jenis	16 Jenis	66,52%
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	4 bulan	4 bulan	100%
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Kali	5 kali	100%
21	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK**	**6 unit**	**6 unit**	100%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	6 Unit	6 Unit	93,39 %
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	100%
25	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**89,38%**	89,38%
26	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
28	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan**	**100%**	**100%**	100%
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	99,67 %
30	**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%
31	**Koordinasi /Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang terkait.**	**Terlaksananya pembinaan dan monitoring,Evaluasi Bidang PSU**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%
30	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**100%**	100%
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
32	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**85,28%**	100%
33	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**85,28%**	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100%
35	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah	Jumlah Kegiatan	4 Keg	4 Keg	99,78 %
35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiaan	99,90 %
35	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
38	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**100%**	100%
39	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksanannya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	100%
40	Koordinasi/Sinergis dengan perangkat Daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik indonesia	Terlaksananya pembinaan Linmas	2 Laporan	2 Laporan	94,07%
41	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	77,21%
42	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananny a Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**100%**	69,62%
43	**Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**	**1 Dokumen**	**100%**	**100%**	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
44	Fasilitasi pengelolaan Keuangan dan pendayaa gunaan aset Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	99,79%
45	Fasilitasi pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT/Rw	12 Bulan	12 Bulan	92,84%

Kesimpulan dari Tabel 2.1 Tentang Capaian target dan realisasi program dan kegiatan kecamatan Cipeundeuy tahun anggaran 2023 dapat di diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pengukuran kinerja melalui pendekatan pencapaian program, secara umum tingkat pencapaiannya berkisar 100%, Pencapaian kinerja program secara keseluruhan dikategorikan baik ,
2. Pencapaian kinerja keuangan berkisar antara 100% yang hingga yang terendah 98,42%, pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan dirata-ratakan sebesar 93,44 % atau dikategorikan baik.

Dari kedua poin diatas, aspek kinerja program yang dilaksanakan dinilai efektif, sedangkan aspek pencapaian keuangan dinilai efisien.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cipeundeuy

Analisis menggambarkan tingkat efektifitas kinerja / pencapaian program melalui tingkat capaian indicator dengan membandingkan antara target dengan realisasi, sehingga dicapai prosentase capaian, analisis efektifitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara target dengan realisasi, selain itu analisis juga dilakukan terhadap perbedaan kinerja yang terjadi, termasuk penyebabnya untuk dicari solusi pemecahannya.

Analisa kinerja pelayanan sesuai dengan PP No 6 tahun 2008 adalah dengan cara membandingkan tingkat capaian kinerja dengan :

1. Target kinerja yang tertuang dalam rencana kerja
2. Realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya

Format pencapaian kinerja kantor kecamatan Cipeundeuy Tahun 2024 dan 2021 sebagai mana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cipeundeuy

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun n-2 (2021)	Tahun n-1 (2022)	Tahun - n (2023)	Tahun n+1 (2024)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n (2024)	Thn n+1 (2025)	
								2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**			**B**	**B**	**B**	**BB**	**B**	**B**	**B**	**BB**	
2	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			**82,40**	**82.40**	**82.40**	**72.00**	**82,25**	**82,25**	**86,00**	**86.50**	
3	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Kesimpulan dari Tabel 2.3 Tentang Pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cipeundeuy dapat di diuraikan sebagai berikut :

a) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Tahun 2023 tercapai 61,30
b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :
   Tahun 2023 tercapai 82,25

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Cipeundeuy, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Cipeundeuy sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kantor Kecamatan Cipeundeuy pada tahun 2023 mencapai angka 93,44 % atau dengan kata lain cukup tinggi, hal ini diwujudkan dengan 2 indikator sebagai berikut :
   - Capaian > 100 % : sebanyak 0 indikator
   - Capaian 100 % : sebanyak 0 indikator
   - Capaian 99-100 % : 0 indikator
   - Capaian < 99 % : 2 indikator
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain masih tahap optimalisasi sarana dan prasarana kantor.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum optimalnya sistem pelayanan.
4. Dampak Pandemi Covid-19
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah jumlah tenaga pegawai yang masih kurang disamping sarana kantor, dan peluang akan kebutuhan tersebut di atas dapat di usulkan/dipenuhi pada tahun berikutnya,
6. Sedangkan isu-isu penting yang perlu di tindak lanjuti pada tahun mendatang adalah berupa:
   - Belum optimalnya sarana Kantor yang memadai
   - Penanggulangan dampak Covid - 19
   - Rendahnya aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi

- Masih buruknya sarana perhubungan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Kantor Kecamatan Cipeundeuy, dengan arahan kepala SKPD terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatip yang di sediakan untuk Kantor Kecamatan Cipeundeuy berdasarkan rancangan awal.

Kalau kita lihat rancangan awal renja SKPD Tahun 2024, disusun pada awal tahun 2023, dimana tahun tersebut adalah merupakan Tahun 4 dari masa pembangunan lima tahun yang ketiga di Kabupaten Bandung barat, dimana sistem perencanaan SKPD mengacu pada perubahan RPJMD 2018 -2024.

Berdasarkan Perubahan Renstra untuk masa tahun 2018-2024, maka program dan kegiatan yang di susun di awal 2023 untuk rencana Tahun 2024 perlu menyesuaikan dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatip yang tertuang sebagaimana tercantum pada RPJMD 2018-2024, untuk itulah review terhadap rancangan awal RKPD dapat di jabarkan pada table berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Cipeundeuy

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Cipeundeuy	NILAI SAKIP	100%	3.148.772861	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Cipeundeuy	NILAI SAKIP	100%	3.148.772861	
2	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11 Dok	63.459.400	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11 Dok	63.459.400	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	37.919.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	37.919.700	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	5.022.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	5.022.700	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	5.026.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	5.026.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	4.348.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	4.348.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	4.228.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	1 Dok	4.228.000	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	6 Laporan	6.915.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	6 Laporan	6.915.000	
9	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	30 Laporan	2.858.837.761	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6 Laporan	2.858.837.761	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah ASN	11 Orang/Bulan	2.798.811.061	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah ASN	11 Orang/Bulan	2.798.811.061	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	19 Laporan	60.026.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	19 Laporan	60.026.700	
12	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2 Unit	72.947.500	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2 Unit	72.947.500	
13	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pegawai	2 Unit	72.947.500	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pegawai	2 Unit	72.947.500	
15	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	31 Laporan	106.905.800	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	31 Laporan	106.905.800	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	22.968.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	22.968.100	
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	52.558.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	52.558.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Bahan Logistik Kantor	4 Paket	14.950.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Bahan Logistik Kantor	4 Paket	14.950.500	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	6.829.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	6.829.000	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Laporan	12 Laporan	9.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Laporan	12 Laporan	9.600.000	
21	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIBELI DALAM SATU TAHUN	9 Unit	46.622.400	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIBELI DALAM SATU TAHUN	9 Unit	46.622.400	
22	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	16.600.000	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	16.600.000	
23	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan bangunan lainnya**	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara /direhabilitasi TA	3 Unit	30.022.400	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan bangunan lainnya**	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara /direhabilitasi TA	3 Unit	30.022.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cipeundeuy	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang terfasilitasi	100%	234.736.800	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cipeundeuy	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang terfasilitasi	100%	234.736.800	
30	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	1 Dokumen	90.823.700	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	1 Dokumen	90.823.700	
31	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90.823.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90.823.700	
32	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	9 Laporan	59.882.500	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	9 Laporan	59.882.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Laporan	9 Laporan	59.882.500	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Laporan	9 Laporan	59.882.500	
34	**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA **KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	100%	43.240.000	**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA **KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	100%	43.240.000	
35	**Koordinasi /Sinergi dengan perangkat Daerah dan/instansi vertical yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanaan umum**	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen **Koordinasi /Sinergi dengan perangkat Daerah dan/instansi vertical yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanaan umum**	1 Dokumen	43.240.000	**Koordinasi /Sinergi dengan perangkat Daerah dan/instansi vertical yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanaan umum**	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen **Koordinasi /Sinergi dengan perangkat Daerah dan/instansi vertical yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanaan umum**	1 Dokumen	43.240.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Keg	40.790.600	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Keg	40.790.600	
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	4 Keg	40.790.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	4 Keg	40.790.600	
36	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cipeundeuy	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	142.889.500	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cipeundeuy	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	142.889.500	
37	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam Forum musrenbangdes	5 Lembaga	142.889.500	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam Forum musrenbangdes	5 Lembaga	142.889.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	35.811.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Kegiatan	5 Lembaga	35.811.000	
39	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	63.153.100	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	63.153.100	
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah laporan	3 Laporan	43.925.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah laporan	3 Laporan	43.925.400	
41	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cipeundeuy	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	878.159.100	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cipeundeuy	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	878.159.100	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	12 Laporan	878.159.100	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANYA KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	12 Laporan	878.159.100	
43	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Laporan	12 Laporan	878.159.100	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Laporan	12 Laporan	878.159.100	
44	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cipeundeuy	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	1.342.811.100	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cipeundeuy	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	1.342.811.100	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	3 Dokumen	1.342.811.100	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cipeundeuy	TERLAKSANANNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	3 Dokumen	1.342.811.100	
46	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dn peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen yg difasilitasi	3 Dokumen	11.999.600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen yg difasilitasi	3 Dokumen	11.999.600	
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen yg difasilitasi	2 Dokumen	37.890.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen yg difasilitasi	2 Dokumen	37.890.500	
47	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cipeundeuy	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	1.2557.921.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cipeundeuy	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
JUMLAH					5.747.369.361	JUMLAH				5.747.369.361	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (MUSRENBANG)

kegiatan dari

masyarakat melalui Forum PD dan Musrenbang Kecamatan dengan menghasilkan usulan daftar skala prioritas pada tahun 2023 yang akan direalisasikan Tahun 2024. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang atau mitra terkait perencanan pembangunan di Kecamatan Cipeundeuy. Berikut Daftar usulan skala prioritas KecamatanCipeundeuy.

Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2023

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
1	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Kp. Ciharashas-Sukamanah-Tugu Desa Ciharashas	700 x 4 M2	769,770,000	PUTR
2	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Kp. Tugu Desa Ciharashas	200 x M2 x 2 Titik	346,443,000	PUTR
3	Pembangunan Fasilitas Perhubungan	Masyarakat	Kp. Ciharashas Kulon Rw.04,Rw.07 dan Kp. Tugu Rw.14	32 Titik	464,000,000	DISHUB
4	Musrenbang Pembangunan Jalan Desa	Jalan Desa Nyenang	Desa Nyenang	843 x 2,5 M	992,632,500	PUTR
5	Musrenbang Pembangunan Drainase	Desa Nyenang	Kp. Nyenang Rt. 001 Rw. 004	105 x 864,000	90,720,000	PUTR
6	Musrenbang Pembangunan TPT	Desa Nyenang	Kp. Cibuang Rt. 002 Rw. 006	142 m2 x 1,656,000	235,152,000	PUTR

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
7	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jalan Cijawa-Sukahaji Rw. 05 Rw. 07	500 x 4 x 0,30 m	282,600,000	PUTR
8	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jalan Sukahaji-Margalaksana Rw. 01	250 x 4 x 0,30 m	141,300,000	PUTR
9	Pembangunan Infrastruktur dan Sanitasi Air	Masyarakat	Kp. Cipatra Rw. 02	1 Paket	220,000,000	PUTR
10	Peningkatan Produksi Ternak	Kelompok Tani BINA CIPTA	Desa Margalaksana	20 Ekor	480,000,000	DISNAKAN
11	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jalan Cipedang Dusun I Desa Margalaksana	14 x 6 m2	139,104,000	PUTR
12	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jl. Pasir Cabe Dusun 3 Desa Margalaksana	1000 x 2,5 m2	1,177,500,000	PUTR

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
13	Pembangunan Drainase Jalan U-ditch	Lokasi Desa Wisata	Blok Junghil Desa Bojongmekar	600 x 2,80 x 0,15	317,526,000	PUTR
14	Pembangunan Drainase Jalan U-ditch	Lokasi Desa Wisata	Blok Junghil Desa Bojongmekar	1 Paket	150,000,000	DISPARBUD
15	Pembangunan Drainase Jalan U-ditch	Kelompok Ternak	Desa Bojongmekar	1 Kelompok	200,000,000	DISNAKAN
16	Pembangunan Drainase Jalan U-ditch	Masyarakat	Kp. Cijati Rw. 13 Desa Jatimekar	1,325 m2 (P. 530 x L.2,5)	431,950,000	PUTR
17	Pembangunan Drainase Jalan U-ditch	Masyarakat	Kp. Cijati Rw. 11 Desa Jatimekar	240 M (P. 240 X L. 40 X T. 60)	303,600,000	PUTR
18	Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga	Masyarakat	Kp. Cijati	1 Paket	150,000,000	DISPORA
19	Penurunan Percepatan Stunting	Masyarakat	Desa Nanggeleng	1 Paket	20,000,000	DINKES

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
20	Rehab Jalan	Masyarakat	Jln. Kabupaten (Nanggeleng - Margaluyu)	6000 m2	1,974,000,000	PUTR
21	Kirmir Jl. Kabupaten	Masyarakat	Kirmir Jl. Kabupaten (Nanggeleng-Sirnaraja)	40 m3	76,942,800	PUTR
22	Pembangunan Jaringan Jalan	Masyarakat	Sirnagalih-Sukahaji		978,000,000	PUTR
23	Pembangunan Jaringan Jalan	Masyarakat	RW. 01	44 x 6 m	132,480,000	PUTR
24	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	Masyarakat	Desa Sirnagalih	1 Kelompok	181,602,000	Pertanian

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
25	Musrenbang Pembangunan Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten	Desa Sirnaraja	3000 x 4 M	5,940,000,000	PUTR
26	Pembangunan Masjid Jami	Pembangunan Masjid Jami	Kp. Sindangpalay Rt.03 Rw.09	1 Paket	50,000,000	SETDA
27	Pembangunan MCK/TOILET/TEMPAT WUDHU	Pembangunan MCK/TOILET/TEMPAT WUDHU	Kp. Cibanen Rt.02 Rw.05	1 Paket	20,000,000	SETDA
28	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jalan Citembong-Cibungur Dusun I dan III	200 x 1 m	192,000,000	PUTR
29	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jalan Citembong-Cibungur Dusun I dan III	150 x 1,5 m	372,600,000	PUTR
30	Pembangunan PJU Perdesaan	Masyarakat	Jalan Citembong Dusun I	10 Unit	145,000,000	DISHUB
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Masyarakat	Kp. Margaluyu Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipeundeuy	1 Paket	150,000,000	DISPORA

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
32	Pembangunan Pondok Pesantren Besar	Masyarakat	Kp. Cipeundeuy Rt. 001 Rw. 005 Desa Cipeundeuy	1 Paket	100,000,000	SETDA
33	Peningkatan Sarana Air Bersih	Masyarakat	Kp. Margaluyu Rt. 001 Rw. 010 Desa Cipeundeuy	1 Paket	220,000,000	PUTR
34	Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan	Masyarakat	Jl. Raya Cipeundeuy-Cirata Kp. Cibodas Rt. 27 Rw. 10	500 x 4 x 0,20	893,100,000	PUTR
35	Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan	Masyarakat	Jl. Raya Cipeundeuy-Cirata	10 Titik	145,000,000	DISHUB
36	Edukasi Kespro bagi PUS resiko Stunting	Masyarakat	Desa Ciroyom	2 Kali	20,000,000	DP2KBP3A

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah **"PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL"** dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pembangunan Wilayah Sumatera
	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
	Pembangunan Wilayah Kalimantan
	Pembangunan Wilayah Sulawesi
	Pembangunan Wilayah Maluku
	Pembangunan Wilayah Papua

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
	Pengentasan Kemiskinan
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK
Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
	Pembangunan Rendah Karbon
Stabilitas Polhukhankam dan	Konsolidasi Demokrasi

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
	Penegakan Hukum Nasional
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Misi ke – 4 Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipeundeuy

NO.	PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN CIPEUNDEUY
1	**Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi “**

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan lagi menjadi tujuan Kecamatan Cipeundeuy sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi, dengan sasaran terkait adalah :
    a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan
    b. Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, dengan sasaran terkait adalah **“ Meningkatnya kualitas pelayanan Publik “**

3.2. Tujuan dan sararan Renja Kecamatan Cipeundeuy

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Cipeundeuy diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Fasilitasi Kunjungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
					Tamu
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
					Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah konsistensi dengan Renstra SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat.

Program dan Kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi SKPD, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di SKPD baik sumberdaya manusia, sarana, serta anggaran yang tersedia.

Program yang tersedia yaitu dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat, dan untuk Kecamatan terdiri dari 2 urusan yaitu :

I. **NON URUSAN, terdiri dari :**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II . URUSAN KEWILAYAHAN

Terdiri dari 4 (Empat) Program , yaitu:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1 Rencana Kerja(Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024

Unit Organisasi : Kecamatan Cipeundeuy

RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cipeundeuy											
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan											
Kode					**Uraian**	**Tahun N**					
						Sebelum			**Sesudah**		
						Belanja Operasi	**Belanja Modal**	**Jumlah (Rp)**	**Belanja Operasi**	**Belanja Modal**	**Jumlah (Rp)**
Kecamatan Cipeundeuy											
7					UNSUR KEWILAYAHAN	Rp. 5.722.251.861	Rp. 25.117.500	Rp. 5.747.369.361	Rp. 5.354.381.977	Rp. 25.117.500	Rp. 5.379.499.477
7	01				KECAMATAN	Rp. 5.722.251.861	Rp. 25.117.500	Rp. 5.747.369.361	Rp. 5.354.381.977	Rp. 25.117.500	Rp. 5.379.499.477

7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.123.655.361	Rp. 25.117.500	Rp. 3.148.772.861	Rp. 2.755.785.477	Rp. 25.117.500	Rp. 2.780.902.977
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 63.459.400		Rp. 63.459.400	Rp. 63.459.400		Rp. 63.459.400
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 37.919.700		Rp. 37.919.700	Rp. 37.919.700		Rp. 37.919.700
7	01	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.022.700		Rp. 5.022.700	Rp. 5.022.700		Rp. 5.022.700
7	01	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 5.026.000		Rp. 5.026.000	Rp. 5.026.000		Rp. 5.026.000
7	01	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 4.348.000		Rp. 4.348.000	Rp. 4.348.000		Rp. 4.348.000
7	01	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 4.228.000		Rp. 4.228.000	Rp. 4.228.000		Rp. 4.228.000
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.915.000		Rp. 6.915.000	Rp. 6.915.000		Rp. 6.915.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.858.837.761		Rp. 2.858.837.761	Rp. 2.490.967.877		Rp. 2.490.967.877

7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.798.811.061		Rp. 2.798.811.061	Rp. 2.430.941.177		Rp. 2.430.941.177
7	01	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 60.026.700		Rp. 60.026.700	Rp. 60.026.700		Rp. 60.026.700
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 72.947.500		Rp. 72.947.500	Rp. 72.947.500		Rp. 72.947.500
7	01	01	2,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp. 72.947.500		Rp. 72.947.500	Rp. 72.947.500		Rp. 72.947.500
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 83.937.700	Rp. 22.968.100	Rp. 106.905.800	Rp. 83.937.700	Rp. 22.968.100	Rp. 106.905.800
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 22.968.100	Rp. 22.968.100		Rp. 22.968.100	Rp. 22.968.100
7	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 52.558.200		Rp. 52.558.200	Rp. 52.558.200		Rp. 52.558.200
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 14.950.500		Rp. 14.950.500	Rp. 14.950.500		Rp. 14.950.500
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 6.829.000		Rp. 6.829.000	Rp. 6.829.000		Rp. 6.829.000

7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 9.600.000		Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000		Rp. 9.600.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 44.473.000	Rp. 2.149.400	Rp. 46.622.400	Rp. 44.473.000	Rp. 2.149.400	Rp. 46.622.400
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 16.600.000		Rp. 16.600.000	Rp. 16.600.000		Rp. 16.600.000
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 27.873.000	Rp. 2.149.400	Rp. 30.022.400	Rp. 27.873.000	Rp. 2.149.400	Rp. 30.022.400
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 234.736.800		Rp. 234.736.800	Rp. 234.736.800		Rp. 234.736.800
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 90.823.700		Rp. 90.823.700	Rp. 90.823.700		Rp. 90.823.700
7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 90.823.700		Rp. 90.823.700	Rp. 90.823.700		Rp. 90.823.700
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Rp. 59.882.500		Rp. 59.882.500	Rp. 59.882.500		Rp. 59.882.500

					di Kecamatan						
7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 59.882.500		Rp. 59.882.500	Rp. 59.882.500		Rp. 59.882.500
7	01	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 43.240.000		Rp. 43.240.000	Rp. 43.240.000		Rp. 43.240.000
7	01	02	2,03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 43.240.000		Rp. 43.240.000	Rp. 43.240.000		Rp. 43.240.000
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 40.790.600		Rp. 40.790.600	Rp. 40.790.600		Rp. 40.790.600
7	01	02	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 40.790.600		Rp. 40.790.600	Rp. 40.790.600		Rp. 40.790.600
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 142.889.500		Rp. 142.889.500	Rp. 142.889.500		Rp. 142.889.500
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 142.889.500		Rp. 142.889.500	Rp. 142.889.500		Rp. 142.889.500

7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 35.811.000		Rp. 35.811.000	Rp. 35.811.000		Rp. 35.811.000
7	01	03	2,01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 63.153.100		Rp. 63.153.100	Rp. 63.153.100		Rp. 63.153.100
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 43.925.400		Rp. 43.925.400	Rp. 43.925.400		Rp. 43.925.400
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 878.159.100		Rp. 878.159.100	Rp. 878.159.100		Rp. 878.159.100
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 878.159.100		Rp. 878.159.100	Rp. 878.159.100		Rp. 878.159.100
7	01	04	2,02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 878.159.100		Rp. 878.159.100	Rp. 878.159.100		Rp. 878.159.100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Rp. 1.342.811.100		Rp. 1.342.811.100	Rp. 1.342.811.100		Rp. 1.342.811.100

					PEMERINTAHAN DESA						
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.342.811.100		Rp. 1.342.811.100	Rp. 1.342.811.100		Rp. 1.342.811.100
7	01	06	2,01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 11.999.600		Rp. 11.999.600	Rp. 11.999.600		Rp. 11.999.600
7	01	06	2,01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 37.890.500		Rp. 37.890.500	Rp. 37.890.500		Rp. 37.890.500
7	01	06	2,01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000
7	01	06	2,01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 1.257.921.000		Rp. 1.257.921.000	Rp. 1.257.921.000		Rp. 1.257.921.000
Jumlah						**Rp. 5.722.251.861**	**Rp. 25.117.500**	**Rp. 5.747.369.361**	**Rp. 5.354.381.977**	**Rp. 25.117.500**	**Rp. 5.379.499.477**

PENUTUP

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 merupakan lanjutan serta penambahan dari program sebelumnya. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam pelaksanaanya adalah bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 telah disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan SKPD dilihat dari berbagai kepentingan yang terintegrasi, dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Adapun kemungkinan jika terdapat terdapat perubahan kebijakan program serta anggarannya pada masa tahun tersebut dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang menuntunnya dan di implementasikan pada penyusunan dokumen berikutnya.

Rancangan awal rencana kerja Kantor Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2024 ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, proporsional, partisipatif dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh stake horlder SKPD, dengan kaidah pada pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan/regulasi yang melandasi penyusunan suatu dokumen
2. Pelaksanaan kegiatan di dasarkan pada mekanisme yang di sesuaikan dengan kewenangan (PP. 19/2008) yang di jabarkan dengan Perbup Bandung Barat Tentang Tugas Fungsi dan Rincian tugas Kecamatan (Perbup 27 Tahun 2021).
3. Penyusunan dokumen selanjutnya berkewajiban menjaga konsistensi dengan penyusunan rancangan awal renja SKPD ini.
4. Penyesuaian/pergeseran jumlah anggaran hendaknya dikonsultasikan dan mendapat arahan dari TAPD Kabupaten Bandung Barat.

Kami yakin bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan pendapat diharapakan demi perbaikan dimasa yang akan datang

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah Subhanahu Wata’ala membalas dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua.

Cipeundeuy, September 2024
Camat Cipeundeuy

Drs.AGUS GANJAR HIDAYAT,M.Si
Nip. 196903101994011001

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Pemerintah daerah lainnya di Indonesia dituntut untuk lebih mandiri mengelola daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Perundangan yang lainnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menitik beratkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, yang mana di dalamnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan Pemerintah Pusat, yakni Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, dan Agama. Pemerintah Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.Pemerintah Propinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternal regional, dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal.

Dampak dari kebijakan tersebut maka Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia merubah organisasi kelembagaan pemerintahan di daerahnya, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, khususnya untuk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu maka dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Maksud dari penyusunan Renja-SKPD adalah sebagai alat pengendali rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 , dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja-SKPD adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu organisasi kelembagaan merencanakan kegiatannya, apakah sudah sesuai dengan Rencana Strategis yang dibuat oleh institusi tersebut serta keterpaduan dengan Rencana Kerja Instansi lainnya.

Sasaran Renja-SKPD adalah penilaian rencana kegiatan yang disusun oleh organisasi kelembagaan untuk tahun berikutnya disesuai dengan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Tujuan dan Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Rencana Kegiatan
- 4.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022
- 4.3. Indikator Kinerja Utama
- 4.4. Indikator Kinerja Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perubahan SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**21.683.636.210**	**19.685.811.350**
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Terlaksanya Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Renstra Perubahan dan Renja Perangkat***	**630.392.019**	**538.364.998**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	263.767.975,00	254.273.948
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	110.650.844,00	67.594.250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.978.300,00	19.578.150
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	83.546.200,00	81.199.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubuhan DPA-SKPD	21.490.000,00	10.119.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.958.700,00	105.600.150
Administrasi Keuangan	***Terlaksannya Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu*** ***Terlaksannya Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi***	**17.155.289.775,00**	**16.238.462.087**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur ASN	16.753.351.175,00	15.908.333.515
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	168.661.200,00	127.423.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	86.731.200,00	84.203.922
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	132.646.200,00	109.978.700

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	13.900.000,00	8.522.300
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik***	**207.803.460,00**	**175.307.860**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	207.803.460,00	175.307.860
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Terlaksannnya Kedisplinan Aparatur Sesuai dengan Ketentuan***	**384.249.650,00**	**312.886.470**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksanya Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	25.062.600,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	236.737.050,00	233.348.970
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal	122.450.000,00	79.537.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan perkantoran yang Terpenuhi***	**1.794.876.980,00**	**1.492.084.835**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.962.780,00	6.616.523
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengakapan Kantor	381.110.000,00	360.526.050
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	45.765.200,00	45.073.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	731.126.500,00	731.025.000
Penyediaan Barang Cetakan	Tersedianya Barang Cetakan	30.422.500,00	22.122.500

dan Penggandaan	dan Penggandaan		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.739.000,00	52.393.100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	22.230.000,00	8.775.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapar Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	521.521.000,00	265.553.162
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi***	**4.814.500,00**	**4.700.000**
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	4.814.500,00	4.700.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi***	**323.541.776,00**	**231.514.417**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Administrasi dan Jasa Surat Menyurat	167.393.544,00	110.003.372
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	39.815.616,00	22.013.545
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terciptanya Lingkungan yang Bersih	116.332.616,00	99.497.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi***	**1.182.668.050,00**	**692.490.683**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.350.000,00	22.247.403

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	869.120.000,00	393.075.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	18.521.000,00	18.446.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	259.677.050,00	258.722.180
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase areal daerah Irigasi dalam kondisi baik**	**9.072.609.710,00**	**8.956.518.754,00**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Perencanaan Resevoir***	**1.512.321.876,00**	**1.509.682.087,00**
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlakasananya Perencanaan Pembangunan Resevoir	247.310.244,00	246.915.244,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Terlakasananya Perencanaan Pembangunan Resevoir	112.412.800,00	112.262.000,00

Pembangunan Tanggul Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	940.143.716,00	938.049.727,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Resevoir	108.457.144,00	108.457.144,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Resevoir	103.997.972,00	103.997.972,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi*** ***Tersedianya Perencanaan Pembangunan Resevoir***	**7.560.287.834,00**	**7.446.836.667,00**
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis	450.935.344,00	449.961.144,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	4.119.313.873,00	4.090.979.112,00
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Resevoir	864.769.211,00	843.129.394,00

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Normalisasi Sungai Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	2.125.269.406,00	2.062.767.017,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Tersedianya Akses Air Minum Yang Memadai**	**8.761.940.694,00**	**8.476.527.034,00**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya akses air minum yang memadai***	**8.761.940.694,00**	**8.476.527.034,00**
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya akses air minum yang memadai dilokasi sasaran	2.035.494.875,00	1.865.064.990,00
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Telaksananya Pembangunan Jaringan Non Perpiaan	6.726.445.819,00	6.611.462.044,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL	**Jumlah sarana persampahan yang dibangun**	**77.691.200,00**	**77.521.700,00**
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Infrastruktur Persampahan terbangun**	**77.691.200,00**	**77.521.700,00**

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Perasampahan	77.691.200,00	77.521.700
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Cakupan pelayanan air limbah domestik**	**4.021.963.788,00**	**3.793.174.183,00**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Pelayanan Air Limbah***	**4.021.963.788,00**	**3.793.174.183,00**
Pembangunan/Penyediaan Sub sistem pengelolaan setempat	Tersedianya Prasarana dan sarana Air Limbah Domestik	4.021.963.788,00	3.793.174.183,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Panjang drainase permukiman yang terbangun**	**4.914.770.274,00**	**4.874.282.516,00**
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Saluran drainase yang baik***	**4.914.770.274,00**	**4.874.282.516,00**
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	tersedianya saluran drainase yang baik	4.810.270.274,00	4.773.532.116,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Terlaksananya Rehabilitasisaluran Drainase	104.500.000,00	100.750.400,00

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase pembangunan di wilayah desa**	**9.955.111.757,00**	**9.755.340.884,00**
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya pembangunan di wilayah desa***	**9.955.111.757,00**	**9.755.340.884,00**
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Tertatanya pembangunan di wilayah desa	9.955.111.757,00	9.755.340.884
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Bangunan Publik Yang Memadai**	**41.070.138.588,00**	**39.757.948.401,00**
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	***Tersedianya Pembangunan Fasilitas Publik Kabupaten Bandung Barat***	**41.070.138.588,00**	**39.757.948.401,00**
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlakasanya Izin mendirikan bangunan dan Sertifikat laik fungsi bangunan	338.092.386,00	219.471.952,00
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Pemerintah	36.470.350.558,00	35.606.157.982,00
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen HSBGN	70.781.698,00	68.599.172,00

Kabupaten/Kota			
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lokasi kegiatan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah	907.232.074,00	848.705.871,00
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	3.283.681.872,00	3.015.013.424,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik**	**229.105.999.309,00**	**178.953.823.380,00**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	***Tersedianya Jalan dalam Kondisi Baik***	**229.105.999.309,00**	**178.953.823.380,00**
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	1.215.838.500,00	1.195.654.305,00
Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	192.804.200,00	175.624.200,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedainya Dokumen Hasil Survey Jalan dan Jembatan	653.408.432,00	612.587.516,00
Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan dalam Kondisi Baik	214.737.224.161,00	166.301.304.285,00
Rehabilitasi Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	7.108.269.668,00	6.116.807.243,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	3.257.483.407,00	2.992.230.884,00
Rehabilitasi Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	1.410.775.841,00	1.115.351.507,00

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung Barat**	**287.965.373,00**	**261.734.044,00**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	***Terlaksananya Sertifikasi Tukang Terampil***	**189.916.773,00**	**171.990.544,00**
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Sosialisasi dan Sertifikasi Tukang Terampil se Kabupaten Bandung Barat	106.685.229,00	90.365.779,00
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi	83.231.544,00	81.624.765,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelatihan Tenaga Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	**98.048.600,00**	**89.743.500,00**
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	89.743.500,00	89.743.500,00
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	-
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	***Cakupan kegiatan sosialisasi pengusaha jasa konsturksi di kabupaten bandung barat***	-	-
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan**	**3.244.690.872,00**	**3.023.828.734,00**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	***Tersedianya Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RDTR***	**1.094.887.775,00**	**1.066.559.860,00**
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RDTR	210.172.050,00	208.584.485,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	491.997.525,00	480.599.955,00
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RDTR	260.709.800,00	247.537.020,00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlakasananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	132.008.400,00	129.838.400,00
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Koordinasi dalam Rencana Tapak***	**629.265.625,00**	**548.978.700,00**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	629.265.625,00	548.978.700,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Dokumen RTRW/rencana Peruntukan***	**684.581.825,00**	**677.541.400,00**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	406.155.975,00	402.258.800,00
Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	278.425.850,00	275.282.600,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Dokumen Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran Tata Ruang***	**835.955.647,00**	**730.748.774,00**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	401.080.447,00	367.162.672,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkroniasis Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	254.449.600,00	244.037.102,00
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	180.425.600,00	119.549.000,00
TOTAL ANGGARAN DPUTR TAHUN 2022		**332.196.517.775,00**	**277.616.510.980,00**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, (Matriks RENJA terlampir).

3.1. Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Mengikuti Penjelasan dari visi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Banung Barat yaitu :

"Kabupaten Agro Industri dan Wisata Ramah Lingkungan"

Penjabaran Visi RPJPD 2005-2025 Yaitu :

Menggambarkan sinergisitas pembangunan berbasis pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menggambarkan bahwa infrastruktur yang dikembangkan dan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang unggul dari sisi kualitas, merata dan mampu menopang/menunjang pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu terkait dengan pembentuk visi RPJPD KBB terdapat unsur yang menjadi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu ; Bandung Barat sebagai Pusat Kegiatan Agro dan Destinasi Wisata Unggulan yang mengandung arti bahwa dalam proses dan hasil pembangunan harus menjamin tersedianya akses pola distribusi komoditasa agro dan terkonektivitasnya destinasi wisata ramah lingkungan (agrowisata), keterbukaan isolasi bagi seluruh masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini yang mendasari bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus menyusun program dan kegiatan dan sub kegiatannya yang mampu mendorong upaya-upaya terbangunnya infrastruktur dasar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,

terkonektivitasnya destinasi wisata ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Misi.

Untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Mengambil Misi yang Telah di Tentukan Pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 Kabupaten Bandung Barat Yaitu :

- **MISI 4 : Memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, hal ini dijabarkan terkait dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu guna menciptakan kawasan agribisnis dan wisata sebagai pusat kegiatan ekonomi yang efisien dan efektif untuk kegiatan perkembangan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai perwujudan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik layak
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya Jumlah Lahan Pertanian yang terairi oleh infrastruktur SDA
3	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Ketersediaan Infrastuktur di Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan
4	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten dalam Menunjang Konektivitas Wilayah

5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Sinkronisasi dan Penyelarasan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
6	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Gedung Pemerintah, Penataan Bangunan dan Lingkungannya dalam Menunjang Ketahan Daerah terhadap Bencana
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Menunjang Pengelolaan Persampahan
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatnya capaian komponen perencanaan penganggaran, pengukuran kinerja, pelaopran dan evaluasi kinerja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun selama kurun waktu 2024-2026.

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
    2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
    3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
    4. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
    5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
    6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
    7. Program Penataan bangunan gedung
    8. Program penataan bangunan dan lingkungannya
    9. Program penyelenggaraan jalan
    10. Program pengembangan jasa konstruksi
    11. Program penyelenggaraan penataan ruang

Selanjutnya program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada Dokumen Rencana Strategis. Setelah diidentifikasi maka ditetapkan program yang kemudian diaplikasikan ke dalam beberapa kegiatan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➢ Sub kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- ❖ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Pengadaan Mebel

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

❖ Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pembangunan Tanggul Sungai
c. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
d. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

❖ Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

b. Rehabilitasi Bendung Irigasi
c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
d. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

❖ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

❖ Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
b. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

❖ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- ❖ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
    b. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
    b. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
    c. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
    d. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
    b. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

❖ Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
b. Pengelolaan Leger Jalan
c. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
d. Rekonstruksi Jalan
e. Pemeliharaan Berkala Jalan
f. Pemeliharaan Rutin Jembatan
g. Rehabilitasu Jembatan
h. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
i. Rehabilitasi Jalan
j. Pemeliharaan Rutin Jalan

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

❖ Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
b. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
c. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

❖ Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

- ❖ Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota

- ❖ Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
  - ➢ Sub kegiatan:
    a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
    b. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
    c. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
    d. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
    e. Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- ❖ Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - ➢ Sub kegiatan:

a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
b. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
c. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
d. Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
e. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang

❖ Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
c. Penyusunan Peta Dasar
d. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
e. Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang

❖ Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang DaerahKabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Sistem Informasi Penataan Ruang
b. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
d. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian PemanfaatanRuang Daerah Kabupaten/Kota

➢ Sub kegiatan:

a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
b. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
c. Pelaksanaan Audit Tata Ruang
d. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
e. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
f. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
g. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
h. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
i. Penilaian Perwujudan RTR
j. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
k. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiska

4.2. Rencana Kegiatan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merencanakan anggaran kegiatannya bersumber pada pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan APBD 2024. (Matriks Renja Terlampir)

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Renja-SKPD Tahun 2024 ini, maka diharapkan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Barat Tahun 2024 dapat diinformasikan sejak dini kepada seluruh stake holder yang terkait dengan rangkaian kegiatan ini. Karenanya selain berfungsi sebagai media penyampai informasi, Renja- SKPD ini juga dapat berfungsi sebagai kerangka yang perlu dipedomani oleh para perencana maupun pelaksana kegiatan agar seluruh kegiatan yang dilakukan menjadi bagian dari program besar Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu tersebut, bahkan menjadi bagian integral dari program sektoral maupun Wilayah.

Harapan kami, semoga kesepakatan menjaga arah pelaksanaan kegiatan agar tidak keluar dari yang telah direncanakan dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dan dapat melaksanakan kinerjanya secara lebih terarah, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung Barat, 1 Juli 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Bandung Barat

(MOCH. RIDWAN EVI, BE., S.Sos., MM)
Pembina IV/a
NIP. 196911271999011001

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**81.584.308.911,00**	**171.179.805.527,00**	**207.053.031.652,00**	**125.468.722.741,00**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**81.584.308.911,00**	**171.179.805.527,00**	**207.053.031.652,00**	**125.468.722.741,00**						
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**81.584.308.911,00**	**171.179.805.527,00**	**207.053.031.652,00**	**125.468.722.741,00**						
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DPUTR**				**B Huruf**	**B Huruf**	**20.303.582.142,00**	**20.685.801.266,00**	**19.172.592.322,00**	**1.535.313.271,00**						
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*				19 Dokumen	19 Dokumen	177.998.550,00	363.597.750,00	537.840.000,00	359.841.450,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.950,00	189.769.400,00	364.011.650,00	264.011.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.600,00	62.575.500,00	62.575.500,00	37.575.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.999.600,00	7.999.600,00	7.999.600,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.999.800,00	73.253.650,00	73.253.650,00	58.253.850,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.023.694.212,00	18.553.539.236,00	16.469.967.631,00	-1.553.726.581,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/ bulan	101 Orang/ bulan	17.937.795.412,00	18.257.318.736,00	16.173.747.131,00	-1.764.048.281,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25.999.600,00	158.649.500,00	158.649.500,00	132.649.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.999.800,00	58.835.700,00	58.835.700,00	38.835.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.999.600,00	66.835.500,00	66.835.500,00	38.835.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	11.899.800,00	11.899.800,00	11.899.800,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKBMD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	14.800.000,00	168.199.800,00	168.199.800,00	153.399.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	59.207.400,00	59.207.400,00	54.257.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.850.000,00	108.992.400,00	108.992.400,00	99.142.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu*				100 %	100 %	170.620.000,00	430.129.850,00	430.129.850,00	259.509.850,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.240.000,00	131.259.850,00	131.259.850,00	121.019.850,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	47.880.000,00	186.370.000,00	186.370.000,00	138.490.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu*				100 %	100 %	426.882.500,00	449.302.400,00	449.302.400,00	22.419.900,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.001.700,00	5.001.700,00	5.001.700,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.596.800,00	30.067.300,00	30.067.300,00	14.470.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.387.600,00	18.337.000,00	18.337.000,00	7.949.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	134.571.800,00	134.571.800,00	134.571.800,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.999.600,00	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	151.325.000,00	151.325.000,00	151.325.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Dokumen	12 Dokumen	62.554.880,00	156.243.230,00	156.243.230,00	93.688.350,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.995.000,00	55.995.950,00	55.995.950,00	46.000.950,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	42.554.880,00	42.554.880,00	42.554.880,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.005.000,00	57.692.400,00	57.692.400,00	47.687.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara*				140 Unit	140 Unit	1.427.032.000,00	564.789.000,00	960.909.411,00	-466.122.589,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	465.320.000,00	259.905.000,00	259.905.000,00	-205.415.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	54 Unit	889.792.000,00	282.964.000,00	282.964.000,00	-606.828.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	396.120.411,00	346.120.411,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah		
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal**				**60,51 %**	**60,51 %**	**2.443.999.675,00**	**4.506.644.050,00**	**4.506.644.050,00**	**522.000.325,00**						

	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				61 %	61 %	661.859.694,00	453.788.050,00	453.788.050,00	-208.071.644,00			-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				35 Lembaga	35 Lembaga	54.141.000,00	88.452.600,00	88.452.600,00	34.311.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai															
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,05 KM	0,05 KM	392.583.094,00	46.513.750,00	46.513.750,00	-346.069.344,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai															
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	107.492.300,00	139.027.400,00	139.027.400,00	31.535.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya															
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	107.643.300,00	179.794.300,00	179.794.300,00	72.151.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.782.139.981,00	4.052.856.000,00	4.052.856.000,00	2.270.716.019,00			-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	R
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,4 KM	0,4 KM	581.753.520,00	2.270.416.600,00	2.270.416.600,00	1.688.663.080,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 Bendung	2 Bendung	399.294.501,00	111.359.100,00	111.359.100,00	-287.935.401,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,15 KM	0,15 KM	376.548.660,00	1.279.097.300,00	1.279.097.300,00	902.548.640,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	424.543.300,00	391.983.000,00	391.983.000,00	-32.560.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan		
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum**				**83.42 %**	**83.42 %**	**6.128.733.000,00**	**11.160.560.900,00**	**14.266.041.500,00**	**-4.128.733.000,00**						
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum layak*				6 KK	6 KK	6.128.733.000,00	11.160.560.900,00	14.266.041.500,00	8.137.308.500,00			-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	5.289.457.000,00	8.036.316.900,00	10.863.543.300,00	5.574.086.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	759.276.000,00	759.276.000,00	759.276.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																

			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,5 Liter/Detik	1,5 Liter/Detik	80.000.000,00	2.364.968.000,00	2.643.222.200,00	2.563.222.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun**				**100 %**	**100 %**	**5.938.844.616,00**	**5.938.891.100,00**	**1.832.975.900,00**	**-566.844.616,00**						
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Sampah Yang Memadai*				11 Unit	11 Unit	5.938.844.616,00	5.938.891.100,00	1.832.975.900,00	-4.105.868.716,00			-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				0,5 Ton/hari	0,5 Ton/hari	266.446.116,00	266.465.800,00	266.465.800,00	19.684,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	5.672.398.500,00	5.672.425.300,00	1.566.510.100,00	-4.105.888.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik**				**66,26 %**	**66,26 %**	**4.321.538.640,00**	**7.121.636.744,00**	**9.761.636.744,00**	**-2.921.538.640,00**						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana air limbah domestik yang terkelola dan dikembangkan*				5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	4.321.538.640,00	7.121.636.744,00	9.761.636.744,00	5.440.098.104,00			-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	3.421.538.940,00	6.221.637.044,00	8.861.637.044,00	5.440.098.104,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	899.999.700,00	899.999.700,00	899.999.700,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase yang terbangun**				**66,89 %**	**66,89 %**	**991.360.000,00**	**704.716.600,00**	**704.716.600,00**	**808.640.000,00**						
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang drainase permukiman yang terbangun*				0.5 KM	0.5 KM	991.360.000,00	704.716.600,00	704.716.600,00	-286.643.400,00			-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				770 M	770 M	991.360.000,00	704.716.600,00	704.716.600,00	-286.643.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																

			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman		
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik**				**100 %**	**100 %**	**3.348.903.736,00**	**32.961.742.486,00**	**44.404.289.409,00**	**5.381.096.264,00**						
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Terpeliharanya dan terbanguannya gedung Pemerintah Daerah*				6 Gedung	6 Gedung	3.348.903.736,00	32.961.742.486,00	44.404.289.409,00	41.055.385.673,00			-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				7 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	2.086.030.586,00	1.976.333.886,00	2.144.428.492,00	58.397.906,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				4 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung	1.063.103.000,00	1.153.406.300,00	1.971.164.500,00	908.061.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				2 Dokumen	2 Dokumen	100.942.150,00	137.451.100,00	137.451.100,00	36.508.950,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	98.828.000,00	29.694.551.200,00	40.151.245.317,00	40.052.417.317,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**201.152.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.698.847.500,00**						
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	201.152.500,00	0,00	0,00	-201.152.500,00			-	- -	-	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																

			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	201.152.500,00	0,00	0,00	-201.152.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik**				**58,42 %**	**58,42 %**	**35.812.200.002,00**	**85.903.985.981,00**	**109.956.095.937,00**	**-7.680.200.002,00**						
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik*				7,56 %	7,56 %	35.812.200.002,00	85.903.985.981,00	109.956.095.937,00	74.143.895.935,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	170.633.591,00	46.635.900,00	46.635.900,00	-123.997.691,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.670.729.370,00	167.063.850,00	267.063.850,00	-1.403.665.520,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2,56 KM	2,56 KM	15.722.666.588,00	76.108.492.499,00	92.007.677.620,00	76.285.011.032,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,3 KM	0,3 KM	731.286.818,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-723.486.818,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				65 Jembatan	65 Jembatan	243.762.273,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-235.962.273,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				8 Jembatan	8 Jembatan	975.049.091,00	331.544.400,00	331.544.400,00	-643.504.691,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	3.047.028.409,00	93.579.000,00	1.085.169.750,00	-1.961.858.659,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	3 KM	8.375.798.408,00	7.692.183.132,00	9.834.626.117,00	1.458.827.709,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,5 KM	1,5 KM	4.875.245.454,00	1.448.887.200,00	6.367.778.300,00	1.492.532.846,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**400.000.800,00**	**486.615.950,00**	**486.615.950,00**	**189.999.200,00**						
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Pelatihan Tenaga Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*				100 %	100 %	300.000.000,00	386.615.150,00	386.615.150,00	86.615.150,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.800,00	99.999.800,00	-200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		

	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis															
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	135.307.950,00	135.307.950,00	35.307.950,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis															
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	151.307.400,00	151.307.400,00	51.307.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelatihan Tenaga Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi															
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi															
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Cakupan kegiatan sosialisasi pengusaha jasa konsturksi di kabupaten bandung barat*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Cakupan kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*				100 %	100 %	100.000.800,00	100.000.800,00	100.000.800,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				5 Lembaga	5 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	15.000.400,00	15.000.400,00	15.000.400,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.400,00	15.000.400,00	15.000.400,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang**				**100 %**	**100 %**	**1.693.993.800,00**	**1.709.210.450,00**	**1.961.423.240,00**	**1.764.006.200,00**						

	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RDTR*				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.100,00	593.685.350,00	769.635.590,00	219.635.490,00			-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang															
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota															
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	193.343.850,00	369.294.090,00	219.294.090,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang															
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	1 Publikasi	100.000.000,00	89.400.000,00	89.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota															
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.100,00	89.400.100,00	89.400.100,00	-10.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	131.535.900,00	131.535.900,00	31.535.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	R
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	90.005.500,00	90.005.500,00	-9.994.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	314.130.000,00	240.466.100,00	240.466.100,00	-73.663.900,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	1 Peta	99.999.800,00	83.259.700,00	83.259.700,00	-16.740.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	114.130.200,00	67.183.900,00	67.183.900,00	-46.946.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	90.022.500,00	90.022.500,00	-9.977.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	329.863.500,00	384.625.500,00	460.888.050,00	131.024.550,00			-	- -	-	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	90.040.000,00	166.302.550,00	66.302.550,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	121.500.500,00	152.562.750,00	152.562.750,00	31.062.250,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																

			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	108.363.000,00	142.022.750,00	142.022.750,00	33.659.750,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.200,00	490.433.500,00	490.433.500,00	-9.566.700,00			-	- -	-	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	100.000.100,00	89.984.300,00	89.984.300,00	-10.015.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang																
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	1 Kasus	50.000.000,00	51.870.000,00	51.870.000,00	1.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	119.316.600,00	119.316.600,00	19.316.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	100.000.100,00	89.912.600,00	89.912.600,00	-10.087.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	89.350.000,00	89.350.000,00	-10.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang																
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		
	J U M L A H								**81.584.308.911,00**	**171.179.805.527,00**	**207.053.031.652,00**	**125.468.722.741,00**						

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tantang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja 2024 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2024-2026.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan Perikanan dan Peternakan di Bandung Barat.

Bandung Barat, September 2024

Plt. KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

drh. Wiwin Aprianti, M.Si
NIP. 197911252005012012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
BAB I	Pendahuluan	.....	1
	1.1 Latar Belakang	.....	1
	1.2 Landasan Hukum	.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
	1.4 Sistematika Pelaporan	.....	3
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu	.....	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	.....	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	.....	10
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	.....	12
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	13
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..	...	26
BAB III	Tujuan dan Sasaran	.....	27
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	.....	27
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	.....	28
	3.3 Program dan Kegiatan	.....	28
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan	.....	40
BAB V	Penutup	.....	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada spm sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam langkah–langkah yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat ini adalah merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat yang telah disusun melalui beberapa tahapan forum, mulai dari forum perangkat daerah dan forum gabungan perangkat daerah sampai pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini dilakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerjanya atau tolok ukur keberhasilannya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Diharapkan dengan adanya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat ini dapat meningkatkan peranannya sebagai fungsi

pelayanan dan fasilitator serta motivator bagi keberhasilan pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bandung Barat yang lebih efisien dan efektif sesuai tujuan dan sasaran strategis Dinas.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
k. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor No 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
m. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarankan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024 dan untuk memperoleh gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2022

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat untuk Tahun 2022 memperoleh anggaran DPA yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen
a.	Pendapatan	520.000.000	368.938.600	70.95
b.	Belanja	34.767.230.432	33.254.587.624	95.65
	1. Belanja Oprasi	34.534.388.287	33.022.651.244	95.62
	2. Belanja Modal	232.842.145	231.972.380	99.63

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Dinas Perikanan dan Peternakan s/d Tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	Pilihan										
	Kelautan dan Perikanan										
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan Tangkap yang terdaftar (%)**	**25**	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Temu Teknis	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkkan CBIB/CPIB (Unit)**	**30**	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Peningkatan Produksi Ikan, Peningkatan Pengetahuan Budidaya Ikan	2x Bimtek/Pelatihan	-	-	-	-	2x Bimtek/Pelatihan	2x Bimtek/Pelatihan	100	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terdaftarnya Pelaku Usaha Perikanan (TDUPR)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	20%	-	-	-	-	20%	20%	100	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan**	**2**	-	-	-	-	2	2	100	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelestarian SDP	100%	-	-	-	-	100%	100%	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	**86**	78	80	80	100	83	83	100	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Terdatanya pelaku usaha pengolahan ikan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya sosialisasi , bimtek dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan	2	-	-	-	-	2	2	100	
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya sarana pengolahan	4	-	-	-		4	4	100	
	Pilihan Pertanian										
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Persentase Penyebaran Bibit unggul**	**15%**	-	-	-	-	10	10	100	
		Persentase kelahiran Ternak	**78%**	72	74	74	100	76	76	100	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	terawasinya dan tersedianya sarana perternakan	6 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	100	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Bibit Tanaman Hijauan Pakan Ternak serta Pendistribusian pakan Ternak	12%	-	-	-	-	12%	12%	100	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Terawasinya Peredaran Obat Hewan	70%	-	-	-		70%	70%	100	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran	Peningkatan Populasi Ternak	10%	-	-	-	-	10%	10%	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	20%	-	-	-	-	20%	20%	100	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpeliharanya Prasarana Peternakan	2 UPT	-	-	-		2 UPT	2 UPT	100	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Biibt Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)**	**72%**	46	54.5	54.5	100	63	63	100	
		Prevalensi Brucellosis	**3**	5.5	5	5	100	4	4	100	
	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Bandung Barat	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan	Terawasinya lalu lintas ternak	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	masyarakat veteriner										
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	100	100	
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	5 Kecamatan	-	-	-	-	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100	
	Program Perizinan usaha pertanian	**Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan**	**100%**	-	-	-	-	100	100	100	
	Penerbitan izin usaha produk benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	16 Kecamtan	-	-	-	-	16 Kecamtan	16 Kecamtan	100	
	Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok**	**10 kelompok**	10	10	10	100	10	10	100	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelatihan untuk Kelompok Ternak	4 kali	-	-	-	-	3	3	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat

Dari hasil pengukuran kinerja, pencapain 2 (dua) Indikator Kinerja RPJMD yang menjadi tugas Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2022 adalah Dari 2 (Dua) indikator kinerja pemda yang merupakan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2022 tercapai 1 indikator kinerja dan 1 indikator kinerja tidak tercapai.

Sedangkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan yang di targetkan pada tahun 2022 dalam Renstra tahun 2019-2023, sebanyak 3 (tiga) IKU mencapai target dan 4 (empat) IKU tidak mencapai target.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator	IKU/IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Produksi Benih Ikan (Juta Ekor)	IKU	196,7	206,6	216,9	216,9	196,7	206,6	216,9		
2	Jumlah Produksi Ikan Kolam Air Tenang (Ton)	IKU	4,652	5,350	6,153	6,153	4,652	5,350	6,153		
3	Jumlah Produksi Daging (Ton)	IKU	25,335	25,968	26,618	26,618	25,335	25,968	26,618		
4	Jumlah Produksi Telur (Ton)	IKU	1,427	1,463	1,499	1,499	1,427	1,463	1,499		
5	Jumlah Produksi Susu (Ton)	IKU	86,616	90,947	95,494	95,494	86,616	90,947	95,494		
6	Nilai Mutu SAKIP	IKU	BB	BB	A	A	BB	BB	A		
7	Nilai IKM	IKU	88	89	90	90	88	89	90		
8	Persentase Penyebaran Benih Unggul (%)	IKK	10	15	20	20	10	15	20		
9	Jumlah RTP	IKK	2.450	2.540	2.650	2.650	2.450	2.540	2.650		
10	Pengawasan Sumberdaya Perikanan	IKK	2	2	2	2	2	2	2		
11	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	IKK	83	86	90	90	83	86	90		
13	Persentase Penyebaran Bibit unggul (%)	IKK	10	15	20	20	10	15	20		
14	Persentase kelahiran Ternak (%)	IKK	76	78	80	80	76	78	80		
15	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan	IKK	15	20	25	25	15	20	25		
16	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan (%)	IKK	20	20	20	20	20	20	20		
17	Prevalensi Brucellosis (%)	IKK	4	3	2	2	4	3	2		
18	Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)	IKK	63	71.5	80	80	63	71.5	80		
19	Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi (%)	IKK	100	100	100	100	100	100	100		
20	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan (%)	IKK	100	100	100	100	100	100	100		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat

Yang menjadi isu-isu penting pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH)

   Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan asal hewan sebagai sumber protein menjadi potensi dan tantangan dinas perikanan dan peternakan dalam menyediakan bahan pangan asal hewan. Tuntutan akan kemandirian pangan setiap daerah menjadikan suatu tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Penyedian bahan pangan asal hewan sampai saat ini belum mampu sepenuhnya dipenuhi oleh produksi daerah.

b. Penataan parairan umum dan alih fungsi lahan pertanian

   Program Nasional Citarum Harum dan SK Gubernur Jawa Barat No.523.34/Kep.917-DKP/2017, berdampak pada penataan perairan umum dimana budiaya ikan keramba jaring apung yang merupakan pemasok terbesar terhadap produksi perikanan akan ditata ulang, yang akhirnya akan menurunkan potensi produksi perikanan. Disektor peternakan lahan pertanian yang terus menurun akibat alih funsi lahan ke non pertanian mengakibatkan peternak sulit untuk berkembang dan sulit mendapatkan pakan ternak (terutama HPT).

c. Manajemen budidaya

   Manajemen budidaya ikan dan ternak belum dilakukan secara baik, pembudidaya dan peternak masih banyak menerpakan budidaya secara tradisional, yang mengakibatkan produktivitas tidak optimal. Selain itu belum optimalnya produktifitas budidaya perikanan dan peternakan di Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh permasalahan ketersedian dan kualitas benih/bibit, tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak; minimnya penerapan teknologi tepat guna bagi pembudidaya ikan dan peternak; dan pengolahan limbah perikanan dan peternakan yang belum optimal. Terakhir adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia pembudiaya ikan dan peternak.

d. Kesehatan hewan

Kondisi peternakan di Bandung Barat yang sebagian besarnya merupakan peternakan rakyat akan sangat rentan dengan ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis strategis. Selain itu letak geografis Bandung Barat yang sangat strategis, menyebabkan tingginya lalu lintas hewan/ternak yang dapat menimbulkan perpindahan penyakit dan daya dukung lingkungan yang semakin menurun akibat meningkatnya aktifitas manusia. Faktor lain yang berpengaruh adalah minimnya sarana dan prasarana serta SDM kesehatan hewan.

e. Kesehatan masyarakat veteriner

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Pangan asal hewan seperti ikan, daging, susu dan telur serta hasil olahannya umumnya bersifat mudah rusak (perishable) dan memiliki potensi mengandung bahaya biologik, kimiawi dan atau fisik, yang membahayakan manusia. Cemaran mikroorganisme antraks, residu antibiotika, residu hormon, cemaran mikotoksin, penggunaan formalin, penggunaan boraks, pemalsuan daging, penjualan ayam bangkai, penggunaan bahan pewarna non-pangan, penyuntikan air ke dalam daging merupakan berbagai masalah yang dihadapi selama ini.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Yang menjadi isu-isu penting pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1.	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**25.677.973.587**	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**25.677.973.587**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Nilai SAKIP**	**Bandung Barat**		**12.317.921.464**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai SAKIP**	**Bandung Barat**		**12.317.921.464**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan	Bandung Barat	100%	**294.900.553**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan	Bandung Barat	100%	**294.900.553**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Bandung Barat	2 Dokumen	145.342.903	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Bandung Barat	2 Dokumen	145.342.903	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA	Bandung Barat	1 Dokumen	14.177.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA	Bandung Barat	1 Dokumen	14.177.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Tersusunya Dokumen RKA Perubahan	Bandung Barat	1 Dokumen	15.981.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Tersusunya Dokumen RKA Perubahan	Bandung Barat	1 Dokumen	15.981.600	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA	Bandung Barat	1 Dokumen	21.804.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA	Bandung Barat	1 Dokumen	21.804.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA Perubahan	Bandung Barat	1 Dokumen	23.369.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA Perubahan	Bandung Barat	1 Dokumen	23.369.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Dokumen Laporan Capaian kinerja	Bandung Barat	3 Dokumen	65.865.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Dokumen Laporan Capaian kinerja	Bandung Barat	3 Dokumen	65.865.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja	Bandung Barat	12 Bulan	8.360.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja	Bandung Barat	12 Bulan	8.360.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengendalian tertib administrasi keuangan		100 Persen	**10.699.677.172**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengendalian tertib administrasi keuangan		100 Persen	**10.699.677.172**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Bandung Barat	12 Bulan	10.568.321.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Bandung Barat	12 Bulan	10.568.321.322	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan akuntansi	Bandung Barat	12 Bulan	70.869.150	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan akuntansi	Bandung Barat	12 Bulan	70.869.150	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cetak laporan keuangan akhir tahun	Bandung Barat	1 Dokumen	6.317.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cetak laporan keuangan akhir tahun	Bandung Barat	1 Dokumen	6.317.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	Bandung Barat	1 Berkas	6.923.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	Bandung Barat	1 Berkas	6.923.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran	Bandung Barat	12 Bulan	47.246.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran	Bandung Barat	12 Bulan	47.246.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**337.518.300**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**337.518.300**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana pegawai	Bandung Barat	1 paket	64.247.200	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana pegawai	Bandung Barat	1 paket	64.247.200	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan pakaian dinas harian pegawai	Bandung Barat	1 paket	65.119.450	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan pakaian dinas harian pegawai	Bandung Barat	1 paket	65.119.450	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pengolahan data kepegawaian	Bandung Barat	12 Bulan	73.619.150	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pengolahan data kepegawaian	Bandung Barat	12 Bulan	73.619.150	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	Bandung Barat	12 Bulan	134.532.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	Bandung Barat	12 Bulan	134.532.500	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan sumberdaya pegawai	Bandung Barat	1 paket	**727.105.459**	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan sumberdaya pegawai	Bandung Barat	1 paket	**727.105.459**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				26.943.252	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				26.943.252	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik sebagai pemenuhan kebutuhan UPTD	Bandung Barat	1 paket	178.878.543	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik sebagai pemenuhan kebutuhan UPTD	Bandung Barat	1 paket	178.878.543	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang kantor	Bandung Barat	5 Jenis	191.729.231	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang kantor	Bandung Barat	5 Jenis	191.729.231	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Bandung Barat	1 Paket	6.317.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Bandung Barat	1 Paket	6.317.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan	Bandung Barat	1 Paket	63.948.333	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan	Bandung Barat	1 Paket	63.948.333	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Penyediaan media cetak dan elektronik	Bandung Barat	12 bulan	7.260.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Penyediaan media cetak dan elektronik	Bandung Barat	12 bulan	7.260.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan jamuan makan dan snack untuk tamu dinas	Bandung Barat	12 bulan	26.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan jamuan makan dan snack untuk tamu dinas	Bandung Barat	12 bulan	26.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan jamuan makan dan snack untuk peserta rapat dinas	Bandung Barat	12 bulan	78.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan jamuan makan dan snack untuk peserta rapat dinas	Bandung Barat	12 bulan	78.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis dinas	Bandung Barat	100 Persen	54.446.100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis dinas		100 Persen	54.446.100	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bandung Barat		99.900.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bandung Barat		99.900.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bandung Barat		**46.786.056**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Bandung Barat		**46.786.056**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandung Barat	100 Persen	46.786.056	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandung Barat	100 Persen	46.786.056	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kelengkapan Korpri	Bandung Barat	12 bulan	**9.324.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya kelengkapan Korpri	Bandung Barat	12 bulan	**9.324.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa telepon dan internet		12 bulan	9.324.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa telepon dan internet	Bandung Barat	12 bulan	9.324.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bandung Barat		**202.609.924**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**202.609.924**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Bandung Barat	2 Unit/Tahun	18.082.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Bandung Barat	2 Unit/Tahun	18.082.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bandung Barat	4 Unit/Tahun	113.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bandung Barat	4 Unit/Tahun	113.990.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan pemeliharaan peralatan dan perlenngkapan kantor	Bandung Barat	24 Unit/Tahun	28.620.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan pemeliharaan peralatan dan perlenngkapan kantor	Bandung Barat	24 Unit/Tahun	28.620.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandung Barat	1 Paket	41.917.424	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandung Barat	1 Paket	41.917.424	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Terfasilitasinya Nelayan kecil**	Bandung Barat	**16 kecamatan**	**7.800.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Terfasilitasinya Nelayan kecil**	Bandung Barat	**16 kecamatan**	**7.800.000**	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terfasilitasinya Nelayan kecil**	Bandung Barat	16 kecamat**an**	**7.800.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya Nelayan kecil**	Bandung Barat	16 kecamat**an**	**7.800.000**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya ana nya Temu Teknis Pembudidaya Ikan	Bandung Barat	80 OH	7.800.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya ana nya Temu Teknis Pembudidaya Ikan	Bandung Barat	80 OH	7.800.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Penyebaran Benih Unggul**	**Bandung Barat**	**15**	**12.109.878.156**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Penyebaran Benih Unggul**	**Bandung Barat**	**15**	**12.109.878.156**	
		Jumlah RTP	**Bandung Barat**	**2.540**	**1.391.040.250**		**Jumlah RTP**	**Bandung Barat**	**2.540**	**1.391.040.250**	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Peningkatan Produksi Ikan, Peningkatan Pengetahuan Budidaya Ikan	Bandung Barat	16 kecamatan	1.235.841.650	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	Peningkatan Produksi Ikan, Peningkatan Pengetahuan Budidaya Ikan	Bandung Barat	16 kecamatan	1.235.841.650	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Paket Budidaya Ikan	Bandung Barat	80 paket	155.198.600	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Paket Budidaya Ikan	Bandung Barat	80 paket	155.198.600	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Telaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan bagi Pembudidaya Ikan	Bandung Barat	50 orang	41.917.424	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Telaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan bagi Pembudidaya Ikan	Bandung Barat	50 orang	41.917.424	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terdaftarnya Pelaku Usaha Perikanan (TDUPR)	Bandung Barat	16 Kecamatan	**13.000.000**	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	Terdaftarnya Pelaku Usaha Perikanan (TDUPR)	Bandung Barat	16 Kecamatan	**13.000.000**	
	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Tersusunya SOP Penerbitan TDPIK	Bandung Barat	1 Dokumen	13.000.000	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Tersusunya SOP Penerbitan TDPIK	Bandung Barat	1 Dokumen	13.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bandung Barat	20%	**10.705.837.906**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bandung Barat	20%	**10.705.837.906**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pendataan Pembudidaya ikan	Bandung Barat	1 Dokumen	28.420.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pendataan Pembudidaya ikan	Bandung Barat	1 Dokumen	28.420.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaaan Prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.220.246.647	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaaan Prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.220.246.647	
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bandung Barat	30 Sampel	9.396.375.659	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bandung Barat	30 Sampel	9.396.375.659	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian kualitas air, pengujian kesehatan ikan	Bandung Barat	2 Perairan Umun	60.795.600	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian kualitas air, pengujian kesehatan ikan	Bandung Barat	2 Perairan Umun	60.795.600	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan**	Bandung Barat	**2**	**660.245.548**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan**	Bandung Barat	**2**	**660.245.548**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelestarian SDP	Bandung Barat	100%	**660.245.548**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Pelestarian SDP	Bandung Barat	100%	**660.245.548**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksana nya Bersih Waduk Terlaksana nya Restocking (Penebaran) Ikan Endemik di Perairan Umum Darat Terlaksana nya Sosialisasi Pokmaswas di Perairan Umum Daerah	Bandung Barat	2	**660.245.548**	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksana nya Bersih Waduk Terlaksana nya Restocking (Penebaran) Ikan Endemik di Perairan Umum Darat Terlaksana nya Sosialisasi Pokmaswas di Perairan Umum Daerah	Bandung Barat	2	**660.245.548**	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	Bandung Barat	**86**	**582.128.419**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	Bandung Barat	**86**	**582.128.419**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Terdatanya pelaku usaha pengolahan ikan	Bandung Barat	1 Dokumen	**137.169.450**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	Terdatanya pelaku usaha pengolahan ikan	Bandung Barat	1 Dokumen	**137.169.450**	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Bandung Barat	1 Dokumen	137.169.450	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Bandung Barat	1 Dokumen	137.169.450	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya sosialisasi , bimtek dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan	Bandung Barat	2	**120.955.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Terlaksananya sosialisasi , bimtek dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan	Bandung Barat	2	**120.955.000**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Telaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan	Bandung Barat	50 orang	120.955.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Telaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan	Bandung Barat	50 orang	120.955.000	
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya sarana pengolahan	Bandung Barat	4	**324.003.969**	**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	tersedianya sarana pengolahan	Bandung Barat	4	**324.003.969**	
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan hasil perikanan	Bandung Barat	5 unit	324.003.969	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan hasil perikanan	Bandung Barat	5 unit	324.003.969	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
2.	**URUSAN PEMERINTAH PERTANIAN**				**19.376.662.055**	**URUSAN PEMERINTAH PERTANIAN**				**19.376.662.055**	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penyebaran Bibit unggul**	**Bandung Barat**	**15%**	**13.678.098.310**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyebaran Bibit unggul**	**Bandung Barat**	**15%**	**13.678.098.310**	
		Persentase kelahiran Ternak		**78%**			**Persentase kelahiran Ternak**		**78%**		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	terawasinya dan tersedianya sarana perternakan	Bandung Barat	6 paket	**1.532.268.250**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	terawasinya dan tersedianya sarana perternakan	Bandung Barat	6 paket	**1.532.268.250**	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.532.268.250	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.532.268.250	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Bibit Tanaman Hijauan Pakan Ternak serta Pendistribusian pakan Ternak	Bandung Barat	12%	**159.619.300**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Bibit Tanaman Hijauan Pakan Ternak serta Pendistribusian pakan Ternak	Bandung Barat	12%	**159.619.300**	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	159.619.300	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	159.619.300	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Terawasinya Peredaran Obat Hewan	Bandung Barat	70%	**93.546.460**	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	Terawasinya Peredaran Obat Hewan	Bandung Barat	70%	**93.546.460**	
	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kios obat hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	93.546.460	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kios obat hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	93.546.460	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Populasi Ternak	Bandung Barat	10%	**11.892.664.300**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Populasi Ternak	Bandung Barat	10%	**11.892.664.300**	
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terlaksananya Penjaminan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	9.605.688.500	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terlaksananya Penjaminan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	9.605.688.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	2.286.975.800	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	2.286.975.800	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	20%	**1.370.220.153**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	20%	**1.370.220.153**	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terpeliharanya Prasarana Peternakan	Bandung Barat	2 UPT	**1.155.480.153**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terpeliharanya Prasarana Peternakan	Bandung Barat	2 UPT	**1.155.480.153**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	UPT RPH	UPT RPH	593.786.903	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	UPT RPH	UPT RPH	593.786.903	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan UPT Pembibitan Ternak	UPT Pembibitan	UPT Pembibitan	561.693.250	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan UPT Pembibitan Ternak	UPT Pembibitan	UPT Pembibitan	561.693.250	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Biibt Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**214.740.000**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Biibt Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**214.740.000**	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	214.740.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	214.740.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)**	**Bandung Barat**	**72%**	**3.508.072.088**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)**	**Bandung Barat**	**72%**	**3.508.072.088**	
		Prevalensi Brucellosis	**Bandung Barat**	**3**			**Prevalensi Brucellosis**	**Bandung Barat**	**3**		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	**457.103.548**	**Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota**	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	**457.103.548**	
	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	120.887.108	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	120.887.108	
	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	178.199.250	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	178.199.250	
	Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Terlaksananya respon cepat kasus penyakit hewan menular strategis	Bandung Barat	16 Kecamtan	158.017.190	Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Terlaksananya respon cepat kasus penyakit hewan menular strategis	Bandung Barat	16 Kecamtan	158.017.190	
	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	**467.088.751**	**Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota**	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	**467.088.751**	
	Penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Terlaksananya penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	11.859.000	Penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Terlaksananya penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	11.859.000	
	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya sosialisasi pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Bandung Barat	16 Kecamtan	423.829.751	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya sosialisasi pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Bandung Barat	16 Kecamtan	423.829.751	
	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/ kota	Tersedianya alat perbekalan kesehatan	Bandung Barat	1 Paket	31.400.000	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/ kota	Tersedianya alat perbekalan kesehatan	Bandung Barat	1 Paket	31.400.000	
	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Bandung Barat	16 Kecamtan	**2.199.600.917**	**Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota**	Tersedianya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Bandung Barat	16 Kecamtan	**2.199.600.917**	
	Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	Terlaksananya pelayanan jasa Laboratorium	Bandung Barat	16 Kecamtan	238.288.449	Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	Terlaksananya pelayanan jasa Laboratorium	Bandung Barat	16 Kecamtan	238.288.449	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.961.312.468	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.961.312.468	
	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terawasinya lalu lintas ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	**291.215.850**	**Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	Terawasinya lalu lintas ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	**291.215.850**	
	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Terlaksananya pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	105.700.000	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Terlaksananya pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	105.700.000	
	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	81.446.600	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	81.446.600	
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Bandung Barat	16 Kecamtan	104.069.250	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Bandung Barat	16 Kecamtan	104.069.250	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**93.063.022**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**93.063.022**	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	93.063.022	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	93.063.022	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi**	**Bandung Barat**	**100%**	**92.240.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi**	**Bandung Barat**	**100%**	**92.240.000**	
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Bandung Barat	5 Kecamatan	**92.240.000**	**Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota**	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Bandung Barat	5 Kecamatan	**92.240.000**	
	Penanggulangan pasca bencana alam bersifat zoonosis	Terlaksananya respon cepat kasus penyakit hewan menular strategis	Bandung Barat	5 Kecamatan	92.240.000	Penanggulangan pasca bencana alam bersifat zoonosis	Terlaksananya respon cepat kasus penyakit hewan menular strategis	Bandung Barat	5 Kecamatan	92.240.000	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan**	**Bandung Barat**	**100%**	**205.792.450**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan**	**Bandung Barat**	**100%**	**205.792.450**	
	Penerbitan izin usaha produk benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan	Bandung Barat	16 Kecamatan	**14.805.000**	**Penerbitan izin usaha produk benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan**	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan	Bandung Barat	16 Kecamatan	**14.805.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,	Bandung Barat	50 orang	10.380.000	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,	Bandung Barat	50 orang	10.380.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terlaksanya Pengawasan pelaksanaan izin usaha Rumah Potong hewan	Bandung Barat	20 Kali	4.425.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terlaksanya Pengawasan pelaksanaan izin usaha Rumah Potong hewan	Bandung Barat	20 Kali	4.425.000	
	Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	Bandung Barat	16 Kecamtan	**190.987.450**	**Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan**	pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	Bandung Barat	16 Kecamtan	**190.987.450**	
	Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obath hewan	Terlaksananya pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	Bandung Barat	16 Kecamtan	107.300.000	Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obath hewan	Terlaksananya pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	Bandung Barat	16 Kecamtan	107.300.000	
	Pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Terlaksananya pendataan toko obat hewan.	Bandung Barat	16 Kecamtan	83.687.450	Pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Terlaksananya pendataan toko obat hewan.	Bandung Barat	16 Kecamtan	83.687.450	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok**	**Bandung Barat**	**10 kelompok**	**522.239.054**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok**	**Bandung Barat**	**10 kelompok**	**522.239.054**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**522.239.054**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya penyuluhan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**522.239.054**	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi penyuluh peternakan	Bandung Barat	20 Petugas	90.972.104	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi penyuluh peternakan	Bandung Barat	20 Petugas	90.972.104	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi bidang Peternakan	Bandung Barat	400 Peternak	431.266.950	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi bidang Peternakan	Bandung Barat	400 Peternak	431.266.950	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kewilayahan dan usulan pokok pikiran DPRD. Usulan kewilayahan melalui proses musrenbang, dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga ke musrenbang kabupaten. Sedangkan usulan pokok pikiran DPRD berasal dari reses anggota DPRD.

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	**Usulan Masyarakat melalui MUSRENBANG**	Desa Cipangeran, Kab. Bandung Barat, Saguling, Cipangeran	Pengadaan Benih Ikan	50,000,000	
		Kelompok Ternak Sari Mukti, Kp. Bojongpari RT 003 RW 001 Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Karangsari	Pengadaan Benih Ikan	35,000,000	
		kp. Cisauhuen RT 004 RW 004, KP CIPATRA RT 001 RW 002, Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Sukahaji	Pengadaan Benih Ikan	50,000,000	
		Desa Cihanjuang, Kab. Bandung Barat, Parongpong, Cihanjuang	Pengadaan Benih Ikan	50,000,000	
		KP, CISAUHEUN RT 001 RW 005, Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Sukahaji	Pengadaan Benih Ikan	178750000	
		RT 02 RW 17, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cilame	Pengadaan Bibit Ternak	30,000,000	
		KP. cikawawo RT 01 RW 03, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cimanggu	Pengadaan Bibit Ternak	75,000,000	
		KP.LOJI RT.006 RW.004 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Baranangsiang	Pengadaan Bibit Ternak	70,000,000	
		KP. CISAUHEUN RT 01 RW 05, Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Sukahaji	Pengadaan Bibit Ternak	63,000,000	
		Kelompok Tani Mitra Mandiri, Kp, Cicarita RT 01/19 Desa Ciwaruga, Kab. Bandung Barat, Parongpong, Ciwaruga	Pengadaan Bibit Ternak	77,500,000	
		Kp Cikapundung Rt.03 Rw.07, Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Wangunsari	Pengadaan Bibit Ternak	42,500,000	
		Kp Dungus Rt.02 Rw.08,	Pengadaan	67,500,000	

		Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Wangunsari	Bibit Ternak		
		Kp. Banuraja 002 RW 009, Kab. Bandung Barat, Batujajar, Pangauban	Pengadaan Bibit Ternak	38,500,000	
		Blok Sukamaju RT. 05 RW. 13, Kab. Bandung Barat, Batujajar, Batujajar Barat	Pengadaan Bibit Ternak	78,050,000	
		kp. taman mulya rt 002/014, Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Celak	Pengadaan Bibit Ternak	45,000,000	
		KP.CIRUMAMIS RT.02 RW.09, Kab. Bandung Barat, Rongga, Cinengah	Pengadaan Bibit Ternak	63,000,000	
		KP. CIPAIT RT 01 RW 06, Kab. Bandung Barat, Saguling, Girimukti	Pengadaan Bibit Ternak	70,000,000	
		Kp. Lampegan RT 01 RW 25 Desa Sukamanah, Kab. Bandung Barat, Rongga, Sukamanah	Pengadaan Bibit Ternak	80,000,000	
		Kp. Tugu RT.001 RW.014 Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Ciharashas	Pengadaan Bibit Ternak	172,000,000	
		Kp. Cibaros RT 02 RW 08 Desa Sukaresmi, Kab. Bandung Barat, Rongga, Sukaresmi	Pengadaan Bibit Ternak	96,000,000	
		Jl. Raya Citalem no. 416, Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Citalem	Pengadaan Bibit Ternak	210,000,000	
		Kp. Bongkok Rt 01 Rw 07 Desa Padaasih, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	Pengadaan Bibit Ternak	200,000,000	
		Kp. Cipanas Rt 01 Rw 05 Desa Padaasih, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	Pengadaan Bibit Ternak	125,000,000	
		Kp. Bangreung RT 03 RW 09, Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Sukasari	Pengadaan Bibit Ternak	22,500,000	
		Kp. Tangkil RT 001 RW 009 Desa Mekarjaya, Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Mekarjaya	Pengadaan Bibit Ternak	20,000,000	
		Kp. Sukamaju RT 002 RW 009, Kab. Bandung Barat, Cipatat, Mandalawangi	Pengadaan Bibit Ternak	100,000,000	
		RT 02 RW 17, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cilame	Pengadaan Bibit Ternak	30,000,000	
		KP. cikawawo RT 01 RW 03, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cimanggu	Pengadaan Bibit Ternak	75,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perikanan dan Peternakan membidangi dua urusan pilihan, yaitu urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian.

Bidang perikanan dalam hal ini mengacu pada kementrian kelautan dan perikanan yang memiliki tujuan pembanguna kelautan dan perikanan yaitu Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Sasaran yang ingin dicapai Kementrian Kelautan dan Perikanan yakni:

1. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
2. Meningkatnya pendapatan;
3. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya mutu keamanan produk perikanan sesuai standar;
5. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan pertanian Tahun 2020-2023 adalah terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula; Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan; Bergesernya budaya konsumsi pangan; Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga; Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi; Mendorong majunya agrobioindustri; Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat secara fungsional memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah digariskan secara nasional. Dalam kaitan tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan sasaran kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Bandung Barat 2024-2026, maka tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 adalah :

a. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan peternakan;
b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 adalah :

a. Meningkatnya produksi perikanan;
b. Meningkatnya produksi peternakan;
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan maka dalam Rencana Pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 dituangkan dalam program dan kegiatan, yaitu :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju 2025 Kabupaten Bandung Barat

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Perikanan dan Peternakan					**45.054.635.642**				**14.377.743.856**
3.25	**Urusan Kelautan dan perikanan**				**25.677.973.587**	**APBD**			**14.377.743.856**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Nilai SAKIP	Bandung Barat	72	**12.317.921.464**	APBD		76	**12,823,889,268**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Bandung Barat	100 Persen	**294.900.553**	APBD		100 Persen	**293.000.000**
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan	Bandung Barat	2 Dokumen	145.342.903	APBD		2 Dokumen	80.000.000
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen RKA	Bandung Barat	1 Dokumen	14.177.600	APBD		1 Dokumen	16.000.000
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA	Bandung Barat	1 Dokumen	15.981.600	APBD		1 Dokumen	13.000.000
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen RKA perubahan	Bandung Barat	1 Dokumen	21.804.000	APBD		1 Dokumen	13.000.000
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA Perubahan	Bandung Barat	1 Dokumen	23.369.200	APBD		1 Dokumen	11.000.000
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Dokumen Laporan capain Kinerja	Bandung Barat	1 Dokumen	65.865.250	APBD		1 Dokumen	120.000.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaporan	Bandung Barat	10 Kali	8.360.000	APBD		10 Kali	40.000.000
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengendalian tertib administrasi keuangan	Bandung Barat	100 Persen	**10.699.677.172**	APBD		100 Persen	**11.085.200.000**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Bandung Barat	12 Bulan	10.568.321.322	APBD		12 Bulan	11.000.000.000
3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bandung Barat	12 Bulan	70.869.150	APBD		12 Bulan	26.400.000
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandung Barat	100 Persen	6.317.000	APBD		100 Persen	15.000.000
3.25.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bandung Barat	12 Bulan	6.923.600	APBD		12 Bulan	8,800,000
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandung Barat	100 Persen	47.246.100	APBD		100 Persen	164,870,000
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Bandung Barat	100 Persen	**337.518.300**	APBD		100 Persen	**254,100,00**
3.25.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pengadaan pakaian olahraga	Bandung Barat	110 ASN		APBD		12 Bulan	110,000,000
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bandung Barat	50 ASN	64.247.200	APBD		50 ASN	80,500,000
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandung Barat	100 Persen	65.119.450	APBD		100 Persen	95.000.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.05.04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandung Barat	100 Persen	73.619.150	APBD		100 Persen	6,600,000
3.25.01.2.05.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandung Barat	100 Persen	134.532.500	APBD		100 Persen	66,000,000
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bandung Barat	100 Persen	**727.105.459**	APBD		100 Persen	**544,500,000**
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor	Bandung Barat	50 Unit	26.943.252	APBD		50 Unit	27,500,000
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang administrasi	Bandung Barat	1 paket	178.878.543	APBD		1 paket	165,000,000
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya barang cetakan dalam menunjang kinerja kantor	Bandung Barat	1 paket	191.729.231	APBD		1 paket	198,000,000
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya komponen listrik dan alat penerangan ruangan kantor	Bandung Barat	1 paket	63.948.333	APBD		1 paket	154.000.000
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya sarana dan prasana kantor sebagai penunjang kinerja kantor	Bandung Barat	5 Jenis	7.260.000	APBD		5 Jenis	29,960,000
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya surat kabar dan Majalah	Bandung Barat	2 Jenis	26.000.000	APBD		2 Jenis	48,750,000
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan jamuan peserta rapat, kunjungan dan kegiatan SKPD	Bandung Barat	4000 OK	78.000.000	APBD		4000 OK	110,500,000
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya penunjang operasional untuk kelancaran koordinasi dan konsultansi ke instansi lain	Bandung Barat	50 HOK	54.446.100	APBD		50 HOK	140.329.172

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bandung Barat	3 Jenis	99.900.000	APBD		3 Jenis	110,500,000
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandung Barat	12 Bulan	**9.324.000**	APBD		12 Bulan	**10.560.000**
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandung Barat	12 Bulan	9.324.000	APBD		12 Bulan	10.560.000
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bandung Barat	12 Bulan	**202.609.924**	APBD		12 Bulan	**400.000.000**
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandung Barat	12 Bulan	18.082.500	APBD		12 Bulan	35,350,000
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandung Barat	12 Bulan	113.990.000	APBD		12 Bulan	327,290,000
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandung Barat	12 Bulan	28.620.000	APBD		12 Bulan	32,148,000
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan	Bandung Barat	12 Bulan	41.917.424				
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Penyebaran Benih Unggul**	**Bandung Barat**	**15**	**12.109.878.156**	**APBD**		**20**	**1.105.781.700**
		Jumlah RTP	**Bandung Barat**	**2.540**				**2.650**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	Peningkatan Produksi Ikan, Peningkatan Pengetahuan Budidaya Ikan	Bandung Barat	16 kecamatan	**1.391.040.250**	APBD		16 kecamatan	**290.913.800**
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Paket Budidaya Ikan	Bandung Barat	80 paket	1.235.841.650	APBD		80 paket	178.658.800
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Telaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan bagi Pembudidaya Ikan	Bandung Barat	50 orang	155.198.600	APBD		50 orang	112.255.000
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	Terdaftarnya Pelaku Usaha Perikanan (TDUPR)	Bandung Barat	16 Kecamatan		APBD		16 Kecamatan	**48.730.000**
3.25.04.2.03.01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Tersusunya SOP Penerbitan TDPIK	Bandung Barat	1 Dokumen	13.000.000	APBD		1 Dokumen	48.730.000
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bandung Barat	20%	**10.705.837.906**	APBD		20%	**766.137.900**
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pendataan Pembudidaya ikan	Bandung Barat	1 Dokumen	28.420.000	APBD		1 Dokumen	63.396.300
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaaan Prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.220.246.647	APBD		16 Kecamtan	555,000,000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bandung Barat	30 Sampel	9.396.375.659	APBD		30 Sampel	108.944.000
3.25.03.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian kualitas air, pengujian kesehatan ikan	Bandung Barat	2 Perairan Umun	60.795.600	APBD		2 Perairan Umun	43.797.600
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan**	Bandung Barat	**2**	**660.245.548**	**APBD**		**2**	**160.072.888**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Pelestarian SDP	Bandung Barat	100%	**660.245.548**	APBD		100%	**160.072.888**
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksana nya Bersih Waduk Terlaksana nya Restocking (Penebaran) Ikan Endemik di Perairan Umum Darat Terlaksana nya Sosialisasi Pokmaswas di Perairan Umum Daerah	Bandung Barat	2	660.245.548	APBD		2	160.072.888
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	Bandung Barat	**86**	**582.128.419**	APBD		**90**	**288.000.000**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	Terdatanya pelaku usaha pengolahan ikan	Bandung Barat	1 Dokumen	**137.169.450**	APBD		1 Dokumen	**101,862,000**
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Bandung Barat	1 Dokumen	137.169.450	APBD		1 Dokumen	101,862,000
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Terlaksananya sosialisasi , bimtek dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan	Bandung Barat	2	**120.955.000**	APBD		2	**128,676,000**
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Telaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan	Bandung Barat	50 orang	120.955.000	APBD		50 orang	128,676,000
3.25.06.2.03	**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	tersedianya sarana pengolahan	Bandung Barat	4	**324.003.969**	APBD		4	**57.462.000**
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan hasil perikanan	Bandung Barat	5 unit	324.003.969	APBD		5 unit	57.462.000
3.27	**Urusan Pemerintah Pertanian**				**19.376.662.055**	**APBD**			**8.456.257.515**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyebaran Bibit unggul**	**Bandung Barat**	**15%**	**13.678.0998.310**	**APBD**		**20%**	**1.448.278.756**
		Persentase kelahiran Ternak		**78%**				**80%**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	terawasinya dan tersedianya sarana perternakan	Bandung Barat	6 paket	**1.532.268.250**	APBD		6 paket	**49,571,000**
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.532.268.250	APBD		16 Kecamtan	49,571,000
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Bibit Tanaman Hijauan Pakan Ternak serta Pendistribusian pakan Ternak	Bandung Barat	12%	**159.619.300**	APBD		12%	**125,603,500**
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	159.619.300	APBD		16 Kecamtan	125,603,500
3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	Terawasinya Peredaran Obat Hewan	Bandung Barat	70%	**93.546.460**	APBD		70%	**123,104,256**
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kios obat hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	93.546.460	APBD		16 Kecamtan	123,104,256
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Populasi Ternak	Bandung Barat	10%	**11.892.664.300**	APBD		10%	**1.150.000.000**
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terlaksananya Penjaminan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Bandung Barat	16 Kecamtan					
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terlaksananya Penjaminan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**9.605.688.500**	APBD		16 Kecamtan	150.000.000
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	2.286.975.800	APBD		16 Kecamtan	1.000.000.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan**	**Bandung Barat**	**20%**	**1.370.220.153**	**APBD**		**20%**	**1,229,673,350**
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terpeliharanya Prasarana Peternakan	Bandung Barat	2 UPT	**1.155.480.153**	APBD		2 UPT	**1,029,961,350**
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	UPT RPH	UPT RPH	593.786.903	APBD		UPT RPH	550,000,000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan UPT Pembibitan Ternak	UPT Pembibitan	UPT Pembibitan	561.693.250	APBD		UPT Pembibitan	479,961,350
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Biibt Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**214.740.000**	APBD		16 Kecamtan	**199,712,000**
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Bandung Barat	16 Kecamtan	214.740.000	APBD		16 Kecamtan	199,712,000
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)**	**Bandung Barat**	**72%**	**3.508.072.088**	**APBD**		**80%**	**3,937,739,637**
		Prevalensi Brucellosis	**Bandung Barat**	**3**				**2**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota**	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	**457.103.548**	APBD		16 Kecamtan	**1,294,653,827**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	120.887.108	APBD		16 Kecamtan	347,578,092
3.27.04.2.01.02	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah	Bandung Barat	16 Kecamtan	178.199.250	APBD		16 Kecamtan	632,630,335

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penyakit hewan menular di Kabupaten Bandung Barat							
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Terlaksananya respon cepat kasus penyakit hewan menular strategis	Bandung Barat	16 Kecamtan	158.017.190	APBD		16 Kecamtan	314,445,400
3.27.04.2.02	**Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota**	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	16 Kecamtan	**467.088.751**	APBD		16 Kecamtan	**752,561,560**
3.27.04.2.02.01	Penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Terlaksananya penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	11.859.000	APBD		16 Kecamtan	8,090,000
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya sosialisasi pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Bandung Barat	16 Kecamtan	423.829.751	APBD		16 Kecamtan	687,970,560
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/ kota	Tersedianya alat perbekalan kesehatan	Bandung Barat	1 Paket	31.400.000	APBD		1 Paket	56,501,000
3.27.04.2.03	**Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota**	Tersedianya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Bandung Barat	16 Kecamtan	**2.199.600.917**	APBD		16 Kecamtan	**1,305,592,562**
3.27.04.2.03.01	Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	Terlaksananya pelayanan jasa Laboratorium	Bandung Barat	16 Kecamtan	238.288.449	APBD		16 Kecamtan	110,130,125
3.27.04.2.03.02	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner	Bandung Barat	16 Kecamtan	1.961.312.468	APBD		16 Kecamtan	1,195,462,437
3.27.04.2.04	**Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	Terawasinya lalu lintas ternak	Bandung Barat	16 Kecamtan	**291.215.850**	APBD		16 Kecamtan	**579,644,800**
3.27.04.2.04.01	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Terlaksananya pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	105.700.000	APBD		16 Kecamtan	110,000,000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.2.04.02	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	81446.600	APBD		16 Kecamtan	119,000,000
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Bandung Barat	16 Kecamtan	104.069.250	APBD		16 Kecamtan	350,644,800
3.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**93.063.022**	APBD		16 Kecamtan	**149,000,000**
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bandung Barat	16 Kecamtan	93.063.022	APBD		16 Kecamtan	149,000,000
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi**	**Bandung Barat**	**100%**	**92.240.000**	**APBD**		**100%**	**57,675,100**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota**	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Bandung Barat	5 Kecamatan	**92.240.000**	APBD		5 Kecamatan	**57,675,100**
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan pasca bencana alam bersifat zoonosis	Terlaksananya respon cepat kasus penyakit hewan menular strategis	Bandung Barat	5 Kecamatan	92.240.000	APBD		5 Kecamatan	57,675,100
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan**	**Bandung Barat**	**100%**	**205.792.450**	**APBD**		**100%**	**355,978,172**
3.27.06.2.02	**Penerbitan izin usaha produk benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan**	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan	Bandung Barat	16 Kecamatan	**14.805.000**	APBD		16 Kecamatan	**147,435,000**
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,	Bandung Barat	50 orang	10.380.000	APBD		50 orang	104,246,000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terlaksanya Pengawasan pelaksanaan izin usaha Rumah Potong hewan	Bandung Barat	20 Kali	4.425.000	APBD		20 Kali	43,189,000
3.27.06.2.03	**Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan**	pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	Bandung Barat	16 Kecamtan	**190.987.450**	APBD		16 Kecamtan	**208,543,172**
3.27.06.2.03.01	Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obath hewan	Terlaksananya pengawasan obat hewan yang legal dan baik;	Bandung Barat	16 Kecamtan	107.300.000	APBD		16 Kecamtan	55,850,000
3.27.06.2.03.02	Pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Terlaksananya pendataan toko obat hewan.	Bandung Barat	16 Kecamtan	83.687.450	APBD		16 Kecamtan	152,693,172
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok**	**Bandung Barat**	**10 kelompok**	**522.239.054**	APBD		10 kelompok	**1,426,912,500**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya penyuluhan	Bandung Barat	16 Kecamtan	**522.239.054**	APBD		16 Kecamtan	**1,426,912,500**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi penyuluh peternakan	Bandung Barat	20 Petugas	90.972.104	APBD		20 Petugas	100,000,000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi bidang Peternakan	Bandung Barat	400 Peternak	431.266.950	APBD		400 Peternak	1,326,912,500
				TOTAL	**31,168,000,000**				**22.834.001.371**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
1.	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan**	**Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB (%)**			**12.88**	**12.89**	**13**
			Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan (%)	5	5	5
			Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	2.5	2.5	2.5
				Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	3	3	3
				Persentase Peningkatan Produksi Susu (%)	5	5	5
2.	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Mutu SAKIP**			**BB/70**	**BB/72**	**BB/75**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Mutu SAKIP	BB/70	BB/72	BB/75

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat ini memuat tentang keadaan/kondisi umum daerah, isu strategis dan permasalahan, prioritas program pembangunan dan rencana kegiatan serta anggarannya pada Tahun 2024.

Renja ini disusun dalam rangka untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas serta efisiensi dan efektivitas setiap pelaksanaan program dan kegiatannya yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Bangung Barat Tahun 2024.

Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi Pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bersumber dari APBD Kabupaten; APBD Propinsi; dan APBN Tahun 2024, sehingga prioritas pembangunan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat.

RENCANA KERJA Perubahan

Tahun 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DLH Bandung Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta ridho-Nya sehingga kami mampu menyelesaikan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yaitu dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Renstra DLH Kabupaten Bandung Barat 2024-2026. Dokumen ini berisikan deskripsi program dan kegiatan Perubahan Tahun 2024 beserta target-target capaian program, masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang pengajuannya didasarkan oleh Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 2024–2026. Efisiensi anggaran diprioritaskan dengan tetap mempertimbangkan perolehan capaian kinerja yang tertuang di dalam Renstra.

Semoga dokumen Renja Perubahan ini menjadi suatu alat penunjang keberhasilan guna pencapaian tujuan pembangunan dan menjadi indikator pencapaian kinerja SKPD khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Renja ini, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, Amin.

Bandung Barat, September 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

IBRAHIM AJI, S.E., M.M

NIP. 19701109 199803 1 011

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ---------- i

Daftar Isi ---------- ii

BAB 1 P E N D A H U L U A N ---------- 1

1.1. Latar Belakang ---------- 1

1.2. Landasan Hukum---------- 2

1.3. Maksud dan Tujuan---------- 3

1.4. Sistematika Penulisan---------- 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TW 2 TA. 2024 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Tahun 2023---------- 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dias Lingkungan Hidup 6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional/RENSTRA OPD 31

3.2. Tujuan Renja Perangkat Daerah ---------- 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

4.1. Program dan Kegiatan ---------- 33

4.2. Rencana perubahan pendanaan TA. 2024 ---------- 38

BAB V PENUTUP---------- 39

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berupa urusan Lingkungan Hidup. Tahun 2024 merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD 2024-2026 Kabupaten Bandung Barat yang menjadi pedoman pembangunan di masa transisi berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki visi " Kabupaten Agro Industri dan Wisata Ramah Lingkungan". Serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, maka misi yang memiliki arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup dan merupakan urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pada Misi ke 4 yaitu "Memelihara Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup". Hal ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 :

MISI DAERAH (RPD)	TUJUAN (RPD)	SASARAN (RPD)
Memelihara Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan
	Meningkatnya infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pemukiman

		Meningkatnya aksesibilitas kewilayahan

Tujuan Renstra DLH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 adalah: "MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN"

Proses dan tahapan penyusunan Renja Perubahan DLH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja DLH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian sasaran s.d. TW 2 tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
2. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya

tujuan dan sasaran program dan kegiatan DLH Kabupaten Bandung Barat yang tercantum dalam Renstra DLH periode 2024-2026 dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S.D. TW 2 TA. 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 semester 1 dan Capaian Renstra 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Renstra OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S.D. TW 2 TA. 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 s.d. semester 1 dan Capaian Renstra s.d. Tahun 2023

Capaian Sasaran Renstra s.d. tahun 2023 adalah sebagaimana berikut :

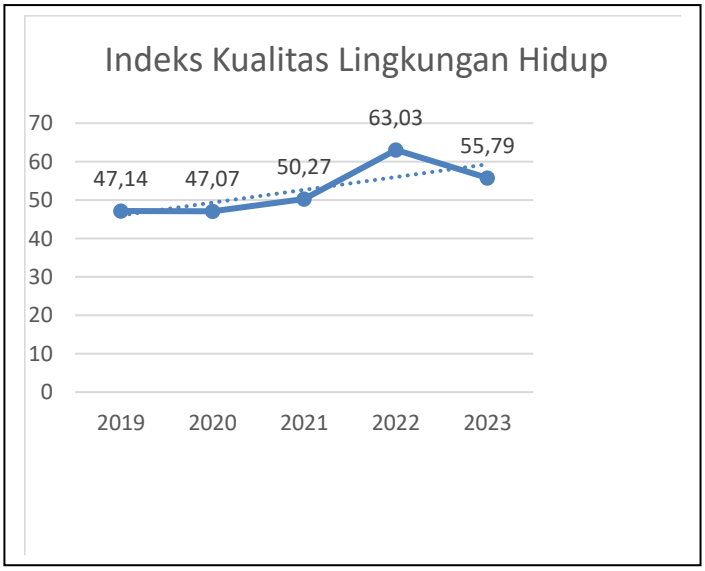

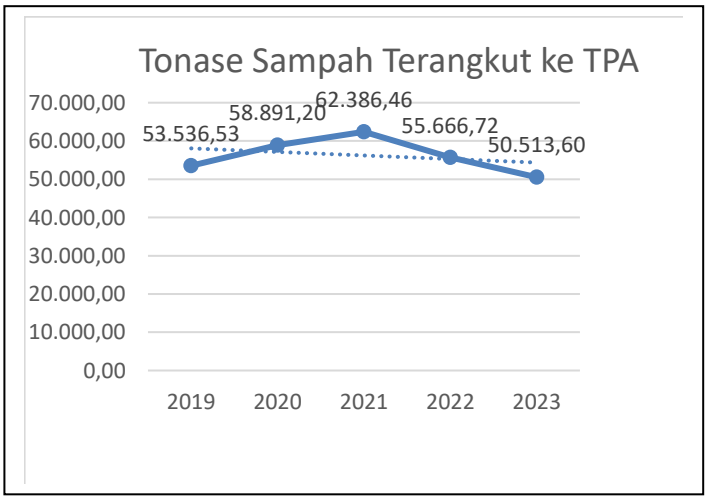

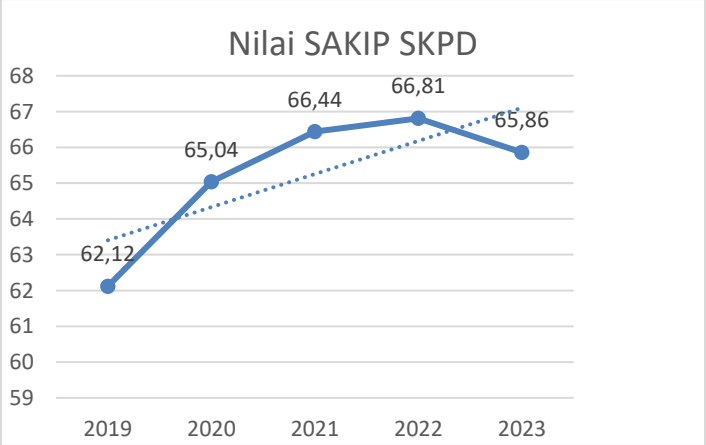

CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN PROGRAM

Hasil capaian kinerja sasaran dan capaian kinerja program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 baru akan diketahui setelah Triwulan ke-4 tahun 2024 selesai sehingga capaian kinerja sasaran dan program belum bisa terllaporkan. Akan tetapi pelaksanaan kenerja program dapat dimonitoring dan dievaluasi melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan s.d. TW 2 tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Program : Perencanaan Lingkungan Hidup

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	$\frac{Jumlah\ dokumen\ perencanaan\ LH\ sd.th\ ke{-}n}{Jumlah\ dokumen\ perencanaan\ LH\ th\ 2024{-}2026}$ x 100%	100%	42,86%	NA	NA

Target program perencanaan lingkungan hidup merupakan target kumulatif berupa terpenuhinya dokumen-dokumen pendukung perencanaan lingkungan hidup yaitu kajian/kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, dokumen IKPLHD.

Capaian indikator program perencanaan lingkungan hidup didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini ditopang oleh 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran (s.d. TW 2) sebesar Rp. 74.253.300. Target sub kegiatan ini berupa tersusunnya :

      - 1 dokumen Materi Teknis Raperda RPPLH.

      Realisasi target sub kegiatan ini s.d. TW 2, adalah 0 dokumen karena masih dalam proses rencana pengerjaan. (Catatan : Di dalam sub kegiatan ini terdapat anggaran luncuran untuk pembayaran pelaksanaan penyusunan dokumen Data Kualitas Lingkupan 2023 dan dokumen IKPLHD 2023 yang telah selesai pada tahun 2023).

2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini ditopang oleh 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, dengan realisasi anggaran (s.d. TW 2) sebesar Rp. 65.830.000. Target sub kegiatan ini berupa tersusunnya :

      - 1 dokumen KLHS RPJPD.

        Realiasasi out put sub kegiatan ini 1 dokumen KLHS RPJMD (masih tahap validasi di provinsi).

      - 1 dokumen KLHS RPJMD.

        Realiasasi out put sub kegiatan ini masih 0.

Capaian Program : Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	$\frac{Jumlah\ titik\ sampel\ status\ mutu\ air\ baik\ pada\ th\ ke{-}n}{Jumlah\ semua\ titik\ sampel\ pada\ th\ ke{-}n}$ x 100%	0%	6%	NA	NA
	Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik	$\frac{Jumlah\ titik\ sampel\ status\ udara\ baik\ pada\ th\ ke{-}n}{Jumlah\ semua\ titik\ sampel\ pada\ th\ ke{-}n}$ x 100%	n.a	70%	NA	NA

Pencapaian indikator program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan out put berupa:
      - 1 dokumen hasil pemantauan kualitas air,
      - 1 dokumen hasil pemantauan kualitas udara,

      Realiasasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 38.313.120. Dengan ralisasi out put masih 0 (telah dilaksanakan pemantauan kualitas air dan udara untuk pemantauan tahap 1).
   b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan out put berupa:
      - 1 dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup,

Realiasasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 750.000. Dengan ralisasi out put masih 0 karena masih dalam proses persiapan-persiapan untuk koordinasi.

c Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, dengan out put berupa:

- 1 dokumen SLHD (IKPLHD),

Realiasasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0. Dengan ralisasi out put masih 0 karena masih dalam proses persiapan-persiapan untuk pendukung pemantauan.

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan out put berupa :

- Fasilitasi 1 unit IPAL UMKM.

Realiasasi anggaran s.d. TW 2 sebesar Rp. 0, dengan ralisasi out put masih 0.

3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, dengan out put berupa :

- 1 dokumen Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
- Penghijauan non area hutan 1 lokasi.

Realiasasi anggaran s.d. TW 2 sebesar Rp.123.649.450, dengan ralisasi out put masih 0. (Cataatan: di sub kegiatan ini terdapat output berupa Kajian Tutupan Lahan tahun 2023 yang telah terlaksanana pada tahun 2023 tetapi anggaran masih terhutang).

Capaian Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Perentase RTH Taman yang terawat (taman kehati)	$\frac{Jumlah\ RTH\ taman\ kehati\ yang\ terawat\ pada\ th\ ke-n}{Jumlah\ RTH\ taman\ kehati}$ x 100%	NA (belum memiliki taman kehati)	100%	NA	NA

Pencapaian indikator program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan out put berupa :

- 1 dokumen FS Taman Keanekaragaman Hayati.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 30.323.640 dengan ralisasi out put s.d. TW 2 adalah 0 (telah dilaksanakan penanaman di lokasi yang menjadi rencana sebagai area taman Kehati).

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan out put berupa :

- 1 dokumen Kajian Inventarisasi Pohon (Hutang belanja DLH 2023)

Realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 36.913.050. (Catatan: output sub kegiatan ini telah terealisasi pada tahun 2023).

Capaian Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Persentase Usaha/Industri yang mengelola LB3 sesuai peraturan	$\frac{Jumlah\ industri\ yang\ mengelola\ LB3\ sesuai\ peraturan\ pada\ th\ ke-n}{Jumlah\ industri}$ x 100%	NA	37%	NA	NA

Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)						

Pencapaian indikator program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan out put berupa :

- 10 dokumen Persetujuan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- 1 kali Pelatihan Pengelolaan Limbah B3.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 6.025.000 dengan ralisasi out put s.d. TW 2 :

- 10 dokumen Persetujuan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- Belum dilaksanakan.

b. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan out put berupa :

- 30 kali Pembinaan/pengawasan pengelolaan Limbah B3.

Realisasi anggaran s.d. TW 2 adalah 52.588.120, dengan ralisasi out put:

- 20 kali Pembinaan/pengawasan pengelolaan Limbah B3.

Capaian Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2021	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Industri/usaha dalam Pelaporan Pelaksanaan PPLH	$\frac{Jumlah\ industri\ yang\ taat\ dalam\ pelaporan\ pelaksanaan\ PPLH\ pada\ th\ ke{-}n}{Jumlah\ industri}$ x 100%	NA	62%	NA	NA

Capaian indikator program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang ditopang oleh 2 (dua) sub kegiatan yakni :
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, adapun out put nya berupa :
      - 10 dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 20.000.000, dengan realisasi out put:

      - 88 dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan.

	AMDAL	UKL/UPL	SPPL
Jumlah	0	5	83

b. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun out put nya berupa :

- Dokumen pelaksanaan pengawasan 15 industri.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 29.550.400, dengan realisasi out put:

- 10 Dokumen pelaksanaan pengawasan industri.

Capaian Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2022	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Desa yang telah menerapkan Aksi Peduli Lingkungan	$\frac{Jumlah\ desa\ yang\ dibina\ dan\ menerapkan\ aksi\ peduli\ lingkungan\ pada\ th\ ke{-}n}{Jumlah\ desa\ yang\ dibina\ pada\ th\ ke{-}n}$ x 100%	2 desa	100%	na	na

Capaian indikator program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang ditopang oleh 2 sub kegiatan yakni :

a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Adapun out put nya berupa :

- 1 dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 32.250.000 dengan out put: masih 0.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat. Adapun out put nya berupa :

- 15 lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (pembinaan sekolah adiwiyata).

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out put: terlaksananya pembinaan sekolah Adiwiyata sejumlah 28 sekolah.

Capaian Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	Jumlah Masyarakat /Dunia Usaha /Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	21 sekolah (tk. Kab) 7 sekolah (tk. Prov) 2 sekolah (tk. Nas)	15 entitas	na	na

Capaian indikator program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang ditopang oleh 1 sub kegiatan yakni :

a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun out put nya berupa :

- Penilaian sekolah adiwiyata.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 900.000 dengan out put: masih 0.

Capaian Program: Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	$\frac{Jumlah\ pengaduan\ yang\ ditindaklanjuti\ pada\ th\ ke{-}n}{Jumlah\ pengaduan\ pada\ th\ ke{-}n}$ x 100%	21 tindak lanjut pengaduan	100%	na	na

Capaian indikator program Pengaduan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota, yang ditopang oleh 1 sub kegiatan yakni:
   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota. Adapun out put nya berupa :
      - 5 pengaduan yang ditindak lanjuti.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 3.662.000 dengan out put:

      - 12 pengaduan yang telah ditindak lanjuti.

Capaian Program : Pengelolaan Persampahan

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2022	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program pengelolaan persampahan	Persen cakupan pengelolaan sampah	$\frac{\frac{Jumlah\ timbulan\ sampah\ yang\ terkelola\ pada\ th\ ke-n}{Jumlah\ timbulan\ sampah\ pada\ th\ ke-n}}$ X 100%	na	12%	na	na

Capaian program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah, yang ditopang oleh 7 sub kegiatan antara lain :
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan out put berupa:

      Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 70 kelompok.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 64.465.000 dengan out put:

      Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 78 kelompok.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan out put berupa:

      1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 643.195.500 dengan out put: 0 (terlaksananya koordinasi pembangunan bank sampah perkantoran KBB serta terlaksananya pembayaran hutang tahun 2023 berupa 4 paket belanja : belanja modal motor roda tiga sebanyak 3 unit, motor roda tiga sebanyak 11

unit, bak container 1 unit dan mesin pemotong rumput gendong sebanyak 10 unit).

c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan out put berupa:

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.

DATA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2024:

SARANA DAN PRASARANA	SUDAH/BELUM
Tempat Sampah Terpilah 2 Warna 25 set	sudah
Tempat Sampah Terpilah 3 Warna 20 set	sudah
Tempat Sampah Terpilah 3 Warna 5 set	sudah
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Bank Sampah Cempaka Mekar Padalarang 1 unit)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Bank Sampah Giri Mukti Kec Saguling 1 unit)	
Mesin Pencacah Plastik (Batujajar Giri Asih 2 unit)	
Mesin Pencacah Plastik (Batujajar Pangauban 2 unit)	
Mesin Pencacah Plastik (Batujajar Timur 3 uit)	
Mesin Pencacah Plastik (Kabupaten Bandung Baratr 6 uit)	
Mesin Pencacah Sampah Kapasitas 400 kg/jam (KBB 6 unit)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (KBB 14 unit)	
Gerobak Sorong (KBB 131 buah)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Kecamatan Ngamprah Kab Bandung Barat 5 unit)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Kp Andir Rw 15 Gudang kahuripan Lembang 1 unit)	
Mesin Pencacah Plastik (Kp. Citiis RW 08 Cililin Batulayang 2 uit)	
Mesin Pencacah Plastik (Kp. Ciwaruga RT 05 RW 05 Parongpong 2 uit)	
1 Unit Pembangunan TPS 5 3 M (Kp Neglasari Tagog Apu Padalarang Kab Bandung Barat)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Rw 03 Desa Langensari Lembang 1 unit)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Rw 11 Desa Cibogo Lembang 1 unit)	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Rw 13 Desa Cibogo Lembang 1 unit)	
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	
BKK JABAR Arm roll 3 unit	
BKK JABA Dump truck 4 unit	
BKK JABA Kontainer 12 m 2 unit	
BKK JABA Kontainer 6 m 2 unit	
Mesin Pemilah Sampah 7 m3/jam (KBB 1 unit)	
Mesin Pencacah Sampah Kapasitas 300 kg/jam 9 (KBB 6 unit)	
Mesin Pencacah Sampah Kapasitas 400 kg/jam (KBB 7 unit)	
Mesin Insinerasi 500 kg/hari (KBB 1 unit)	
Pembangunan TPS 3 M (KBB 2 unit)	

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 122.000.000 dengan out put:

Tempat Sampah Terpilah 2 Warna 25 set

Tempat Sampah Terpilah 3 Warna 20 set

Tempat Sampah Terpilah 3 Warna 5 set

d. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan out put berupa:

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Berupa:

- 1 dokumen Kajian Penyusunan Terkait Sampah Organik
- 1 dokumen Kajian Perbup Pengurangan Kantong Plastik
- 1 dokumen Kajian SOP Pengurangan SRT dan SSRT.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 157.727.000 dengan out put : 0 (terlaksananya pembayaran hutang tahun 2023 berupa : 1 dokumen pengadaan perencanaan lahan, 1 dokumen peraturan bupati pengurangan sampah, 1 dokumen peraturan bupati penanganan sampah).

e. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah, dengan out put berupa:

55 unit fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 1.762.944.100 dengan out put:

50 unit fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (perawatan 6 bulan).

f. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan, dengan out put berupa:

59.500 ton sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 7.027.517.795 dengan out put:

20.483,232 ton sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (catatan: pengangkutan s.d bulan Mei 2024).

REKAPITULASI DATA SAMPAH DARI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT KE TPPAS REGIONAL SEMENTARA SARIMUKTI TAHUN 2024

No.	BULAN	TOTAL TONASE	RITASE
1.	JANUARI	4.078,368	1.143
2.	FEBRUARI	3.950,324	1.094
3.	MARET	4.221,168	1.178
4.	APRIL	3.898,916	1.084
5.	MEI	4.334,456	1.218
6.	JUNI		
7.	JULI		
8.	AGUSTUS		
9.	SEPTEMBER		
10.	OKTOBER		
11.	NOVEMBER		
12.	DESEMBER		
	JUMLAH		
	RATA-RATA PER BULAN		

g. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat, dengan out put berupa :

500 ton sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out :

2.298,62 ton sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, ditopang oleh 1 sub kegiatan yaitu:
   a. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah, dengan out put berupa:

      1 dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out : belum terlaporkan.

Capaian Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	REALISASI 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Nilai SAKIP DLH	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (65,86)	B (70,00)	na	na

Capaian program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yang ditopang oleh 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, ditopang oleh 6 (enam) sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan out put berupa :

   Tersunsunnya Dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024.

   Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Ranwal Renja 2025

   Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 70.133.600 dengan out put:

   Tersunsunnya Dokumen Renja 2025.

   Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Ranwal Renja 2025

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan out put berupa :

   Tersusunnya RKA-SKPD

   Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 6.554.000 dengan out put 1 dok. RKA-SKPD.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan out put berupa :

   Tersusunnya RKAP-SKPD.

   Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out put masih 0

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, dengan out put berupa :

   Tersusunnya DPA-SKPD.

   Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 6.554.000 dengan out put 1 dok. DPA-SKPD.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan out put berupa :

   Tersusunnya DPAP-SKPD

   Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out put masih 0

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan out put berupa :

Tersusunnya LAKIP dan CALK SKPD

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 4.045.700. dengan out put 1 dok LAKIP.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, ditopang oleh 4 (empat) sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan out put berupa :

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan sebanyak 12 bulan

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 5.376.754.692 dengan out put pembayaran Gaji dan Tunjangan sebanyak 6 bulan.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan out put berupa :

Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun LAT.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 20.000.000 dengan out put masih 0

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan out put berupa :

Tersusunnya laporan keuangan semesteran.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 13.217.000 dengan out put masih 1 dok laporan TW 2.

d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan out put berupa :

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran DLH.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 2.855.500 dengan out put masih 1 dok laporan prognosis 2024

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang ditopang oleh 2 (dua) sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan out put berupa :

      1 dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 2.867.500 dengan out put:

      1 dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

   b. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan out put berupa :

      1 dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan).

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 3.073.000 dengan out put: masih 0.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang ditopang oleh 1 (satu) sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan out put berupa :

      1 paket pakaian dinas.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out put: masih 0.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang ditopang oleh 8 (delapan) sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi, dengan out put berupa :

      1 paket peralatan listrik.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 7.354.900 dengan out put:

Tersedianya komponen instansi listrik 1 paket terdiri dari Baterai AAA blister pack 2 12 pak, Baterai Kecil (AA) Biru single pack 12 12 pak, Fitting 11, Kabel Roll 25m 9 roll, Lampu DL 18 Watt 24 buah, Terminal Sambungan Kabel 2,5mm 16 buah, dan Thermal Overload 10 A 6 buah.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan out put berupa :

1 paket peralatan dan perlengkapan kantor.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 83.900.000 dengan out put:

Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 paket terdiri dari Camera Mirrorless 1 unit, Camera 360, Camera Gopro 1 unit, dan Stick Insta 360 1 unit

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan out put berupa :

1 paket peralatan rumah tangga.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 52.587.200 dengan out put :

Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket terdiri dari Alat Pel Lantai Micro Fiber 2 buah, Alat Pembersih Kaca 2 buah, Asbak meja bagus 2 buah, Baki air mineral 2 buah, Cangkir 2 lusin, Disinfektan 10 botol, Garpu Makan 2 lusin, Kemoceng besar 4 buah, Pengharum Ruangan refill 7 buah, Sabun Cuci Tangan 4 botol, Sapu Plastik Tebal 4 buah, Sendok Makan 2 lusin dan Tissue Kotak 8 dus dan belanja modal alat Premium Biometric Fingerprint Digital Door Lock 8 unit.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan out put berupa :

1 paket alat tulis kantor.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 44.615.200 dengan out put :

Tesedianya bahan logistik kantor 1 paket terdiri dari Binder Clip Capacity No 105 2 pak, Binder Clip Capacity No 111 7 pak, Binder Clip Capacity No 200 1 pak, Box file Bindex karton 1 buah, Box file Bindex plastik 12 buah, Buku Ekspedisi 32 X 14 cm (100 lbr) 2 buah, Buku Kwitansi Besar (Paperline) 8 buah, Buku Kwitansi Kecil 5 buah, Buku Kwitansi Sedang 2 buah, Buku Kwitansi Sedang 15 buah, Glue Stick 15 Gr 1 pak, Gunting Kertas 3 buah, Highlighter 8 pak, Highlighter Original 70 1 pak, Box 10 Pcs 1 pak, Isi Staples No. 10, 20 kotak 4 dus, Isolasi solatip 1 buah, Lakban 7 buah, Lakban Bening 48 X 12 Mm 2 buah, Lakban Double Tape 12 X 12 Mm 10 buah, Lakban Double Tape 48 X 12 Mm 7 buah, Lakban Kain Hitam (Cloth Tape) 24 X 12 Mm 2 buah, Map Batik 9 buah, Map Biasa Kertas 4 pak, Map Clear Holder F4 33 X 21,59 Cm (20 Sheet) 1 pak, Map Kertas Polos Biola 4 pak, Map Sneilhekter Plastik 3 pak, Paper Clip Triangular 25 mm 3 pak, Paper Clip Trigonal Colour No. C-3100 1 pak,Paper Clip Trigonal No 3 3 pak, Paper Clip Trigonal No 5 4 pak, Penghapus Pensil ER-30W 2 buah, Pensil 12 pcs 4 buah, Post-it 654 (Size 76 x 76 mm) 7 buah, Pulpen AE7 0.5 - blue/red/black 1 pak, Pulpen Balliner BL-5M black/blue 5 pak, Pulpen Ball Pen Legand BP-192 4 pak, Pulpen Ball Pen Lino 0.7 BP-249 10 pak, Pulpen Clip Gel JK 100 black/blue/red 1 pak, Rautan Pensil 2 buah, Spidol Permanent (snowman) 1 buah, Tip Ex Kertas Pita 12pcs CT-522 1 pak, Amplop Putih No 110 Ukuran 114X162Mm 5 pak, Kertas A4 70 Gram 79 rim, Kertas A4 80 Gram 4 rim, Kertas Cover/Jilid A4 2 rim, Kertas HVS F4 70 Gsm 99 rim, Kertas HVS F4 80 Gsm 6 rim, Kertas Warna A4 70 gr 10 rim, Materai 10000 300 buah, Flash disk 128GB 2 buah, Kabel HDMI 2 unit, Tinta black/cyan/magenta/yellow 2 botol dan Toner LaserJet Cartridge Colour Biasa 2 unit.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan out put berupa :

1 paket barang penggandaan.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 41.499.700 dengan out put:

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket terdir dari Map Kop Dinas 120 buah, Blanko Kop Garuda 1 rim, Kop Surat Kop Surat SKPD 1 rim, Formulir/ Blanko SPPD 5 rim, Formulir/ Blanko SPPD 10 rim,Tanda Bukti Penerimaan 5 rim, Penggandaan/ Fotocopy HVS A4 7700 Lembar, Penggandaan/ Fotocopy HVS A4 bolak-balik 2640, Lembar dan Penggandaan/ Fotocopy HVS F4 7500 Lembar.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan out put berupa :

10 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 2.500.000 dengan out put:

Pembayaran langganan 3 bulan 11 jenis koran/tabloid .

g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan out put berupa :

1 laporan kunjungan tamu.

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 160.675.000 dengan out put: 0

terfasilitasi kunjungan 205 tamu.

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan out put berupa :

1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 131.481.500 dengan out put:

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam dan luar daerah sejumlah 96 HOK (Januari – Juni 2024).

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang ditopang oleh 1 (satu) sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan out put berupa :

      13 Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 235.322.076 dengan out put: masih 0 (terlaksananya pembayaran hutang 2 paket belanja tahun 2023 berupa : a. Penataan ruang fungsional dan ruang bidang. b. Penataan ruang reseptionis kepala dinas

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang ditopang oleh 2 (dua) sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan out put berupa :

      1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 5.130.900 dengan out put:

      Pembayaran jasa komunikasi 6 bulan.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan out put berupa :

      1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 6.000.000 dengan out put:

Pembayaran jasa kebersihan kantor 6 bulan.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang ditopang oleh 2 (dua) sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan out put berupa :

      20 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 0 dengan out put masih 0.

   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan out put berupa :

      22 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (8 unit computer dan 14 unit printer).

      Realisasi anggaran sub kegiatan ini s.d. TW 2 adalah Rp. 7.140.000 dengan out put:

      Pemeliharaan Personal Computer / Notebook 6 unit dan Printer 4 unit

Faktor pendorong/pendukung dalam pencapaian kinerja :

- Ketersediaan pagu anggaran untuk setiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Adanya koordinasi yang baik antar bidang dan antar seksi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dalam pelaporan capaian output-output sub kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Telah berjalannya monitoring aksi 3R.

Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian kinerja :

- Adanya sub kegiatan-sub kegiatan yang sudah berlangsung/berjalan, akan tetapi belum ada pelaporan datanya, sehingga capaian out put masih dianggap 0.

- Di setiap bidang belum mengisi form laporan pelaksanaan rencana aksi per triwulan sehingga kesulitan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dari rencana aksi yang telah dibuat oleh setiap bidang.
- Terdapat item belanja yang standar satuan harganya sudah tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
- Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah belum terlaksanan karena belum memiliki form monitoring dan evaluasi pelayanan sampah swasta.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Rekapitulasi data yang belum terlaporkan akan dimasukkan ke dalam laporan triwulan berikutnya.
- Memberikan pengumuman internal kepada setiap bidang untuk melaksanakan pengisian form laporan pelaksanaan rencana aksi.
- Mengajukan usulan tambahan standar satuan harga barang di rencana kerja perubahan 2024.
- Disarankan hendaknya membuat form sementara untuk monitoring dan evaluasi pelayanan swasta hingga ditetapkannya suatu kebijakan pelayanan sampah oleh swasta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan sub kegiatan-sub kegiatan s.d. semester 1 tahun 2024 serta pertimbangan adanya efisiensi pagu anggaran 2024, maka dihasilkan kesimpulan untuk perubahan rencana kerja 2024 sebagai berikut :

1. Adanya rencana pembangunan TPS 3R untuk perkantoran KBB, sehingga harus mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk sarana-prasarana TPS 3R perkantoran KBB.
2. Penyesuaian anggaran berupa efisiensi pada sub kegiatan-sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Fasilitasi Pemenuhan

Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Penyesuaian anggaran berupa penambahan anggaran pada sub-sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat, Penanganan sampah melalui pengangkutan, Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Renstra OPD

Di dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Arah kebijakan untuk prioritas nasional meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Adapaun strategi yang diterapkan yaitu: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Iklim, Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan limbah cair.

3.2. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah menurut RPD tahun 20224-2026, maka berdasarkan tugas dan fungsinya DLH memiliki peran penting dalam mewujudkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menunjang prioritas-prioritas pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, sesuai urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni Urusan Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berada pada Tujuan ke-3 RPD 2024-2026 yaitu “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan” dan Tujuan ke-4 RPD 2024-2026 yaitu :”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik‘. Adapun Sasaran

RPD 2024-2026 yang dituju adalah Sasaran 3.1 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup) dan Sasaran 4.1 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah).

Tujuan dan sasaran renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 mengikuti tujuan dari renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 yang telah diselaraskan dengan RPD 2024-2026 sebagaimana berikut :

Sasaran RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Satuan	2024	2025	2026	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	63,1	63,2	63,3	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Skor	49,4	49,5	49,6
								Indeks Kualitas Udara	Skor	77,1	77,2	77,3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Poin	70	71	72	Meningkatnya capaian komponen perencanaan penganggaran, pengukuran kinerja, pelaopran dan evaluasi kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	22	22	22
								Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20	20	20
								Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Poin	11	11	11
								Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	Poin	17	18	19

BAB IV
RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan mempertimbangkan efisiensi pagu anggaran 2024 dan adanya rencana pembangunan TPS 3R Perkantoran KBB pada tahun 2024, dan memperhatikan capaian pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan s.d. TW 2 tahun 2024, maka pada Renja Perubahan TA 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

Kode Rekening						Bidang Urusan/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja
1						2	3
Program prioritas 2 (P2)							
2	11	02				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**
2	11	02	*2*	01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian/telaahan PPLH yang disusun
2	11	02	2	01	03	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan
2	11	02	2	02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun
2	11	02	2	02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
Program prioritas 1 (P1)							
2	11	03				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik** **Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik**
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan air dan jumlah sampel pemantauan udara
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
2	11	03	2	01	11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi IPAL Peternak / UMKM berdasar hasil koordinasi
2	11	03	2	02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghijauan non area hutan berdasar hasil koordinasi
2	11	03	2	03	13	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Program prioritas 2 (P2)							
2	11	04				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH Taman yang terawat**
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya perawatan RTH
		03	1	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragamaan Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kenanekaragaman yang Disusun
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota
Program prioritas 1 (P1)							
2	11	05				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Usaha/Industri yang mengelola LB3 sesuai peraturan**
2	11	05	2	01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha/Industri yang taat melaporkan pengelolaan LB3
2	11	05	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
Program prioritas 1 (P1)							
2	11	06				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Industri/usaha dalam Pelaporan Pelaksanaan PPLH**
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan dan persentase usaha/industri yang diawasi berdasarkan target tahun ke-n
2	11	06	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan

						Izin PPLH	Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
2	11	06	2	01	05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
Program prioritas 2 (P2)							
2	11	08				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Desa yang telah menerapkan Aksi Peduli Lingkungan**
2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilbina sebagai desa peduli lingkungan
2	11	08	2	01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Program prioritas 2 (P2)							
2	11	09				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH**
2	11	09	2	01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang memenuhi kriteria Penilaian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
Program prioritas 1 (P1)							
2	11	10				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti**
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan yang segera direspon/ditindaklanjuti
2	11	10	2	01	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
2	11	11				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase cakupan pengelolaan sampah**
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah kota
2	11	11	2	01	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan

2	11	11	2	01	17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
2	11	11	2	01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
2	11	11	2	01	09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pengelola sampah suasta yang memenuhi satandar pelayanan sampah
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
2	11	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DLH**
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanan perangkat daerah
2	11	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	11	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	11	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2	11	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	11	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2	11	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	11	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
2	11	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	11	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu
2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
2	11	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
2	11	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2	11	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai kebutuhan perencanaan barang
2	11	01	3	07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik dan peralatan kantor kondisi baik
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

4.2. Rencana Perubahan Pendanaan TA. 2024

Adapun perubahan rencana pendanaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel yang ada pada lampiran Renja Perubahan TA. 2024 ini.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berisi program dan kegiatan tahun 2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup. Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan lebih baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 2, Mekarsari, Ngamprah, 40552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 000.9/ 1644 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja (renja) dinas lingkungan hidup kabupaten bandung barat.

b. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja (renja) di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286).
2. Undang-undang nomor 1tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara repu blik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355).
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia

tahun2005 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421).

4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republik lndonesianomor 4817).
5. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402).
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
7. Peraturan menteri dalam negeri ri nomor 32 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1447).
9. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah.
10. Peraturan bupati kabupaten bandung barat nomor 17 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah kabupten bandung barat tahun 2024-2026.
11. Peraturan bupati kabupaten bandung barat nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman peyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diktum pertama di maksud mempunyai tugas :

a. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya.
b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya.
c. Menyajikan data time series selama periode Rentra atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah.
d. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah.
e. Melakukan pembahasan dan identifikasi isu strategis ataupun permasalahan terkait lingkungan hidup yang berkembang di masyarakat.
f. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
g. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
h. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
i. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah.
j. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik kota palu disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
k. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bandung Barat, 23 April 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

IBRAHIM AJI, S.E., M.M.
NIP. 19701109 199803 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 000.9/ 1644 /2024
Tanggal : 23 April 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebersihan	Anggota
7.	Kepala UPT Kebersihan	Anggota
8.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota
9.	Kasubbag TU UPT Kebersihan	Anggota
10.	Pengelola Barang Milik Daerah	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung Barat

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

IBRAHIM AJI, S.E., M.M.
NIP. 19701109 199803 1 011

RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHU 2024
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kode Rekening						Bidang Urusan/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)	SEBELUM					RENCANA PERUBAHAN 2024 SESUDAH				PENAMBAHAN /PENGURANGAN
										Target	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12	13	14 (11+12+13)	15 (14-10)
Program prioritas 2 (P2)																			
2	11	02				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	Persentase	**100%**	***42,86%***	***1.049.407.300***	***-***	***-***	***1.049.407.300***	***962.509.300***	***-***	***-***	***962.509.300***	***- 86.898.000***
2	11	02	2	01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian/telaahan PPLH yang disusun	Dokumen	**4**	1	374.181.300	-	-	374.181.300	374.181.300	-	-	374.181.300	-
2	11	02	2	01	03	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen	NA	1	374.181.300			374.181.300	374.181.300			374.181.300	-
2	11	02	2	02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	Dokumen	2	2	675.226.000	-	-	675.226.000	588.328.000	-	-	588.328.000	- 86.898.000
2	11	02	2	02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	NA	2	675.226.000			675.226.000	588.328.000			588.328.000	- 86.898.000
Program prioritas 1 (P1)																			
2	11	03				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik**	Persentase	***6%***	***6%***	***1.018.417.050***	***-***	***-***	***1.018.417.050***	***1.018.417.050***	***-***	***-***	***1.018.417.050***	***-***
							Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik		***70%***	***70%***								
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan air dan jumlah sampel pemantauan udara	Dokumen	13	3	598.791.200	-	-	598.791.200	598.791.200	-	-	598.791.200	-
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	8	2	448.796.200			448.796.200	448.796.200			448.796.200	-
2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	1	99.995.000			99.995.000	99.995.000			99.995.000	-
2	11	03	2	01	11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	4	1	50.000.000			50.000.000	50.000.000			50.000.000	-
2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi IPAL Peternak / UMKM berdasar hasil koordinasi	Titik	NA	1	110.000.100	-	-	110.000.100	110.000.100	-	-	110.000.100	-
2	11	03	2	02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	NA	1	110.000.100			110.000.100	110.000.100			110.000.100	
2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghijauan non area hutan berdasar hasil koordinasi	Lokasi	4	1	309.625.750	-	-	309.625.750	309.625.750	-	-	309.625.750	-
2	11	03	2	03	13	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Dokumen	NA	1	309.625.750			309.625.750	309.625.750			309.625.750	-
Program prioritas 2 (P2)																			
2	11	04				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH Taman yang terawat**	Persentase	72,22%	***100%***	***261.904.050***	***-***	***-***	***261.904.050***	***261.904.050***	***-***	***-***	***261.904.050***	***-***
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya perawatan RTH	Lokasi	36	36	261.904.050	-	-	261.904.050	261.904.050	-	-	261.904.050	-
		03	1	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragamaan Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kenanekaragaman yang Disusun	Dokumen	1	1	224.991.000			224.991.000	224.991.000			224.991.000	-
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Ha	NA	1	36.913.050			36.913.050	36.913.050			36.913.050	-
Program prioritas 1 (P1)																			
2	11	05				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Usaha/Industri yang mengelola LB3 sesuai peraturan**	Persentase	***31,78%***	***37%***	***234.952.000***	***-***	***-***	***234.952.000***	***234.952.000***	***-***	***-***	***234.952.000***	***-***
2	11	05	2	01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha/Industri yang taat melaporkan pengelolaan LB3	Industri		30	234.952.000	-	-	234.952.000	234.952.000	-	-	234.952.000	-
2	11	05	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	NA	10	72.680.000			72.680.000	72.680.000			72.680.000	-

Kode Rekening						Bidang Urusan/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)	SEBELUM					RENCANA PERUBAHAN 2024 SESUDAH				PENAMBAHAN /PENGURANGAN
										Target	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	Laporan	61	30	162.272.000			162.272.000	162.272.000			162.272.000	-
							Program prioritas 1 (P1)												
2	11	06				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Industri/usaha dalam Pelaporan Pelaksanaan PPLH**	Persentase	***58,70%***	***62%***	***625.524.000***	***-***	***-***	***625.524.000***	***476.246.000***	***-***	***-***	***476.246.000***	***- 149.278.000***
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan dan persentase usaha/industri yang diawasi berdasarkan target tahun ke-n	Persentase	NA	100%	625.524.000	-	-	625.524.000	476.246.000	-	-	476.246.000	- 149.278.000
2	11	06	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	184	10	376.774.000			376.774.000	227.496.000			227.496.000	- 149.278.000
2	11	06	2	01	05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	NA	15	248.750.000			248.750.000	248.750.000			248.750.000	-
							Program prioritas 2 (P2)												
2	11	08				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Desa yang telah menerapkan Aksi Peduli Lingkungan**	Persentase	***100%***	***100%***	***1.289.797.200***	***-***	***-***	***1.289.797.200***	***1.289.547.100***	***-***	***-***	***1.289.547.100***	***- 250.100***
2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah desa yang dilbina sebagai desa peduli lingkungan	Desa	7	1	1.289.797.200	-	-	1.289.797.200	1.289.547.100	-	-	1.289.547.100	- 250.100
2	11	08	2	01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	NA	15	415.047.200			415.047.200	874.499.900			874.499.900	459.452.700
2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	NA	1	874.750.000			874.750.000	415.047.200			415.047.200	- 459.702.800
							Program prioritas 2 (P2)												
2	11	09				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH**	Entitas	7	***15***	***50.000.000***	***-***	***-***	***50.000.000***	***50.000.000***	***-***	***-***	***50.000.000***	***-***
2	11	09	2	01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang memenuhi kriteria Penilaian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	7	15	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000	-
2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	NA	15	50.000.000			50.000.000	50.000.000			50.000.000	-
							Program prioritas 1 (P1)												
2	11	10				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti**	Persentase	NA	***100%***	***90.000.000***	***-***	***-***	***90.000.000***	***90.000.000***	***-***	***-***	***90.000.000***	***-***
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan yang segera direspon/ditindaklanjuti	Persentase	NA	75%	90.000.000	-	-	90.000.000	90.000.000	-	-	90.000.000	-
2	11	10	2	01	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen	NA	15	90.000.000			90.000.000	90.000.000			90.000.000	-
2	11	11				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMI**	**Persentase cakupan pengelolaan sampah**	Persentase	***12%***	***12%***	***57.134.464.829***	***4.690.000.000***	***-***	***61.824.464.829***	***31.444.825.700***	***-***	***-***	***31.444.825.700***	***- 30.379.639.129***
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah kota	Tonase	55.666,72	59500; 500	57.087.418.829	4.690.000.000	-	61.777.418.829	31.397.779.700	-	-	31.397.779.700	- 30.379.639.129
2	11	11	2	01	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	7	2	351.864.300			351.864.300	351.864.300			351.864.300	-
2	11	11	2	01	17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Tonase	NA	500	230.905.200			230.905.200	230.905.600			230.905.600	400

Kode Rekening						Bidang Urusan/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)	SEBELUM					RENCANA PERUBAHAN 2024 SESUDAH				PENAMBAHAN /PENGURANGAN
										Target	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	
2	11	11	2	01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Tonase	55.666,72	59.500	17.056.127.500			17.056.127.500	17.258.164.900			17.258.164.900	202.037.400
2	11	11	2	01	09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	NA	50	5.244.440.000			5.244.440.000	5.429.990.000			5.429.990.000	185.550.000
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	NA	70	174.330.000			174.330.000	174.330.000			174.330.000	-
2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	Dokumen	NA	1	1.291.687.500			1.291.687.500	726.855.500			726.855.500	- 564.832.000
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	NA	1	32.738.064.329	4.690.000.000		37.428.064.329	7.225.669.400			7.225.669.400	- 30.202.394.929
2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pengelola sampah suasta yang memenuhi satandar pelayanan sampah	Usaha	NA	1	47.046.000	-	-	47.046.000	47.046.000	-	-	47.046.000	-
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	1	47.046.000			47.046.000	47.046.000			47.046.000	-
2	11	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DLH**		66,81/B	70/B	12.801.182.066	-	-	12.801.182.066	12.814.068.904	-	-	12.814.068.904	12.886.838
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	29	8	196.379.800	-	-	196.379.800	196.379.800	-	-	196.379.800	-
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanan perangkat daerah	Dokumen	5	2	136.379.800			136.379.800	136.379.800			136.379.800	-
2	11	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
2	11	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
2	11	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
2	11	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	2	20.000.000			20.000.000	20.000.000			20.000.000	-
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daer	Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	32	21	10.094.493.166	-	-	10.094.493.166	9.994.409.704	-	-	9.994.409.704	- 100.083.462
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	58	62	9.959.493.166			9.959.493.166	9.859.409.704			9.859.409.704	- 100.083.462
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4	1	87.000.000			87.000.000	87.000.000			87.000.000	-
2	11	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	16	18	38.000.000			38.000.000	38.000.000			38.000.000	-
2	11	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
2	11	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	NA	2	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-
2	11	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-

Kode Rekening						Bidang Urusan/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)	SEBELUM					RENCANA PERUBAHAN 2024 SESUDAH				PENAMBAHAN /PENGURANGAN
										Target	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	APBD KBB	APBD PROV	APBN	TOTAL	
2	11	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	NA	1	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase	NA	100%	129.000.000	-	-	129.000.000	241.970.300	-	-	241.970.300	112.970.300
2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	NA	1	129.000.000			129.000.000	241.970.300			241.970.300	112.970.300
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	Persentase	NA	100%	1.766.137.100	-	-	1.766.137.100	1.766.137.100	-	-	1.766.137.100	-
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1	15.130.500			15.130.500	15.130.500			15.130.500	-
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	2	902.626.700			902.626.700	902.626.700			902.626.700	-
2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	NA	1	59.474.000			59.474.000	59.474.000			59.474.000	-
2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1	131.749.700			131.749.700	131.749.700			131.749.700	-
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	NA	1	117.352.200			117.352.200	117.352.200			117.352.200	-
2	11	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	NA	10	20.000.000			20.000.000	20.000.000			20.000.000	-
2	11	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	1	169.583.000			169.583.000	169.583.000			169.583.000	-
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	NA	1	350.221.000			350.221.000	350.221.000			350.221.000	-
2	11	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai kebutuhan perencanaan barang	Unit	34	13	512.372.000	-	-	512.372.000	512.372.000	-	-	512.372.000	-
2	11	01	3	07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	34	13	512.372.000			512.372.000	512.372.000			512.372.000	-
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	NA	2	52.800.000	-	-	52.800.000	52.800.000	-	-	52.800.000	-
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	1	28.800.000			28.800.000	28.800.000			28.800.000	-
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Ka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	1	24.000.000			24.000.000	24.000.000			24.000.000	-
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik dan peralatan kantor kondisi baik	Unit	45	37	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	-
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	17	14.500.000			14.500.000	14.500.000			14.500.000	-
2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	20	15.500.000			15.500.000	15.500.000			15.500.000	-
							PAGU PENDANAAN AWAL USULAN DLH				74.555.648.495	4.690.000.000	-	79.245.648.495	48.642.470.104	-	-	48.642.470.104	- 30.603.178.391

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

dp2kbp3a kab. bandung barat

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dinas sepanjang tahun 2023 masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon koreksi dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program kegiatan dinas pada tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan kepada seluruh unsur di DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat dan semua pihak yang telah memberikan partisipasinya atas pelaksanaan kegiatan dinas sepanjang tahun 2023, semoga Alloh SWT membalas dengan balasan yang berlipat ganda dan dengan memohon ridho-Nya semoga pada tahun 2024, kita mampu melaksanakan program kegiatan dinas dengan hasil yang lebih baik lagi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini dapat dijadikan panduan dan bahan kebijakan berikutnya.

Bandung Barat, November 2024
Plt. Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Bandung Barat

Avira Nur Fashihah, SH., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
196504191989032005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Permendagri 86 tahun 2017). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (Satu) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Kerja Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra DP2KBP3A 2024-2026. Renstra DP2KBP3A 2024-2026 ini mengacu kepada RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2AKBP3A) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut ; (1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; dan (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (6) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh bidang/subbidang dan UPT, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat adalah :

dasar hukum renja :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Tentative
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Perpres Nomor 72 Tahun 2021
7. Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
8. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022
12. Peraturan Kepala BKKBN No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024
13. Peraturan BKKBN/Peraturan lain tentang Kampung KB

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri 050
15. Perda 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 tahun 2020 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat
17. Peraturam Bupati Bandung Barat Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2025
18. Perbup Renstra 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk kurun waktu satu tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat) dan RPJMD Kabupaten Bandung Barat sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan fungsinya.

1.2.1. Tujuan

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat;

2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat

1.3 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 disusun, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan	*1.1. Latar Belakang* *1.2. Landasan Hukum* *1.3. Maksud dan Tujuan* *1.4. Sistematika Penulisan*
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2021	*2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra* *2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah* *2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah* *2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD* *2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	*3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional* *3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah* *3.3 Program dan Kegiatan*
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	*Berisi rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
BAB IV Penutup	*Mengemukakan catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.*

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKBPPPA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA Tahun 2023

Evaluasi Renstra dan Analisis kinerja pelayanan dilakukan dengan menganalisis atas hasil kinerja pelayanan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023, sehingga menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Proses pengumpulan data untuk capaian pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang, yang kemudian ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai yaitu Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja sasaran seluruh Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang melaporkan seluruh capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023, dan diuraikan secara rinci sebagai berikut :

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021 n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2)2021	Realisasi Renja PD (n-2) 2021	Tingkat Realisasi		Ralisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)(2022)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**82,5% (33 organisasi Wanita)**	**82,5%**				**84 % (35 Organisasi Wanita)**		
2	**08**	**02**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kewenangan kabupaten/kota**	**Lembaga layanan peningkatan ekonomi perempuan dalam keluarga.**	**33 Kelompok**	**33 Kelompok**				**33 Kelompok**		

2	08	02	2	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terlatih.	33 Kelompok	33 Kelompok				33 kelompok		
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan**	**100**	**100**				**100**		
2	**08**	**03**	**2**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Lembaga yang mempunyai komitmen pencegahan Kekerasan terhadap perempuan**	**3 Lembaga**	**4 lembaga**				**4 Lembaga**		
2	08	03	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Mitra yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	75 orang	75 orang				75 orang		
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.**	**39,0%**	**39,0%**				**41**		
2	**08**	**04**	**2**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**				**1 Kegiatan**		

2	08	04	2	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang terlayani dalam rangka peningkatan kualitas keluarga.	80 Orang	80 Orang				80 Orang		
2	**08**	**04**	**2**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**				**1 Kegiatan**		
2	08	04	2	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga Binaan.	100 KK	100 KK				100 KK		
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Data serta profil gender dan anak Hasil analisis**	**85,0%**	**85,0%**				**87**		
2	**08**	**03**	**2**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Dokumen data terpilah gender dan anak**	**1 dokumen**	**1 dokumen**				**1 dokumen**		

2	08	03	2	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Gender dan Anak di Daerah	1 keg	1 keg				1 keg		
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak**	**67,0%**	**67,0%**				**78**		
2	**08**	**06**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga layanan dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak yang terlatih**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**				**1 Lembaga**		
2	08	06	2	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang teradvokasi dalam pemenuhan hak anak di daerah.	25 orang	25 orang				25 orang		
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak**	**100**	**100**				**100**		
2	**08**	**07**	**2**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan terhadap anak.**	**34 Lembaga**	**34 Lembaga**				**34 Lembaga**		

2	08	07	2	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Gugus Tugas Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan orang yang teradvokasi	75 Orang	75 Orang				75 Orang		
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk**	**0**	**0**				**0**		
						Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	**5.11%**	**5.11%**				**6.78%**		
						Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	**70,0%**	**70,0%**				**1**		
						Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	**100,0%**	**100,0%**				**1**		
2	**14**	**02**	**2**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian**	**Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kependudukan**	**16 kec**	**16 kec**				**16 kec**		

					Kuantitas Penduduk										
2	14	02	2	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	49 Sekolah	49 Sekolah				17 Sekolah		
2	14	02	2	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	90 orang	90 orang				100 orang		
2	14	02	2	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	120 Orang	120 Orang				120 Orang		
2	**14**	**02**	**2**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data**	**13 dok data mikro keluarga**	**13 dok data mikro keluarga**				**13 dok data mikro keluarga**		
2	14	02	2	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Petugas Report and Record	140 Orang	140 Orang				100 Orang		
2	14	02	2	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Evaluasi data Program KKBPK	50 Orang	50 Orang				50 Orang		
2	**14**	**03**				**Persentase KB Aktif**	**73,75**	**73,85**				**74**		

					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**20,73**	**22,08**				**21**		
						Persentase UNMETNEED	**10,24**	**14,33**				**10**		
2	**14**	**03**	**2**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**kegiatan KIE Masa**	**32 gerak**	**32 gerak**				**32 gerak**		
2	14	03	2	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	KIE Masa	30 Gerak	30 Gerak				48 Gerak		
2	14	03	2	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Penyediaan sarana KIE Masa untuk balai penyuluhan KB	16 balai	16 balai				16 balai		
2	14	03	2	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK kepada Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				1 Kegiatan		
2	14	03	2	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Mekanisme Operasional Program KKBPK						4 Kegiatan		

2	14	03	2	07	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Kegiatan pengelolaan operasional di balai penyuluhan KKBPK						4 Kegiatan		
2	**14**	**03**	**2**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan**	**84 org**	**84 org**				**84 org**		
2	14	03	2	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Operasional dan pembinaan Petugas lini lapangan non PNS	1008 bulan	1008 bulan				1008 bulan		
2	14	03	2	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Institusi Masyarakat pedesaan						2588		
2	**14**	**03**	**2**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes dan Jumlah Akseptor Baru**	**4.663 Peserta KB Aktif**					**4.896 Peserta KB Aktif**		
2	14	03	2	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Pelaporan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dari Fasilitas Pelayanan KB ke Faskes dan Jejaringnya	34 Faskes	34 Faskes				35 Faskes		

					Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
2	14	03	2	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB IUD dan Implant	1100 Akseptor MKJP	1100 Akseptor MKJP				20768 Akseptor MKJP		
2	14	03	2	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan (faskes)	34 faskes	34 faskes				35 Faskes		
2	14	03	2	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Anggota kelompok kegiatan (Poktan)	330 orang	330 orang				363 Orang		
2	14	03	2	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan (faskes)	175 orang	175 orang				192 Orang		
2	14	03	2	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Momentum melalui Tim KB Keliling Keliling (TKBK)	48 Kegiatan	48 Kegiatan				64 Kegiatan		
2	14	03	2	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	500 Orang	500 Orang				525 Orang		

2	**14**	**03**	**2**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kampung KB**	**57 Kampung kb**	**57 Kampung kb**				**58 Kampung kb**		
2	14	04	3	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB	57 Kampung KB	57 Kampung KB				58 Kampung KB		
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten**	**40**	**40**				**50**		
2	**14**	**04**	**2**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**80 Kelompok**	**80 Kelompok**				**100 Kelompok**		
2	14	04	2	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) dan BKB KIT	64 paket	64 paket				64 paket		

2	14	04	2	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	295 Orang	295 Orang				295 Orang		
2	14	04	2	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/Kader Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	295 Orang	295 Orang				295 Orang		
2	14	04	2	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Tenaga Pendukung Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7 Orang	7 Orang				7 Orang		
2	14	04	2	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Biaya Operasional	105 Orang	105 Orang				105 Orang		

					Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
2	14	04	2	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menngikuti pameran dan sosialisasi	196 Orang	196 Orang				196 Orang		
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP3A**	**B**	**B**				**B**		
2	**14**	**01**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu**	**100,0%**	**100,0%**				**1**		
2	14	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dok	4 dok				3 dok		
2	14	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok				1 dok		
2	14	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dokumen RKA- P SKPD	1 dok	1 dok				1 dok		

					Perubahan RKA-SKPD										
2	14	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok				1 dok		
2	14	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DokumenDPA- P SKPD	1 dok	1 dok				1 dok		
2	14	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	2 dok	2 dok				4 dok		
2	14	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan SKPD	5 dok	5 dok				5 dok		
2	**14**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**12**	**12**				**12**		
2	14	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan bagi ASN	12	12				12		
2	14	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 dok	1 dok				1 dok		
2	14	01	2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kegiatan penyusunan Bahan tanggapan pemeriksaan	1 keg	1 keg				1 keg		
2	14	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 dok	2 dok				2 dok		
2	14	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan realisasi dan prognosis	12 dok	12 dok				12 dok		

2	14	01	2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen aset**	**1 dokumen**	**1 dokumen**				**1 dokumen**		
2	14	01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Aset di kantor penyuluhan kb	0	0				16		
2	14	01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan aset DP2KBP3A	1 dok	1 dok				1 dok		
2	**14**	**01**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan**	**100,0%**	**100,0%**				**1**		
2	14	01	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN	200	200				200		
2	14	01	2	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan				12 bulan		
2	14	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 bulan	12 bulan				12 bulan		
2	14	01	2	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	12 bulan				12 bulan		
2	**14**	**01**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi**	**100,0%**	**100,0%**				**1**		
2	14	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan				5 jenis peralatan		
2	14	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Kebutuhan Kantor	3 keg	3 keg				3 keg		

2	14	01	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13 jenis cetakan	13 jenis cetakan				13 jenis cetakan		
2	14	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 keg	3 keg				3 keg		
2	**14**	**01**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi**	**100,0%**	**100,0%**				**1**		
2	14	01	2	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Pejabat	1 kendaraan	1 kendaraan				1 kendaraan		
2	14	01	2	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	3 paket	3 paket				3 keg		
2	**14**	**01**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi**	**100,0%**	**100,0%**				**100**		
2	14	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kegiatan jasa surat menyurat	1 jenis materai	1 jenis materai				2 jenis materai		
2	14	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Cleaning service dan keamanan kantor	0	0				36 bulan		
2	**14**	**01**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi**	**100,0%**	**100,0%**				**100**		
2	14	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan perorangan dan dinas	7	7				2		

2	14	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	7 kendaraan roda empat	7 kendaraan roda empat				4		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain. Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

TABEL T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn (n-2) (2021)	Thn (n-1)(2022)	Thn n (2023)	Thn n+1 (2024)	Thn (n-2) (2021)	Thn (n-1)(2022)	Thn n (2023)	Thn n+1 (2024)	
1	Persentase penangan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya di unit pelayanan terpadu	-	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penangan anakkorban kekerasan yang terselesaikan penanganannya di unit pelayanan terpadu	-	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Total Fertility Rate	-	v	2,44	2,43	2,42	2,23	2,43	2,24	2,42	2,23	
4	Nilai SAKIP	-	v	B	B	BB	BB	B	BB	BB	BB	

Indikator Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya di unit pelayanan terpadu tercapai 100% yaitu terdapat 63 kasus, terjadi kenaikan kasus dari tahun 2022 yang terdiri dari 54 Kasus. Pada tahun 2023 kekerasan terhadap anak terdapat 30, dan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengaduan kasus ini semua dapat ditangani, diantaranya sudah divonisnya tersangka, dan sebagian diselesaikan secara kekeluargaan.

Capaian indikator *Total Fertility Rate (TFR)* dari target 2,42 dapat tercapai 2,12 atau sebesar 117% dari target yang telah ditetapkan. Nilai indikator *Total Fertility Rate (TFR)* ini nilainya meningkat dari tahun 2022 yaitu 2,21.

Tercapainya nilai *Total Fertility Rate (TFR)* ini tidak terlepas dari dukungan yang ada antara lain :

a. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi penyelenggaraan kegiatan Program KKBPK.
b. Pengalaman dalam melaksanakan Advokasi, KIE dan Penggerakan dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ke masyarakat.
c. Dukungan pelayanan dari BKKBN salah satunya Kegiatan pelayanan terpusat Akseptor di masa pandemic. Serta adanya Pendidikan dan Pelatihan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan dan penelitian Program KKBPK yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kebijakan dan mitra kerja, yang diselenggarakan untuk Petugas Lini Lapangan baik yang PNS maupun Non PNS.
d. Dukungan dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam melakukan kegiatan penggerakan program KKBPK.
e. Dukungan mitra kerja (Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, TNI, TPPKK, LSM/Ormas) dalam meningkatkan Program KKBPK.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

a. Arus penduduk masuk ke Kabupaten Bandung Barat yang besar pada umumnya Pasangan Usia Subur (PUS), perlu intervensi langsung dan pemberian informasi dan pelayanan KB yang memadai;

b. Sebagai pengaruh dari keberhasilan Program KB di masa lampau, persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB.
c. Belum optimalnya Petugas KB di lini lapangan seperti belum semua desa memiliki rasio satu PKB satu desa sehingga dalam melakukan pembinaan KIE belum maksimal
d. Penggerakan yang kurang tepat sasaran dalam Penggunaan metode MKJP (masih dominasi oleh peserta PUS tua dan sudah memiliki anak lebih dari 2), sehingga jumlah peserta KB MKJP belum dapat mendorong untuk penurunan TFR.

Indikator Nilai Sakip dari target kategori B tercapai 100 % dari target yg telah ditetapkan yaitu mendapatkan nilai 72,46. Kriteria Kategori BB ini adalah yg nilainya >70-80. Pengukuran nilai sakip ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan DP2KBP3A untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dan menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. B atau Baik artinya akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi DPPKBPPPA

Pelaksanaan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk penanganan isu-isu kependudukan dengan 2 (dua) fokus utama yaitu : (1) Pengendalian makro kuantitatif kependudukan, (2) Peningkatan mikro kualitatif keluarga.

Ada 4 isu strategis yang diharapkan akan menjadi kebijaksanaan pembangunan berkaitan dengan masalah kependudukan dengan berbagai asumsinya ke depan meliputi :

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk,
2. Pengembangan Kualitas Penduduk,
3. Pengarahan mobilitas penduduk,
4. Pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Dari Isu tersebut, Kinerja DPPKBPPPA sebagai lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung Barat adalah :

1. Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)
2. Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga
3. Pemberdayaan Perempuan
4. Perlindungan hak-hak perempuan dan Anak terhadap kekerasan

Sedangkan Core Bussiness (Kegiatan Utama) adalah

1. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
2. Peningkatan keluarga Sejahtera
3. Advokasi /KIE dan Penggerakan Masyarakat
4. Penyediaan Data dan Informasi data Mikro Keluarga
5. Pelayanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Fokus kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, adalah pada demand side, yang ruang lingkup kegiatannya adalah pada upaya promosi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Interpersonel/Konseling (KIP/K), penanggulangan masalah HIV/AIDS, Pemenuhan Hak-hak Reproduksi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak serta Peningkatan Partisipasi Pria.

Peningkatan kesejahteraan keluarga diarahkan pada upaya pengembangan kualitas penduduk agar memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan intervensi kegiatan yang mencakup peningkatan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan kemitraan dengan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Intervensi pada ketahanan keluarga ini dilakukan melalui pengembangan dan pembinaan terhadap kelompok kegiatan: Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia dengan

sasaran keluarga yang mempunyai Balita, remaja dan Lanjut Usia, serta kegiatan Bina Lingkungan Keluarga.

Kegiatan Advokasi/KIE dan Penggerakan Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan berbagai kerjasama antar lembaga dan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD serta Institusi Masyarakat lainnya). Institusi Masyarakat merupakan kekuatan inti dalam pelaksanaan kegiatan program KB dilapangan, untuk menggerakan mekanisme operasional melalui rangkaian pertemuan dan pembinaan.

Penyediaan data dan informasi data mikro penduduk merupakan bagian dari pengelolaan sistem informasi dan administrasi penduduk yang mencakup data demografis, Keluarga Berencana dan data tahapan Keluarga Sejahtera yang diharapkan memberikan kontribusi yang berharga bagi perencanaan pembangunan di Kota Bandung. Data hasil pendataan yang selama ini dilakukan telah diperoleh data mikro keluarga dan dijadikan bahan perencanaan bagi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Terkait dengan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup pendampingan dan penyelesaian masalah yang dialami oleh keluarga si korban dan melakukan koordinasi dengan LSM-LSM yang menangani perlindungan hak-hak perempuan anak.

Dari seluruh manajemen program yang dikembangkan tersebut diharapkan mampu menunjukkan adanya “core competence” (kemampuan inti) yaitu :

1. Kekuatan manajemen program KB mampu menyentuh seluruh Desa, RW, RT dan Keluarga secara merata dengan peran serta Institusi Masyarakat , Pos KB , Sub Pos KB yang dikendalikan oleh PLKB/Penyuluh KB dengan segala fasilitas yang ada diseluruh kelurahan.
2. Kemampuan untuk menggerakan masyarakat (kader) secara bersama-sama melaksanakan pendataan keluarga.
3. Kemampuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan program pembangunan bidang kependudukan yang terarah pada pengendalian kuantitas penduduk.

4. Kemampuan dalam upaya peningkatan kualitas penduduk melalui pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif dan ketahanan keluarga.
5. Kemampuan untuk melakukan advokasi dan KIE melalui berbagai bentuk media baik secara individu, kelompok maupun komunikasi massa.
6. Kemampuan untuk melaksanakan pencatatan pelaporan manajemen Program Keluarga Kerencana .
7. Kemampuan untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dengan professional.
8. Kemampuan untuk membina dan meningkatkan kemandirian organisasi perempuan;
9. Kemampuan untuk memberikan motivasi terhadap kedudukan dan peranannya dalam kehidupan serta kebijakan publik;
10. Bertumpu pada “core competence” tersebut, maka arah kebijakan dibidang Keluarga Berencana, meliputi aspek; Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui pengendalian program KB dan kesehatan reproduksi, Pengembangan Kualitas Penduduk, melalui upaya pengembangan ekonomi keluarga, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Keluarga dengan kelompok kegiatannya, Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Keluarga Berencana secara online.

Sedangkan di bidang pemberdayaan perempuan, arah kebijakan meliputi keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan PUG dan anak, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

2.4 Reviev Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C.31

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bandung Barat

NO					Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024				
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.226.747.272,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 40.899.654.098
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		IDG	79.73	1,175,510,600.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		IDG	79.73	Rp. 2.101.490.300
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	87.50%	480.932.400,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	87.50%	Rp. 1.000.935.700

2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 580.000.000
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp. 580.000.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Organisasi Kemasyarakatan Perempuan	37 organisasi		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Organisasi Kemasyarakatan Perempuan	37 organisasi	Rp. 162.183.600
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	37 organisasi		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	37 organisasi	Rp. 162.183.600
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 orang		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 orang	Rp. 258.752.100

2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 orang	Rp. 258.752.100
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan**	**100%**	100.000.000,00	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan**	**100%**	**Rp. 221.956.200**
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 30.450.000
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 30.450.000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Rp. 170.800.200

2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Rp. 170.800.200
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	32 Orang		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	32 Orang	Rp. 20.706.000
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	32 Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	32 Orang	Rp. 20.706.000
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**40,51%**	164.340.600,00	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**40,51%**	**Rp. 164.266.600**

2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp. 164.266.600
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp. 164.266.600
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak**	**80%**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak**	**80%**	**Rp. 198.850.600**
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	37 Organisasi		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	37 Organisasi	Rp. 148.850.600

2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	37 Organisasi		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	37 Organisasi	Rp. 148.850.600
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 50.000.000
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 50.000.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak**	**100%**	231.331.200,00	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak**	**100%**	**Rp. 515.481.200**

2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	50 Lembaga		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	50 Lembaga	Rp. 302.331.200
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA terpadu			Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA terpadu		
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	37 Orang		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	37 Orang	Rp. 302.331.200
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Rp. 164.836.000

2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Rp. 164.836.000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 48.314.000
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 48.314.000

2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)**	**1,58**	15,322,343,472.00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)**	**1,58**	**Rp. 38.798.163.798**
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Sakip DP2KBP3A**	**BB (74)**	13,289,976,072.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Sakip DP2KBP3A**	**BB (74)**	**Rp. 13.824.015.998**
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100%	Rp. 473.871.200
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Rp. 28.350.000
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	Rp. 55.781.200
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 389.740.000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 Laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 Laporan	Rp. 12.567.739.098
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	Rp. 12.496.740.298
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp. 70.998.800
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen aset	1 Dokumen		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen aset	1 Dokumen	Rp. 52.490.600
2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 52.490.600
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan	100%	Rp. 257.779.200

2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	Rp. 33.540.600
2	14	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Rp. 38.940.600
2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Laporan		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Laporan	Rp. 185.298.000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi		Rp. 278.535.900
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp. 80.110.000
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp. 141.727.600
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Rp. 56.698.300
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 169.100.000
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	1 Kegiatan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	1 Kegiatan	Rp. 12.500.000

2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Jasa Cleaning service dan keamanan kantor	12 Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Jasa Cleaning service dan keamanan kantor	12 Bulan	Rp. 156.600.000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi	100%	Rp. 24.500.000
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit	Rp. 4.000.000
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan	10 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan	10 unit	Rp. 20.500.000
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**TFR**	**2,23**	735.510.600,00	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**TFR**	**2,23**	**Rp. 1.202.586.800**
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kependudukan	1 Dokumen		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kependudukan	1 Dokumen	Rp. 735.486.800

2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 219.224.400
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	3 Dokumen		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	3 Dokumen	Rp. 516.262.400
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data	16 Dokumen		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data	16 Dokumen	Rp. 467.100.000
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Rp. 167.100.000
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Rp. 300.000.000

2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang Aktif untuk memperkuat Integrasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang Aktif untuk memperkuat Integrasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)**	**70,80%**	896.856.800,00	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)**	**70,80%**	**Rp. 13.358.061.000**
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		kegiatan KIE Masa	16 Gerak		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		kegiatan KIE Masa	16 Gerak	Rp. 1.523.600.000
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		Pengendalian Program KKBPK	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Rp. 140.000.000

2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1 Laporan		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1 Laporan	Rp. 793.600.000
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	Rp. 240.000.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	Rp. 100.000.000
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100 orang		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100 orang	Rp. 250.000.000

2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	66 orang		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	66 orang	Rp. 4.720.407.400
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2040 orang		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2040 orang	Rp. 495.000.000
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 organisasi		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 organisasi	Rp. 284.781.200

2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	13 Laporan		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	13 Laporan	Rp. 3.940.626.200
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	Rp. 4.221.588.600
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Rp. 124.338.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4807 orang		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4807 orang	Rp. 3.254.922.400

2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen	Rp. 97.881.200
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	300 orang		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	300 orang	Rp. 45.000.000
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Rp. 44.288.000
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 orang		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 orang	Rp. 197.080.000
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	16 Laporan		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	16 Laporan	Rp. 215.654.600

2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Akseptor		Peningkatan Kesertaan KB Pria	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Akseptor	Rp. 49.800.000
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	30 Orang		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	30 Orang	Rp. 192.624.400
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Kampung KB	59 Kampung KB		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Kampung KB	59 Kampung KB	Rp. 2.892.465.000
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 Organisasi		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 Organisasi	Rp. 13.600.000
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Rp. 28.950.000

2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan		Pembinaan Terpadu Kampung KB	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	Rp. 251.415.000
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	165 Kampung KB		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	165 Kampung KB	Rp. 2.598.500.000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		400.000.000,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Rp. 10.413.500.000**
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Kelompok		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Kelompok	Rp. 1.386.850.000
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	1 Laporan		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	1 Laporan	Rp. 38.400.000

2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	Rp. 1.010.250.000
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	Rp. 300.000.000

2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	32 Kelompok		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	32 Kelompok	Rp. 38.200.000
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp. 9.026.650.000
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	Rp. 351.550.000

2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	Rp. 4.131.000.000
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	- Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	Rp. 4.544.100.000
														Rp. 40.899.654.098

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh DPPKBPPPA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
Kabupaten Bandung Barat

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	RW 6, RW9 DAN RW 11, Kab. Bandung Barat, Parongpong, Parongpong, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Rp. 45.000.000	Musrenbang Pemberdayaan kelompok PEKKA
		Kp. Selaawi RW 07, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cisarua, Seluruh Kelurahan/Desa		15.560.000	
		Kp. Baruahad RW. 13, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cisarua, Seluruh Kelurahan/Desa		Rp.15.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan				

	Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Desa Girimukti Nomor : 2002 RW 01 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 RW 07 Kab. Bandung Barat, Saguling, Saguling, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Rp.90.000.000	Murenbang Kelompok PEKKA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Mekarwangi RW 05, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cisarua, Seluruh Kelurahan/Desa		RP. 16.000.000	#musrenbang Kampung KB (kemiskinan Ekstrim)
		Kp.Bojong Sari RT 01 RW 09, Kab. Bandung Barat, Parongpong, Parongpong, Seluruh Kelurahan/Desa		Rp. 30.000.000	#musrenbang Kampung KB (kemiskinan Ekstrim)
		Kp. Baruahad Rw. 13, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cisarua, Seluruh Kelurahan/Desa		Rp. 16.000.000	#musrenbang Kampung KB (kemiskinan Ekstrim)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPKBPPPA lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Bandung Barat. Berikut ini disampaikan Rekapitulasi Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional :

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode (PN/ PP)	RPJMN 2020-2024			Bidang Urusan	Program	Kegiatan
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PN 3	Meningkatkan Sumber daya manusia Berkualitas dan berdaya saing	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat tata kelola Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
							Administrasi Umum Perangkat Daerah
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
							Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKA	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan

						TAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kewenangan kabupaten/kota
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA

Sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG BARAT			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga,
			2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga, keluarga
			3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja,
			4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB,
			5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan,
			6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia,
			7. Peningkatan kemitraan pembangunan
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta	Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
			Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

		pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,	- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah. - Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.
		Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.	Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
			Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
		Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran	Penguatan kemitraan dan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
			Peningkatan Peran serta Serta Organisasi Kemasyarakatan untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.
Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan pelembagaan PUG dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1. Peningkatan implementasi PUG melalui tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender
		Mengupayakan peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang meliputi koordinasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan	2. Meningkatkan Advokasi, pelatihan dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatkan penyediaan layanan perempuan korban kekerasan,	3. Peningkatan layanan perlindungan bagi perempuan penyintas Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

		eksploitasi dan diskriminasi.	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Menurunkan rasio kekerasan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dan penyediaan layanan perlindungan khusus anak	1. Peningkatan layanan perlindungan khusus anak penyintas kekerasan eksploitasi dan diskriminasi
		Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	2. Pemenuhan hak anak melalui percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DP2KBP3A	Meningkatkan kapasitas pegawai dan sarana prasarana dalam organisasi	Peningkatan kapasitas dan ketersediaaan sumberdaya organisasi untuk mendukung optimalisasi pelayanan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran renja yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

SASARAN , INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
DP2KBP3A TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100%
2.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,58
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	79,73

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP2KBP3A	Nilai SAKIP DP2KBP3A	Nilai/Predikat	74 (BB)

SASARAN , INDIKATOR KINERJA DAN TARGET (PERUBAHAN)
DP2KBP3A BARAT TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100%
2.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,42
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	80,89
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP2KBP3A	Nilai SAKIP DP2KBP3A	Nilai/Predikat	74 (BB)

1.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan juga mengacu pada Visi, Misi dan program pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dan visi dan Badan Keluarga Berencana dan Perempuan. Adapun rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kewenangan kabupaten/kota
   b. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   c. Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kotaProgram
2) Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota
b. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan Provinsi

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi

5) Program Pemenuhan Hak Anak

a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

6) Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota
b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten Kota.

7) Program Pengendalian Penduduk

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

8) Program Pembinaan Keluarga Berencana

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya LokalPemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	17	20
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)				**19,226,747,272.00**	**40,899,654,098.00**	**38,288,192,965.00**	**19,061,445,693.00**			**33,828,236,302.00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**19,226,747,272.00**	**40,899,654,098.00**	**38,288,192,965.00**	**19,061,445,693.00**			**33,828,236,302.00**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1,455,510,600.00**	**2,101,490,300.00**	**2,021,490,300.00**	**565,979,700.00**			**900,000,000.00**
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**85 %**	**85 %**	**760,932,400.00**	**1,000,935,700.00**	**945,935,700.00**	**-535,932,400.00**			**225,000,000.00**

	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan gender di Daerah*	34 0	34 0	280,000,000.00	580,000,000.00	525,000,000.00	245,000,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen	280,000,000.00	0.00	0.00	-280,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	0.00
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1,455,510,600.00**	**2,101,490,300.00**	**2,021,490,300.00**	**565,979,700.00**			**900,000,000.00**
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Organisasi kemasyarakatan perempuan*	35 0	35 0	162,183,600.00	162,183,600.00	162,183,600.00	0.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	112,500,000.00
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										

			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Organisasi	37 Organisasi	162,183,600.00	162,183,600.00	162,183,600.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Lembaga layanan peningkatan ekonomi perempuan dalam keluarga Lembaga layanan peningkatan ekonomi perempuan dalam keluarga.*	0 Kelompok 22 % 33 0	0 Kelompok 22 % 33 0	318,748,800.00	258,752,100.00	258,752,100.00	-59,996,700.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										

			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 Orang	33 Orang	318,748,800.00	258,752,100.00	258,752,100.00	-59,996,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan**	**100 %**	**100 %**	**100,000,000.00**	**221,956,200.00**	**221,956,200.00**	**68,750,000.00**			**168,750,000.00**
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Lembaga yang mempunyai komitmen pencegahan Kekerasan terhadap perempuan*	5 0	5 0	0.00	30,450,000.00	30,450,000.00	30,450,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	30,450,000.00	30,450,000.00	30,450,000.00	DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00

	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyedia Layanan Rujukan Bagi permepuan korban kekerasan*	0 Lembaga 16 Lembaga	0 Lembaga 16 Lembaga	100,000,000.00	170,800,200.00	170,800,200.00	70,800,200.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100,000,000.00	170,800,200.00	170,800,200.00	70,800,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terlatih*	0 Lembaga 16 Lembaga	0 Lembaga 16 Lembaga	0.00	20,706,000.00	20,706,000.00	20,706,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										

			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	32 Orang	32 Orang	0.00	20,706,000.00	20,706,000.00	20,706,000.00	DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
2.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**40.51 %**	**40.51 %**	**164,340,600.00**	**164,266,600.00**	**164,266,600.00**	**-51,840,600.00**			**112,500,000.00**
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	164,340,600.00	164,266,600.00	164,266,600.00	-74,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	164,340,600.00	164,266,600.00	164,266,600.00	-74,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00

	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	1 Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
3.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase data dan profil gender dan anak**	**79 %**	**79 %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,250,000.00**			**56,250,000.00**
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen data terpilah gender dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota										

			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak**	**78 %**	**78 %**	**198,906,400.00**	**198,850,600.00**	**173,850,600.00**	**-86,406,400.00**			**112,500,000.00**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak di daerah*	34 Lembaga	34 Lembaga	148,906,400.00	148,850,600.00	148,850,600.00	-55,800.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	34 Organisasi	34 Organisasi	148,906,400.00	148,850,600.00	148,850,600.00	-55,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00

	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang terlatih Jumlah Lembaga layanan dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak yang terlatih*	0 Lembaga 1 0	0 Lembaga 1 0	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	-25,000,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak**	**100 %**	**100 %**	**231,331,200.00**	**515,481,200.00**	**515,481,200.00**	**-6,331,200.00**			**225,000,000.00**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*	34 Lembaga	34 Lembaga	231,331,200.00	302,331,200.00	302,331,200.00	71,000,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	112,500,000.00
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA										

			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA										
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	34 Orang	34 Orang	231,331,200.00	302,331,200.00	302,331,200.00	71,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus terlayani*	0 % 100 % 1000	0 % 100 % 1000	0.00	164,836,000.00	164,836,000.00	164,836,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK										

			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	1 Orang	1 Orang	0.00	164,836,000.00	164,836,000.00	164,836,000.00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terlatih*	0 Lembaga 16 Lembaga	0 Lembaga 16 Lembaga	0.00	48,314,000.00	48,314,000.00	48,314,000.00		Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/										
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	1 Orang	0.00	48,314,000.00	48,314,000.00	48,314,000.00	DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	56,250,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**

1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**BB Poin**	**BB Poin**	**13,289,976,072.00**	**13,824,015,998.00**	**11,508,082,365.00**	**728,203,030.00**			**14,018,179,102.00**
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu*	100 % 1000	100 % 1000	282,850,000.00	473,871,200.00	530,978,000.00	248,128,000.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	403,701,000.00
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	85,983,800.00	28,350,000.00	85,456,800.00	-527,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	162,585,800.00
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,050,000.00	0.00	0.00	-5,050,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	11,550,000.00

	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,050,000.00	0.00	0.00	-5,050,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	11,550,000.00
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,050,000.00	0.00	0.00	-5,050,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	5,550,000.00
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	5,550,000.00
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	75,716,200.00	55,781,200.00	55,781,200.00	-19,935,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	36,750,200.00
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	106,000,000.00	389,740,000.00	389,740,000.00	283,740,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	170,165,000.00
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu*	12 0 12 Laporan	12 0 12 Laporan	12,483,975,772.00	12,567,739,098.00	10,171,708,665.00	-2,312,267,107.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	12,528,673,972.00
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	12,387,976,972.00	12,496,740,298.00	10,091,109,865.00	-2,296,867,107.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	12,387,976,972.00
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11,085,000.00	0.00	0.00	-11,085,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	26,801,000.00
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	50,000,000.00
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	84,913,800.00	70,998,800.00	70,998,800.00	-13,915,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	56,425,400.00
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	7,470,600.00
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen aset*	1 0 1 Dokumen	1 0 1 Dokumen	80,723,100.00	52,490,600.00	52,490,600.00	-28,232,500.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	141,040,000.00
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	4,750,000.00
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	16 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	85,120,000.00
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8,437,500.00	0.00	0.00	-8,437,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	4,608,600.00
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	72,285,600.00	52,490,600.00	52,490,600.00	-19,795,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	46,561,400.00
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan*	100 % 1000	100 % 1000	138,137,400.00	257,779,200.00	313,560,400.00	175,423,000.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	173,558,780.00
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	210 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	105,000,000.00
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	42,906,800.00	33,540,600.00	33,540,600.00	-9,366,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	46,732,300.00
	2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	44,790,600.00	38,940,600.00	94,721,800.00	49,931,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	866,430.00
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	50,440,000.00	185,298,000.00	185,298,000.00	134,858,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	20,960,050.00

	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi*	100 % 1000	100 % 1000	162,889,800.00	278,535,900.00	233,644,700.00	70,754,900.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	224,152,850.00
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31,513,900.00	80,110,000.00	35,110,800.00	3,596,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	16,809,800.00
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	84,396,400.00	141,727,600.00	141,727,600.00	57,331,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	67,671,400.00
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	46,979,500.00	56,698,300.00	56,806,300.00	9,826,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	13,755,900.00
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	14,300,000.00
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	75,000,000.00
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	36,615,750.00
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi*	100 % 100 0	100 % 100 0	0.00	0.00	0.00	0.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	270,920,000.00
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	132,590,000.00
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	138,330,000.00
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi*	100 %	100 %	116,900,000.00	169,100,000.00	169,100,000.00	52,200,000.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	203,550,000.00
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	5,550,000.00
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	104,400,000.00	156,600,000.00	156,600,000.00	52,200,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	198,000,000.00
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi*	100 % 100 0	100 % 100 0	24,500,000.00	24,500,000.00	36,600,000.00	12,100,000.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	72,582,500.00
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	27,582,500.00
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	20,500,000.00	20,500,000.00	32,600,000.00	12,100,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	45,000,000.00
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**TFR TFR Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan**	**80 100 2.23 0 8,46 55 % % Angka Angka % %**	**2.23 0 100 55 80 8,46 Angka Angka % % % %**	**735,510,600.00**	**1,202,586,800.00**	**1,202,586,800.00**	**130,345,400.00**			**865,856,000.00**

	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Meningkatnya Data Kependudukan secara Kuantitas dan Kualitas Naskah Kesepakatan Tersedianya data mikro keluarga dan pendidikan kependudukan Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kepandudukan Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kependudukan*	0 dokumen 16 0 16 Dokumen 1 Naskah 80 Sekolah Siaga Kependudukan	0 dokumen 16 0 16 Dokumen 1 Naskah 80 Sekolah Siaga Kependudukan	735,510,600.00	735,486,800.00	735,486,800.00	-23,800.00		Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	187,222,000.00
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	219,384,700.00	219,224,400.00	219,224,400.00	-160,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	65,964,000.00
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal										
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	516,125,900.00	516,262,400.00	516,262,400.00	136,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	121,258,000.00

	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Mikro Keluarga Tersedianya data mikro keluarga dan rekonsiliasi data Tersedianya data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data Tersedianya Dokumen Kependudukan*	0 Dokumen 13 0 16 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 13 0 16 Dokumen 1 Dokumen	0.00	467,100,000.00	467,100,000.00	467,100,000.00		Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	678,634,000.00
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	16 Laporan	16 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	217,280,000.00
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga										
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17 Laporan	17 Laporan	0.00	167,100,000.00	167,100,000.00	167,100,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	92,472,000.00
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										

			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	68,764,000.00
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain										
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	16 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	275,228,000.00
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	24,890,000.00
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)**	**70.80 %**	**70.80 %**	**3,345,750,000.00**	**13,358,061,000.00**	**13,208,061,000.00**	**3,827,926,200.00**			**7,173,676,200.00**

	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Kegiatan KIE Masa*	16 Gerak	16 Gerak	29,748,200.00	1,523,600,000.00	1,523,600,000.00	1,493,851,800.00		Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	1,931,932,000.00
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	1 Laporan	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	161,000,000.00
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	1 Laporan	0.00	793,600,000.00	793,600,000.00	793,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	1,117,432,000.00
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	-	1 Laporan	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	276,000,000.00

			Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							BOKB-KB			
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	29,748,200.00	100,000,000.00	100,000,000.00	70,251,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	55,000,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal											
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokumen	16 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal											

	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	1 Organisasi	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	287,500,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	17	20
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan*	84 Orang	84 Orang	2,028,396,800.00	4,735,422,400.00	4,345,127,700.00	2,316,730,900.00		Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	1,627,000,000.00
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	17 Orang	17 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**

	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB										
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	10 Organisasi	286,248,400.00	0.00	0.00	-286,248,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB										
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	12 Laporan	13 Laporan	1,742,148,400.00	0.00	0.00	-1,742,148,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENUR	- -	0.00

			Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							U NAN STUNTI NG (KB)		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes*	35 Faskes	35 Faskes	1,008,138,600.00	4,221,588,600.00	4,221,588,600.00	3,213,450,000.00		Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	1,161,160,000.00
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	1 Laporan	0.00	72,900,000.00	124,338,000.00	124,338,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	83,835,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										

			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4807 Orang	4807 Orang	292,114,600.00	0.00	0.00	-292,114,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	113,831,800.00	0.00	0.00	-113,831,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB										

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	300 Orang	300 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	55,000,000.00
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	1 Laporan	0.00	45,500,000.00	44,288,000.00	44,288,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	52,325,000.00
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi										
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	400 Orang	400 Orang	231,883,200.00	197,080,000.00	197,080,000.00	-34,803,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	250,000,000.00
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak										
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	16 Laporan	16 Laporan	210,134,600.00	215,654,600.00	215,654,600.00	5,520,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	250,000,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**

		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria										
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Orang	50 Orang	14,550,000.00	0.00	0.00	-14,550,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria										
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan										
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	430 Kab/ Kota	430 Kab/ Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	55,000,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB										
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Orang	16 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	0.00

	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB										
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan										
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	30 Orang	30 Orang	100,624,400.00	192,624,400.00	192,624,400.00	92,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	250,000,000.00
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB Jumlah Kampung KB*	0 Kampung KB 165 Kampung KB 590	0 Kampung KB 165 Kampung KB 590	279,466,400.00	2,877,450,000.00	3,117,744,700.00	2,838,278,300.00		- -	2,453,584,200.00
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 Organisasi	12 Organisasi	18,050,200.00	13,600,000.00	13,600,000.00	-4,450,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	46,400,600.00
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB										

			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	34,100,400.00	28,950,000.00	28,950,000.00	-5,150,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	45,000,000.00
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	16 Laporan	227,315,800.00	251,415,000.00	171,415,000.00	-55,900,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	253,700,000.00
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	165 Kampung	0.00	2,583,485,000.00	2,903,779,700.00	2,903,779,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	2,108,483,600.00
1.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100 %**	**100 %**	**400,000,000.00**	**10,413,500,000.00**	**10,347,972,500.00**	**10,470,525,000.00**			**10,870,525,000.00**

	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	120 Kelompok	120 Kelompok	257,000,000.00	1,386,850,000.00	1,338,812,500.00	1,081,812,500.00		Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	794,160,000.00
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)										
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen	0.00	38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	44,160,000.00
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))										
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	5 Laporan	205,000,000.00	1,010,250,000.00	960,802,500.00	755,802,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	275,000,000.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										

			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	250 Unit	250 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	0.00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**17,771,236,672.00**	**38,798,163,798.00**	**36,266,702,665.00**	**18,495,465,993.00**			**32,928,236,302.00**
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	32 Kelompok	32 Kelompok	52,000,000.00	38,200,000.00	38,200,000.00	-13,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	275,000,000.00

	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Organisasi Kemasyarakan Tingkat Daerah Kabupaten Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	0 % 70 0	0 % 70 0	143,000,000.00	9,026,650,000.00	9,009,160,000.00	8,866,160,000.00		Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	10,076,365,000.00
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	2 Laporan	143,000,000.00	351,550,000.00	331,850,000.00	188,850,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	100,000,000.00
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 lapor an	0.00	4,131,000,000.00	4,133,210,000.00	4,133,210,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	4,750,650,000.00
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)										

			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	1 laporan	0.00	4,544,100,000.00	4,544,100,000.00	4,544,100,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	5,225,715,000.00
	J U M L A H					**19,226,747,272.00**	**40,899,654,098.00**	**38,288,192,965.00**	**19,061,445,693.00**			**33,828,236,302.00**

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ini merupakan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung Barat, November 2024
Plt. Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Bandung Barat

Avira Nur Fashihan, SH, MM
Pembina Utama Muda,IV/c
196504191989032005

RENCANA KERJA
KECAMATAN CIKALONGWETAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Cikalongwetan ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Cikalongwetan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Cikalongwetan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Cikalongwetan dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Cikalongwetan tahun 2024.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Cikalongwetan khususnya dan masyarakat Kab. Bandung Barat pada umumnya.

Cikalongwetan, Oktober 2024

CAMAT CIKALONGWETAN

H. DADANG A. SAPARDAN,M.Pd.

NIP. 19680515 199512 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah pada saat ini semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stakeholders. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Penjabaran dari rencana strategis tersebut adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

RKPD Perubahan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan indikator kinerja beserta target-targetnya. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cikalongwetan Tahun 2024, didasarkan pada aspek hukum utama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 288);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bandung Barat;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026.
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1 Aspek Strategis Organisasi

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Struktur Organisasi

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan maka Camat sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan fungsi / Rincian Tugas :

CAMAT

(1) Camat mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan; dan
c. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

(4) Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;

d. mengkoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
f. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum ; dan
c. pelaksanaan fasilitasi di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

(3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;

c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja tekait serta pelaporan tugas di bidang Perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan keuangan;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang Perencanaan dan keuangan; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang Perencanaan dan keuangan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan Perencanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan dan Keuangan;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
f. melaksanakan pemantauan realisasi program Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Kecamatan;
h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
k. melaksanakan administrasi anggaran Kecamatan;
l. melaksanakan verifikasi keuangan;
m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Perencanaan dan Keuangan;

o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Perencanaan dan Keuangan;
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q. melaksanakan tugas operasional di bidang Perencanaan dan Keuangan;
r. melaksanakan ketatausahaan bidang Perencanaan dan Keuangan;
s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja tekait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan Perencanaan kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai lingkup Kecamatan;
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup Kecamatan;
h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai lingkup Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kecamatan;
j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Kecamatan;
m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Kecamatan;
q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
v. melaksanakan ketatausahaan bidang Subbagian Kepegawaian dan Umum;
w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
x. melaksanakan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

(1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan; dan
c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan

(3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan Perencanaan kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemerintahan
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati dibidang pemerintahan

d. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan;
e. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati
f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
h. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan di bidang pemerintahan;
i. melaksanakan penyusuan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa;
l. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
o. melakukan pengkajian bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
p. masyarakat di bidang pemerintahan;
q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
r. melasanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

s. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;

t. melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

u. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;

v. melaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;

w. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang pemerintahan;

x. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan;

y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

z. melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan;

å. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemerintahan;

aa. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemerintahan;

bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

cc. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemerintahan; dan

dd. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan Perencanaan kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masayrakat dan desa;
d. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masayrakat dan desa;
e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (MUSRENBANG) tahunan di Kecamatan.
g. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
h. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

k. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

l. melakukan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

n. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa;

p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

s. melaksanakan tugas operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

t. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

u. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

(3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan Perencanaan kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati di bidang tata ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
d. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
f. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan

ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;

g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kecamatan;

i. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;

j. melakukan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

k. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

m. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

n. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;

p. melaksanakan penyusunan bahan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan di wilayah Kecamatan;

q. melaksanakan penyusunan bahan penanganan kasus-kasus di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

r. melaksanakan pengkajian perumusan langkah-langkah antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
s. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
t. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya (pamswakarsa di wilayah Kecamatan);
u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan;
v. melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
w. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
y. melaksanakan tugas operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
aa. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
cc. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
dd. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum Pemerintahan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum; dan
c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

(1) melaksanakan Perencanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
(2) melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
(3) melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahakan oleh Bupati di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(4) melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(5) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan umum;
(6) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan umum;

(7) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(8) melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
(9) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(10) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(11) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(12) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
(13) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(14) melaksanakan penyusunan bahan informasi pelayanan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(15) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(16) melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(17) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
(18) melaksanakan tugas operasional di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(19) melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(20) melaksanakan ketatausahaan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
(21) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

(22) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum; dan

(23) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 84 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 84 tahun 2020 tentang Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Cikalongwetan dipimpin oleh seorang Pejabat Esselon III a yaitu Camat, dan diisi oleh seorang pejabat Esselon III b sebagai Sekretaris Kecamatan, 4 Orang Pejabat Esselon IV a dan 2 Orang Pejabat Esselon IV b, secara rinci sebagai berikut sebagaimana gambar 2.1 berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Cikalongwetan
Kabupaten Bandung Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

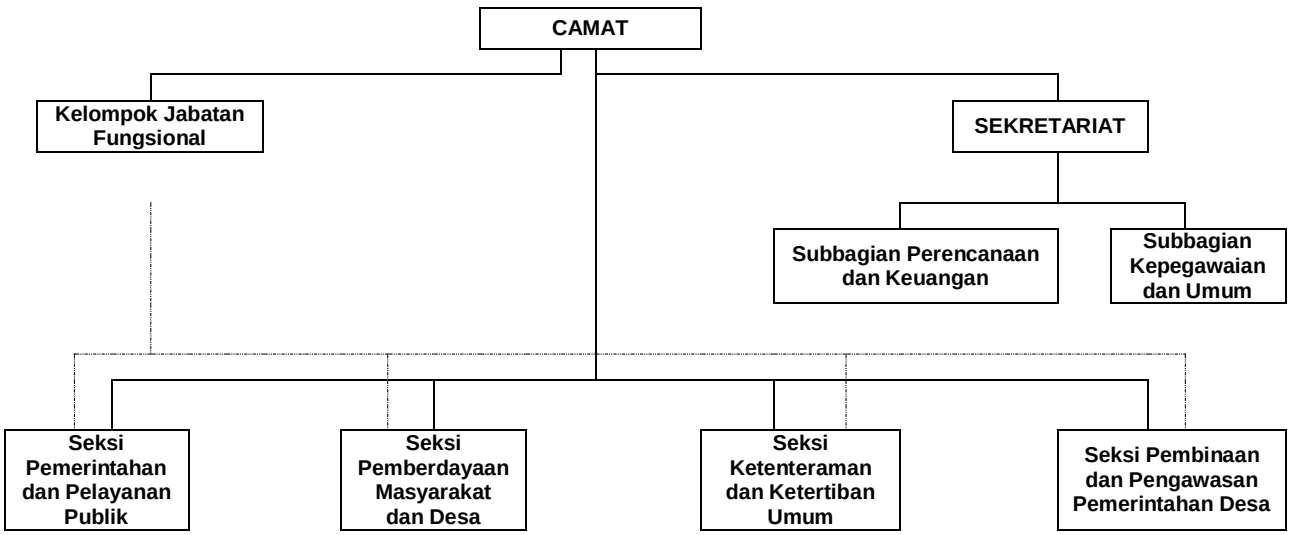

B. Sumber Daya Kecamatan Cikalongwetan

1. Sumberdaya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat memiliki pegawai sebanyak 26 orang, terdiri dari PNS 13 Orang TKK / PTT 13 Orang . Selanjutnya khusus untuk keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diuraikan berdasarkan golongan, pendidikan formal dan pendidikan dalam jenjang struktural sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1
PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I	IV/b	-
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tk. I	III/d	2
4.	Penata	III/c	3
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Penata Muda	III/a	1
6.	Pengatur Tk. I	II/d	2
7.	Pengatur	II/c	1
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
9.	Pengatur Muda	II/a	-
10.	Juru Tk. I	I/d	-
11.	Juru	I/c	-
12.	Juru Muda Tk. I	I/b	-
13.	Juru Muda	I/a	-
Jumlah			12

2. Sumber Daya aset/Modal

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Peralatan dan Perlengkapan / Aset

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG BAIK
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Alat dapur lainnya/Yongma	1	1	
2	Televisi	2	1	1
3	Personal komputer	5	5	
4	Kursi kerja pejabat Eselon III	1	1	
5	Lemari dan arsip pejabat lain-lain	1	1	
6	Mesin fotocopy dengan kertas biasa	1	-	1
7	Kursi putar	14	13	1
8	Loudspeaker	2	2	
9	Note book	9	8	1
10	Printer	7	6	1
11	Meja kerja pejabat	11	11	
12	Camera film dan vidieo	3	2	1
13	Infocus	1	1	
14	Layar Film	1	1	
15	Faxsimille	2	-	2
16	Sepeda motor	5	4	1
17	Filling besi metal	4	4	
18	Tempat tidur kayu lengkap	1	1	
19	Sofa	1	1	
20	Lemari penyimpanan	1	1	
21	Papan visual	1		1
22	Papan pengumuman	4		4
23	Kursi tamu	4	4	
24	Mesin potong rumput	1	1	
25	AC unit	2	2	
26	Sound system	1	1	
27	Dispenser	2	2	
28	Antena MF/MW Transportable	1	1	
29	Rig universal	1	1	
30	Rak-rak penyimpanan	1	1	
31	Meja computer	3	3	
32	Mesin potong rumput	1		1
33	Mesin ketik manual	2	1	1
34	Meja rapat	2	2	
35	Meja Panjang	1	1	
36	Radio	1		1
37	UPS Prolink	1	1	
38	Mini busToyota Rush	1	1	

39	CPU	3		3
40	Tugu peringatan	1	1	
41	Tugu tanda batas administrasi	6	6	
42	Bangunan gedung rumah dinas	1	1	
43	Bangunan gedung kantor pendopo	1	1	
44	Bangunan gedung kantor pelayanan	1	1	
45	Bangunan gedung kantor mushola	1	1	
46	Bangunan gedung kantor Satpol PP	1	1	
47	Bangunan gedung kantor ruang Gudang	1		1
48	Kursi rapat	60	60	
49	Piala	10	10	
50	Kompor gas	1	1	
51	Tabung gas	1	1	
52	Dispenser	2	2	
53	Tempat sampah	6	6	
54	Rak piring	1	1	
55	Stabilizer	2	0	2
56	Power suplai	1	1	
57	Buku	1	1	
58	Buku laporan	1	1	
Jumlah		207	188	23

3. Tantangan dan peluang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk 3 (tiga) tahun, maka perlu dukungan, komitmen dan SDM kecamatan yang semakin meningkat. Sehingga meningkatnya sinergi antara Kecamatan Cikalongwetan dengan Perangkat Daerah lainnya. Maka diharapkan kecamatan Cikalongwetan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, dalam rangka mewujudkan visi, misi Kepala Daerah terpilih, diawali dengan tersusunnya dokumen perencanan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD yang telah disepakati bersama.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Cikalongwetan 3 (tiga) tahun kedepan dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

A. Tantangan :

1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus lebih konsisten, hal ini dapat diawali dengan perbaikan kualitas dokumen

perencanaan dan penganggaran. Penyelesaran program, kegiatan dan sub kegiatan harus terus dilakukan dengan baik.

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
3. Penentuan indikator kinerja sasaran harus berorientasi outcome, pemilihan sasaran strategis termasuk didalamnya penentuan Indikator kinerja dan targetnya, harus senantiasa mempertimbangkan kondisi aktual yang ada dan didasarkan pada isu-isu strategis kewilayahan yang relevan.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan, seyogyanya diprioritaskan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
5. Kemajuan Teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Peluang :

1. Bonus demografi dapat dioptimalkan semaksimal mungkin dalam rangka percepatan pembangunan di segala bidang dengan meningkatnya kualitas SDM baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat umum dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, kursus-kursus, pembinaan dan bimtek.
2. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dan jajarannya untuk merubah dari “dilayani” menjadi “melayani” yang didukung dengan kesejahteraan aparatur yang lebih baik, sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang lebih representatif dan memadai.
3. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah tertata dengan baik.
4. Kepemimpinan camat yang berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Cikalongwetan.

5. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
6. Sinergi antara program pemerintah baik dari pusat maupun daerah sampai ke tingkat perangkat daerah semakin baik dan kolaboratif.
7. Semakin meningkatnya promosi informasi daerah terutama di bidang kesehatan, pendidikan, agroindustri, wisata dan UMKM.
8. Semakin meratanya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana tranportasi, jaringan irigasi, pendidikan, energi dan kesehatan.
9. Semakin lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung visi dan misi KBB .
10. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan kegiatan pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan bimtek baik oleh intern SKPD, kabupaten maupun propinsi dan pusat.
11. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikalongwetan yang ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024- 2026 adalah bagian yang terintegrasi dengan RPJM Kabupaten Bandung Barat serta merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Kecamatan Cikalongwetan yang disusun dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Bandung Barat yaitu **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.**

Dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki kecamatan Cikalongwetan, dalam upaya mewujudkan misi ke-4 RPJMD yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berbasis Pengembangan Teknologi Informasi dan Inovasi”, berdasarkan Bidang / urusan yang akan dilaksanakan yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dirumuskanlah tujuan strategis sebagai berikut ;

(1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,

(2) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

(3) Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rumusan Misi dimaksud telah sejalan dan menjadi pedoman untuk penetapan misi RMJMD kabupaten Bandung Barat 2024-2026 yaitu misi ke 4 : "*Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi"*

Sasaran kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Cikalongwetan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan kecamatan
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
c. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum

Upaya Pemerintahan Kecamatan Cikalongwetan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk dukungan sebagai bagian dari *stakeholder* dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalammenerapkan strategi dan kebijakan.

Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Cikalongwetan selama kurun waktu 2024-2026. Kecamatan Cikalongwetan berupaya menerapkan *komprehensive strategy* yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tujuan, sasatan, strategi dan kebijakan Kecamatan Cikalongwetan untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diembannya yang dituangkan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cikalongwetan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan kecamatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP)	62 (B)	63,5 (B)	65 (B)
2.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	84.22	84.94	85.66
3	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100%	100%	100%

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cikalongwetan

Visi : **Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius) berbasis Pengembangan Ekonomi, Optimalisasi Sumberdaya Alam dan Kualitas Sumberdaya Manusia**			
Misi 4 : **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan kecamatan	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kelembagaan kecamatan
Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif, efektif, efisien melalui birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kecamatan dan desa	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan prima kepada masyarakat dengan penyelenggaraan kegiatan Paten yang kreatif dan inovatif berbasis IT
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mengembangkan peningkatan peran kecamatan dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban umum

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan dokumen RENSTRA Kecamatan Cikalongwetan Tahun 2024-2026 dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai landasan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

Hal ini mengingat Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan intansi pemerintah, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mangarahkan dan mengelola program atau kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Cikalongwetan, masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

Tabel 6 adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja kecamatan Cikalongwetan.

Tabel 5
Rekapitulasi Daftar Program Dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
			UNSUR KEWILAYAHAN										
			KECAMATAN								**6,284,168,742**		
01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,206,288,542**	**(1.156.367.646)**	
01	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								13.229.500		
01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	2 Dokumen		4.761.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Dokumen		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	1 Dokumen		2.117.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Dokumen		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	1 Dokumen		2.117.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Dokumen		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	1 Dokumen		2.117.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Dokumen		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	1 Dokumen		2.117.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

01	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.893.483.342**	**1.156.367.646 (berkurang)**	
01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah ASN		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	14 Bulan		2.855.528.942	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.156.367.646 (berkurang)
01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Dokumen		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	1 Dokumen		3.754.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan /Triwulanan/Semesteran PD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Dokumen		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	12 Dokumen		34.200.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	**2,03**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3.600.000**		
01	2,03	06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Pakaian Dinas		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	12 Dokumen		3.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**121.993.600**		
01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	12 Dokumen		121.993.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**45.679.000**		
01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	8 Paket		6.418.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Bahan Logistik Kantor		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	14 Paket		26.231.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Cetak		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	4 Paket		13.030.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35.083.100**		
01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Bulan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	12 Bulan		3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	12 Bulan		32.083.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93.220.000**		
01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Kendaraan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	7 unit		87.540.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	2,09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kelurahan	68.50 (B) Angka / Mutu	10 unit		5.680.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**304.058.200**		
02	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**120.552.600**		

02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	2 kegiatan		120.552.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
02	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**84.005.600**		
02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Jumlah Pelayanan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan		84.005.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
02	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**11.400.000**		
02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan		11.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
02	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**88.100.000**		
02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	2 kegiatan		88.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**152.883.200**		
03	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**152.883.200**		

03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan		25.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	2 kegiatan		127.383.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**920.723.800**		
04	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**920.723.800**		
04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	12 kegiatan		920.723.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**1.700.215.000**		
06	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**1.700.215.000**		
06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Jumlah Kegiatan		Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan , Semua Kelurahan	100 %	12 kegiatan		1.700.215.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

BAB IV
P E N U T U P

Perencanaan Kinerja sebagai aktifitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cikalongwetan 2024 sebagai dokumen perencanaan yang merupakan turunan dari Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program/kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cikalongwetan.

Dengan kesungguhan dari semua pihak serta komitmen yang tinggi untuk melaksanakan agenda kegiatan Pemerintah

Cikalongwetan, Oktober 2024

CAMAT CIKALONGWETAN

H. DADANG A. SAPARDAN,M.Pd.
NIP. 19680515 199512 1 003

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CISARUA TAHUN 2024

KECAMATAN CISARUA

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun, Permendagri no 90 tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Tahun 2024 ini merupakan Implementasi Penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja beserta Kelompok Sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih Objektif, karena Rencana Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan Anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ada.

Cisarua, Agustus 2024

CAMAT CISARUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CISARUA

Drs. TAUFIK FIRMANSYAH, M.Si

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19670620 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD & TUJUAN 2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA **5**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisarua tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cisarua Tahun 2022 5

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua 21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (MUSRENBANG) 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **53**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 53

3.2. Tujuan dan sararan Renja Kecamatan Cisarua 55

3.3. Program dan Kegiatan 59

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **101**

PENUTUP **147**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cisarua Tahun Anggaran 2022 5
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD 11
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua 22
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Cisarua 25
Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2022 .. 36
Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 53
Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua 55
Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2023 56
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 61
Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2024 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD..... 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada Level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam Satu Tahun Anggaran dan Kerangka Regulasi serta memberikan Gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja dan bagaimana Pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cisarua Tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD periode satu tahun, hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Daerah nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja perubahan Kantor Kecamatan Cisarua Tahun 2024 menjadi acuan di dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Rencana Kerja SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Rencana kerja SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
4. Rencana Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah sesuai perkembangannya.
5. Rencana Kerja dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan anggaran sumberdaya dan waktu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Tentative
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Perda 3 tahun 2019 tentang RPJMD
13. Perbup SOTK Tentang Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan

1.3. MAKSUD & TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Kantor Kecamatan Cisarua dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya.

Sebagai implementasi dari Renstra SKPD. Sedangkan Tujuannya Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatkan pelayanan, menentukan target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
2. Menyelaraskan siklus perencanaan lima tahunan (Renstra) SKPD dengan rencana tahunan SKPD.
3. Menyelaraskan perencanaan tahunan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan Visi dan misi Kepala Daerah

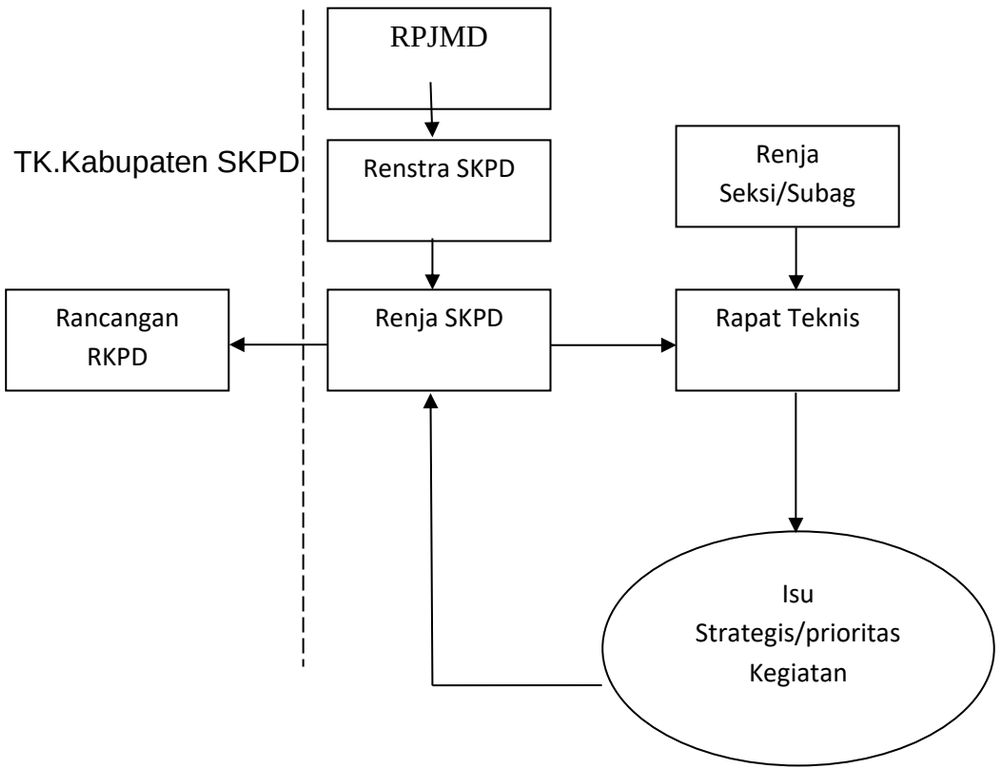

Gambar 1.1 PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas tentang Latar belakang, pengertian ringkas tentang Rencana kerja SKPD, kedudukan renja SKPD dalam system perencanaan daerah, serta landasan yang mengatur tentang system perencanaan nasional

1.2 Landasan hukum

Merupakan landasan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan SKPD

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dari penyusunan Renja, serta tujuan yang ingin di capai dari tersusunnya rencana kerja SKPD tersebut.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan tentang isi bab per bab dalam menyusun Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN CISARUA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cisarua

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Cisarua

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Cisarua

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisarua tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cisarua Tahun 2024

Rencana kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan diskenariokan dalam Renja.

Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas dasar dokumen diatas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya, (anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2023 lengkap dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cisarua Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN , DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2 layanan**	**2 layanan**	100%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	17 ASN	17 ASN	100%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
12	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**2 layanan**	**2 layanan**	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas	27 Stel	27 Stel	100%
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**3 layanan**	**3 layanan**	100%
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	100%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	32 Jenis	100%
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	10000 Lembar	10000 Lembar	100%
19	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan jasa penunjang kebutuhan Kantor dalam satu tahun**	**1 layanan**	**1 layanan**	100%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya kebutuhan penunjang Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
21	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK**	**6 unit**	**6 unit**	100%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	100%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	5 Unit	5 Unit	100%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
25	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	100%
26	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	100%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
28	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan**	**100%**	**100%**	100%
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan	5 Jenis Pelayanan	5 Jenis Pelayanan	100%
30	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**100%**	100%
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
32	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**100%**	100%
33	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100%**	100%
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan	2 Keg	2 Keg	100%
35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	3 Keg	3 Keg	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
36	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksanannya Pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**100%**	100%
37	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	11 Keg	11 Keg	100%
38	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**100%**	100%
39	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksanannya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	100%
40	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%
41	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	100%
42	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananny a Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**100%**	100%
43	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kesimpulan dari Tabel 2.1 Tentang Capaian target dan realisasi program dan kegiatan kecamatan cisarua tahun anggaran 2023 dapat di diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pengukuran kinerja melalui pendekatan pencapaian program, secara umum tingkat pencapaiannya berkisar 100%, Pencapaian kinerja program secara keseluruhan dikategorikan baik ,

2. Pencapaian kinerja keuangan berkisar antara 100% yang hingga yang terendah 98,42%, pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan dirata-ratakan sebesar 99,82 % atau dikategorikan baik.

Dari kedua poin diatas, aspek kinerja program yang dilaksanakan dinilai efektif, sedangkan aspek pencapaian keuangan dinilai efisien.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD

NAMA SKPD : Kantor Kecamatan Cisarua

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB									
4.01.4.01.21.01.	**Program Administrasi Perkantoran**									
4.01.4.01.21.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materei, dan benda pos lainnya	6500 buah	1300 buah	650 buah	650 buah	100	650 buah	2600 buah	**40,00**
4.01.4.01.21.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 1 tahun	120 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	**40,00**
4.01.4.01.21.01.003.	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Jenis	12 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	24 Jenis	**40,00**

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Alat kebersihan dan petugas kebersihan	130 OB, 305 Jenis barang	52 OB, 122 Jenis barang	26 OB, 61 Jenis barang	26 OB, 61 Jenis barang	100	26 OB, 61 Jenis barang	104 OB, 244 Jenis barang	**80,00**
4.01.4.01.21.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	510 Jenis	102 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	100	51 Jenis	204 Jenis	**40,00**
4.01.4.01.21.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	50 jenis barang cetak dan 165.000 Lembar penggandaan	20 jenis barang cetak dan 66.000 Lembar penggandaan	10 jenis barang cetak dan 33.000 Lembar penggandaan	10 jenis barang cetak dan 33.000 Lembar penggandaan	100	10 jenis barang cetak dan 33.000 Lembar penggandaan	40 jenis barang cetak dan 132.000 Lembar penggandaan	**80,00**
4.01.4.01.21.01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 jenis	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	20 jenis	**66,67**
4.01.4.01.21.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah Rapat Koordinasi dalam 1 tahun	60 kali Rapat	24 kali Rapat	12 kali Rapat	12 kali Rapat	100	12 kali Rapat	48 kali Rapat	**80,00**

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.01.025.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Non PNS	pembayaran iuran asuransi BPJS untuk Pegawai non PNS sebanyak 8 orang	80 Orang	16 Orang	8 Orang	8 Orang	100	8 Orang	32 Orang	**40,00**
4.01.4.01.21.02.	**Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**									
4.01.4.01.21.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bahan Bangunan dan petugas Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Gedung Kantor	2 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100	1 Gedung Kantor	4 Gedung Kantor	**80,00**
4.01.4.01.21.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah servis Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit Roda empat : 20 kali servis (20 HOK) dan 2 unit roda dua 24 kali servis (48 OK)	1 unit Roda empat : 8 kali servis (8 HOK) dan 2 unit roda dua 12 kali servis (24 OK)	1 unit Roda empat : 4 kali servis (4 HOK) dan 2 unit roda dua 6 kali servis (12 OK)	1 unit Roda empat : 4 kali servis (4 HOK) dan 2 unit roda dua 6 kali servis (12 OK)	100	1 unit Roda empat : 4 kali servis (4 HOK) dan 2 unit roda dua 6 kali servis (12 OK)	1 unit Roda empat : 16 kali servis (16 HOK) dan 2 unit roda dua 16 kali servis (32 OK)	**80,00**

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.03.	**Program peningkatan disiplin aparatur**									
4.01.4.01.21.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah BaJumlah pakaian Dinas dan pakaian olahraga	135 stel	54 stel	27 stel	28 stel	100	27 stel jaket Olah Raga dan baju batik	109 stel	**80,74**
4.01.4.01.21.05.	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**									
4.01.4.01.21.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi sumber daya aparatur	200 Orang	80 Orang	40 Orang	40 Orang	100	40 Orang	160 Orang	**80,00**
4.01.4.01.21.06.	**Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan**									

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	8 dokumen LAKIP LPPD LKPJ E Monev	4 dokumen : LAKIP, LPPD, LKPJ, E Monev	4 dokumen : LAKIP, LPPD, LKPJ, E Monev	100	4 dokumen : LAKIP, LPPD, LKPJ, E Monev	16 dokumen LAKIP LPPD LKPJ E Monev	**80,00**
4.01.4.01.21.06.005.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan	35 Dokumen	14 Dokumen BKU Pengesahan SPJ SPJ Pengeluaran BAP Register Kas Rincian Per Objek Laporan prognosis dan Laporan Keuangan	7 Dokumen (BKU, Pengesahan SPJ, SPJ Pengeluaran, BAP Register Kas, Rincian Per Objek, Laporan prognosis dan Laporan Keuangan)	7 Dokumen (BKU, Pengesahan SPJ, SPJ Pengeluaran, BAP Register Kas, Rincian Per Objek, Laporan prognosis dan Laporan Keuangan)	100	7 Dokumen (BKU, Pengesahan SPJ, SPJ Pengeluaran, BAP Register Kas, Rincian Per Objek, Laporan prognosis dan Laporan Keuangan)	28 Dokumen BKU Pengesahan SPJ SPJ Pengeluaran BAP Register Kas Rincian Per Objek Laporan prognosis dan Laporan Keuangan	**80,00**
4.01.4.01.21.07.	**Program peningkatan pengembangan system**									

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	perencanaan SKPD									
4.01.4.01.21.07.001.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanann SKPD	35 Dokumen	14 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	28 dokumen	**80,00**
2.07.4.01.21.17.	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**									
2.07.4.01.21.17.002.	Musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	4 Kegiatan	**80,00**
2.07.4.01.21.19.	**Program peningkatan peran perempuan di pedesaan**									

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.4.01.21.19.002.	Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	30 Kegiatan	12 jenis kegiatan Pembinaan PKK	6 jenis kegiatan Pembinaan PKK	6 jenis kegiatan Pembinaan PKK	100	6 jenis kegiatan Pembinaan PKK	24 jenis kegiatan Pembinaan PKK	**80,00**
4.02.4.01.21.20.	**Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**									
4.02.4.01.21.20.003.	Pengendalian manajmen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan KDH	5 Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100	1 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	**80,00**
4.01.4.01.21.16.	**Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil Kepala Daerah**									

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.16.009.	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)	Jumlah Kegiatan	50 Jenis Layanan dan 5 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20 Jenis Layanan dan 2 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 Jenis Layanan dan 1 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 Jenis Layanan dan 1 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	10 Jenis Layanan dan 1 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	40 Jenis Layanan dan 4 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**80,00**
4.01.4.01.21.32.	**Program peningkatan pelayananan masyarakat**									
4.01.4.01.21.32.001.	Fsilitasi pelayanan adminitrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Jenis pelayanan	10 Kegiatan	4 Kegiatan Pembinaan RAPBdes dan APBDes	2 Kegiatan Pembinaan RAPBdes dan APBDes	2 Kegiatan Pembinaan RAPBdes dan APBDes	100	2 Kegiatan Pembinaan RAPBdes dan APBDes	8 Kegiatan Pembinaan RAPBdes dan APBDes	**80,00**
4.01.4.01.21.35.	**Program peningkatan dan pengembangan Kecamatan**									

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.35.001.	Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monev bidang Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan	10 Kegiatan	4 Kegiatan Pembinaan Linmas dan Bencana Alam	2 Kegiatan Pembinaan Linmas dan Bencana Alam	2 Kegiatan Pembinaan Linmas dan Bencana Alam	100	2 Kegiatan Pembinaan Linmas dan Bencana Alam	8 Kegiatan Pembinaan Linmas dan Bencana Alam	**80,00**
4.01.4.01.21.35.002.	Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monev bidang PMD	Jumlah Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Bidang PMD.	10 Kegiatan	4 Kegiatan Pembinaan KBU	2 Kegiatan Pembinaan KBU	2 Kegiatan Pembinaan KBU	100	2 Kegiatan Pembinaan KBU	8 Kegiatan Pembinaan KBU	**80,00**
4.01.4.01.21.35.003.	Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monev bidang Tramtib	Jumlah Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Bidang Trantib.	10 Kegiatan	4 Kegiatan Pembinaan izin gangguan HO dan PBB	2 Kegiatan Pembinaan izin gangguan (HO) dan PBB	2 Kegiatan Pembinaan izin gangguan (HO) dan PBB	100	2 Kegiatan Pembinaan izin gangguan (HO) dan PBB	8 Kegiatan Pembinaan izin gangguan HO dan PBB	**80,00**
4.01.4.01.21.35.004.	Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monev bidang PSU	Jumlah Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Bidang PSU .	10 Kegiatan	4 Kegiatan Pembinaan izin gangguan HO dan PBB	2 Kegiatan Pembinaan izin gangguan (HO) dan PBB	2 Kegiatan Pembinaan izin gangguan (HO) dan PBB	100	2 Kegiatan Pembinaan izin gangguan (HO) dan PBB	8 Kegiatan Pembinaan izin gangguan HO dan PBB	**80,00**

Kode	Urusan/Bidang Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d th 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2021 tahun berjalan (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renja SKPD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.21.35.005.	Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monev bidang EP2D	Jumlah Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Bidang EP2D	5 Kali Kegiatan	2 kali Kegiatan	1 kali Kegiatan	1 kali Kegiatan	100	1 kali Kegiatan	4 kali Kegiatan	**80,00**

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua

Analisis menggambarkan tingkat efektifitas kinerja / pencapaian program melalui tingkat capaian indicator dengan membandingkan antara target dengan realisasi, sehingga dicapai prosentase capaian, analisis efektifitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara target dengan realisasi, selain itu analisis juga dilakukan terhadap perbedaan kinerja yang terjadi, termasuk penyebabnya untuk dicari solusi pemecahannya.

Analisa kinerja pelayanan sesuai dengan PP No 6 tahun 2008 adalah dengan cara membandingkan tingkat capaian kinerja dengan :

1. Target kinerja yang tertuang dalam rencana kerja
2. Realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya

Format pencapaian kinerja kantor kecamatan Cisarua Tahun 2023 dan 2022 sebagai mana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun n-2 (2020)	Tahun n-1 (2021)	Tahun - n (2022)	Tahun n+1 (2023)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n (2022)	Thn n+1 (2023)	
								2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**			**CC**	**B**	**BB**	**BB**	**CC**		**BB**	**BB**	
2	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**			**84,9**	**84,98**	**85**	**85,86**	**83,09**		**85**	**85,86**	

Kesimpulan dari Tabel 2.3 Tentang Pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua dapat di diuraikan sebagai berikut :

a) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Tahun 2020 tercapai 95,3 %, dan Tahun 2021…..
b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :
   Tahun 2020 tercapai 97,86% dan Tahun 2021 ….

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Cisarua sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kantor Kecamatan Cisarua pada tahun 2021 mencapai angka 96,58 % atau dengan kata lain cukup tinggi, hal ini diwujudkan dengan 2 indikator sebagai berikut :
   - Capaian > 100 % : sebanyak 0 indikator
   - Capaian 100 % : sebanyak 0 indikator
   - Capaian 99-100 % : 0 indikator
   - Capaian < 99 % : 2 indikator
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain masih tahap optimalisasi sarana dan prasarana kantor.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum optimalnya sistem pelayanan.
4. Dampak Pandemi Covid-19
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah jumlah tenaga pegawai yang masih kurang disamping sarana kantor, dan peluang akan kebutuhan tersebut di atas dapat di usulkan/dipenuhi pada tahun berikutnya,
6. Sedangkan isu-isu penting yang perlu di tindak lanjuti pada tahun mendatang adalah berupa:
   - Belum optimalnya sarana Kantor yang memadai
   - Penanggulangan dampak Covid - 19
   - Rendahnya aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi

- Masih buruknya sarana perhubungan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Kantor Kecamatan Cisarua, dengan arahan kepala SKPD terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatip yang di sediakan untuk Kantor Kecamatan Cisarua berdasarkan rancangan awal.

Kalau kita lihat rancangan awal renja SKPD Tahun 2024, disusun pada awal tahun 2021, dimana tahun tersebut adalah merupakan Tahun 4 dari masa pembangunan lima tahun yang ketiga di Kabupaten Bandung barat, dimana sistem perencanaan SKPD mengacu pada perubahan RPJMD 2018 -2023.

Berdasarkan Perubahan Renstra untuk masa tahun 2018-2023, maka program dan kegiatan yang di susun di awal 2021 untuk rencana Tahun 2024 perlu menyesuaikan dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatip yang tertuang sebagaimana tercantum pada RPJMD 2018-2023, untuk itulah review terhadap rancangan awal RKPD dapat di jabarkan pada table berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Cisarua

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Cisarua	NILAI SAKIP	100%	3.875.405.828	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Cisarua	NILAI SAKIP	100%	3.875.405.828	
2	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10 Dok	27.830.900	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10 Dok	27.830.900	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 Dok	12.613.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 Dok	12.613.800	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	1 Dok	2.236.900	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cisarua	Jumlah Dokumen	4 Dok	6.269.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cisarua	Jumlah Dokumen	4 Dok	6.269.500	
9	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2 layanan	3.506.107.949	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2 layanan	3.506.107.949	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cisarua	Jumlah ASN	18 ASN	3.429.425.477	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cisarua	Jumlah ASN	18 ASN	3.429.425.477	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Dokumen	4 Dok	76.682.472	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Cisarua	Jumlah Dokumen	4 Dok	76.682.472	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2 layanan	111.426.744	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2 layanan	111.426.744	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cisarua	Jumlah Pakaian Dinas	28 Stel	25.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cisarua	Jumlah Pakaian Dinas	28 Stel	25.500.000	
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 Keg	85.926.744	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 Keg	85.926.744	
15	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5 layanan	93.861.500	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5 layanan	93.861.500	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cisarua	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	36.827.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cisarua	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	36.827.800	
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cisarua	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis	9.289.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cisarua	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis	9.289.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cisarua	Jumlah Bahan Logistik Kantor	23 Jenis	18.665.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cisarua	Jumlah Bahan Logistik Kantor	23 Jenis	18.665.400	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Penggandaan	10000 Lembar	5.078.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Penggandaan	10000 Lembar	5.078.400	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	12 Keg	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	12 Keg	24.000.000	
21	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIBELI DALAM SATU TAHUN	6 Unit	29.187.500	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIBELI DALAM SATU TAHUN	6 Unit	29.187.500	
22	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cisarua	Jumlah mebel	6 Unit	29.187.500	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cisarua	Jumlah mebel	6 Unit	29.187.500	
23	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN JASA PENUNJANG KEBUTUHAN KANTOR DALAM SATU TAHUN	2 Layanan	31.020.000	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LAYANAN JASA PENUNJANG KEBUTUHAN KANTOR DALAM SATU TAHUN	2 Layanan	31.020.000	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cisarua	Jumlah Bulan	12 Bulan	19.020.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cisarua	Jumlah Bulan	12 Bulan	19.020.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cisarua	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	12.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cisarua	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	12.000.000	
26	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK	5 Unit	75.971.235	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK	5 Unit	75.971.235	
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cisarua	Jumlah Peralatan	5 Unit	56.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cisarua	Jumlah Peralatan	5 Unit	56.050.000	
28	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisarua	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	19.921.235	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cisarua	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	19.921.235	
29	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	434.491.744	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cisarua	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	434.491.744	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	4 Keg	121.208.600	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	4 Keg	121.208.600	
31	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	4 Keg	121.208.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	4 Keg	121.208.600	
32	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	5 Jenis Pelayanan	253.921.544	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	5 Jenis Pelayanan	253.921.544	
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Pelayanan	5 Jenis Pelayanan	253.921.544	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Pelayanan	5 Jenis Pelayanan	253.921.544	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Keg	59.361.600	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Keg	59.361.600	
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	4 Keg	59.361.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	4 Keg	59.361.600	
36	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cisarua	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	272.860.400	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cisarua	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	272.860.400	
37	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	9 Keg	272.860.400	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	9 Keg	272.860.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 keg	81.274.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 keg	81.274.400	
39	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	3 Keg	72.580.800	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	3 Keg	72.580.800	
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	4 keg	119.005.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	4 keg	119.005.200	
41	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cisarua	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	390.600.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cisarua	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	390.600.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	12 Keg	390.600.000	**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANYA KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	12 Keg	390.600.000	
43	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	12 Keg	390.600.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	12 Keg	390.600.000	
44	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cisarua	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	912.817.200	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cisarua	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	912.817.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	13 keg	912.817.200	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cisarua	TERLAKSANANNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	13 keg	912.817.200	
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 Keg	64.037.200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	2 Keg	64.037.200	
47	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	11 Keg	848.780.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cisarua	Jumlah Kegiatan	11 Keg	848.780.000	
JUMLAH					5.886.175.172	JUMLAH				5.886.175.172	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (MUSRENBANG)

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisarua telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari

masyarakat melalui Forum PD dan Musrenbang Kecamatan dengan menghasilkan usulan daftar skala prioritas pada tahun 2021 yang akan direalisasikan Tahun 2024. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang atau mitra terkait perencanan pembangunan di Kecamatan Cisarua. Berikut Daftar usulan skala prioritas Kecamatan Cisarua :

Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2024

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
1	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak Domba Bina Bakti PIKW	Jl Desa Cipada No 25, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	10 Ekor	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak Domba Burangrang I PIKW	Kp Umur-umuran Rw.04, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	10 Ekor	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak Domba Burangrang II PIKW	Kp.Barujumaah Rw.06, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	10 Ekor	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak Domba Burangrang III PIKW	Kp. Barupadang Rw 08, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	10 Ekor	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak Domba Burangrang IV PIKW	Kp.Kiaralawang Rw.09, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	10 Ekor	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak burangrang V PIKW	Kp.Pasircalung Rw.10, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	10 Ekor	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Penyedian / Pengadaan Hewan Ternak	Kelompok Ternak Domba MUKTI RAHAYU PIKW	Jl.Desa Cipada No 25, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	1 Kelompok	Rp21.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
8	Usulan berupa bantuan modal ataupun barang bagi kelompok PEKKA dengan mengacu pada skala prioritas (PIKW)	Kelompok SAUYUNAN Pengadaan Pelatihan dan Pengadaan Alat Tataboga PIKW	Kp. Barujumaah Rt.04 Rw.06, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	1 Kelompok	Rp10.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
9	Pemberdayaan PKK	Kelompok CITRA RASA Pengadaan Pelatihan dan Pengadaan Alat Tataboga PIKW	Jl.Desa Cipada No.25, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	1 Kelompok	Rp20.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	Usulan berupa Pelatihan, Bantuan Alat dan bantuan modal usaha (Bansos). (PIKW)	Kelompok Bhina Bhakti PIKW	Desa Cipada, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Rp190.000.000	
11	Usulan berupa bantuan sarana dan prasarana pendukung (PIKW)	msh minimnya sarana prasarana kepustakaan	TBM MAWAR 16 Kampung Jambudipa RW 16, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
12	Usulan berupa bantuan modal ataupun barang bagi kelompok PEKKA dengan mengacu pada skala prioritas (PIKW)	belum adanya bantuan modal usaha	MAWAR 15,Kampung Muril RT 02 RW 15, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	1 Paket	Rp10.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
13	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Hasil Produksi Telur Puyuh masih kurang, perlu adanya pengembangan Produksi	Kelompok Puyuh " PELOPOR" Kp. Paratag RT 01 RW 07, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	200 Ekor	Rp25.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
14	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Kelompok Ternak " BERKAH" masih kurang hasil Produksi Domba	Kelompok " BERKAH",Kp. Muril RT 03 RW 15, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	23 Ekor	Rp48.300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Usulan berupa sarana prasarana dalam upaya pengelolaan sampah. (PIKW)	Belum adanya pengelolaan sampah yang optimal(Kendaraan Pengangkut,Bak sampah,tong sampah,mesin penghancur)	DEsa Jambudipa RT 03 RW 08, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	1 Paket	Rp86.700.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
16	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Perlu adanya bimbingan dan bantuan untuk kelompok UMKM Jambudipa Mandiri	Rt 03 Rw 08 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
17	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	UMKM MAWAR Kecamatan,perlu adanya pengembangan usaha	Rt 03 Rw 08 Desa Jambudipa, Cisarua, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Rp320.000.000	
18	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bibit tanaman pangan (PIKW)	kurangnya ketersedian bibit tanaman pangan dikarenakan adanya pandemi (KELOMPOK MAKMUR TANI)	kp. cibolang RT 01 RW 10 Dusun III, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
19	Pengembangan UMKM	kurangnya ketersediaan modal untuk peralatan dan bibit sehingga kami mengajukan permohonan bantuan alat dan modal usaha untuk pengembangan kelompok tani gemah ripah maju (PIKW)	Jalan Mekartani RT 04 RW 05 Dusun I, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp30.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20	Usulan berupa sarana prasarana dalam upaya pengelolaan sampah. (PIKW)	belum tersedianya alat atau mesin pengolah sampah yang baik sehingga perlu adanya bantuan untuk alat atau mesin tersebut diatas dengan tujuan agar sampah bisa di olah secara maksimal maka dari itu kami mengajukan permohonan bantuan alat/mesin pengolah sampah untuk KPS Bangkit (PIKW)	Kp. Cisarua RT 03 RW 06 Dusun II, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
21	Usulan berupa pengadaan prasarana yang berhubungan secara langsung untuk optimalisasi destinasi wisata (PIKW)	kurang tersedia tempat ibadah di lingkungan tempat wisata yang bersih dan baik sebagai penunjang kebutuhan ibadah bagi wisatawan khususnya tempat wisata Curug Putri Layung sehingga kami mengajukan permohonan pembangunan prasarana tempat ibadah berupa Mushola di Curug Putri Layung	curug putri layung Kp. Cijanggel Dusun II, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22	Usulan berupa bantuan Lumbung Pangan (bangunan dan bibit) (PIKW)	kurangnya ketersedian bibit tanaman jeruk lemon dan tempat atau bangunan untuk lumbung bibit pangan sehingga perlu adanya bantuan bibit tanaman khususnya pohon jeruk lemon dengan tujuan pengembangan ekonomi di bidang tanaman jeruk lemon untuk kelompok tani Makmur Tani (PIKW)	Kp. Cibolang RT 01 RW 10 Dusun III, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
23	Usulan berupa pelatihan yang berhubungan secara langsung untuk optimalisasi destinasi wisata baik yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan (PIKW)	belum tersedianya sarana pelatihan bagi pelaku seni yang berhubungan dengan wisata sehingga perlu adanya pelatihan seni khususnya seni tari tradisional yang bisa dilaksanakan memalui kelompk seni Kurawa Merdeka Entertaiment dengan sasaran jumlah peserta sebanyak 50 Orang	Kp. Cibadak RT 01 RW 02 Dusun I, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp15.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24	Bimbingan teknis/pelatihan Pengelolaan Website Desa (PIKW)	usulan berupa pelatihan bagi pengelola website desa dalam rangka transfaransi terkait desa (peserta sebanyak 16 Orang) PIKW	Desa Kertawangi, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp36.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
25	Usulan berupa pelatihan yang berhubungan secara langsung untuk optimalisasi destinasi wisata baik yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan (PIKW)	Usulan berupa pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM bagi pengelola destinasi wisata di wilayah desa kertawangi yang sudah berjalan maupun akan dikembangkan (peserta sebanyak 20 orang anggota POKDARWIS KERTAWANGI BANGKIT) PIKW	Desa Kertawangi, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Rp336.000.000	
26	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan bibit jamur	Kampung Panyandaan RW 001 (Kelompok Tani Jamur Tiram SALUYU), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan modal usaha Tani Sayur	Kampung Pamoyanan RW 013 (Kelompok Tani MANDIRI), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
28	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha Kelompok Tani	Kampung Cipanas RW 004 (Kelompok Tani MAJU RAHAYU), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
29	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha Pertanian	Kampung Ciuyah RW 010 (Kelompok Tani SAHABAT TANI), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha Pertanian	Kampung Pamoyanan RW 014 (KELOMPOK TANI SABILULUNGAN), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
31	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha Pertanian Sayur	Kampung Bongkok RW 007 (Kelompok Tani SALUYU 2), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
32	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Babakan muncang RW 011 (UMKM MANOHARA), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
33	sulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Pamoyanan RW 015 (UMKM ELEKTRO TEHNIK), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
34	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Bongkok RW 008 (Kelompok Tani KEBON HEJO), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
35	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Bongkok RW 009 (Kelompok UMKM ANGKRINGAN), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
36	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Cipanas RW 005 (Kelompok Tani WARGI ASIH), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
37	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Cipanas RW 005 (Kelompok Ternak Kambing BERKAH), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
38	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Cilimus RW 006 (Kelompok Tani HIDAYAH), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
39	Usulan berupa bantuan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih/ bibit) (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha Pertanian	Kampung Cilimus RW 003 (Kelompok Tani BERKAH), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
40	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Pamoyanan RW 013 (UMKM KARI CUR), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
41	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Kekurangan Modal Usaha	Kampung Cilimus RW 003 (KELOMPOK UMKM SEGARA), Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
42	Usulan berupa pengadaan prasarana yang berhubungan secara langsung untuk optimalisasi destinasi wisata (PIKW)	Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Curug Penganten dan Curug Lalay	Kp. Bongkok RW 09 Dan RW 07 Desa Padaasih, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp13.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
43	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	KELOMPOK BINA INSANI (TERNAK KAMBING) MEMBUTUHKAN BIBIT KAMBING 23 EKOR	Kp. babakan Slamet RW 01 RT 01 Desa Padaasih, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih	1 Kelompok	Rp48.300.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
					Rp269.300.000	

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
44	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Pengadaan bibit ternak untuk kelompok Tani ternak Mandiri	Kp.Sindangsari RW 007, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	23 Ekor	Rp48.300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
45	Usulan berupa sarana prasarana dalam upaya pengelolaan sampah. (PIKW)	Pengadaan tempat sampah organik dan anorganik	Kp.Pameungpeuk RW 012, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	8 Set	Rp16.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
46	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Pengadaan bibit ternak domba untuk kelompok tani ternak karya bakti	Kp.Pameungpeuk RT 003 RW 012, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	23 Ekor	Rp48.300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
47	Bimbingan teknis/pelatihan Pengelolaan Website Desa (PIKW)	Pengembangan wawasan	Desa Pasirhalang, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	1 Paket	Rp20.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
48	Usulan berupa bantuan sarana dan prasarana pendukung (PIKW)	meningkatkan minat baca	desa pasirhalang, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
49	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	Pelatihan untuk kelompok UMKM "sinar abadi" untuk meningkatkan wawasan bagi pelaku UMKM	Desa Pasirhalang, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	1 Kelompok	Rp10.750.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
50	Usulan berupa bantuan sarana dan prasarana pendukung (PIKW)	Pemeliharaan Taman Baca	Desa Pasirhalang, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang	1 Paket	Rp10.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Rp203.350.000	
51	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Kurangnya pengembangan bibit ternak khususnya domba yang sudah banyak beralih ke pertanian. Untuk itu kami mengajukan pengembangan bibit domba sebanyak 30 ekor untuk kelompok ternak kahuripan. (PIKW)	Kp Pasirkuda Rw 10 Desa Pasirlangu, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	30 Ekor	Rp63.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
52	Usulan berupa sarana prasarana dalam upaya pengelolaan sampah. (PIKW)	Kurangnya alat angkut sampah yang ada dilingkungan masyarakat desa pasirlangu, sehingga membutuhkan alat angkut berupa motor sampah. (pikw)	Desa Pasirlangu, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	1 Unit	Rp36.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
53	Usulan berupa pelatihan, bantuan alat dan bantuan modal usaha (bansos) dalam rangka pembentukan dan pengembangan UMKM. (PIKW)	adanya pengusaha UMKM yang bergerak di bidang menjahit tetapi sudah tidak mempunyai alat menjahit yang layak, untuk itu kami mengajukan alat menjahit beserta meja sebanyak 8 unit untuk kelompok Selaras. (PIKW)	Desa pasirlangu, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	8 Unit	Rp24.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
54	Usulan berupa sarana prasarana dalam upaya pengelolaan sampah. (PIKW)	Tidak adanya tempat pembuangan sampah sebagai percontohan dimana terdapat 3 jenis tempat pembuangan sampah, sehingga kami merasa perlu untuk mengajukan tong sampah terpilah 3 warna untuk percontohan di setiap RW	Rw 01 sampai dengan RW 13, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	13 Unit	Rp26.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
55	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Kurangnya Pembibitan ternak domba dilingkungan setempat untuk itu kami mengajukan pengembangan bibit domba sebanyak 13 ekor untuk kelompok Ternak Bakti Saluyu (PIKW)	Kp Babakan Rt 04 Rw 11, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	13 Ekor	Rp27.300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
56	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	Kurangnya Pembibitan ternak domba dilingkungan setempat untuk itu kami mengajukan pengembangan bibit domba sebanyak 10 ekor untuk kelompok Ternak Berkah Anugerah Peternakan (PIKW)	Kp Cipeundeuy Rt 04 Rw 07, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	1 Kelompok	Rp21.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
57	Usulan berupa bantuan modal ataupun barang bagi kelompok PEKKA dengan mengacu pada skala prioritas (PIKW)	Kurangnya aktifitas Kelompok sehingga perlu di ajukan berbagai kegiatan ataupun pelatihan , untuk itu kami mengajukan kelompok PEKKA bangkit mandiri sebagai salah satu penerima manfaat (PIKW	Kp Sukaraja RT 03 Rw 05, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu	1 Kelompok	Rp10.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
					Rp207.300.000	
58	Usulan berupa bantuan sarana dan prasarana pendukung (PIKW)	terbatasnya tempat/lahan baca	Desa Sadangmekar Rt 01 RW 01, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Sadangmekar	2 Unit	Rp14.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
59	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	penyediaan bibit ternak domba dan kambing bagi kelompok ternak sadang anyar	Kp. Cowal RT 01 RW 01, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Sadangmekar	1 Paket	Rp50.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Pagu	Tujuan Dinas
60	sulan pembangunan saluran irigasi melalui rehabilitasi saluran irigasi yang rusak atau tidak berfungsi (PIKW)	tidak optimalnya pertanian masyarakat akibat dari saluran irigasi yang rusak dan rawan ambruk/longsor	Kp. Cisarua Girang RW 08, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Sadangmekar	200 meter persegi	Rp136.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
61	Usulan berupa pengadaan bibit perikanan (PIKW)	Terpenuhinya Bantuan Pengadaan Bibit Lele Dumbo untuk Kelompok Ternak Harapan Mekar	Kp. Cibodas RT 02 RW 05, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Sadangmekar	250 Ekor	Rp21.250.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
					Rp221.250.000	
62	Usulan berupa pengadaan bibit peternakan (PIKW)	terdapat kelompok ternak "Mandiri Mukti" di Desa Tugumukti yang membutuhkan bantuan ternak sapi perah dara bunting sebanyak 10 ekor untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat	Kp.Cimeta Rt.03 Rw09 Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Banduung Barat 40551, Kab. Bandung Barat, Cisarua, Tugumukti	1 Paket	Rp200.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Rp200.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah **”PEMULIHAN EKONOMI DNA REFORMASI STRUKTURAL”** dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pembangunan Wilayah Sumatera
	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
	Pembangunan Wilayah Kalimantan
	Pembangunan Wilayah Sulawesi
	Pembangunan Wilayah Maluku
	Pembangunan Wilayah Papua

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
	Pengentasan Kemiskinan
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK
Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
	Pembangunan Rendah Karbon
	Konsolidasi Demokrasi

PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
	Penegakan Hukum Nasional
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Cisarua Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Misi ke – 4 Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua

NO.	PROGRAM NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN CISARUA
1	**Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi “**

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan lagi menjadi tujuan Kecamatan Cisarua sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi, dengan sasaran terkait adalah :
    a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan
    b. Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, dengan sasaran terkait adalah **“ Meningkatnya kualitas pelayanan Publik “**

3.2. Tujuan dan sararan Renja Kecamatan Cisarua

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Cisarua diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM 2024	KEGIATAN 2024	SUB KEGIATAN 2024
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah konsistensi dengan Renstra SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat.

Program dan Kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi SKPD, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di SKPD baik sumberdaya manusia, sarana, serta anggaran yang tersedia.

Program yang tersedia yaitu dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat, dan untuk Kecamatan terdiri dari 2 urusan yaitu :

I. **NON URUSAN, terdiri dari :**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II . URUSAN KEWILAYAHAN

Terdiri dari 4 (dua) Program , yaitu:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN CISARUA							**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.374.778.052,00**							**4.320.164.806,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.374.778.052,00**							**4.320.164.806,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.374.778.052,00**							**4.320.164.806,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP KEC. CISARUA**				**B Angka Mutu**	**B Angka Mutu**	**3.782.079.206,00**	**4.071.063.774,00**	**3.467.814.158,00**	**56.028.748,00**							**3.838.107.954,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	13.650.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	5.200.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kecamatan Cisarua		27.396.550,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan			12.605.500,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			6.195.050,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Layanan	5 Laporan	3.644.744.806,00	3.685.052.654,00	3.081.803.038,00	-562.941.768,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	ASN, LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN CISARUA		3.605.885.806,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	3.591.364.806,00	3.624.672.654,00	3.021.423.038,00	-569.941.768,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			3.591.364.806,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.015.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	650.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			7.500.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	51.365.000,00	57.715.000,00	57.715.000,00	6.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			7.021.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Layanan	2 Dokumen	59.166.800,00	75.266.800,00	75.266.800,00	16.100.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi	ASN KECAMATAN CISARUA		33.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	26 Paket	10.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola			22.500.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	48.366.800,00	54.466.800,00	54.466.800,00	6.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			10.500.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah*				5 Layanan	15 Laporan	23.044.600,00	99.446.000,00	99.446.000,00	76.401.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kantor Kecamatan Cisarua		67.660.598,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	5.546.500,00	62.395.800,00	62.395.800,00	56.849.300,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			25.585.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	1.151.200,00	2.050.400,00	2.050.400,00	899.200,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			14.600.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15 Paket	9.691.700,00	18.106.000,00	18.106.000,00	8.414.300,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			16.521.030,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.255.200,00	2.593.800,00	2.593.800,00	1.338.600,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			4.760.568,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	11 Laporan	5.400.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	8.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			6.194.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Unit	10 Unit	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi	Kantor Kecamatan Cisarua		13.915.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola			13.915.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	24 Laporan	19.260.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	1.800.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kantor Kecamatan Cisarua		20.400.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.460.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			8.400.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	1.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			12.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Jenis	8 Unit	15.718.000,00	164.893.320,00	164.893.320,00	149.175.320,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi	Infrastruktur Kantor Kecamatan Cisarua		69.850.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			yang Dipelihara													daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	4 Unit	12.400.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	250.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola			33.350.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	1.420.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	730.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			1.500.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.898.000,00	150.093.320,00	150.093.320,00	148.195.320,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi			35.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																daerah				
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**222.780.800,00**	**428.619.100,00**	**428.619.100,00**	**72.219.200,00**							**295.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	4 Dokumen	46.257.200,00	203.283.600,00	203.283.600,00	157.026.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan	Wilayah Kecamatan Cisarua		90.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah				
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	4 Dokumen	46.257.200,00	203.283.600,00	203.283.600,00	157.026.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovas			90.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																i daerah				
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				4 Laporan	12 Laporan	159.643.600,00	172.063.100,00	172.063.100,00	12.419.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Pelayanan di Kantor Kecamatan Cisarua		180.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	12 Laporan	159.643.600,00	172.063.100,00	172.063.100,00	12.419.500,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			180.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				1 Laporan	1 Laporan	16.880.000,00	53.272.400,00	53.272.400,00	36.392.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	UMKM		25.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	16.880.000,00	53.272.400,00	53.272.400,00	36.392.400,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			25.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan**				**100 %**	**100 %**	**40.350.000,00**	**150.172.800,00**	**150.172.800,00**	**87.406.852,00**							**127.756.852,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				5 Laporan	5 Laporan	40.350.000,00	150.172.800,00	150.172.800,00	109.822.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Lembaga Masyarakat, Desase - Kecamatan Cisarua		127.756.852,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.750.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00	6.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			52.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5 Laporan	18.600.000,00	122.122.800,00	122.122.800,00	103.522.800,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			75.756.852,00	KECAMATAN CISARUA
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang**				**100 %**	**100 %**	**16.550.000,00**	**526.324.400,00**	**526.324.400,00**	**3.450.000,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Terfasilitasi																	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 laporan	14 laporan	16.550.000,00	526.324.400,00	526.324.400,00	509.774.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Sektor Keamanan wilayah Kecamatan Cisarua		20.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	14 Laporan	16.550.000,00	526.324.400,00	526.324.400,00	509.774.400,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			20.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**29.604.800,00**	**893.212.400,00**	**893.212.400,00**	**9.695.200,00**							**39.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			yang terfasilitasi																	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				3 Dokumen	14 Dokumen	29.604.800,00	893.212.400,00	893.212.400,00	863.607.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cisarua		39.300.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	18.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	10.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			37.500.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	12 Dokumen	11.204.800,00	864.412.400,00	864.412.400,00	853.207.600,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			1.800.000,00	KECAMATAN CISARUA
	JUMLAH								**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.125.312.569.095,00**							**4.320.164.806,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2024

Unit Organisasi : Kecamatan Cisarua

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN CISARUA							**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.374.778.052,00**							**4.320.164.806,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.374.778.052,00**							**4.320.164.806,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.374.778.052,00**							**4.320.164.806,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP KEC. CISARUA**				**B Angka Mutu**	**B Angka Mutu**	**3.782.079.206,00**	**4.071.063.774,00**	**3.467.814.158,00**	**56.028.748,00**							**3.838.107.954,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	13.650.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	5.200.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kecamatan Cisarua		27.396.550,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			12.605.500,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	1.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			2.149.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			6.195.050,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Layanan	5 Laporan	3.644.744.806,00	3.685.052.654,00	3.081.803.038,00	-562.941.768,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	ASN, LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN CISARUA		3.605.885.806,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	3.591.364.806,00	3.624.672.654,00	3.021.423.038,00	-569.941.768,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			3.591.364.806,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.015.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	650.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			7.500.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	51.365.000,00	57.715.000,00	57.715.000,00	6.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			7.021.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Layanan	2 Dokumen	59.166.800,00	75.266.800,00	75.266.800,00	16.100.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	ASN KECAMATAN CISARUA		33.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	26 Paket	10.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			22.500.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	48.366.800,00	54.466.800,00	54.466.800,00	6.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			10.500.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah*				5 Layanan	15 Laporan	23.044.600,00	99.446.000,00	99.446.000,00	76.401.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kantor Kecamatan Cisarua		67.660.598,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	5.546.500,00	62.395.800,00	62.395.800,00	56.849.300,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			25.585.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	1.151.200,00	2.050.400,00	2.050.400,00	899.200,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			14.600.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15 Paket	9.691.700,00	18.106.000,00	18.106.000,00	8.414.300,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			16.521.030,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.255.200,00	2.593.800,00	2.593.800,00	1.338.600,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			4.760.568,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	11 Laporan	5.400.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	8.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			6.194.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Unit	10 Unit	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kantor Kecamatan Cisarua		13.915.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			13.915.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	24 Laporan	19.260.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	1.800.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Kantor Kecamatan Cisarua		20.400.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.460.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			8.400.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	1.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			12.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*				2 Jenis	8 Unit	15.718.000,00	164.893.320,00	164.893.320,00	149.175.320,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Infrastruktur Kantor Kecamatan Cisarua		69.850.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	4 Unit	12.400.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	250.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			33.350.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	1.420.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	730.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			1.500.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.898.000,00	150.093.320,00	150.093.320,00	148.195.320,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			35.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan**				**100 %**	**100 %**	**222.780.800,00**	**428.619.100,00**	**428.619.100,00**	**72.219.200,00**							**295.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DAN PELAYANAN PUBLIK	**Pelayanan Publik yang Terfasilitasi**																	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	4 Dokumen	46.257.200,00	203.283.600,00	203.283.600,00	157.026.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Wilayah Kecamatan Cisarua		90.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	4 Dokumen	46.257.200,00	203.283.600,00	203.283.600,00	157.026.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			90.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				4 Laporan	12 Laporan	159.643.600,00	172.063.100,00	172.063.100,00	12.419.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Pelayanan di Kantor Kecamatan Cisarua		180.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	12 Laporan	159.643.600,00	172.063.100,00	172.063.100,00	12.419.500,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			180.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				1 Laporan	1 Laporan	16.880.000,00	53.272.400,00	53.272.400,00	36.392.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	UMKM		25.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	16.880.000,00	53.272.400,00	53.272.400,00	36.392.400,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			25.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangu**				**100 %**	**100 %**	**40.350.000,00**	**150.172.800,00**	**150.172.800,00**	**87.406.852,00**							**127.756.852,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN	**nan kewilayahan**																	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				5 Laporan	5 Laporan	40.350.000,00	150.172.800,00	150.172.800,00	109.822.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Lembaga Masyarakat, Desase - Kecamatan Cisarua		127.756.852,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.750.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00	6.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			52.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5 Laporan	18.600.000,00	122.122.800,00	122.122.800,00	103.522.800,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			75.756.852,00	KECAMATAN CISARUA
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**16.550.000,00**	**526.324.400,00**	**526.324.400,00**	**3.450.000,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KETERTIBAN UMUM	**Umum yang Terfasilitasi**																	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 laporan	14 laporan	16.550.000,00	526.324.400,00	526.324.400,00	509.774.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Sektor Keamanan wilayah Kecamatan Cisarua		20.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	14 Laporan	16.550.000,00	526.324.400,00	526.324.400,00	509.774.400,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah			20.000.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**29.604.800,00**	**893.212.400,00**	**893.212.400,00**	**9.695.200,00**							**39.300.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				3 Dokumen	14 Dokumen	29.604.800,00	893.212.400,00	893.212.400,00	863.607.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cisarua		39.300.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																inovasi daerah				
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	18.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	10.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan			37.500.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																inovasi daerah				
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	12 Dokumen	11.204.800,00	864.412.400,00	864.412.400,00	853.207.600,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan dan			1.800.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																inovasi daerah				
	J U M L A H								**4.091.364.806,00**	**6.069.392.474,00**	**5.466.142.858,00**	**1.125.312.569.095,00**							**4.320.164.806,00**	

PENUTUP

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 merupakan lanjutan serta penambahan dari program sebelumnya. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam pelaksanaanya adalah bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 telah disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan SKPD dilihat dari berbagai kepentingan yang terintegrasi, dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Adapun kemungkinan jika terdapat terdapat perubahan kebijakan program serta anggarannya pada masa tahun tersebut dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang menuntunnya dan di implementasikan pada penyusunan dokumen berikutnya.

Rancangan perubahan rencana kerja Kantor Kecamatan Cisarua Tahun 2024 ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, proporsional, partisipatif dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh stake horlder SKPD, dengan kaidah pada pelaksanaanya sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan/regulasi yang melandasi penyusunan suatu dokumen
2. Pelaksanaan kegiatan di dasarkan pada mekanisme yang di sesuaikan dengan kewenangan (PP. 19/2008) yang di jabarkan dengan Perbup Bandung Barat No 45/2011, dan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi (Perbup 71/2012).
3. Penyusunan dokumen selanjutnya berkewajiban menjaga konsistensi dengan penyusunan rancangan perubahan renja SKPD ini.
4. Penyesuaian/pergeseran jumlah anggaran hendaknya dikonsultasikan dan mendapat arahan dari TAPD Kabupaten Bandung Barat.

Kami yakin bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan pendapat diharapakan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua.

Cisarua, Agustus 2023
CAMAT CISARUA

Drs. TAUFIK FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670620 199203 1 005

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

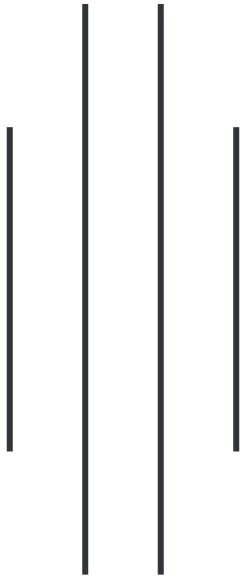

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2024 ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional penjabaran dari Renstra yang berisi program dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari partisipasi pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusianya. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pertimbangan bagi penentuan kebijakan.

Bandung Barat, 31 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. Hj AGUSTINA PIRYANTI., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408301985032003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung Barat 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat 26
BAB III PERUBAHAN RENJA 31
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2024 36
BAB V PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Tahun 2023 Prov. Jawa Barat 10

Tabel 2.2.1 Hasil Penilaian Oleh Tim Verifikasi Sistem Merit KASN Melalui Aplikasi Sipinter Tahun 17

Table 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2023 20

Tabel 2.3 Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya 29

Tabel 3.1 Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 31

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran RPD dengan Sasaran Renstra BKPSDM Kab. Bandung Barat 33

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 34

Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa : perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan.
b. Kebutuhan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
c. Pergeseran pagu kegiatan antara Perangkat Daerah, penambahan target dan anggaran kegiatan, pengurangan target dan anggaran kegiatan serta perubahan sasaran kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, sehingga perubahan yang disusun berpedoman pada dokumen tersebut dan telah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan renja yang disusun merupakan upaya peningkatkan kualitas penyusunan belanja kegiatan dengan target kinerja yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan beberapa revisi terkait penentuan target kinerja, komponen/uraian pendukung belanja, yang selanjutnya secara keluruhan akan menjadi pendoman penyusunan Kebijakan

Perubahan Umum Perubahan (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). Rencana Kinerja dan Anggaran Belanja Perubahan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Perubahan (APBD- P) Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025;
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026;
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026;

18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Tujuan

Memberikan arahan dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi dan ditetapkan dalam Renstra BKPSDM dan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terkandung dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat. dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.1 Evaluasi

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang

disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran.

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target Tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai pada bulan September tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja berjalan tahun anggaran 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 adalah 53,64%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.353.359.903,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar 53,64% dengan predikat kinerja "Rendah" (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E. PMDN Halaman 494, jika nilai capaian diatas 91 maka capaiannya "Sangat Tinggi", jika nilai capaian diatas 75 maka capaiannya "Tinggi", jika nilai capaian diatas 65 maka capaiannya "Sedang", jika nilai capaian diatas 50 maka capaiannya "Rendah", dan jika nilai capaian kurang dari 50 capaiannya adalah "Sangat Rendah").

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** dengan target indikator Nilai SAKIP BKPSDM Tahun Anggaran 2023 adalah "75", dengan realisasi sebesar "75,66", dengan capaian sebesar

“100,88%”, telah melebihi dari target yang ditetapkan atau “BB – Sangat Baik” sesuai Laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Nomor : 700.1.2.1/215/itda.irbanIII tanggal 14 Mei 2024. Adapun kegiatan pada Penyediaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan target kinerja sebanyak 22 Dokumen, realisasi kinerja sebanyak 11 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50%.
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** dengan target kinerja sebanyak 26 Dokumen, realisasi kinerja sebanyak 17 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 65,38%.
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** dengan target sebanyak 24 Dokumen, dan realisasi sebanyak 5 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 20,83%.
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan target sebanyak 24 dokumen, realisasi kinerja sebanyak 9 dokumen, dengan realisasi 9 dokumen, dan capaian kinerja sebesar 37,50%.
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target sebanyak 24 laporan, realisasi kinerja sebanyak 18 laporan, dan capaian kinerja sebesar 75,00%.
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan target sebanyak 105 Unit, realisasi kinerja sebanyak 52 unit, dan capaian kinerja sebesar 49,52%.

b. **Program Kepegawaian Daerah**, dengan target indikator Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian, Nilai Aspek Promosi dan Mutasi, dan Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin pada tahun 2024 belum terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena penilaian sistem merit di pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum mendapatkan penilaian dari BKN. Adapun kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN,** dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, dengan realisasi sebanyak 10 dokumen, dan capaian sebesar 83,33%.
2. **Mutasi dan Promosi ASN,** dengan target kinerja sebanyak 9

dokumen, dengan realisasi sebanyak 5 dokumen, dan capaian sebesar 55,56%.

3. **Pengembangan Kompetensi ASN,** dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen, dengan realisasi sebanyak 3 dokumen, dan capaian sebesar 50,00%.
4. **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,** dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen, dengan realisasi sebanyak 3 dokumen, dan capaian sebesar 75,00%.

c. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,** dengan target indikator adalah Nilai Aspek Pengembangan Karir. Adapun kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. **Pengembangan Kompetensi Teknis**, dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, dengan realisasi sebanyak 1 dokumen, dan capaian sebesar 50,00%.
2. **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, dengan realisasi sebanyak 1 dokumen, dan capaian sebesar 50,00%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Tahun 2023 Prov. Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)* dan Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2023			Target Program/Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2023	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BKPSDM**	**A**	**BB**	**A**	**BB**		**75,00 (BB)**	**-**	**-**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**22 Dokumen**	**11 Dokumen**	**50,00%**
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0

		SKPD								
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen Laporan	20 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan men	100%	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Kali	36 Kali	12 Kali	12 kali	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Adminitrasi Keuangan yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**26 Dokumen**	**17 Dokumen**	**65,38%**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	70 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	75,00%
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Laporan	1 Laporan	50,00%
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	60 Dokumen	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Adminitrasi Kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**109,86%**	**109,86%**	**24 Dokumen**	**5 Dokumen**	**20,83%**
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	340 Stel	200 Stel	70 Stel	100%	100%	5 Paket	5 Paket	100%
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	1 Kegiatan	8 Kegiatan	800%	50 Orang	50 Orang	100%
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**90,95%**	**90,95%**	**24 Dokumen**	**9 Dokumen**	**37,50%**
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60 Jenis	36 Jenis	12 Jenis	0	0	1 Paket	1 Paket	100,00%

		Disediakan								
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125 Jenis	132 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100.00	2 Paket	2 Paket	100,00%
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	310 Jenis	174 Jenis	56 Jenis	56 Jenis	100.00	2 Paket	0	0
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Jenis	134 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100.00	3 Paket	1 Paket	33,33%
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100.00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285 Kegiatan	305 Kegiatan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	100.00	108 Laporan	81 Laporan	75,00%
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**24 Laporan**	**18 Laporan**	**75,00%**
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**105 Unit**	**52 Unit**	**49,52%**
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	107 Unit	107 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100,00%
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Jenis	30 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	40 Unit	36 Unit	90,00%
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian**	**80%**	**74,26%**	**80%**	**78,61%**	**98,26%**	**106,06 (Nilai)**	**0**	**0**

5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**80%**	**79,70%**	**80%**	**116,29%**	**116,29%**	**12 Dokumen**	**10 Dokumen**	**83,33%**
5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	0	0
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	0	0
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2.350 Orang	3.393 Orang	400 Orang	561 Orang	140,25%	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	4 Lembaga	2 Lembaga	50,00%
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	0	0
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 Kegiatan	19 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75,00%	4 Dokumen	0	0
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN**	**80%**	**60%**	**80%**	**37,50%**	**46,88%**	**9 Dokumen**	**5 Dokumen**	**55,56%**
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	20 Kali	6 Kali	4 Kali	1 Kali	100.00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%

		dan Mutasi ASN antar Daerah								
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10 Periode	10 Periode	2 Periode	2 Periode	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Kali	18 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN**	**80%**	**70%**	**80%**	**35%**	**43,75%**	**6 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50,00%**
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	60 Kegiatan	28 Kegiatan	12 Kegiatan	5 Kegiatan	41,67%	4 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	12 Kali	15 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	100 Orang	75 Orang	75,00%
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**80%**	**70%**	**80%**	**72,73%**	**90,91%**	**4 Dokumen**	**3 Dokumen**	**75,00%**
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Dokumen	9 Dokumen	75,00%
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Laporan	9 Dokumen	75,00%
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	10 Orang	10 Orang	100%
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Kegiatan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100.00	47 Orang	16 Orang	34,04%
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Jenis Hukuman Disiplin	15 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	100.00	3 Laporan	1 Laporan	33,33%
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai Aspek Pengembangan Karir**	**80%**	**73,33%**	**80%**	**75%**	**97,50%**	**67,5**		

5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**80%**	**73,33%**	**80%**	**75%**	**97,50%**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50,00%**
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12 Kegiatan	10 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75.00%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial**	**80%**	0	**80%**	**75%**	**97,50%**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50,00%**
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PelaksanaanSertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	12 Kegiatan	12 Kegiatan	80%	75%	97,50%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung Barat

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan hasil kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat telah memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat juga memiliki dua indikator kinerja sasaran dan tiga indikator kinerja program, dengan rencana target capaian dari tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam tabel 2.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 Indeks Merit dan Nilai SAKIP tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat tahun

2023 belum berhasil mencapai target kinerjanya. Dengan demikian indikator sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat belum tercapai.

Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kredibilitas akan terus dilakukan agar lebih mampu dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan nilai 301 (tiga ratus satu) dan Indeks 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Meningkat pada tahun 2022 lalu dengan nilai 288 (dua ratus delapan puluh delapan) dan Indeks 0,70 (nol koma tujuh puluh). Hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 106/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Setelah dilakukannya verifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

TABEL 2.2.1
HASIL PENILAIAN OLEH TIM VERIFIKASI SISTEM MERIT KASN MELALUI APLIKASI SIPINTER TAHUN 2023

ASPEK	Bobot Nilai	Nilai Maksimal	NILAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN	20%	40,0	37,5
PENGADAAN	10%	40,0	40,0
PENGEMBANGAN KARIR	25%	120,0	62,5
PROMOSI DAN MUTASI	10%	40,0	22,5
MANAJEMEN KINERJA	15%	80,0	67,5
PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN	10%	40,0	40,0
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN	5%	16,0	16,0
SISTEM INFORMASI	5%	24,0	15,0
TOTAL AKHIR		**400,0**	**301**

Sumber : SURAT KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA NOMOR 106/ KEP.KASN/ C/XI/2023 TENTANG PENETAPAN KATEGORI, PENILAIAN, DAN INDEKS PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. Ditetapkan pada Kategori III (Baik) dengan Indeks 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat menyadari bahwa mewujudkan internal organisasi dengan tata kelola yang efektif dan senantiasa menjunjung akuntabilitas merupakan sebuah keharusan agar berhasil mencapai kinerja yang diinginkan secara optimal. Hal ini berpijak dari prinsip *good governance* yang ingin diaplikasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pada Tahun 2023 capaian terhadap Indikator Nilai SAKIP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat tidak mencapai target dari yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, yaitu **"peringkat A"**. dengan capaian **"peringkat BB"**. Dibandingkan tahun lalu Nilai SAKIP mendapat nilai 74,85. Sedangkan pada tahun 2023 nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai SAKIP sebesar 74,91 dan mengalami peningkatan sebesar 0,06. Nilai SAKIP tersebut berdasarkan hasil Reviu Laporan Hasil Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor: 700/220/Itda/IrbanIV Tanggal 29 Mei 2023 tentang laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat

tahun anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.

Pencapaian Kinerja yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Sampai denganTahun 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	(14)
I	Indikator Sasaran (IKU):										
1.	**Indeks Merit**			**BB**	**BB**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**0,76**	
II.	Indikator Program:										
1.	**Persentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian**			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**73,94%**	**61,70%**	**78,61%**	**(106,5)**	
	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**106,09%**	**152,17%**	**145,37%**	**12 Dokumen**	
	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Dokumen	
	Jumlah administrasi pemberhentian yang terselesaikan			450 Orang	500 Orang	400 Orang	480 Orang	690 Orang	558 Orang	3 Dokumen	
	Jumlah kegiatan fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang terfasilitasi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Lembaga	
	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi Data Sistem Informasi Kepegawaian yang terlaksana			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Dokumen	
	Jumlah kegiatan Rekonsiliasi Data Kepegawaian yang terlaksana			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Dokumen	
	Persentase Terfasilitasinya			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**100%**	**50.00%**	**50.00%**	**27,5**	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	(14)
	Mutasi dan Promosi ASN										
	Jumlah Proses Mutasi ASN yang terfasilitasi			4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	4 Dokumen	
	Jumlah periode pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2 Periode	2 Periode	2 Periode	2 Periode	2 Periode	1 Periode	2 Dokumen	
	Jumlah proses Promosi ASN yang terfasilitasi			4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	3 Dokumen	
	Persentase ASN yang berkompeten			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**100%**	**41,18%**	**35.00%**	**6 Dokumen**	
	Jumlah Kegiatan Assessment yang terfasilitasi			12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Dokumen	
	Jumlah Kegiatan Sosialiasi Informasi Jabatan Fungsional ASN yg dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	
	Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional ASN yang dilaksanakan			12 Kali	4 Kali	4 Kali	12 Kali	4 Kali	4 Kali	100 Orang	
	Persentase Aparatur yang berkinerja baik			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**100%**	**100%**	**90,91%**		
	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Dokumen	
	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1o Orang	
	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN yang dilaksanakan			16 Kali	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kali	16 Kegiatan	16 Kegiatan	47 Orang	
	Jumlah Jenis Pelanggaran Disiplin ASN Yang terselesaikan			3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Jenis Hukuman Disiplin	3 Laporan	
2.	**Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis**			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**70.00%**	**75.00%**	**75.00%**	**2 Dokumen**	
	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Dokumen	
	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial			**70.00%**	**75.00%**	**80.00%**	**52,50%**	**52,50%**	**52,50%**	**2 Dokumen**	
	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial yang dilaksanakan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Dokumen	
2.	**Nilai SAKIP**										
III.	Indikator Program:										
1.	**Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			**BB**	**BB**	**A**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	
	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**22 Dokumen**	
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun tepat			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**22 Dokumen**	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	(14)
	waktu										
	Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun waktu			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu			4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	12 Laporan	
	kegiatan Evaluasi Kinerja PD yang dilaksanakan			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Laporan	
	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**51,85%**	**26 Dokumen**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	9 Bulan	50 orang/bulan	
	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	2 Laporan	
	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Laporan	
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**90,95%**	**90,95%**	**12 Dokumen**	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	0	**1 Paket**	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	(14)
	Kantor yang terpenuhi										
	n Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi			6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	-	0	0	
	n Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi			25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	2 Paket	
	n Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi			62 jenis, 22 kegiatan rapat	62 jenis, 22 kegiatan rapat	62 jenis, 22 kegiatan rapat	62 jenis, 22 kegiatan rapat	56 jenis, 22 kegiatan rapat	62 jenis, 22 kegiatan rapat	2 Paket	
	n Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi			30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	3 Paket	
	n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 Dokumen	
	n Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 laporan	
	n Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi			55 Kegiatan	60 Kegiatan	65 Kegiatan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	56 Kegiatan	108 Laporan	
	ntase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**24 Laporan**	
	n Penyediaan Jasa Komunikasi yang terpenuhi			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	
	n Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	
	ntase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**105 Unit**	
	n Kendaraan Dinas dengan kondisi baik			22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	15 Unit	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	(14)
	n jenis Peralatan dan Mesin Lainnya dengan kondisi baik			6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	40 nit	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, berdasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada perubahan paradigma yang prinsipal dalam Undang – undah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang mengedepankan kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Salah satunya Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) selain itu seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kompetensi.

Isu-isu Strategis pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian tahapan dari pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan

secara berkesinambungan.

Dalam penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (Opportunities) serta tantangan (Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan tujuan ataupun target pada periode sebelumnya belum tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk ditindak lanjuti pada periode 2024-2026. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2024-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah, yaitu:

1. Sistem Aplikasi Manajemen ASN terintegrasi;
2. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Analisis jabatan dan Beban Kerja;
3. Data Kepegawaian yang terintegrasi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta;
5. Mekanisme Kerja Baru dan Transformasi Kelembagaan;
6. Human Capital Development Strategy.

Dari penjabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat:

1. Meningkatkan sistem aplikasi Manajemen ASN terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Menetapkan Rencana Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
3. Menerapkan Kebijakan Manajemen Talenta;
4. Membangunan Data Kepegawaian yang terintegrasi;
5. Menyusun Human Capital Development Plan (HCDP);
6. Menyelaraskan dengan Mekanisme Kerja Baru dan Transformasi kelembagaan.

Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat antara lain :

1. Pengembangan seluruh sistem aplikasi Manajemen ASN yang terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Penguatan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja dalam pemenuhan Kebutuhan Pegawai;
3. Pemetaan Kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap;

4. Penyusunan Kebijakan Simpeg berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai serta teritegrasi dengan SAPK BKN;
5. Peningkatan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai yang berbasis pada kesenjangan kompetensi dan kinerja, baik dalam bentuk klasikal dan non klasikal;
6. Menyusun Agile Framework Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja, Serta Menginput Kedalam Aplikasi E-Sakip.
7. Tuntutan masyarakat akan profesionalisme aparatur semakin besar, sehingga kinerja pelayanan kepada pelayanan masyarakat yang dilakukan aparatur pemerintah menjadi sangat sensitive. Banyak variable tentang bagaimana aparatur yang professional dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

TABEL 2.3
Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN; Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima;	Rendahnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintahan; Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tata laksana pemerintahan;	Masih Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi ASN untuk mendukung kinerja organisasi; Masih Rendahnya	Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga lain; Adanya peraturan perundangan yang

	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN; Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN ; Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN; Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN; Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Kerangka Regulasi yang belum mendukung; Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai prinsip *good governance.*	motivasi ASN untuk memangku jabatan fungsional.	mendukung tugas dan fungsi BKPSDM (UU- PP- Perpres - Permen - Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian)

BAB III
PERUBAHAN RENJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.1Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

Adapun Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 dapat dilihat pada tabel. 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN KE-		
				1	2	3			1	2	3
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Merit	Meningkatnya manajemen ASN	Indeks Merit	0,76 (Indeks)	0,81 (Indeks)	0,86 (Indeks)	Program Kepegawaian Derah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	106,5	110	113,5
								Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	27,5	30	32,5
								Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	102,5	110	115
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir	67,5	70	75
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	75,00 (BB)	76,00 (BB)	77,00 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Da erah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP BKPSDM	75,00	76,00	77,00

Tabel. 3.2
Keterkaitan Sasaran RPD dengan
Sasaran Renstra BKPSDM Kab. Bandung Barat

VISI	**"KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN"**		
MISI	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kreatif, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pengembangan Industri Yang Berdaya Saing Serta Berkeadilan, Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan,Mengintegrasikan Kearifan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Dalam Pembangunan		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Indeks Merit	Meningkatnya manajemen ASN Indikator Sasaran: - Indeks Merit Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM Indikator Sasaran: - Nilai SAKIP BKPSDM	Meningkatkan sistem aplikasi Manajemen ASN terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian; Menetapkan Rencana Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja; Membangunan Data Kepegawaian yang terintegrasi; Menerapkan Kebijakan Manajemen Talenta; Menyelaraskan dengan Mekanisme Kerja Baru dan Transformasi kelembagaan; Menyusun Human Capital Development Plan (HCDP);	Pengembangan seluruh sistem aplikasi Manajemen ASN yang terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian; Penguatan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja dalam pemenuhan Kebutuhan Pegawai; Penyusunan Kebijakan Simpeg berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai serta teritegrasi dengan SAPK BKN; Pemetaan Kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap; Penyusunan Agile Framework Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja; Peningkatan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai yang berbasis pada kesenjangan kompetensi dan kinerja, baik dalam bentuk klasikal dan non klasikal;

Tabel. 3.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

Tujuan 4: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik			
NO	**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, PD Penanggung jawab, dan Sumber Data)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Tujuan : Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur Sasaran : Meningkatnya manajemen ASN	Indeks Merit	Alasan Pemilihan Indikator : Indeks Sistem Merit merupakan ukuran sejauhmana kepatuhan instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit sebagai wujud implementasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Formulasi Pengukuran : $\frac{(\Sigma \text{ total Skor sub aspek})}{(\Sigma \text{ total Skor maksimal sub aspek})}$ Dasar : Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Satuan : Skala 0,2 - 1 Tipe Penghitungan : Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggung jawab : BKPSDM

2.	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Alasan Pemilihan Indikator : Penilaian SAKIP merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Formulasi Pengukuran : = Σ total nilai sub komponen Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Satuan : Skala 0 - 100 Tipe Penghitungan : Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggung jawab : BKPSDM

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	86.600.000,00	259.800.000,00	259.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi*				12 Dokumen	12 Dokumen	171.810.300,00	518.405.700,00	677.449.700,00	505.639.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		323.581.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.984.900,00	5.984.900,00	5.984.900,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.011.000,00	90.625.400,00	90.625.400,00	85.614.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			10.581.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.142.400,00	49.989.400,00	49.989.400,00	38.847.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.312.000,00	9.312.000,00	9.312.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	15.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108 Laporan	108 Laporan	112.760.000,00	187.294.000,00	346.338.000,00	233.578.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang yang tersedia*				24 Laporan	24 Laporan	88.973.400,00	135.622.200,00	135.622.200,00	46.648.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		119.960.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	88.073.400,00	134.722.200,00	134.722.200,00	46.648.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			119.060.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara*				105 Unit	105 Unit	161.916.900,00	265.736.900,00	324.803.100,00	162.886.200,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		310.798.020,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	112.396.900,00	216.216.900,00	275.283.100,00	162.886.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			260.798.020,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	49.520.000,00	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian**				**106.5 Nilai**	**106.5 Nilai**	**1.741.066.850,00**	**3.601.842.850,00**	**3.733.697.650,00**	**1.995.933.150,00**							**3.737.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	749.999.650,00	1.179.933.350,00	1.175.618.250,00	425.618.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		1.710.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	32.735.100,00	28.640.100,00	28.640.100,00	-4.095.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	32.957.550,00	128.447.550,00	128.447.550,00	95.490.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	371.438.350,00	351.100.750,00	351.100.750,00	-20.337.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			1.094.901.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.947.550,00	17.947.550,00	17.947.550,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				3 Dokumen	3 Dokumen	178.547.500,00	316.399.500,00	316.399.500,00	137.852.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			178.547.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 Lembaga	4 Lembaga	44.145.300,00	35.535.300,00	31.220.200,00	-12.925.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			72.599.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.880.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	-1.360.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	41.378.250,00	29.363.000,00	29.363.000,00	-12.015.250,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			57.558.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	12.970.050,00	255.979.600,00	255.979.600,00	243.009.550,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			60.394.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN*				9 Dokumen	9 Dokumen	547.499.600,00	1.360.641.000,00	1.334.210.900,00	786.711.300,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		1.252.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	93.500.600,00	93.500.600,00	93.500.600,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	312.297.400,00	285.867.300,00	35.867.300,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Margajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	203.999.000,00	954.843.000,00	954.843.000,00	750.844.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			452.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN*				6 Dokumen	6 Dokumen	241.067.600,00	475.357.900,00	475.357.900,00	234.290.300,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		212.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	241.067.600,00	379.234.600,00	379.234.600,00	138.167.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	0,00	96.123.300,00	96.123.300,00	96.123.300,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				4 Dokumen	4 Dokumen	202.500.000,00	585.910.600,00	748.510.600,00	546.010.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		562.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	148.000.000,00	310.600.000,00	260.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	151.010.000,00	151.010.000,00	101.010.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				47 Orang	47 Orang	21.300.000,00	205.700.600,00	205.700.600,00	184.400.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	3 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			31.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				4 Dokumen	4 Dokumen	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			31.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**508.927.300,00**	**1.029.831.300,00**	**1.010.925.500,00**	**501.998.200,00**							**1.500.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai Aspek Pengembangan Karir**				**67.5 Nilai**	**67.5 Nilai**	**508.927.300,00**	**1.029.831.300,00**	**1.010.925.500,00**	**991.072.700,00**							**1.500.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis*				2 Dokumen	2 Dokumen	281.071.300,00	535.692.700,00	516.786.900,00	235.715.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang MengikutiPengembangan Kompetensi				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			370.032.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi JabatanAdministrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	281.071.300,00	535.692.700,00	516.786.900,00	235.715.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			479.968.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Dokumen Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan KompetensiManajerial dan Fungsional yang terselenggara*				2 Dokumen	2 Dokumen	227.856.000,00	494.138.600,00	494.138.600,00	266.282.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah	-		650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensibagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			351.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaandan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan KerjaSama				0 0	0 0	227.856.000,00	494.138.600,00	494.138.600,00	266.282.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah Penguatan tata kelola pemerintahandan inovasi daerah			298.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**26.708.422.263,00**	**21.141.935.235,00**	**18.638.557.315,00**	**-8.069.864.948,00**							**30.172.422.264,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bandung Barat Tahun 2025 merupakan bahan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2025. Pencapaian target pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Rencana kerja (Renja) yang telah disusun ini, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi/organisasi yang ada pada Pemerinta Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan manajemen kepegawaian terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya.

Berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja tidak hanya tergantung pada proses perumusannya saja akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana kerja ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat termasuk dari para pegawai (aparatur pemerintah) baik dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat maupun dari seluruh komponen organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tingkat perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian sumbangan pikiran atau saran dalam perumusannya maupun turut membantu dalam memperbaiki dan memperlancar pelaksanaannya, dengan maksud agar rencanakerja yang telah dirumuskan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Semoga Alloh S.W.T senantiasa memberikan petunjuk bagi Seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat ke arah yang lebih baik.

RENJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dan Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun agar pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD, lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.. Renja Perubahan ini merupakan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2024 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan.

Semoga Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 ini dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan kami menyadari bahwa Penyusuna RENJA Perubahan ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun substansi materi yang ada. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan RENJA ditahun mendatang, agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu dan mendukung dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung Barat, 2024

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dra. SRI DUSTIRAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19680801198803200

DAFTAR ISI

			Hal
Kata Pengantar …….……..			1
Daftar Isi ……..……..			2
Daftar Tabel ……..……..			3
BAB I	**PENDAHULUAN ……..……..**		**4**
	1.1	Latar Belakang …….	4
	1.2	Landasan Hukum ……..……...……	6
	1.3	Maksud dan Tujuan …….……	10
	1.4	Sistematika Penulisan Laporan ……..……..	10
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU …….. **		**12**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja hingga triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat ……..	12
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …..……	37
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……..…….	42
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal …….	45
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……	66
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……... **		**73**
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……	73
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ……	77
	3.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat……...	80
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . **		**101**
BAB V	**PENUTUP ……..……..…….. **		**114**

DAFTAR TABEL

		Hal
2.1	Hasil Evaluasi Renja dan capaian Renstra hingga triwulan II Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun anggaran 2024 ……..	15
2.2	Hasil Evaluasi Renja dan capaian Renstra hingga triwulan II Urusn Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun anggaran 2024……	26
2.3	Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat periode (2021-2023)……	39
2.4	Jumlah dan Kondisi Koperasi serta Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2022……..	44
2.5	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 …….	50
2.6	Usulan Aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran tahun 2024……..	67
3.1	RPJMN TAHUN 2020-2024……	75
3.2	RENSTRA KEMENKOP UKM 2020-2024…….	77
3.3	Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat……	78
3.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil……..	79
3.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM 2024-2026…….	81
3.6	Kriteria Koperasi Berkualitas……	82
3.7	Kriteria Pertumbuhan Usaha Mikro……..	83
3.8	Rencana Maju Program Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah……..	87
4.1	Program Kegiatan Perubahan 2024 ……..……..	102
4.2	Formulasi Capaian IKU DiskopUKM……..	113
4.3	Formulasi Capaian IKU DiskopUKM……..	113
4.4	Kategori Capaian Kinerja…….	113

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Rencana Kerja (Renja) organisasi pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan kerja penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah yang berlaku dalam satu tahun anggaran. Renja organisasi perangkat daerah ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam renja organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan pendekatan kinerja.

Pemkab mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemkab memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat serta

pemerintahan provinsi, dan dijadikan program prioritas pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi baik negara ataupun provinsi. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Selaku pemegang mandat dari kepala daerah Kabupaten Bandung Barat untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan revisi dokumen rencana kerja yang telah disusun selama 3 (tiga) tahun yaitu RENSTRA 2024-2026 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 atau Daerah Otonom Baru menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Bupati Bandung Barat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka upaya pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk

Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan; yang dalam teknis pelaksanaannya perlu dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, bahwa tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui Urutan: (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum OPD; (iii) Penyusunan rancangan akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja.

Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara keseluruhan Rancangan Renja OPD ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional itTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkoperasian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633) ;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UKM;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayan Usaha Mikro;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro;
34. Peraturan Bupati Bandung Barat No. 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat;
35. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjelasan perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini, adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang juga sebagai acuan bagi bidang-Bidang di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam sektor Koperasi dan UMKM, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada indikator sasaran kinerja pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 dan yang telah ditelaah pada tahun anggaran berjalan.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mencapai kesinambungan dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024 secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan sumber daya yang dimiliki, untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal.
2. Merubah Rencana Kerja Tahunan agar terciptanya konsistensi, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja di akhir tahun anggaran perencanaan.
3. Mencapai Harmonisasi perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD
Analisis Kinerja SKPD
2.2 Analiasa Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD tahun 2024

BAB V PENUTUP

Lampiran – Lampiran

Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 7 (tujuh) Program. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga triwulan II tahun anggaran 2024 sebagai syarat perubahan APBD tahun pelaksanaan berjalan, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran perubahan perangkat daerah) tahun berjalan tentunya didasarkan dari hasil telaahan evaluasi hingga triwulan II.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Perubahan ini tetap merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, atau merupakan periode pertama dari rangkaian implementasi Renstra tersebut. Dengan demikian, Renstra akan dijabarkan kedalam 3 buah Renja, yaitu Renja 2024, Renja 2025 dan Renja 2026.

Pada anggaran tahun 2024 perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat memiliki 6 program dan 6 kegiatan dalam menunjang urusan wajib non pelayanan dasar serta 1 program dan 8 kegiatan dalam unsur penunjang pemerintahan daerah yaitu :

1. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, dengan kegiatan
    a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**, dengan kegiatan:
    a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, dengan kegiatan:
    a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,** dengan kegiatan:
    a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UKM),** dengan kegiatan:
    a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
6. **Program Pengembangan UKM**, dengan kegiatan:
    a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
7. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui target program/kegiatan yang direncanakan, serta kesesuaian program/kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Diskopukm tahun-tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan ditujukan untuk mengkaji (review) pencapaian target Renja Diskopukm berdasarkan realisasi program dan kegiatan, serta faktor-faktor penyebab terhadap target kinerja program dan kegiatan, implikasi terhadap target capaian program Renja dan kebijakan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra hingga triwulan II yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Renja dan capaian Renstra hingga triwulan II
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun anggaran 2024

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGAITAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasI		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir TahunPelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	4	12		13		14		15	
			1,017,458,924		**109.30**		**1,017,458,924**		**10.22**
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Aktif**		**23,234,800**		**60.04**		**23,234,800**		**2.32**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**23,234,800**		**60.04**		**23,234,800**		**2.32**
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	62	10,524,000	49.60	300.69	62	10,524,000	13.78	1.62

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100	12,710,800	50.00	36.11	100	12,710,800	13.33	3.63
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**49.80**	**60.04**			**13.56**	**2.32**
Predikat kinerja				**SR**	**R**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**49.80**	**60.04**			**13.56**	**2.32**
Predikat kinerja				**SR**	**R**			**SR**	**SR**
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi Sehat**		**12,710,800**		**35.01**		**12,710,800**		**1.88**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**		**12,710,800**		**35.01**		**12,710,800**		**1.88**
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	122	12,710,800	50.21	35.01	122	12,710,800	16.20	1.88
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**50.21**	**35.01**			**16.20**	**1.88**
Predikat kinerja				**R**	**SR**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**50.21**	**35.01**			**16.20**	**1.88**
Predikat kinerja				**R**	**SR**			**SR**	**SR**
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan**		**25,421,600**		**2533.29**		**25,421,600**		**5.65**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi kopeasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**		**25,421,600**		**2533.29**		**25,421,600**		**5.65**

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	126	25,421,600	50.40	2533.29	126	25,421,600	14.00	5.65
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**50.40**	**2533.29**			**14.00**	**5.65**
Predikat kinerja				**R**	**ST**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**50.40**	**2533.29**			**14.00**	**5.65**
Predikat kinerja				**R**	**ST**			**SR**	**SR**
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan**		**294,728,100**		**117.89**		**294,728,100**		**10.13**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Unit Usaha yang mendapat fasilitasi Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**294,728,100**		**117.89**		**294,728,100**		**10.13**
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0.00	0.00
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00

Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0.00	0.00
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	55	294,728,100	45.08	123.79	55	294,728,100	14.55	16.59
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**15.03**	**117.89**			**2.91**	**10.13**
Predikat kinerja				**SR**	**ST**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**15.03**	**117.89**			**2.91**	**10.13**
Predikat kinerja				**SR**	**ST**			**SR**	**SR**
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan**		**430,904,424**		**74.00**		**430,904,424**		**14.32**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan**		**430,904,424**		**74.00**		**430,904,424**		**14.32**
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	66	81,692,900	50.77	226.40	66	81,692,900	14.51	17.38
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25	240,433,424	50.00	52.86	25	240,433,424	15.15	68.70
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00

Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0	-	0.00	#DIV/0!	0	-	0.00	0.00
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Terlaksananya Penyusunan Data berbasis Usaha Mikro	0	-	0.00	#DIV/0!	0	-	0.00	0.00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	20	108,778,100	66.67	281.93	20	108,778,100	16.67	26.53
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**33.49**	**74.00**			**6.62**	**14.32**
Predikat kinerja				**SR**	**S**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**33.49**	**74.00**			**6.62**	**14.32**
Predikat kinerja				**SR**	**S**			**SR**	**SR**
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang Dikembangkan**		**230,459,200**		**1021.72**		**230,459,200**		**12.03**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengembangan**		**230,459,200**		**1021.72**		**230,459,200**		**12.03**
Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan Usaha mikro	40	230,459,200	66.67	1118.41	40	230,459,200	26.67	35.46
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	0	-	0.00	#DIV/0!	0	-	0.00	0.00
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kegiatan inkubator Bisnis Bagi Usaha mikro	0	-	0.00	#DIV/0!	0	-	0.00	0.00

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Pameran/Bazar Produk usaha mikro serta terpasilitasinya kegiatan bisnis matching bagi pelaku usaha mikro	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**33.33**	**1021.72**			**6.67**	**12.03**
Predikat kinerja				**SR**	**ST**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**33.33**	**1021.72**			**6.67**	**12.03**
Predikat kinerja				**SR**	**ST**			**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program untuk 6 program (%)				**38.71**	**109.30**			**9.99**	**10.22**
Predikat kinerja				**SR**	**ST**			**SR**	**SR**

Sumber : Matriks evaluasi renja diskopukm (2024)

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat hingga triwulan II yang dirangkum pada narasi dibawah ini :

1. **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 49,80% dan 60,04% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   a. **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 49,80% dan 60,04% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi mempunyai capaian kinerja sebesar 49,60% dan 300,69% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota mempunyai capaian kinerja sebesar 50% dan 36,11% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

2. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 50,21% dan 35,01% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   a. **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 50,21% dan 35,01% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan mempunyai capaian kinerja sebesar 50,21% dan 35,01% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

3. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 50,40% dan 2533,29% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   a. **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi kopeasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 50,40% dan 2533,29% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan
      - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi mempunyai capaian kinerja sebesar 50,40% dan 2533,29% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 15,03% dan 117,89% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   a. **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 15,03% dan 117,89% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan
      - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi mempunyai capaian kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha mempunyai capaian kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai capaian kinerja sebesar 45,08% dan 123,79% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

5. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 33,49% dan 74% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   a. **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 33,49% dan 74% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro mempunyai capaian kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro mempunyai capaian kinerja sebesar 50,77% dan 226,40% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Mikro mempunyai capaian kinerja sebesar 50% dan 52,86% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai capaian kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
      - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan mempunyai capaian kinerja sebesar 66,67% dan 281,93% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

6. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 33,33% dan 1021,72% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

a. **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 33,33% dan 1021,72% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   - Pengembangan Usaha Mikro mempunyai capaian kinerja sebesar 66,67% dan 1118,41% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi mempunyai capaian kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

Dari kesimpulan diatas dapat diketahui Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menetukan prioritas pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pengaggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok, sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dalam pertengahan periode Renja Perangkat Daerah untuk disesuaikan dan menjadi bahan

penyusunan rencana tahun-tahun selanjutnya. Dalam hal ini dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Bandung Barat banyak terdapat capaian diatas dari hasil maksimal dalam hal pagu indikatif yang disesuaikan dengan realisasi tahun berjalan. Tentunya hal ini tidak bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya yang bisa membuat penilaian perangkat daerah itu sendiri mempunyai perencanaan yang tidak ideal.

Setelah membahan Urusan wajib non pelayanan dasar tentunya setiap perangkat daerah selalu menaungi dalam hal urusan wajib penunjang pemerintahan daerah yang dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini :

-

-

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Renja dan capaian Renstra hingga triwulan II

Urusn Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun anggaran 2024

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUPUT) / SUB KEGAITAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasl		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	4	12		13		15	
NON URUSAN			3,074,183,816		55.98		15.50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISKOPUKM		3,074,183,816		55.98		15.50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan		94,572,950		74.06		9.42

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	54,850,500	100.00	190.16	28.57	15.90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	9,488,000	100.00	100.00	33.33	21.32
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	30,234,450	0.00	72.24	0.00	8.58

			Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)	**28.57**	**74.06**	**8.84**	**9.42**
			Predikat kinerja	**SR**	**S**	**SR**	**SR**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2,706,729,536**		**52.85**		**17.36**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	2,681,565,436	51.16	52.59	51.16	17.53
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	12,302,500	0.00	122.35	0.00	12.30
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	12,861,600	43.75	107.29	14.58	9.53
			Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)	**31.64**	**52.85**	**16.44**	**17.36**
			Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**SR**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**11,209,450**		**63.10**		**8.97**

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	11,209,450	100.00	63.10	33.33	8.97
			Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)	**100.00**	**63.10**	**33.33**	**8.97**
			Predikat kinerja	**ST**	**R**	**SR**	**SR**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**139,298,500**		**1605.28**		**17.17**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43	12,900,000	100.00	500.00	33.33	10.32
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	126,398,500	23.26	2072.96	7.75	22.94
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
			Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)	**61.63**	**1605.28**	**13.70**	**17.17**
			Predikat kinerja	**R**	**ST**	**SR**	**SR**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum**		**67,246,800**		**43.82**		**4.71**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	27,777,500	53.33	49.80	14.55	14.62
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	21,493,900	48.00	84.65	9.60	13.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	7,227,900	40.00	51.97	3.64	4.13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	6,477,500	40.00	25.06	6.67	6.48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	4,270,000	40.00	18.02	8.00	1.07
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**27.67**	**43.82**	**5.31**	**4.71**
Predikat kinerja				**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi**		**-**		**0.00**		**0.00**

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
			Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**		**25,421,600**		**2033.73**		**13.34**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	25,421,600	0.00	2033.73	0.00	14.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
			Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)	**0.00**	**2033.73**	**0.00**	**13.34**
			Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai**		**29,704,980**		**49.81**		**5.60**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	29,704,980	54.55	85.65	18.18	10.80
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)				**27.27**	**49.81**	**4.55**	**5.60**
Predikat kinerja				**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)				**34.60**	**55.98**	**10.27**	**15.50**
Predikat kinerja				**SR**	**R**	**SR**	**SR**

Sumber : matriks evaluasi renja diskopukm (2024)

Dari tabel 2.2 berikut ini adalah ringkasan penilaian yang telah dilaksanakan hingga triwulan II sebagai dasar penyusunan perubahan renja

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 34,60% dan 55,98% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
    a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ,** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 28,57% dan 74,06% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **,** mempunyai capaian Kinerja sebesar 100% dan 190,16% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
        - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 100% dan 100% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
        - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai capaian

Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 72,74% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 31,64% dan 74,06% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai capaian Kinerja sebesar 51,16% dan 52,59% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 122,35% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 43,75% dan 107,29% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 100% dan 63,10% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 100% dan 63,10% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 61,63% dan 1605,28% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai capaian Kinerja sebesar 100% dan 500% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mempunyai capaian Kinerja sebesar 23,26% dan 2072% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 27,67% dan 43,82% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai capaian Kinerja sebesar 53,33% dan 49,80% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai capaian Kinerja sebesar 48% dan 84,65% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai capaian Kinerja sebesar 40% dan 51,97% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu mempunyai capaian Kinerja sebesar 40% dan 25,06% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai capaian Kinerja sebesar 40% dan 18,02% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

f. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   - Pengadaan Mebel mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

g. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 0% dan 2033,73% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 2033,73% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

h. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mempunyai rata-rata capaian Kinerja sebesar 27,27% dan 49,81% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mempunyai capaian Kinerja

sebesar 54,55% dan 85,65% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai capaian Kinerja sebesar 0% dan 0% capaian keuangan.yang disandingkan dengan pagu perencanaan.

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah Tahun 2024 telah mencapai target dari sisi pagu indikatif. Namun besarnya capaian pagu membuat perencanaan yang telah dibuat tidak bisa menggambarkan target yang sesungguhnya. Target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2024 – 2026 dan hasil evaluasi triwulan berjalan tersebut menunjukan terdapat program dan kegiatan yang dilanjutkan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2024 – 2026 serta terdapat juga program dan kegiatan yang tidak masuk kedalam Rencana Strategis 2024 – 2026. Hal ini tentu didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi aktual maupun faktual yang ada di Lingkup Kabupaten Bandung Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola perangkat secara cepat untuk bersinergi bersama dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan Daerah.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Koperasi dan UMKM.

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat

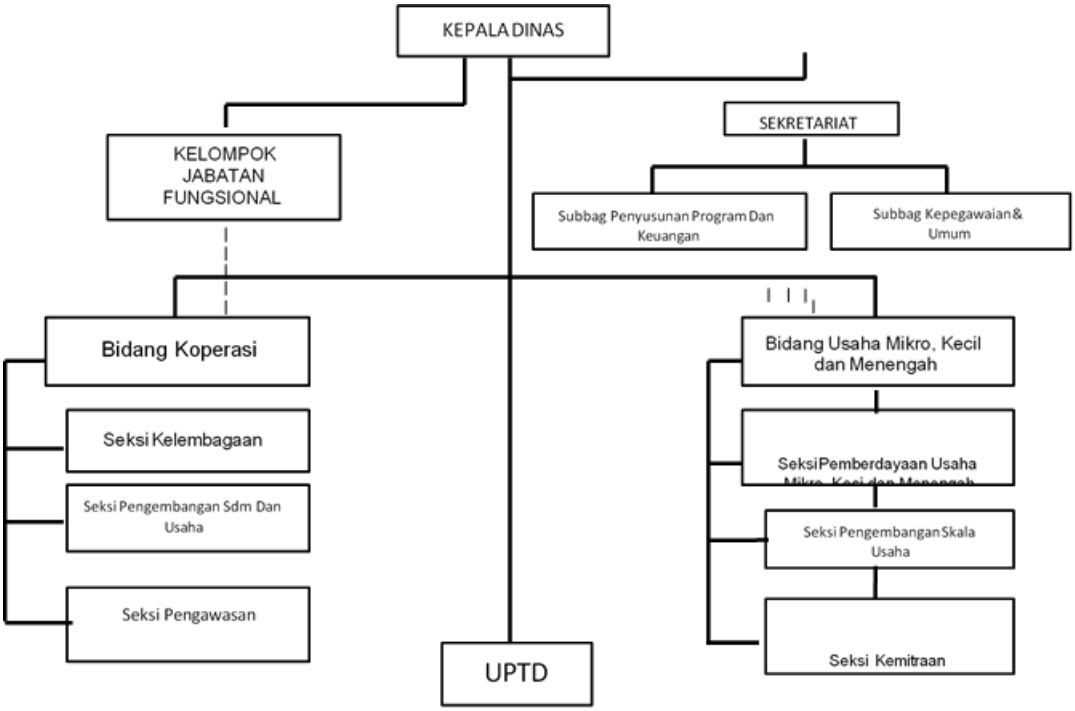

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Koperasi dan UKM merupakan Dinas Tipe C. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil (total skor variabel kurang dari 400), terdiri dari 1 Sekretariat yang terdiri dari 2 Sub bagian dan 2 Bidang. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung barat disajikan pada Tabel 2.3. di bawah ini. Termasuk dalam analisis tersebut adalah Target Renstra, realisasi capaian serta rasio capaiannya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung Barat periode (2021-2023)

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun Terakhir Renstra	
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	22	7,777,531,000	25	8,457,100,475	28	14,547,323,350	24.55	88
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	33	408,103,500	39	597,223,875	44	786,344,250	17.00	38.64
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	21	113,194,500	26	189,120,375	31	271,371,825	31.00	100.00
Persentase Peserta Diklat Perkoperasian	%	14	987,380,500	19	1,037,224,475	23	1,685,309,200	23.00	100.00
Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kegiatan	8	989,042,500	9	984,832,400	10	1,978,085,000	4.00	40.00
Penumbuhan Wirausaha Baru	Pelaku Usaha	100	2,189,945,500	125	2,770,000,000	150	3,525,000,000	152.00	101.33

Jumlah Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	**Pelaku Usaha**	**100**	**1,524,982,500**	**515**	**1,770,000,000**	**580**	**2,025,000,000**	**838.00**	**144.48**
pertumbuhan Pengembangan Pelaku Usaha Mikro	**Pelaku Usaha**	**120**	**664,963,000**	**150**	**1,000,000,000**	**175**	**1,500,000,000**	**245.00**	**140.00**
Nilai SAKIP Kabupaten Bandung Barat		**BB**	**2,562,361,346**	**BB**	**1,312,875,225**	**A**	**1,506,382,120**	**B**	**68.59**
Nilai SAKIP DISKOPUKM	**nilai mutu**	**B**	**2,562,361,346**	**BB**	**1,312,875,225**	**BB**	**1,506,382,120**	**B**	

Sumber : Diskopukm kbb diolah (2024)

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori **Baik**, tetapi beberapa kegiatan ke depan untuk menjadi perhatian masih perlu ada perbaikan kinerja khususnya untuk menunjang Nilai SAKIP berada pada kategori B dari target BB.

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Adanya Kepemimpinan yang baik dalam memberikan dorongan dan dukungan terhadap pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Keccil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat.
2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang baik, motivasi, dan komitmen individu.
3. Adanya system kerja ,dan kerjasama team, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja
4. Adanya sarana dan prasarana yang memadai .

2.2.3 Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran/hasil yang direncana di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat

pada program Koperasi. Faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya pada program kegiatan koperasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut;

a) Kurangnya kesadaran koperasi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan
b) Sarana dan prasarana perkoperasian yang masih kurang, banyaknya kasus koperasi bermasalah berdampak terhadap kepercayaan dan keaktifan masyarakat berkoperasi.
c) Banyaknya kasus koperasi bermasalah berdampak terhadap kepercayaan dan keaktifan masyarakat berkoperasi, masih kurangnya dukungan terhadap koperasi berprestasi.
d) Minimnya kapasitas SDM Koperasi, masih kurangnya kuantitas SDM Koperasi di internal Dinas.
e) Masih rendahnya kesadaran perkoperasian di masyarakat, masih kurangnya regenerasi kepengurusan koperasi, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap koperasi.

2.2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Tindakan perencanaan yang perlu dilakukan agar capaian kinerja terpenuhi yaitu sebagai berikut.

- Regulasi perkoperasian yang mengatur tata kelola koperasi, bimtek bagi SDM perkoperasian, dukungan fasilitasi dan advokasi bagi koperasi, anggaran bagi pengembangan koperasi menjadi poin yang sangat penting dan mendukung, program kegiatan yang tepat sasaran bagi pencapaian target kemajuan dan pemngembangan koperasi.
- Dukungan sarana dan prasarana perkoperasian yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan koperasi.
- Bimtek bagi SDM perkoperasian

- Dukungan fasilitasi dan advokasi bagi koperasi, anggaran bagi pengembangan koperasi menjadi poin yang sangat penting dan mendukung, program kegiatan yang tepat sasaran bagi pencapaian target kemajuan dan pemngembangan koperasi, sosialisasi perkoperasian.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat apabila diukur secara kuantitas Program dan Kegiatan telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapa tahapan dalam proses perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas SDM: (1) belum terpenuhinya hasil analisis beban kerja yang menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana dimasing-masing bidang; dan (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang karir dan pelatihan.
2. Kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan belum tersedia sesuai kebutuhan.
3. Beban kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Namun demikian perumusan perencanaan bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil telah diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional dan Program Provinsi sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat serta

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawabarat. Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan dan memiliki peluang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal meliputi:

A. Kekuatan

1) Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi;
2) Memiliki pemberdayaan setiap tahun yang selalu dilaksanakan agar para SDM kerja selalu optimal;

B. Kelemahan

1) Pemberdayaan Aparatur tidak optimal hasilnya;
2) Belum adanya database UMKM yang telah diperbaharui
3) Tidak ada Roadmap yang dibentuk untuk Seluruh Bidang;
4) Pendistribusian APBD untuk Dinas selalu tidak mencukupi meskipun masuk dalam program pengembangan ekonomi yang dicanangkan Nasional ataupun Provinsi;
5) Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi.
6) Sinergitas dengan Instansi lain kurang optimal

C. Peluang

1) Adanya Regulasi yang Mendukung Koperasi dan Usaha Kecil;
2) Peluang Pengembangan Usaha Luas;
3) Pasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terbuka luas;
4) Sinergi kerjasama dari berbagai stakeholder;
5) Teknologi Informasi yang pendukung pemasaran produk;
6) Pendamping UMKM dan Koperasi.

D. Ancaman

1) Menghadapi Revolusi Industri 4.0;
2) Administrasi usaha/pembukuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3) Citra Koperasi belum memasyarakat;
4) Teknologi masih sederhana di Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5) Sertifikasi Produk masih kurang;
6) Pasar global yang memanfaatkan teknologi.

Untuk menangani dan mengatasi Isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik Perangkat Daerah maupun stakeholder terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Perencanaan pembangunan seyogyanya perlu adanya sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dll). Data-data yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan pembangunan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai gambaran kondisi perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Barat ditunjukan pada tabel ini :

Tabel 2.4.

Jumlah dan Kondisi Koperasi serta Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2019 – 2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	667	692	722	758
Koperasi Aktif	60,1 %	61,6%	64,3%	66%
Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	557 Pelaku Usaha	0	213 Pelaku Usaha	7116 Pelaku Usaha
Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	171Pelaku Usaha	221 Pelaku Usaha

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2022

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2019-2022.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 yang telah diterbitkan, memuat berbagai arah kebijakan pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, termasuk didalamnya mengenai rancangan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2024. Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 tersebut, disebutkan bahwa pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penjabaran dari Misi 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif, maka sebagai dasar implementasinya dalam rancangan RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 telah dirumuskan bahwa Program Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi TataKelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi TataKelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Dana Transfer Umum-Dana
- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

6. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
    a. **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
        - Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
        - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
        - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
        - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
        - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
7. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
    a. **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**
        - Pengembangan Usaha Mikro
        - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sebagai dasar pertimbangan pendanaannya dapat dikelompokan menurut kategori sebagai berikut:

a. Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir kedalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat;
b. Usulan Program dan Kegiatan melalui mekanisme Bantuan khusu dan hibah yang tentunya diberikan kepada penerima anggaran sesuai nama Koperasi ataupun kelompok usulan;

c. Usulan Program dan kegiatan yang dapat diteruskan kedalam usulan APBD Provinsi ataupun APBN;
d. Usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat melaui rapat koordinasi dan hasil monev kunjungan lapangan.

Terkait Review terhadap rancangan awal RKPD Koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 bisa dilakukan dengan cara membandingkan rencana kerja dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka membandingkan dan menyesuaikan usulan perubahan rencana kerja dengan kebutuhan real kegiatan serta pagu PPAS perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap perubahan rencana kerja dinas koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten Bandung Barat tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	**Lokasi Kelompok Sasaran**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**URUSAN PROGRAM / KEGIATAN**	**Lokasi Kelompok Sasaran**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**8,129,731,479.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**8,021,577,687.00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6,181,018,481.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5,556,300,187.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**383,447,300.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**173,257,400.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	254,465,400.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	70,950,500.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,158,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,158,000.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,158,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,158,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,488,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,488,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9,488,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9,488,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	11,715,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	9,515,500.00	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	71,974,400.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	47,499,400.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**5,239,857,881.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,825,734,587.00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5,162,033,681.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4,753,660,387.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37,945,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32,195,600.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	16 Laporan	39,878,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	16 Laporan	39,878,600.00	

	Semesteran SKPD	n, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Semesteran SKPD	n, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**42,389,400.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**32,057,600.00**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42,389,400.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32,057,600.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**158,677,600.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**139,298,500.00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	2,580,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	12,900,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	156,097,600.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	126,398,500.00	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**153,457,900.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**159,040,100.00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	724,500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,108,600.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,017,000.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	55,777,500.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	55,777,500.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25,391,900.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	21,506,200.00	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13,907,900.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7,739,900.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	3,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	25,847,500.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	19,347,500.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	23,700,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	34,652,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				**1,314,700.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**				**25,138,300.00**	

	Pemerintah Daerah					**Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1,314,700.00	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	25,138,300.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**57,031,200.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**56,931,200.00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57,031,200.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	56,931,200.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**144,842,500.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**144,842,500.00**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	119,882,500.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	119,882,500.00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	24,960,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	24,960,000.00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				**241,428,600.00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**196,444,100.00**	

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				**241,428,600.00**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**196,444,100.00**	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	10,311,000.00	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	10,524,000.00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	231,117,600.00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	185,920,100.00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				**66,925,600.00**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**40,153,100.00**	

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**66,925,600.00**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**40,153,100.00**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	242 Unit Usaha	66,925,600.00	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	242 Unit Usaha	40,153,100.00	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				**139,085,200.00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**540,677,200.00**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				**139,085,200.00**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**540,677,200.00**	

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	139,085,200.00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	540,677,200.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				**357,730,700.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**549,522,800.00**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**357,730,700.00**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**549,522,800.00**	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	8 Kelompok Masyarakat	43,250,000.00	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	8 Kelompok Masyarakat	37,550,000.00	

	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	70 Unit Usaha	20,600,000.00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	70 Unit Usaha	-	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	122 Unit Usaha	293,880,700.00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	122 Unit Usaha	511,972,800.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				**870,986,898.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**801,298,100.00**	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65 Unit Usaha	92,478,000.00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65 Unit Usaha	72,610,000.00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	130 Unit Usaha	224,784,700.00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	130 Unit Usaha	251,205,900.00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	454,841,298.00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	242,625,200.00	

	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	35 Orang	10,300,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	35 Orang	10,300,000.00	
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	0,00	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	-	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	160 Unit Usaha	50,000,000.00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	160 Unit Usaha	77,196,000.00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	38,582,900.00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	147,361,000.00	

	melalui Pendidikan dan Pelatihan					melalui Pendidikan dan Pelatihan					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				**272,556,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**337,182,200.00**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**337,182,200.00**	
	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	70,606,000.00	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	282,800,200.00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah yang Difasilitasi	60 Orang	0,00	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah yang Difasilitasi	60 Orang	-	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamata	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	15 Unit Usaha	0,00	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamata	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	15 Unit Usaha	-	

		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	201,950,000.00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	54,382,000.00	
					8,129,731,479.00					**8,021,577,687.00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil pelaksanaan dari forum Musrenbang tingkat Desa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan tahunan di tingkat desa dengan membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun.

Hasil dari Musrenbang Desa yaitu penetapan usulan prioritas program kemudian dibahas lebih lanjut pada forum Musrenbang tingkat Kecamatan. Hasil penetapan usulan program ditingkat Kecamatan selanjutnya dibahas dan di verifikasi pada forum PD sesuai rancangan Renja PD yang masing-masing sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN. Hasil dari kesepakatan forum PD tersebut selanjutnya dibawa ke forum Musrenbang tingkat Kabupaten untuk disepakati, kemudian ditetapkan berupa RKPD. Tahun 2024 Perubahan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tidak termasuk kedalam kamus usulan. antara lain

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel yang disajikan format Tabel T-C.32

Tabel 2.6

Usulan Aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran tahun 2024

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
1	12-02-2024	Rusmana Dismartika	#Musrenbang Fasilitasi akses permodalan dan pendanaan UMKM Kreatif	Kurangnya modal untuk pelaku usaha UMKM di Desa Cipeundeuy untuk pengembangan usaha	Desa Cipeundeuy , Kab. Bandung Barat	Cipeundeuy	Cipeundeuy	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	12-02-2024	Dadan Buldani, S.Pd	#Musrenbang Fasilitasi akses permodalan dan pendanaan UMKM Kreatif	DI desa kami terdapat kelompok sauyunan yang bergerak di bidang perekonomian yang beralamat di kp. pasirbuntu rt 04 rw 04 desa sukahaji. berdasar hal itu perlu akses permodalan.	KP. Pasir buntu rt 04 rw 04, Kab. Bandung Barat	Cipeundeuy	Sukahaji	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	12-02-2024	Rusmana Dismartika	#Musrenbang Fasilitasi akses permodalan dan pendanaan UMKM Kreatif	Pengadaan Mesin Printer Banner untuk kelompok usaha	Kp. Cipeundeuy, RT 02 RW 02, Kab. Bandung Barat	Cipeundeuy	Cipeundeuy	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
4	04-04-2024	RONI DAHRONI	#Hibah Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Kelompok UMKM ALUS MILIK membutuhkan bantuan dana hibah	Kp. Cibogo RT 002 RW 017, Kab.	Cipeundeuy	Margalaksana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				APBD untuk meningkatkan kapasitas usaha kelompok demi pemberdayaan masyarakat.	Bandung Barat				
5	09-04-2024	CATERING ALILAH	#BK Outlet KUMKM Kabupaten/Kota	UMKM Merupakan penopang utama roda ekonomi kecil menengah, tetapi masih banyak UMKM yang tidak maksimal dalam pengembangan usahanya, dikarenakan keterbatasan modal, sehingga berdasarkan kondisi, kelompok UMKM ALILAH CATERING sangat membutuhkan bantuan.	KP. NGAMPRAH KALER RT. 001 RW. 009 , Kab. Bandung Barat	Ngamprah	Ngamprah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
6	16-04-2024	PEPI SUHENDRA	#Hibah Operasional Badan/ Lembaga/ Organisasi Kepemudaan	dana hibah bantuan umkm	Kp babakan sukagalih ciharasahas, Kab. Bandung Barat	Cipeundeuy	Ciharashas	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

7	16-04-2024	PEPI SUHENDRA	#BKK Kompetitif - Pembangunan Rumah Kemasan	belum adanya rumah kemasan di kecamatan cipeundeuy kabupaten bandung barat sehingga kami forum umkm cipeundeuy ingin mengajukan bantuan rumah kemasan agar umkm sekitar terbantu kemasan nya semakin naik kelas	Kp babakan sukagalih ciharasahas, Kab. Bandung Barat	Cipeundeuy	Ciharashas	Provinsi	Pengajuan Usulan
8	16-04-2024	PEPI SUHENDRA	#BKK Kompetitif - Pengembangan Gerai Usaha Terpadu	belum terciptanya gerai untuk pemasaran produk UMKM di kecamatan cipeundeuy	Kp babakan sukagalih ciharasahas, Kab. Bandung Barat	Cipeundeuy	Ciharashas	Provinsi	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
9	24-04-2024	Yuyu Yuhaeni	#BKDes Kompetitif - Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi Produktif Terpadu	Desa Kidangpananjung merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan. Potensi desa ini adalah pertanian dan perkebunan dengan ciri khas pengolahan hasil pertanian menjadi produk UMKM yang menjadi penyangga ekonomi masyarakat. Namun dengan tersebut, pengembangannya belum bisa dilaksanakan secara efektif, dikarenakan terhambat dan terkendalanya sarana prasarana akses menuju lahan pertanian, serta jalur distribusi pemasaran UMKM, yang mengakibatkan mahalnya ongkos	Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Cililin	Kidangpananjung	Provinsi	Validasi Mitra Bappeda

				angkut produk pertanian dan UMKM.					
10	24-04-2024	Rini Sartika, S.Sos.,M.Si	#BKK Kompetitif - Pengembangan Gerai Usaha Terpadu	masalah pemasaran apalagi di tengah persaingan pasar global dimana produk produk luar negeri dapat dengan bebas memasuki pasar Indonesia. Atas dasar hal tersebut kami berupaya memajukan produk UMKM Kabupaten Bandung Barat melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM,	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Ngamprah	Ngamprah	Provinsi	Usulan disetujui

11	04-05-2024	YAY. PENDIDIKAN INDONESIA MERDEKA	#Hibah Operasional Badan/ Lembaga/ Organisasi Pendidikan	Masih adanya perlu peningkatan sarana dan prasarana bagi yayasan dan pelatihan UMKM dan perlu adanya pelatihan bagi guru paud	Lokasi Sekolah KB.Tunas Merdeka : Jln. Galudra No.14 Rt.01/08 Ds.Cilame Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	Ngamprah	Cimareme	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
12	05-05-2024	YAY. PENDIDIKAN INDONESIA MERDEKA	#HB Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan	Masih adanya perlu peningkatan sarana dan prasarana bagi yayasan dan pelatihan UMKM dan perlu adanya pelatihan bagi guru paud	Lokasi Sekolah KB.Tunas Merdeka : Jln. Galudra No.14 Rt.01/08 Ds.Cilame Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cimareme, Kab. Bandung Barat	Ngamprah	Cilame	Provinsi	Validasi Mitra Bappeda

Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020 - 2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilasanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan

Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu: dengan 3 agenda antara lain :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang di- tunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan keberlan- jutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata ;
2. **Peningkatan inovasi dan kualitas investasi** merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
3. **Pengelolaan sumber daya ekonomi** yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
4. **Akselerasi** peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman,

energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Koperasi. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, Rasio Kewirausahaan Nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3%-3,95%; Pertumbuhan Wirausaha Baru sebesar 1,7%-4%; Kontribusi Koperasi Terhadap PDB sebesar 5,10%-5,50%; Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 24,7%-30,78%; Rasio Kred- it UMKM Terhadap Total Kredit Perbankansebesar 19,75%-22%;ProporsiPenyal- uran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 50,4%-80%; Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada IKM sebesar 2,4%-5%; Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan sebanyak 0-500;Jumlah Sentra Industri Kecildan Menengah (IKM) Baru Diluar Jawa yang Beroperasi 22 sentra sampai 30 sentra (kumulatif); Proporsi Nilai Tambah IKM Terhadap Total Nilai Tambah Industri Pengolahan Non Migas sebesar 18,5%-20%; Kontribusi usaha sosial sebesar 1,9%-2,5% dan Pen- umbuhan start-up sebesar 700 unit - 3.500 unit (kumulatif). Selanjutnya, sasaran indikator dan target penguatan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam RPJMNTahun 2020-2024 disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

RPJMN TAHUN 2020-2024

RPJMN 2020-2024			
SASARAN	**INDIKATOR**	**2020**	**2024**
Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rasio kewirausahaan nasional	3,3%	3,95%
	Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,7%	4%

(UMKM), dan Koperasi	.Kontribusi Koperasi Terhadap PDB	5,10%	5,50%
	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	24,7%	30,78%
	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	19,75%	22%
	Proporsi penyaluranKredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	50,4%	80%
	Proporsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	2,40%	5%
	Jumlah Koperasi modern yang dikembangkan	0	500
	Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	22 SENTRA	30 SENTRA
	Proporsi Nilai Tambah IKM terhadap total nilai tambah industry pengolahan non migas	18,50%	20%
	Kontribusi Usaha Sosial	1,9%PDB	2,5% PDB
	Penumbuhan start-up	748 UNIT	3500 UNIT

SUMBER RPJMN 2020-2024 di-olah DISKOPUKM KBB (2024)

Lebih lanjut, dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, indikator yang dipergunakan dengan menyesuaikan indikator dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

RENSTRA KEMENKOP UKM 2020-2024

Indikator	2020	2024
Kontribusi PDB Sektor UMKM	33,88%	59,56%
a. Rasio Kewirausahaan b. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM c. Pertumbuhan start-up berbasis koperasi	0,25% 5% 50	0,50% 10% 100
Kontribusi PDB Sektor Koperasi	5,10%	5,50%
a. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM b. Persentase Total Investasi UMKM c. Persentase UKM Naik Kelas	0,5% 2% 0,1%	1% 3% 0,5%
Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	25 Unit Koperasi	400 Unit Koperasi

SUMBER RPJMN 2020-2024 di-olah DISKOPUKM KBB (2024)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 - 2025, yaitu ”Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Sasaran Pokok RPJPD Tahap V (2023 – 2025) menyebutkan bahwa indikator Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%) yang biasa digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang menyasar kepada sasaran Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja dengan pencapaian isu strategis Pembangunan

Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan dengan sub Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha.

Tujuan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam RPD 2024 - 2026 ini, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran, Meningkatya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja

2. Strategi,

A. Peningkatan Inovasi dan kualitas penanaman Modal.

i. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas

ii. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

B.Transformasi perluasan kesempatan kerja.

i. Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan

ii. Pengembangan dan Penjaminan keberlanjutan usaha kecil

3. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024 menurut RPD dan renstra Diskuk Jabar, yakni :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAN KUALITAS USAHA	PROPORSI KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT	%	23,3

Sumber : DinasKUK Prov Jabar (2024) di-olah DiskopKBB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**%**	15
	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI	**%**	8
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KEPATUHAN KOPERASI	**%**	15
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE SERTIFIKAT KESEHATAN KSP / USP	**%**	25
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	**%**	25
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	LAJU PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT	**%**	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	**%**	33,3

	PERSENTASE UMKM YANG BERPOTENSI EKSPOR	**%**	11
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE UNIT USAHA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN	**%**	22

Sumber : DinasKUK Prov Jabar (2024) di-olah DiskopKBB

3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat

Adapun rumusan tujuan dan sasaran di dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

3.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan daya saing koperasi dan UKM
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM

3.3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur. Sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
3. Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi dan laporan kinerja

Berikut dijelaskan dalam tabel mengenai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2024-2026.

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
			2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan daya saing koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persentase koperasi aktif	67,02%	68,07%	69,13%
		Persentase koperasi sehat	48,40%	50,00%	51,60%
		Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	0,45%	0,54%	0,63%
		Persentase Koperasi yang Mendapatkan	40,00%	50,00%	60,00%

		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan			
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan	20,00%	22,22%	22,73%
		Persentase Usaha Mikro yang Dikembangkan	20,00%	21,43%	21,57%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi dan laporan kinerja	Nilai SAKIP DISKOPUKM	64,50/B	66,50/B	70,01/BB

Sumber : Diskop UKM KBB (2024) diolah

Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat menggunakan indikator pertumbuhan koperasi berkualitas dan pertumbuhan usaha mikro. Dari kedua indikator tersebut dirumuskan kriteria koperasi sehat dan usaha mikro yang mengalami pertumbuhan dari 3 (tiga) aspek, yaitu skala usaha, manajerial dan sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.6
Kriteria Koperasi Berkualitas

Kriteria Koperasi Berkualitas
1. Penyelenggaraan rapat-rapat sesuai ketentuan 2. Manajemen pengawasan koperasi 3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB 4. Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan 5. Kinerja kepengurusan 6. Tertib Administrasi 7. Meningkatnya omset dan struktur permodalan 8. Tingkat kesehatan kondisi keuangan 9. Kohesivitas anggota

10. Rasio peningkatan jumlah anggota 11. Pendidikan dan pelatihan anggota 12. Koperasi yang memiliki legalitas

Sumber : Diskop UKM KBB (2024) diolah

Tabel 3.7

Kriteria Pertumbuhan Usaha Mikro

Kriteria Pertumbuhan Usaha Mikro
1. Peningkatan omset dan modal usaha mikro 2. Usaha mikro yang memiliki kelengkapan legalitas 3. Peningkatan akses pada permodalan 4. Peningkatan akses kemitraan usaha mikro 5. Peningkatan kapasita produksi usaha 6. Pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan

Sumber : Diskop UKM KBB (2024) diolah

Untuk mencapai masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2024 diimplementasikan dalam 7 (tujuh) program,14 (empat belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
    a. **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
        - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
        - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
3. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**
    a. **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
        - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi TataKelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
4. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**
    a. **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
        - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi TataKelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
5. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**
    a. **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
        - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
        - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Dana Transfer Umum-Dana
        - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
        -

6. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
    a. **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
        - Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
        - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
        - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
        - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
        - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
7. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
    a. **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**
        - Pengembangan Usaha Mikro
        - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

3.3.3 Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Keuangan daerah merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan kinerja keuangan daerah tahun 2019-2023 serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019-2023 Kabupaten Bandung Barat setidaknya ada beberapa kelemahan yang berpotensi menjadi permasalahan pembangunan daerah kedepan antara lain:

1. Sumber pendapatan daerah yang masih di dominasi dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang akan menyebabkan ketergantungan pada

pemerintah pusat sehingga berdampak kepada APBD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2. Kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD): Terbatasnya diversifikasi sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil usaha milik daerah dapat mengakibatkan keterbatasan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.
3. Tingginya proporsi belanja pegawai yang mengakibatkan rendahnya penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan
4. Keterbatasan Infrastruktur Keuangan: Infrastruktur keuangan yang terbatas, seperti lembaga keuangan daerah yang kurang berkembang atau kurangnya akses ke pasar keuangan, dapat menghambat kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan sehingga berdampak kepada APBD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Ini pun menjadi sebab jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja OPD, dikarenakan program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya yang ditentukan dengan Penerimaan anggaran yang sesungguhnya.

Dikarenakan hal tersebut maka kendala OPD ketika menyusun Perencanaan tidak dapat membuat seideal mungkin. Bisa terlihat dalam tabel rencana Prakiraan Maju tahun 2026 OPD tidak bisa memprediksi berapa pagu indikatif yang didapat sehingga membuat perencanaan yang dibuat menjadi tidak ideal.

Tabel 3.8

Rencana Maju Program Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				NASIONAL	DAERAH		
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						2.594.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN						2.594.000.000,00

	PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**2.594.000.000,00**
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP DISKOPUKM***	**66,50 / B Nilai Mutu**			**66,50 / B Nilai Mutu**	**592.500.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan*	-	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Governance	-	442.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Gov ernance		160.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Gov ernance		25.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		25.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi		17.500.000,00

					dengan melibatkan UMKM dan koperasi		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		30.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Gov ernance		30.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Gov ernance		155.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu*	-	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	150.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Gov ernance		30.000.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi peme rintahan melalui Smart Gov ernance		60.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		60.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-	-	Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*	-	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata		0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik		-	Pertumbuh an ekonomi dan investasi		0,00

		Kantor yang Disediakan			dengan melibatkan UMKM dan koperasi		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata		0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi*	-	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata	-	0,00
	Pengadaan Mebel						

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata		0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi*	-	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	0,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai*	-	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata	-	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata		0,00
	Pemeliharaan Mebel						
		Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi birokrasi dan transpo rmasi		0,00

					peme rintahan melalui Smart Gov ernance		
2,	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Aktif***	**68,07 %**			**68,07 %**	**400.000.000,00**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	-	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	400.000.000,00
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		250.000.000,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		150.000.000,00
3,	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi Sehat***	**50,00 %**			**50,00 %**	**325.000.000,00**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam*	-	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi	-	325.000.000,00

		1 (satu) daerah kabupaten/kota		Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dengan melibatkan UMKM dan koperasi		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		325.000.000,00
4,	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan***	**0,54 %**			**0,54 %**	**200.000.000,00**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	200.000.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		200.000.000,00
5,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan***	**50,00 %**			**50,00 %**	**1.076.500.000,00**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha yang mendapat fasilitasi Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan*	-	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi	-	1.076.500.000,00

		Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dengan melibatkan UMKM dan koperasi		
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						
		Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		120.000.000,00
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		80.000.000,00
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		200.000.000,00
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi		676.500.000,00

				Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dengan melibatkan UMKM dan koperasi		
6,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan***	22,22 %			22,22%	**0,00**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro*	-	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	0,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		Melanjutkan Pengemb angan Infrastruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00

				Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil						
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro						
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan						
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
7,	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro yang Dikembangkan***	21,43%			21,43%	**0,00**

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang berorientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil*	-	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi	-	0,00
	Pengembangan Usaha Mikro						
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						
		Jumlah yang Difasilitasi		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro						
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		0,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya		Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata		0,00

		Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi		
			2.594.000.000,00				

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja (Renja) adalah rencana anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana anggaran, target capaian kinerja, dan langkah-langkah pelaksanaan. Renja menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah untuk mengukur kinerja dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Renja memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan RKP-PD dan DPA-PD.

Sebelum memasuki tabel kerangka pendaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan Program Prioritas turunan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil ditingkat nasional atau internasional ini berdampak kepada peningkatan perekonomian Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil rumusan rencana Program dan kegiatan 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, menetapkan 5 (lima) kegiatan Prioritas untuk Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. Fasilitasi UMKM
2. Wirausaha Baru
3. UMKM Naik Kelas
4. Pelatihan Perkoperasian
5. Penilaian Pengawasan Pemberdayaan dan Perizinan Koper

Tabel. 4.1

Program Kegiatan Perubahan tahun anggaran 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
3	4	8	9	10	11	12
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				**6.421.992.039,00**	**8.246.060.931,00**	**6.932.699.232,00**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**6.421.992.039,00**	**8.246.060.931,00**	**6.932.699.232,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**6.421.992.039,00**	**8.246.060.931,00**	**6.932.699.232,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP DISKOPUKM**	**64,50 / B Nilai Mutu**	**64,50 / B Nilai Mutu**	**5.491.147.041,00**	**5.993.548.481,00**	**5.142.421.532,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	100 %	127.702.500,00	196.382.400,00	196.382.400,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	28.845.000,00	81.575.500,00	70.950.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	13.158.000,00	13.158.000,00	13.158.000,00

	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.158.000,00	13.158.000,00	13.158.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00	9.488.000,00	9.488.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00	9.488.000,00	9.488.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	11.715.500,00	11.715.500,00	9.515.500,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	41.850.000,00	57.799.400,00	47.499.400,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	5.121.336.941,00	5.239.857.881,00	5.239.857.881,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.099.293.941,00	5.162.033.681,00	4.339.781.732,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.055.000,00	37.945.600,00	32.195.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	11.988.000,00	39.878.600,00	39.878.600,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	17.765.000,00	42.389.400,00	42.389.400,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.765.000,00	42.389.400,00	32.057.600,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.677.500,00	142.698.500,00	142.698.500,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	43 Paket	2.580.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	43 Orang	6.097.500,00	129.798.500,00	126.398.500,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	43 Orang	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	100 %	153.457.900,00	169.031.900,00	169.031.900,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	724.500,00	724.500,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.108.600,00	4.690.600,00	20.017.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	55.777.500,00	55.777.500,00	55.777.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25.391.900,00	21.493.900,00	21.506.200,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	13.907.900,00	13.907.900,00	7.739.900,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu						
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	25.847.500,00	19.347.500,00	19.347.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	23.700.000,00	50.090.000,00	34.652.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
Pengadaan Mebel						

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.314.700,00	1.314.700,00	25.138.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.250.000,00	57.031.200,00	57.031.200,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	57.031.200,00	56.931.200,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai	32 Unit	32 Unit	59.642.500,00	144.842.500,00	144.842.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	34.682.500,00	119.882.500,00	119.882.500,00
Pemeliharaan Mebel						
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						

	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Aktif**	**67,02 %**	**67,02 %**	**38.700.000,00**	**208.846.600,00**	**181.306.600,00**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	38.700.000,00	208.846.600,00	208.846.600,00
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	3.500.000,00	10.524.000,00	10.524.000,00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	35.200.000,00	198.322.600,00	170.782.600,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi Sehat**	**48,40 %**	**48,40 %**	**36.304.500,00**	**62.825.600,00**	**36.890.600,00**

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	242 Unit Usaha	242 Unit Usaha	36.304.500,00	62.825.600,00	62.825.600,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	242 Unit Usaha	242 Unit Usaha	36.304.500,00	62.825.600,00	36.890.600,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan**	**0,45 %**	**0,45 %**	**1.003.500,00**	**139.085.200,00**	**74.181.200,00**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	250 Orang	250 Orang	1.003.500,00	139.085.200,00	139.085.200,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	250 Orang	1.003.500,00	139.085.200,00	74.181.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan**	**40,00 %**	**40,00 %**	**249.995.900,00**	**440.619.950,00**	**359.419.000,00**

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapat fasilitasi Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	249.995.900,00	440.619.950,00	440.619.950,00
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	8 Kelompok Masyarakat	8 Kelompok Masyarakat	6.500.000,00	37.550.000,00	37.550.000,00
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	5.412.000,00	37.250.000,00	0,00
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	122 Unit Usaha	122 Unit Usaha	238.083.900,00	365.819.950,00	321.869.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan**	**20 %**	**20 %**	**582.285.098,00**	**1.012.879.400,00**	**750.224.600,00**

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	325 Pelaku Usaha	582.285.098,00	1.012.879.400,00	1.012.879.400,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	42.478.000,00	98.482.500,00	98.482.500,00
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	36.082.900,00	264.907.700,00	251.455.900,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	454.841.298,00	491.828.200,00	242.625.200,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	35 Orang	35 Orang	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil						
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00

Penyusunan Basis Data Usaha Mikro						
	Jumlah Unit Usaha Mikro	160 Unit	160 Unit	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan						
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	30 Orang	38.582.900,00	147.361.000,00	147.361.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang**	**20%**	**20%**	**22.556.000,00**	**388.255.700,00**	**388.255.700,00**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengembangan	145 Unit Usaha	145 Unit Usaha	22.556.000,00	388.255.700,00	388.255.700,00
Pengembangan Usaha Mikro						
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	20.606.000,00	333.873.700,00	333.873.700,00
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						
	Jumlah yang Difasilitasi	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro						
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	1.950.000,00	54.382.000,00	54.382.000,00
				6.421.992.039,00	**8.246.060.931,00**	**6.932.699.232,00**

SUMBER : DISKOPUKM KABUPATEN BANDUNG BARAT (2024)

TABEL 4.2

Formulasi Capaian IKU DiskopUKM

Persentase Capaian Kinerja	=	Realisasi / Rencana	X 100 %

SUMBER : DATA DINAS KOPERASI 2024 (DIOLAH)

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah capaian kinerja, maka digunakan rumus :

TABEL 4.3

Formulasi Capaian IKU DiskopUKM

Persentase Capaian Kinerja	=	Rencana – (Realisasi – Rencana) / Rencana	X 100%

SUMBER : DATA DINAS KOPERASI 2024 (DIOLAH)

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut :

Tabel 4.4

Kategori Capaian Kinerja

KATEGORI	INTERVAL
BAIK	> 80
CUKUP	> 60-80
KURANG	≤ 60

SUMBER : DATA DINAS KOPERASI 2024 (DIOLAH)

Bab 5 PENUTUP

Renja Perubahan adalah media perwujudan pertanggungjawaban agar turut mensukseskan pelaksanaan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Penyusunan Perubahan Renja ini mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana. Daerah dan RKP Daerah. Perubahan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat terhadap kinerja dan anggaran yang terstruktur sehingga dapat bermanfaat dan sesuai hasil yang diharapkan, tentunya tidak akan terlepas dari Renstra Diskop Ukm periode 2024-2026;
2. Dengan adanya perubahan kembali dokumen perencanaan yang dituangkan dalam perubahan renstra perlu melakukan pemutakhiran data dan informasi serta sistem data base yang update menyesuaikan dengan kebutuhan data sesuai dokumen perencanaan yang baru;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat;
4. Peningkatan Koordinasi, Kolaborasi dan Sinergitas antara Pemerintah, Stakeholder, Akademisi, Media dan unsur Pentahelix

lainnya agar lebih maksimal terhadap pengembangan UMKM dan Koperasi;

5. Belum maksimalnya peran tenaga Pendamping UMKM dan Pengawas Koperasi;

Dengan adanya langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, diharapkan pada masa mendatang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat dapat menyempurnakan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terstruktrur tentunya apa yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang direncanakan, dalam upaya peningkatan pencapaian program dan keuangan.

Demikian semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat dapat menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Perekonomian yang menunjang demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati Bandung Barat sehingga pelayanan publik secara sinergis upaya pembangunan mampu mewujudkan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang Mandiri dan Sejahtera.

Bandung Barat, 2024

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dra. SRI DUSTIRAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19680801198803200

RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat merupakan acuan perencanaan program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat adalah untuk merencanakan kegiatan organisasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Penyusunan Rencana Kerja dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan misi pertama dan kedua dari RPJMD kelima 2023-2025 pada RPJPD 2007-2025, yaitu "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kreatif" dan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu Kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja untuk tahun mendatang.

Bandung Barat, 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja

Drs. Hasanuddin, M.Si
NIP. 19730404 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **5**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **31**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31
3.3. Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **46**
4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 46

BAB V PENUTUP **54**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (Tahun Berjalan) 6
Tabel 2.3 Reviu Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat 18
Tabel 3.1 Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 32
Tabel 3.2 Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 33
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja (Perubahan) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 37
Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, tahun ke-1 (satu) pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Renja Tahun 2024 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024. Proses penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 meliputi:

1) Musrenbang desa dan kelurahan serta musrenbang kecamatan;
2) Konsultasi publik rencana awal RKPD 2024.

Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024, dilakukan serangkaian tahapan dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Di antaranya dan Review RPJMD Tahun 2018-2023 dan Evaluasi Triwulanan RKPD Tahun 2023. Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan, Program Strategis Nasional,

Program Strategis Provinsi Jawa Barat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota lainnya, khususnya pembangunan wilayah perbatasan ditunjukkan pada (Gambar 1).

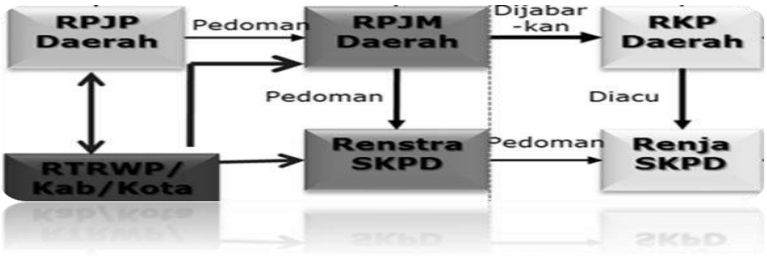

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antara dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan (Gambar 2) Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun Renja PD. RKPD diserasikan dengan RKPD Provinsi dan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain: 1) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 2) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan 3) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja;
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026;

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor tenaga kerja dan transmigrasi tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja;
2. Untuk penjabaran visi dan misi pertama dan kedua dari RPD 2024-2026 pada RPJPD 2007-2025 kedalam program dan kegiatan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
3. Untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah;
4. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUAP/PPAS-P) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dan realisasi sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang *tidak* memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
   a. Program Penempatan Tenaga Kerja
   b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
   c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. Realisasi program/kegiatan yang *telah* memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
   a. Program Hubungan Industrial;
   b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan:
   a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Fasilitasi Kartu Prakerja dan AK 1;
2. Pelayanan antar kerja bagi pencari kerja;
3. Palatihan Wirausaha baru;
4. Fasilitasi Pelatihan Korban PHK Perusahaan

Pencapaian target kinerja urusan Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 2.1:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2023 (Tahun Berjalan)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISNAKER	Nilai Mutu	72 (BB)	70,65 (BB)	60-70 (B)	-	-	-		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	dokumen	7	6	7	7	100%	7	20	2,86
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	-	1	1	100%	1	2	2
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23 org x 14 bln	28 org x 14 bln	28 org x 14 bln	23 org x 14 bln	100	28 org x 14 bln	100%	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	-	1	1	100	1	3	3
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	1	-	1	1	100	1	3	3
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dokumen	1	-	1	1	100	1	3	3
2	07	1	2.03		Administrasi Barang Milik Dearah pada Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
2	07	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	**100**	1	3	3
2	07	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1	1	1	**100**	-	2	-
2	07	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD-SKPD	Laporan	1	1	1	1	**100**	1	3	3
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	1	1	0	0	5	6	1.50
2	07	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	60 paket	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1 dokumen							

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	1 dokumen							
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1							
2	07	01	2.05	10	Sosialisai Peraturan Perudang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	55 orang	0	75	0	0	75	75	18.75
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Orang	55 orang							
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	Presentase	100%	8	8	4	100	8	20	5
2	07	01	2.06	01	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1							
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6	6	2	33.33	6	14	3.50
2	07	01	2.06	03	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1							
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	10	10	5	50	10	25	6.25
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12	12	6	50	12	30	7.50
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	6	6	6	100	6	18	4.50
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12	12	7	58.33	12	31	7.75
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12							

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPKD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Laporan	1							
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	2							
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	2							
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	Persentase	100%							
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1							
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1							
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	2	5	4	80	2	**8**	**2**
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	16	1	1	1	100.00	1	3	0.75
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1							
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persentase	100%							
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja	Dokumen								
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Dokumen								

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	03			Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	%	30.67%	40	60	60	100	80		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja yang dilatih	Orang	1.400	**3**	**3**	**2**	**67**	3	**8**	**2**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	750	740	610	80	13.11	610	1,430	357.50
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	Lembaga	8	40	20	20	100.00	4	100	25.00
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Unit	33	0	0	0	0.00	1	1	0.25
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya	Perusahaan	25	20	20	20	100	3	43	11
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	25	20	20	20	100	1	41	10.25
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tingkat daerah	Dokumen	1	1	1		0	1	2	1
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Dokumen	1	50		0	0	1	51	12.75
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	%	16.03%	60	80	0	0	1		
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	%	100%	1	1	0	0	1	2	1

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	orang	20	1	1	0	0	1	2	0.50
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	orang	350	1	1	0	0	1	2	0.50
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	orang	20	1	1	0	0	1	2	0.50
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terkelolanya informasi pasar kerja	%	100%							
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	dokumen	1							
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	orang	400							
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang mendapat perlindungan	orang	60	1	2	0	0	2	3	1
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	orang	20	1	1	0	0	1	2	0.50
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna diberdayakan	orang	40							
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang		1	1	0	0	1	2	3
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang terkoordinasi dan tersinkronisasi	orang		1	1	0	0	1	2	0.50
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP dan PKB	PP&PKB	55	3	3	2	66.67	3	8	2.00
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	perusahaan	50 PP	1	1	1	100	1	3	0.75
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Sama	perusahaan	5 PKB	1	1	1	100	1	3	0.75
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek dan pengupahan	laporan	1 laporan	1	1	0	0	1	2	0.50
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	%	100	5	5	3	60	5	13	3.25
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi pencegahan kasus perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	perkara/ kasus	30 Kasus	1	1	1	100	1	3	0.75
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	perkara/ kasus	30 Kasus	1	1	1	100	1	3	0.75

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi yang terverifikasi dan rekapitulasi	asosiasi dan serikat pekerja	30 pencatatan	1	1	1	100	1	3	0.75
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS tripartit yang dibina	lembaga	1 lembaga	1	1	1	100	1	3	0.75
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	60 orang	1	1	1	100	1	3	0.75
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	persentase transmigran yang diberangkatkan	%	16%	-	-	-	-	-	-	-
3	32	04	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten sampai ke lokasi	KK	4	-	-	-	-	-	-	-
3	32	04	2.01	18	Pendampingan dari Kabupaten/ Kota sampai ke Lokasi	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten sampai ke lokasi	KK	4	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana yang tersedia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Setiap tahun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barta berupaya dapat memenuhi target pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi perangkat daerah, pelaksanaan dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam satu tahun berjalan, yaitu tahun 2024. Beberapa kegiatan ini memang tidak setiap tahun dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan adanya kewajiban untuk mendukung program-program pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bandung Barat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain:

1. Tingginya jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung Barat;
2. Rendahnya tingkat Pendidikan dan kurangnya kompetensi pencari kerja;
3. Kualifikasi/jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Meningkatnya data pencari kerja dalam pembuatan AK 1;
5. Lapangan kerja dalam negeri masih terbatas;
6. Lapangan kerja luar negeri makin meningkat;
7. Pemberian upah belum sesuai dengan upah minimum kota;
8. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan;

9. Banyaknya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat;
10. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;
11. Belum adanya tindak lanjut dan dukungan kepada alumni peserta pelatihan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, diantaranya adalah:

1. Sarana dan prasarana kerja maupun untuk pelatihan yang belum lengkap, serta gedung UPTD BLK yang belum memadai;
2. Belum adanya instruktur PNS, sehingga kebutuhan instruktur untuk pelatihan mengambil dari luar;
3. Terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator;
4. Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja;
5. Masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja;
6. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
7. Rendahnya motivasi tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat untuk bekerja di luar Kabupaten Bandung Barat;
8. Pembiayaan yang belum mencukupi untuk kelancaran pelaksaan tugas dalam pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. Belum optimalnya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanan kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan;
10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah:

1. Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil;
3. Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Bandung Barat, dan adanya ketidaksesuaian tata naskah dan prosedural penyusunan perjanjian kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah lokasi transmigrasi, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Selain permasalahan pengangguran dan penempatan, permasalahan perselisihan hubungan industrial tahun ketahun memang tidak pernah ada habisnya dan akan selalu menarik perhatian banyak pihak. Permasalahan-permasalah tersebut penting untuk mendapatkan perlindungan dari perspektif hak-hak asasi tenaga kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan adanya pencapaian kata sepakat atau dengan penyelesaian himbauan, hal ini berdasar pada pasal 136 ayat (1) UUK, ketentuan pasal 136 ayat (1) tersebut mengenal dua pola penyelesaian, yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalaui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya disebut UU PPHI mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan maupun didalam pengadilan. Penyelesaian perkara dan kasus hubungan industrial dikabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel:

Perkembangan Kasus PHK/PHI TAHUN 2022/2023

No	Tahun	Jenis	Masuk		Selesai		PPHI	
			Kasus	TK	Anjuran	PB	Kasus	TK
1	2022	PHI	17	55	9	8	8	12

2		PHK	27	247	15	12	15	157
Jumlah			**44**	**302**	**24**	**20**	**23**	**169**

No	Tahun	Jenis	Masuk		Selesai		Diteruskan BPPKD/P4P	
			Kasus	TK	Anjuran	PB	Kasus	TK
1	2023	PHI	9	14	3	6	3	4
2		PHK	7	10	2	5	2	3
Jumlah			**16**	**24**	**5**	**11**	**5**	**7**

Penyelesaian antara buruh/pekerja dengan pengusaha amatlah penting dialakukan di masa pembangunan nasional sekarang ini karena tidak bisa dipungkiri tenaga kerja merupakan faktor yang teramat penting bagi terselengaranya pembangunan nasional di Negara kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target renja dan tingkat kinerja yang dicapai, yang diselaraskan dengan rencana program/kegiatan dan plafon pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Disnaker	72 (BB)	6.665.203.233	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Disnaker	72 (BB)	5.889.862.801
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi K inerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokumen	67.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokumen	236.677.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	32.767.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	143.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
		Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	66.087.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	137.678.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.750.203.233	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.097.965.301
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang x 14 bulan	5.725.203.233	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang x 14 bulan	5.067.768.301
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	98.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disnaker	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan	1 dokumen	7.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disnaker	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan	1 dokumen	581.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
		tindak lanjut pemeriksaan					tindak lanjut pemeriksaan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD an laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD an laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	29.518.000
Administrasi Barang Milik Dearah Pada perangkat daerah		Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	100%	50.000.000	Administrasi Barang Milik Dearah Pada perangkat daerah		Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	100%	11.534.900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Disnaker	Jumlah rencana kebutuhan BMD-SKPD	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Disnaker	Jumlah rencana kebutuhan BMD-SKPD	1 dokumen	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disnaker	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	15.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disnaker	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disnaker	Jumlah laporan penatausahaan BMD-SKPD	1 laporan	20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disnaker	Jumlah laporan penatausahaan BMD-SKPD	1 laporan	11.534.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	245.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	262.569.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Disnaker	Jumlah unit peningkatan sarana	1 unit	45.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Disnaker	Jumlah unit peningkatan sarana	-	-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
		dan prasarana disiplin pegawai					dan prasarana disiplin pegawai		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60 paket	27.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	55 paket	115.304.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disnaker	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disnaker	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Disnaker	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Disnaker	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disnaker	Jumlah dokumen, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	8.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disnaker	Jumlah dokumen, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	-	147.265.000
Sosialisai Peraturan Perudang-undangan	Disnaker	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	60.000.000	Sosialisai Peraturan Perudang-undangan	Disnaker	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	55 orang	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase telaksananya administrasi umum	100%	300.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase telaksananya administrasi umum	100%	56.102.600

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	22.254.800
Pemyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	35.000.000	Pemyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	2.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	Disnaker	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	Disnaker	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	2.902.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	28.545.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPKD	Disnaker	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPKD	Disnaker	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-
Pengadaan Mebeleur	Disnaker	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	30.000.000	Pengadaan Mebeleur	Disnaker	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	23.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	50.748.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	50.748.800
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	17.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	174.264.400

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	149.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	174.264.400
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30,67%	1.830.000.000	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30,67%	13.749.890.213
		Produktivitas tenaga kerja	46,76 juta				Produktivitas tenaga kerja	46,76 juta	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		terlaksannya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.400 orang	1.630.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		terlaksannya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.400 orang	13.749.890.213
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bandung Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	750 Orang	300.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bandung Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	750 Orang	2.274.853.013

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	8 Lembaga	230.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	3 Lembaga	227.139.400
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	33 unit	1.100.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	116 unit	11.247.897.800
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya	25 Perusahaan	150.000.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya	-	-
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bandung Barat	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	25 Perusahaan	150,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bandung Barat	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	-	-
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tingkat daerah	1 dokumen	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tingkat daerah	-	-
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	1 dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	-	-
Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	16,43%	230.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	16,43%	432.330.800

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	100%	50.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	-	-
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	20 Orang	20.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	-	-
Pelayanan Antar Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	350 Orang	20.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	-	-
Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 Orang	10.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	-	-
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bandung Barat	Persentase terkelolanya informasi pasar kerja	100%	50.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bandung Barat	Persentase terkelolanya informasi pasar kerja	100%	239.520.800
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bandung Barat	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 dokumen	10.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bandung Barat	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	-	-
Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	400 orang	40.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	400 orang	239.520.800
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMI yang mendapat perlindungan	60 orang	130.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMI yang mendapat perlindungan	-	192.810.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Bandung Barat	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	100.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Bandung Barat	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	-	192.810.000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Bandung Barat	Jumlah PMI purna diberdayakan	40 orang	30.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Bandung Barat	Jumlah PMI purna diberdayakan	-	-
Program Hubungan Industrial		Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100%	800.000.000	Program Hubungan Industrial		Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100%	1.282.717.650
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PP dan PKB	55 PP & PKB	110.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PP dan PKB	55 PP & PKB	597.302.650
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	50 perusahaan	50.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	50 perusahaan	161.715.800
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Sama	5 perusahaan	50.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Bandung Barat	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Sama	5 perusahaan	435.586.850

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bandung Barat	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek dan pengupahan	1 laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bandung Barat	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek dan pengupahan	-	-
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100%	690.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100%	685.415.000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah perselisihan yang dicegah	30 perkara	175.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah perselisihan yang dicegah	-	-
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 perkara	245.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di	Kab. Bandung Barat	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 perkara	376.065.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
					1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bandung Barat	Jumlah Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi yang terverifikasi dan rekapitulasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bandung Barat	Jumlah Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi yang terverifikasi dan rekapitulasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	309.350.000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah LKS tripartit yang dibina	1 lembaga	200.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung Barat	Jumlah LKS tripartit yang dibina	-	-
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	20.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bandung Barat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Persentase transmigran yang diberangkatkan	16%	200.000.000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Persentase transmigran yang diberangkatkan	-	-
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tertatanya persebaran penduduk	100%	200.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tertatanya persebaran penduduk	-	-
Pendampingan dari Kabupaten/ Kota sampai ke Lokasi		Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan	4 kk	200.000.000	Pendampingan dari Kabupaten/ Kota sampai ke Lokasi		Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan	-	-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuahn				
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
		Kabupaten sampai ke lokasi					Kabupaten sampai ke lokasi		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Secara umum, keterkaitan dengan adanya RENJA Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bandung Barat adalah untuk mengakomodir perkembangan perubahan sasaran kegiatan guna peningkatan pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Di dalam bab ini dipaparkan secara umum tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan terkait dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

Hal ini sejalan dengan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat bahwa perlunya dilakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik pada pengenaan berupa program dan kegiatan yang dilakukan sampai kepada tingkat PD.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka menengah yaitu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya, yang menggambarkan

arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Periode 2024-2026 disesuaikan dengan misi pertama dan kedua dari RPJMD kelima 2023-2025 pada RPJPD 2007-2025

Tabel 3.1

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat 2024-2026

Visi KBB	Misi	Tujuan Disnaker KBB	Indikator	Target
Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kreatif	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,40%
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Disnaker	BB (72,00)

Sasaran merupakan hal yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Secara umum sasaran ialah penjabaran dari suatu tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan dan sifatnya dapat di ukur.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan, guna menjadi indikator pencapaian misi RPJMD Kelima 2023-2025 pada RPJPD 2007-2025, tertuang dalam Rencana Strategis 2024-2026.

Tabel 3.2

Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30,67%
	Meningkatkan penempatan pencari kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	16,43%
	Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan kesejahteraan pekerja	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Disnaker	Nilai SAKIP Disnaker	BB (72,00)

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat menetapkan target kinerja sasaran dalam usaha mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2024, adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapain tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja. Program, kegiatan beserta sub kegiatan dimaksud meliputi:

I. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi program:
    1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, didukung oleh kegiatan:
        1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, terdiri dari sub kegiatan:
            a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
            b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
            c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
    2. Program Penempatan Tenaga Kerja, didukung oleh kegiatan:
        1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, terdiri dari sub kegiatan:
            a. Job Fair/Bursa Kerja
        2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota:
            a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CPMI/PMI
    3. Program Hubungan Industrial, didukung oleh kegiatan:
        1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
            a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
            b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
        2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

II. Non Urusan, meliputi program:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh kegiatan:
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Pemyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA (PERUBAHAN)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Non Urusan														
2	07	01			Program Penunjnag Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISNAKER		72,00 (BB)	nilai mutu	**5.889.862.801**	PAD		73,00 (BB)	Nilai mutu	7.225.203.233
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		7	dokumen	236.677.800	PAD		7	dokumen	84.000.000
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Disnaker	1	dokumen	32.767.700	PAD		1	dokumen	20.000.000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Disnaker	1	dokumen	143.500	PAD		1	dokumen	10.000.000
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnaker	1	dokumen	-	PAD		1	dokumen	12.500.000
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Disnaker	1	dokumen	-	PAD		1	dokumen	10.000.000
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disnaker	1	dokumen	-	PAD		1	dokumen	12.500.000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnaker	1	laporan	66.087.900	PAD		1	laporan	10.000.000
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	1	laporan	137.678.700	PAD		1	laporan	9.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Disnaker	100	%	5.097.965.301	PAD		100	%	5.755.203.233

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	23 x 14	orang/ bulan	5.067.768.301	DAU		23 x 14	Orang/ Bulan	5.725.203.233
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Disnaker	1	dokumen	98.000	PAD		1	dokumen	10.000.000
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Disnaker	1	dokumen	581.000	PAD		1	dokumen	10.000.000
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD an laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Disnaker	1	dokumen	29.518.000	PAD		1	dokumen	10.000.000
2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Dearah Pada perangkat daerah	Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	Disnaker	100	%	11.534.900	PAD		100	%	100.000.000
2	7	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD-SKPD	Disnaker	1	dokumen	-	PAD		1	dokumen	30.000.000
2	7	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disnaker	1	laporan	-	PAD		1	laporan	30.000.000
2	7	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD-SKPD	Disnaker	1	laporan	11.534.900	PAD		1	laporan	40.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	100	%	262.569.000	PAD		100	%	280.000.000
2	07	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Disnaker	-	-	-	PAD		1	unit	50.000.000
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Disnaker	55	paket	115.304.000	PAD		60	paket	31.000.000
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Disnaker	-	-	-	PAD		1	dokumen	25.000.000
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Disnaker	-	-	-	PAD		1	dokumen	30.000.000
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Disnaker	-	-	147.265.000	PAD		1	dokumen	8.000.000
2	07	01	2.05	10	Sosialisai Peraturan Perudang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Disnaker	-	-	-	PAD		55	orang	40.000.000
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Disnaker	-	-	-	PAD		55	orang	96.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	Disnaker	100	%	56.102.600	PAD		100	%	585.000.000
2	07	01	2.06	01	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disnaker	-	-	-	PAD		1	paket	30.000.000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disnaker	1	paket	-	PAD		1	paket	150.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Disnaker	-	-	-	PAD		1	paket	30.000.000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Disnaker	1	paket	22.254.800	PAD		1	paket	80.000.000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Disnaker	1	paket	2.400.000	PAD		1	paket	60.000.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Disnaker	-	-	-	PAD		1	dokumen	35.000.000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Disnaker	12	laporan	2.902.800	PAD		12	laporan	50.000.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	12	laporan	28.545.000	PAD		12	laporan	140.000.000
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPKD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Disnaker	-	-	-	PAD		1	dokumen	10.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Disnaker	-	-	0	PAD		2	unit	80.000.000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan	Disnaker	-	-	0	PAD		2	unit	80.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	Disnaker	100	%	50.748.800	PAD		100	%	41.000.000
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Disnaker	1	laporan	50.748.800	PAD		1	laporan	6.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disnaker	-	-	-	PAD		1	laporan	35.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	100	%	174.264.400	PAD		100	%	300.000.000
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Disnaker	16	unit	174.264.400	PAD		16	unit	200.000.000
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disnaker	-	-	-	PAD		1	unit	100.000.000
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	KBB	30,67	%	13.749.890.213	PAD		31,52	%	2.200.000.000
						Produktivitas tenaga kerja		46,76	juta	0			47,17	juta	400.000.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja yang dilatih	KBB	…	orang	13.749.890.213	PAD		1.500	orang	2.200.000.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	KBB	….	orang	2.274.853.013	PAD		800	orang	500.000.000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan	KBB	..	lembaga	227.139.400	PAD		8	lembaga	550.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas									
	07	03	2.02	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	KBB	33	unit	11.247.897.800	PAD		21	unit	1.150.000.000
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya	KBB	-	-	-	PAD		25	perusahaan	250.000.000
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	KBB	-	-	-	PAD		25	perusahaan	250.000.000
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KBB	-	-	-	PAD		1	dokumen	150.000.000
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	KBB	-	-	-	PAD		1	dokumen	150.000.000
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	KBB	16,43	%	432.330.800	PAD		16,81	%	350.000.000
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	KBB	-	-	-	PAD		100	%	90.000.000
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	KBB	-	-	-	PAD		20	orang	30.000.000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	KBB	-	-	-	PAD		400	orang	40.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui	KBB	-	-	-	PAD		20	orang	20.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						program perluasan kesempatan kerja									
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terkelolanya informasi pasar kerja	KBB	100	%	239.520.800	PAD		100	%	130.000.000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	KBB	-	-	-	PAD		1	dokumen	100.000.000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	KBB	400	orang	239.520.800	PAD		400	orang	30.000.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang mendapat perlindungan	KBB	-	-	192.810.000	PAD		60	orang	130.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	KBB	-	-	192.810.000	PAD		20	orang	100.000.000
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna diberdayakan	KBB	-	-	-	PAD		40	orang	30.000.000
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	KBB	100	%	1.282.717.650	PAD		100	%	1.200.000.000
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP dan PKB	KBB	55	PP & PKB	597.302.650	PAD		62	PP & PKB	110.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait	KBB	50	perusahaan	161.715.800	PAD		55	perusahaan	50.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online									
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Sama	KBB	5	perusahaan	435.586.850	PAD		7	perusahaan	50.000.000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek dan pengupahan	KBB	-	-	-	PAD		1	laporan	10.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	KBB	100	%	685.415.000	PAD		100	%	1.090.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi pencegahan kasus perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	KBB	-	-	-	PAD		33	perkara	275.000.000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	KBB	30	perkara	376.065.000	PAD		30	perkara	390.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (2025)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi yang terverifikasi dan rekapitulasi	KBB	30	asosiasi dan serikat pekerja	309.350.000	PAD		30	asosiasi dan serikat pekerja	75.000.000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS tripartit yang dibina	KBB	-	-	-	PAD		1	lembaga	300.000.000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	KBB	-	-	-	PAD		120	orang	50.000.000
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	persentase transmigran yang diberangkatkan	KBB	-	-	-			32	%	350.000.000
3	32	04	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertatanya persebaran penduduk	KBB	-	-	-	PAD		100	%	350.000.000
3	32	04	2.01	18	Pendampingan dari Kabupaten/ Kota sampai ke Lokasi	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten sampai ke lokasi	KBB	-	-	-	PAD		4	KK	350.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Bandung Barat. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**30,67%**	**2.218.438.150**	**13.749.890.213**
	Produktivitas tenaga kerja	**46,78 juta**		
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah pencari Kerja yang dilatih**	**1.400 orang**	**2.218.438.150**	**13.749.890.213**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	224 orang	1.833.950.950	2.274.853.013
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	3 lembaga	227.139.400	227.139.400
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	116 unit	157.347.800	11.247.897.800
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**16,43 %**	**482.781.200**	**432.330.800**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase terkelolanya informasi pasar kerja**	**400 orang**	**482.781.200**	**239.520.800**
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	400 orang	482.781.200	239.520.800
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah PMI yang mendapat perlindungan**	8 orang	**-**	**192.810.000**
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	8 orang	-	192.810.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar**	**100%**	**1.672.711.800**	**1.437.217.650**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PP dan PKB**	**55 PP & PKB**	**673.647.900**	**597.302.650**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan	50 perusahaan	218.643.100	161.715.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
	industrial dan terdaftar di WLKP online			
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Sama	5 perusahaan	455.004.800	435.586.850
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan**	**100%**	**999.063.900**	**839.915.000**
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 perkara	450.000.000	530.565.000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi yang terverifikasi dan rekapitulasi	30 perkara	549.063.900	309.350.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai Sakip DISNAKER**	**72 / BB**	**7.495.655.698**	**5.964.812.101**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**7 dokumen**	**366.127.100**	**236.677.800**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	37.622.700	32.767.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.341.300	143.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.889.700	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.841.300	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.489.700	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	70.637.900	66.087.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	233.304.500	137.678.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5.910.143.998**	**5.047.965.301**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang x 14 bulan	5.864.638.998	5.017.768.301
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	4.908.600	98.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen	3.969.600	581.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD an laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	36.626.800	29.518.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah**	**100%**	**36.235.600**	**11.534.900**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD-SKPD	1 dokumen	3.847.500	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD-SKPD	1 laporan	32.388.100	11.534.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian**	**100%**	**115.304.000**	**262.569.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	55 paket	115.304.000	115.304.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		-	147.265.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase telaksananya administrasi umum**	**100%**	**782.768.400**	**181.051.900**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	319.920.800	121.734.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	48.912.800	25.469.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	20.640.000	2.400.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	61.546.800	2.902.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	331.748.000	28.545.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran**	**100%**	**73.702.200**	**50.748.800**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	73.702.200	50.748.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**211.374.400**	**174.264.400**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	211.374.400	174.264.400

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), yang memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024, merupakan acuan rencana kegiatan maupun evaluasi terhadap capaian kinerja tahun angaran 2023. Rencana Kerja ini menunjang tercapainya visi Kabupaten Bandung Barat pada RPJPD 2007-2025, yaitu "Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan".

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Bandung Barat, 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja

Drs. Hasanuddin, M.Si
NIP. 19730404 199203 1 001

BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**I**
DAFTAR ISI		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**3**
	1.1 Latar Belakang	**3**
	1.2 Landasan Hukum	**3-4**
	1.3 Maksud dan Tujuan	**6**
	1.4 Sistematika	**7**
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**	**8**
	Tabel 2.1	**10-20**
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**21**
	Tabel 3.1	**22-31**
BAB IV	**PENUTUP**	**32**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan penelitian pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan telah dimutakhirkan dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;

19. Peraturan Bupati Bandung Barat No. 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026 ;

20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024 Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja perubahan tahun 2024 bagi Bappelitbangda dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Srtategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan mengacu kepada Perbahan RKPD Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Bappelitbangda;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan Bappelitbangda.

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Bandung Barat Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Pencapaian target kinerja dan penganggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Bappelitbangda sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada tahun 2024 serta pendanaan kegiatan pada masing- masing bidang di Bappelitbangda.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bappelitbangda dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan dan sub kegiatan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Dearah

Kabupaten Bandung Barat

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
1	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM RKPD KE DALAM APBD**	**100%**	**2.745.000.000**	**APBD**	**-**	**665.574.550**
1.1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**1.075.000.000**	**APBD**	**-**	**305.711.200**
1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	29	396.179.600	APBD	-	171.973.000
1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29	28.000.000	APBD	-	11.425.000
1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29	24.650.000	APBD	-	3.200.000
1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	29	35.000.000	APBD	-	1.900.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41	466.836.000	APBD	-	105.145.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41	26.500.000	APBD	-	4.550.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41	38.159.400	APBD	-	6.568.200
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41	59.675.000	APBD	-	950.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	100%	**835.000.000**	APBD	100%	**78.214.000**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	8	332.820.000	APBD	-	60.491.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	42.000.000	APBD	-	4.326.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7	36.155.000	APBD	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			24.850.000			3.750.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6	308.220.000	APBD	-	3.312.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	36.000.000	APBD	-	280.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	33.155.000	APBD	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			21.800.000		-	6.055.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**835.000.000**	**APBD**	**100%**	**279.649.350**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2	294.067.000	APBD	-	95.918.350

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	37.375.000	APBD	-	14.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	37.375.000	APBD	-	8.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2	20.989.000	APBD	-	15.923.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	340.795.000	APBD	-	115.868.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	35.750.000	APBD	-	12.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	35.750.000	APBD	-	12.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	32.899.000	APBD	-	5.940.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD	100%	**2.600.005.300**	APBD	-	**1.525.310.327**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah**	100%	**2.049.908.300**	APBD	-	**1.097.641.350**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Dokumen Analisis	1	5.200.000	APBD	-	2.600.000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen	1	5.200.000	APBD	-	-
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan Konsultasi Publik	2	79.660.000	APBD	-	78.880.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah	2	5.200.000	APBD	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	2	477.387.500,00	APBD	-	460.682.750
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pagu indikatif kewilayahan	1	8.320.000	APBD	-	8.320.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	3	1.468.940.800	APBD	-	547.158.600

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah**	100%	**300.000.000**	APBD	-	**372.202.877**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan penyusunan Indikator Makro RPJMD	5	200.000.000	APBD	-	288.588.877
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2	100.000.000	APBD	-	83.614.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembanggunan Daerah yang Efektif dan Akuntabel**	100%	**250.097.000**	APBD	-	55.466.100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan SPM	4	197.305.400	APBD	-	52.139.500
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja, Evaluasi Capaian RPJMD, Laporan TP/UB dan DAK	4	52.791.600	APBD	-	3.326.600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI EVALUASI SAKIP BAPPELITBANGDA**	**72 (BB)**	**12.584.622.459**	**APBD**	**72,91 (BB)**	**5.701.300.898**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**143.201.000**	**APBD**	**-**	**48.255.600**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	2	74.090.000	APBD	-	34.322.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	6.721.000	APBD	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	6.388.000	APBD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumenDPA	1	6.988.000	APBD	1	6.988.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	8.938.000	APBD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	1	18.088.000	APBD	-	557.600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1	21.988.000	APBD	1	6.388.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	**100%**	**11.226.728.159**	APBD	-	**5.414.830.514**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN	46	11.100.728.159	APBD	-	5.393.630.514
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Verifikasi Keuangan	4	64.751.200	APBD	-	19.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2	14.778.400	APBD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan semesteran	4	39.470.400	APBD	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1	7.000.000	APBD	-	1.800.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	100%	**62.400.000**	APBD	-	**24.600.000**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	62.400.000	APBD	-	24.600.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur**	60%	**453.650.000**	APBD	-	**28.200.000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1	58.950.000	APBD	-	28.200.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur perencana	50	394.700.000	APBD	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran**	55%	**416.501.600**	APBD	-	**78.443.990**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	26	31.564.600	APBD	-	19.561.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu dan rapat	14	17.995.900	APBD	-	5.356.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8	3.448.100	APBD	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tersedianya makanan dan miniman tamu	12	31.200.000	APBD	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi PD/instansi pemerintahan diluar Kabupaten Bandung Barat	12	332.293.000	APBD	-	53.525.590
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran**	55%	**170.219.200**	APBD	-	72.867.234

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12	26.100.000	APBD	-	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya pelayanan kebersihan kantor	12	144.119.200	APBD	-	60.867.234
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran**	55%	**111.922.500**	APBD	**-**	**34.103.560**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional	23	74.402.500	APBD	-	29.633.560
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya perbaikan peralatan kerja	10	7.520.000	APBD	-	4.470.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2	30.000.000	APBD	-	-
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE DISEMINASI HASIL KELITBAGAN	100%	**1.864.999.250**	APBD	-	430.202.585
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	100%	**320.714.000**	APBD	-	72.861.700
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup otonomi daerah	1	126.024.500	APBD	-	52.400.700
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kelitbangan	4	194.689.500	APBD	-	20.461.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan**	**100%**	**810.454.000**	**APBD**	**-**	**119.304.285**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup aspek aspek sosial	1	531.201.950	APBD	-	119.304.285
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup kepariwisataan	1	103.500.000	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen kelitbangan lingkup partisipasi masyarakat	1	175.752.050	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan**	100%	**388.108.500**	APBD	-	26.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup koperasi dan UMKM	1	151.721.750	APBD	-	26.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup pertanian, perkebunan dan pangan	1	114.101.750	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian kelitbangan lingkup lingkungan hidup	1	122.285.000	APBD	-	-
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif untuk menunjang proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan di bidang inovasi dan teknologi**	100%	**345.722.750**	APBD	**6**	Rp412.000.000
	Penelitian, Pengembangan, dan	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup inovasi	3	139.132.750	APBD	1	99.586.600

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran
	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dan teknologi					
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	2	176.590.000	APBD	4	112.450.000
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			30.000.000			-
	TOTAL			**19.794.627.009**			**8.322.388.360**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran yang berbasis kinerja. Menindaklanjuti hal tersebut Bappelitbangda telah melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024. Seluruh pendanaan kegiatan masing – masing bagian atau bidang di Bappelitbangda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

Adapun bab ini menjelaskan mengenai besaran anggaran di masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan beserta perubahan besaran anggaran disesuaikan dengan realisasi Bappelitbangda dan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Dearah

Kabupaten Bandung Barat

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
1	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM RKPD KE DALAM APBD**	**2.745.000.000**	**2.545.000.000**	**(200.000.000)**
1.1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.075.000.000**	**1.025.000.000**	**(50.000.000)**
1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	396.179.600	385.342.000	(10.837.600)
1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28.000.000	28.000.000	-
1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.650.000	21.075.000	(3.575.000)
1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	35.000.000	27.202.500	(7.797.500)
1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	466.836.000	476.986.000	10.150.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.500.000	26.500.000	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38.159.400	37.874.900	(284.500)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.675.000	49.019.600	(10.665.400)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**835.000.000**	**735.000.000**	**(100.000.000)**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	332.820.000	279.770.000	(53.050.000)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.000.000	42.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	36.155.000	36.155.000	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		24.850.000	24.770.000	(80.000)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	308.220.000	257.225.000	(50.995.000)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	36.000.000	36.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	33.155.000	. 41.280.000	8.125.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		21.800.000	17.800.000	(4.000.000)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**835.000.000**	**785.000.000**	**(50.000.000)**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	294.067.000	267.719.000	(26.348.000)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	37.375.000	37.375.000	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	37.375.000	40.425.000	3.050.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	20.989.000	25.945.000	4.956.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	340.795.000	302.045.000	(38.750.000)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.750.000	33.750.000	(2.000.000)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.750.000	37.375.000	1.625.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	32.899.000	40.366.000	7.467.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD	**2.600.005.300**	**2.715.162.392**	**115.157.092**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah**	**2.049.908.300**	**2.041.658.300**	**(8.250.000)**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Dokumen Analisis	5.200.000	5.200.000	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen	5.200.000	5.200.000	-
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan Konsultasi Publik	79.660.000	79.660.000	-
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	477.387.500,00	477.387.500,00	-
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pagu indikatif kewilayahan	8.320.000	8.320.000	-
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	1.468.940.800	1.460.690.800	(8.250.000)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah**	**300.000.000**	**478.164.892**	**178.164.892**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan penyusunan Indikator Makro RPJMD	200.000.000	367.114.892	167.114.892
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100.000.000	111.050.000	11.050.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembanggunan Daerah yang Efektif dan Akuntabel**	**250.097.000**	**195.339.200**	(54.757.800)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan SPM	197.305.400	158.085.200	(39.220.200)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja, Evaluasi Capaian RPJMD, Laporan TP/UB dan DAK	52.791.600	37.254.000	(15.537.600)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI EVALUASI SAKIP BAPPELITBANGDA**	**12.584.622.459**	**10.910.758.976**	**(1.673.863.483)**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**	**143.201.000**	**125.197.400**	**(18.003.600)**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	74.090.000	56.086.400	(18.003.600)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6.721.000	6.721.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	6.388.000	6.388.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumenDPA	6.988.000	6.988.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	8.938.000	8.938.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	18.088.000	18.088.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	21.988.000	21.988.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	**11.226.728.159**	**9.948.061.276**	**(1.278.666.883)**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN	11.100.728.159	9.822.061.276	(1.278.666.883)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Verifikasi Keuangan	64.751.200	64.751.200	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	14.778.400	14.778.400	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan semesteran	39.470.400	39.470.400	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	7.000.000	7.000.000	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**62.400.000**	**44.400.000**	**(18.000.000)**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	62.400.000	44.400.000	(18.000.000)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur**	**453.650.000**	**96.650.000**	**(357.000.000)**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	58.950.000	58.950.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur perencana	394.700.000	37.700.000	(357.000.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran**	**416.501.600**	**418.803.600**	**2.302.000**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	31.564.600	31.564.600	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu dan rapat	17.995.900	17.995.900	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3.448.100	3.448.100	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tersedianya makanan dan miniman tamu	31.200.000	31.200.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi PD/instansi pemerintahan diluar Kabupaten Bandung Barat	332.293.000	334.595.000	2.302.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran**	**170.219.200**	**155.174.200**	**(15.045.000)**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	26.100.000	26.100.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya pelayanan kebersihan kantor	144.119.200	129.074.200	(15.045.000)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran**	**111.922.500**	**122.472.500**	**10.550.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional	74.402.500	74.402.500	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya perbaikan peralatan kerja	7.520.000	18.070.000	10.550.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30.000.000	30.000.000	-
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE DISEMINASI HASIL KELITBAGAN	**1.864.999.250**	**1.428.228.500**	**(436.770.750)**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan**	**320.714.000**	**282.483.000**	**(38.231.000)**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
		di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup otonomi daerah	126.024.500	98.567.500	(27.457.000)
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kelitbangan	194.689.500	183.915.500	(10.774.000)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan**	**810.454.000**	**430.894.250**	**(379.559.750)**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup aspek aspek sosial	531.201.950	316.222.700	(214.979.250)
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup kepariwisataan	103.500.000	3.900.000	(99.600.000)
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen kelitbangan lingkup partisipasi masyarakat	175.752.050	110.771.550	(64.980.500)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan**	**388.108.500**	**369.128.500**	**(18.980.000)**
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup koperasi dan UMKM	151.721.750	151.721.750	-
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup pertanian, perkebunan dan pangan	114.101.750	95.121.750	(18.980.000)
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian kelitbangan lingkup lingkungan hidup	122.285.000	122.285.000	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Anggaran	Bertambah / (Berkurang)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif untuk menunjang proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan di bidang inovasi dan teknologi**	**345.722.750**	**345.722.750**	**-**
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup inovasi dan teknologi	139.132.750	139.132.750	-
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	176.590.000	176.590.000	-
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		30.000.000	30.000.000	-
	TOTAL		**19.794.627.009**	**17.599.149.868**	**(2.195.477.141)**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit dan sub unit organisasi yang ada di Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyeseuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Oleh karena itu, Renja Perubahan ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, karena bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali dengan kondisi pada waktu pelaksanaannya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan mengkesampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak mengganggu sinergitas masing-masing kegiatan terhadap tujuan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat secara umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan, pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing sub unit perlu terus dilakukan untuk mendeteksi lebih awal setiap penyimpangan-penyimpangan di setiap kegiatan, sehingga apabila diketahui adanya penyimpangan dapat diperbaiki dan disesuaikan sedini mungkin. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat sebagai institusi perencana. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan oleh Bappelitbangda dalam rangka menunjang dan mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus mendapat dukungan dan antusiasme dari berbagai instansi dan stakeholder terkait.

Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan ridha oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas dan amanah yang telah dibebankan kepada kita.

Bandung Barat, September 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Rina Marlina
Pembina Tk. I
NIP. 197009131990032003

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KECAMATAN GUNUNGHALU

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata pengantar ii

BAB I, PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 3
3. Maksud dan tujuan 4
4. Sistematika penulisan 4

BAB II, HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu 5

BAB III, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 8

DAERAH 8

1. Tujuan Rencana Kerja SKPD 8
2. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 9

Daerah 9

1. Penjabaran Renca Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu Tahun 2025

BAB IV, PENUTUP 11

1. Kesimpulan 11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Kantor kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024. Renja Perubahan Tahun 2024 disusun dengan harapan agar dapat berguna untuk membantu perkembangan program Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat kedepan.

Kami sangat sadar, bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu mohon kiranya memaklumi serta, kami mengucapkan terima kasih kepada staf Kantor Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat yang telah bekerja sama dan berperan secara aktif sehingga Renja Perubahan ini akhirnya dapat disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan Masyarakat dan Negara. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Gununghalu, November 2024
Camat Gununghalu,

HARI MUSTIKA J, S.Sos
NIP.197409131993031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rangkan melaksnakan amanat pasal 124 bagian ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Gununghalu berusaha untuk menyusun Renja Perubahan Kecamatan Gununghalu Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2025 .

Renja Kecamatan Gununghalu Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam system Perencanaan Pembangunan Daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Renja Kecamatan Gununghalu menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung Barat kedalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan pengangagarannya.

Renja Perubahan Kecamatan Gununghalu mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gununghalu Tahun 2024 – 2026 (Renstra SKPD

tahun terakhir), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Renja Perubahan Kecamatan Gununghalu memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanankan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Gununghalu, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Gununghalu merupakan daerah yang bersifat urban dan mempunyai tingkat mobilitas baik penduduk maupun perekonomian yang cukup tinggi karena merupakan wilayah penyangga Ibukota Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Gununghalu terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat dengan jarak dari pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Gununghalu dengan:

- Desa yang terjauh 21 km, dengan waktu tempuh 30 menit
- Ibu Kota Kabupaten 45 km, dengan waktu tempuh 2 Jam
- Ibu Kota Provinsi 65 km, dengan waktu tempuh 3 Jam

Luas Kecamatan Gununghalu adalah 7.954.784 Ha meliputi 9 Desa, 128 RW dan 523 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cipongkor
- Sebelah Selatan :Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Sindangkerta
- Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur

Dengan kondisi masyarakat yang urban dan kompleks pada umumnya masyarakat Kecamatan Gununghalu mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai baik itu anggota TNI Aktif/Pensiunan, PNS Aktif/Pensiunan dan pegawai BUMN disamping sebagian sebagai Petani .

Penduduk Kecamatan Gununghalu berdasarkan data akhir Tahun 2024 berjumlah 72.812 jiwa yang terdiri dari 36.846 penduduk laki-laki dan 35.966 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 23.107 KK, sedangkan data kelembagaan 43 Dusun, 523 RT, dan 129 RW.

Renja Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Gununghalu Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat, yaitu : “Bersama Membangun Masyarakat yang Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis berbasis pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melalui jaminan akses dan pemerataan terhadan layanan dasar kesehatan, Pendidikan dan keagamaan;
2. Mememnuhi kebutuhan Infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, social dan budaya;
3. Menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat masyarakat berbasis kearifan lokan dan kreatifitas;
4. Melakukan optimalisasi Sumber Daya Alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan;
5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan dan industry yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment;
7. Mengembangan system Pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayaniberbasis inovasidan teknologi.

ALUR PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

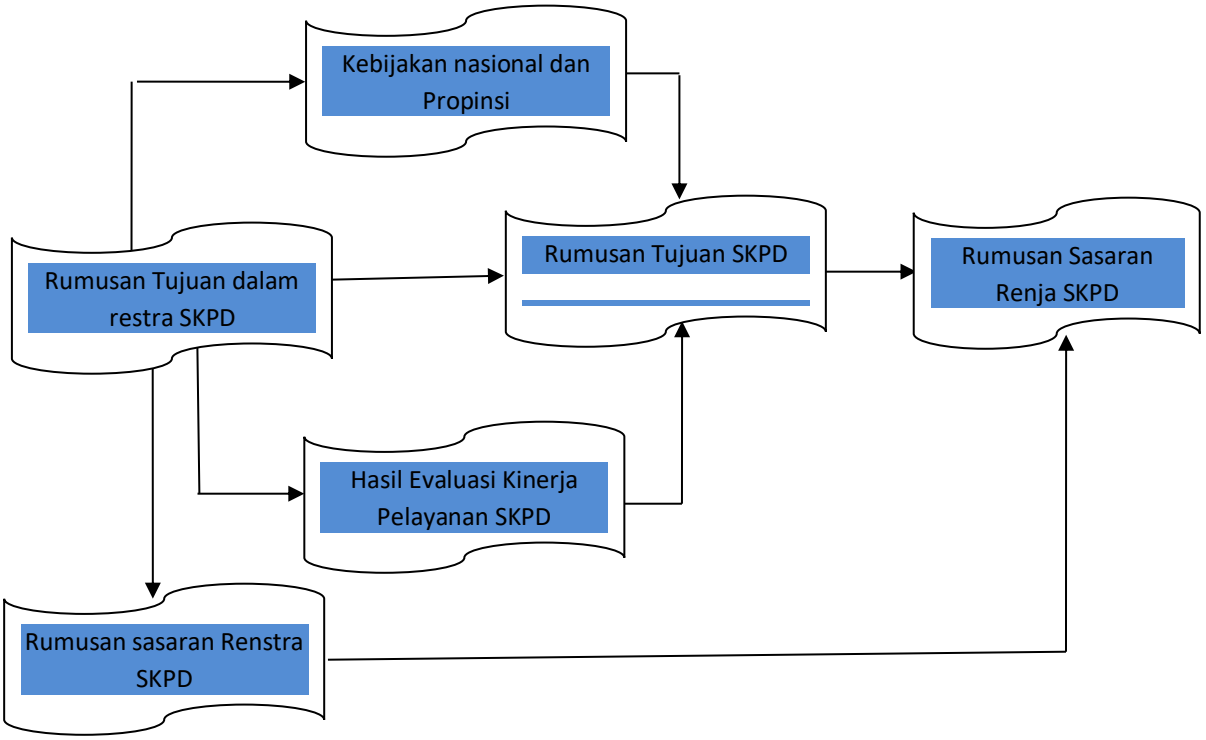

1.2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang – undang nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat
d. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
e. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
f. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;

g. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Barat;
m. Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021, tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintahan Daerah.
n. Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 84 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok, fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor kecamatan Gununghalu dimaksudkan sebagai pedoman dan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya, yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD.

1.3.2. Tujuan

Untuk mewujudkan serta meningkatkan sinergitas antar stake holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terhadap program dan penganggaran pelayanan masyarakat, secara terinci antara lain untuk :

1. Meningkatkan pelayanan, menentukan target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
2. Menyelaraskan siklus perencanaan lima tahunan (Renstra) SKPD dengan rencana tahunan SKPD.
3. Menyelaraskan perencanaan tahunan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Mengawal konsistensi kebijakan dan langkah program dan kegiatan SKPD dengan Renstra, RPJMD, sebagai acuan dalam mengimplemetasikan Visi dan misi Kepala Daerah

1.4. Sistem Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 , secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II, HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Gununghalu) Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1. Penjabaran Renca Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu

BAB IV, PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Gununghalu) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Salah satu cara untuk mengukur sejauhmana realisasi pelaksanaan Rencana kerja SKPD yang telah dilaksanakan, yakni dengan diadakannya evaluasi terhadap apa yang dilkasnakan, sejaumana capaian yang telah dicapai, apakah telah sesuai atau belum, dimana SKPD sudah merancang/merencakan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu, pada Tahun 2023 kegiatan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena adanya devisit anggaran sehingga mengakibatkan pergeseran anggaran dari kegiatan yang sudah direncakan kepada kegiatan yang diproritaskan itu merupakan dampak dari adanya Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021.

Secara rinci Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu dan Pencairan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahaan	100%					100%	1.298.785.585	45,91%
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	5 Keg					5 Keg	11.325.000	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	1.650.000	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	-	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	1.685.000	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Keg					1 Keg	-	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / Jumlah Kegiatan	3 Dokumen 4 Keg					3 Dok	-	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	13 ASN					13 ASN	1.143.510.735	44.63%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ S emesteran SKPD	Jumlah Dokumen / Jumlah Kegiatan	7 Dok					7 Dok	47.962.000	54.18

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%					100%		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27 Stel					27 Stel	4.455.000	100
7.01.01.2.05.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Kegiatan**	4 Keg					4 Keg	4.900.000	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%					100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis					6 Jenis	3.110.500	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis					3 Jenis	24.744.000	92.87
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis					7 Jenis	4.999.000	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan	12 Keg					12 Keg	25.151.200	77.15
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	16076 Lembar					16076 Lembar	4.622.700	82.16
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	12 Keg					12 Keg		

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua	1 unit					1 Unit		0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Kebersihan Kantor	100 %					100%		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	6 jenis					6 Jenis	12.557.000	58.25
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Asset Kantor**	**100 %**					**100%**		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Asset Kantor	6 unit					5 Unit	3.664.200	37.70
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor	2 Jenis					2 jenis	1.420.000	39.81
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	2 Unit					2 unit	3.029.250	100
7.01.02	**PROGRAM**	Persentase	100%					100 %	186.579.900	42.16

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan**	**100%**					**100%**		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan					5 Kegiatan	**44.945.000**	**26.18**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %					100%		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan	2 Jenis Pelayanan					2 Jenis Pelayanan		0
7.01.02.2.0	Peningkatan	Jumlah	2 Jenis					2 Jenis	112.658.900	53.75

2.03	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan	Pelayanan					Pelayanan		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2 Keg							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%					100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		2 Jenis							
	Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan		2 Jenis							

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan	3 Keg					3 Keg	28.976.000	47.30
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 %**					**100 %**	**649.967.550**	**50.99**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %					100 %		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan	2 keg					2 Keg	59.999.750	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Keg					4 Keg	56.167.800	42.36
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan						100%		
7.01.03.2.0	Peningkatan	Jumlah						12 Keg	65.200.000	45.39

3	Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan								
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**					**100 %**	**345.579.700**	**50.97**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	4 Keg							
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 keg							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananny a Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah	100%					100 %		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Kegiatan	243 orang					243 orang	345.579.700	50.97

	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**11 Desa**					**11 Desa**	**27.510.000**	**67.06**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%					100%		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	2 Keg							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan	4 Keg					4 Keg	14.000.000	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		2 Keg							
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Kegiatan								

	Permusyawaratan Desa									
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Keg							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu cara untuk mengukur sejauhmana realisasi pelaksanaan Rencana kerja SKPD yang telah dilaksanakan, yakni dengan diadakannya evaluasi terhadap apa yang dilkasnakan, sejaumana capaian yang telah dicapai, apakah telah sesuai atau belum, dimana SKPD sudah merancang/merencakan program dan kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan di skenariokan dalam Renja. Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas dasar dokumen di atas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan sumberdaya,(anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.

Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)

Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2025 dengan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu

Kabupaten Bandung Barat

No	Tujuan	Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan(SAKIP)	62 (B)	63 (B)	64 (BB)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemberdayaan Desa dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Merujuk kepada Peraturan Bupati Bandung Barat No. 84 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, bahwa Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Upaya Penanganan

1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan yang telah ada
2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
3) Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Rutin, *Continue* dan berkesinambungan disamping mengupayakan program *reward.*
4) Melaksanakan kegiatan pembinaan atau sosialisasi pelayanan kesehatan
5) Mengadakan siskamswakarsa dan pelatihan bagi anggota Linmas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oelh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait

prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp…..)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp…)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Gunung halu			**2.712.022.683**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kecamatan Gunung halu			**2.712.022.683**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	25.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.155.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	2.972.874.251	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	2.972.874.251	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	170.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3 Jenis	170.000.000	

	Administrai Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6 Layanan	174.237.295	Administrai Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6 Layanan	174.237.295	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN JASA PENUNJANG KEBUTUHAN KANTOR DALAM SATU TAHUN	1 Layanan	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH LAYANAN JASA PENUNJANG KEBUTUHAN KANTOR DALAM SATU TAHUN	1 Layanan	35.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK	2 jenis belanja modal	60.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kecamatan Gunung halu	JUMLAH ASSET KANTOR DALAM KEADAAN BAIK	2 jenis belanja modal	60.000.000	
	PROGRAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Gunung halu**	**JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**	**100%**	**330.000.000**	**PROGRAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Gunung halu**	**JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**	**100%**	**330.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	2 Dokumen	110.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	2 Dokumen	110.000.000	

	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	1 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	1 Laporan	150.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Laporan	70.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4 Laporan	70.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan Gunung halu	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	620.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan Gunung halu	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	100%	620.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	3 Keg	620.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gunung halu	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	3 Keg	620.000.000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gunung halu	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	**1.045.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Gunung halu	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERFASILITASI	100%	**1.045.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Gunung halu	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	12 Laporan	**45.000.000**	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Gunung halu	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	12 Laporan	**45.000.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Gunung halu	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	**1.000.000.000**	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Gunung halu	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	**1.000.000.000**	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gunung halu	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	**1.218.120.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Gunung halu	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERFASILITASI	100%	**1.218.120.000**	
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintah Desa	Kecamatan Gunung halu	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	**1.218.120.000**	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintah Desa	Kecamatan Gunung halu	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	**1.218.120.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Gununghalu untuk Usulan Prioritas Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024 belum dilaksanakan menunggu Jadwal dari Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah tentunya harus selaras dengan Rencana yang ditetapkan secara Nasional, dalam arti bahwa arah kebijakan Perangkat Daerah harus sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Awal Tahun 2020 Negara Indonesia mulai dilanda suatu wabah penyakit yakni dengan munculnya wabah Virus Covid 19 sehingga mau tidak mau klebijakan yang sudah dibuat diawal harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penanggulanan bencana pandemik covid19.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Ranhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mempermudah Pelayanan dan memperpendek rentang pelayanan Kepada Masyarakat;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, kapasitas dan kewenangan Kecamatan;
3. Meningkatkan Kualitas dan kapabilitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
4. Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan parasarana ;

3.2.2. Sasaran

Rencana kerja Perangkat daerah Kecamatan Gununghalu dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapai, didasarkan pada sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Membenahi prosedur , mekanisme dan sarana pelayanan masyarakat di Kecamatan ;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pelimpahan sebagaian Urusan Pemerintahan kepada Camat ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa melalui Pembinaan dan Pemahaman TUPOKSI masing-masing;
4. Melaksanakan inventarisasi dan analisa Kebutuhan Barang dan sarana lainnya ;
5. Merumuskan perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat secara efektif dan aspiratif ;

3.3. Program dan Kegiatan

Renca Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 di Kecamatan Gununghalu didasarkan atas beberapa factor, diantaranya :

Kecamatan merupakan bagian dari Subsistem Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan, sehinggan dalam pelaksanaannya mengacu pada misi ke- 4 (empat) Bupati Bandung Barat periode tahun 2024-2026

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2014 bahwa Kecamatan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan desa, oleh karenanya sesuai dengan tufoksi yang dijabarkan dalam kegiatan disetiap Kasi.

Jumlah Program yang akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019, yaitu sebanyak 5 (lima) Program yang terdiri dari :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu

Renca Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gununghalu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat digambarkan dalam bentuk table penjabaran Renja 2025 sebagai berikut :

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Gununghalu

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T 1	Jumlah											T 1
									Tahun											
									Sebelum					Setelah					Bertambah / Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Gununghalu**								Rp5.577.401.812,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.577.401.812,00	Rp5.550.788.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.550.788.165,00	(Rp26.613.647,00)	(0.48)		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp5.577.401.812,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.577.401.812,00	Rp5.550.788.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.550.788.165,00	(Rp26.613.647,00)	(0.48)		
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp5.577.401.812,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.577.401.812,00	Rp5.550.788.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.550.788.165,00	(Rp26.613.647,00)	(0.48)		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp3.021.353.512,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.021.353.512,00	Rp2.994.739.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.994.739.865,00	(Rp26.613.647,00)	(0.89)		
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp30.670.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.670.200,00	Rp30.670.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.670.200,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.959.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.959.000,00	Rp17.959.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.959.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.414.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.414.500,00	Rp1.414.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.414.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.444.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.500,00	Rp1.444.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.444.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.500,00	Rp1.444.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.444.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.500,00	Rp1.444.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.963.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.963.200,00	Rp6.963.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.963.200,00	Rp0,00	0.00		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp2.768.719.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.768.719.707,00	Rp2.742.106.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.742.106.060,00	(Rp26.613.647,00)	(0.97)		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.761.425.207,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.761.425.207,00	Rp2.734.811.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.734.811.560,00	(Rp26.613.647,00)	(0.97)		
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.974.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.974.500,00	Rp2.974.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.974.500,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00	0.00		
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp42.893.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.893.100,00	Rp42.893.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.893.100,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.057.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.100,00	Rp2.057.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.100,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.362.000,00	Rp2.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.362.000,00	Rp0,00	0.00		

Urusan		Program	Kegiatan					Jumlah

					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T 1	Tahun									Bertambah / Berkurang)		T 1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.062.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.062.800,00	Rp34.062.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.062.800,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.411.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.411.200,00	Rp4.411.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.411.200,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp149.070.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.070.505,00	Rp149.070.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.070.505,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.200.000,00	Rp26.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.200.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.870.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.870.505,00	Rp122.870.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.870.505,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp140.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.365.000,00	Rp140.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.365.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.160.000,00	Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.160.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.160.000,00	Rp22.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.160.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				Rp92.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.010.000,00	Rp92.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.010.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.010.000,00	Rp92.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.010.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				Rp26.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.195.000,00	Rp26.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.195.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.195.000,00	Rp26.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.195.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp238.988.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.988.300,00	Rp238.988.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.988.300,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp238.988.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.988.300,00	Rp238.988.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.988.300,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.900.000,00	Rp43.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.900.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp195.088.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.088.300,00	Rp195.088.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.088.300,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp802.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.320.000,00	Rp802.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.320.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				Rp802.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.320.000,00	Rp802.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.320.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp802.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.320.000,00	Rp802.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.320.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp1.374.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.374.375.000,00	Rp1.374.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.374.375.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp1.374.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.374.375.000,00	Rp1.374.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.374.375.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.750.000,00	Rp62.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.750.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.311.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.311.625.000,00	Rp1.311.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.311.625.000,00	Rp0,00	0.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
	Rp
Januari	Rp3.037.679.560,00
Februari	Rp241.391.201,00
Maret	Rp159.135.000,00
April	Rp385.272.805,00
Mei	Rp228.224.499,00
Juni	Rp235.469.538,00
Juli	Rp179.844.399,00
Agustus	Rp225.226.962,00
September	Rp167.620.000,00
Oktober	Rp282.912.800,00
November	Rp219.794.601,00
Desember	Rp188.216.800,00
Jumlah	**Rp5.550.788.165,00**

Ngamprah, Tanggal 08 Oktober 2024 CAMAT
GUNUNGHALU

Hari Mustika Jachja, S.Sos NIP.
197409101993031001

Mengesahkan, PPKD

H. Heru Budi Purnomo, S.Sos, M.si NIP.
197009011995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	DEWI NUR ANGGRAENI,S.STP., MM.	198104272000122001	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.	IRNO BHAKTI PUTRA, SE., M.E	198003102005011009	KEPALA BIDANG ANGGARAN
3.	REDY WIDIAWAN, ST	197912132009011012	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4.	FAHADILA FAHRUROZI REMI, S.T., M.T	198511042010011010	Plt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5.	DINI SETIAWATI, S.AP., MM.	196707101990032005	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
6.	M. IMAM YUDHA, ST, MM	198612092010011004	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
7.	M. NUR RAHMAN HAKIM, S.T., M.T	197909082005011007	KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
8.	ARI WIBISANA, S.IP	197801252003121001	KABID PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

*) Sesuai periodisasi SPD

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Renja Perubahan merupakan kunci utama dari suatu system akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kerja akan menjadi acuan dlam menjalankan Tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Gununghalu dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan focus perbaikan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan presepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai dengan yang direncanakan.

Kecamatan Gununghalu sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat akan berupaya se optimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Gununghalu yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gununghalu demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Renja Perubahan ini, Kecamatan Gununghalu telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada

Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang timbul.

Gununghalu, November 2024
CAMAT GUNUNGHALU

HARI MUSTIKA J, S.Sos
NIP.197409101993031001